RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

RPJMD

KABUPATEN NIAS SELATAN
TAHUN 2025–2029

SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN

Nomor : 2 **SERI : D**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);

SALINAN

21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 76);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2014 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN
dan
BUPATI NIAS SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Nias Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada Rencana Jangka Panjang Daerah dan RPJM Nasional terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Tujuan adalah penjabaran atau implementasi pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang.
15. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menetapkan dokumen RPJM Daerah sebagai dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang menjadi landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan.
(2) Peraturan Daerah ini bertujuan agar dokumen RPJM Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

(1) RPJM Daerah disusun dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional.
(2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

SALINAN

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 4

(1) Sistematika RPJM Daerah meliputi :
   a. BAB I : PENDAHULUAN;
   b. BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH;
   c. BAB III : VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
   d. BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; dan
   e. BAB V : PENUTUP.

(2) Ketentuan mengenai isi dan uraian dari sistematika RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah.

(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan :
   a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil perencanaan Pembangunan Daerah;
   b. konsistensi antara RPJM Daerah dengan RPJP Daerah;
   c. konsistensi antara RKPD dengan RPJM Daerah; dan
   d. kesesuaian antara capaian Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

(3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan Pembangunan Daerah;
   b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah; dan
   c. evaluasi terhadap hasil rencana Pembangunan Daerah.

(4) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

SALINAN

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 9 Oktober 2025

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

SOKHIATULO LAIA

Diundangkan di Teluk Dalam
Pada tanggal 9 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN,

ttd

IKHTIAR DUHA
Pembina Utama Madya
NIP. 19660412 199203 1 022

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 2
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN, PROVINSI SUMATERA UTARA : (3-123/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. NIAS SELATAN,

ANTON NIUS TELAUMBANUA, SH
NIP. 19820403 200903 1 007

SALINAN

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025–2029

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pendapatan, penciptaan kesempatan kerja dan lapangan usaha, peningkatan akses serta kualitas pelayanan publik, dan penguatan daya saing daerah, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun. Penyusunan RPJMD ini merupakan amanat Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa RPJMD merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan kewenangan daerah dalam kerangka sistem perencanaan pembangunan nasional.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang dilengkapi dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun. Penyusunan dokumen ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025–2045 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, sehingga terjamin kesinambungan pembangunan antarperiode kepemimpinan daerah.

RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025–2029 disusun untuk mendukung arah pembangunan daerah selama periode pemerintahan kepala daerah hasil pemilihan tahun 2024. Selain sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, RPJMD juga menjadi pedoman utama dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), yang seluruhnya merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang meliputi jangka panjang, menengah, dan tahunan.

Tujuan utama penyusunan RPJMD ini adalah untuk menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah ke dalam arah kebijakan pembangunan lima tahunan yang terukur dan terarah; menjamin terciptanya keterpaduan, keselarasan, dan sinergi pembangunan antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat; menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun dokumen teknis sektoral dan tahunan; serta mengarahkan pemanfaatan sumber daya daerah secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025–2029 dirumuskan secara partisipatif bersama para pemangku kepentingan pembangunan daerah dan menjadi dasar penyusunan misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah. Visi yang diusung dalam RPJMD ini adalah: "Mewujudkan Masyarakat Adil Makmur, Berdaya Saing, Inovatif, Berkelanjutan, dan Lestari Berkeadaban." Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan seluruh perangkat daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat dapat bersinergi dan berperan aktif dalam mewujudkan visi pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk Kabupaten Nias Selatan lima tahun ke depan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

DAFTAR ISI

Daftar Isi i
Daftar Gambar vi
Daftar Tabel vii
Daftar Grafik x
Bab I Pendahuluan 1
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen I-6
1.3.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nias Selatan 2025-2045 ..... I-7
1.3.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 ..... I-7
1.3.3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara 2025-2029 ..... I-7
1.3.4. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nias Selatan I-7
1.3.5. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) I-7
1.3.6. Dokumen Kebijakan Penganggaran (RKPD, KUA-PPAS, APBD) I-8
1.3.7. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) I-8
1.3.8. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals - SDGs) I-8
1.4. Maksud dan Tujuan I-9
1.5. Sistematika Penulisan I-10
BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi II-1
2.1.1 Posisi dan Peran Strategis II-1
2.1.2 Potensi Sumber Daya Alam II-4
2.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup II-5
2.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan II-8
2.1.4.1 Indeks Ketahanan Pangan II-9
2.1.4.2 Prevelensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan II-9
2.1.4.3 Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum II-10
2.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas II-11
2.1.5.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup II-11
2.1.5.2 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak II-12
2.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim II-13
2.1.6.1 Indeks Risiko Bencana II-14
2.1.7 Demografi II-14
2.1.7.1 Laju Pertumbuhan Penduduk, Rasio Penduduk, Kepadatan Penduduk II-15
2.1.7.2 Analisis dan Proyeksi Penduduk II-17
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-18
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi II-19
2.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi II-19
2.2.1.2 Tingkat Kemiskinan II-21
2.2.1.3 PDRB per Kapita II-22
2.2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka II-23

2.2.1.5 Indeks Gini II-24
2.2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia II-25
2.2.2 Kesehatan Untuk Semua II-26
2.2.2.1 Indeks Kesehatan II-26
2.2.2.2 Usia Harapan Hidup (UHH) II-27
2.2.2.3 Prevalensi Stunting II-28
2.2.2.4 Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) II-29
2.2.2.5 Angka Tuberkulosis (TBC) II-30
2.2.2.6 Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) II-31
2.2.2.7 Fasilitas Kesehatan II-32
2.2.2.8 Ketersediaan Dokter dan Tenaga Kesehatan II-33
2.2.3 Pendidikan Kualitas yang Merata II-33
2.2.3.1 Indeks Pendidikan II-33
2.2.3.2 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) II-34
2.2.3.3 Harapan Lama Sekolah (HLS) II-35
2.2.3.4 Angka Partisipasi Kasar (APK) II-36
2.2.3.5 Angka Partisipasi Murni (APM) II-36
2.2.3.6 Angka Literasi dan Numerasi II-37
2.2.3.7 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat II-38
2.2.4 Pelindungan Sosial Yang Adaptif II-39
2.2.4.1 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja II-39
2.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju II-40
2.2.5.1 Indeks Kerukunan Umat Beragama II-40
2.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif II-41
2.2.6.1 Indeks Perlindungan Anak II-41
2.2.6.2 Indeks Pembangunan Gender II-42
2.2.6.3 Indeks Pemberdayaan Gender II-43
2.2.6.4 Indeks Ketimpangan Gender II-43
2.3 Aspek Daya Saing Daerah II-44
2.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia II-44
2.3.1.1 Rasio Ketergantungan II-44
2.3.2 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi II-45
2.3.2.1 Rasio PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan II-46
2.3.2.2 Rasio PDRB Industri Pengolahan II-46
2.3.2.3 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum II-47
2.3.2.4 Rasio Kewirausahaan II-48
2.3.2.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja II-49
2.3.2.6 Indeks Inovasi Daerah II-50
2.3.3 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global II-51
2.3.3.1 Pembentukan Modal Tetap Bruto II-52
2.3.3.2 Ekspor Barang dan Jasa II-52
2.3.4 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi .. II-53
2.3.4.1 Indeks Infrastruktur II-54
2.3.4.2 Rumah Layak Huni II-55
2.3.4.3 Persentase Desa Mandiri II-56

2.3.5 Stabilitas Ekonomi Makro II-57
2.3.5.1 Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB II-58
2.3.5.2 Tingkat Inflasi II-59
2.4 Aspek Pelayanan Umum II-60
2.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif II-60
2.4.1.1 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) .. II-60
2.4.1.2 Indeks Pelayanan Publik II-61
2.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substantial II-62
2.4.2.1 Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang Ditangani II-62
2.4.2.2 Proporsi Penduduk Merasa Aman Berjalan Sendirian Di Area Tempat Tinggalnya II-63
2.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan II-64
2.4.3.1 Indeks Daya Saing Daerah II-64
2.4.4 Kinerja Setiap Daerah II-66
2.4.4.1 Indikator Kinerja Kunci II-66
2.4.4.2 Standar Pelayanan Minimal (SPM) II-77
2.4.4.2.1 Urusan Pendidikan II-77
2.4.4.2.2 Urusan Kesehatan II-78
2.4.4.2.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .. II-79
2.4.4.2.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman II-80
2.4.4.2.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat II-81
2.4.4.2.6 Urusan Sosial II-82
2.4.4.3 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) II-83
2.5 Gambaran Keuangan Daerah II-88
2.5.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun 2020-2024 ..... II-88
2.5.1.1 Pendapatan Daerah II-92
2.5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah II-93
2.5.1.1.2 Pendapatan Transfer II-94
2.5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah II-95
2.5.1.2 Belanja Daerah II-98
2.5.1.2.1 Belanja Operasi II-99
2.5.1.2.2 Belanja Modal II-100
2.5.1.2.3 Belanja Tak Terduga II-100
2.5.1.2.4 Belanja Transfer II-102
2.5.1.3 Pembiayaan Daerah II-105
2.5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan II-105
2.5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan II-105
2.5.2 Neraca Daerah II-108
2.5.3 Kerangka Pendanaan II-111
2.5.3.1 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan II-111
2.5.3.1.1 Pendapatan Daerah II-113
2.5.3.1.1.1 Proyeksi Pendapatan Daerah

Tahun 2026-2030 ..... II-113
2.5.3.1.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pendapatan Daerah 2026-2030 ..... II-115
2.5.3.1.2 Belanja Daerah II-117
2.5.3.1.2.1 Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2026-2030 .. II-117
2.5.3.1.2.2 Arah Kebijakan dan Strategi Belanja Daerah 2026-2030 ..... II-119
2.5.3.1.3 Proyeksi Pembiayaan II-121
2.5.4 Perhitungan Kerangka Pendanaan II-123
2.5.4.1 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah .. II-124
2.5.4.2 Kebijakan Alokasi Anggaran II-125
2.6 Permasalahan dan Isu Strategis II-126
2.6.1 Permasalahan Pembangunan Daerah II-126
2.6.2 Isu Strategis II-145
2.6.2.1 Isu Global II-145
2.6.2.2 Isu Strategis Nasional II-148
2.6.2.3 Isu Strategis Sumatera Utara II-152
2.6.2.4 Isu Strategis Nias Selatan II-159
BAB III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah III-1
3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran III-1
3.1.1 Visi dan Misi III-1
3.1.1.1 Visi III-2
3.1.1.1.1 Keterkaitan Visi dan Misi dengan Nasional/Provinsi III-3
3.1.1.2 Misi III-4
3.1.2 Tujuan dan Sasaran III-4
3.1.2.1 Penyelarasan Sasaran Pembangunan RPJMD Kabupaten Nias Selatan Dengan Sasaran Pembangunan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara III-11
3.1.2.2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran RPJMD dengan Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan RPJPD III-11
3.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah .. III-14
3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah III-14
3.2.2 Penahapan Pembangunan RPJMD III-27
3.2.3 Program-Program Prioritas Daerah III-31
3.2.3.1 Misi 1 “Membangun dan mengembangkan infrastruktur daerah yang terpadu dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat” III-32
3.2.3.2 Misi 2 “Membangun manusia yang berkualitas dan berkepribadian unggul melalui pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia siap kerja dan siap merintis usaha sendiri” III-38
3.2.3.3 Misi 3 “Memastikan Kemudahan Akses Kesehatan Untuk Rakyat Guna Menciptakan Manusia Yang Sehat Jasmani dan Rohani” III-42

3.2.3.4 Misi 4 “Membangun ekonomi daerah yang berkeadilan, inklusif, inovatif, kreatif, dan mandiri berbasis potensi sumber daya lokal” III-47
3.2.3.5 Misi 5 “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan bebas dari korupsi dengan menjunjung tinggi penegakan hukum dan menjamin hak-hak masyarakat” III-54
3.2.3.6 Misi 6 “Mewujudkan ketahanan sosial budaya yang berkeadaban dan pelestarian lingkungan hidup” III-57
BAB IV Program Perangkat Daerah Dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah IV-1
4.1 Program Perangkat Daerah IV-1
4.1.1 Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Dalam Mencapai Kinerja Pembangunan Daerah..... IV-1
4.1.2 Indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ..... IV-4
4.1.3 Dukungan Program terhadap PHTC dan 17 Program Prioritas RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 ..... IV-85
4.1.4 Sandingan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Astacita, 17 Program Prioritas Nasional IV-166
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah IV-193
4.2.1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Nias Selatan IV-193
4.2.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) . IV-199
4.2.3 Penyelarasan Indikator Kinerja Utama Pembangunan RPJMD Kabupaten Nias Selatan dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026..... IV-231
BAB V Penutup V-1
5.1 Kaidah Pelaksanaan..... V-1
5.1.1 Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan V-2
5.1.1.1 Keterkaitan RPJMD dengan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Pusat V-2
5.1.1.2 Skema Pendanaan dan Penganggaran..... V-4
5.1.1.3
5.1.2 Kerangka Pengendalian..... V-5
5.1.3 Sistem Insentif..... V-11
5.1.4 Mekanisme Perubahan..... V-12
5.1.5 Komunikasi Publik..... V-13
5.2 Pembiayaan Pembangunan V-14
5.3 Kesimpulan..... V-15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur Keterhubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah I-6
Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Nias Selatan II-2
Gambar 5.1 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan V-3
Gambar 5.2 Kerangka Kerja MRPN V-6
Gambar 5.3 Tahapan Manajemen Risiko untuk Mencapai Target RPJMD V-7

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk, Laju pertumbuhan penduduk, Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan, 2024 ..... II-16
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Nias Selatan, 2024 ..... II-17
Tabel 2.3 Proyeksi Penduduk Kabupaten Nias Selatan Berdasarkan Klasifikasi Umur, 2025-2029 (Ribu Jiwa) II-17
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024 ..... II-21
Tabel 2.5 PDRB per Kapita Kabupaten Nias Selatan ADHB dan ADHK 2010, 2020-2021 (Ribu Rupiah) II-23
Tabel 2.6 Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024 ..... II-30
Tabel 2.7 Cakupan Penanggulangan Tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024 ..... II-31
Tabel 2.8 Rasio Fasilitas Kesehatan terhadap 1.000 penduduk Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024 ..... II-32
Tabel 2.9 Jumlah Dokter dan Tenaga Kesehatan terhadap 1.000 penduduk Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024 ..... II-33
Tabel 2.10 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024 ..... II-36
Tabel 2.11 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024 ..... II-37
Tabel 2.12 Angka Literasi dan Numerasi Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024 ..... II-38
Tabel 2.13 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024 ..... II-39
Tabel 2.14 Capaian Kinerja Komponen Indeks Infrastruktur Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024 ..... II-54
Tabel 2.15 Rasio Rumah Layak Huni di Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024 ..... II-55
Tabel 2.16 Status Desa di Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024 ..... II-57
Tabel 2.17 Capaian Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024 ..... II-67
Tabel 2.18 Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan di Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024 ..... II-77
Tabel 2.19 Realisasi Pencapaian SPM Urusan Kesehatan di Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024 ..... II-78
Tabel 2.20 Realisasi Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024 ..... II-80
Tabel 2.21 Realisasi Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024 ..... II-80
Tabel 2.22 Realisasi Pencapaian SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024 ..... II-81
Tabel 2.23 Realisasi Pencapaian SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024 ... II-83

Tabel 2.24 Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Nias Selatan II-84
Tabel 2.25 Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Berdasarkan OPD di Kabupaten Nias Selatan II-86
Tabel 2.26 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Penerimaan Pembiayaan, dan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020-2024 ..... II-90
Tabel 2.27 Realisasi APBD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020-2024 ..... II-91
Tabel 2.28 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020–2024 ..... II-97
Tabel 2.29 Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Periode 2020-2024 ..... II-104
Tabel 2.30 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020-2024 ..... II-107
Tabel 2.31 Neraca Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020-2024 ..... II-109
Tabel 2.32 Proyeksi Kerangka Pendanaan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2026-2030 ..... II-112
Tabel 2.33 Proyeksi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2026-2030 ..... II-114
Tabel 2.34 Proyeksi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2026-2036 ..... II-118
Tabel 2.35 Proyeksi Anggaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2026-2030 ..... II-122
Tabel 2.36 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2026-2030 ..... II-124
Tabel 2.37 Prioritas Kerangka Pendanaan Pengeluaran Jangka Menengah 2026-2030 ..... II-125
Tabel 2.38 Pohon Masalah, Akar Masalah dan Permasalahan Pokok Dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029 ..... II-144
Tabel 3.1 Keterkaitan visi RPJPD dan RPJMD Kabupaten Nias Selatan dengan Visi Pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Utara III-3
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029 ..... III-5
Tabel 3.3 Penyelarasan Sasaran Pembangunan RPJMD Kabupaten Nias Selatan Dengan Sasaran Pembangunan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara III-11
Tabel 3.4 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran RPJMD dengan Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan RPJPD III-12
Tabel 3.5 Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029 ..... III-23
Tabel 3.6 Penahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029 ..... III-28
Tabel 3.7 Kegiatan Strategis Misi 1 “Membangun dan mengembangkan infrastruktur daerah yang terpadu dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat” III-34
Tabel 3.8 Kegiatan Strategis Misi 2 “Membangun manusia yang berkualitas dan berkepribadian unggul melalui pendidikan untuk menciptakan

sumber daya manusia siap kerja dan siap merintis usaha sendiri" III-40
Tabel 3.9 Kegiatan Strategis Misi 3 "Memastikan Kemudahan Akses Kesehatan Untuk Rakyat Guna Menciptakan Manusia Yang Sehat Jasmani dan Rohani" III-44
Tabel 3.10 Kegiatan Strategis Misi 4 "Membangun ekonomi daerah yang berkeadilan, inklusif, inovatif, kreatif, dan mandiri berbasis potensi sumber daya lokal" III-49
Tabel 3.11 Kegiatan Strategis Misi 5 "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan bebas dari korupsi dengan menjunjung tinggi penegakan hukum dan menjamin hak-hak masyarakat" III-55
Tabel 3.12 Kegiatan Strategis Misi 6 "Mewujudkan ketahanan sosial budaya yang berkeadaban dan pelestarian lingkungan hidup" III-59
Tabel 3.13 Program Prioritas RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029.... III-64
Tabel 4.1 Pagu Indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2026-2030 ..... IV-5
Tabel 4.2 Program Perangkat Daerah IV-8
Tabel 4.3 Dukungan Program Daerah terhadap Kegiatan Utama dalam RPJMN 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 ..... IV-85
Tabel 4.4 Dukungan Program Daerah terhadap 6 (enam) PHTC RPJMD Provinsi Sumatera Utara Pelaksanaan Tahun 2025-2029..... IV-86
Tabel 4.5 Dukungan Program Daerah terhadap 17 (Tujuh belas) Program Prioritas RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029..... IV-87
Tabel 4.6 Dukungan terhadap 6 (enam) PHTC Provinsi Sumatera Utara pelaksanaan Tahun 2025-2030..... IV-92
Tabel 4.7 Dukungan Terhadap Program Prioritas/Proyeksi Strategis Daerah (PSD) RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2030 ..... IV-101
Tabel 4.8 Sandingan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Astacita, 17 Program Prioritas Nasional IV-167
Tabel 4.9 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Nias Selatan IV-195
Tabel 4.10 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Nias Selatan IV-200
Tabel 4.11 Penyelarasan Indikator Kinerja Utama Pembangunan RPJMD Kabupaten Nias Selatan dengan Sasaran Pembangunan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara IV-232

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024 ..... II-9
Grafik 2.2 Prevelensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024 ..... II-10
Grafik 2.3 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses pada Air Minum Layak di Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024 ..... II-11
Grafik 2.4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024 ..... II-12
Grafik 2.5 Akses Rumah Tangga Terhadap Sanitasi Layak Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024 ..... II-13
Grafik 2.6 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024 ..... II-14
Grafik 2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024 ..... II-20
Grafik 2.8 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024 ..... II-20
Grafik 2.9 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024 ..... II-23
Grafik 2.10 Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024 ..... II-24
Grafik 2.11 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024 ..... II-25
Grafik 2.12 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Nias Selatan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional, 2020-2024 ..... II-26
Grafik 2.13 Indeks Kesehatan Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024 ..... II-27
Grafik 2.14 Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup di Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024 ..... II-28
Grafik 2.15 Prevalensi Stunting Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024 ..... II-29
Grafik 2.16 Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024 ..... II-31
Grafik 2.17 Indeks Pendidikan Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024 ..... II-34
Grafik 2.18 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024 ..... II-35
Grafik 2.19 Perkembangan Tingkat Harapan Lama Sekolah Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024 ..... II-36
Grafik 2.20 Perkembangan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024 ..... II-38
Grafik 2.21 Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024 ..... II-41
Grafik 2.22 Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024 ..... II-42
Grafik 2.23 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024 ..... II-42
Grafik 2.24 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024 ..... II-43
Grafik 2.25 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024 ..... II-44
Grafik 2.26 Rasio Ketergantungan Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024 ..... II-45
Grafik 2.27 Rasio PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024 ..... II-46
Grafik 2.28 Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024 ..... II-47
Grafik 2.29 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024 ..... II-48

Grafik 2.30 Rasio Kewirausahawan Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024 ..... II-49
Grafik 2.31 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024 ..... II-50
Grafik 2.32 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024..... II-51
Grafik 2.33 Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024 (Persen PDRB II-52
Grafik 2.34 Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024 ..... II-53
Grafik 2.35 Indeks Infrastruktur Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024 ..... II-55
Grafik 2.36 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB di Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024 ..... II-58
Grafik 2.37 Tingkat Inflasi Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024 ..... II-59
Grafik 2.38 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024..... II-61
Grafik 2.39 Indeks Pelayanan Publik di Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024 ..... II-62
Grafik 2.40 Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang Ditangani Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024 ..... II-63
Grafik 2.41 Proporsi Penduduk Merasa Aman Berjalan Sendirian Di Area Tempat Tinggalnya di Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024 ..... II-64
Grafik 2.42 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024 ..... II-65
Grafik 2.43 Indeks Daya Saing Daerah Berdasarkan Nilai Pilar Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024 ..... II-65
Grafik 2.44 Diagram Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Nias Selatan II-85
Grafik 2.45 Diagram Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) BerdasarkanOPD di Kabupaten Nias Selatan II-87
Grafik 2.46 Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020-2024 (dalam milyar rupiah)..... II-92
Grafik 2.47 Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020-2024 Berdasarkan Komponen Pendapatan (dalam milyar rupiah)..... II-93
Grafik 2.48 Persentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2024 Berdasarkan Komponen Pendapatan II-93
Grafik 2.49 Pertumbuhan Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020-2024 (dalam juta rupiah) II-94
Grafik 2.50 Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2024 ..... II-94
Grafik 2.51 Pertumbuhan Komponen Pendapatan Transfer Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020-2024 (dalam milyar rupiah) II-95
Grafik 2.52 Persentase Pertumbuhan Pendapatan Transfer Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2024..... II-95
Grafik 2.53 Pertumbuhan Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020-2024 (dalam milyar rupiah)..... II-96
Grafik 2.54 Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020-2024 (dalam milyar rupiah)..... II-98
Grafik 2.55 Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020-2024 Berdasarkan Komponen Belanja

(dalam milyar rupiah) II-99
Grafik 2.56 Persentase Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2024 Berdasarkan Komponen Belanja II-99
Grafik 2.57 Pertumbuhan Komponen Belanja Operasi Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020-2024 (dalam milyar rupiah) II-100
Grafik 2.58 Persentase Pertumbuhan Belanja Operasi Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2024 ..... II-101
Grafik 2.59 Persentase Pertumbuhan Belanja Modal Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2024 ..... II-101
Grafik 2.60 Persentase Pertumbuhan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2024 ..... II-102
Grafik 2.61 Pertumbuhan Komponen Belanja Transfer Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020-2024 Berdasarkan Komponen Belanja (dalam milyar rupiah) II-102
Grafik 2.62 Persentase Pertumbuhan Belanja Transfer Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2024 ..... II-103

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

RPJMD

KABUPATEN NIAS SELATAN
TAHUN 2025–2029

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun sebagai penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih untuk lima tahun ke depan. Penyusunan RPJMD ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan berbagai aspek strategis guna mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, berdaya saing, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Dasar hukum penyusunan RPJMD mencakup Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang mengatur bahwa perencanaan pembangunan harus dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu, dan berkelanjutan; serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mewajibkan daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan, termasuk RPJMD sebagai dokumen jangka menengah. Selain itu, penyusunan ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi dan Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Sejalan dengan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Masa Jabatan 2025–2030 pada tanggal 20 Februari 2025 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3–1719 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, penyusunan RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025–2029 menjadi langkah strategis dalam menetapkan arah pembangunan lima tahun ke depan.

Sebagai dokumen strategis, RPJMD ini menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Penyusunannya dilandasi oleh evaluasi capaian RPJMD periode sebelumnya (2021–2026), analisis terhadap kondisi eksisting daerah, serta identifikasi

terhadap berbagai tantangan dan peluang pembangunan di tingkat lokal, nasional, dan global. RPJMD ini juga merupakan operasionalisasi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025–2045, serta mengintegrasikan berbagai agenda pembangunan nasional dan provinsi, seperti RPJMN 2025–2029, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara.

Kabupaten Nias Selatan memiliki karakteristik geografis dan sosial-ekonomi yang unik, serta potensi besar di sektor pariwisata, perikanan, dan pertanian. Namun, masih dihadapkan pada berbagai tantangan strategis, seperti keterbatasan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan daya saing daerah. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD 2025–2029 dilakukan secara berbasis data dan analisis yang komprehensif, serta melibatkan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan keselarasan dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan nasional.

Tantangan yang dihadapi Kabupaten Nias Selatan bersifat kompleks dan multidimensi. Dari aspek sosial, tingkat kemiskinan masih relatif tinggi dibandingkan rata-rata provinsi, sementara akses dan kualitas layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, terutama di wilayah terpencil dan kepulauan, masih belum merata. Tingkat partisipasi pendidikan pada jenjang menengah dan perguruan tinggi masih rendah, serta terdapat masalah serius seperti gizi buruk dan stunting yang memerlukan penanganan lintas sektor.

Dari sisi ekonomi, struktur perekonomian masih didominasi sektor primer seperti pertanian dan perikanan tradisional yang bernilai tambah rendah. Tingginya tingkat pengangguran terbuka, terbatasnya lapangan kerja formal, serta rendahnya kapasitas kewirausahaan dan pengembangan UMKM menjadi hambatan dalam mewujudkan perekonomian lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

Di bidang infrastruktur, keterbatasan aksesibilitas antarwilayah masih menjadi kendala utama, terutama karena belum optimalnya jaringan jalan dan jembatan. Layanan dasar seperti listrik, air bersih, dan sanitasi juga belum menjangkau seluruh desa secara memadai.

Pada aspek lingkungan hidup, kerusakan akibat alih fungsi lahan, degradasi kawasan pesisir, dan minimnya pengelolaan sampah menjadi perhatian serius. Upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim masih

belum optimal, padahal Kabupaten Nias Selatan memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap bencana alam seperti tanah longsor, banjir, dan gempa bumi.

Dari sisi daya saing daerah, indeks daya saing masih tergolong rendah, antara lain karena kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, minimnya investasi swasta, serta belum optimalnya pengembangan potensi unggulan seperti pariwisata berbasis budaya dan alam. Konektivitas fisik dan digital antarwilayah juga masih menjadi tantangan utama.

Sementara itu, dari aspek tata kelola pemerintahan, masih terdapat hambatan dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Kapasitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja serta integrasi sistem informasi pembangunan daerah masih perlu ditingkatkan. Pelayanan publik pun belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain itu, sejumlah isu strategis lain yang memerlukan perhatian khusus meliputi ketimpangan pembangunan antarwilayah kepulauan, arus urbanisasi yang tidak tertata, potensi konflik sosial akibat sengketa lahan dan batas wilayah, serta rendahnya literasi digital dan keuangan masyarakat.

Keseluruhan tantangan tersebut menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan lima tahun ke depan yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025–2029. Dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Nias Selatan 2025–2045, RPJMN 2025–2029, SDGs, dan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara, RPJMD ini diharapkan menjadi dokumen yang tidak hanya visioner, tetapi juga implementatif dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah secara efektif dan berkelanjutan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029.

Adapun dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);

10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 76);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2014 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 Nomor 1);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang harus selaras dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik pada tingkat nasional, provinsi, maupun daerah. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Gambar 1.1
Alur Keterhubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

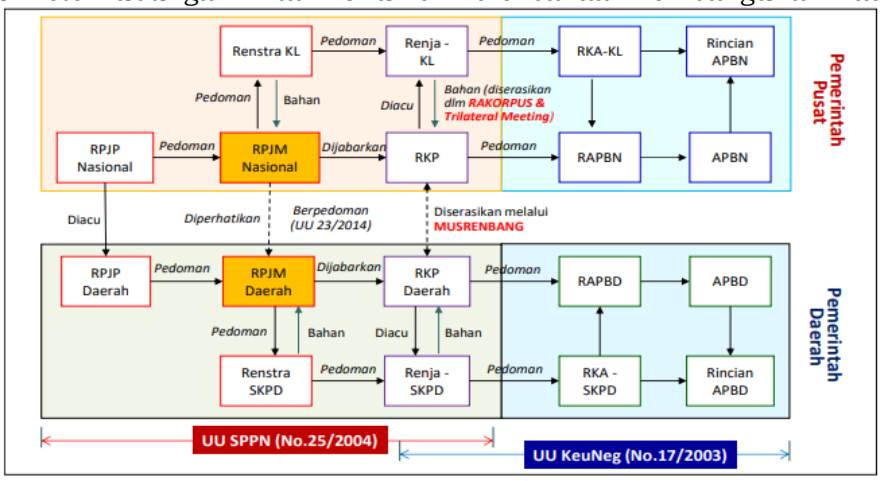

1.3.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nias Selatan 2025-2045

RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029 merupakan tahap pertama dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Nias Selatan 2025-2045. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD ini harus tetap berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan, serta mengacu pada evaluasi capaian pembangunan sebelumnya untuk memastikan kesinambungan arah pembangunan daerah.

1.3.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029

Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional, RPJMD Kabupaten Nias Selatan 2025-2029 harus sejalan dengan RPJMN 2025-2029. RPJMN menjadi acuan utama dalam menetapkan prioritas pembangunan daerah, terutama dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang mencakup pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penguatan daya saing daerah.

1.3.3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara 2025-2029

RPJMD Kabupaten Nias Selatan juga harus memperhatikan RPJMD Provinsi Sumatera Utara agar program-program pembangunan di tingkat kabupaten dapat terintegrasi dengan kebijakan pembangunan provinsi. Hal ini penting untuk memastikan adanya sinergi antara program pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah provinsi, terutama dalam bidang yang menjadi prioritas regional seperti infrastruktur, konektivitas wilayah, dan pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.

1.3.4. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nias Selatan

RPJMD harus selaras dengan RTRW Kabupaten Nias Selatan guna memastikan bahwa perencanaan pembangunan dilakukan sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan. Keselarasan ini penting agar pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan dan tidak menimbulkan konflik dalam pemanfaatan lahan.

1.3.5. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)

RPJMD menjadi pedoman utama bagi perangkat daerah dalam menyusun

Rencana Strategis (Renstra) masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Renstra PD harus mengacu pada visi, misi, dan program strategis yang tertuang dalam RPJMD sehingga seluruh perangkat daerah memiliki kesamaan arah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan daerah.

1.3.6. Dokumen Kebijakan Penganggaran (RKPD, KUA-PPAS, APBD)

RPJMD menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun, yang kemudian diterjemahkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian, program dan kegiatan yang direncanakan dalam RPJMD dapat diimplementasikan secara efektif melalui penganggaran yang tepat dan berkelanjutan.

1.3.7. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan salah satu dokumen yang ditelaah dalam penyusunan RPJMD. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi, dan/atau kompensasi program dan kegiatan

1.3.8. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals - SDGs)

RPJMD juga harus memperhatikan dan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang telah ditetapkan dalam agenda global. Program pembangunan daerah harus mengakomodasi aspek pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang guna memastikan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Nias Selatan 2025-2029 dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya diharapkan dapat membuat perencanaan pembangunan daerah berjalan secara sistematis, terpadu, dan berkelanjutan. Keselarasan ini juga penting untuk memastikan efektivitas kebijakan pembangunan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik di tingkat daerah, provinsi, maupun nasional

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima tahun yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Nias Selatan. Penyusunan dokumen ini mengacu pada visi dan misi kepala daerah terpilih serta diselaraskan dengan dokumen perencanaan di tingkat nasional dan provinsi. Hal ini bertujuan untuk memastikan keselarasan, kesinambungan, serta efektivitas pembangunan daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Secara khusus, penyusunan RPJMD ini bertujuan untuk:

a. Menjabarkan Visi dan Misi Kepala Daerah

   RPJMD berfungsi sebagai instrumen utama dalam menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah selama lima tahun.

b. Menyediakan Pedoman Pembangunan Daerah

   Dokumen ini menjadi rujukan bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, sehingga kebijakan pembangunan daerah dapat terlaksana secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.

c. Mewujudkan Sinergi dan Keselarasan Perencanaan

   RPJMD disusun dengan mempertimbangkan keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), guna mewujudkan pembangunan yang sinergis dan berkelanjutan.

d. Menjadi Instrumen Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan

   RPJMD memuat indikator kinerja yang menjadi acuan dalam mengukur keberhasilan penyelenggaraan pembangunan daerah. Dengan adanya indikator kinerja yang jelas, pelaksanaan pembangunan dapat dievaluasi dan dikendalikan agar tetap sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

e. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

   Pada akhirnya, RPJMD bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nias Selatan melalui pembangunan yang inklusif,

berdaya saing, inovatif, berkelanjutan, dan berbasis pada potensi lokal, dengan tetap memperhatikan aspek keadilan sosial dan kelestarian lingkungan.

Dengan adanya RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029, diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan secara sistematis, terarah, dan mampu menjawab berbagai tantangan serta kebutuhan masyarakat menuju pencapaian visi pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

1.5. Sistematika Penulisan

RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029 terdiri atas lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang penyusunan RPJMD, maksud dan tujuan penyusunannya, dasar hukum yang digunakan, hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, serta sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini memuat gambaran umum Kabupaten Nias Selatan yang mencakup aspek geografis dan demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, serta pelayanan umum. Selain itu, bab ini juga menguraikan kondisi keuangan daerah, termasuk realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Tahun Anggaran 2020-2024 serta proyeksi keuangan daerah untuk Tahun Anggaran 2025-2029. Permasalahan utama yang dihadapi Kabupaten Nias Selatan, beserta isu-isu strategis pembangunan, juga dibahas secara komprehensif dalam bab ini.

Bab III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Bab ini menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih sebagai arah utama pembangunan Kabupaten Nias Selatan dalam lima tahun ke depan. Selain itu, tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan sebagai indikator pencapaian visi dan misi daerah. Bab ini juga menguraikan strategi yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, serta arah kebijakan yang menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan

pembangunan. Selain itu, program prioritas pembangunan daerah juga diuraikan dalam bab ini.

Bab IV Program Perangkat Daerah Dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Bab ini menguraikan program perangkat daerah, termasuk indikator program, target, dan pagu indikatif program perangkat daerah tahun 2025–2029. Selain itu, bab ini juga membahas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator kinerja utama serta Indikator Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD).

Bab V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan harapan terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029 agar dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

RPJMD

KABUPATEN NIAS SELATAN
TAHUN 2025–2029

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi adalah suatu penginterpretasian dan gagasan serta hal-hal yang dipertimbangkan dalam kajian ilmu geografi. Karakteristik lokasi wilayah, potensi dan pengembangan wilayah, serta kerentanan wilayah terhadap bencana disajikan dalam aspek geografi wilayah. Di sisi lain, perubahan jumlah dan komposisi penduduk secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu disajikan dalam aspek demografi.

2.1.1 Posisi dan Peran Strategis

Pembangunan daerah adalah proses kolaboratif yang menuntut sinergi antara berbagai pemangku kepentingan. Dengan memahami posisi dan peran strategis masing-masing pihak, pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan dapat terwujud.

Kabupaten Nias Selatan terletak di sebelah barat Pulau Sumatera jaraknya ± 92 Mil Laut dari Kota Sibolga atau Kabupaten Tapanuli Tengah. Letak Kabupaten Nias Selatan berada di sebelah Selatan Kabupaten Nias yang berjarak ± 120 km dari Gunungsitoli ke Teluk Dalam (Ibu Kota Kabupaten Nias Selatan).

Kabupaten Nias Selatan secara astronomis terletak pada 0°33'25" Lintang Selatan hingga 1°04'5" Lintang Utara dan 97°25'59" Bujur Timur hingga 98°48'29" Bujur Timur. Secara geografis, wilayah Kabupaten Nias Selatan terdiri atas 104 pulau besar dan kecil yang membentang sejajar dengan Pulau Sumatera. Dari keseluruhan gugusan pulau tersebut, terdapat empat pulau utama, yaitu Pulau Tanah Bala dengan luas 39,67 km², Pulau Tanah Masa dengan luas 32,16 km², Pulau Tello dengan luas 18 km², dan Pulau Pini dengan luas 24,36 km². Dari total jumlah pulau, sebanyak 20 pulau berpenghuni, sedangkan sisanya sebanyak 84 pulau tidak berpenghuni.

Kabupaten Nias Selatan mempunyai luas wilayah 6.902,505 km² dengan luas daratan kurang lebih 2.452,1 km², luas lautan kurang lebih 4.450,409 km². Kabupaten Nias Selatan merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Nias. Kabupaten Nias Selatan memiliki luas wilayah administrasi 2.487,99 km² dengan jumlah kecamatan 35 dan terdiri dari 459 Desa dan 2 kelurahan.

Adapun batas-batas wilayah kabupaten Nias Selatan terdiri dari:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Barat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kepulauan Mentawai dan Sumatera Barat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Tapanuli Tengah; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Berikut adalah peta wilayah administrasi Kabupaten Nias Selatan.

Gambar 2.1
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Nias Selatan

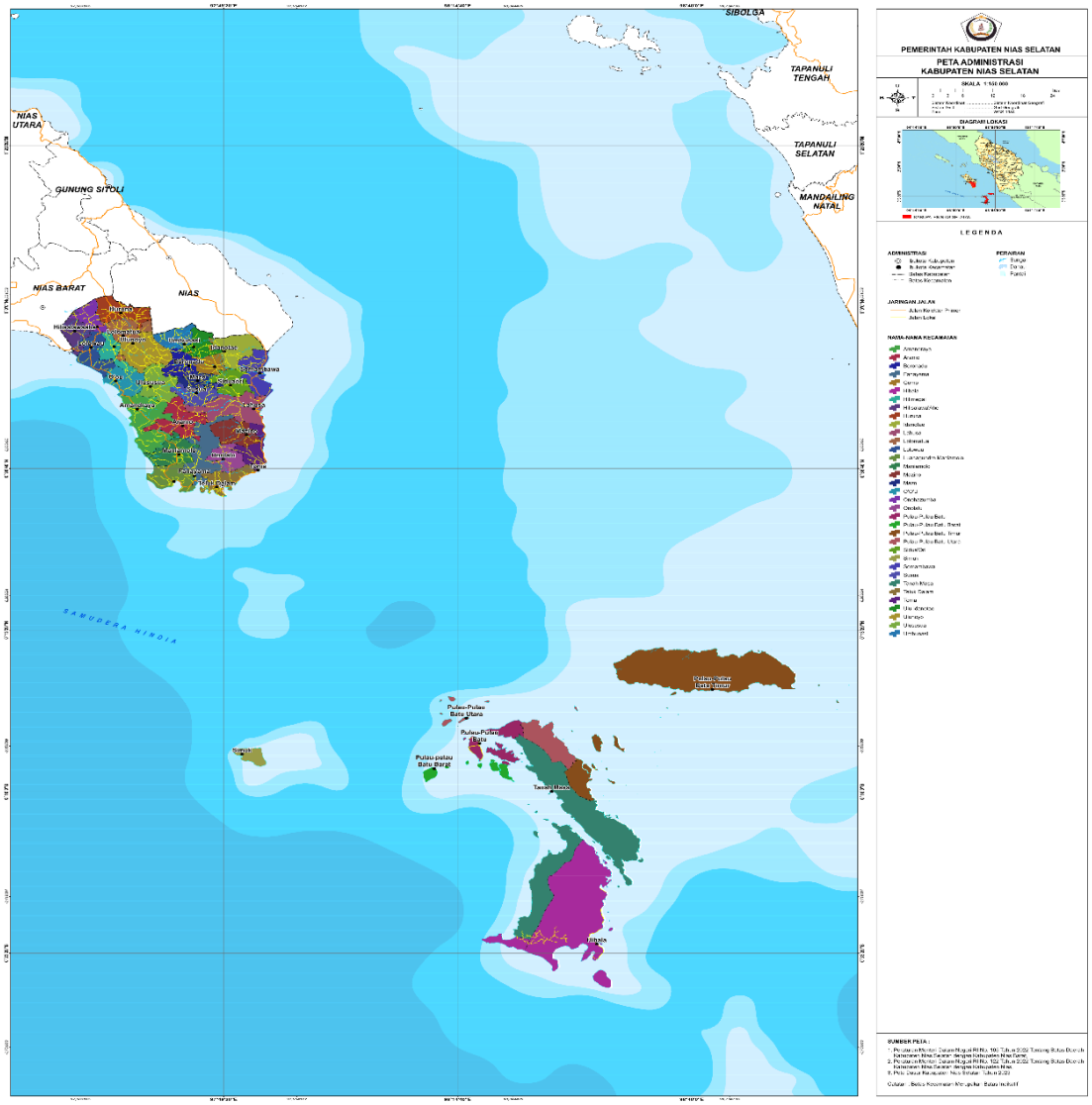

Berdasarkan kondisi eksisting topografi dan kelerengan yang ada di Kabupaten Nias Selatan yang sangat beragam dari landai, bergelombang, curam hingga sangat curam. Hal ini mengindikasikan potensi pengembangan wilayah jika dimanfaatkan secara optimal maka akan sangat menguntungkan.

Kondisi alam atau topografi berbukit-bukit sempit dan terjal serta pegunungan, tingginya di atas permukaan laut bervariasi antara 0-800 m, terdiri dari dataran rendah sampai bergelombang mencapai 20 persen, dari tanah bergelombang sampai berbukit-bukit 28,8 persen dan dari berbukit-bukit sampai pegunungan 51,2 persen dari keseluruhan luas daratan. Kondisi topografi demikian menyulitkan pembuatan jalan-jalan lurus dan lebar. Oleh karena itu, kota-kota utama terletak di tepi pantai.

Kabupaten Nias Selatan memiliki posisi strategis dalam kerangka pengembangan wilayah dan perekonomian Provinsi Sumatera Utara. Potensi unggulannya mencakup pariwisata bahari dan budaya, pertanian, perkebunan, serta perikanan, yang menjadikannya motor penggerak ekonomi dan budaya di Kepulauan Nias. Kontribusi daerah ini terlihat dari penyediaan komoditas strategis, khususnya hasil perkebunan (kelapa, kakao, karet) dan perikanan tangkap, serta dukungan infrastruktur pelabuhan, jaringan jalan, dan bandara perintis sebagai simpul konektivitas. Selain itu, keanekaragaman hayati darat dan laut menjadikan Nias Selatan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Secara demografis, dinamika kependudukan Nias Selatan dipengaruhi oleh pola migrasi masuk dan keluar. Migrasi masuk umumnya dipicu oleh peluang ekonomi di sektor primer dan pariwisata, sedangkan migrasi keluar lebih banyak disebabkan faktor pendidikan, keterbatasan lapangan kerja formal, dan mobilitas sosial-ekonomi. Kondisi ini membentuk struktur penduduk yang adaptif namun rentan terhadap ketimpangan kualitas sumber daya manusia, sehingga menuntut kebijakan pembangunan yang responsif terhadap pergerakan dan kebutuhan penduduk.

Struktur mata pencaharian masyarakat masih didominasi sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, sementara sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata menunjukkan pertumbuhan seiring meningkatnya kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara. Transformasi gradual ini mencerminkan pergeseran menuju diversifikasi ekonomi berbasis potensi lokal, khususnya pariwisata dan ekonomi kreatif. Dengan karakteristik tersebut, Kabupaten Nias Selatan memiliki peran strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, budaya, dan pariwisata di Kepulauan Nias sekaligus sebagai salah satu pilar penting pembangunan berkelanjutan di kawasan barat Sumatera.

2.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam (SDA) adalah kemampuan atau cadangan yang dimiliki alam, baik di darat maupun di laut, yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menunjang proses pembangunan. Potensi ini bisa berupa sesuatu yang langsung terlihat dan digunakan, atau masih tersembunyi dan memerlukan eksplorasi lebih lanjut.

Kabupaten Nias Selatan memiliki beragam potensi sumber daya alam (SDA) yang penting dan strategis dalam mendukung pembangunan daerah serta memberikan kontribusi terhadap perekonomian regional maupun nasional. Keunggulan komparatif yang dimiliki menjadikan sektor-sektor berbasis sumber daya alam sebagai penggerak utama perekonomian lokal, sekaligus sebagai potensi ekonomi yang dapat dioptimalkan secara berkelanjutan.

Sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat. Keunggulan komparatif daerah ini terletak pada ketersediaan lahan subur, iklim tropis yang mendukung, serta keberagaman komoditas unggulan seperti padi, kelapa, karet, kakao, dan hasil hutan non-kayu. Potensi ini tidak hanya mendukung ketahanan pangan lokal, tetapi juga membuka peluang ekspor dan pengembangan industri pengolahan hasil pertanian di tingkat hulu dan hilir.

Sektor perikanan dan kelautan juga memiliki peran sentral, ditopang oleh garis pantai yang panjang dan perairan laut yang kaya akan biodiversitas. Kegiatan perikanan tangkap dan budidaya laut seperti budidaya ikan, udang, lobster dan lain sebagainya menjadi keunggulan daerah yang potensial dikembangkan untuk memperkuat ekonomi pesisir, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Pemanfaatan potensi ini harus mengedepankan prinsip kelestarian ekosistem laut dan keberlanjutan sumber daya.

Di sisi lain, sektor pariwisata alam dan budaya menjadi aset strategis yang memperkuat identitas dan daya saing daerah. Lanskap alam yang indah seperti Pantai Sorake, Pulau Tello, dan gugusan pulau eksotis lainnya, berpadu dengan kekayaan budaya lokal seperti tradisi lompat batu, rumah adat, serta upacara adat yang masih lestari, menjadikan Nias Selatan sebagai destinasi wisata berkelas dunia. Potensi ini memberikan nilai tambah ekonomi, terutama melalui pariwisata berbasis masyarakat dan pelestarian budaya.

Optimalisasi potensi SDA ini harus dilakukan secara terintegrasi dan berorientasi pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan: ekonomi yang produktif, sosial yang inklusif, dan ekologi yang lestari. Melalui penguatan kelembagaan, inovasi teknologi, pengembangan kapasitas masyarakat lokal, serta peningkatan konektivitas dan infrastruktur pendukung, Kabupaten Nias Selatan dapat memanfaatkan keunggulan komparatifnya secara optimal untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang mandiri, berkeadilan, dan berdaya saing tinggi.

2.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan dua konsep utama dalam pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Daya dukung mengacu pada kemampuan lingkungan dalam mendukung kehidupan dan aktivitas manusia tanpa merusak keseimbangan ekosistem, sedangkan daya tampung menunjukkan kemampuan lingkungan untuk menyerap limbah atau zat buangan tanpa menimbulkan pencemaran atau kerusakan. Kedua konsep ini menjadi dasar penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan agar tidak melampaui kapasitas alam, sehingga dapat mencegah degradasi lingkungan dan menjamin keberlanjutan sumber daya bagi generasi mendatang.

Status daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten Nias Selatan ditentukan berdasarkan dua aspek utama, yaitu apakah daya dukung telah terlampaui atau belum, serta tingkat pemanfaatan jasa lingkungan hidup. Penilaian ini mencerminkan sejauh mana kondisi lingkungan masih mampu menopang aktivitas manusia dan pembangunan tanpa menurunkan kualitas maupun merusak fungsi ekosistem.

Dengan demikian, aspek lingkungan hidup menjadi salah satu pertimbangan penting dalam perumusan alternatif skenario pembangunan di Kabupaten Nias Selatan. Pertimbangan tersebut dituangkan secara sistematis melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Nias Selatan. Adapun aspek-aspek kondisi lingkungan hidup yang dipertimbangkan dalam KLHS RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029 meliputi:

1. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan hasil sebagai berikut:
   - Daya dukung air bersih pada tahun 2025 belum terlampaui dan diperkirakan akan tetap belum terlampaui hingga tahun 2029;

- Daya dukung pangan Kabupaten Nias Selatan berada dalam status telah terlampaui sejak tahun 2025 dengan defisit sebesar 69.331 juta kkal dan masih berada dalam kondisi defisit hingga tahun 2029 sebesar 301.485 juta kkal.

2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup dengan hasil sebagai berikut:
   - Timbulan sampah Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2025 sebanyak 1.037 juta liter dan meningkat menjadi 1.125 juta liter pada tahun 2029;
   - Timbulan lumpur tinja Kabupaten Nias Selatan meningkat dari 2.414 juta m° pada tahun 2025 menjadi 2.618 juta m² pada tahun 2029;
   - Timbulan air limbah domestik Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2025 sebesar 14.875 juta liter dan pada tahun 2029 meningkat menjadi 16.134 juta liter;
   - Rawan bencana banjir risiko tinggi mencakup wilayah seluas 7.807,2 Ha, terluas berada di Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur, Tanah Masa dan Hibala;
   - Rawan bencana gempa mencakup hampir seluruh wilayah Kabupaten Nias Selatan, yakni 251.371,6 Ha;
   - Rawan bencana longsor sangat tinggi dan tinggi masing-masing mencakup wilayah seluas 40.783,8 Ha dan 47.310,9 Ha, yang tersebar di seluruh kecamatan, kecuali Kecamatan Luahagundre Maniamolo, Pulau-Pulau Batu, Pulau-Pulau Batu Timur, Pulau-Pulau Batu Utara dan Simuk;
   - Rawan bencana tsunami tinggi mencakup wilayah seluas 14.616,2 Ha, terluas berada di Kecamatan Hibala, Tanah Masa dan Pulau-Pulau Batu Timur;
   - Rawan bencana liquefaksi tinggi mencakup wilayah seluas 36.324,1 Ha, terluas berada di Kecamatan Hibala, Tanah Masa dan Pulau-Pulau Batu Barat.
3. Kinerja layanan atau jasa ekosistem dengan hasil sebagai berikut:
   - Jasa lingkungan penyediaan pangan hampir seluruhnya berada pada kategori rendah hingga sangat rendah, mencakup 97% dari luas wilayah, sedangkan yang memiliki kategori tinggi hanya seluas 5.390,5 Ha atau 2% dari luas wilayah;

- Jasa lingkungan penyediaan air hampir seluruhnya berada pada kategori rendah hingga sangat rendah, mencakup 99% dari luas wilayah, sedangkan yang memiliki kategori tinggi hampir tidak ada, hanya seluas 1,8 Ha;
- Jasa lingkungan penyediaan sumber daya genetik dominan berada pada kategori sedang, mencakup 84% dari luas wilayah, sedangkan yang memiliki kategori tinggi hanya seluas 3.786,7 Ha;
- Jasa lingkungan pengatur iklim didominasi kategori sedang, mencakup 60% dari luas wilayah, sedangkan yang memiliki kategori tinggi tidak ada;
- Jasa lingkungan pengaturan tata aliran air dan banjir dominan rendah hingga sangat rendah, mencakup hampir 100% dari luas wilayah, sedangkan yang memiliki kategori tinggi hampir tidak ada, hanya seluas 0,4 Ha;
- Jasa lingkungan pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana alam dominan rendah hingga sangat rendah, mencakup 95% dari luas wilayah, sedangkan yang memiliki kategori tinggi hanya 178,8 Ha;
- Jasa lingkungan pengaturan kualitas udara dominan tinggi hingga sangat tinggi mencakup 92% dari luas wilayah, sedangkan yang memiliki kategori rendah hingga sangat rendah hanya 11.864,1 Ha;
- Jasa lingkungan budaya tempat tinggal dan ruang hidup dominan rendah hingga sangat rendah, mencakup 989% dari luas wilayah, sedangkan yang memiliki kategori tinggi hingga sangat tinggi hanya 1.708,85 Ha.

4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam dengan hasil sebagai berikut:
   - Jika ditinjau dari aspek perwujudan rencana pola ruang dengan kondisi eksisting penutupan lahan, terdapat inefisiensi pemanfaatan sumber daya alam, berupa kawasan ekosistem mangrove yang sudah dimanfaatkan untuk perkebunan seluas 324 Ha, kawasan hutan lindung yang sudah dimanfaatkan untuk permukiman (641 Ha) dan perkebunan (54.022 Ha), serta kawasan tanaman pangan yang sudah dimanfaatkan untuk permukiman dan tempat kegiatan seluas 331 Ha.
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dengan hasil sebagai berikut:
   - Kabupaten Nias Selatan secara umum memiliki tingkat kerentanan perubahan iklim yang tinggi, hanya beberapa kecamatan yang memiliki

tingkat kerentanan perubahan iklim yang rendah, a.l. Kecamatan Hilimegai, Maniamolo, Pulau-Pulau Batu dan Teluk Dalam.

6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati dengan hasil sebagai berikut:
   - Jasa lingkungan pendukung biodiversitas dominan rendah hingga sangat rendah mencakup 63% dari luas wilayah, sedangkan yang memiliki kategori tinggi hanya 178,4 Ha;
   - Terdapat beberapa wilayah yang memiliki Nilai Konservasi Tinggi (NKT) di Kabupaten Nias Selatan, a.l. Kecamatan Tanah Masa (179,1 Ha), Pulau-Pulau Batu Barat (101,6 Ha), Pulau-Pulau Batu Timur (91,9 Ha), Hibala (144,8 Ha), Pulau-Pulau Batu (33,9 Ha), Simuk (25,9 Ha) dan Pulau-Pulau Batu Utara (9,1 Ha);
   - Di Kabupaten Nias Selatan terdapat kawasan hutan suaka alam dan hutan lindung masing-masing seluas 8.219,1 Ha dan 72.716,6 Ha, dimana seluas 71.364,6 Ha dari kawasan hutan lindung memiliki ketahanan keanekaragaman hayati yang rendah, yang lokasinya tersebar di seluruh kecamatan, kecuali Kecamatan Somambawa;
   - Terdapat PIPPIB kawasan dan PIPPIB primer masing-masing seluas 82.689,1 Ha dan 238,9 Ha di Kabupaten Nias Selatan;
   - Kabupaten Nias Selatan memiliki kawasan mangrove seluas 380,6 Ha yang tersebar pada 5 (lima) kecamatan, yakni Kecamatan Pulau-Pulau Batu Barat (116,1 Ha), Pulau-Pulau Batu (114,7 Ha), Tanah Masa (83,4 Ha), Teluk Dalam (58,6 Ha) dan Hibala (7,8 Ha):
   - Terdapat Folu Net Sink seluas 10.993 Ha di Kabupaten Nias Selatan yang tersebar di 11 (sebelas) kecamatan, terluas di Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur (3.500,5 Ha), Hibala (1.358,9 Ha) dan Huruna (1.282,9 Ha).

2.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Ketahanan energi, air, dan pangan adalah tiga aspek fundamental yang saling terkait dalam menjaga keberlanjutan suatu negara. Ketersediaan energi yang stabil, akses terhadap sumber daya air yang mencukupi, serta kemampuan memproduksi pangan secara mandiri menjadi kunci dalam mencapai kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat.

2.1.4.1 Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor.

Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. IKP dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan memetakan wilayah rentan pangan. Identifikasi ini bertujuan untuk mengetahui situasi pangan wilayah agar dapat dilakukan tindakan intervensi dan penanganan daerah yang termasuk kategori rentan pangan.

Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan selama lima tahun terakhir berada dalam kelompok agak tahan. Hal ini terlihat dari nilai Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan yang berada di angka terendah 63,54 poin pada tahun 2021 dan angka tertinggi berada di 65,87 poin di tahun 2024.

Grafik 2.1
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024

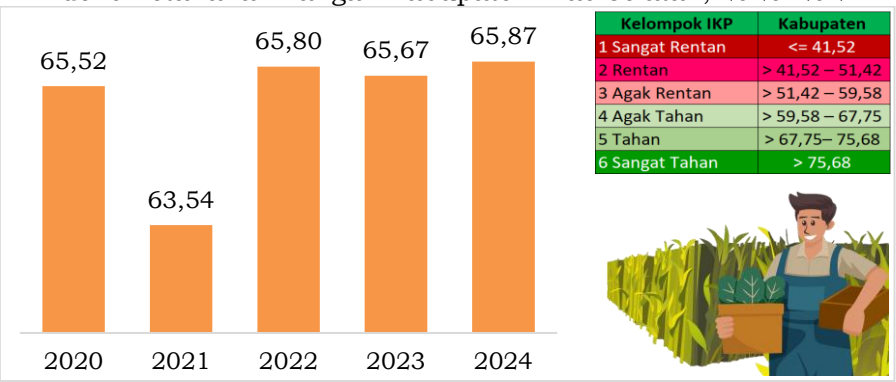

Sumber: Buku Indeks Ketahanan Pangan 2020-2024, (data diolah)

2.1.4.2 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan salah satu indikator yang menjadi tolak ukur ketercapaian tujuan SDGs kedua yaitu Tanpa Kelaparan. Inti dari tujuan ini adalah untuk menghilangkan kelaparan, mencapai

ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.

Ketidakcukupan konsumsi pangan (*undernourishment*) didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang, secara regular, mengonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif, dan sehat.

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kabupaten Nias Selatan dari tahun 2020-2024 menunjukkan pola yang fluktuatif. Pada tahun 2020 dan 2021, angka prevalensi relatif stabil masing-masing sebesar 8,55 persen dan 8,51 persen. Namun, pada tahun 2022 terjadi lonjakan signifikan menjadi 13,08 persen, yang berlanjut meningkat menjadi 13,45 persen pada tahun 2023. Kenaikan tersebut mencerminkan adanya tantangan dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, yang dapat disebabkan oleh faktor ekonomi, gangguan rantai pasok, atau produksi pangan lokal yang belum memadai. Meski demikian, pada tahun 2024 prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan menurun tajam menjadi 7,81 persen, mengindikasikan adanya perbaikan dalam akses dan ketersediaan pangan, serta program intervensi ketahanan pangan terlaksana secara lebih efektif.

Grafik 2.2
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024

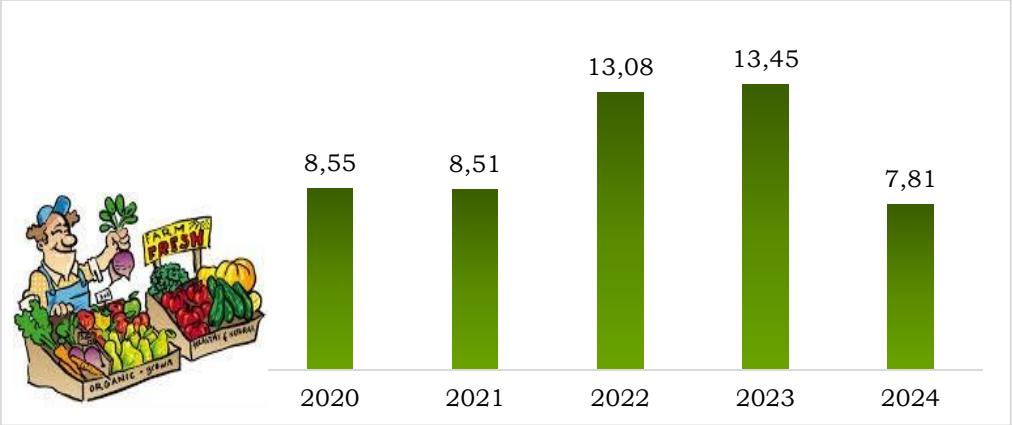

Sumber: Badan Pusat Statistik

2.1.4.3 Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum

Akses rumah tangga terhadap air minum layak adalah proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum yang aman dan memenuhi standar kualitas air minum. Indikator yang digunakan adalah persentase rumah tangga yang memiliki akses pada air minum layak. Nilai persentase yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap air minum yang

aman dan layak konsumsi di suatu wilayah baik. Sebaliknya, nilai persentase yang rendah menunjukkan bahwa tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap air minum yang aman dan layak konsumsi di suatu wilayah masih perlu ditingkatkan.

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak di Kabupaten Nias Selatan mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, akses air minum layak tercatat sebesar 62,80 persen dan meningkat menjadi 66,21 persen pada tahun 2021 serta 66,71 persen pada tahun 2022. Namun, terjadi sedikit penurunan pada 2023 menjadi 64,55 persen sebelum akhirnya meningkat signifikan ke 69,38 persen pada tahun 2024. Secara keseluruhan, tren menunjukkan peningkatan akses terhadap air minum layak, meskipun terdapat penurunan pada 2023. Hal ini dapat mencerminkan adanya upaya peningkatan infrastruktur air minum yang berkelanjutan serta tantangan dalam mempertahankan ketersediaan air minum layak.

Grafik 2.3
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses pada Air Minum Layak di Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024

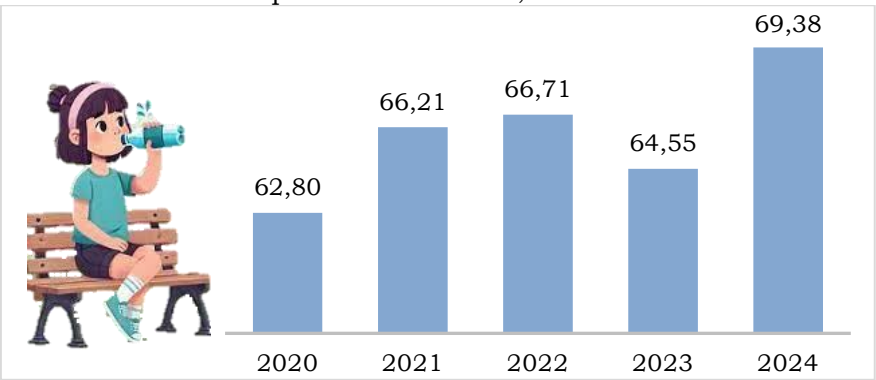

Sumber: Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka, 2025

2.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

Lingkungan hidup yang berkualitas memainkan peran krusial dalam pembangunan yang berkelanjutan. Lingkungan yang sehat, bersih, dan lestari mendukung berbagai aspek kehidupan manusia, ekonomi, dan sosial. Pembangunan yang memperhatikan kualitas lingkungan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat ini tetapi juga menjamin ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang.

2.1.5.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup juga dapat digunakan untuk

mengidentifikasi kualitas lingkungan suatu kawasan dan membandingkan kawasan-kawasan dengan tingkat kualitas lingkungan yang berbeda. IKLH juga berfungsi sebagai salah satu instrumen bagi pemangku kepentingan dalam mengambil kebijakan di bidang lingkungan hidup.

Skor Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2021 dan 2022 relatif stabil, masing-masing sebesar 53,29 dan 53,56, yang masuk dalam kategori "sedang." Namun pada tahun 2023, terjadi peningkatan signifikan menjadi 76,37, yang menempatkannya dalam kategori "baik," meskipun sedikit menurun menjadi 75,58 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam pengelolaan lingkungan, seperti pengendalian polusi, pelestarian sumber daya alam, atau peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Meskipun ada sedikit penurunan pada 2024, tren keseluruhan menunjukkan perbaikan kualitas lingkungan yang positif di Kabupaten Nias Selatan.

Grafik 2.4
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024

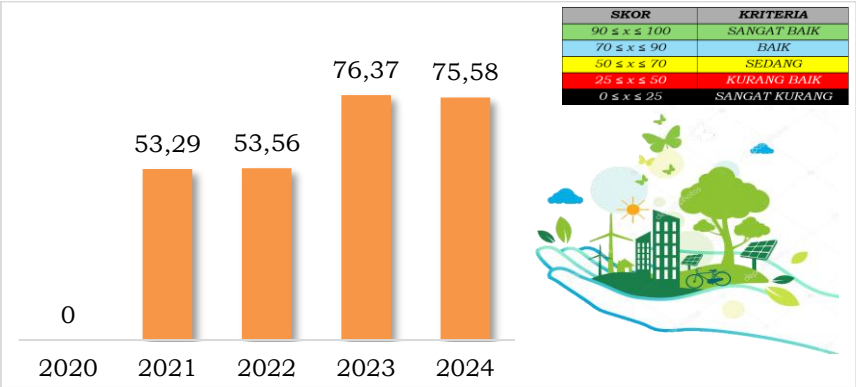

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Selatan, 2025

2.1.5.2 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak

Sanitasi rumah tangga adalah serangkaian kegiatan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan di dalam rumah tangga. Sanitasi rumah tangga meliputi tindakan pencegahan dan pengendalian infeksi, penyediaan air bersih, pengelolaan air limbah dan sampah, pengendalian serangga, dan tindakan lainnya untuk menjaga kualitas udara dan lingkungan di sekitar rumah.

Rumah tangga dikatakan memiliki akses terhadap sanitasi yang layak apabila fasilitas sanitasi yang digunakan bersifat eksklusif untuk anggota rumah tangga sendiri dan dilengkapi dengan kloset berleher angsa, serta memiliki sistem pembuangan tinja yang memenuhi salah satu dari dua kriteria berikut:

1. Tinja dibuang ke tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam lima tahun terakhir dan diolah di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
2. Tinja langsung dialirkan ke Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).

Pada tahun 2020, akses terhadap sanitasi aman tercatat sebesar 11,48% dan mengalami peningkatan menjadi 13,14 persen pada 2021. Namun, pada tahun 2022 terjadi sedikit penurunan menjadi 12,23 persen sebelum kembali meningkat secara signifikan menjadi 15,63 persen pada 2023. Pada tahun 2024, angka rumah tangga dengan akses sanitasi aman mengalami sedikit penurunan menjadi 15,33 persen. Secara keseluruhan, meskipun terdapat fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir, tren lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan akses terhadap sanitasi layak. Hal ini mencerminkan adanya upaya perbaikan infrastruktur sanitasi serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya fasilitas sanitasi yang layak.

Grafik 2.5
Akses Rumah Tangga Terhadap Sanitasi Layak Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024

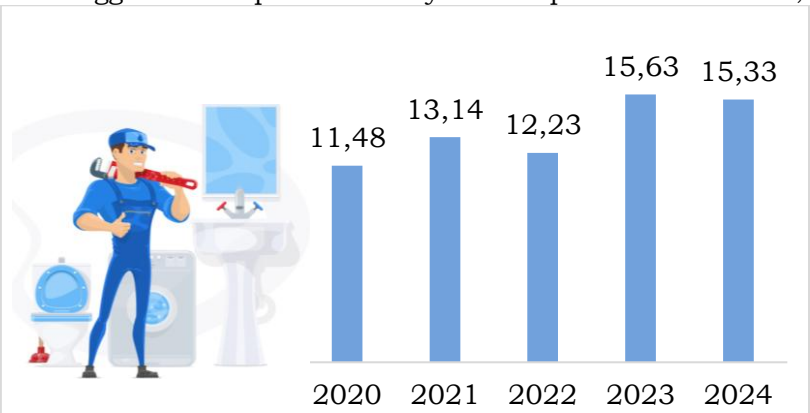

Sumber: Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka, 2025

2.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim adalah kemampuan individu, komunitas, dan sistem untuk menghadapi, beradaptasi, serta pulih dari dampak bencana alam dan perubahan iklim dengan cara yang berkelanjutan. Resiliensi ini mencakup kesiapsiagaan, mitigasi risiko, serta kapasitas untuk beradaptasi terhadap kondisi yang berubah agar dapat meminimalkan kerugian dan memastikan kelangsungan hidup serta kesejahteraan masyarakat.

Strategi untuk meningkatkan resiliensi meliputi pembangunan infrastruktur tahan bencana, perencanaan tata ruang yang memperhitungkan risiko iklim, pemanfaatan teknologi untuk pemantauan dini, serta edukasi dan

pelibatan masyarakat dalam upaya mitigasi dan adaptasi. Dengan meningkatkan resiliensi, suatu wilayah dapat mengurangi dampak negatif dari bencana seperti banjir, kekeringan, atau badai, serta beradaptasi terhadap tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim jangka panjang.

2.1.6.1 Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kerentanan suatu wilayah terhadap bencana. Tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana. Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian di atas memungkinkan adanya perhitungan capaian suatu upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut.

Pada tahun 2020, Indeks Risiko Bencana Kabupaten Nias Selatan berada di angka tertinggi selama lima tahun terakhir yaitu 202,00, menunjukkan tingkat risiko bencana yang sangat tinggi. Namun, pada tahun 2021, skor indeks menurun menjadi 187,94, mengindikasikan adanya upaya mitigasi atau perubahan kondisi yang mengurangi tingkat risiko. Tren penurunan ini tidak berlangsung konsisten, karena pada tahun 2022 indeks kembali meningkat menjadi 191,83, sebelum sedikit menurun pada tahun 2023 dengan skor 190,52. Pada tahun 2024 kembali meningkat dengan skor 202,00.

Grafik 2.6
Indeks Risiko Bencana Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024

Sumber : Indeks Risiko Bencana Indonesia

2.1.7 Demografi

Aspek demografi mencerminkan karakteristik dasar penduduk suatu wilayah yang meliputi jumlah, kepadatan, laju pertumbuhan, struktur umur, serta komposisi jenis kelamin. Faktor-faktor ini menjadi landasan dalam merancang kebijakan pembangunan yang responsif dan berkelanjutan. Demografi bukan

hanya menggambarkan kondisi statis penduduk, tetapi juga dinamika sosial yang memengaruhi penyusunan kebijakan di sektor ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Pemahaman yang komprehensif terhadap karakteristik demografis memungkinkan perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran, efisien, dan inklusif.

Dinamika demografi daerah sangat dipengaruhi oleh pola migrasi yang mencerminkan ketimpangan spasial dalam akses terhadap sumber daya dan layanan dasar. Migrasi keluar umumnya didorong oleh keterbatasan lapangan kerja, pendidikan, dan fasilitas kesehatan di wilayah asal. Sebaliknya, migrasi masuk cenderung terkonsentrasi di wilayah pesisir yang memiliki potensi ekonomi lebih tinggi, khususnya di sektor perikanan dan perdagangan. Fenomena ini menunjukkan bahwa mobilitas penduduk berkorelasi kuat dengan aksesibilitas infrastruktur, kualitas layanan publik, dan daya tarik ekonomi suatu wilayah.

Struktur sosial ekonomi masyarakat turut memperkuat karakteristik demografi daerah. Sektor pertanian dan perikanan masih menjadi tulang punggung utama, dengan perikanan tangkap mendominasi kawasan pesisir, sementara pertanian lahan kering dan perkebunan berkembang di wilayah pegunungan. Di sisi lain, sektor informal seperti perdagangan dan jasa mulai tumbuh di pusat-pusat kecamatan, mengindikasikan adanya diversifikasi ekonomi yang didorong oleh dinamika demografi dan urbanisasi skala lokal.

2.1.7.1 Laju Pertumbuhan Penduduk, Rasio Penduduk, Kepadatan Penduduk

Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh angka kelahiran, kematian, dan migrasi, yang berperan dalam menentukan dinamika ekonomi serta keseimbangan antara generasi muda dan tua. Jumlah dan kepadatan penduduk mencerminkan distribusi populasi dalam suatu wilayah, yang berdampak pada kebutuhan akan infrastruktur, layanan publik, serta ketersediaan sumber daya alam.

Rasio penduduk merupakan perbandingan jumlah penduduk dalam suatu wilayah dan dapat dihitung berdasarkan berbagai indikator, seperti rasio jenis kelamin (perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan), kepadatan penduduk (jumlah penduduk per satuan luas wilayah), serta rasio ketergantungan (perbandingan antara penduduk usia produktif dan non-produktif). Berikut adalah data kependudukan Kabupaten Nias Selatan menurut kecamatan pada tahun 2024.

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk, Laju pertumbuhan penduduk, Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan, 2024

Kecamatan	Penduduk jiwa	Laju Pertumbuhan Penduduk, 2020–2024 (%)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km²	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Hibala	8.417	2,26	2,16	37,28	99,93
Tanah Masa	5.244	2,26	1,34	11,62	103,18
Pulau Pulau Batu	9.902	0,50	2,54	94,22	100,61
Pulau Pulau Batu Timur	3.313	1,82	0,85	8,90	105,52
Simuk	1.968	0,50	0,50	96,38	92,19
Pulau-Pulau Batu Barat	2.361	0,50	0,61	112,11	98,07
Pulau-Pulau Batu Utara	3.963	0,50	1,02	629,05	99,25
Teluk Dalam	27.103	1,62	6,95	656,25	98,85
Fanayama	20.656	3,27	5,30	250,41	107,39
Toma	16.003	4,77	4,10	387,86	101,70
Maniamolo	13.780	-0,07	3,53	182,95	102,68
Mazino	8.769	0,16	2,25	222,06	102,70
Luahagundre Maniamolo	11.692	3,27	3,00	232,03	103,76
Onolalu	9.012	1,62	2,31	355,22	107,46
Amandraya	15.989	3,33	4,10	208,30	102,29
Aramo	10.829	2,14	2,78	170,56	103,97
Ulususua	12.132	3,34	3,11	212,17	101,09
Lahusa	22.923	2,45	5,88	285,25	103,25
Sidua'ori	12.478	2,45	3,20	199,97	102,50
Somambawa	15.499	2,46	3,97	381,47	103,51
Gomo	11.867	3,07	3,04	315,95	100,93
Susua	17.297	0,78	4,44	612,72	99,14
Mazo	12.452	-0,38	3,19	428,94	103,40
Umbunasi	7.450	-0,38	1,91	227,06	97,61
Idanotae	11.369	3,06	2,92	401,59	102,55
Ulu Idanotae	8.086	3,07	2,07	564,27	100,20
Boronadu	8.421	3,06	2,16	287,11	99,22
Lolomatua	12.702	3,56	3,26	588,33	98,84
Ulunoyo	14.954	3,56	3,83	305,25	98,91
Huruna	15.068	3,56	3,86	305,70	93,55
Lolowau	9.601	-0,05	2,46	199,90	100,73
Hilimegai	7.302	1,40	1,87	181,87	101,77
O'o'u	8.785	-0,05	2,25	120,08	102,79
Onohazumba	6.852	-0,05	1,76	240,84	96,90
Hilisalawa Ahe	5.718	-0,05	1,47	142,27	99,44
Nias Selatan	**389.957**	**2,05**	**100,00**	**156,74**	**101,31**

Sumber: Kabupaten Nias Selatan Dalam Angka, 2025 (data diolah)

Struktur usia penduduk terbagi menjadi usia muda, produktif, dan lanjut, yang masing-masing memiliki kebutuhan dan dampak terhadap perekonomian, seperti tenaga kerja dan sistem kesejahteraan sosial. Komposisi jenis kelamin juga berpengaruh terhadap berbagai aspek sosial dan ekonomi, termasuk kesempatan

kerja dan pola pernikahan. Berikut jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Nias Selatan tahun 2024.

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Nias Selatan, 2024

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0–4	23.594	22.487	46.081
5–9	14.850	14.265	29.115
10–14	16.720	16.123	32.843
15–19	21.004	19.421	40.425
20–24	22.090	19.827	41.917
25–29	20.695	19.755	40.450
30–34	16.324	16.564	32.888
35–39	13.176	13.882	27.058
40–44	10.574	11.293	21.867
45–49	9.878	10.807	20.685
50–54	8.132	8.603	16.735
55–59	6.677	7.349	14.026
60–64	5.024	5.203	10.227
65–69	3.525	3.680	7.205
70–74	2.075	2.267	4.342
75+	1.907	2.186	4.093
Nias Selatan	**196.245**	**193.712**	**389.957**

Sumber: Kabupaten Nias Selatan Dalam Angka, 2025

2.1.7.2 Analisis dan Proyeksi Penduduk

Analisis dan proyeksi penduduk merupakan metode untuk memahami tren pertumbuhan penduduk serta memperkirakan jumlah dan struktur demografi di masa depan. Hal ini penting dalam perencanaan pembangunan, kebijakan ekonomi, serta pengelolaan sumber daya. Analisis penduduk membantu memahami dinamika populasi saat ini, sementara proyeksi penduduk memberikan gambaran masa depan yang berguna dalam perencanaan pembangunan. Dengan analisis dan proyeksi yang akurat, kebijakan yang lebih efektif dapat dibuat untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan. Berikut proyeksi penduduk Kabupaten Nias Selatan selama lima tahun mendatang.

Tabel 2.3
Proyeksi Penduduk Kabupaten Nias Selatan Berdasarkan Klasifikasi Umur,
2025-2029 (Ribu Jiwa)

Umur	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0-4	46,08	50,86	50,66	50,46	50,18	49,84
5-9	29,12	28,39	32,48	36,54	40,63	44,85
10-14	32,84	31,15	29,98	29,18	28,7	28,29
15-19	40,43	39,26	37,76	35,99	34,06	32,18

Umur	2024	2025	2026	2027	2028	2029
20-24	41,92	41,49	41,08	40,62	40,03	39,2
25-29	40,45	41,2	41,5	41,44	41,11	40,67
30-34	32,89	34,14	35,57	37,09	38,53	39,68
35-39	27,06	28,24	29,28	30,23	31,15	32,17
40-44	21,87	22,22	22,94	23,96	25,18	26,42
45-49	20,69	21,16	21,35	21,31	21,19	21,22
50-54	16,74	17,25	17,93	18,76	19,61	20,32
55-59	14,03	14,62	15,12	15,5	15,86	16,26
60-64	10,23	10,69	11,22	11,81	12,43	13,03
65-69	7,21	7,64	8,03	8,4	8,76	9,14
70-74	4,34	4,59	4,89	5,25	5,64	6,03
75+	4,09	4,3	4,53	4,76	5	5,26
Total	**389,96**	**397,22**	**404,33**	**411,27**	**418,02**	**424,55**

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Utara (data diolah)

Dari tabel tersebut diatas diperoleh proyeksi penduduk Kabupaten Nias Selatan tahun 2024–2029 menunjukkan tren peningkatan moderat, dari 389,96 ribu jiwa pada 2024 menjadi 424,55 ribu jiwa pada 2029. Struktur penduduk masih didominasi oleh kelompok usia produktif (15–64 tahun) yang mencapai lebih dari 67 persen, mencerminkan peluang bonus demografi yang perlu dimanfaatkan melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun terdapat tren peningkatan proporsi penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas), dari 4,0 persen menjadi 4,8 persen, yang menandakan awal pergeseran menuju struktur penduduk menua. Di sisi lain, kelompok usia muda tetap signifikan, meskipun terdapat indikasi penurunan fertilitas pada kelompok usia 0–4 tahun. Dinamika ini menuntut kebijakan pembangunan yang adaptif dan berkelanjutan, dengan fokus pada perluasan akses pendidikan, penyediaan layanan kesehatan, serta penguatan sistem perlindungan sosial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan tangguh.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan indikator utama dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan dan memiliki dampak besar terhadap keberhasilan pembangunan daerah. Berbagai aspek kesejahteraan harus diperhatikan agar pembangunan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi merupakan faktor utama dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan. Aspek ini mencakup pertumbuhan ekonomi yang stabil, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pemerataan kesempatan kerja.

Beberapa indikator yang digunakan antara lain pendapatan per kapita, yang menunjukkan rata-rata pendapatan masyarakat, serta tingkat kemiskinan yang mengukur persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Selain itu, tingkat pengangguran menjadi indikator penting dalam menilai ketersediaan lapangan kerja dan peluang ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga digunakan untuk mengukur kualitas hidup berdasarkan aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

2.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang menunjukkan peningkatan atau penurunan aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang positif menandakan adanya peningkatan produksi barang dan jasa, investasi, serta daya beli masyarakat, yang umumnya dipengaruhi oleh faktor seperti kebijakan pemerintah, stabilitas ekonomi, perkembangan sektor industri, serta kondisi global. Pertumbuhan ekonomi yang melambat atau negatif dapat disebabkan oleh krisis ekonomi, inflasi, bencana alam, atau faktor eksternal lainnya yang menghambat aktivitas ekonomi.

Pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nias Selatan mengalami perlambatan signifikan, yaitu hanya mencapai 0,61 persen, sebagai dampak langsung dari pandemi Covid-19 yang melanda secara global. Namun demikian, upaya pemulihan ekonomi mulai menunjukkan hasil pada tahun 2021 dengan pertumbuhan mencapai 2,02 persen, kemudian meningkat menjadi 3,08 persen pada tahun 2022. Tren pemulihan ini terus berlanjut pada tahun 2023 dengan capaian sebesar 3,65 persen, dan mencapai 3,82 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan proses pemulihan ekonomi yang berlangsung secara bertahap dan stabil, yang didorong oleh berbagai intervensi kebijakan pemerintah, peningkatan investasi, serta membaiknya aktivitas perekonomian masyarakat. Perbaikan kinerja ekonomi tersebut juga berdampak positif terhadap indikator sosial lainnya, seperti penurunan tingkat pengangguran terbuka, perbaikan meskipun terbatas dalam indikator kemiskinan, serta turut

memberikan kontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berikut grafik laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020-2024.

Grafik 2.7
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024

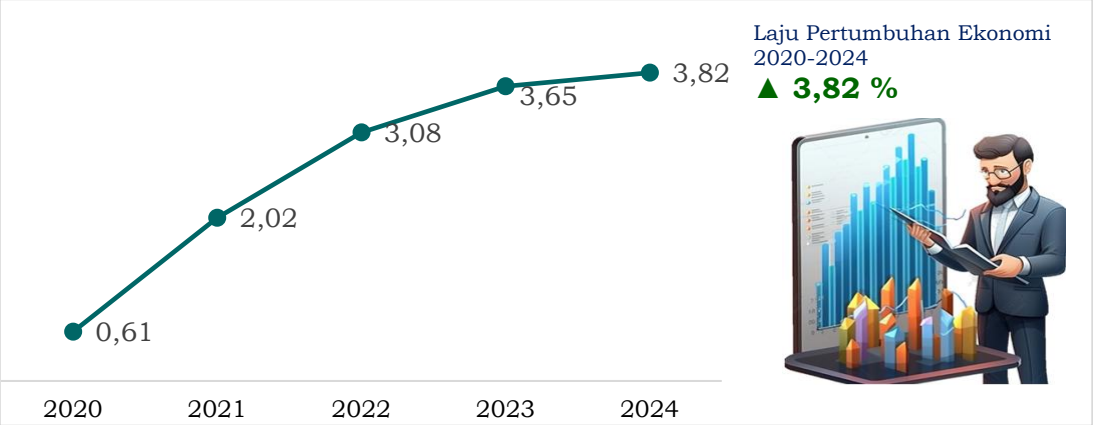

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Selatan

Untuk memahami dampak pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nias Selatan, perlu dilakukan perbandingan dengan pertumbuhan ekonomi di tingkat Provinsi dan Nasional. Perbandingan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana perkembangan ekonomi di Nias Selatan sejalan dengan tren regional dan nasional. Berikut grafik Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Nias Selatan selama tahun 2020-2024.

Grafik 2.8
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024

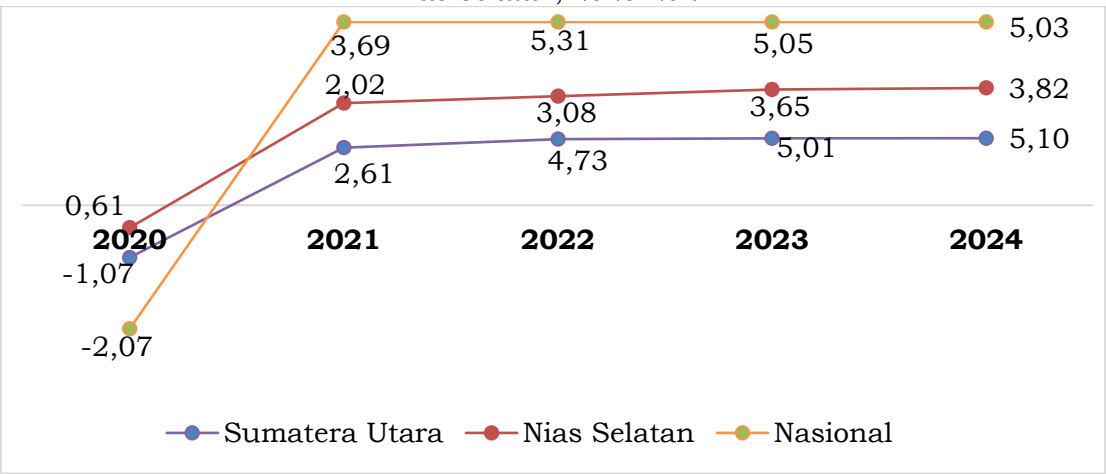

Sumber: Badan Pusat Statistik, (data diolah)

Berdasarkan grafik di atas, Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Provinsi Sumatera Utara mengalami kontraksi pada tahun 2020, masing-masing sebesar -2,07 persen dan -1,07 persen. Sementara itu, Kabupaten Nias Selatan tetap mencatat pertumbuhan positif sebesar 0,61 persen, menunjukkan ketahanan

ekonomi daerah di tengah tekanan pandemi. Pada tahun 2021, terjadi pemulihan dengan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 3,69 persen, Provinsi Sumatera Utara 2,61 persen, dan Kabupaten Nias Selatan 2,02 persen. Hingga tahun 2024, ekonomi nasional stabil di sekitar 5 persen, Provinsi Sumatera Utara tumbuh 5,10 persen, dan Kabupaten Nias Selatan mencapai 3,82 persen. Meskipun pertumbuhan ekonomi Nias Selatan lebih rendah dibandingkan tingkat nasional dan provinsi, tren positif yang berkelanjutan mencerminkan pemulihan yang stabil serta potensi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di masa mendatang.

2.2.1.2 Tingkat Kemiskinan

Secara umum, kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kondisi ketidakmampuan yang dimaksud dilihat dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran).

Beberapa indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kemiskinan adalah jumlah penduduk miskin, garis kemiskinan, persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Penduduk miskin dapat dilihat dari jumlah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan (GK). Berikut Perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Nias Selatan dari tahun 2020-2024.

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	53,88	55,16	54,16	54,29	54,48
2	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	312.453	329.308	350.452	379.929	406.429
3	Persentase Penduduk Miskin (%)	16,71	16,92	16,48	16,39	16,32
4	Indeks Kedalaman Kemiskinan (%)	2,82	2,38	2,71	3,04	2,62
5	Indeks Keparahan Kemiskinan (%)	0,76	0,52	0,71	0,85	0,60

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Selatan, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Nias Selatan selama lima tahun terakhir relatif stagnan, meskipun terjadi sedikit penurunan persentase penduduk miskin. Pada tahun 2021, persentase penduduk miskin sempat meningkat menjadi 16,92 persen dari 16,71 persen pada tahun 2020, sebelum mengalami penurunan bertahap hingga mencapai 16,32 persen pada tahun 2024. Meskipun demikian, jumlah penduduk miskin cenderung fluktuatif, namun tetap berada di kisaran 54 ribu orang.

Sementara itu, garis kemiskinan terus meningkat setiap tahun dari Rp 312.453 pada tahun 2020 menjadi Rp 406.429 pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya kebutuhan minimum untuk hidup layak, yang dipengaruhi oleh inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Selain itu, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan yang berfluktuasi menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat miskin masih belum stabil dan tetap rentan terhadap perubahan ekonomi.

Kondisi ini juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya inklusif, karena belum mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan perlu diperkuat melalui pemerataan akses terhadap peluang ekonomi dan lapangan kerja.

2.2.1.3 PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita adalah pembagian antara PDRB suatu daerah dengan jumlah orang yang tinggal di daerah tersebut. PDRB Per Kapita mencerminkan pendapatan rata-rata setiap orang pada tahun tersebut, tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut, dan dapat memprediksi tingkat pendapatan masyarakat di daerah tersebut di masa depan.

PDRB per kapita juga diasumsikan sebagai pendapatan per kapita, sehingga setiap peningkatan perkembangan daya beli penduduk, dianggap setara dengan peningkatan pendapatan per kapita yang telah disesuaikan dengan inflasi.

PDRB per Kapita ADHB mengalami peningkatan tahunan dengan laju pertumbuhan yang bervariasi, dari 3,55 persen pada tahun 2020 menjadi 3,82 persen pada tahun 2024. Sementara itu, PDRB per Kapita ADHK sempat mengalami kontraksi sebesar -10,73 persen pada 2020, tetapi pulih secara bertahap dengan pertumbuhan positif sejak 2021. Laju pertumbuhannya meningkat dari 0,45 persen pada tahun 2021 menjadi 1,85 persen pada tahun 2024, mencerminkan pemulihan ekonomi yang stabil setelah dampak negatif pada tahun 2020. Peningkatan PDRB per kapita ini juga berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat dan menjadi salah satu komponen penting dalam pembentukan IPM, khususnya pada dimensi standar hidup layak. Untuk lebih jelasnya, berikut tabel terkait PDRB per Kapita Kabupaten Nias Selatan ADHB dan ADHK 2010 tahun 2020-2024

Tabel 2.5
PDRB per Kapita Kabupaten Nias Selatan ADHB dan ADHK 2010, 2020-2024(Ribu Rupiah)

Tahun	ADHB		ADHK	
	Nilai	Pertumbuhan	Nilai	Pertumbuhan
2020	19.871,43	3,55	11.779,39	-10,73
2021	20.265,92	2.02	11.832,15	0,45
2022	21.447,80	3,08	11.951,80	1,00
2023	22.415,96	3,65	12.101,51	1,24
2024	23.408,87	3,82	12.325,28	1,85

Sumber: Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka, 2025 (data diolah)

2.2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tenaga kerja memiliki peran krusial dalam pembangunan ekonomi dan sosial suatu daerah. Tingginya tingkat pengangguran terbuka di daerah dapat berdampak pada perekonomian, sosial, dan kemiskinan. Ketimpangan sosial semakin meningkat karena hanya sebagian masyarakat yang memiliki akses ke pekerjaan dan penghasilan yang layak. Daya beli masyarakat juga menurun, menghambat konsumsi dan pertumbuhan ekonomi.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Nias Selatan selama periode 2020–2024 menunjukkan tren penurunan yang konsisten. Pada tahun 2020, TPT tercatat sebesar 4,15 persen dan menurun bertahap menjadi 3,91 persen pada 2021, 3,69 persen pada 2022, 3,48 persen pada 2023, hingga mencapai 3,03 persen pada 2024. Penurunan ini mengindikasikan perbaikan kondisi ketenagakerjaan yang ditopang oleh pertumbuhan sektor-sektor produktif, peningkatan kesempatan kerja, serta implementasi program pengembangan tenaga kerja dan pemberdayaan usaha lokal. Selain itu, capaian ini turut mendukung pengurangan angka kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat, dan menjadi indikator positif atas efektivitas kebijakan pembangunan ekonomi daerah. Berikut grafik tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020-2024.

Grafik 2.9
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024

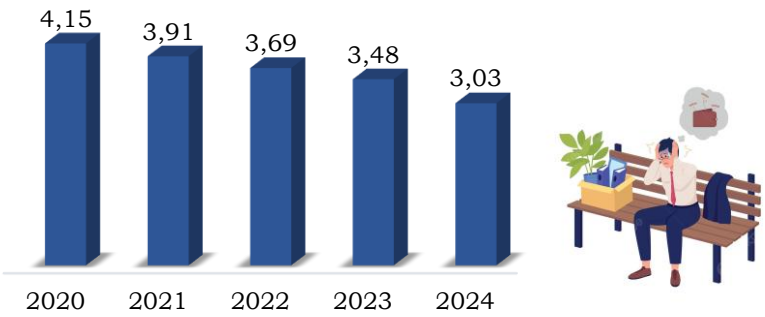

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Selatan

2.2.1.5 Indeks Gini

Indeks Gini adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan dalam suatu daerah. Indikator ini berada di angka antara 0 dan 1. Dimana 0 menunjukkan kesetaraan yang sempurna (setiap orang memiliki pendapatan yang sama) dan 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna (satu orang memiliki semua pendapatan). Dengan kata lain, semakin tinggi nilai Indeks Gini, semakin tinggi tingkat ketimpangan pendapatan di suatu daerah.

Perkembangan indeks gini di Kabupaten Nias Selatan menunjukkan tren fluktuatif selama periode tahun 2020-2024. Pada tahun 2020, indeks gini tercatat sebesar 0,286, kemudian mengalami penurunan signifikan menjadi 0,241 pada 2021 dan mencapai titik terendah di 0,223 pada 2022. Setelah itu, rasio ini kembali meningkat menjadi 0,241 pada 2023 dan naik sedikit menjadi 0,247 pada 2024. Secara keseluruhan, penurunan indeks gini dari 2020 hingga 2022 mencerminkan adanya perbaikan dalam distribusi pendapatan, yang disebabkan oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.

Grafik 2.10
Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024

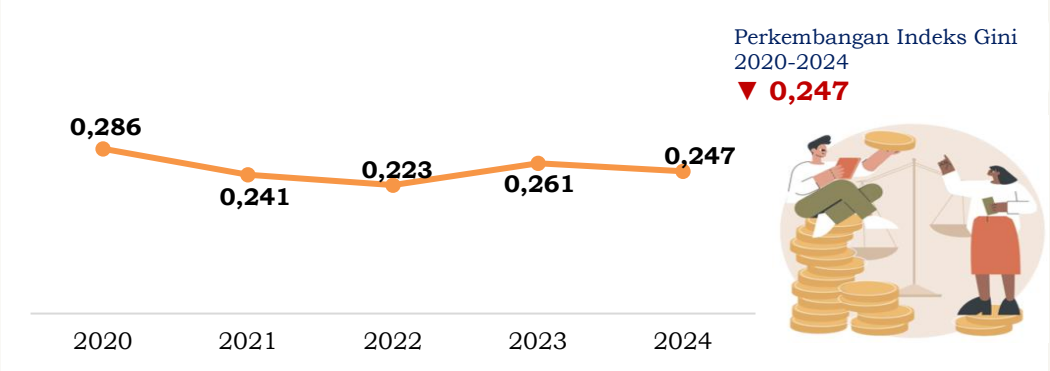

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Selatan

Berdasarkan grafik perkembangan Indeks Gini Kabupaten Nias Selatan tahun 2020–2024 diatas, nilai indeks gini pada tahun 2020 tercatat sebesar 0,286, kemudian menurun menjadi 0,241 pada tahun 2021, dan mencapai titik terendah sebesar 0,223 pada tahun 2022. Selanjutnya, pada tahun 2023 indeks gini meningkat menjadi 0,261, sebelum kembali menurun menjadi 0,247 pada tahun 2024. Pola fluktuasi ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat ketimpangan masih relatif rendah, terdapat indikasi potensi kesenjangan yang perlu diantisipasi melalui kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, terutama terkait penguatan

pertumbuhan ekonomi inklusif, penurunan kemiskinan, dan peningkatan akses terhadap pekerjaan produktif.

2.2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan, dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi utama yaitu: 1) umur panjang dan hidup sehat, 2) pengetahuan dan 3) standar hidup layak

Pembangunan manusia di Nias Selatan terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2020, status pembangunan manusia Nias Selatan sudah berada di level "sedang". Selama 2020–2024, IPM Nias Selatan rata-rata meningkat sebesar 1,21 persen per tahun, dari 62,78 pada tahun 2020 menjadi 65,87 pada tahun 2024. Kenaikan IPM selaras dengan membaiknya indikator ekonomi lainnya seperti peningkatan PDRB per kapita, penurunan tingkat pengangguran, serta tren positif dalam pengurangan ketimpangan pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas hidup masyarakat di Nias Selatan berjalan seiring dengan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Berikut Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Nias Selatan tahun 2020-2024.

Grafik 2.11
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024

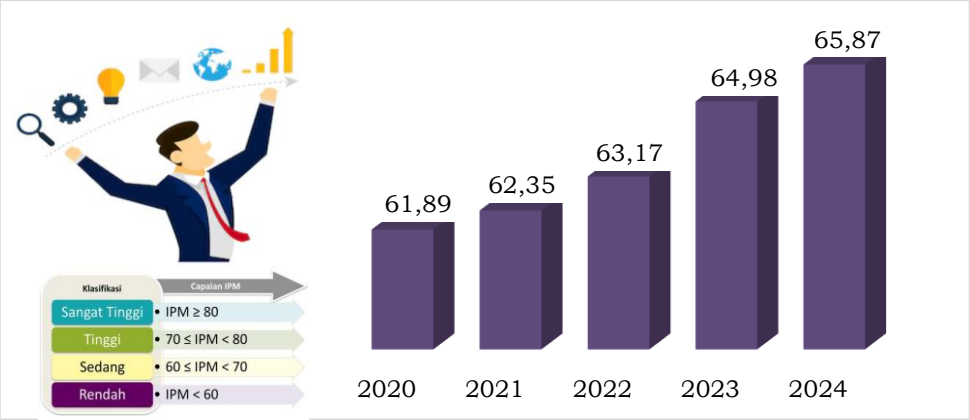

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Selatan

Selanjutnya perbandingan IPM Nias Selatan dengan Provinsi Sumatera Utara dan nasional memperlihatkan kesenjangan yang cukup lebar. Pada tahun 2024, IPM Nias Selatan baru mencapai 65,87, sementara Sumatera Utara sudah berada di angka 75,76 dan nasional sebesar 74,20. Artinya, terdapat selisih sekitar 9,89 poin dengan provinsi dan 8,33 poin dengan capaian nasional. Perbedaan ini

mencerminkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Nias Selatan masih tertinggal signifikan dibandingkan dengan capaian rata-rata provinsi maupun nasional. Meskipun demikian, tren pertumbuhan IPM Nias Selatan dalam lima tahun terakhir relatif lebih cepat, sehingga menunjukkan adanya potensi untuk memperkecil kesenjangan tersebut apabila peningkatan akses pendidikan, pelayanan kesehatan, serta daya beli masyarakat terus diperkuat secara konsisten dan berkelanjutan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam grafik berikut.

Grafik 2.12
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Nias Selatan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional, 2020-2024

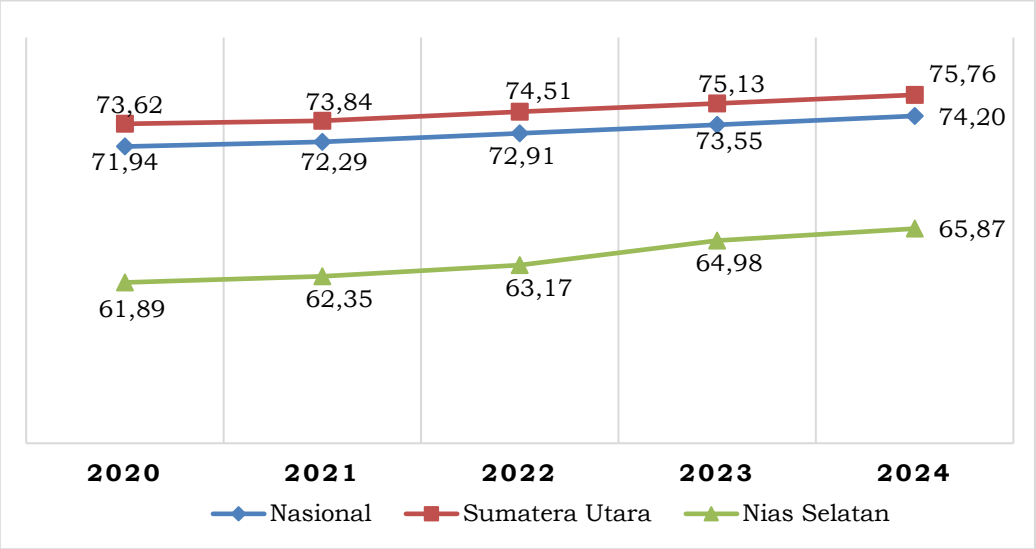

Sumber: Badan Pusat Statistik

2.2.2 Kesehatan Untuk Semua

Konsep "Kesehatan untuk Semua" menjadi salah satu prioritas utama untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif. Pemerintah daerah menargetkan peningkatan akses layanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan implementasi kebijakan yang tepat, visi "Kesehatan untuk Semua" dalam perencanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperpanjang usia harapan hidup, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

2.2.2.1 Indeks Kesehatan

Indeks kesehatan merupakan salah satu indikator strategis dalam mengukur kualitas pembangunan manusia, khususnya pada dimensi kesehatan masyarakat. Indeks ini tidak hanya mencerminkan derajat kesehatan individu, tetapi juga menunjukkan efektivitas sistem pelayanan kesehatan, ketersediaan

infrastruktur, serta perilaku hidup sehat masyarakat. Dalam kerangka pembangunan daerah, indeks kesehatan menjadi acuan penting untuk menilai sejauh mana intervensi kebijakan di bidang kesehatan mampu meningkatkan angka harapan hidup, menurunkan prevalensi penyakit, serta memperbaiki status gizi masyarakat. Dengan demikian, peningkatan indeks kesehatan di Kabupaten Nias Selatan akan berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing.

Indeks kesehatan Kabupaten Nias Selatan meningkat dari 76,47 pada tahun 2020 menjadi 77,95 pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan perbaikan kualitas layanan kesehatan, gizi, dan akses masyarakat, yang berdampak pada semakin tingginya usia harapan hidup. Peningkatan tersebut berkontribusi langsung terhadap capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sekaligus memperkuat indikator pembangunan lainnya seperti penurunan stunting, angka kematian ibu dan bayi, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja dan kualitas pendidikan. Dengan demikian, perbaikan indeks kesehatan menjadi fondasi penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Nias Selatan.

Grafik 2.13
Indeks Kesehatan Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024

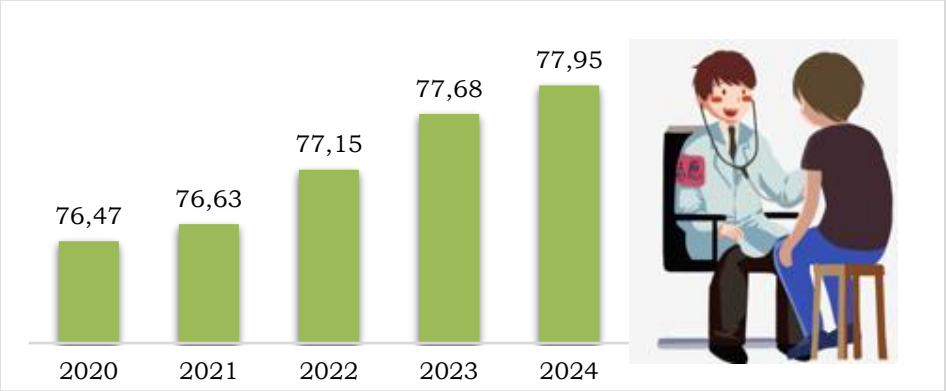

Sumber: Kabupaten Nias Selatan Dalam Angka, 2025 (data diolah)

2.2.2.2 Usia Harapan Hidup (UHH)

Usia Harapan Hidup (UHH) adalah rata-rata kesempatan atau waktu hidup yang tersisa. Usia harapan hidup bisa diartikan pula dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu. UHH dapat digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja daerah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dan derajat kesehatan. UHH juga menjadi tolok ukur seberapa baik taraf kesehatan yang dimiliki oleh suatu daerah.

Usia Harapan Hidup saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2024, UHH Kabupaten Nias Selatan meningkat sebesar 0,89 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,31 persen per tahun. Pada tahun 2020, UHH Kabupaten Nias Selatan sebesar 70,88 tahun dan pada tahun 2024 mencapai 71,77 tahun. UHH pada tahun 2024 meningkat 0,16 tahun (0,22 persen) dibanding tahun sebelumnya.

Grafik 2.14
Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup di Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024

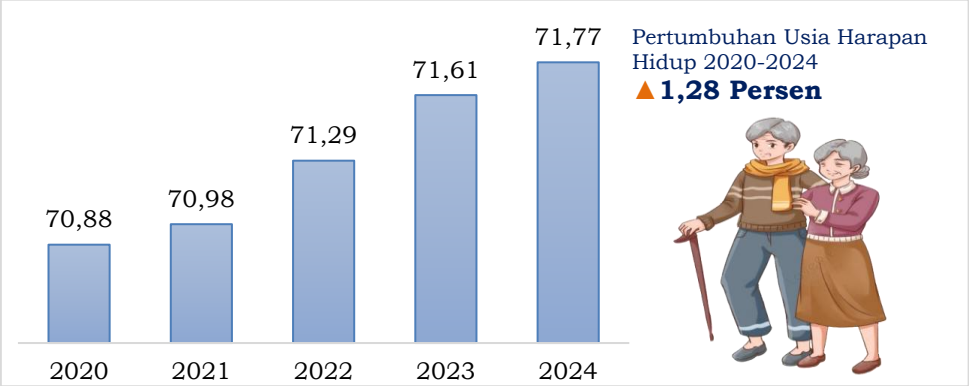

Sumber: Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka, 2025

Dari grafik tersebut diatas terlihat peningkatan angka usia harapan hidup, yang mencerminkan perbaikan kualitas hidup, khususnya dalam aspek layanan kesehatan dan gizi masyarakat, yang juga berkontribusi pada kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain itu, perbaikan ekonomi melalui peningkatan PDRB per kapita dan penurunan kemiskinan turut mendukung akses layanan dasar yang menunjang umur panjang dan hidup sehat.

2.2.2.3 Prevalensi *Stunting*

Prevalensi *Stunting* adalah persentase anak usia di bawah lima tahun (balita) yang mengalami gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis, terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan. Stunting ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibanding standar usianya, yang dapat berdampak pada perkembangan kognitif, produktivitas, dan kesehatan jangka panjang.

Prevalensi stunting menjadi indikator penting dalam menilai status gizi dan kesehatan masyarakat, serta keberhasilan program pembangunan di bidang kesehatan dan gizi. Prevalensi stunting di Kabupaten Nias Selatan menunjukkan fluktuasi dalam periode tahun 2020–2024. Pada tahun 2020, angka stunting tercatat sebesar 26,67 persen, namun meningkat tajam menjadi 34,40 persen

pada tahun 2021, yang mengindikasikan adanya permasalahan gizi atau memburuknya kondisi sosial-ekonomi. Pada tahun 2022, prevalensi stunting menurun menjadi 27,20 persen, mencerminkan dampak awal dari intervensi perbaikan gizi yang mulai dirasakan. Namun, pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi 31,80 persen, menunjukkan masih adanya tantangan dalam menjaga tren penurunan stunting. Tren kenaikan ini berlanjut pada tahun 2024 dengan prevalensi stunting yang mencapai 37,60 persen, mengindikasikan bahwa upaya penanggulangan *stunting* perlu diperkuat secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan, baik dari sisi intervensi gizi spesifik maupun sensitif.

Grafik 2.15
Prevalensi *Stunting* Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan, 2025

2.2.2.4 Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator penting pembangunan daerah yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak. AKI diukur per 100.000 kelahiran hidup dan umumnya disebabkan oleh perdarahan, eklampsia, infeksi, atau komplikasi persalinan, sedangkan AKB diukur per 1.000 kelahiran hidup dan sering dipengaruhi oleh prematuritas, berat badan lahir rendah, asfiksia, infeksi, dan gizi buruk. Tingginya AKI dan AKB menunjukkan tantangan dalam akses layanan kesehatan dan pemerataan fasilitas. Penurunan keduanya menjadi prioritas pembangunan daerah guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung pencapaian target SDGs di Kabupaten Nias Selatan.

Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Nias Selatan periode 2020–2024 menunjukkan tren yang fluktuatif. AKI pada 2020 tercatat sebesar 126,9 per 100.000 kelahiran hidup dan menurun menjadi 94,4 pada 2021. Data 2022 tidak tersedia, namun pada 2023 terjadi penurunan signifikan menjadi 27,5 sebelum kembali meningkat menjadi 67,7

pada 2024. Sementara itu, AKB pada 2020 sebesar 1,3 per 1.000 kelahiran hidup, melonjak menjadi 6,4 pada 2021, sedikit menurun ke 6,2 pada 2022, lalu turun tajam menjadi 1,7 pada 2023, dan kembali naik menjadi 3,2 pada 2024.

Meskipun penurunan di beberapa tahun mencerminkan keberhasilan intervensi kesehatan ibu dan anak, kenaikan kembali pada tahun-tahun tertentu mengindikasikan perlunya penguatan kebijakan berkelanjutan, termasuk peningkatan kualitas layanan kesehatan, pemerataan tenaga medis, edukasi kesehatan ibu, serta perbaikan gizi dan lingkungan, guna mendukung pencapaian target SDGs dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Nias Selatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Ibu Hamil	8.914	7.750	8.283	11.120	11.044
Jumlah Kematian Ibu	7	5	-	3	6
Jumlah Kelahiran Hidup	5.514	5.295	5.295	10.910	8.891
Jumlah Kematian Bayi (0-11 bulan)	7	34	33	19	28
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup	126,9	94,4	-	27,5	67,7
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup	1,3	6,4	6,2	1,7	3,2

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan, 2025

2.2.2.5 Angka Tuberkulosis (TBC)

Tuberkulosis (TBC) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium tuberculosis*, yang umumnya menyerang paru-paru namun dapat juga mengenai organ tubuh lain seperti kelenjar getah bening, tulang, selaput otak, dan ginjal. Penularannya terjadi melalui udara ketika penderita TBC aktif batuk, bersin, atau berbicara, sehingga menghasilkan droplet yang mengandung kuman. TBC merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat global dengan beban penyakit yang tinggi, yang dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup, produktivitas, bahkan kematian apabila tidak ditangani dengan tepat.

Data penanggulangan Tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Nias Selatan menunjukkan peningkatan jumlah terduga yang signifikan, dari 193 orang pada tahun 2020 menjadi 3.032 orang pada tahun 2024, mencerminkan intensifikasi skrining dan perluasan akses deteksi dini. Jumlah pasien terkonfirmasi meningkat dari 87 menjadi 472 orang pada periode yang sama, selaras dengan peningkatan pemeriksaan kasus terduga. Pasien yang mendapatkan pengobatan juga bertambah dari 66 menjadi 498 orang, dengan capaian 2024 sedikit melebihi

jumlah pasien terkonfirmasi, kemungkinan akibat *carry over* kasus atau perbedaan waktu pencatatan. Tren ini menunjukkan penguatan program pengendalian TBC, namun tetap memerlukan penguatan strategi pencegahan, peningkatan kualitas diagnosis, dan pemantauan ketuntasan terapi untuk mendukung target eliminasi TBC sesuai kebijakan nasional dan global.

Tabel 2.7
Cakupan Penanggulangan Tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Terduga	193	240	341	1.028	3.032
Jumlah Pasien	87	125	211	313	472
Jumlah Pasien yang diobati	66	117	260	366	498

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan, 2025

2.2.2.6 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah persentase penduduk yang telah terdaftar sebagai peserta JKN—baik melalui BPJS Kesehatan maupun skema lainnya dibandingkan dengan total jumlah penduduk di suatu wilayah. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Nias Selatan mengalami peningkatan yang konsisten dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2021, cakupan JKN tercatat sebesar 52%, kemudian meningkat menjadi 66% pada tahun 2022, 83,95% pada tahun 2023, dan mencapai 91% pada tahun 2024. Peningkatan signifikan pada periode 2022–2024 tidak hanya mencerminkan efektivitas kebijakan nasional, tetapi juga menunjukkan peran aktif pemerintah daerah dalam memperluas kepesertaan. Hal ini ditempuh melalui optimalisasi skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang bersumber dari APBN maupun APBD, penetapan kebijakan *Universal Health Coverage (UHC)* tingkat daerah, serta intensifikasi kerja sama lintas sektor untuk memperbarui data kependudukan dan meminimalkan penduduk yang belum terdaftar.

Grafik 2.16
Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024

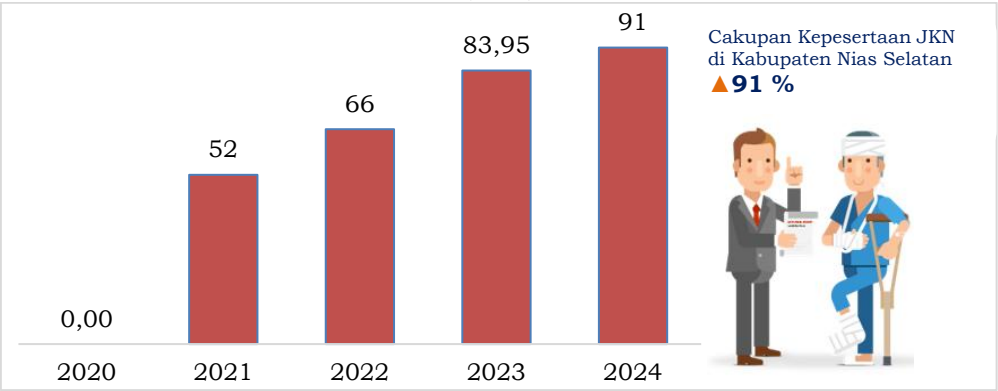

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan, 2025

Peningkatan cakupan JKN ini memberikan implikasi positif terhadap indikator kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan semakin banyak penduduk yang memiliki akses pembiayaan kesehatan, risiko *catastrophic health expenditure* dapat ditekan, sehingga membantu mengurangi kerentanan ekonomi rumah tangga dan berpotensi menurunkan angka kemiskinan. Selain itu, perlindungan kesehatan yang lebih merata mendorong peningkatan Umur Harapan Hidup (UHH) dan berkontribusi pada kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya pada dimensi kesehatan.

Jika tren positif ini berlanjut, Kabupaten Nias Selatan berpeluang mencapai target *Universal Health Coverage* (UHC) sebesar 95% pada tahun 2025. Hal ini akan memperkuat fondasi pembangunan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan, serta menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi daerah.

2.2.2.7 Fasilitas Kesehatan

Fasilitas Kesehatan dan tenaga kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Fasilitas kesehatan menyediakan layanan medis mulai dari pencegahan, diagnosis, pengobatan, hingga rehabilitasi bagi pasien. Selain itu, fasilitas kesehatan juga berperan sebagai pusat edukasi dengan memberikan penyuluhan mengenai kesehatan, seperti pola hidup sehat, imunisasi, dan pencegahan penyakit menular. Berikut rasio fasilitas kesehatan terhadap 1.000 penduduk di Kabupaten Nias Selatan 2020-2024:

Tabel 2.8
Rasio Fasilitas Kesehatan terhadap 1.000 penduduk Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Rumah Sakit	1	1	2	3	3
	Jumlah Penduduk	314.395	366.163	373.674	382.539	389.957
	Rasio per 1000 Penduduk	**0,003**	**0,003**	**0,005**	**0,008**	**0,008**
2	Jumlah Puskesmas	36	36	36	36	36
	Jumlah Penduduk	314.395	366.163	373.674	382.539	389.957
	Rasio per 1000 Penduduk	**0,115**	**0,098**	**0,096**	**0,094**	**0,092**
3	Jumlah Pustu	59	66	67	67	68
	Jumlah Penduduk	314.395	366.163	373.674	382.539	389.957
	Rasio Per 1000 Penduduk	**0,188**	**0,180**	**0,179**	**0,175**	**0,174**

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan, 2025

2.2.2.8 Ketersediaan Dokter dan Tenaga Kesehatan

Ketersediaan dokter dan tenaga kesehatan merupakan faktor kunci dalam pembangunan kesehatan suatu daerah. Semakin tinggi jumlah dan kualitas

tenaga kesehatan yang tersedia, semakin baik pula pelayanan kesehatan yang dapat diberikan kepada masyarakat. Dokter dan tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam pencegahan, pengobatan, rehabilitasi, serta edukasi kesehatan, yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut jumlah dokter dan tenaga kesehatan terhadap 1000 penduduk di Kabupaten Nias Selatan 2020-2024.

Tabel 2.9
Jumlah Dokter dan Tenaga Kesehatan terhadap 1.000 penduduk Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Dokter Umum	43	50	50	53	54
	Jumlah Penduduk	314.395	366.163	373.674	382.539	389.957
	Rasio per 1000 penduduk	**0,14**	**0,14**	**0,13**	**0,14**	**0,14**
2	Jumlah Dokter Gigi	5	5	9	9	9
	Jumlah Penduduk	314.395	366.163	373.674	382.539	389.957
	Rasio	**0,02**	**0,01**	**0,02**	**0,02**	**0,02**
3	Jumlah Dokter Spesialis	3	3	2	4	5
	Jumlah Penduduk	314.395	366.163	373.674	382.539	389.957
	Rasio per 1000 penduduk	**0,010**	**0,008**	**0,005**	**0,010**	**0,013**
4	Jumlah Tenaga Kesehatan	1.911	2.185	1.685	1.612	2.278
	Jumlah Penduduk	314.395	366.163	373.674	382.539	389.957
	Rasio per 1000 penduduk	6,08	5,97	4,51	4,21	5,84

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan, 2025

2.2.3 Pendidikan Kualitas yang Merata

Pendidikan berkualitas yang merata merupakan salah satu kunci utama dalam pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan akses yang setara terhadap pendidikan yang baik, setiap individu memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka, meningkatkan keterampilan, dan berkontribusi secara aktif dalam masyarakat serta perekonomian. Pendidikan yang merata juga membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, mempercepat inovasi, serta menciptakan tenaga kerja yang lebih kompetitif.

2.2.3.1 Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat capaian pembangunan manusia pada dimensi pendidikan, serta menjadi salah satu pilar utama dalam pembentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Secara metodologis, indeks ini dibangun dari dua indikator utama, yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang merefleksikan akumulasi lama pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun ke atas, dan Harapan Lama Sekolah (HLS) yang menggambarkan jumlah tahun pendidikan

formal yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak usia 7 tahun berdasarkan kondisi pendidikan saat ini.

Perkembangan Indeks Pendidikan di Kabupaten Nias Selatan pada periode 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan yang stabil dan berkesinambungan. Nilai indeks pada tahun 2020 tercatat sebesar 53,47, kemudian meningkat menjadi 54,28 pada 2021, 55,43 pada 2022, 57,10 pada 2023, dan mencapai capaian tertinggi sebesar 57,62 pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan kemajuan signifikan dalam dimensi pendidikan, yang dapat diatribusikan pada meningkatnya partisipasi sekolah, membaiknya mutu pembelajaran, serta pemerataan distribusi sarana dan prasarana pendidikan di berbagai wilayah. Kenaikan Indeks Pendidikan turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), karena pendidikan merupakan salah satu dari tiga dimensi utama pembentuk IPM selain Umur Harapan Hidup (UHH) dan Standar Hidup Layak. Perbaikan capaian pendidikan berpotensi memperkuat daya saing sumber daya manusia, memperluas peluang kerja, dan mendorong produktivitas, yang pada gilirannya berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Berikut grafik perkembangan Indeks Pendidikan Kabupaten Nias Selatan tahun 2020-2024.

Grafik 2.17
Indeks Pendidikan Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024

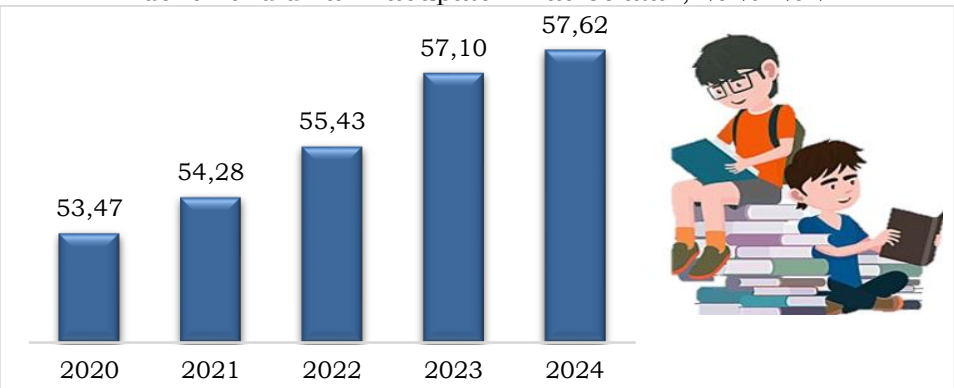

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Selatan, data diolah

2.2.3.2 Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. RLS dapat digunakan untuk mengetahui tingkat dan kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu daerah. Rata-rata lama sekolah (RLS) dipengaruhi oleh angka putus sekolah akibat ketidakmampuan membayar biaya pendidikan. Di samping itu masih terdapat beberapa faktor yang

menyebabkan anak putus sekolah, seperti faktor lingkungan, pemahaman atas pentingnya pendidikan, budaya, ketersediaan sarana/prasarana pendidikan dan lain-lain.

Selama periode tahun 2020-2024, RLS meningkat 2,76 persen per tahun. RLS pada 2024 meningkat 0,04 tahun (0,62 persen) dibanding tahun 2023, lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2023 yang sebesar 3,47 persen. Peningkatan RLS menunjukkan kemajuan dalam akses dan partisipasi pendidikan, yang secara tidak langsung berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan melalui peningkatan kapasitas dan produktivitas tenaga kerja. RLS juga merupakan salah satu komponen utama penyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sehingga peningkatannya mendorong perbaikan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Grafik 2.18
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024

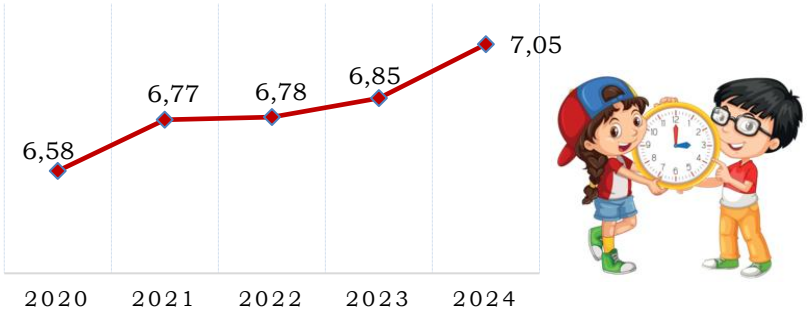

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

2.2.3.3 Harapan Lama Sekolah (HLS)

HLS didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Sebagai salah satu komponen utama dalam dimensi pendidikan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM), peningkatan HLS mencerminkan harapan partisipasi pendidikan masyarakat yang semakin baik. HLS yang lebih tinggi menunjukkan bahwa anak-anak usia sekolah diproyeksikan akan menempuh pendidikan lebih lama, yang tidak hanya berdampak positif terhadap peningkatan IPM, tetapi juga terhadap penurunan kemiskinan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Selama periode 2020 hingga 2024, HLS Nias Selatan rata-rata meningkat 1,38 persen per tahun, HLS tahun 2024 meningkat 0,14 tahun (1,10

persen) dibandingkan tahun 2023, lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2023 (1,48 persen).

Grafik 2.19
Perkembangan Tingkat Harapan Lama Sekolah Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024

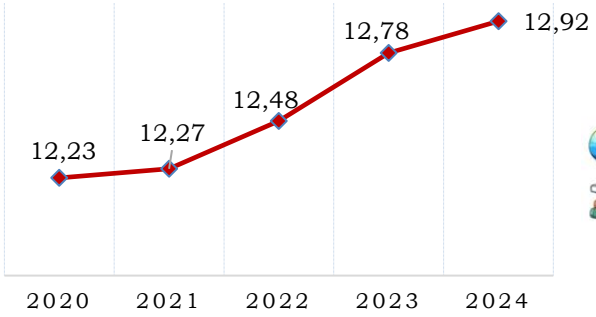

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

2.2.3.4 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai. Perhitungan APK yaitu jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dibagi jumlah penduduk kelompok usia sekolah dikali 100. Makin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan atau semakin banyak anak usia di luar kelompok usia sekolah tertentu bersekolah ditingkat pendidikan tertentu.

APK adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Nias Selatan dari Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.10
Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024

No.	Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK)				
		2020	2021	2022	2023	2024*
1	SD/MI	111,59	108,6	90,78	109,70	109,70
2	SMP/MTs	80,78	87,05	82,78	95,08	95,08
3	SMA/SMK/MA	85,29	87,19	86,62	85,74	85,74
4	Perguruan Tinggi	16,5	16,65	23,89	27,59	27,59

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Selatan, 2024 (data diolah)
*Data Sementara (Data Tahun 2023)

2.2.3.5 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara jumlah penduduk kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai. Semakin tinggi APM maka menunjukkan

semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang tertentu. Angka Partisipasi Murni (APM) menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Nias Selatan dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.11
Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024

No.	Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)				
		2020	2021	2022	2023	2024*
1	SD/MI	96,08	96,04	77,9	94,24	94,24
2	SMP/MTs	70,44	71,59	65,79	75,22	75,22
3	SMA/SMK/MA	66,63	66,6	66,62	56,94	56,94
4	Perguruan Tinggi	14,27	13,7	22,72	15,08	15,08

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Selatan, 2024 (data diolah)
*Data sementara (Data tahun 2023)

2.2.3.6 Angka Literasi dan Numerasi

Literasi dan numerasi merupakan kompetensi dasar yang menjadi prasyarat utama peningkatan kualitas sumber daya manusia. Literasi tidak hanya dipahami sebagai kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mencakup kemampuan memahami, mengolah, serta memanfaatkan informasi secara kritis. Sementara itu, numerasi tidak hanya terbatas pada keterampilan berhitung, melainkan juga kemampuan menganalisis, menafsirkan, dan menggunakan konsep matematika dalam penyelesaian masalah sehari-hari. Kedua aspek ini menjadi fondasi penting dalam meningkatkan daya saing masyarakat dan mendukung transformasi sosial-ekonomi daerah.

Capaian literasi dan numerasi di Kabupaten Nias Selatan pada periode 2020–2024 masih menghadapi tantangan yang cukup signifikan. Hal ini terlihat dari keterbatasan ketersediaan data pada awal periode, di mana capaian secara terukur baru tersedia pada tahun 2024 melalui hasil Asesmen Nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemantauan literasi dan numerasi sebelumnya belum terdokumentasi secara sistematis, sehingga tahun 2024 menjadi baseline penting dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pada tahun 2024, capaian literasi untuk jenjang SD tercatat sebesar 40,83, sementara untuk jenjang SMP sebesar 46,11. Adapun capaian numerasi berada pada angka 41,46 untuk SD dan 47,56 untuk SMP. Nilai ini masih relatif rendah dibandingkan rata-rata provinsi maupun nasional, sehingga menggambarkan perlunya upaya penguatan mutu pembelajaran dasar. Rendahnya capaian tersebut tidak terlepas dari keterbatasan sarana prasarana pendidikan, disparitas

kualitas antarwilayah, angka putus sekolah, serta keterbatasan tenaga pendidik berkualitas.

Tabel 2.12
Angka Literasi dan Numerasi Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Kemampuan Literasi SD	n/a	n/a	n/a	n/a	40,83
Kemampuan Literasi SMP	n/a	n/a	n/a	n/a	46,11
Kemampuan Numerasi SD	n/a	n/a	n/a	n/a	41,46
Kemampuan Numerasi SMP	n/a	n/a	n/a	n/a	47,56

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), 2025

Dengan tersedianya capaian literasi dan numerasi pada tahun 2024, Kabupaten Nias Selatan memiliki baseline awal untuk merumuskan target peningkatan kualitas pendidikan dasar pada periode RPJMD berikutnya. Data ini tidak hanya menjadi acuan evaluasi, tetapi juga landasan strategis dalam menyusun kebijakan peningkatan mutu pembelajaran, penguatan kompetensi guru, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, serta pengembangan gerakan literasi dan numerasi berbasis sekolah dan komunitas.

2.2.3.7 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat literasi suatu masyarakat, termasuk kemampuan membaca, menulis, memahami informasi, serta akses terhadap bahan bacaan dan fasilitas pendukung literasi. IPLM juga merupakan penilaian terhadap upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan perpustakaan.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) terdiri dari 7 komponen, yaitu Pemerataan Layanan Perpustakaan, Ketercukupan Koleksi, Ketercukupan Tenaga Perpustakaan, Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari, Jumlah Perpustakaan berstandar Nasional Perpustakaan (SNP), Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi, dan Anggota Perpustakaan.

Grafik 2.20
Perkembangan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024

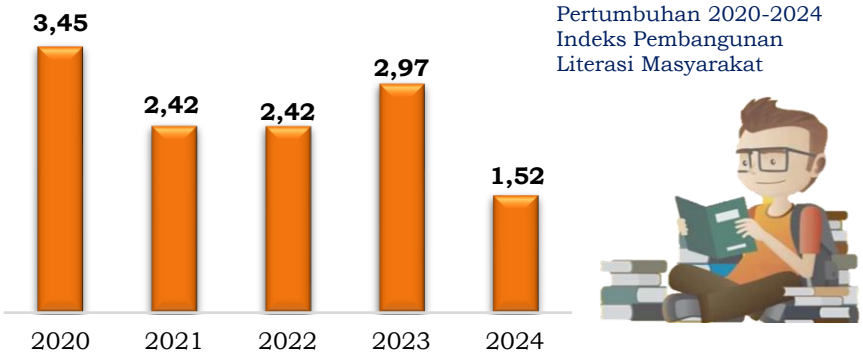

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Nias Selatan, 2025 (data diolah)

Grafik menunjukkan tren fluktuatif dalam Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Kabupaten Nias Selatan selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, indeks berada di angka tertinggi sebesar 3,45, namun mengalami penurunan menjadi 2,42 pada tahun 2021 dan tetap stagnan di angka yang sama pada 2022. Tahun 2023 menunjukkan peningkatan menjadi 2,97, tetapi pada 2024 terjadi penurunan drastis hingga 1,52. Penurunan terjadi dikarenakan bertambahnya jumlah penduduk yang tidak di iringi dengan penambahan judul dan koleksi buku di perpustakaan daerah.

2.2.4 Pelindungan Sosial Adaptif

Perlindungan Sosial Adaptif adalah pendekatan dalam kebijakan perlindungan sosial yang dirancang untuk merespons, mengantisipasi, dan beradaptasi terhadap guncangan atau perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Peran Perlindungan Sosial Adaptif penting dalam menciptakan stabilitas ekonomi, meningkatkan kesejahteraan pekerja, dan mengurangi kerentanan sosial.

Perlindungan Sosial Adaptif menekankan pentingnya jaminan sosial yang mampu merespons dan beradaptasi terhadap perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Salah satu komponen utamanya adalah jaminan ketenagakerjaan seperti jamsostek yang tidak hanya memberikan perlindungan saat terjadi risiko kerja, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi pekerja dan keluarganya terhadap guncangan.

2.2.4.1 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mengacu pada jumlah atau persentase pekerja yang terdaftar dan menerima manfaat dari program jaminan sosial tenaga kerja, baik di sektor formal maupun informal. Cakupan ini mencerminkan sejauh mana perlindungan tenaga kerja diberikan dalam bentuk jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Berikut Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Nias Selatan tahun 2020-2024.

Tabel 2.13
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah pekerja/buruh Jamsostek	11.465	12.897	21.986	2017	1940
Jumlah pekerja/buruh	16.242	19.689	24.564	2242	2156
Persentase (%)	70,59	65,50	89,50	89,96	89,98

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi UKM Kab. Nias Selatan, 2025

Berdasarkan data diatas dapat dilihat tahun 2022 mencatat lonjakan signifikan baik dari sisi jumlah maupun persentase cakupan, dengan 21.986 pekerja tercatat sebagai peserta Jamsostek dari total 24.564 pekerja (89,50%). Namun, pada tahun 2023 dan 2024 jumlah absolut pekerja dan peserta Jamsostek turun drastis. Meski demikian, rasio cakupan tetap tinggi di atas 89%, menunjukkan efisiensi dalam menjangkau hampir seluruh pekerja formal yang tercatat. Penurunan jumlah pekerja yang tercatat pada 2023–2024 kemungkinan besar mencerminkan perubahan basis data atau metode pencatatan, bukan penurunan faktual jumlah pekerja. Meski begitu, rasio cakupan yang tetap tinggi menunjukkan efektivitas sistem jaminan sosial ketenagakerjaan yang adaptif dan terintegrasi.

2.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Konsep "Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju" dalam pembangunan mencerminkan pendekatan holistik yang menggabungkan nilai-nilai keagamaan dan budaya dalam proses pembangunan. Pembangunan berbasis "Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju" mendorong kebijakan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan dengan menyeimbangkan aspek spiritual, sosial, dan teknologi.

2.2.5.1 Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana kerukunan umat beragama di suatu wilayah. IKUB digunakan sebagai tolak ukur untuk mengukur capaian program-program kerukunan. Indeks Kerukunan Umat Beragama memiliki tiga dimensi utama yakni: toleransi, kesetaraan, dan kerja sama.

Indeks Kerukunan Umat Beragama terdiri dari tiga dimensi utama, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Di Kabupaten Nias Selatan, kerukunan umat beragama telah terjalin dengan baik, tercermin dalam sikap saling menghargai, menghormati, dan bekerja sama dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini terlihat dari pelaksanaan peringatan hari besar keagamaan yang berlangsung khidmat serta adanya partisipasi lintas agama dalam berbagai kegiatan sosial dan budaya.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan telah membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai wadah strategis untuk memperkuat dialog antarumat beragama, menyelesaikan potensi konflik secara damai, serta

mendorong harmoni sosial. Dengan adanya FKUB dan komitmen bersama, kerukunan umat beragama di daerah ini terus dipelihara, menciptakan lingkungan yang damai, inklusif, dan kondusif bagi pembangunan daerah.

Grafik 2.21
Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024

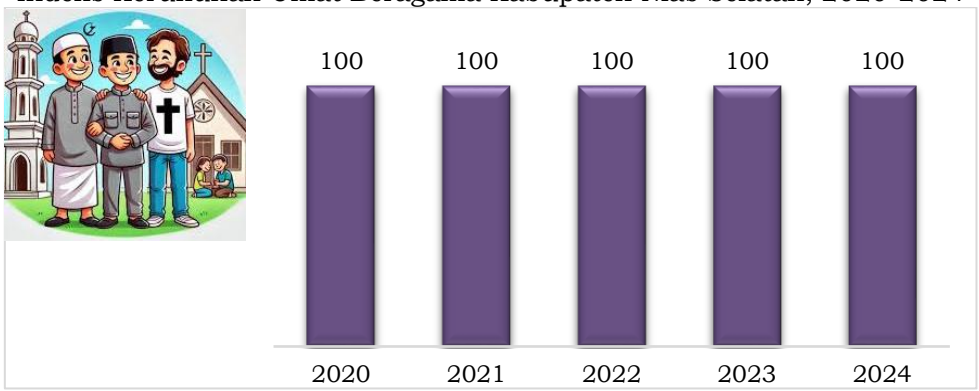

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan, 2025

2.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif

Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif merupakan tiga pilar penting dalam pembangunan sosial yang berkelanjutan. Keluarga berkualitas mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter, mendukung pembangunan sosial dan ekonomi. Kesetaraan gender memastikan akses yang adil bagi laki-laki dan perempuan di berbagai bidang, meningkatkan partisipasi dan produktivitas. Masyarakat inklusif menciptakan lingkungan yang ramah bagi semua, termasuk kelompok rentan, mendorong keadilan dan kesetaraan. Ketiga aspek ini saling berhubungan dan menjadi kunci dalam menciptakan masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera dalam pembangunan daerah.

2.2.6.1 Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) mengukur sejauh mana hak-hak anak terpenuhi, termasuk aspek kesehatan, pendidikan, perlindungan dari kekerasan, serta akses terhadap layanan dasar. Indeks ini mencerminkan komitmen pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Dimulai tahun 2021, IPA dihitung tidak hanya pada level nasional dan provinsi, namun juga hingga tingkat kabupaten/kota. Penghitungan tingkat kabupaten/kota dilakukan dengan metode statistik *Small Area Estimation (SME)* untuk mendapatkan estimasi nilai indikator hingga level kabupaten/kota karena adanya keterbatasan ketersediaan data tingkat kabupaten/kota. Sehingga capaian

di tingkat kabupaten baru tersedia sejak tahun 2022. Capaian indeks perlindungan anak Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2022 adalah 41,45 poin, sedikit meningkat 0,62 poin di tahun 2023 menjadi 42,07 poin. Berikut grafik indeks perlindungan anak di Kabupaten Nias Selatan tahun 2020-2024.

Grafik 2.22
Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024

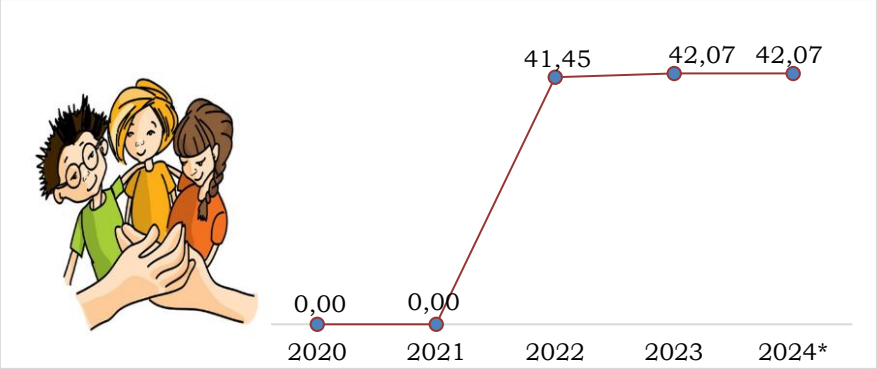

Sumber : Indeks Perlindungan Anak, 2020-2024 (data diolah)
*Data sementara (Data tahun 2023)

2.2.6.2 Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu ukuran tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender. IPG adalah ukuran pembangunan manusia berbasis gender dilihat dari tiga dimensi capaian dasar manusia yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Nias Selatan menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, indeks pembangunan gender tercatat sebesar 87,58 dan terus meningkat hingga mencapai 89,84 pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya kemajuan dalam kesetaraan gender, yang disebabkan oleh meningkatnya akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, dan partisipasi ekonomi.

Grafik 2.23
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024

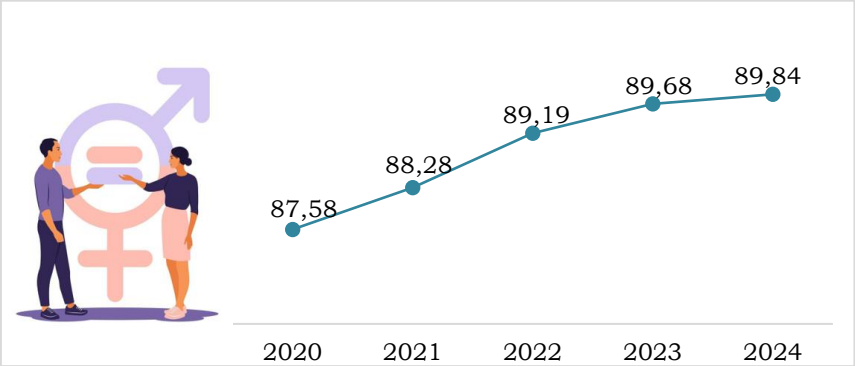

Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah)

2.2.6.3 Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana perempuan dan laki-laki memiliki akses yang setara terhadap kesempatan ekonomi dan politik serta partisipasi dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang kehidupan. Semakin tinggi angka IDG, semakin tinggi tingkat pemberdayaan dan kesetaraan gender di wilayah tersebut.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Nias Selatan menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam lima tahun terakhir, dari 66,70 pada tahun 2020 menjadi 69,56 pada tahun 2024. Lonjakan paling tajam terjadi antara tahun 2021 dan 2022, ketika indeks naik drastis dari 67,04 menjadi 69,03. Kenaikan ini mencerminkan kemajuan pesat dalam peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan, akses terhadap sumber daya ekonomi, dan keterwakilan politik. Namun, setelah 2022, laju peningkatannya mulai melambat, dengan hanya sedikit pertumbuhan hingga 2024. Ini mengindikasikan adanya hambatan struktural yang mulai mengurangi kemajuan, seperti ketimpangan akses, norma sosial yang belum sepenuhnya inklusif, atau kurangnya keberlanjutan program pemberdayaan.

Grafik 2.24
Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024

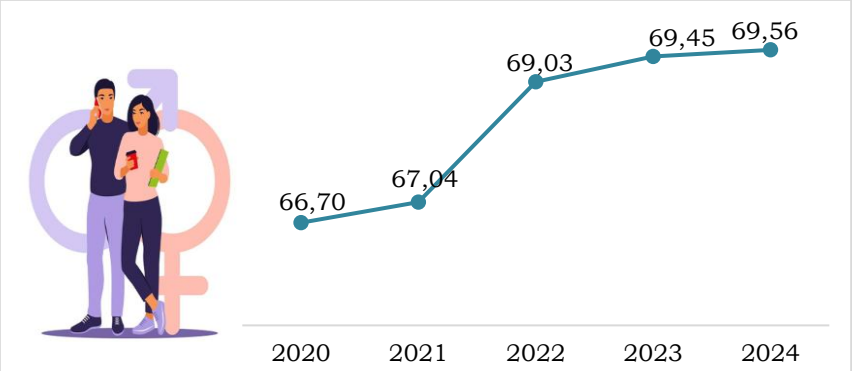

Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah)

2.2.6.4 Indeks Ketimpangan Gender

Salah satu indikator yang dapat melihat kesenjangan gender adalah Indeks Ketimpangan Gender (IKG). IKG merujuk pada metodologi yang digunakan oleh *United Nation Development Programme (UNDP)* dalam menyusun *Gender Inequality Index (GII)* 2010 dengan menyesuaikan data yang tersedia. IKG hanya berfokus mengukur kesenjangan pencapaian antara perempuan dan laki-laki dalam tiga dimensi yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Nias Selatan mengalami fluktuasi selama tahun 2020–2024, dengan lonjakan tajam pada 2024. Setelah sempat menurun ke titik terendah 0,565 pada 2023, IKG melonjak menjadi 0,594 di 2024, angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Karena IKG yang lebih tinggi mencerminkan ketimpangan yang semakin besar, tren ini menjadi peringatan serius. Meski indikator lain menunjukkan kemajuan, kesenjangan nyata justru memburuk.

Grafik 2.25
Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024

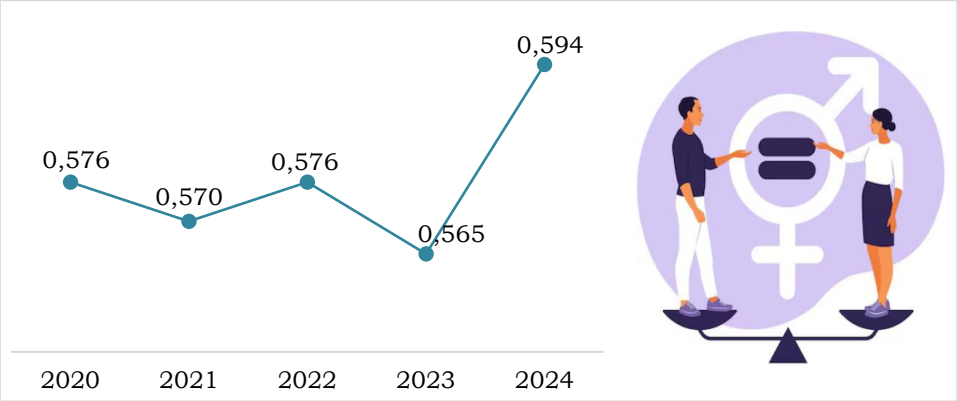

Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah)

2.3 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah mencerminkan kemampuan suatu wilayah dalam menarik investasi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta bersaing dengan daerah lain dalam berbagai sektor. Daya saing daerah berperan dalam pembangunan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan produktivitas. Selain itu, daya saing yang tinggi mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas SDM, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan kesejahteraan masyarakat.

2.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) merujuk pada kemampuan tenaga kerja dalam suatu daerah atau negara untuk bersaing di tingkat nasional maupun global. SDM yang kompetitif menjadi faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

2.3.1.1 Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia dibawah 15

tahun/penduduk muda dan penduduk usia 65 tahun atau lebih/penduduk tua) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15 sampai 64 tahun). Rasio Ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non produktif.

Semakin tinggi persentase Rasio Ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk non produktif. Sebaliknya, jika semakin rendah persentase Rasio Ketergantungan, maka semakin rendah pula beban penduduk produktif untuk menanggung penduduk usia non produktif.

Pada tahun 2020, rasio ketergantungan berada di angka 45,94, yang kemudian mengalami sedikit peningkatan menjadi 45,96 pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan signifikan hingga 44,81, yang mengindikasikan lebih sedikitnya jumlah penduduk tidak produktif dibandingkan penduduk produktif. Tren ini kembali berubah pada tahun 2023 dengan peningkatan rasio ketergantungan menjadi 46,04, dan terus naik hingga 46,45 pada tahun 2024. Artinya rasio ketergantungan mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir, dengan tren penurunan di tahun 2022 tetapi meningkat kembali pada tahun 2023 dan 2024. Peningkatan rasio ketergantungan di periode ini mengindikasikan adanya peningkatan jumlah penduduk usia tidak produktif, yang berpotensi memberikan beban lebih besar bagi penduduk usia produktif dalam menopang kebutuhan ekonomi.

Grafik 2.26
Rasio Ketergantungan Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024

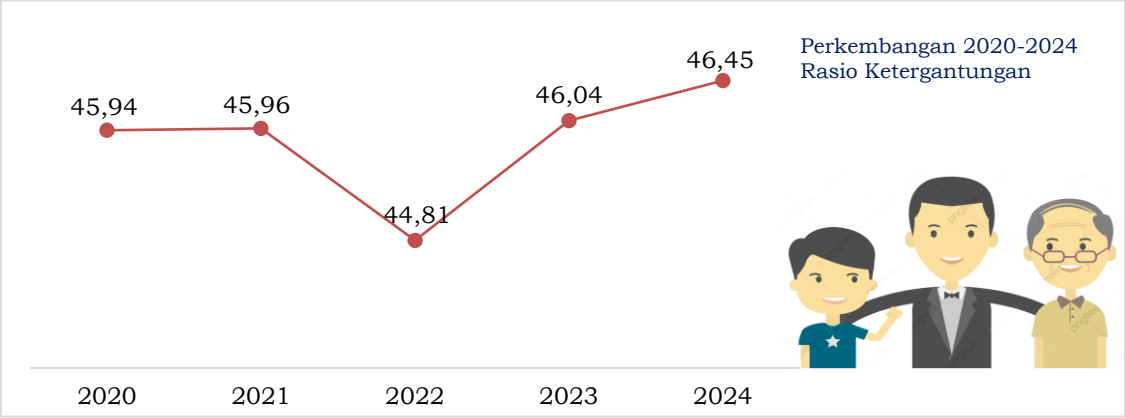

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Selatan (data diolah)

2.3.2 Iptek, Inovasi dan Produktifitas Ekonomi

Iptek dan inovasi meningkatkan efisiensi produksi, daya saing, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan sektor

usaha baru. Pemanfaatannya juga meningkatkan kualitas hidup, memperkuat ketahanan ekonomi, serta mendukung keberlanjutan melalui teknologi ramah lingkungan.

2.3.2.1 Rasio PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Rasio PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah perbandingan antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap total PDRB suatu daerah dalam suatu periode tertentu. Rasio ini menunjukkan kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap perekonomian regional, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional.

Perkembangan Rasio PDRB pertanian, kehutanan, dan perikanan Kabupaten Nias Selatan periode 2020-2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, rasio tercatat sebesar 44,61 persen dan sedikit menurun menjadi 44,57 persen pada tahun 2021. Kemudian terjadi peningkatan signifikan hingga 45,16 persen pada tahun 2022, yang didorong oleh peningkatan produktivitas dalam sektor ini. Namun rasio kembali menurun menjadi 44,72 persen pada tahun 2023 dan 44,55 persen pada tahun 2024. Meskipun sektor ini tetap berperan besar dalam ekonomi daerah, tren yang berfluktuasi menunjukkan perlunya strategi yang lebih stabil dan berkelanjutan untuk mempertahankan atau meningkatkan kontribusi terhadap PRDB. Berikut grafik rasio PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan tahun 2020-2024.

Grafik 2.27
Rasio PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024

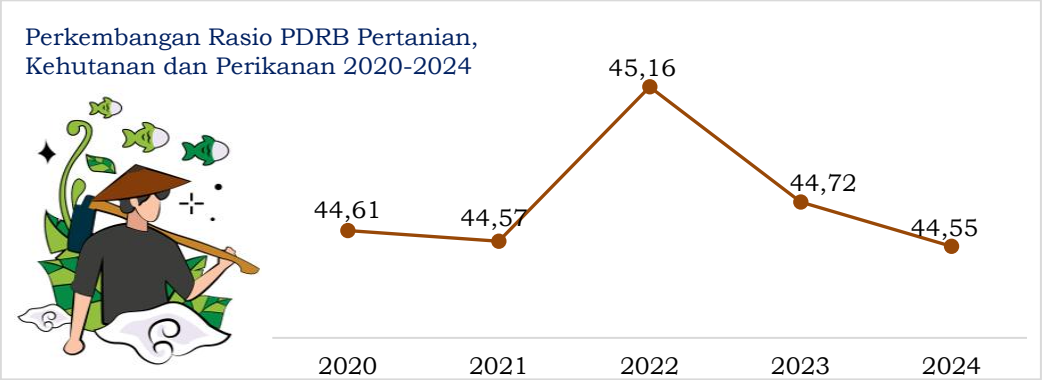

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Selatan

2.3.2.2 Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio PDRB Industri Pengolahan adalah perbandingan antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan dari sektor industri pengolahan

terhadap total PDRB suatu daerah. Rasio ini digunakan untuk mengukur kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian daerah.

Rasio PDRB industri pengolahan mencerminkan seberapa besar kontribusi sektor ini terhadap total perekonomian suatu daerah. Jika rasio ini tinggi, maka industri pengolahan memiliki peran dominan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menunjukkan bahwa daerah tersebut telah mengalami industrialisasi yang signifikan. Sebaliknya, jika rasio ini rendah, berarti perekonomian daerah masih bergantung pada sektor lain, seperti pertanian atau jasa, dan industri pengolahan belum berkembang secara optimal.

Data menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan di Kabupaten Nias Selatan memberikan kontribusi yang sangat kecil terhadap total PDRB daerah, yakni hanya berkisar antara 0,165 hingga 0,166. Pada tahun 2020, rasio tercatat sebesar 0,165 dan mengalami peningkatan hingga mencapai puncaknya pada tahun 2021 sebesar 0,169. Setelah itu terjadi penurunan secara bertahap, yaitu menjadi 0,167 pada tahun 2022 dan 0,166 pada tahun 2023. Kondisi ini berlanjut hingga tahun 2024, di mana rasio tetap stagnan pada angka 0,166. Secara keseluruhan, meskipun sempat menunjukkan peningkatan pada awal periode, tren kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB justru cenderung menurun dan stagnan di tahun-tahun berikutnya.

Grafik 2.28
Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024

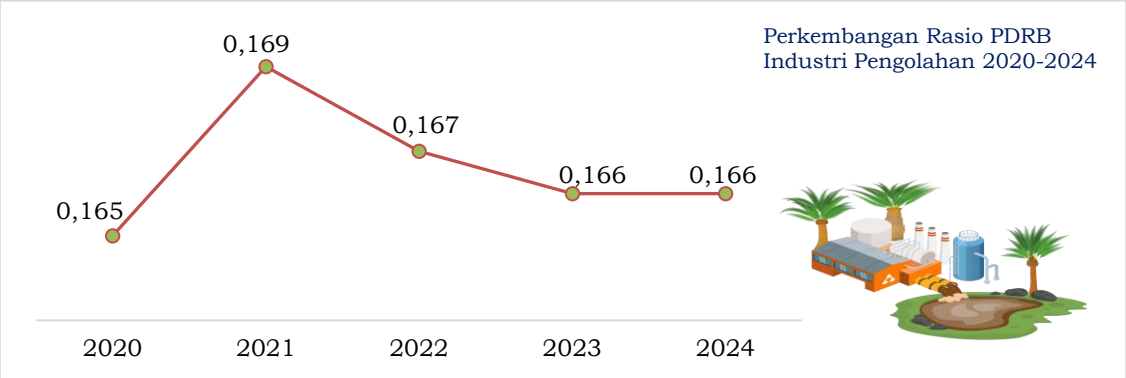

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Selatan

2.3.2.3 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Rasio PDRB akomodasi makan dan minum menunjukkan kontribusi sektor perhotelan, restoran, dan usaha kuliner terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah. Sektor ini mencerminkan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan pariwisata, konsumsi rumah tangga, serta perkembangan industri makanan dan minuman.

Pada tahun 2020, rasio akomodasi makan dan minum berada di angka 2,24 kemudian mengalami penurunan menjadi 2,15 pada tahun 2021. Namun setelah itu, rasio kembali mengalami tren peningkatan berturut-turut menjadi 2,17 pada tahun 2022, 2,20 pada tahun 2023, dan mencapai 2,27 pada tahun 2024.

Penurunan pada tahun 2021 kemungkinan disebabkan oleh dampak pandemi *Covid-19* yang membatasi mobilitas masyarakat dan wisatawan, sehingga sektor akomodasi dan makanan-minuman mengalami tekanan. Namun di tahun setelahnya tren pertumbuhan yang terjadi mengindikasikan pemulihan sektor akomodasi makan dan minum, disebabkan oleh meningkatnya jumlah wisatawan dan daya beli masyarakat.

Grafik 2.29
Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024

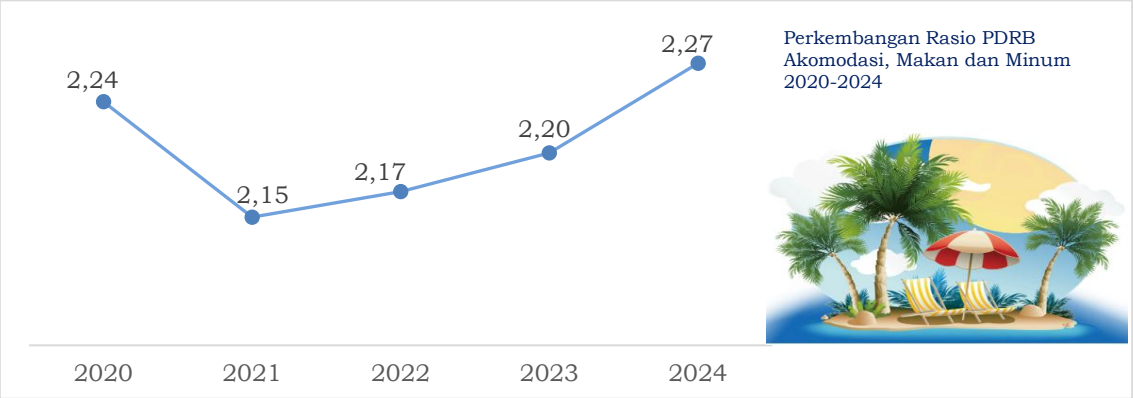

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Selatan

2.3.2.4 Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan dalam pembangunan daerah merujuk pada ukuran atau indikator yang digunakan untuk menilai kontribusi dan peran kewirausahaan dalam mendorong perkembangan ekonomi dan sosial suatu wilayah. Kewirausahaan memiliki dampak besar terhadap pembangunan daerah, karena dapat menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong inovasi dan daya saing.

Rasio kewirausahaan di Kabupaten Nias Selatan selama periode tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi signifikan. Pada tahun 2020, rasio kewirausahaan tercatat sebesar 0,51, kemudian meningkat tajam menjadi 0,75 pada tahun 2021. Namun pada tahun 2022 terjadi penurunan drastis hingga 0,14, yang disebabkan oleh faktor ekonomi atau kebijakan tertentu. Pada tahun 2023, rasio kembali naik menjadi 0,44, sebelum kembali turun ke 0,14 pada tahun 2024. Pola naik-turun ini mengindikasikan adanya faktor eksternal atau internal yang

memengaruhi pertumbuhan kewirausahaan seperti akses permodalan, regulasi pemerintah, atau kondisi ekonomi lokal.

Grafik 2.30
Rasio Kewirausahawan Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024

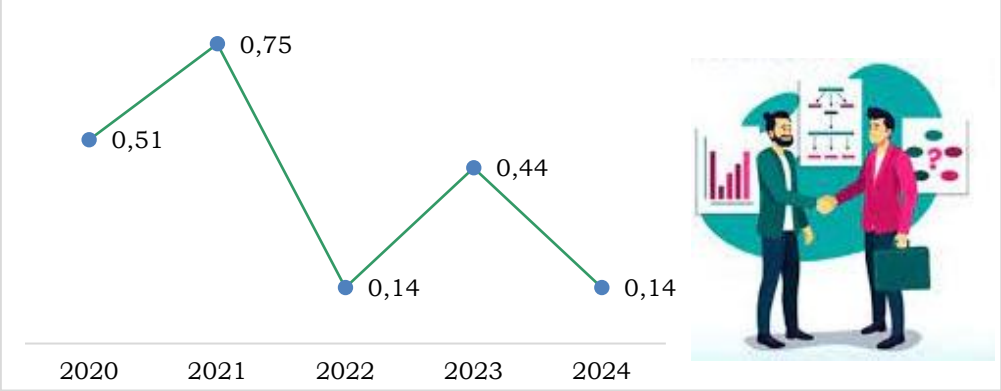

Sumber : Badan Pusat Statistik, (data diolah)

2.3.2.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. TPAK merupakan indikator untuk mengetahui seberapa besar persentase penduduk usia kerja yang bekerja atau mencari pekerjaan terhadap total penduduk usia kerja.

Tingkat partisipasi angkatan kerja berbeda dengan tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran adalah persentase orang dalam angkatan kerja yang menganggur. Artinya TPAK tidak dapat digunakan untuk mengetahui penduduk yang aktif bekerja ataupun mencari pekerjaan (menganggur).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Nias Selatan mengalami fluktuasi sepanjang periode 2020-2024. Pada tahun 2020, TPAK tercatat sebesar 77,14 persen, namun mengalami penurunan signifikan pada 2021 menjadi 72,25 persen, yang kemungkinan disebabkan oleh dampak pandemi *Covid-19* terhadap perekonomian dan sektor ketenagakerjaan. Setelah itu, terjadi peningkatan tajam pada tahun 2022 menjadi 78,54 persen, hal ini menandakan pemulihan ekonomi dan meningkatnya partisipasi tenaga kerja. Tren positif berlanjut pada tahun 2023 dengan TPAK mencapai 79,29 persen, angka tertinggi dalam periode ini. Meskipun pada 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi 78,83 persen, angka ini masih lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan pemulihan ekonomi yang baik serta meningkatnya kesempatan kerja di Kabupaten Nias Selatan pascapandemi.

Berikut Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Nias Selatan tahun 2020-2024.

Grafik 2.31
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024

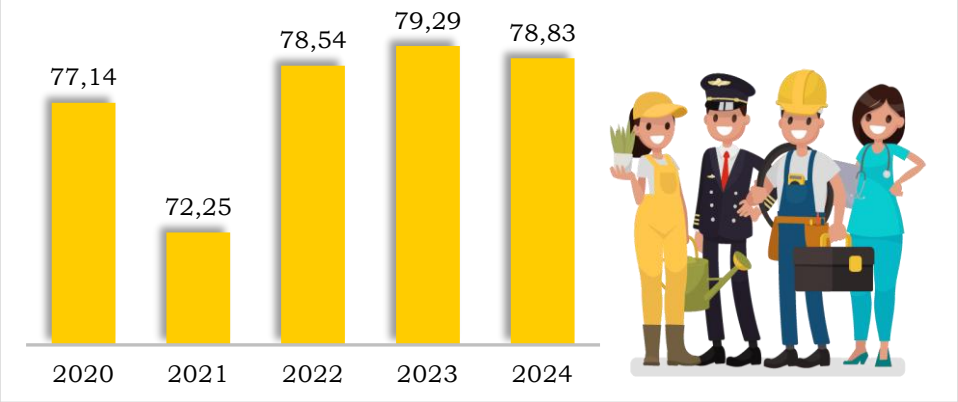

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Selatan (data diolah)

2.3.2.6 Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kapasitas dan kinerja inovasi suatu daerah dalam mendorong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. IID dikembangkan oleh Badan Strategis Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri sebagai alat ukur untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu menciptakan, mengembangkan, dan menerapkan inovasi dalam berbagai sektor, termasuk pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan perekonomian.

Klasifikasi Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah sebagai berikut:

1. Sangat Inovatif (>60): Daerah dengan inovasi unggul dan berkelanjutan, layanan publik modern, dan tata kelola berbasis teknologi.
2. Inovatif (40-60): Sudah menerapkan inovasi, tetapi belum merata di semua sektor.
3. Kurang Inovatif (<40): Minim inovasi, masih bergantung pada metode konvensional, dan kurang kompetitif.

Kabupaten Nias Selatan menghadapi berbagai tantangan struktural dan teknis dalam pengembangan inovasi daerah, yang tercermin dari dinamika capaian Indeks Inovasi Daerah (IID) selama periode 2020–2024. Tidak adanya nilai IID pada 2020–2022 disebabkan oleh belum tersedianya dokumentasi inovasi yang sistematis dan terstandar. Inisiasi pendokumentasian inovasi baru dimulai pada tahun 2022 dan mulai menunjukkan hasil positif dengan capaian IID tahun 2023 sebesar 37,08, yang menempatkan Kabupaten Nias Selatan dalam kategori

"inovatif". Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan skor menjadi 35,01 yang bukan disebabkan oleh penurunan kualitas inovasi, melainkan oleh kendala teknis dalam proses pelaporan, yakni kesalahan dalam memenuhi ketentuan format rancang bangun inovasi yang mengakibatkan satu inovasi tidak diikutsertakan dalam penghitungan skor. Berikut capaian indeks daya saing daerah Kabupaten Nias Selatan tahun 2020-2024.

Grafik 2.32
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024

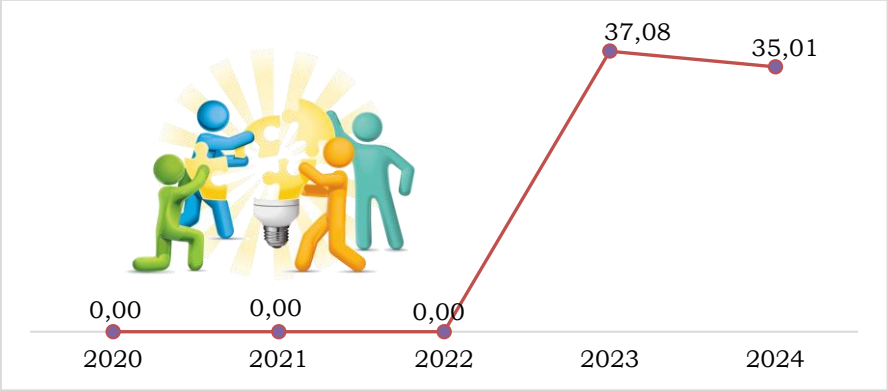

Sumber : Indeks Inovasi Daerah, 2022-2024 (data diolah)

Tantangan utama meliputi terbatasnya kapasitas sumber daya manusia dalam memahami indikator teknis penilaian IID, lemahnya sistem dokumentasi lintas perangkat daerah, serta belum optimalnya koordinasi dalam pengelolaan inovasi. Meskipun demikian, terdapat sejumlah faktor pendorong yang signifikan, antara lain komitmen pemerintah daerah, mulai terbentuknya ekosistem inovasi, serta dukungan regulasi nasional yang mendorong keterlibatan aktif daerah dalam penguatan daya saing berbasis inovasi. Dengan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas teknis, dan sistem pendokumentasian yang lebih terintegrasi, Kabupaten Nias Selatan memiliki potensi untuk meningkatkan kinerja inovasinya secara berkelanjutan.

2.3.3 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Integrasi ekonomi domestik dan global memainkan peran penting dalam pembangunan daerah dengan mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing, dan menciptakan peluang investasi. Di tingkat domestik, konektivitas antarwilayah yang baik mendorong distribusi barang dan jasa secara efisien, memperkuat sektor industri, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, keterlibatan dalam ekonomi global melalui ekspor,

investasi asing, dan transfer teknologi dapat meningkatkan produktivitas serta mendorong inovasi di daerah.

2.3.3.1 Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah indikator ekonomi yang mencerminkan investasi dalam aset tetap seperti infrastruktur, peralatan, bangunan, dan kendaraan yang digunakan untuk produksi dalam jangka panjang. PMTB berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah karena meningkatkan kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong efisiensi ekonomi.

Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di Kabupaten Nias Selatan selama periode 2020–2024 yang mengalami tren meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020, nilai PMTB tercatat sebesar 40,45 dan terus meningkat menjadi 42,39 pada tahun 2021, lalu naik lagi menjadi 44,97 pada tahun 2022. Kenaikan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2023 dengan angka 48,71, dan mencapai 49,49 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya pertumbuhan investasi dalam aset tetap seperti infrastruktur dan peralatan produksi di daerah tersebut. Tren positif ini mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi dan pembangunan fisik di Nias Selatan semakin membaik, yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan memperkuat struktur ekonomi daerah.

Grafik 2.33
Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024 (Persen PDRB)

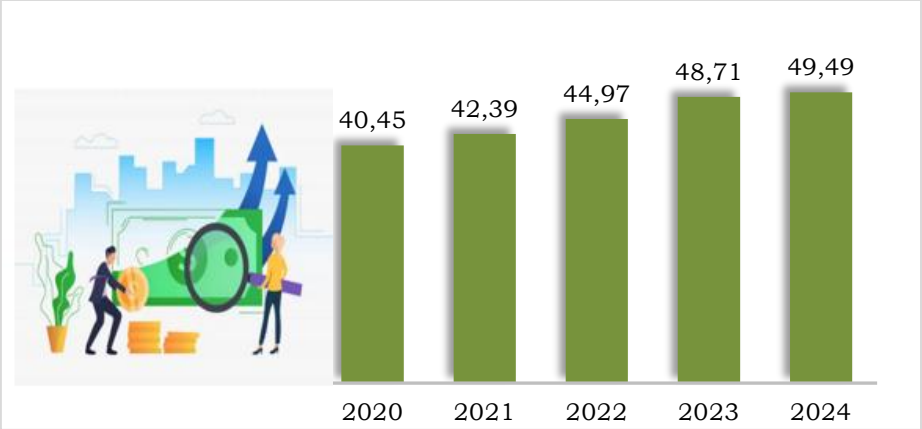

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Selatan, (data diolah)

2.3.3.2 Ekspor Barang dan Jasa

Ekspor barang dan jasa memegang peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kegiatan ekspor tidak hanya mencerminkan daya saing suatu wilayah dalam menghasilkan produk bernilai tambah, tetapi juga

menjadi sumber devisa dan penggerak utama peningkatan pendapatan masyarakat serta Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam konteks pembangunan daerah, peningkatan ekspor barang (seperti hasil pertanian, perikanan, dan kerajinan lokal) dan jasa (termasuk pariwisata, transportasi, dan layanan kreatif) memiliki efek multiplikasi terhadap sektor lain, seperti tenaga kerja, logistik, dan industri pengolahan. Hal ini dapat memperluas lapangan kerja, mengurangi tingkat pengangguran, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Selama periode 2020–2024, Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Nias Selatan selalu berada pada posisi negatif, yang berarti nilai ekspor secara konsisten lebih rendah dibandingkan nilai impor atau dengan kata lain terjadi defisit perdagangan keluar daerah. Pada tahun 2020, defisit tercatat sebesar -37,32 Persen, kemudian semakin melebar pada tahun 2021 menjadi -39,28 Persen. Meski demikian, tren perbaikan mulai terlihat sejak tahun 2022 dengan defisit menurun menjadi -37,94 Persen, berlanjut turun lagi pada tahun 2023 menjadi -36,32 Persen, dan mencapai angka -36,12 Persen pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun defisit masih cukup besar, terdapat kecenderungan perbaikan sejak 2022, yang mengindikasikan adanya peningkatan kinerja ekspor barang dan jasa atau pengendalian impor yang lebih baik.

Grafik 2.34
Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024

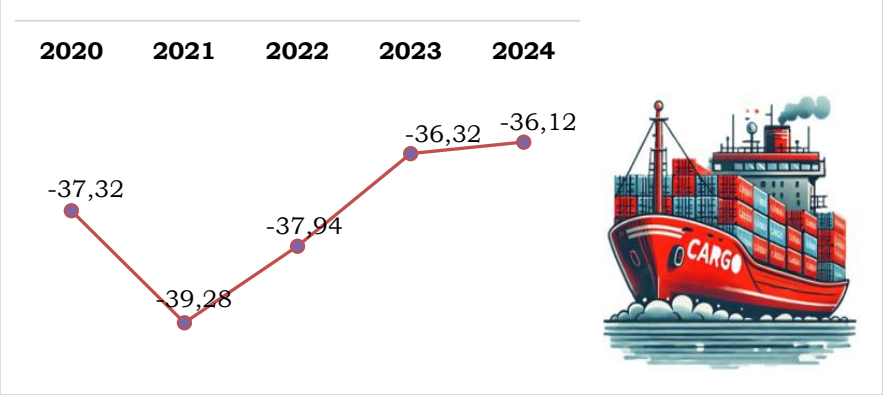

Sumber : PDRB Kabupaten Nias Selatan Menurut Pengeluaran, 2020-2024 (data diolah)

2.3.4 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Dalam perencanaan pembangunan, perkotaan dan perdesaan memiliki peran penting sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang saling mendukung untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan merata. Sinergi antara

perkotaan dan perdesaan diperlukan agar pertumbuhan ekonomi lebih inklusif dan berkelanjutan.

2.3.4.1 Indeks Infrastruktur

Indeks infrastruktur merupakan salah satu komponen *City Development Index (CDI)* yang menilai kinerja kota berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada fasilitas-fasilitas mendasar. Indeks Infrastruktur dihitung dengan menggunakan berbagai metode, tergantung pada indikator yang digunakan. Indikator tersebut dilihat dari sarana transportasi (jalan maupun jembatan), energi, akses terhadap air dan sanitasi ataupun layanan telekomunikasi.

Indikator yang digunakan untuk mengetahui indeks infrastruktur Kabupaten Nias Selatan adalah tingkat kemantapan jalan, akses rumah tangga terhadap air minum layak, akses rumah tangga terhadap sanitasi minum layak, akses rumah tangga terhadap listrik. Berikut capaian komponen indeks infrastruktur Kabupaten Nias Selatan selama 2020-2024.

Tabel 2.14
Capaian Kinerja Komponen Indeks Infrastruktur Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024

Nama Indikator	Komponen Indeks Infrastruktur				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Kemantapan Jalan	57,24	0,00	42,02	37,98	42,49
Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Layak	62,80	66,21	66,71	64,55	69,38
Akses Rumah Tangga terhadap Sanitasi Layak	11.48	13,14	12,23	15,63	15,33
Akses Rumah Tangga terhadap Listrik PLN	76,04	81,16	85,2	87,16	93,88
Indeks Infrastruktur	**51,89**	**40,13**	**51,54**	**51,33**	**55,27**

Sumber : Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka, 2025 (data diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Indeks Infrastruktur Kabupaten Nias Selatan mengalami fluktuasi dalam periode tahun 2020-2024. Pada tahun 2020, indeks tercatat sebesar 51,89, kemudian turun drastis menjadi 40,13 pada tahun 2021, hal ini dikarenakan tidak tersedianya data terkait tingkat kemantapan jalan. Namun indeks kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 51,54, kemudian stabil di 51,33 pada tahun 2023, dan akhirnya mencapai 55,27 pada tahun 2024, yang merupakan capaian tertinggi dalam periode ini. Peningkatan indeks infrastruktur pada 2024 didorong oleh membaiknya akses rumah tangga terhadap air minum layak, listrik PLN, dan sanitasi. Berikut Grafik Indeks Infrastruktur di Kabupaten Nias Selatan tahun 2020-2024.

Grafik 2.35
Indeks Infrastruktur Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024

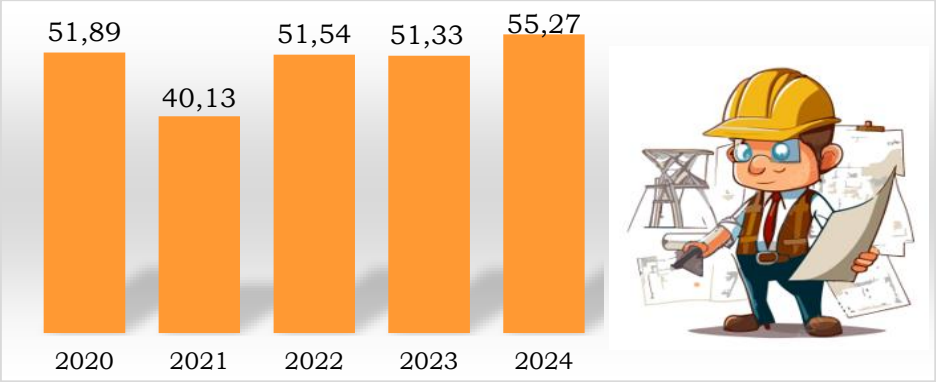

Sumber : Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka, 2025 (data diolah)

2.3.4.2 Rumah Layak Huni

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi standar kesehatan, keamanan, dan kenyamanan bagi penghuninya. Rumah layak huni juga harus memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan luas bangunan, dan kesehatan penghuninya.

Rumah layak huni berperan penting dalam pembangunan daerah dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kesehatan, dan produktivitas. Hunian yang memenuhi standar keselamatan dan sanitasi mengurangi risiko penyakit, mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan daya kerja, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman. Selain itu, ketersediaan rumah layak huni juga berkontribusi pada pengurangan kesenjangan sosial dan kemiskinan, serta mendorong pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Dengan demikian, penyediaan rumah layak huni menjadi salah satu faktor kunci dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Berikut cakupan terkait rasio rumah layak huni Kabupaten Nias Selatan tahun 2020-2024.

Tabel 2.15
Rasio Rumah Layak Huni di Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Rumah Layak Huni (Unit)	39.335	40.121	41.181	41.200	41.200
	Jumlah Penduduk	360.531	366.163	373.674	382.539	389.957
	Rasio	0,109	0,110	0,110	0,108	0,108
2	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	21.745	21.998	22.175	22.156	22.156
	Jumlah Penduduk	360.531	366.163	373.674	382.539	389.957
	Rasio	0,060	0,060	0,059	0,058	0,058
3	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani (Unit)	297	78	329	19	0
	Jumlah Penduduk	360.531	366.163	373.674	382.539	389.957
	Rasio	0,0008	0,0002	0,0009	0,0000	0,0000

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
4	Luas Pemukiman Layak huni	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5	Luas Wilayah pemukiman	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
6	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	n/a	n/a	n/a	98%	98%

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukinan, 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio rumah layak huni di Kabupaten Nias Selatan menunjukkan tren yang relatif stabil selama periode 2020-2024, berkisar antara 0,108 hingga 0,110. Meskipun jumlah rumah layak huni meningkat dari 39.335 unit pada tahun 2020 menjadi 41.200 unit pada tahun 2024, rasio terhadap jumlah penduduk tidak mengalami peningkatan signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan rumah layak huni belum mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk. Sementara itu, jumlah rumah tidak layak huni juga mengalami sedikit peningkatan, meskipun rasio terhadap jumlah penduduk mengalami penurunan dari 0,060 pada tahun 2020 menjadi 0,058 pada tahun 2024. Namun, upaya penanganan rumah tidak layak huni tampaknya kurang optimal, terlihat dari jumlah unit yang ditangani yang menurun drastis dari 297 unit pada 2020 menjadi 0 unit pada 2024. Artinya pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan tidak melakukan intervensi terkait perbaikan rumah tidak layak huni.

2.3.4.3 Persentase Desa Mandiri

Dalam pembangunan suatu daerah, status desa mencerminkan tingkat kemajuan berdasarkan infrastruktur, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), status desa dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu:

1. Desa Mandiri: Desa yang memiliki akses dan ketersediaan layanan dasar yang memadai, infrastruktur yang baik, dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
2. Desa Maju: Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mampu mengelolanya untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Desa Berkembang: Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, tetapi belum dikelola secara optimal.
4. Desa Tertinggal: Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, tetapi belum atau kurang dikelola secara optimal.

5. Desa Sangat Tertinggal: Desa yang sangat rentan terhadap bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial

Klasifikasi status desa digunakan sebagai acuan dalam melakukan integrasi, afirmasi, dan sinergi pembangunan desa.

Kabupaten Nias Selatan terdiri dari 459 desa yang tersebar di 35 kecamatan, dengan mayoritas desa berstatus sangat tertinggal dan tertinggal. Namun, dalam lima tahun terakhir, terjadi peningkatan status desa yang menunjukkan perkembangan positif. Jumlah desa sangat tertinggal menurun dari 312 desa pada tahun 2021 menjadi 263 desa pada tahun 2024, sementara desa berkembang meningkat dari 5 desa pada tahun 2021 menjadi 54 desa pada tahun 2024. Pada 2024, ada satu desa berstatus desa maju, yaitu Desa Hilisimaetano, yang berhasil meningkatkan statusnya setelah meraih Anugerah Desa Wisata 2022 serta terpilih dalam program Desa CANTIK (Desa Cinta Statistik) 2022. Meskipun hingga tahun 2024 belum ada desa yang mencapai status desa mandiri, tren peningkatan ini menunjukkan kemajuan yang signifikan.

Tabel 2.16
Status Desa di Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Desa Mandiri	-	-	-	-	-
Desa Maju	-	-	-	-	1
Desa Berkembang	-	5	0	48	54
Desa Tertinggal	-	142	143	130	141
Desa Sangat Tertinggal	-	312	316	281	263
Total Desa	459	459	459	459	459

Sumber : Indeks Desa Membangun, 2020-2024(data diolah)

2.3.5 Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas Ekonomi Makro adalah kondisi di mana suatu perekonomian berada dalam keseimbangan yang memungkinkan pertumbuhan berkelanjutan dengan inflasi terkendali, tingkat pengangguran rendah, dan sistem keuangan yang sehat. Stabilitas ini ditentukan oleh berbagai faktor, seperti kebijakan fiskal dan moneter, nilai tukar, defisit anggaran, serta keseimbangan neraca perdagangan.

Stabilitas ekonomi makro sangat penting karena menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan peningkatan produktivitas. Ketika inflasi rendah dan nilai tukar stabil, daya beli masyarakat meningkat, sehingga mendorong konsumsi dan pertumbuhan usaha lokal. Selain itu, stabilitas makroekonomi juga

memperkuat kepercayaan investor, baik domestik maupun asing, dalam menanamkan modalnya di suatu daerah.

2.3.5.1 Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB adalah indikator yang menunjukkan kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Rasio ini menggambarkan seberapa besar potensi ekonomi suatu daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak.

Rasio pajak daerah yang tinggi mencerminkan kemandirian fiskal yang baik, sementara rasio yang rendah bisa mengindikasikan ketergantungan pada transfer dana dari pemerintah pusat. Faktor-faktor yang memengaruhi rasio ini meliputi tingkat kepatuhan wajib pajak, efektivitas administrasi pajak, pertumbuhan ekonomi daerah, serta kebijakan perpajakan yang diterapkan. Oleh karena itu, peningkatan rasio pajak daerah terhadap PDRB dapat dilakukan melalui optimalisasi pemungutan pajak, transparansi fiskal, serta kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi.

Pada tahun 2020, rasio pajak daerah terhadap PDRB di Kabupaten Nias Selatan tercatat sebesar 0,39, kemudian meningkat signifikan menjadi 0,76 pada 2021 dan mencapai puncaknya di 0,88 pada 2022. Setelah itu, rasio mengalami sedikit penurunan menjadi 0,82 pada 2023 dan turun lebih lanjut ke 0,64 pada 2024. Berikut rasio pajak daerah terhadap PDRB di Kabupaten Nias Selatan selama tahun 2020-2024.

Grafik 2.36
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB di Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024

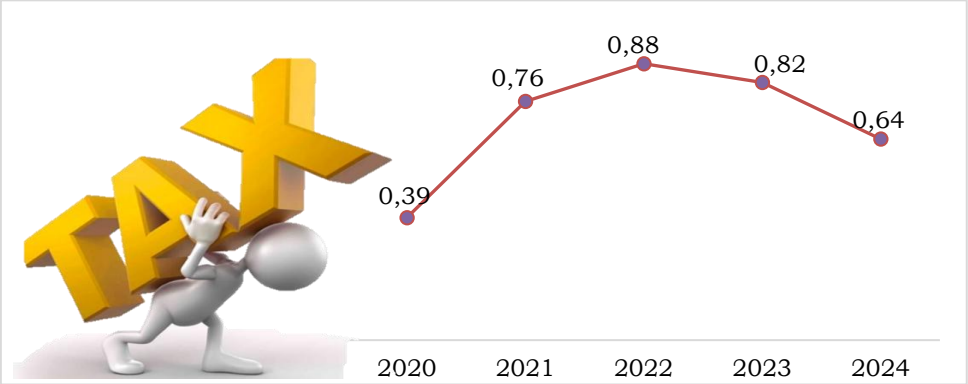

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2025 (data diolah)

2.3.5.2 Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi adalah persentase kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode tertentu, biasanya dihitung secara tahunan (*year-on-year*) atau bulanan (*month-to-month*). Inflasi menunjukkan penurunan daya beli

uang, di mana dengan jumlah uang yang sama, masyarakat dapat membeli lebih sedikit barang atau jasa dibanding sebelumnya.

Tingkat inflasi memiliki peran penting dalam perekonomian sebagai indikator stabilitas ekonomi, penentu daya beli masyarakat, serta panduan bagi kebijakan moneter. Inflasi yang terkendali mendorong investasi, menjaga nilai tukar mata uang, dan memastikan kesejahteraan masyarakat dengan menjaga keseimbangan antara pendapatan dan harga barang.

Di Provinsi Sumatera Utara, lima kota telah rutin merilis angka inflasi, yakni Medan, Pematangsiantar, Sibolga, Padangsidimpuan, dan Gunungsitoli. Namun, mulai tahun 2024, akan ada penambahan tiga kabupaten yang juga akan merilis angka inflasi, yaitu Karo, Deli Serdang, dan Labuhan Batu. Dengan demikian, total akan ada delapan kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Laju inflasi Kota Gunungsitoli, yang digunakan sebagai acuan regional untuk kawasan Kepulauan Nias termasuk Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2020, tingkat inflasi sebesar 1,68 persen, kemudian menurun drastis menjadi 0,54 persen pada tahun 2021, yang menunjukkan adanya perlambatan kenaikan harga. Namun pada tahun 2022, inflasi melonjak tajam hingga 5,74 persen, akibat faktor eksternal seperti kenaikan harga barang dan jasa pascapandemi atau gangguan rantai pasok. Selanjutnya pada tahun 2023, inflasi kembali menurun menjadi 2,35 persen, mencerminkan stabilisasi harga. Namun pada 2024, inflasi kembali meningkat menjadi 3,10 persen, dipengaruhi oleh faktor ekonomi lokal seperti kenaikan permintaan barang dan jasa.

Secara keseluruhan, inflasi di Kabupaten Nias Selatan mengalami ketidakstabilan, dengan lonjakan tinggi pada 2022 dan fluktuasi pada tahun berikutnya. Berikut tingkat inflasi Kabupaten Nias Selatan tahun 2020-2024.

Grafik 2.37
Tingkat Inflasi Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024

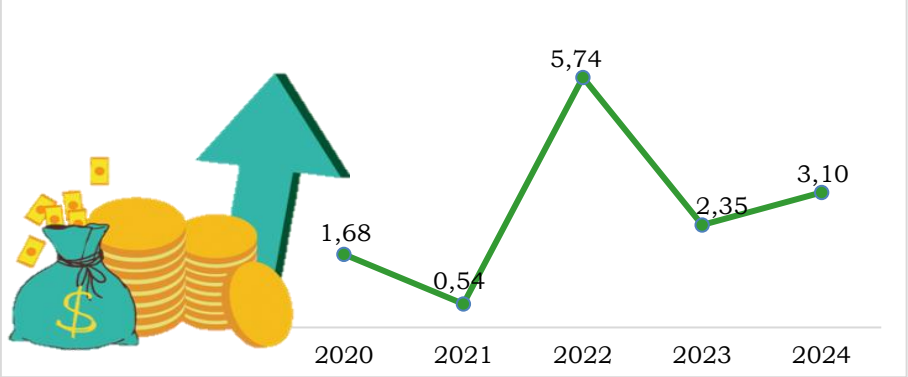

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Gunung Sitoli

2.4 Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum dalam pembangunan daerah berfokus pada peningkatan kualitas, efisiensi, dan aksesibilitas layanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Pelayanan umum mencakup berbagai sektor yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

2.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif merupakan kunci dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta responsif terhadap perubahan zaman dan tantangan pembangunan. Dengan regulasi yang kuat dan tata kelola yang adaptif, pemerintah dapat meningkatkan daya saing daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

2.4.1.1 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah nilai yang menunjukkan tingkat kematangan penerapan SPBE di instansi pemerintah. Indeks ini dihitung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB). Indeks SPBE berperan sebagai tolak ukur keberhasilan transformasi digital pemerintahan dan menjadi dasar evaluasi serta perbaikan kebijakan berbasis teknologi.

Pada tahun 2020 dan 2021, indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Nias Selatan masih berada di angka 0,00, yang menunjukkan bahwa implementasi sistem berbasis elektronik dalam pemerintahan daerah belum dapat dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB). Namun, pada tahun 2022, terjadi peningkatan signifikan dengan indeks mencapai 1,37, menandakan dimulainya penerapan sistem elektronik dalam pemerintahan yang kemudian dievaluasi oleh Menpan RB. Tren positif ini terus berlanjut pada tahun 2023 dengan kenaikan indeks menjadi 1,81, dan semakin meningkat pada tahun 2024 hingga mencapai 2,90. Perkembangan ini mencerminkan kemajuan dalam digitalisasi pemerintahan serta reformasi birokrasi di Kabupaten Nias Selatan, yang berkontribusi pada peningkatan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik.

Grafik 2.38
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024

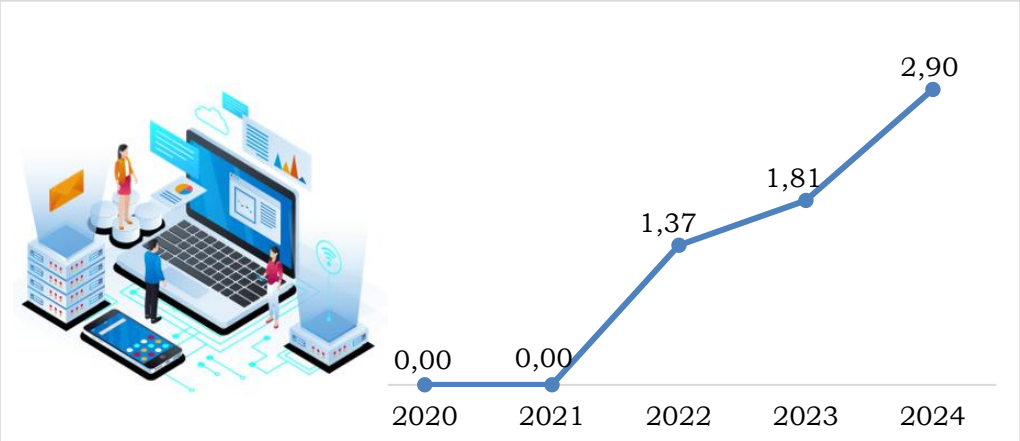

Sumber : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (data diolah)

2.4.1.2 Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas layanan yang diberikan oleh instansi pemerintah kepada masyarakat. Indeks ini mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap berbagai aspek pelayanan, seperti transparansi, kecepatan, akurasi, aksesibilitas, dan akuntabilitas.

Indeks Pelayanan Publik menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas birokrasi dalam memberikan layanan yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Semakin tinggi indeks ini, semakin baik kinerja pemerintah dalam memberikan layanan yang mudah, cepat, dan berorientasi pada kepuasan publik. Sebaliknya, indeks yang rendah menunjukkan perlunya perbaikan dalam berbagai aspek pelayanan, seperti pengurangan birokrasi yang berbelit, peningkatan profesionalisme aparatur, serta penerapan teknologi dalam sistem pelayanan.

Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Nias Selatan mengalami peningkatan konsisten selama periode tahun 2020-2024. Lonjakan signifikan terjadi pada tahun 2021–2022, mencerminkan adanya perbaikan besar dalam sistem layanan publik. Meskipun laju pertumbuhan melambat setelah tahun 2022, peningkatan tetap terjadi hingga tahun 2024, menunjukkan keberlanjutan upaya perbaikan. Stabilitas kenaikan ini dapat mengindikasikan efektivitas kebijakan yang diterapkan, meskipun perlunya evaluasi untuk mempertahankan atau mempercepat tren positif di masa mendatang.

Grafik 2.39
Indeks Pelayanan Publik di Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024

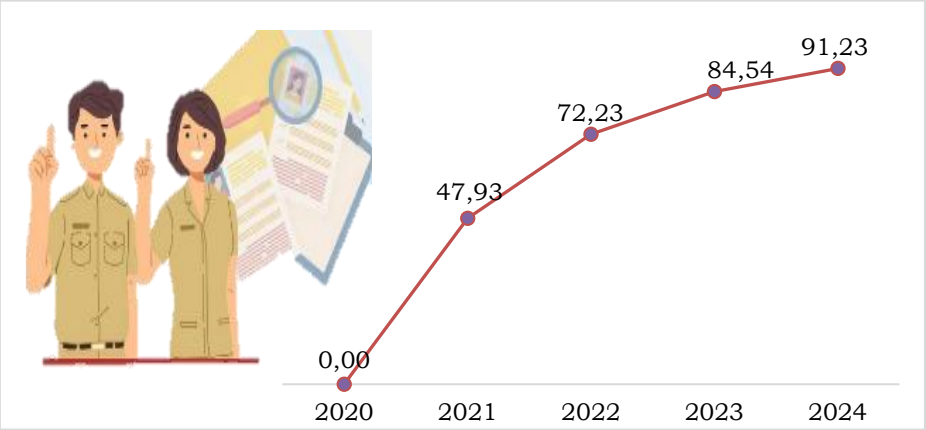

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan, 2025 (data diolah)

2.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substantial

Konsep hukum berkeadilan, keamanan nasional yang tangguh, dan demokrasi substansial merupakan pilar utama dalam menciptakan kondisi daerah yang stabil, aman, dan demokratis. Ketiga aspek ini saling berkaitan dalam memastikan kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan sistem pemerintahan yang efektif dan berintegritas.

2.4.2.1 Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang Ditangani

Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang Ditangani adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) telah ditindaklanjuti oleh aparat atau instansi berwenang. Persentase ini menjadi indikator penting dalam mengukur efektivitas penerapan kebijakan daerah serta ketegasan pemerintah dalam menjaga ketertiban dan kepatuhan terhadap regulasi yang ada.

Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani di Kabupaten Nias Selatan mengalami fluktuasi selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020 dan 2021, tingkat penanganan pelanggaran tetap stabil di angka 10 persen, mencerminkan konsistensi dalam upaya penegakan hukum. Namun pada tahun 2022 terjadi sedikit penurunan menjadi 9,47 persen, yang disebabkan oleh berkurangnya pelanggaran atau lemahnya pengawasan. Pada tahun 2023, angka kembali naik ke 10 persen, menunjukkan pemulihan dalam upaya penindakan. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2024, dengan lonjakan hingga 17,74 persen, mengindikasikan adanya penguatan dalam pengawasan dan penegakan

hukum dan meningkatnya jumlah pelanggaran yang terdeteksi dan ditindaklanjuti.

Grafik 2.40
Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang Ditangani Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024

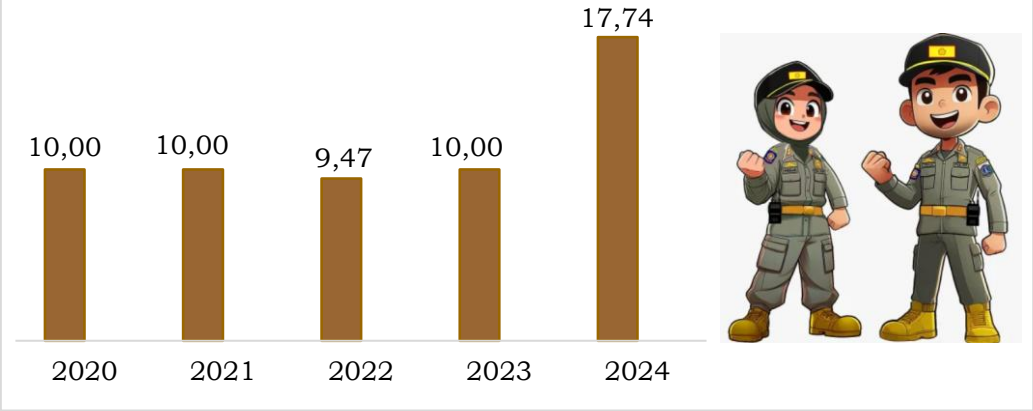

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan, 2025

2.4.2.2 Proporsi Penduduk Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya

Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya merupakan indikator yang mengukur tingkat persepsi masyarakat terhadap rasa aman di lingkungan tempat tinggal. Indikator ini dihitung berdasarkan persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang menyatakan merasa aman ketika berjalan sendirian, baik pada siang maupun malam hari. Tingginya proporsi penduduk yang merasa aman mencerminkan kondisi sosial yang kondusif, rendahnya tingkat kriminalitas, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas sistem keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut. Sebaliknya, rendahnya proporsi dapat menjadi indikasi adanya kerentanan sosial dan gangguan keamanan yang perlu mendapatkan perhatian dalam kebijakan pembangunan daerah.

Pada periode tahun 2020–2024, proporsi penduduk Kabupaten Nias Selatan yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya selalu berada pada angka 100 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh masyarakat, tanpa terkecuali, memiliki persepsi rasa aman yang tinggi terhadap lingkungan tempat tinggalnya, baik pada siang maupun malam hari. Kondisi tersebut mencerminkan situasi sosial yang kondusif, tingkat kriminalitas yang rendah, serta efektivitas peran pemerintah daerah, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan. Rasa aman yang terjamin ini

tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari, tetapi juga berkontribusi positif terhadap berbagai aspek pembangunan.

Grafik 2.41
Proporsi Penduduk Merasa Aman Berjalan Sendirian Di Area Tempat Tinggalnya di Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024

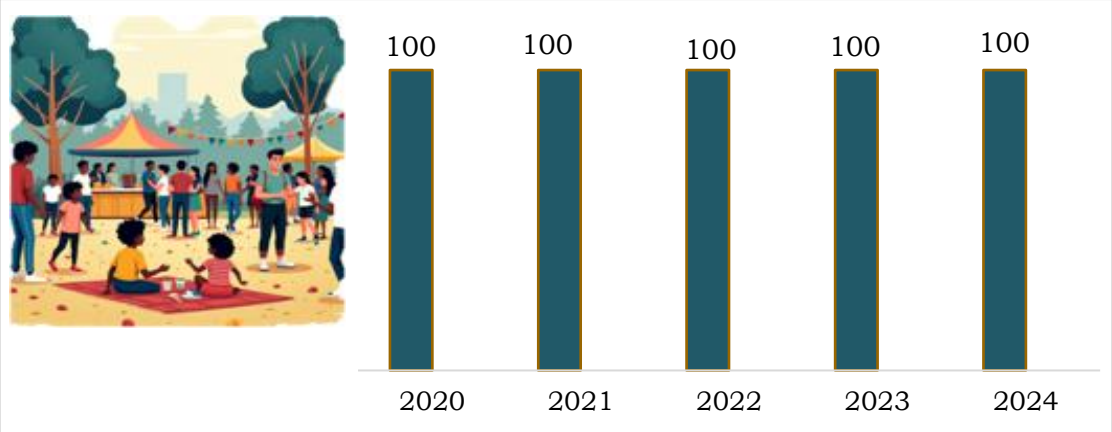

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Selatan, 2025

2.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

2.4.3.1 Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. IDSD juga dapat menggambarkan tingkat produktivitas, perkembangan, persaingan, dan kemandirian suatu daerah.

IDSD menggunakan empat aspek utama, yaitu: Lingkungan penguat, Sumber daya manusia, Pasar, Ekosistem inovasi. IDSD juga memiliki 12 pilar, yaitu: Kelembagaan, Infrastruktur, Perekonomian Daerah, Kesehatan, Pendidikan, Efisiensi Pasar Produk, Ketenagakerjaan, Akses Keuangan, Ukuran Pasar, Adopsi Teknologi, Dinamika Bisnis, Kapasitas Inovasi.

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Nias Selatan mengalami peningkatan signifikan dalam periode 2020-2024. Pada tahun 2020 dan 2021, nilai indeks daya saing masih 0,00, yang mengindikasikan belum adanya pencatatan dan belum terpenuhinya indikator daya saing daerah. Namun, pada tahun 2022, terjadi lonjakan tajam ke angka 2,38, menandakan adanya perbaikan dalam berbagai aspek yang mendukung daya saing daerah, seperti infrastruktur, ekonomi, sumber daya manusia, dan inovasi. Tren positif ini terus berlanjut dengan peningkatan indeks menjadi 2,71 pada tahun 2023 dan mencapai 3,01 pada tahun 2024. Peningkatan IDSD mencerminkan upaya sistematis melalui kebijakan pembangunan, perbaikan layanan publik, dan kolaborasi lintas sektor.

Namun, capaian ini masih relatif rendah dibandingkan daerah lain, sehingga diperlukan strategi yang berkelanjutan dan terintegrasi untuk mendorong akselerasi daya saing Kabupaten Nias Selatan ke depan.

Grafik 2.42
Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024

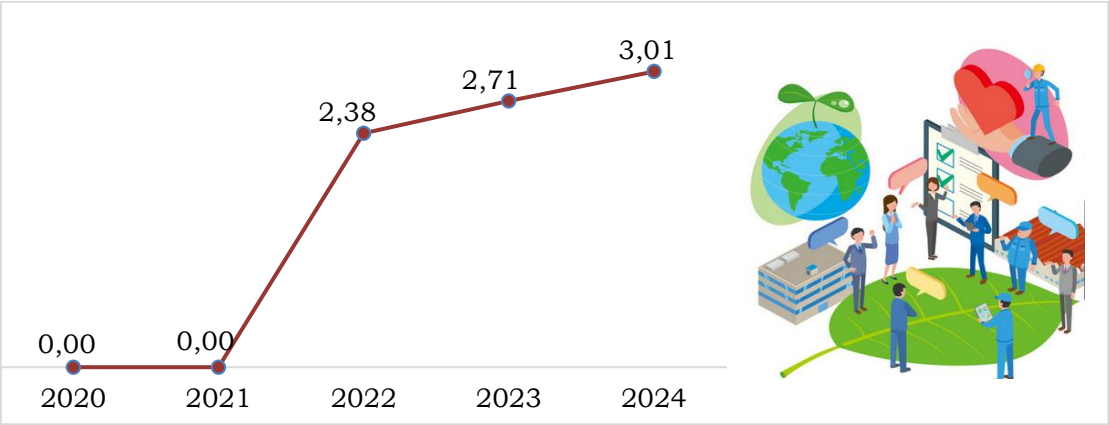

Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Skor IDSD diatas dipengaruhi oleh 12 pilar pendukung yang mencerminkan berbagai aspek strategis dalam pembangunan daerah. Pilar-pilar tersebut mencakup dimensi institusi, infrastruktur, teknologi informasi, stabilitas ekonomi, kesehatan, keterampilan sumber daya manusia, efisiensi pasar, sistem keuangan, dinamika bisnis, inovasi, serta kolaborasi riset dan pengembangan. Setiap pilar memberikan kontribusi terhadap penilaian daya saing secara keseluruhan, di mana peningkatan atau penurunan skor pada masing-masing pilar akan berdampak langsung terhadap posisi daya saing daerah.

Grafik 2.43
Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024

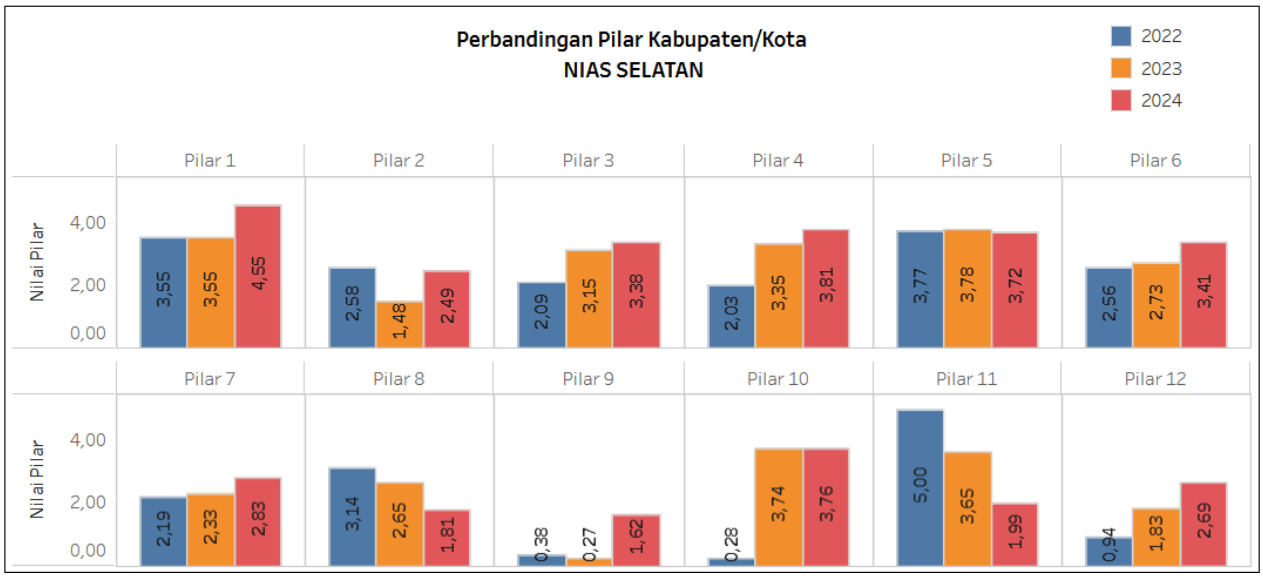

Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Berdasarkan grafik perbandingan skor Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Nias Selatan tahun 2022–2024, terlihat adanya peningkatan skor di sebagian besar pilar, yang mengindikasikan perbaikan daya saing daerah secara bertahap dimana

1. Peningkatan Signifikan:
   - Pilar 1 (Institusi) naik dari 3,55 (2023) ke 4,55 (2024), menunjukkan penguatan kelembagaan.
   - Pilar 6 (Keterampilan/SDM) juga meningkat tajam dari 2,56 (2022) ke 3,41 (2024).
   - Pilar 2 (Infrastruktur) dan Pilar 12 (Kolaborasi Riset dan Inovasi) menunjukkan peningkatan stabil.
2. Stagnasi atau Kenaikan Moderat:
   - Pilar 5 (Kesehatan) stabil di kisaran 3,7–3,78.
   - Pilar 9 (Sistem Keuangan) meningkat dari 0,27 (2023) menjadi 1,38 (2024), namun masih tergolong rendah.
3. Penurunan:
   - Pilar 11 (Kemampuan Inovasi) menurun drastis dari 5,00 (2022) ke 1,99 (2024), menunjukkan kemunduran besar dalam aspek inovasi.
   - Pilar 8 (Pasar Tenaga Kerja) juga mengalami penurunan skor.

Secara umum, Kabupaten Nias Selatan menunjukkan tren positif dalam peningkatan daya saing di berbagai pilar, terutama dalam institusi, SDM, dan infrastruktur. Namun, adanya penurunan drastis pada Pilar 11 perlu menjadi perhatian serius, karena dapat menghambat pencapaian daya saing yang berkelanjutan. Perlu upaya strategis untuk memperkuat ekosistem inovasi dan meningkatkan kolaborasi antar pelaku riset dan industri di daerah ini.

2.4.4 Kinerja Setiap Urusan Daerah

2.4.4.1 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Kinerja setiap urusan daerah dapat diukur melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang mencerminkan pencapaian berbagai sektor. IKK memiliki peran penting dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah karena berfungsi sebagai tolak ukur pencapaian pembangunan dan efektivitas kebijakan yang diterapkan. Melalui IKK, pemerintah daerah dapat menilai sejauh mana target pembangunan telah tercapai, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menyesuaikan

strategi untuk meningkatkan kinerja di berbagai sektor. Berikut capaian kinerja setiap urusan daerah dalam IKK tahun 2020-2024.

Tabel 2.17
Capaian Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024

No	Aspek/ Fokus/ Bidang/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian				OPD Penanggung Jawab
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**							
A.1.	**FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI**							
1	Pertumbuhan Ekonomi							
1.1	PDRB per kapita ADHB	Juta Rupiah/ Jiwa	22,22	20,27	21,45	22,42	23,41	Seluruh Perangkat Daerah
1.2	PDRB per kapita ADHK	Juta Rupiah/ Jiwa	11,78	11,83	11,95	12,10	12,33	Seluruh Perangkat Daerah
1.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian	Persen	1,04	1,77	3,3	2,72	2,72	Dinas Pertanian
1.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (penyediaan Akomodasi dan makan minum) Pariwisata	Persen	0,84	-0,75	6,88	5,47	0	Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga
2	Laju Inflasi	Persen	1,87	0,54	1,79	-	3,98	Seluruh Perangkat Daerah
3	Indeks Gini	Poin	0,286	0,241	0,223	0,261	0,216	Seluruh Perangkat Daerah
4	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	Persen	16,74	16,92	16,48	16,39	16,39	Seluruh Perangkat Daerah
5	Persentase PAD terhadap APBD	Persen	1,14	2,35	2,88	2,14	1,97	BPKPAD
6	Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Predikat	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	BPKPAD
A.2	**FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL**							
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	61,89	62,35	63,17	64,98	65,87	Seluruh Perangkat Daerah
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	66,7	88,28	89,19	17,42	22	DP2KBP3A
3	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	5,85	6,06	6,23	6,48	6,00	Dinas Pendidikan
4	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,23	12,27	12,48	12,78	10,5	Dinas Pendidikan
5	Angka Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	68,74	68,86	69,21	67	68,5	Dinas Kesehatan
6	Indek Risiko Bencana (IRB)	Poin	202	187.94	191,83	190,52	100	BPBD
7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	77,14	72,25	78,54	76,9	79,29	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	4,15	3,91	3,69	3,91	3,03	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah
9	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instnsi Pemerintahan (SAKIP)	Predikat	C	C (38,83)	C (42,54)	CC (50,17)	CC (54,15)	Bagian Organisasi - Setda
A.3	**FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA**							
1	Persentase festival budaya daerah yang diselenggarakan di tingkat kabupaten	Persen	0	100	-	100	100	Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga
2	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen	0	10	20	15.00	0	Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga
3	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	0	0	-	-	0,74	Dinas Kebudayaan Pariwisata dan

No	Aspek/ Fokus/ Bidang/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian				OPD Penanggung Jawab
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Kepemudaan Olahraga
B	**ASPEK PELAYANAN UMUM**							
B.1	**FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB**							
B.1.1	**PELAYANAN DASAR**							
1	**PENDIDIKAN**							
1.1	APK PAUD	Persen	12,72	25,43	25,43	14,02	94,88	Dinas Pendidikan
1.2	APK SD/MI/Paket A	Persen	111,59	108,6	87,62	86,85	91,54	Dinas Pendidikan
1.3	APK SMP/MTs/Paket B	Persen	80,78	87,05	95,48	94.50	67,87	Dinas Pendidikan
1.4	APM PAUD	Persen	12,72			-	94,88	Dinas Pendidikan
1.5	APM SD/MI/Paket A	Persen	96,08	96,04	87,48	86.56	91,41	Dinas Pendidikan
1.6	APM SMP/MTs/Paket B	Persen	70,44	71,59	94,79	94,5	67,35	Dinas Pendidikan
1.7	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	5,85	6,06	6,35	5.89	6,52	Dinas Pendidikan
1.8	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,23	12,27	12,31	12.10	12,92	Dinas Pendidikan
1.9	Angka Kelulusan (AL) SD/MI/Paket A	Persen	97,56	81,81	89,23	98	96,8	Dinas Pendidikan
1.10	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs/Paket B	Persen	95,87	100,15	96	96,2	96,62	Dinas Pendidikan
1.11	Guru SD kualifikasi ≥ DIV/S1	Persen	57,9	54,19	60,5	62,9	60,3	Dinas Pendidikan
1.12	Guru SMP kualifikasi ≥ DIV/S1	Persen	87,5	75,19	44,25	88,5	85,25	Dinas Pendidikan
1.13	Rasio ketersediaan sekolah PAUD	Persen	52,28		33,89	33,89	65,50	Dinas Pendidikan
1.14	Rasio ketersediaan sekolah SD	Persen	77,24		41,12	41,12	80	Dinas Pendidikan
1.15	Rasio ketersediaan sekolah SMP	Persen	55,66		33,33	33,33	68,5	Dinas Pendidikan
1.16	Rasio guru terhadap murid PAUD	Persen	73,4		38,2	38,2	60,50	Dinas Pendidikan
1.17	Rasio guru terhadap murid SD	Persen	81,82		41,11	41,11	80,05	Dinas Pendidikan
1.18	Rasio guru terhadap murid SMP	Persen	83,69		43,05	43,05	82,25	Dinas Pendidikan
2	**KESEHATAN**							
2.1	Angka kelangsungan hidup bayi (kematian bayi per 1000 kelahiran)	per 1000 kelahiran hidup	n/a	992	992	998	995	Dinas Kesehatan
2.2	Angka kematian ibu melahirkan (per 100.000 kelahiran hidup)	per 100.000 kelahiran hidup)	n/a	205	205	n/a	26	Dinas Kesehatan
2.3	Angka Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	68,74	67	67	68,5	69,5	Dinas Kesehatan
2.4	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Persen	n/a	0,12	0,12	5	3	Dinas Kesehatan
2.5	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Persen	23,47	23,02	24	7	5	Dinas Kesehatan
2.6	Rasio posyandu per satuan balita	per satuan balita	50	50	50	23	60	Dinas Kesehatan
2.7	Rasio pustu per satuan penduduk	per satuan penduduk	0,22	0,22	0,22	0,18	0,18	Dinas Kesehatan
2.8	Rasio puskesmas per satuan penduduk	Persen	1/31.000	1/31.000	1/31.000	1/10374	1/10374	Dinas Kesehatan
2.9	Jumlah Rumah Sakit di Kab. Nias Selatan yang terakreditasi	unit	0	0	-	1	2	Dinas Kesehatan

No	Aspek/ Fokus/ Bidang/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian				OPD Penanggung Jawab
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.10	Rasio dokter per satuan penduduk	Rasio	0,24	0,12	0,12	0,16	0,18	Dinas Kesehatan
2.11	Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk	per satuan penduduk	2	6,26	6,3	4,58	5,5	Dinas Kesehatan
2.12	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	13,5	12,9	12,9	100	100	Dinas Kesehatan
2.13	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	94,87	94,25	94,25	100	100	Dinas Kesehatan
2.14	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	15,86	12,6	13,5	9,39	9,39	Dinas Kesehatan
2.15	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.16	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	100	100	100	68	100	Dinas Kesehatan
2.17	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.18	Cakupan kunjungan bayi	Persen	100	85	95	88	100	Dinas Kesehatan
2.19	Cakupan puskesmas	Persen	100	102,9	100	102,85	102,85	Dinas Kesehatan
2.20	Cakupan pembantu puskesmas	Persen	70/461	70/461	70/461	67/461	67/461	Dinas Kesehatan
2.21	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Persen	49,3	40	40	20	25	Dinas Kesehatan
2.22	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Persen	66	52	66	61	91	Dinas Kesehatan
2.23	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Desa	10	10	10	286	297	Dinas Kesehatan
2.24	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	100	100	100	100	89	Dinas Kesehatan
2.25	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	100	100	100	100	84	Dinas Kesehatan
2.26	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	100	100	100	100	80	Dinas Kesehatan
2.27	Cakupan pelayanan balita sesuai standar	Persen	100	100	100	100	88	Dinas Kesehatan
2.28	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	77	Dinas Kesehatan
2.29	Persentase usia 15-59 thn mendapatkan screening kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	35,37	46	Dinas Kesehatan
2.30	Persentase Warga negera usia 60 thn ke atas mendapatkan screening kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	97	100	Dinas Kesehatan
2.31	Persentase penderita hypertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	24,5	11,7	Dinas Kesehatan
2.32	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	30	31,1	Dinas Kesehatan
2.33	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	100	100	100	97	70	Dinas Kesehatan

No	Aspek/ Fokus/ Bidang/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian				OPD Penanggung Jawab
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.34	Persentase org terduga penderita TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	100	100	100	6,28	100	Dinas Kesehatan
2.35	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai stand	Persen	100	100	100	28,32	100	Dinas Kesehatan
2.36	Cakupan Rumah tangga Sehat	Persen	65	50	50	51	80	Dinas Kesehatan
3	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							
3.1	**PEKERJAAN UMUM**							
3.1.1	Indeks layanan kualitas infrastruktur daerah	Persen	54,36		56,94	64,51	68,09	Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang
3.1.2	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	Persen	53	54,69	61	65	77,44	Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang
3.1.3	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	46,21	51,05	43	55,5	96,35	Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang
3.1.4	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Persen	53	53	30,7	62	60,14	Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang
3.1.5	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persen	49,55	49,55	49,55	50,6	100	Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang
3.1.6	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum layak	Persen	55,72	55,72	64,78	65,72	96,35	Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang
3.1.7	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk	Rasio	1:180266	1:180266	0	0	0	Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang
3.2	**PENATAAN RUANG**							
3.2.1	Tersedianya revisi dokumen RTRW Kab. Nias Selatan yang di-PERDA-kan	Dokumen	0	0	0	1	0	Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang
3.2.2	Tersedianya dokumen Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) yang di-PERDA-kan	Dokumen	0	0	0	1	1	Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang
4	**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN**							
4.1	Rasio Rumah layak huni	Persen	0,048	0,282	0,29	0,1143	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4.2	Jumlah penerima bantuan rumah layak huni dari pemerintah daerah	KK	451	125	12	19	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4.3	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN	Persen	76,04	81,64	81,64	86,73	0	Sekretariat Daerah
5	**KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							
5.1	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	18,12	18,12	18	19,5	88.70	Satpol-PP
5.2	Persentase pelangggaran Perda dan Perkada yang ditangani.	Persen	10	10	9,47	10	17.74	Satpol-PP
5.3	Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	Persen	n/a	80	80	67,41	66.40	Satpol-PP
5.4	Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	n/a	100	100	100	100	BPBD
5.5	Persentase pengaduan kedaruratan yang direspon < 5 jam	Persen	n/a	100	30	100	100	BPBD

No	Aspek/ Fokus/ Bidang/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian				OPD Penanggung Jawab
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.6	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	50	33,33	30	33,33	33,33	BPBD
5.7	Tingkat Kerukunan dan Toleransi Umat Beragama	Persen	n/a	100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
6	**SOSIAL**							
6.1	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	Persen	15	15	20	20	20	Dinas Sosial
6.2	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan (PKH)	RT	19000	17590	19000	17382	19026	Dinas Sosial
6.3	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM).	Persen	10	20	25	25	20	Dinas Sosial
6.4	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar pada saat dan setelah tanggap bencana darurat daerah kabupaten	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
B.1.2	**FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR**							
1	**KETENAGAKERJAAN**							
1.1	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	77,14		77,14	77,14	79,29	Dinas Tenaga Kerja Dan Koperasi Usaha Kecil Menengah
1.2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	n/a		2	-	3,12	Dinas Tenaga Kerja Dan Koperasi Usaha Kecil Menengah
1.3	Persentase Tenaga kerja yang ditempatan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota	Persen	16		32	32	0	Dinas Tenaga Kerja Dan Koperasi Usaha Kecil Menengah
1.4	Persentase jumlah usaha mikro yang dilakukan updating pendataan	Persen	n/a		50	50	100	Dinas Tenaga Kerja Dan Koperasi Usaha Kecil Menengah
2	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							
2.1	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	persen	17	17	30	17,14	14,29	DP2KBP3A
2.2	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (II)	persen	11,76	11,76	17,24	11,03	17,85	DP2KBP3A
2.3	lndeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	66,7	67,04	89,19	52,28	22	DP2KBP3A
2.4	Persentase kampung layak anak	Persen	100	-	75	3,03	27	DP2KBP3A
2.5	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	Persen	100	-	80	75	100	DP2KBP3A
3	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							

No	Aspek/ Fokus/ Bidang/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian				OPD Penanggung Jawab
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi)	Persen	91	25	25	29,98	27,8	DP2KBP3A
3.2	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Persen	14,34	75	70	7,64	13	DP2KBP3A
3.3	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Persen	14,34	13	70	14,7	31,1	DP2KBP3A
3.4	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Persen	14,35	10	0	0.21	0,8	DP2KBP3A
3.5	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	Persen	14,34	20	15	14,7	31	DP2KBP3A
3.6	Persentase Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Aktif	Persen	40	80	85	60	28	DP2KBP3A
4	**KETAHANAN PANGAN**							
4.2	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	77,6	79	80	73,9	79,20	Dinas Ketahanan Pangan
4.3	Tersedianya Regulasi Ketahanan Pangan yang di PERDA-kan	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Dinas Ketahanan Pangan
4.5	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Persen	62,86	-		57,14	31,88	Dinas Ketahanan Pangan
5	**LINGKUNGAN HIDUP**							
5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	69,22	70,44	53,56	-	76,37	Dinas Lingkungan Hidup
5.2	Persentae Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	Persen	50	50	-	-	70	Dinas Lingkungan Hidup
5.3	Persentase Pengelolaan sampah di wilayah kabupaten	Persen	26,63	26,4	32,69	8,06	25,13	Dinas Lingkungan Hidup
6	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**							
6.1	Persentase penduduk yang memiliki wajib KTP elektronik	Persen	64	74,61	70	70,47	85	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.2	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Persen	53,83	66,26	93	92	95	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.3	Persentase Kartu Identitas Anak (KIA)	Persen	8	-	22	22	45	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							
7.1	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Persen	21	30	31	31	31	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7.2	Jumlah Desa Tertinggal	Desa	219	138	142	142	142	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8	**PERHUBUNGAN**							
8.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	72.146	43.920	29.438	29,438	83.511	Dinas Perhubungan
8.2	Jumlah Bandar Udara (Bandara)	Unit	2	2	2	2	2	Dinas Perhubungan

No	Aspek/ Fokus/ Bidang/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian				OPD Penanggung Jawab
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.3	Jumlah dermaga penyeberangan.	Unit	8	8	14	14	14	Dinas Perhubungan
8.4	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi darat	Persen	73	73	100	75	77	Dinas Perhubungan
8.5	Persentase keselamatan lalu lintas di dalam kabupaten	Persen	99,84	99,83	49.84	85,84	99,84	Dinas Perhubungan
8.6	Cakupan Layanan fasilitas pengelolaan pelayaran	Persen	70	72	72	72	77	Dinas Perhubungan
9	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							
9.1	Tingkat Capaian Aplikasi untuk Penerapan e-Government	Persen	14	20	43	57	67	Dinas Komunikasi dan Informatika
9.2	Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	Persen	100	100	80	100	56	Dinas Komunikasi dan Informatika
10	**KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**							
10.1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persen	n/a		50	50	79,29	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah
10.2	Persentase koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam dan KSPPS/USPPS yang sehat dan cukup sehat	Persen	n/a		50	50	16	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah
11	**PENANAMAN MODAL**							
11.1	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten Nias Selatan	Persen	230	824	-	48	61,63	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
11.2	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Dokumen	8000	7405	1966	1453	749	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
11.3	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan Kabupaten	Aplikasi	1	1	2	3	3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
12	**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							
12.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	n/a	0	-	-	0,86	Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga
13	**STATISTIK**							
13.1	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen		20	20	40	60	Dinas Komunikasi dan Informatika
13.2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen		20	20	40	50	Dinas Komunikasi dan Informatika
14	**PERSANDIAN**							
14.1	Tersedianya persandian untuk pengamanan informasi pemerintah	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Komunikasi dan Informatika
15	**KEBUDAYAAN**							

No	Aspek/ Fokus/ Bidang/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian				OPD Penanggung Jawab
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.1	Persentase festival budaya daerah yang diselenggarakan di tingkat kabupaten	Persen	-	100	-	100	100	Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga
15.2	Jumlah SDM, lembaga, dan pranata yang dibina	Orang	-	25	30	50	135	Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga
15.3	Terlestarikannya cagar budaya	Persen	-	10	20	15	10	Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga
16	**PERPUSTAKAAN**							
16.1	Indeks Pembangunan literasi masyarakat	Poin	1	1	0,1	1,2	1,5	Dinas Perpustakaan
16.2	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Poin	50	51	22,3	45	54	Dinas Perpustakaan
17	**KEARSIPAN**							
17.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional.	Persen	n/a	40	50	10	10	Dinas Perpustakaan
B.2	**FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							
1	**PARIWISATA**							
1.1	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten per tahun	Persen	-0,86	104,5	0,25	-	16,33	Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga
1.2	Jumlah pelaku pariwisata yang terbina	Orang	120	280	200	-	65	Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga
2	**PERTANIAN**							
2.1	Produktifitas tanaman Padi per tahun	Ton/ hektar	4,27	3,986	5,09	4,34	4,360	Dinas Pertanian
2.2	Produktifitas tanaman Jagung per tahun	Ton/ hektar	6,13	6,23	6,3	6,26	6,32	Dinas Pertanian
2.3	Produktifitas Cabai per tahun	Ton/ hektar	4,5	4,8	4,8	4,92	5,4	Dinas Pertanian
2.4	Populasi Ternak Besar (Babi)	Ekor	4756	4853	7564	9441	12147	Dinas Pertanian
2.5	Produktifitas Kelapa per tahun	Ton/ hektar	1052,29	1057,5	1061,62	1067	1.076,00	Dinas Pertanian
3	**PERDAGANGAN**							
3.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan SIUP	Persen	n/a	n/a	0	0	0	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.2	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persen	n/a	n/a	50	0	0	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.3	Persentase Kinerja realisasi pupuk	Persen	n/a	n/a	0	65,57	46,15	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
4	**PERINDUSTRIAN**							
4.1	Terselesaikannya dokumen RIPIK menjadi Perda	Ada/ Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.2	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	Persen	n/a	n/a	0	-	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**							

No	Aspek/ Fokus/ Bidang/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian				OPD Penanggung Jawab
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.1	Produktifitas perikanan tangkap	Ton/ Tahun	8.600	8.600,00	8.810	8709	9505	Dinas Kelautan dan Perikanan
5.2	Produktifitas perikanan budidaya	Ton/ Tahun	10	30	33	40	38	Dinas Kelautan dan Perikanan
5.3	Peningkatan Konsumsi Makan Ikan	Kg per Kapita/Thn	69,94	69,94	69,9	-	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
B.3	**FOKUS LAYANAN URUSAN PENUNJANG**							
1	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN**							
1.1	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	Persen	62	74	88	86	100	Bappeda
1.2	Penjabaran Konsistensi Sub Kegiatan RKPD ke dalam APBD	Persen	58	83	67	100	100	Bappeda
1.3	Persentase usulan Musrenbang desa yang terakomodir dalam RKPD	Persen	4	4	19	44	44	Bappeda
1.4	Persentase desa yang melaksanakan Musrenbang tingkat desa.	Persen	50	50	73,6	63	82,43	Bappeda
2	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							
2.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	Persen	n/a	n/a	100	100	100	Bappeda
3	**KEUANGAN**							
3.1	Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Predikat	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah
3.2	Persentase PAD terhadap APBD	Persen	1,14	2,35	2,11	2,14	1,97	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah
3	**KEPEGAWAIAN**							
3.1	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan Kompetensi	Persen	69	60	61	41	11	Badan Kepegawaian Daerah
3.2	Persentase Kehadiran PNS	Persen	85	90	90	90	90	Badan Kepegawaian Daerah
3.3	Persentase penanganan kasus pelanggaran disiplin yang telah ditindaklanjuti	Persen	83	9	64	85	90	Badan Kepegawaian Daerah
3.4	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kategori	n/a	Baik	Baik	Baik	Baik	Badan Kepegawaian Daerah
	Persentase pegawai struktural yang mengikuti Diklat dan bersertifikat	Persen	-	0	5	5	15	Badan Kepegawaian Daerah
3.5	Persentase pegawai fungsional yang mengikuti Diklat dan bersertifikat	Persen	-	0	-		0	Badan Kepegawaian Daerah
4	**PENGAWASAN**							
4.1	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang di Tindaklanjuti	Persen	66	67,31	73,02	65	80	Inspektorat
4.2	Tingkat Maturitas SPIP	Level	II	II	II	II	II	Inspektorat
4.3	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	II	II	II	II	III	Inspektorat
5	**SEKRETARIAT DAERAH**							
5.1	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Predikat	Sedang	-	-	Sedang	0	Sekretariat Daerah
5.2	Nilai LPPD	Nilai	19044	-	-	1904	0	Sekretariat daerah

No	Aspek/ Fokus/ Bidang/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian				OPD Penanggung Jawab
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.3	Indeks Reformasi Birokrasi	n/a	C	-	C	CC (51,76)	0	Sekretariat daerah
5.4	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instnsi Pemerintahan (SAKIP)	Predikat	C	C	C (42,54)	CC (50,17)	0	Sekretariat daerah
6	**SEKRETARIAT DEWAN**							
6.1	Persentase Rancangan Perda yang ditetapkan jadi Perda	Persen	100	100	100	80	43,75	Sekretariat DPRD
6.2	Pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu	Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Sekretariat DPRD
7	**Unsur Kewilayahan**							
7.1	Persentase ketercapaian pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Persen	100	100	100	100	100	Seluruh Kecamatan
7.2	Persentase APBDes yang difasilitasi kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	Seluruh Kecamatan
7.3	Nilai Lakip Kecamatan	Predikat	C	C	-	-	B	Seluruh Kecamatan
C	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**							
C.1	**FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH**							
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita ADHB	milyar rupiah/tahun	5369,47	5.951,02	-	-	6577,13	Seluruh Perangkat Daerah
2	Nilai Tukar Nelayan	Poin	99,52	99,52	109,72	-	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten per tahun	Persen	-0,86	104,5	0,25	-	0	Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga
4	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	0		-	-	0	Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga
5	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN	Persen	76,04	81,64	81,64	86,73	0	Sekretariat Daerah
C.2	**Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur**							
1	Indeks layanan kualitas infrastruktur daerah	Persen	54,36	55,21	56,94	64,51	35,2	Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang
C.3	**FOKUS IKLIM BERINVESTASI**							
1	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten Nias Selatan	Persen	230	824	-	48	12,04	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2	Persentase PAD terhadap APBD	Persen	1,14	2,35	2,81	2,14	1,97	BPKPAD
C.4	**FOKUS SUMBER DAYA MANUSIA**							
1	APM SD/MI/Paket A	Persen	96,08	96,04	87,48	86,48	91,41	Dinas Pendidikan
2	APM SMP/MTs/Paket B	Persen	70,44	71,59	94,79	90,79	67,35	Dinas Pendidikan
3	Angka Kelulusan (AL) SD/MI/Paket A	Persen	97,56	81,81	89,23	96,5	96,8	Dinas Pendidikan
4	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs/Paket B	Persen	95,87	100,15	96	95,58	96,62	Dinas Pendidikan
5	Guru SD kualifikasi ≥ DIV/S1	Persen	57,9	54,19	60,5	61	60,3	Dinas Pendidikan
6	Guru SMP kualifikasi ≥ DIV/S1	Persen	87,5	75,19	44,25	87,55	85,25	Dinas Pendidikan

No	Aspek/ Fokus/ Bidang/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian				OPD Penanggung Jawab
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Persen	23,47	50	24	7	5	Dinas Kesehatan

Sumber : Laporan Evaluasi Hasil RPJMD Kabuaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 (data diolah)

2.4.4.2 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat secara merata dan terjangkau sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan dasar. SPM diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan diperjelas dalam berbagai peraturan teknis lainnya.

2.4.4.2.1 Urusan Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang pendidikan sebagai berikut:

a. pendidikan anak usia dini;
b. pendidikan dasar;
c. pendidikan kesetaraan

berikut pencapaian standar pelayanan minimal urusan pendidikan di Kabupaten Nias Selatan

Tabel 2.18
Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan di Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Capaian SPM				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7–15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	70,17 %	88,65 %	37,67 %	79,56 %	95,04 %
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	91,67 %	87.50 %	30,00 %	87,14 %	56,20 %
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5 – 6Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100 %	40.36 %	64,10 %	48,05 %	93,95 %

Sumber: Laporan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Nias Selatan TA. 2024 (data diolah)

2.4.4.2.2 Urusan Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang kesehatan sebagai berikut:

a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
d. pelayanan kesehatan balita;
e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;pelayanan kesehatan pada usia produktif;
f. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
g. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
h. pelayanan kesehatan penderita Diabetes melitus;
i. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
j. pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis;
k. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia *(Human Immunodeficiency Virus).*

berikut pencapaian standar pelayanan minimal urusan kesehatan di Kabupaten Nias Selatan

Tabel 2.19
Realisasi Pencapaian SPM Urusan Kesehatan di Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Capaian SPM				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	99,71 %	81,67 %	71,33 %	47,36%	74,74%
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	98,71 %	71,87 %	45,86 %	49,51%	80,67%
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	82,18 %	74,47 %	49,09%	82,19%
4.	Pelayanan kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	51,73 %	89.07 %	67,89 %	68,51%	79,29%
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	26,71 %	97 %	82,46 %	84,15%	97,01%
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	17,33 %	72,07 %	85,65 %	35,68%	10,02%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Capaian SPM				
			2020	2021	2022	2023	2024
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	16,02 %	95,24 %	78,18 %	54,58%	82,65%
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	85,79 %	95.44 %	77,70 %	41,09%	6,12%
9.	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes delitus	Jumlah Warga Negara penderita Diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	33,33 %	84.67 %	68,54 %	60,36%	22,75%
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani Kesehatan	0,00 %	85.34 %	56,34 %	41,98%	74,84%
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberculosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	90.20 %	70,63 %	44,59%	66,29%
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia *(Human Immunodeficiency Virus)*	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia *(Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan*	1,13 %	91.57 %	87,88 %	55,94%	7,00%

Sumber: Laporan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Nias Selatan TA. 2024 (data diolah)

2.4.4.2.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 29/PRT/M 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Jenis-jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

a. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

berikut pencapaian standar pelayanan minimal urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Nias Selatan

Tabel 2.20
Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian SPM				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	54, 80 %	69.91 %	16,09 %	7,92%	33,92%
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	3,31 %	53.22 %	14,39 %	26,68%	37,05%

Sumber: Laporan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Nias Selatan TA. 2024 (data diolah)

2.4.4.2.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 29/PRT/M2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, bahwa jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal perumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah sebagai berikut:

a. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
b. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah;
c. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.

berikut pencapaian standar pelayanan minimal urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Nias Selatan

Tabel 2.21
Realisasi Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Capaian SPM				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	0,00 %	0,00 %	6,00 %	6,00 %	0,00 %
2.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	0,00 %	0,00 %	0,33 %	0,33 %	0,00 %
3.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Sumber: Laporan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Nias Selatan TA. 2024 (data diolah)

2.4.4.2.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Adapun untuk urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dasar hukum dalam penerapan SPM diantaranya:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupate/Kota; dan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah sebagai berikut:

a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum terhadap penegakan Perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi;
b. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum terhadap jumlah penegakan Perda sesuai mutu;
c. pelayanan informasi rawan bencana;
d. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana ;
e. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
f. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

berikut pencapaian standar pelayanan minimal urusan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Nias Selatan.

Tabel 2.22
Realisasi Pencapaian SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Capaian SPM				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum terhadap penegakan Perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan akibat dari penegakkan hukum Perda dan Perkada	0,00 %	0.00 %	0,00 %	0.00 %	82,86%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Capaian SPM				
			2020	2021	2022	2023	2024
2.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum terhadap jumlah penegakan Perda	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	68,15 %	35,46 %	68,15 %	11.19 %	100%
3.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	1,24 %	3.11 %	1,24 %	3.11 %	100%
	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0,00 %	4.34 %	0,00 %	4.34 %	0,00%
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	0,00 %	0.00 %	0,00 %	0.00 %	57,14%
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	40,00 %	30,21 %	40,00 %	0.00 %	82,86%

Sumber: Laporan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Nias Selatan TA. 2024 (data diolah)

2.4.4.2.6 Urusan Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, bahwa jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang sosial adalah sebagai berikut:

a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial;
b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial;
c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial;
d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial;
e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/ kota.

berikut pencapaian standar pelayanan minimal urusan Bidang Urusan Sosial di Kabupaten Nias Selatan

Tabel 2.23
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial di Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian SPM				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,33 %	91,05%
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,28 %	99,90%
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	0,33 %	0,00 %	0,33 %	0,33 %	87,38%
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	98,30%
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	0,00 %	0,00 %	0,00 %	5,00 %	98,57%

Sumber: Laporan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Nias Selatan TA. 2024 (data diolah)

2.4.4.3 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan kesepakatan pembangunan global yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 sebagai kelanjutan dari *Millennium Development Goals* (MDGs). TPB dirancang sebagai kerangka pembangunan jangka panjang yang menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola pemerintahan. Agenda ini mencakup 17 tujuan, 169 target, dan 241 indikator yang menjadi acuan bersama bagi seluruh negara, termasuk Indonesia, dalam mengarahkan pembangunan menuju keberlanjutan.

Pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pembangunan dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, termasuk Kabupaten Nias Selatan. Pembagian kewenangan ini juga berlaku dalam pelaksanaan indikator TPB, sehingga terdapat indikator yang menjadi tanggung

jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten Nias Selatan sesuai peran dan kapasitasnya.

Aspek-aspek tersebut saling berkaitan yang dijadikan sebagai pilar utama dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yaitu pilar sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola kelembagaan. Keempat pilar tersebut diuraikan dalam 17 TPB yang dicanangkan untuk menjadi target bagi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah. Dalam proses perencanaan dan penyusunan kebijakan, TPB berperan sebagai tolak ukur Perumusan Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) yang memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Masing-masing tujuan pada TPB memiliki indikator yang berperan sebagai instrumen penilaian terhadap pencapaian target TPB.

Kategori capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di kabupaten Nias Selatan dibagi atas empat kategori yaitu : (1) sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS), (2) sudah dilaksanakan belum mencapai target nasional (SB), (3) belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (BB) dan (4) tidak ada data/belum ada data (NA). Untuk lebih jelasnya ada dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini.

Tabel 2.24
Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)
di Kabupaten Nias Selatan

Tujuan	Tujuan SDGs	Kategori Indikator				Jumlah
		SS	SB	BB	N/A	
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	6	14	-	4	24
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	4	5	1	1	11
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	10	16	2	6	34
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	1	10	1	1	13
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	6	7	1	-	14
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	2	5	6	2	15
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	1	10	8	-	19
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	-	6	3	1	10
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	3	2	4	2	11

Tujuan	Tujuan SDGs	Kategori Indikator				Jumlah
		SS	SB	BB	N/A	
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	4	1	2	1	8
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	1	2	1	-	4
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	1	-	-	1	2
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	-	-	1	3	4
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	7	2	3	9	21
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	6	5	1	3	15
Total		**52**	**85**	**34**	**34**	**205**
Persentase		**25%**	**41%**	**17%**	**17%**	**100%**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029

Grafik 2.44
Diagram Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Nias Selatan

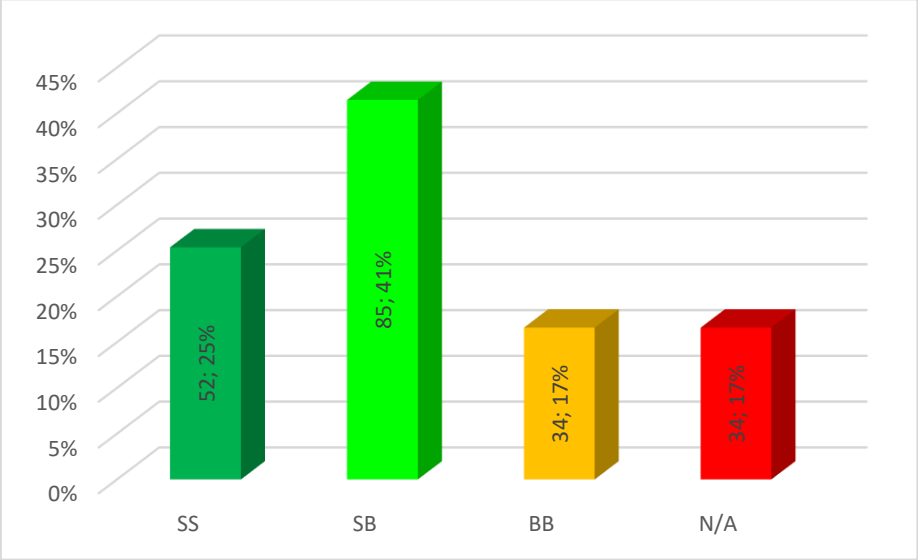

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Nias Selatan telah mencapai target (SS) sebesar 25,37% (52 indikator dari 205 indikator). Kondisi ini memerlukan kerja keras dan terpadu untuk meningkatkan pencapaian lebih tinggi. Hal ini dapat juga dilihat dari indikator-indikator belum mencapai target (SB) yaitu : 41% (85 indikator dari 205 indikator) masih lebih besar dari yang telah mencapai target.

Jika dilihat berdasarkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terdapat tiga OPD yang telah berhasil mencapai 100 persen indikator sesuai dengan target nasional, yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Daerah, dan Sekretariat DPRD. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah OPD yang belum menunjukkan pencapaian indikator sama sekali, antara lain Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Inspektorat Daerah, Sekretariat Daerah Bagian Hukum, serta Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan.

Apabila ditinjau dari tingkat ketercapaian indikator, Dinas Kesehatan menjadi OPD dengan capaian tertinggi, yakni mencapai 17 indikator atau sebesar 35 persen dari total 49 indikator yang menjadi tanggung jawabnya. Gambaran lebih rinci mengenai tingkat ketercapaian masing-masing OPD dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 2.25
Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)
Berdasarkan OPD di Kabupaten Nias Selatan

No	OPD	Kategori Indikator				Jumlah
		SS	SB	BB	N/A	
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	-	-	-	2
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	1	-	1
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4	3	2	4	13
4	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah	2	2	-	4	8
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	1	1	-	3
6	Badan Pusat Statistik	6	8	1	6	21
7	Dinas Kebudayaan, Pariwisata Dan Kepemudaan Olahraga	1	2	2	-	5
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	3	1	-	5
9	Dinas Kesehatan	17	26	2	4	49
10	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	1	1	2
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	7	1	2	10
12	Dinas Lingkungan Hidup	2	2	2	3	9
13	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	-	3	2	-	5
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1	2	-	1	4
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	2	-	-	2
16	Dinas Pendidikan	2	10	-	-	12
17	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perempuan dan Perlindungan Anak	7	6	2	1	16

No	OPD	Kategori Indikator				Jumlah
		SS	SB	BB	N/A	
18	Dinas Perhubungan	-	1	-	-	1
19	Dinas Pertanian	-	1	1	-	2
20	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	-	1	3	2	6
21	Dinas Sosial	2	1	1	3	7
22	Dinas Tenaga Kerja Dan Koperasi Usaha Kecil Menengah	1	4	9	-	14
23	Inspektorat Daerah	-	-	1	-	1
24	Sekretariat Daerah	1	-	-	-	1
25	Sekretariat Daerah Bagian Hukum	-	-	-	1	1
26	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi	1	-	1	1	3
27	Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan	-	-	-	1	1
28	Sekretariat DPRD	1	-	-	-	1
Total		52	85	34	34	205

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029

Grafik 2.45
Diagram Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Berdasarkan OPD di Kabupaten Nias Selatan

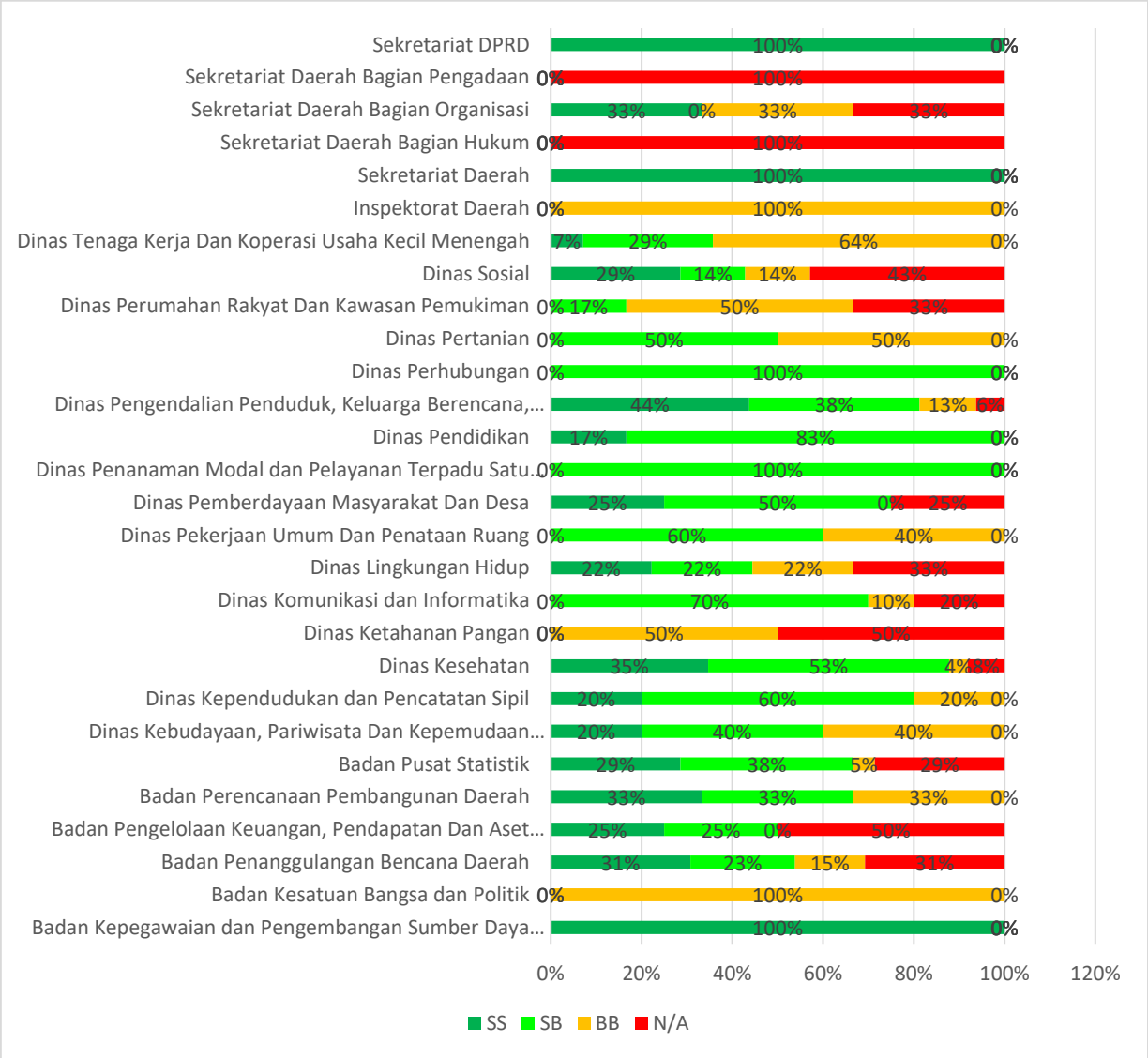

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029

2.5 Gambaran Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, untuk dapat melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah diperlukan analisis pelaksanaan APBD tahun sebelumnya, yang dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Postur APBD terdiri dari komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Oleh karena itu, dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu perlu memahami jenis-jenis objek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah. Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi.

2.5.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun 2020-2024

Secara umum komponen APBD Kabupaten Nias Selatan terdiri atas: (1) Komponen Pendapatan Daerah, yang di dalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; (2) Komponen Belanja Daerah, yang di dalamnya terdapat Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer; dan (3) Komponen Pembiayaan Daerah, yang di dalamnya terdapat Penerimaan Pembiayaan Daerah, dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Selama periode 2020-2024, realisasi Pendapatan Daerah mengalami fluktuasi dibandingkan target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020 hingga 2022, realisasi pendapatan selalu berada di bawah target dengan persentase pencapaian berkisar antara 95,88 persen hingga 98,40 persen. Penurunan terbesar terjadi pada tahun 2021, dengan selisih realisasi dan target sebesar Rp60,19 miliar. Namun, pada tahun 2023, terdapat kenaikan signifikan dalam realisasi pendapatan yang melebihi target dengan pencapaian 101,32 persen atau Rp20,07 miliar lebih tinggi dari target yang direncanakan. Kondisi ini menunjukkan peningkatan efektivitas dalam pengelolaan pendapatan, baik dari sektor pajak daerah, retribusi, maupun sumber lainnya. Pada tahun 2024, realisasi pendapatan kembali sedikit mengalami penurunan di bawah target, mencapai 99,49 persen, dengan selisih Rp8,05 miliar. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor eksternal, seperti ketidakstabilan ekonomi atau perubahan kebijakan

fiskal. Secara umum, meskipun terdapat beberapa tahun dengan realisasi di bawah target, tren pendapatan daerah menunjukkan kestabilan dengan upaya peningkatan penerimaan di tahun-tahun terakhir.

Belanja daerah Kabupaten Nias Selatan pada periode 2020-2024 secara konsisten lebih rendah dari target yang ditetapkan. Hal ini ditunjukkan oleh rasio realisasi belanja yang berkisar antara 90,26 persen hingga 92,76 persen setiap tahunnya. Pada tahun 2020, belanja daerah terealisasi 92,76 persen, atau Rp121,25 miliar lebih rendah dari target. Tren ini terus berlanjut di tahun 2021 hingga 2024, dengan selisih yang semakin besar, terutama pada tahun 2023, di mana belanja yang terealisasi hanya 90,26 persen dari target, dengan kekurangan sekitar Rp155,02 miliar. Fenomena ini dapat diartikan sebagai upaya penghematan anggaran atau adanya kendala dalam realisasi program dan kegiatan, seperti keterlambatan lelang, perubahan prioritas belanja, atau efisiensi dalam penggunaan anggaran.

Penerimaan pembiayaan menunjukkan pola yang beragam selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, realisasi penerimaan pembiayaan melebihi target sebesar Rp216,19 miliar. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, penerimaan pembiayaan sangat kecil dan hampir tidak mengalami perubahan signifikan. Pada tahun 2024, terdapat peningkatan signifikan dalam target penerimaan pembiayaan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yakni mencapai Rp175,09 miliar. Hal ini mengindikasikan adanya kebutuhan yang lebih besar terhadap sumber pembiayaan, baik untuk menutup defisit anggaran maupun untuk mendanai proyek-proyek pembangunan daerah. Realisasi penerimaan pembiayaan pada tahun 2024 juga hampir mencapai 100 persen dari target, dengan selisih yang sangat kecil, yakni hanya Rp0,63, yang menunjukkan bahwa perencanaan pembiayaan telah dilakukan dengan perhitungan yang matang. Pengeluaran pembiayaan dalam periode 2020-2024 menunjukkan pola yang bervariasi.

Tahun 2020 tidak memiliki pengeluaran pembiayaan, sedangkan pada tahun 2021, realisasi pengeluaran mencapai Rp891,81 juta, atau 100 persen dari target. Namun, pada tahun 2022, terdapat target pengeluaran pembiayaan sebesar Rp3,74 miliar, tetapi realisasinya nol rupiah, yang berarti dana tersebut tidak dikeluarkan. Hal ini bisa terjadi karena perubahan kebijakan fiskal atau pengalihan dana ke sektor lain yang lebih prioritas. Tahun 2023 dan 2024

menunjukkan tren stabil dengan pengeluaran pembiayaan mencapai 100 persen dari target, masing-masing sebesar Rp4,5 miliar dan Rp5 miliar. Stabilitas ini menunjukkan perencanaan yang lebih matang dalam pengelolaan pengeluaran pembiayaan pada tahun-tahun terakhir.

Tabel 2.26
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Penerimaan Pembiayaan, dan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	Persen	Bertambah / (Berkurang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pendapatan Daerah				
2020	1.483.534.952.584,80	1.459.870.566.296,50	98,40	(23.664.386.288,30)
2021	1.461.332.092.084,00	1.401.145.250.515,16	95,88	(60.186.841.568,84)
2022	1.393.155.009.075,00	1.357.339.845.820,03	97,43	(35.815.163.254,97)
2023	1.523.254.255.904,94	1.543.327.013.979,97	101,32	20.072.758.075,03
2024	1.560.183.438.647,37	1.552.128.805.972,14	99,48	(8.054.632.675,23)
Belanja Daerah				
2020	1.674.906.659.834,29	1.553.661.000.944,26	92,76	(121.245.658.890,03)
2021	1.549.477.546.628,80	1.411.390.331.215,25	91,09	(138.087.215.413,55)
2022	1.391.469.802.328,00	1.286.145.493.191,83	92,43	(105.324.309.136,17)
2023	1.592.005.031.775,00	1.436.980.765.349,40	90,26	(155.024.266.425,60)
2024	1.730.280.463.148,00	1.592.441.517.658,05	92,03	(137.838.945.489,95)
Penerimaan Pembiayaan				
2020	108.964.392.033,71	109.180.580.762,71	100,20	216.188.729,00
2021	13.193.699.252,95	13.193.699.162,95	100,00	(90,00)
2022	2.056.423.242,00	2.056.423.241,86	100,00	(0,14)
2023	73.250.775.870,06	73.250.775.870,06	100,00	0,00
2024	175.097.024.500,63	175.097.024.500,00	100,00	(0,63)
Pengeluaran Pembiayaan				
2020	0,00	0,00		0,00
2021	891.813.186,00	891.813.186,00	100,00	0,00
2022	3.741.629.989,00	0,00	0,00	(3.741.629.989,00)
2023	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	100,00	0,00
2024	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	0,00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020-2024 (data diolah)

Tabel 2.27
Realisasi APBD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020-2024

Kode	Uraian	Realisasi Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	**PENDAPATAN**					
04.01	Pendapatan Asli Daerah	16.598.894.145,70	32.822.657.272,16	39.084.921.881,03	37.993.792.368,97	30.783.762.868,34
04.02	Pendapatan Transfer	1.347.225.124.818,00	1.295.553.732.105,00	1.318.254.923.939,00	1.505.333.221.611,00	1.507.603.342.818,80
04.03	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	96.046.547.332,80	72.768.861.138,00	0,00	0,00	13.741.700.285,00
	Jumlah Pendapatan	**1.459.870.566.296,50**	**1.401.145.250.515,16**	**1.357.339.845.820,03**	**1.543.327.013.979,97**	**1.552.128.805.972,14**
5	**BELANJA**					
05.01	Belanja Operasi	756.468.191.393,00	687.216.771.816,08	654.207.605.050,60	728.592.793.890,40	825.523.799.703,80
05.02	Belanja Modal	293.434.513.125,26	245.107.576.769,17	191.302.931.909,23	243.948.650.092,00	292.305.992.715,25
05.03	Belanja Tidak Terduga	10.699.076.640,00	161.396.530,00	2.264.106.500,00	0,00	1.954.521.800,00
05.04	Belanja Transfer	493.059.219.786,00	478.904.586.100,00	438.370.849.732,00	464.439.321.367,00	472.657.203.439,00
	Jumlah Belanja	**1.553.661.000.944,26**	**1.411.390.331.215,25**	**1.286.145.493.191,83**	**1.436.980.765.349,40**	**1.592.441.517.658,05**
	Surplus/(Defisit)	**(93.790.434.647,76)**	**(10.245.080.700,09)**	**71.194.352.628,20**	**106.346.248.630,57**	**(40.312.711.685,91)**
6	**PEMBIAYAAN**					
06.01	Penerimaan Pembiayaan	109.180.580.762,71	13.193.699.162,95	2.056.423.241,86	73.250.775.870,06	175.097.024.500,00
06.02	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	891.813.186,00	0,00	4.500.000.000,00	5.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	**109.180.580.762,71**	**12.301.885.976,95**	**2.056.423.241,86**	**68.750.775.870,06**	**170.097.024.500,00**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	**15.390.146.114,95**	**2.056.805.276,86**	**73.250.775.870,06**	**175.097.024.500,63**	**129.784.312.814,09**

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020-2024 (data diolah)

2.5.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Akun pendapatan daerah terdiri atas 3 kelompok, yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang komponennya dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas: (1) Pajak daerah (2) Retribusi daerah (3) Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
b. Pendapatan Transfer, terdiri dari:
   1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas: (a) Dana Perimbangan, (b) Dana Insentif Daerah, (c) Insentif Fiskal, dan (d) Dana Desa.
   2. Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri atas (a) Pendapatan Bagi Hasil dan (b) Bantuan keuangan.
   3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas: (a) Hibah dan (b) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pendapatan daerah Kabupaten Nias Selatan selama periode 2020-2024 menunjukkan tren fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 1,78 persen. Pada tahun 2020, realisasi pendapatan tercatat sebesar Rp1,46 triliun dan mengalami penurunan pada tahun 2021 dan 2022. Namun, pada tahun 2023 dan 2024, pendapatan daerah kembali meningkat mendekati angka Rp1,55 triliun.

Grafik 2.46
Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2020-2024 (dalam milyar rupiah)

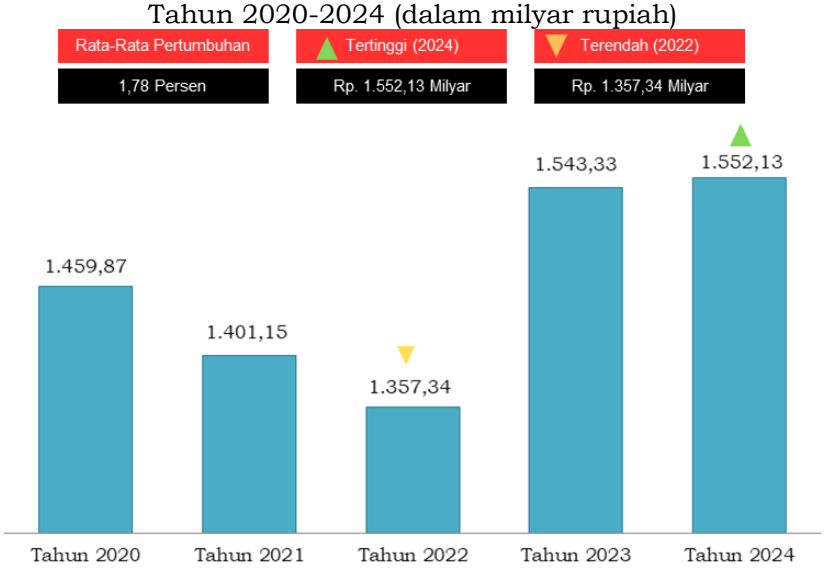

Grafik 2.47
Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020-2024 Berdasarkan Komponen Pendapatan (dalam milyar rupiah)

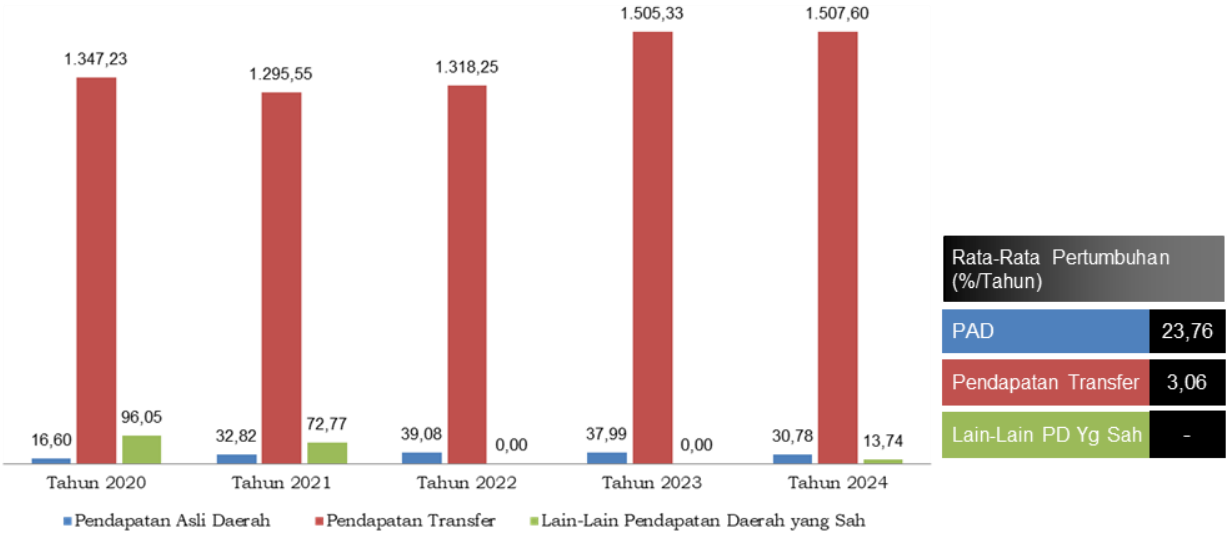

Grafik 2.48
Persentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2024 Berdasarkan Komponen Pendapatan

2.5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah mengalami pertumbuhan signifikan dengan rata-rata 23,76 persen per tahun, menunjukkan adanya upaya peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah yang lebih mandiri. Pada tahun 2020, Pendapatan Asli Daerah hanya sebesar Rp16,60 miliar, namun meningkat menjadi Rp39,08 miliar pada tahun 2022 sebelum mengalami sedikit penurunan pada tahun 2024 menjadi Rp30,78 miliar. Secara rinci, peningkatan PAD dipengaruhi oleh komponen berikut:

a. Pajak Daerah mengalami kenaikan signifikan dengan rata-rata 26,99 persen per tahun, meningkat dari Rp5,70 miliar pada 2020 menjadi Rp14,02 miliar pada 2024.
b. Retribusi Daerah juga menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 15,40 persen.
c. Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan tumbuh dengan rata-rata 20,06 persen.

d. Lain-lain PAD yang Sah mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 27,67 persen, meskipun pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022.

Grafik 2.49
Pertumbuhan Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020-2024 (dalam juta rupiah)

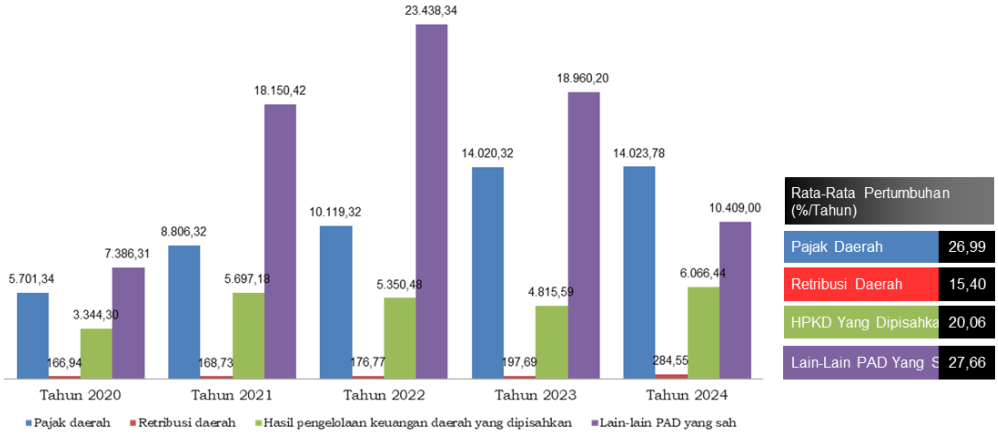

Grafik 2.50
Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2024

2.5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer tetap menjadi komponen utama pendapatan daerah dengan kontribusi lebih dari 90 persen dari total pendapatan. Rata-rata pertumbuhan pendapatan transfer sebesar 3,06 persen per tahun. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat tumbuh sebesar 3,02 persen, dengan kenaikan pada komponen Dana Desa sebesar 3,59 persen, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar 25,37 persen dan Dana Bagi Hasil (DBH)

yang tumbuh signifikan sebesar 22,13 persen. Dana Alokasi Umum (DAU) hanya mengalami pertumbuhan sebesar 2,52 persen, sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik justru mengalami kontraksi sebesar (2,12 persen). Dana Insentif Daerah (DID) dan Insentif Fiskal muncul pada tahun 2023 dan 2024, tetapi tidak memiliki data pertumbuhan. Pendapatan Transfer Antar Daerah menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 9,20 persen, terutama didorong oleh Pendapatan Bagi Hasil Pajak, yang tumbuh 8,19 persen.

Grafik 2.51
Pertumbuhan Komponen Pendapatan Transfer Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2020-2024 (dalam milyar rupiah)

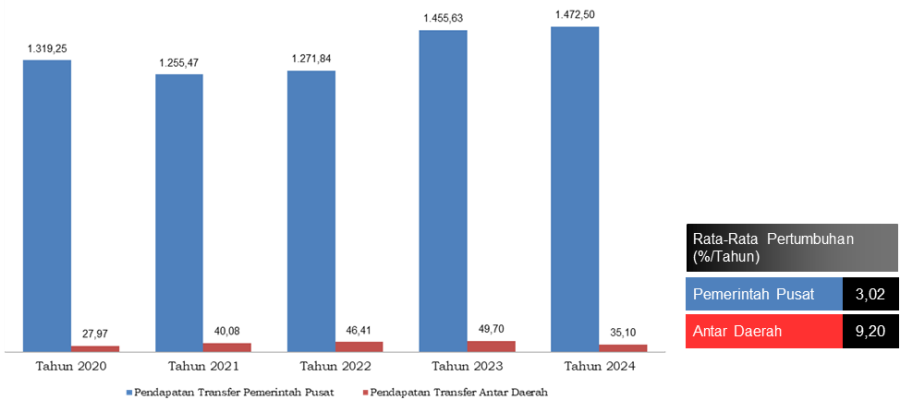

Grafik 2.52
Persentase Pertumbuhan Pendapatan Transfer
Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2024

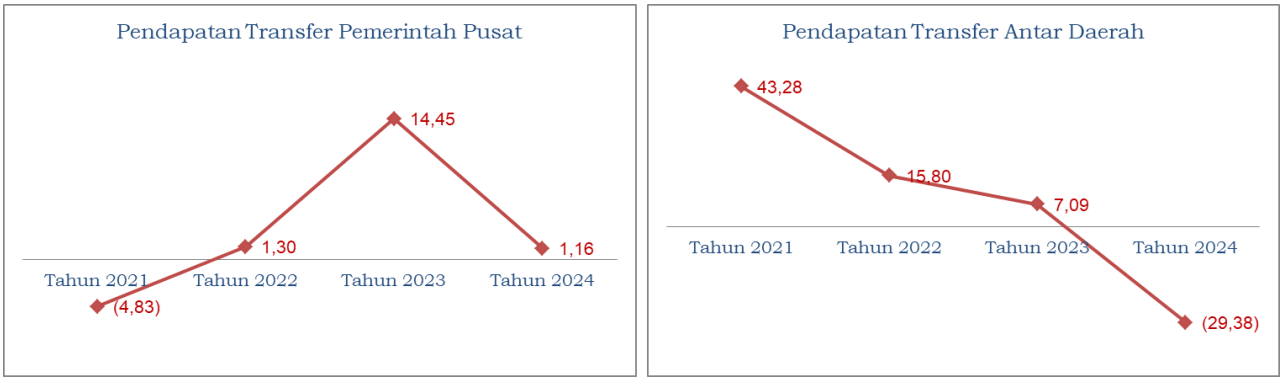

2.5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan dari pos ini mengalami ketidakstabilan, dengan penurunan drastis pada tahun 2022 dan 2023, sebelum muncul kembali pada tahun 2024 dengan angka Rp13,74 miliar. Ketiadaan data pada beberapa tahun disebabkan oleh perubahan penempatan akun pendapatan.

Grafik 2.53
Pertumbuhan Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020-2024 (dalam milyar rupiah)

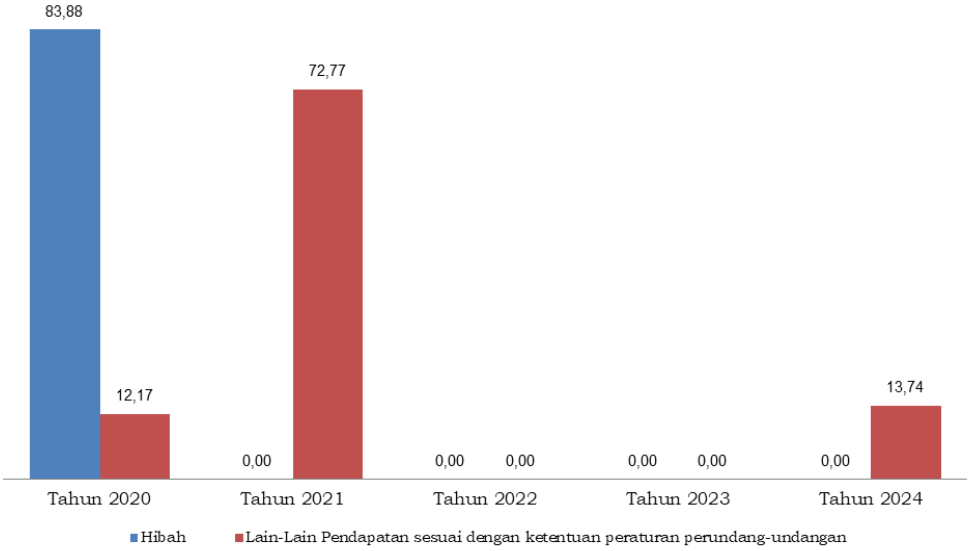

Berikut ini merupakan keseluruhan komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan yang secara agregat menunjukkan tren pertumbuhan positif. Rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan pada periode 2020 hingga 2024 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.28
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020–2024

Kode	Uraian	Realisasi (Rp)					Rata-Rata Pertumbuhan
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	**PENDAPATAN**	**1.459.870.566.296,50**	**1.401.145.250.515,16**	**1.357.339.845.820,03**	**1.543.327.013.979,97**	**1.552.128.805.972,14**	**1,78**
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**16.598.894.145,70**	**32.822.657.272,16**	**39.084.921.881,03**	**37.993.792.368,97**	**30.783.762.868,34**	**23,76**
4.1.01	Pajak daerah	5.701.344.377,60	8.806.322.592,62	10.119.323.120,50	14.020.315.098,45	14.023.775.776,15	26,99
4.1.02	Retribusi daerah	166.938.289,00	168.732.630,00	176.771.625,00	197.686.288,00	284.552.800,00	15,40
4.1.03	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	3.344.299.449,00	5.697.181.857,00	5.350.484.156,00	4.815.589.663,00	6.066.435.843,00	20,06
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	7.386.312.030,10	18.150.420.192,54	23.438.342.979,53	18.960.201.319,52	10.408.998.449,19	27,66
4.2	**Pendapatan Transfer**	**1.347.225.124.818,00**	**1.295.553.732.105,00**	**1.318.254.923.939,00**	**1.505.333.221.611,00**	**1.507.603.342.818,80**	**3,06**
4.2.01	***Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat***	***1.319.251.191.664,00***	***1.255.472.466.063,00***	***1.271.842.426.941,00***	***1.455.632.175.515,00***	***1.472.502.516.093,80***	***3,02***
4.2.01.01	Dana perimbangan	968.464.320.320,00	908.496.178.535,00	899.882.662.212,00	1.034.202.996.495,00	1.049.414.609.594,80	2,31
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	14.451.759.811,00	24.130.045.034,00	30.178.258.826,00	30.497.531.137,00	29.099.426.597,00	22,13
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	626.743.578.000,00	617.556.640.000,00	568.966.577.033,00	650.139.402.200,00	683.537.602.435,00	2,52
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	327.268.982.509,00	159.567.890.244,00	123.120.188.290,00	152.927.148.799,00	141.097.087.052,00	(2,12)
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik		107.241.603.257,00	177.617.638.063,00	200.638.914.359,00	195.680.493.510,80	25,37
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)				23.520.905.000,00		
4.2.01.02.01	DID				23.520.905.000,00		
4.2.01.05	Dana desa	350.786.871.344,00	346.976.287.528,00	371.959.764.729,00	397.908.274.020,00	403.004.364.499,00	3,59
4.2.01.05.01	Dana Desa	350.786.871.344,00	346.976.287.528,00	371.959.764.729,00	397.908.274.020,00	403.004.364.499,00	3,59
4.2.01.06	Insentif Fiskal					20.083.542.000,00	
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal					20.083.542.000,00	
4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**27.973.933.154,00**	**40.081.266.042,00**	**46.412.496.998,00**	**49.701.046.096,00**	**35.100.826.725,00**	**9,20**
4.2.02.01	Pendapatan bagi hasil	27.973.933.154,00	40.081.266.042,00	43.015.327.745,00	44.209.266.042,00	35.100.826.725,00	8,19
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	27.973.933.154,00	40.081.266.042,00	43.015.327.745,00	44.209.266.042,00	35.100.826.725,00	8,19
4.2.02.02	Bantuan keuangan	0,00	0,00	3.397.169.253,00	5.491.780.054,00	0,00	
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0,00	0,00	3.397.169.253,00	5.491.780.054,00	0,00	
4.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**96.046.547.332,80**	**72.768.861.138,00**	**0,00**	**0,00**	**13.741.700.285,00**	
4.3.01	Hibah	83.879.290.080,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.03	Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	12.167.257.252,00	72.768.861.138,00	0,00	0,00	13.741.700.285,00	

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020-2024 (data diolah)

2.5.1.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Tranfer.

Analisis Belanja Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi kebijakan pembelanjaan pada periode 2020-2024. Hasil analisis ini digunakan sebagai dasar dalam menentukan rencana Belanja Daerah di masa mendatang guna meningkatkan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Realisasi belanja daerah Kabupaten Nias Selatan dalam kurun waktu 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Secara keseluruhan, total belanja daerah mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1,13 persen per tahun. Belanja operasi masih mendominasi dengan kenaikan yang relatif stabil, sementara belanja modal menunjukkan fluktuasi yang cukup tinggi. Tren belanja tidak terduga yang sangat variatif mencerminkan respons daerah terhadap kondisi darurat dan kebijakan keuangan yang adaptif. Sedangkan, belanja transfer juga mengalami dinamika, terutama terkait bantuan keuangan kepada pemerintah desa.

Untuk perencanaan ke depan, stabilisasi belanja operasi, efisiensi dalam belanja barang dan jasa, serta optimalisasi belanja modal perlu menjadi perhatian utama guna memastikan penggunaan anggaran yang lebih efektif dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Nias Selatan.

Grafik 2.54
Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2020-2024 (dalam milyar rupiah)

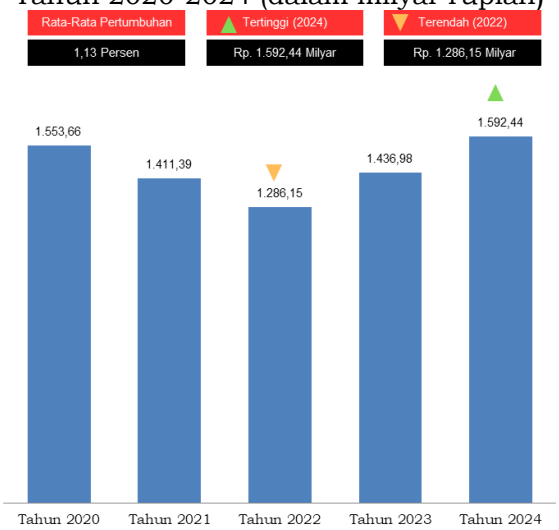

Grafik 2.55
Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020-2024
Berdasarkan Komponen Belanja (dalam milyar rupiah)

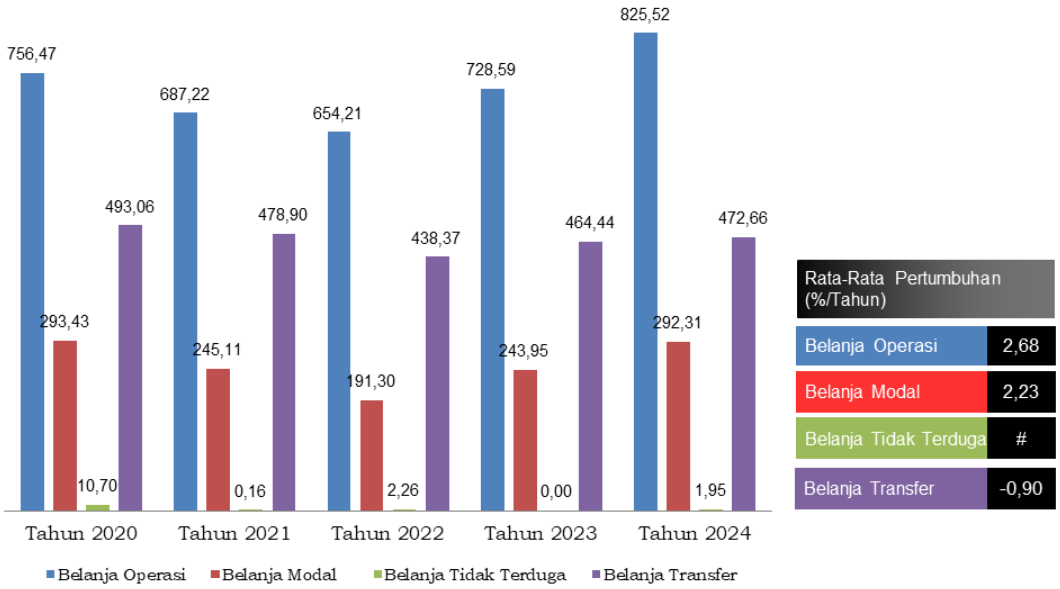

Grafik 2.56
Persentase Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2021-2024 Berdasarkan Komponen Belanja

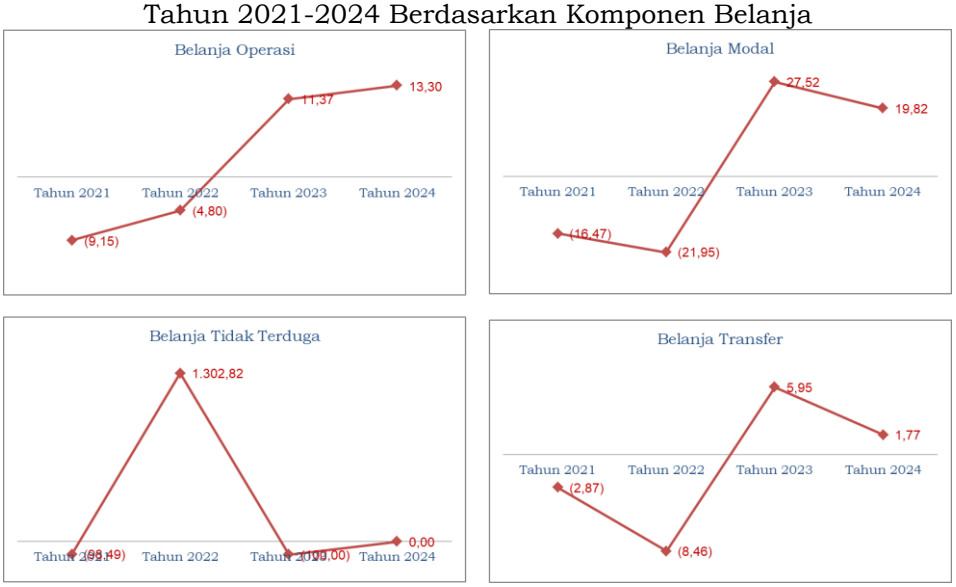

2.5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan komponen terbesar dalam struktur belanja daerah. Pada tahun 2020, belanja operasi mencapai Rp 756,47 miliar, kemudian mengalami fluktuasi dan pada tahun 2024 meningkat menjadi Rp 825,52 miliar dengan rata-rata pertumbuhan 2,68 persen per tahun.

a. Belanja Pegawai mengalami peningkatan dari Rp 384,62 miliar pada 2020 menjadi Rp 455,73 miliar pada 2024 dengan rata-rata pertumbuhan 4,66

persen. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan belanja untuk gaji, tunjangan, dan komponen lain yang terkait dengan aparatur daerah.

b. Belanja Barang dan Jasa menunjukkan fluktuasi, dengan nilai tertinggi pada tahun 2021 sebesar Rp 298,94 miliar dan menurun pada 2024 menjadi Rp 283,89 miliar. Pertumbuhan rata-rata sebesar 1,17 persen menunjukkan upaya efisiensi dalam belanja operasional.

c. Belanja Subsidi mengalami pertumbuhan signifikan dengan rata-rata 34,21 persen. Pada tahun 2020, anggaran subsidi hanya Rp 994,8 juta, meningkat menjadi Rp 3,2 miliar di tahun 2021, meskipun kemudian menurun menjadi Rp 829,9 juta di tahun 2024.

d. Belanja Hibah mengalami fluktuasi tajam. Pada 2020, realisasi belanja hibah mencapai Rp 74,43 miliar, tetapi turun drastis di tahun 2022 menjadi Rp 2,73 miliar sebelum melonjak lagi menjadi Rp 80,53 miliar pada 2024. Rata-rata pertumbuhan mencapai 208,70 persen.

e. Belanja Bantuan Sosial juga mengalami dinamika serupa, dengan kenaikan dan penurunan yang cukup drastis. Dari Rp 16,27 miliar pada 2020, turun menjadi Rp 4,01 miliar pada 2021, lalu meningkat lagi menjadi Rp 19,58 miliar pada 2022 sebelum kembali turun menjadi Rp 4,54 miliar pada 2024. Pertumbuhan rata-rata mencapai 52,41 persen.

Grafik 2.57
Pertumbuhan Komponen Belanja Operasi Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2020-2024 (dalam milyar rupiah)

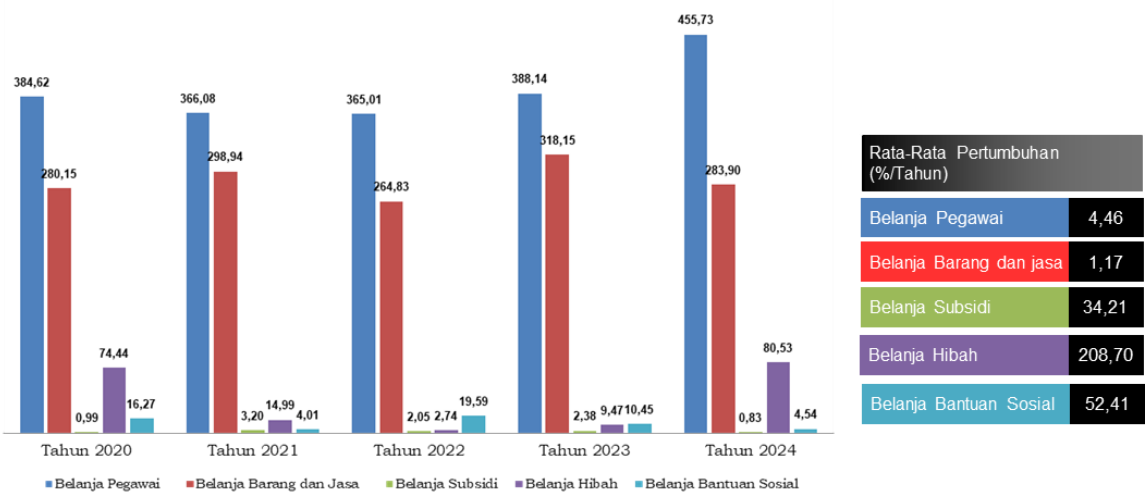

Grafik 2.58
Persentase Pertumbuhan Belanja Operasi Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2021-2024

2.5.1.2.2 Belanja Modal

Belanja modal yang diarahkan untuk pembangunan infrastruktur mengalami tren fluktuatif. Dari Rp 293,43 miliar pada 2020, turun menjadi Rp 191,30 miliar pada 2022, kemudian meningkat kembali menjadi Rp 292,30 miliar pada 2024. Rata-rata pertumbuhan belanja modal adalah 2,23 persen. Fluktuasi ini menunjukkan adanya variasi dalam kebijakan pembangunan infrastruktur yang bergantung pada ketersediaan anggaran dan prioritas daerah.

Grafik 2.59
Persentase Pertumbuhan Belanja Modal Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2021-2024

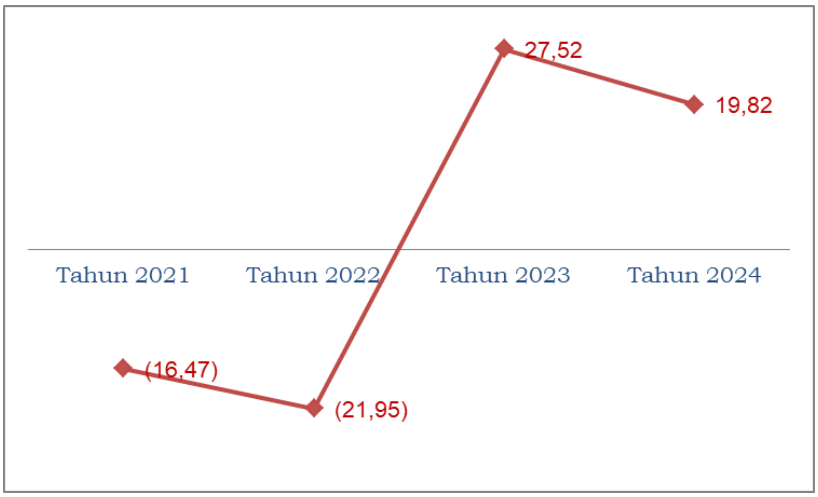

2.5.1.2.3 Belanja Tak Terduga

Belanja tidak terduga pada tahun 2020, realisasi mencapai Rp 10,69 miliar, tetapi turun drastis menjadi Rp 161,39 juta pada 2021. Namun, pada 2022 belanja ini kembali naik menjadi Rp 2,26 miliar dan mencapai Rp 1,95 miliar pada 2024.

Peningkatan ini mencerminkan respons terhadap keadaan darurat dan kebijakan mitigasi risiko yang diambil oleh pemerintah daerah.

Grafik 2.60
Persentase Pertumbuhan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2021-2024

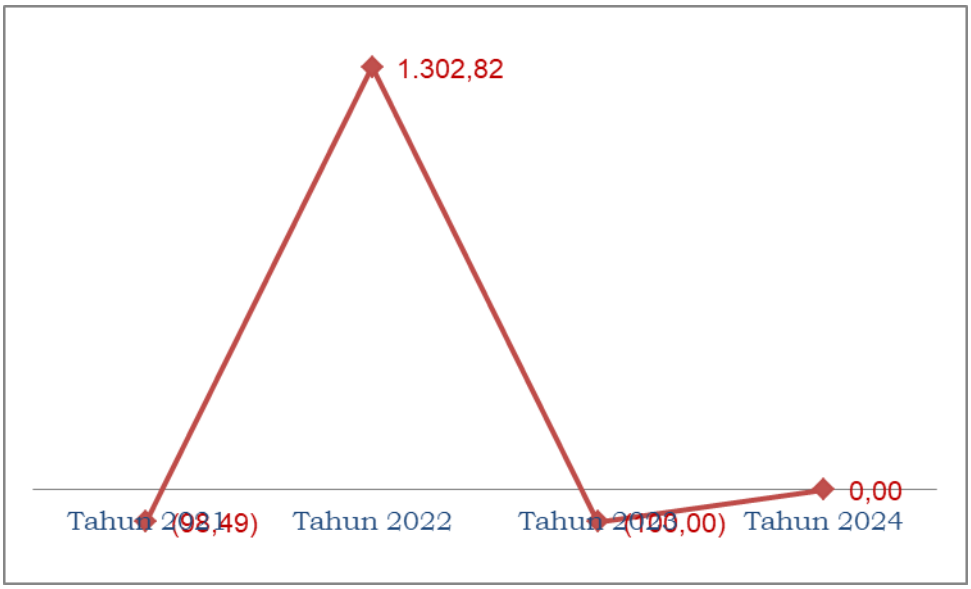

2.5.1.2.4 Belanja Transfer

Belanja transfer mengalami kontraksi sebesar (0,90) persen. Pada tahun 2020, belanja transfer mencapai Rp 493,05 miliar, kemudian turun menjadi Rp 438,37 miliar pada 2022, dan kembali naik menjadi Rp 472,65 miliar pada 2024. Komponen utama dalam belanja transfer adalah Belanja Bantuan Keuangan, yang mengalami pola serupa karena tidak adanya belanja bagi hasil dalam lima tahun terakhir.

Grafik 2.61
Pertumbuhan Komponen Belanja Transfer Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020-2024
Berdasarkan Komponen Belanja (dalam milyar rupiah)

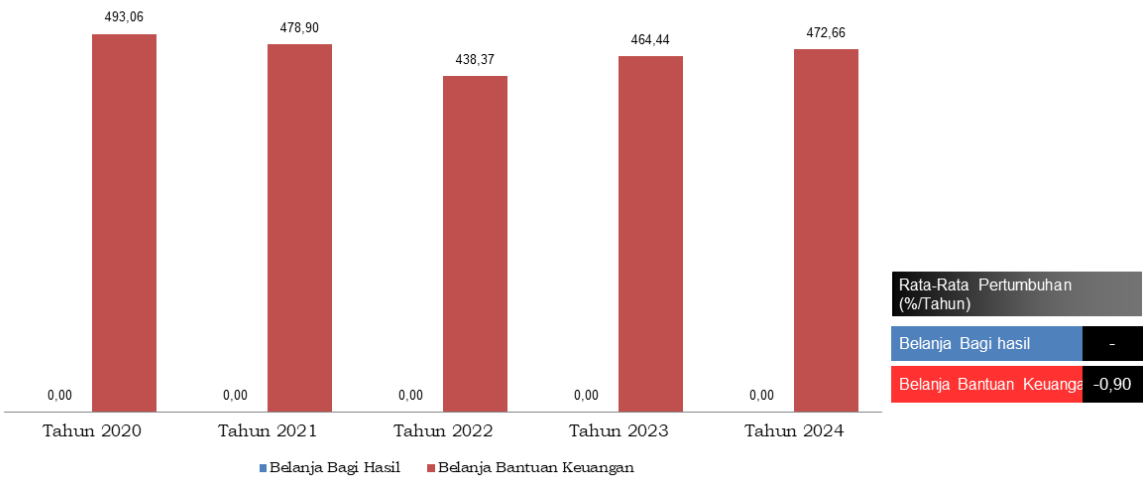

Grafik 2.62
Persentase Pertumbuhan Belanja Transfer Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2021-2024

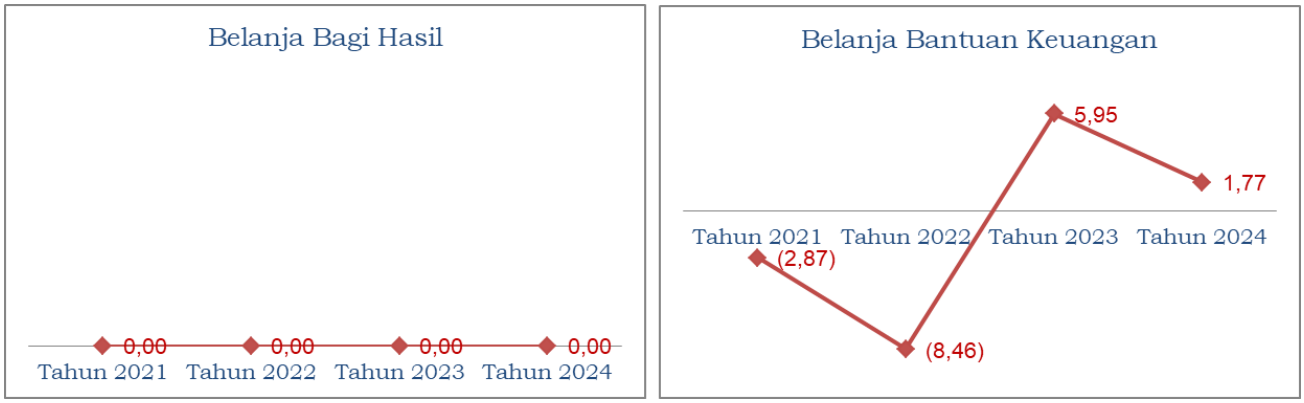

Berikut ini disajikan tabel yang menunjukkan rata-rata pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan selama periode 2020-2024.

Tabel 2.29
Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Periode 2020-2024

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	**BELANJA**	**1.553.661.000.944,26**	**1.411.390.331.215,25**	**1.286.145.493.191,83**	**1.436.980.765.349,40**	**1.592.441.517.658,05**	**1,13**
5.1	**Belanja Operasi**	**756.468.191.393,00**	**687.216.771.816,08**	**654.207.605.050,60**	**728.592.793.890,40**	**825.523.799.703,80**	**2,68**
5.1.01	Belanja Pegawai	384.620.809.918,00	366.078.209.392,00	365.005.664.573,00	388.144.685.284,00	455.727.333.392,00	4,66
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.146.598.847,00	298.935.202.627,08	264.828.304.494,60	318.153.245.144,40	283.895.556.571,80	1,17
5.1.04	Belanja Subsidi	994.800.000,00	3.203.700.000,00	2.051.730.000,00	2.376.760.000,00	829.895.000,00	24,21
5.1.05	Belanja Hibah	74.435.212.732,00	14.987.498.266,00	2.735.493.340,00	9.472.965.900,00	80.531.001.740,00	208,70
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	16.270.769.896,00	4.012.161.531,00	19.586.412.643,00	10.445.137.562,00	4.540.013.000,00	52,41
5.2	**Belanja Modal**	**293.434.513.125,26**	**245.107.576.769,17**	**191.302.931.909,23**	**243.948.650.092,00**	**292.305.992.715,25**	**2,23**
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**10.699.076.640,00**	**161.396.530,00**	**2.264.106.500,00**	**0,00**	**1.954.521.800,00**	**#DIV/0!**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.699.076.640,00	161.396.530,00	2.264.106.500,00	0,00	1.954.521.800,00	#DIV/0!
5.4	**Belanja Transfer**	**493.059.219.786,00**	**478.904.586.100,00**	**438.370.849.732,00**	**464.439.321.367,00**	**472.657.203.439,00**	**(0,90)**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	493.059.219.786,00	478.904.586.100,00	438.370.849.732,00	464.439.321.367,00	472.657.203.439,00	(0,90)

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020-2024 (data diolah)

2.5.1.3 Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang harus dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan meliputi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman.

Apabila terjadi surplus anggaran, pembiayaan daerah berfungsi sebagai mekanisme pemanfaatan surplus tersebut. Sebaliknya, jika terjadi defisit anggaran, pembiayaan daerah berperan dalam menutup defisit guna menjaga keseimbangan keuangan daerah.

2.5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Nias Selatan mengalami fluktuasi signifikan dalam periode 2020-2024. Pada tahun 2020, penerimaan mencapai Rp109,18 miliar, namun mengalami penurunan drastis pada tahun 2021 menjadi Rp13,19 miliar dan semakin turun pada tahun 2022 menjadi Rp2,06 miliar. Namun, terjadi lonjakan kembali pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar Rp73,25 miliar, dan pada tahun 2024 mencapai angka tertinggi dalam lima tahun terakhir, yaitu Rp175,09 miliar.

Rata-rata pertumbuhan penerimaan pembiayaan mencapai 857,19 persen, menunjukkan peningkatan signifikan, terutama pada tahun 2023 dan 2024. Lonjakan ini besar disebabkan oleh peningkatan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) atau sisa dana akibat tidak tercapainya target kinerja dan pengeluaran pembiayaan.

2.5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah menunjukkan pola yang tidak merata dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, tidak ada pengeluaran pembiayaan (Rp0), tetapi pada tahun 2021 terjadi pengeluaran sebesar Rp891,81 juta. Pada

tahun 2022, pengeluaran kembali Rp0, namun meningkat drastis pada tahun 2023 menjadi Rp4,5 miliar, dan mencapai Rp5 miliar pada tahun 2024.

Pengeluaran pembiayaan ini sebagian besar berasal dari penyertaan modal daerah, khususnya untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu PT. Bank Sumut. Rata-rata pertumbuhan pengeluaran pembiayaan tidak dapat dihitung secara konvensional karena terdapat tahun-tahun dengan nilai Rp0, sehingga hasil perhitungan rata-rata pertumbuhan menunjukkan nilai #DIV/0!.

Kinerja pembiayaan daerah Kabupaten Nias Selatan dalam kurun waktu 2020-2024 ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.30
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
6	**PEMBIAYAAN**						
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**109.180.580.762,71**	**13.193.699.162,95**	**2.056.423.241,86**	**73.250.775.870,06**	**175.097.024.500,00**	**857,19**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	109.180.580.762,71	13.193.699.162,95	2.056.423.241,86	73.250.775.870,06	175.097.024.500,00	857,19
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	109.180.580.762,71	13.193.699.162,95	2.056.423.241,86	73.250.775.870,06	175.097.024.500,00	857,19
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**0,00**	**891.813.186,00**	**0,00**	**4.500.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**#DIV/0!**
6.2.02	Penyertaan modal daerah	0,00	891.813.186,00	0,00	4.500.000.000,00	5.000.000.000,00	#DIV/0!
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0,00	891.813.186,00	0,00	4.500.000.000,00	5.000.000.000,00	#DIV/0!

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020-2024 (data diolah)

2.5.2 Neraca Daerah

Neraca Daerah merupakan laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan Pemerintah Daerah pada suatu waktu tertentu, mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Laporan ini memberikan gambaran komprehensif mengenai kekayaan daerah, kewajiban yang harus dipenuhi, serta ekuitas dana yang dimiliki.

Laporan Neraca Daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pengambilan keputusan, baik bagi manajemen Pemerintah Daerah, pihak legislatif, kreditur atau pemberi pinjaman, maupun masyarakat luas. Informasi yang tersaji dalam laporan ini menjadi dasar untuk menilai kondisi keuangan daerah dan menentukan langkah-langkah kebijakan yang tepat. Struktur Neraca Daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu: (1). Aset, yang mencakup aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. (2) Kewajiban, yang terdiri dari kewajiban jangka pendek. (3). Ekuitas Dana, yang terbagi menjadi ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi.

Gambaran posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Neraca Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.31
Neraca Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	**Aset**						
A	Aset lancar	43.646.209.194,30	29.385.074.005,66	90.794.648.143,07	193.262.315.932,23	148.676.476.395,40	66,52
B	Investasi jangka panjang	63.737.412.806,00	64.601.028.167,00	64.563.963.659,00	69.049.996.987,00	74.035.943.523,00	3,87
C	Aset tetap	1.821.444.440.913,54	2.023.716.517.306,41	1.966.840.801.895,69	1.799.917.484.900,17	1.967.283.178.148,49	2,28
D	Aset lainnya	83.284.766.152,26	44.374.951.395,90	21.005.438.099,63	31.351.921.262,85	30.238.713.026,06	(13,42)
	Jumlah Aset Daerah	**2.012.112.829.066,10**	**2.162.077.570.874,97**	**2.143.204.851.797,39**	**2.093.581.719.082,25**	**2.220.234.311.092,95**	**2,58**
II	**Kewajiban**						
A	Kewajiban jangka pendek	75.273.586.679,56	99.011.761.137,56	27.028.414.740,42	29.490.876.248,89	9.147.800.313,95	(25,26)
B	Kewajiban jangka penjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Kewajiban	**75.273.586.679,56**	**99.011.761.137,56**	**27.028.414.740,42**	**29.490.876.248,89**	**9.147.800.313,95**	**(25,26)**
III	**Ekuitas Dana**	**1.936.839.242.386,54**	**2.063.065.809.737,41**	**2.116.176.437.056,97**	**2.064.090.842.833,36**	**2.211.086.510.779,00**	**3,44**
Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas Dana		**2.012.112.829.066,10**	**2.162.077.570.874,97**	**2.143.204.851.797,39**	**2.093.581.719.082,25**	**2.220.234.311.092,95**	**2,58**

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020-2024 (data diolah)

Berdasarkan Neraca Daerah Kabupaten Nias Selatan dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat bahwa kondisi keuangan daerah mengalami pertumbuhan yang cukup positif. Total aset daerah meningkat dengan rata-rata 2,58 persen, didorong oleh pertumbuhan signifikan pada aset lancar sebesar 66,52 persen. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan kas dan piutang daerah, meskipun terdapat fluktuasi yang cukup besar antara tahun 2023 dan 2024. Investasi jangka panjang juga mengalami pertumbuhan yang stabil sebesar 3,87 persen, mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mempertahankan alokasi investasi. Di sisi lain, aset tetap menunjukkan kenaikan rata-rata sebesar 2,28 persen, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2023. Sementara itu, aset lainnya mengalami tren penurunan dengan rata-rata -13,42 persen, yang kemungkinan disebabkan oleh pelepasan atau realokasi aset tertentu.

Dari sisi kewajiban, terjadi penurunan drastis dalam kewajiban jangka pendek dengan rata-rata -25,26 persen, dari Rp 75,27 miliar pada tahun 2020 menjadi hanya Rp 9,15 miliar pada tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil mengurangi beban utang jangka pendek secara signifikan, yang merupakan indikator positif dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, tidak adanya kewajiban jangka panjang dalam periode ini menunjukkan bahwa Kabupaten Nias Selatan tidak memiliki utang jangka panjang yang membebani anggaran daerah.

Sementara itu, ekuitas daerah mengalami pertumbuhan positif sebesar 3,44 persen, yang mencerminkan peningkatan akumulasi kekayaan bersih pemerintah daerah. Peningkatan ini menunjukkan ketahanan keuangan yang semakin kuat dan kemandirian daerah dalam mengelola sumber daya keuangannya. Secara keseluruhan, kondisi keuangan Kabupaten Nias Selatan menunjukkan tren yang baik dengan peningkatan aset dan penurunan kewajiban, yang mencerminkan pengelolaan keuangan yang lebih sehat. Namun, perlu dilakukan kajian lebih lanjut terhadap tren penurunan aset lainnya serta fluktuasi aset tetap pada tahun 2023 untuk memastikan bahwa investasi dalam infrastruktur dan aset daerah tetap berjalan optimal

2.5.3 Kerangka Pendanaan

Analisis Kerangka Pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas keuangan daerah dalam mendanai pembangunan Kabupaten Nias Selatan selama lima tahun ke depan. Kerangka pendanaan menjadi dasar perencanaan keuangan daerah agar pembiayaan pembangunan berjalan berkelanjutan dan seimbang dengan pendapatan daerah. Dengan perencanaan yang baik, sumber daya keuangan dapat dialokasikan secara efektif sesuai dengan prioritas pembangunan.

Penyusunan kerangka pendanaan mempertimbangkan tren penerimaan daerah, alokasi belanja, serta strategi pembiayaan dalam mengatasi defisit jika diperlukan. Selain itu, faktor seperti dinamika ekonomi, kebijakan fiskal nasional, dan kapasitas fiskal daerah juga diperhitungkan agar keuangan daerah tetap stabil dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Dalam beberapa tahun terakhir, tantangan seperti ketidakpastian ekonomi dan perubahan kebijakan transfer ke daerah memengaruhi pengelolaan pendanaan. Oleh karena itu, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer, serta skema pembiayaan lainnya menjadi langkah penting dalam menjaga ketahanan fiskal.

Bagian ini membahas proyeksi pendanaan, strategi alokasi anggaran, dan mekanisme pembiayaan untuk pembangunan Kabupaten Nias Selatan secara berkelanjutan.

2.5.3.1 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah disusun berdasarkan kinerja keuangan pada periode sebelumnya. Analisis tren keuangan masa lalu membantu mengidentifikasi pola pertumbuhan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, sehingga dapat menjadi dasar yang lebih akurat dalam merumuskan proyeksi keuangan di masa depan. Dengan pendekatan berbasis data historis dan analisis tren, proyeksi keuangan diharapkan lebih realistis, berkelanjutan, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Proyeksi ini juga menjadi acuan untuk menjaga keseimbangan antara kapasitas fiskal dan kebutuhan pembiayaan pembangunan, sehingga program dan kegiatan daerah dapat berjalan secara optimal. Berikut adalah proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah Kabupaten Nias Selatan untuk periode 2026-2030.

Tabel 2.32
Proyeksi Kerangka Pendanaan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2026-2030

Kode	Uraian	Baseline Tahun 2024	Proyeksi Tahun				
			2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	**PENDAPATAN**						
04.01	Pendapatan Asli Daerah	30.783.762.868,34	53.908.184.173,47	64.689.821.008,16	77.627.785.209,80	93.153.342.251,76	111.784.010.702,11
04.02	Pendapatan Transfer	1.507.603.342.818,80	1.584.519.011.625,54	1.655.712.447.452,55	1.731.483.208.809,80	1.811.286.970.118,41	1.895.712.016.209,91
04.03	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	13.741.700.285,00	16.500.000.000,00	16.500.000.000,00	16.500.000.000,00	16.500.000.000,00	16.500.000.000,00
Jumlah Pendapatan		**1.552.128.805.972,14**	**1.654.927.195.799,01**	**1.736.902.268.460,71**	**1.825.610.994.019,60**	**1.920.940.312.370,16**	**2.023.996.026.912,01**
5	**BELANJA**						
05.01	Belanja Operasi	825.523.799.703,80	897.591.309.477,05	945.554.163.731,73	965.786.858.231,54	1.045.811.458.446,70	1.041.012.779.099,78
05.02	Belanja Modal	292.305.992.715,25	274.069.347.811,21	283.330.144.537,08	325.746.790.808,63	315.097.636.858,54	393.508.555.200,24
05.03	Belanja Tidak Terduga	1.954.521.800,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
05.04	Belanja Transfer	472.657.203.439,00	485.766.538.510,75	510.017.960.191,90	535.577.344.979,43	562.531.217.064,92	590.974.692.611,99
Jumlah Belanja		**1.592.441.517.658,05**	**1.659.927.195.799,01**	**1.741.402.268.460,71**	**1.829.610.994.019,60**	**1.925.940.312.370,16**	**2.027.996.026.912,01**
Surplus/(Defisit)		**(40.312.711.685,91)**	**(5.000.000.000,00)**	**(4.500.000.000,00)**	**(4.000.000.000,00)**	**(5.000.000.000,00)**	**(4.000.000.000,00)**
6	**PEMBIAYAAN**						
06.01	Penerimaan Pembiayaan	175.097.024.500,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
06.02	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.500.000.000,00	6.000.000.000,00	5.000.000.000,00	6.000.000.000,00
Pembiayaan Netto		**170.097.024.500,00**	**5.000.000.000,00**	**4.500.000.000,00**	**4.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**4.000.000.000,00**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		**129.784.312.814,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Sumber : Bapperida, data diolah

2.5.3.1.1 Pendapatan Daerah

2.5.3.1.1.1 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2026-2030

Pendapatan daerah Kabupaten Nias Selatan selama periode 2020-2024 menunjukkan fluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,78 persen per tahun. Pendapatan daerah ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD mengalami pertumbuhan signifikan dengan rata-rata 23,76 persen per tahun, mencerminkan adanya upaya peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah yang lebih mandiri. Meskipun demikian, pendapatan transfer tetap menjadi komponen utama dengan kontribusi lebih dari 90 persen terhadap total pendapatan daerah, yang mencerminkan ketergantungan yang masih cukup tinggi terhadap dana dari pemerintah pusat maupun provinsi. Sementara itu, lain-lain pendapatan daerah yang sah turut berkontribusi dalam struktur pendapatan daerah, meskipun porsinya relatif kecil dibandingkan dengan komponen lainnya.

Dengan mempertimbangkan kinerja pendapatan masa lalu serta peluang pertumbuhan di masa depan, proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Nias Selatan untuk tahun-tahun mendatang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.33
Proyeksi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2026-2030

Kode	Uraian	Target Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan
		2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	**PENDAPATAN**	**1.654.927.195.799,01**	**1.736.902.268.460,71**	**1.825.610.994.019,60**	**1.920.940.312.370,16**	**2.023.996.026.912,01**	**5,16**
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**53.908.184.173,47**	**64.689.821.008,16**	**77.627.785.209,80**	**93.153.342.251,76**	**111.784.010.702,11**	**20,00**
4.1.01	Pajak daerah	34.087.249.987,87	40.904.699.985,44	49.085.639.982,53	58.902.767.979,04	70.683.321.574,85	20,00
4.1.02	Retribusi daerah	1.501.699.619,60	1.802.039.543,52	2.162.447.452,22	2.594.936.942,67	3.113.924.331,20	20,00
4.1.03	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	7.599.606.370,00	9.119.527.644,00	10.943.433.172,80	13.132.119.807,36	15.758.543.768,83	20,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	10.719.628.196,00	12.863.553.835,20	15.436.264.602,24	18.523.517.522,69	22.228.221.027,23	20,00
4.2	**Pendapatan Transfer**	**1.584.519.011.625,54**	**1.655.712.447.452,55**	**1.731.483.208.809,80**	**1.811.286.970.118,41**	**1.895.712.016.209,91**	**4,58**
4.2.01	***Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat***	***1.552.386.166.025,00***	***1.622.816.944.940,00***	***1.697.803.796.247,00***	***1.776.801.669.304,35***	***1.860.398.094.379,57***	***4,63***
4.2.01.01	Dana perimbangan	1.131.437.701.025,00	1.180.821.056.690,00	1.233.708.113.584,50	1.289.501.202.508,73	1.348.732.604.244,16	4,49
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	22.127.401.800,00	23.233.771.890,00	24.395.460.484,50	25.615.233.508,73	26.895.995.184,16	5,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	742.124.283.700,00	773.523.103.000,00	806.378.115.000,00	840.759.856.000,00	876.742.340.000,00	4,26
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	111.167.205.000,00	118.171.786.000,00	126.002.954.000,00	134.775.716.000,00	144.621.922.060,00	6,80
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	256.018.810.525,00	265.892.395.800,00	276.931.584.100,00	288.350.397.000,00	300.472.347.000,00	4,08
4.2.01.05	Dana desa	405.782.475.000,00	426.071.598.750,00	447.375.178.687,50	469.743.937.621,88	493.231.134.502,97	5,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	405.782.475.000,00	426.071.598.750,00	447.375.178.687,50	469.743.937.621,88	493.231.134.502,97	5,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	15.165.990.000,00	15.924.289.500,00	16.720.503.975,00	17.556.529.173,75	18.434.355.632,44	5,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	15.165.990.000,00	15.924.289.500,00	16.720.503.975,00	17.556.529.173,75	18.434.355.632,44	5,00
4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**32.132.845.600,54**	**32.895.502.512,55**	**33.679.412.562,80**	**34.485.300.814,06**	**35.313.921.830,34**	**2,39**
4.2.02.01	Pendapatan bagi hasil	28.132.845.600,54	28.695.502.512,55	29.269.412.562,80	29.854.800.814,06	30.451.896.830,34	2,00
4.2.02.02	Bantuan keuangan	4.000.000.000,00	4.200.000.000,00	4.410.000.000,00	4.630.500.000,00	4.862.025.000,00	5,00
4.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**16.500.000.000,00**	**16.500.000.000,00**	**16.500.000.000,00**	**16.500.000.000,00**	**16.500.000.000,00**	**0,00**
4.3.03	Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	16.500.000.000,00	16.500.000.000,00	16.500.000.000,00	16.500.000.000,00	16.500.000.000,00	0,00

Sumber : Bapperida, data diolah

Target pendapatan daerah Kabupaten Nias Selatan diproyeksikan terus meningkat dari Rp 1,63 triliun pada 2026 menjadi Rp 2,02 triliun pada 2030, dengan rata-rata pertumbuhan 5,16 persen per tahun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tumbuh lebih cepat dibandingkan pendapatan transfer, dengan rata-rata kenaikan 20 persen per tahun. PAD meningkat dari Rp 53,90 miliar pada 2026 menjadi Rp 111,78 miliar pada 2030, dengan rata-rata pertumbuhan 20 persen per tahun. Meskipun PAD terus meningkat, pendapatan transfer tetap menjadi sumber utama dengan kontribusi lebih dari 90 persen terhadap total pendapatan daerah. Rata-rata pertumbuhan pendapatan transfer sebesar 4,58 persen per tahun, meningkat dari Rp 1,58 triliun pada 2026 menjadi Rp 1,89 triliun pada 2030, dengan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan dana desa sebagai komponen utamanya. Pendapatan transfer antar daerah juga mengalami peningkatan, meskipun lebih lambat, dengan rata-rata pertumbuhan 2,39 persen per tahun, terutama berasal dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak mengalami pertumbuhan, tetap berada di angka Rp 16,5 miliar per tahun.

2.5.3.1.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pendapatan Daerah 2026-2030

Untuk mencapai target pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Nias Selatan, diperlukan kebijakan dan strategi yang disesuaikan dengan potensi daerah, khususnya di sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan sumber daya alam.

a. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
   1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi, serta pemanfaatan aset daerah secara produktif.
   2. Diversifikasi Sumber Pendapatan dengan menggali potensi ekonomi lokal, mengembangkan sektor unggulan, dan meningkatkan kerja sama antar daerah.
   3. Pemanfaatan Dana Transfer Secara Efektif dengan memastikan alokasi anggaran yang tepat untuk sektor prioritas dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana transfer.
   4. Peningkatan Kerja Sama dengan Swasta dan Masyarakat dalam rangka mendorong investasi daerah dan memperkuat kolaborasi dengan pihak

swasta untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi daerah.

b. Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah

1. Optimalisasi PAD
   - Meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dan retribusi daerah, terutama dari sektor potensial seperti pariwisata, UMKM, serta industri perikanan dan pertanian.
   - Mengembangkan sistem digitalisasi dalam administrasi perpajakan daerah untuk meningkatkan kepatuhan dan memudahkan pembayaran pajak serta retribusi.
   - Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah, seperti tanah dan bangunan milik pemerintah, untuk meningkatkan penerimaan dari hasil pengelolaan keuangan daerah.
2. Diversifikasi Sumber Pendapatan
   - Mengembangkan sumber pendapatan baru di luar pendapatan transfer dari pemerintah pusat dengan menggali potensi ekonomi daerah, terutama dalam sektor pariwisata bahari dan budaya.
   - Meningkatkan kerja sama antar daerah dalam skema bagi hasil dan bantuan keuangan, terutama dalam pengelolaan sumber daya perikanan dan pertanian berbasis regional.
3. Pemanfaatan Dana Transfer Secara Efektif
   - Memastikan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, pertanian, perikanan, pendidikan, dan kesehatan.
   - Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana transfer dengan perencanaan dan pengelolaan anggaran yang lebih efektif serta berbasis kebutuhan prioritas daerah.
4. Peningkatan Kerja Sama dengan Swasta dan Masyarakat
   - Mendorong investasi daerah dengan memberikan kemudahan perizinan bagi pelaku usaha di sektor pariwisata, perikanan, dan industri kreatif berbasis budaya lokal.

Mengembangkan skema *Public-Private Partnership* (*PPP*) untuk mendukung pembangunan infrastruktur, seperti jalan desa dan kawasan wisata berbasis budaya lokal.

2.5.3.1.2 Belanja Daerah

2.5.3.1.2.1 Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2026-2030

Belanja daerah Kabupaten Nias Selatan pada 2020-2024 tumbuh rata-rata 1,13 persen per tahun dengan pola fluktuatif. Belanja operasi tetap menjadi yang terbesar, naik dari Rp 756,47 miliar pada 2020 menjadi Rp 825,52 miliar pada 2024 dengan rata-rata pertumbuhan 2,68 persen per tahun. Belanja modal untuk infrastruktur juga mengalami naik turun, sempat turun ke Rp 191,30 miliar pada 2022 sebelum kembali meningkat ke Rp 292,30 miliar pada 2024. Belanja tidak terduga turun drastis dari Rp 10,69 miliar pada 2020 menjadi Rp 161,39 juta pada 2021, lalu naik kembali menjadi Rp 1,95 miliar pada 2024, mencerminkan respons terhadap kondisi darurat. Sementara itu, belanja transfer cenderung menurun dengan rata-rata 0,90 persen per tahun, meskipun kembali meningkat menjadi Rp 472,65 miliar pada 2024.

Melihat tren ini serta peluang pertumbuhan ke depan, belanja daerah Kabupaten Nias Selatan diproyeksikan meningkat sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.34
Proyeksi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2026-2030

Kode	Uraian	Target Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan
		2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
5	**BELANJA**	**1.659.927.195.799,01**	**1.741.402.268.460,71**	**1.829.610.994.019,60**	**1.925.940.312.370,16**	**2.027.996.026.912,01**	**5,13**
05.01	**Belanja Operasi**	**897.591.309.477,05**	**945.554.163.731,73**	**965.786.858.231,54**	**1.045.811.458.446,70**	**1.041.012.779.099,78**	**3,83**
05.01.01	Belanja Pegawai	521.056.418.104,18	542.088.814.226,85	564.278.770.055,66	587.692.108.325,91	612.398.539.559,67	4,12
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	285.618.119.304,87	278.878.791.436,88	303.213.174.107,88	271.075.430.052,79	324.778.407.472,11	3,89
05.01.04	Belanja Subsidi	4.000.000.000,00	4.250.000.000,00	4.500.000.000,00	4.750.000.000,00	5.000.000.000,00	5,74
05.01.05	Belanja Hibah	84.916.772.068,00	116.336.558.068,00	87.794.914.068,00	174.293.920.068,00	90.835.832.068,00	15,78
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	2.000.000.000,00	4.000.000.000,00	6.000.000.000,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	45,83
05.02	**Belanja Modal**	**274.069.347.811,21**	**283.330.144.537,08**	**325.746.790.808,63**	**315.097.636.858,54**	**393.508.555.200,24**	**9,99**
05.03	**Belanja Tidak Terduga**	**2.500.000.000,00**	**2.500.000.000,00**	**2.500.000.000,00**	**2.500.000.000,00**	**2.500.000.000,00**	**0,00**
05.03.01	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
05.04	**Belanja Transfer**	**485.766.538.510,75**	**510.017.960.191,90**	**535.577.344.979,43**	**562.531.217.064,92**	**590.974.692.611,99**	**5,02**
05.04.01	Belanja Bagi Hasil	3.558.894.960,75	4.270.673.952,90	5.124.808.743,48	6.149.770.492,17	7.379.724.590,60	20,00
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	482.207.643.550,00	505.747.286.239,00	530.452.536.235,95	556.381.446.572,75	583.594.968.021,39	4,89

Sumber : Bapperida, data diolah

Belanja daerah Kabupaten Nias Selatan diproyeksikan meningkat dari Rp 1,65 triliun pada 2026 menjadi Rp 2,02 triliun pada 2030, dengan rata-rata pertumbuhan 5,13 persen per tahun. Komponen belanja operasi tetap menjadi bagian terbesar, tumbuh rata-rata 3,85 persen per tahun dari Rp 897,59 miliar pada 2026 menjadi Rp 1,04 triliun pada 2030. Peningkatan ini terutama didorong oleh belanja pegawai yang naik sebesar 4,12 persen per tahun serta belanja barang dan jasa yang tumbuh 3,89 persen per tahun. Selain itu, belanja hibah dan bantuan sosial mengalami lonjakan signifikan, masing-masing tumbuh 15,78 persen dan 45,83 persen per tahun, mencerminkan perhatian pemerintah daerah terhadap sektor sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, belanja modal diproyeksikan tumbuh 9,99 persen per tahun, dari Rp 274,06 miliar pada 2026 menjadi Rp 393,50 miliar pada 2030, mengindikasikan komitmen pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur dan aset daerah. Sementara itu, belanja tidak terduga tetap stagnan di angka Rp 2,5 miliar per tahun, menunjukkan pendekatan konservatif dalam mitigasi risiko keuangan. Belanja transfer juga mengalami pertumbuhan rata-rata 5,02 persen per tahun, dari Rp 485,76 miliar pada 2026 menjadi Rp 590,97 miliar pada 2030. Peningkatan ini terutama didorong oleh belanja bagi hasil yang tumbuh 20,00 persen per tahun, serta bantuan keuangan yang naik sebesar 4,89 persen per tahun. Tren ini menunjukkan semakin kuatnya dukungan keuangan daerah kepada pemerintah desa.

Secara keseluruhan, proyeksi belanja daerah ini mencerminkan keseimbangan antara peningkatan belanja operasional dan investasi pembangunan. Dengan meningkatnya belanja modal, ada peluang percepatan pembangunan infrastruktur, namun harus diimbangi dengan efisiensi pengelolaan anggaran. Pertumbuhan belanja sosial juga menjadi tantangan tersendiri untuk memastikan program bantuan tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat

2.5.3.1.2.2 Arah Kebijakan dan Strategi Belanja Daerah 2026-2030

Belanja daerah Kabupaten Nias Selatan diproyeksikan tumbuh rata-rata 4,56 persen per tahun, dengan belanja operasi sebagai komponen terbesar, diikuti oleh belanja modal dan belanja transfer. Untuk memastikan anggaran digunakan

secara efektif dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah, diperlukan kebijakan dan strategi belanja yang lebih terarah.

a. Arah Kebijakan Belanja Daerah

1. Memaksimalkan Efisiensi Belanja Operasi
   - Mengendalikan pertumbuhan belanja pegawai agar tidak membebani keuangan daerah.
   - Memastikan belanja barang dan jasa lebih fokus pada peningkatan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
   - Mengoptimalkan belanja hibah dan bantuan sosial agar lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
2. Meningkatkan Investasi melalui Belanja Modal
   - Memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, dan fasilitas pendidikan serta kesehatan.
   - Memanfaatkan sumber daya lokal untuk mendukung pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata.
3. Pengelolaan Anggaran yang Fleksibel dan Berkelanjutan
   - Menyediakan belanja tidak terduga dalam jumlah yang cukup untuk menghadapi kondisi darurat seperti bencana alam.
   - Mengelola anggaran secara transparan dan berbasis kebutuhan riil daerah.
4. Mengoptimalkan Belanja Transfer untuk Pembangunan Desa
   - Memastikan dana bagi hasil dan bantuan keuangan desa digunakan secara efektif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
   - Meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah dan desa dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

b. Strategi Belanja Daerah

1. Efisiensi dan Transparansi Belanja Operasi
   - Digitalisasi sistem administrasi dan pengadaan barang/jasa untuk mengurangi pemborosan anggaran.
   - Mengawasi dan mengevaluasi belanja hibah dan bantuan sosial agar lebih bermanfaat bagi masyarakat.

2. Peningkatan Kualitas Belanja Modal
   - Fokus pada pembangunan infrastruktur yang menunjang konektivitas antar wilayah dan akses pasar bagi hasil pertanian dan perikanan.
   - Mendorong investasi melalui skema kerja sama dengan pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur strategis.
3. Penguatan Pengelolaan Fiskal
   - Mengalokasikan anggaran secara fleksibel sesuai prioritas pembangunan dan kebutuhan mendesak.
   - Meningkatkan kapasitas pengelolaan anggaran agar lebih efisien dan berbasis hasil.
4. Optimalisasi Dana Transfer untuk Desa
   - Memastikan dana transfer digunakan untuk program prioritas yang mendukung pertumbuhan ekonomi desa.
   - Meningkatkan pengawasan dan transparansi dalam penggunaan dana transfer agar tepat sasaran.

2.5.3.1.3 Proyeksi Pembiayaan

Proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Nias Selatan untuk periode 2026-2030 disusun dengan mempertimbangkan realisasi pembiayaan tahun 2020-2024 serta asumsi kebijakan penggunaan anggaran di masa mendatang. Penerimaan pembiayaan diproyeksikan tetap sebesar Rp 10 miliar setiap tahunnya, yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Hal ini mencerminkan adanya efisiensi dalam pengelolaan anggaran serta potensi realokasi dana dari belanja yang tidak terserap secara optimal. Di sisi lain, pengeluaran pembiayaan diproyeksikan mengalami pertumbuhan rata-rata 5,61 persen per tahun, dengan alokasi utama untuk penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu PT. Bank Sumut. Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat peran BUMD sebagai pilar utama dalam pengembangan ekonomi daerah

Proyeksi anggaran pembiayaan daerah kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.35
Proyeksi Anggaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2026-2030

Kode	Uraian	Target Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan
		Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
6	**PEMBIAYAAN**						
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**10.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**0,00**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**5.000.000.000,00**	**5.500.000.000,00**	**6.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**6.000.000.000,00**	**5,61**
6.2.02	Penyertaan modal daerah	5.000.000.000,00	5.500.000.000,00	6.000.000.000,00	5.000.000.000,00	6.000.000.000,00	5,61
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	5.000.000.000,00	5.500.000.000,00	6.000.000.000,00	5.000.000.000,00	6.000.000.000,00	5,61

Sumber : Bapperida, data diolah

2.5.4 Perhitungan Kerangka Pendanaan

2.5.4.1 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Proyeksi total penerimaan setelah dikurangi dengan proyeksi belanja menghasilkan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, yang mencerminkan ruang fiskal yang tersedia untuk mendanai program pembangunan prioritas. Kapasitas riil ini menjadi indikator utama dalam menentukan sejauh mana pemerintah daerah dapat membiayai kebutuhan pembangunan tanpa bergantung pada sumber pendanaan eksternal.

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Nias Selatan pada periode 2026-2030 menunjukkan tren pertumbuhan rata-rata sebesar 5,13 persen per tahun. Hal ini mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai program pembangunan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan. Dengan proyeksi kapasitas riil yang terus meningkat, ruang fiskal daerah masih cukup stabil untuk mendukung prioritas pembangunan.

Pertumbuhan kapasitas riil ini didorong oleh kenaikan pendapatan daerah, terutama dari pendapatan transfer yang tetap menjadi sumber utama. Namun, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif kecil, sehingga perlu optimalisasi untuk meningkatkan kemandirian fiskal. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal daerah juga menunjukkan tren kenaikan, yang berpotensi memberikan dampak positif dalam jangka panjang jika investasi pada BUMD mampu meningkatkan pendapatan daerah.

Meskipun kapasitas riil menunjukkan pertumbuhan yang stabil, tantangan ke depan adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara belanja daerah dan penerimaan, agar tetap memiliki ruang fiskal yang cukup untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta program prioritas lainnya. Oleh karena itu, strategi pengelolaan keuangan daerah perlu diarahkan pada peningkatan efektivitas pendapatan dan efisiensi belanja guna memperkuat ketahanan fiskal Kabupaten Nias Selatan di masa mendatang.

Adapun proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Nias Selatan untuk periode 2026-2030 tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.36
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Mendanai Pembangunan Daerah
Tahun 2026 – 2030

No	Uraian	Tahun					Jumlah	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	**PENDAPATAN**							
4.1	Pendapatan Asli Daerah	53.908.184.173,47	64.689.821.008,16	77.627.785.209,80	93.153.342.251,76	111.784.010.702,11	401.163.143.345,29	20,00
4.2	Pendapatan Transfer	1.584.519.011.625,54	1.655.712.447.452,55	1.731.483.208.809,80	1.811.286.970.118,41	1.895.712.016.209,91	8.678.713.654.216,21	4,58
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	16.500.000.000,00	16.500.000.000,00	16.500.000.000,00	16.500.000.000,00	16.500.000.000,00	82.500.000.000,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	**1.654.927.195.799,01**	**1.736.902.268.460,71**	**1.825.610.994.019,60**	**1.920.940.312.370,16**	**2.023.996.026.912,01**	**9.162.376.797.561,50**	**5,16**
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**							
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Penerimaan	**1.664.927.195.799,01**	**1.746.902.268.460,71**	**1.835.610.994.019,60**	**1.930.940.312.370,16**	**2.033.996.026.912,01**	**9.212.376.797.561,50**	**5,13**
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**							
6.2.02	Penyertaan modal daerah	5.000.000.000,00	5.500.000.000,00	6.000.000.000,00	5.000.000.000,00	6.000.000.000,00	27.500.000.000,00	5,61
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	**1.659.927.195.799,01**	**1.741.402.268.460,71**	**1.829.610.994.019,60**	**1.925.940.312.370,16**	**2.027.996.026.912,01**	**9.184.876.797.561,50**	**5,13**

Sumber : Bapperida, data diolah

2.5.4.2 Kebijakan Alokasi Anggaran

Kebijakan belanja daerah Kabupaten Nias Selatan dalam periode 2026-2030 difokuskan pada tiga prioritas utama. Prioritas pertama adalah mendanai belanja wajib (Mandatory Spending) dan belanja mengikat yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah (PERDA). Belanja wajib ini mencakup sektor-sektor strategis seperti pendidikan, pegawai, infrastruktur, Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta belanja yang bersumber dari Cukai Hasil Tembakau, Pajak Rokok, Dana Alokasi Khusus (DAK), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta dana transfer dan investasi. Selain itu, belanja mengikat mencakup kebutuhan operasional rutin seperti pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, perjalanan dinas, pemeliharaan gedung dan kantor, sewa fasilitas, listrik, bahan bakar, telekomunikasi, alat tulis kantor (ATK), dan percetakan.

Prioritas kedua diarahkan untuk mendanai belanja yang bertujuan merealisasikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Pendanaan ini mencakup berbagai program pembangunan yang selaras dengan agenda kepala daerah, terutama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur, serta perbaikan pelayanan publik.

Sementara itu, prioritas ketiga ditujukan untuk mendanai penyelenggaraan program lainnya sesuai dengan kebutuhan pemerintahan daerah. Penyusunan program didasarkan pada tingkat urgensi dan relevansinya terhadap tantangan yang dihadapi daerah, dengan tetap mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi anggaran. Dengan strategi ini, diharapkan kebijakan belanja daerah dapat berjalan optimal guna mendukung pembangunan Kabupaten Nias Selatan yang berkelanjutan.

Tabel 2.37
Prioritas Kerangka Pendanaan Pengeluaran Jangka Menengah 2026-2030

Tahun	Kapasitas Rill	Prioritas 1		Prioritas 2		Prioritas 3	
		Pagu	%	Pagu	%	Pagu	%
2026	1.659.927.195.799,01	1.579.019.802.957,93	95,13	79.907.392.841,08	4,81	1.000.000.000,00	0,06
2027	1.741.402.268.460,71	1.667.827.566.786,75	95,77	72.574.701.673,97	4,17	1.000.000.000,00	0,06
2028	1.829.610.994.019,60	1.700.729.344.178,09	92,96	127.881.649.841,51	6,99	1.000.000.000,00	0,05
2029	1.925.940.312.370,16	1.852.178.582.132,58	96,17	72.761.730.237,58	3,78	1.000.000.000,00	0,05
2030	2.027.996.026.912,01	1.838.265.507.432,10	90,64	188.730.519.479,91	9,31	1.000.000.000,00	0,05
Jumlah	**9.184.876.797.561,50**	**8.638.020.803.487,44**	**94,05**	**541.855.994.074,05**	**5,90**	**5.000.000.000,00**	**0,05**

Sumber : Bapperida, data diolah

2.6 Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan fokus pembangunan daerah, maka perlu melibatkan berbagai pihak dalam proses perumusannya sehingga lebih fokus dan terarah didalam upaya untuk menyelesaikan persoalan pembangunan di daerah. Perumusan permasalahan dan isu strategis ini akan memberikan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan untuk lima tahun kedepan. Identifikasi permasalahan dan analisis isu-isu strategis ini juga sebagai pijakan awal bagi daerah agar fokus dalam merumuskan visi dan misi pembangunan jangka menengah dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang tepat sasaran dan efektif.

2.6.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Penentuan permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Nias Selatan untuk periode perencanaan tahun 2025–2029 dilakukan melalui proses yang sistematis dan berbasis data. Proses ini mengacu pada hasil analisis dari gambaran umum kondisi daerah sebagaimana termuat dalam Bab II dokumen RPJMD, yang mencakup aspek geografis, demografis, sosial, ekonomi, dan infrastruktur. Selain itu, perumusan permasalahan juga didasarkan pada temuan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD 2025–2029 yang menyoroti isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan, seperti pengelolaan sumber daya alam, penurunan kualitas lingkungan, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Kedua sumber ini memberikan potret menyeluruh mengenai capaian pembangunan daerah yang belum optimal dan menjadi dasar identifikasi permasalahan pembangunan.

Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan juga melakukan penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum-forum konsultasi publik, musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), dan berbagai kanal komunikasi lainnya. Hasil penjaringan ini memperkuat identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat secara langsung, termasuk keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Permasalahan-permasalahan tersebut kemudian dirumuskan sebagai pernyataan kondisi (realita) yang mencerminkan kesenjangan antara kondisi aktual dengan kondisi ideal yang diharapkan. Misalnya, ketimpangan antar wilayah, tingginya angka kemiskinan

dan pengangguran, serta belum optimalnya pelayanan publik menjadi rumusan permasalahan utama yang perlu diintervensi secara strategis selama lima tahun ke depan melalui kebijakan pembangunan daerah. Adapun permasalahan pembangunan di Nias Selatan adalah sebagai berikut berikut:

a. Keterbatasan infrastruktur dasar yang belum terpenuhi, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Kabupaten Nias Selatan sebagai salah satu daerah kepulauan di Sumatera Utara masih menghadapi kesenjangan signifikan dalam pemenuhan infrastruktur dasar. Berdasarkan pendekatan berbasis gap, kondisi aktual yang ada saat ini masih jauh dari kondisi ideal sebagaimana yang ditargetkan dalam RPJPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025–2045, RPJMN 2025–2029, maupun visi pembangunan nasional Asta Cita. Salah satu permasalahan utama terdapat pada infrastruktur transportasi. Jalan-jalan penghubung antar-desa dan kecamatan sebagian besar masih rusak, belum beraspal, bahkan ada yang belum tersedia sama sekali. Kondisi ini berlawanan dengan target nasional yang menekankan peningkatan konektivitas wilayah dengan jalan mantap minimal 75–80% pada tahun 2045. Faktor pengaruh yang memperburuk kondisi ini antara lain topografi wilayah berbukit dan berliku, keterbatasan anggaran daerah untuk pembangunan serta pemeliharaan, dan lemahnya kapasitas penyedia jasa konstruksi. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur transportasi menjadi agenda penting dalam RPJPD, selaras dengan RPJMN yang menekankan konektivitas berkeadilan, dan Asta Cita yang menempatkan pemerataan infrastruktur dasar sebagai salah satu prioritas utama.

Selain transportasi, kesenjangan juga nyata terlihat pada infrastruktur air bersih dan sanitasi. Sebagian besar masyarakat, khususnya di pedesaan, masih bergantung pada sumber air alami seperti sungai, sumur, dan air hujan yang kualitasnya tidak terjamin, sementara akses terhadap sanitasi layak juga sangat terbatas. Padahal, kondisi ideal yang ditargetkan pemerintah adalah tercapainya akses universal terhadap air minum aman dan sanitasi layak (100%) pada tahun 2030 sesuai dengan SDGs dan target nasional. Faktor penyebab utama kesenjangan ini adalah kelembagaan pengelolaan air bersih yang masih lemah, keterbatasan jaringan perpipaan, dan rendahnya kesadaran masyarakat akan perilaku hidup bersih dan sehat. Hal ini menjadi perhatian dalam RPJPD Kabupaten Nias Selatan yang menekankan pemenuhan kebutuhan dasar,

sekaligus sejalan dengan RPJMN dan Asta Cita yang menempatkan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui layanan dasar kesehatan dan lingkungan sebagai prioritas pembangunan.

Permasalahan serupa juga terjadi pada infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Banyak sekolah masih kekurangan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, maupun sarana olahraga, sedangkan ketersediaan fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit juga masih terbatas serta belum merata di seluruh wilayah. Kondisi ini jelas tidak sejalan dengan kondisi ideal berupa pemerataan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan yang modern, layak, dan menjangkau seluruh kecamatan. Beberapa faktor yang memengaruhi kesenjangan ini adalah rendahnya rasio guru, tenaga kesehatan, serta fasilitas dibandingkan jumlah penduduk, keterbatasan anggaran yang bergantung pada transfer pusat, dan sulitnya akses geografis antarwilayah. Kesenjangan ini sangat relevan dengan RPJPD yang menargetkan peningkatan kualitas sumber daya manusia unggul dan sehat, serta dengan RPJMN yang menekankan pembangunan manusia, dan Asta Cita yang menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan dan kesehatan.

Pada sektor listrik dan energi, meskipun sebagian besar wilayah telah teraliri listrik, namun kualitas layanan belum stabil. Pemadaman listrik masih sering terjadi, bahkan masih ada beberapa desa yang sama sekali belum menikmati akses listrik. Kondisi ini berlawanan dengan target ideal rasio elektrifikasi 100% dengan suplai energi stabil dan berkelanjutan pada tahun 2045. Faktor penyebabnya antara lain terbatasnya jaringan PLN di wilayah terpencil, tingginya biaya pembangunan jaringan listrik di kepulauan, dan pemanfaatan energi terbarukan yang belum optimal. Permasalahan ini sudah diantisipasi dalam RPJPD Kabupaten Nias Selatan yang menargetkan perluasan akses energi berkelanjutan, serta konsisten dengan RPJMN yang mendorong transisi energi bersih dan pemerataan listrik, dan Asta Cita yang menekankan pemerataan pembangunan infrastruktur termasuk energi.

Sementara itu, di bidang komunikasi dan informasi, banyak desa dan wilayah terpencil di Nias Selatan yang masih belum terjangkau internet stabil, dan kualitas jaringan telekomunikasi juga masih lemah. Kondisi aktual ini tentu jauh dari kondisi ideal berupa keterhubungan digital secara menyeluruh pada tahun 2045. Faktor penyebabnya meliputi hambatan geografis kepulauan yang

menyulitkan pembangunan fiber optik, rendahnya minat investasi swasta di wilayah terpencil, dan keterbatasan infrastruktur BTS serta tower telekomunikasi. Permasalahan ini mendapat perhatian dalam RPJPD Kabupaten Nias Selatan yang menekankan transformasi digital untuk mendukung pelayanan publik dan ekonomi lokal, sejalan dengan RPJMN yang menempatkan transformasi digital sebagai prioritas nasional, serta Asta Cita yang mendorong digitalisasi dan inovasi sebagai penggerak pembangunan.

Secara keseluruhan, analisis berbasis gap ini menunjukkan bahwa permasalahan infrastruktur dasar di Kabupaten Nias Selatan dipengaruhi oleh faktor geografis kepulauan, keterbatasan fiskal daerah, kapasitas kelembagaan yang rendah, serta minimnya investasi swasta. Kesenjangan tersebut berimplikasi besar terhadap kualitas hidup masyarakat dan daya saing daerah. Oleh sebab itu, kebijakan pembangunan ke depan harus berorientasi pada percepatan pemenuhan infrastruktur dasar sesuai arah RPJPD 2025–2045, konsisten dengan RPJMN, serta mendukung implementasi Asta Cita sebagai agenda pembangunan nasional jangka menengah.

b. Akses pendidikan yang belum merata dan rendahnya angka partisipasi sekolah hingga jenjang yang lebih tinggi.

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Namun, di Kabupaten Nias Selatan, terdapat kesenjangan nyata antara kondisi aktual penyelenggaraan pendidikan dengan kondisi ideal yang diharapkan sesuai arah kebijakan pembangunan jangka panjang. Hal ini tercermin dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan yang menempatkan sektor pendidikan sebagai isu strategis, sekaligus terkait dengan visi pembangunan daerah dalam RPJPD 2025–2045 yang menargetkan terciptanya SDM unggul, sehat, dan berdaya saing. Permasalahan pendidikan di Nias Selatan juga berhubungan erat dengan agenda RPJMN yang menekankan peningkatan kualitas manusia Indonesia, serta Asta Cita yang mengarahkan pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh pelosok negeri.

Salah satu permasalahan mendasar adalah ketimpangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Kondisi aktual menunjukkan bahwa sekolah-sekolah di wilayah perkotaan relatif memiliki fasilitas yang lebih lengkap, seperti perpustakaan, laboratorium, dan ruang kelas layak. Sebaliknya, di pedesaan dan wilayah terpencil, banyak sekolah masih kekurangan sarana dasar,

bahkan ada yang hanya memiliki bangunan seadanya dengan peralatan belajar yang minim. Kesenjangan ini sangat kontras dengan kondisi ideal berupa pemerataan akses pendidikan yang layak dan berkualitas di semua wilayah. Faktor penyebab ketimpangan ini antara lain topografi Nias Selatan yang berbukit-bukit, keterbatasan alokasi anggaran untuk membangun sekolah di daerah terpencil, serta lemahnya perencanaan distribusi sarana pendidikan. Dalam RPJPD, masalah ini telah diantisipasi melalui kebijakan pemerataan layanan dasar, sejalan dengan RPJMN yang menargetkan akses pendidikan merata, serta Asta Cita yang menegaskan misi untuk menghadirkan pendidikan berkualitas bagi semua anak Indonesia, termasuk di daerah tertinggal.

Permasalahan berikutnya adalah rendahnya angka partisipasi sekolah, terutama pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi. Data menunjukkan bahwa banyak anak di Nias Selatan putus sekolah setelah menyelesaikan pendidikan dasar, akibat kendala biaya, kebutuhan membantu ekonomi keluarga, serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan lanjutan. Padahal kondisi ideal yang dituju adalah peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) di semua jenjang, agar anak-anak dapat menempuh pendidikan minimal 12 tahun sesuai program nasional wajib belajar. Faktor pengaruh yang memperlebar kesenjangan ini mencakup keterbatasan dukungan beasiswa, kondisi ekonomi keluarga yang lemah, serta minimnya lapangan kerja formal yang membuat sebagian orang tua kurang melihat relevansi pendidikan lanjutan. Dalam konteks kebijakan, RPJPD Nias Selatan menargetkan peningkatan partisipasi pendidikan menengah dan tinggi sebagai strategi peningkatan daya saing SDM, yang sejalan dengan RPJMN dan Asta Cita melalui agenda penguatan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat.

Kualitas guru dan tenaga pendidik juga menjadi persoalan krusial. Di lapangan, masih banyak guru yang ditempatkan di daerah terpencil belum memiliki kualifikasi yang sesuai standar atau minim pelatihan pedagogis modern. Selain itu, distribusi tenaga pendidik yang tidak merata mengakibatkan beberapa sekolah mengalami kekurangan guru, sedangkan sekolah lain kelebihan. Kesenjangan ini berbeda dengan kondisi ideal yang menghendaki tersedianya guru berkualitas dan terdistribusi merata di semua satuan pendidikan. Faktor penyebabnya adalah terbatasnya rekrutmen guru baru, sistem distribusi ASN yang belum optimal, serta minimnya program peningkatan kapasitas guru secara

berkelanjutan. Dalam RPJPD, peningkatan kualitas tenaga pendidik menjadi strategi penting membangun SDM unggul, sementara RPJMN menekankan profesionalisasi guru, dan Asta Cita menegaskan peran guru sebagai ujung tombak pendidikan yang harus difasilitasi secara adil di seluruh wilayah Indonesia.

Selain itu, minimnya fasilitas pendidikan menjadi penghambat peningkatan mutu pembelajaran. Banyak sekolah di Nias Selatan tidak memiliki laboratorium, perpustakaan, maupun fasilitas olahraga, bahkan akses terhadap teknologi pendidikan seperti komputer dan internet masih sangat terbatas. Hal ini menyebabkan kesenjangan besar dengan kondisi ideal yang menuntut sekolah mampu menyediakan sarana penunjang pembelajaran berbasis teknologi di era digital. Faktor pengaruhnya meliputi keterbatasan pembiayaan, rendahnya prioritas investasi pendidikan berbasis teknologi, serta kesulitan akses infrastruktur komunikasi di daerah pedesaan. Dalam kerangka kebijakan, RPJPD mendorong transformasi digital dalam pendidikan, RPJMN menekankan modernisasi sistem pendidikan, sementara Asta Cita menargetkan digitalisasi dan inovasi sebagai penggerak kemajuan pendidikan nasional.

Terakhir, tingginya angka putus sekolah masih menjadi masalah nyata, khususnya di jenjang menengah. Faktor utama yang memengaruhi adalah kondisi ekonomi keluarga yang lemah sehingga anak-anak harus bekerja untuk membantu orang tua. Selain itu, faktor sosial budaya, seperti pernikahan dini dan pandangan bahwa bekerja lebih penting daripada melanjutkan sekolah, juga berkontribusi memperparah masalah ini. Kesenjangan ini bertolak belakang dengan kondisi ideal berupa pendidikan tuntas bagi semua anak minimal hingga jenjang menengah atas. Faktor pengaruh utama selain ekonomi adalah lemahnya sistem perlindungan anak, minimnya program intervensi sosial untuk keluarga miskin, serta kurang optimalnya peran pemerintah daerah dalam mengawasi dan mencegah anak putus sekolah. Dalam RPJPD, isu ini diprioritaskan melalui program pengentasan putus sekolah dan perluasan akses pendidikan, sejalan dengan RPJMN yang menekankan pengurangan kesenjangan pendidikan, serta Asta Cita yang menargetkan peningkatan literasi, keterampilan, dan produktivitas generasi muda Indonesia.

Secara keseluruhan, kesenjangan pendidikan di Kabupaten Nias Selatan mencerminkan tantangan multidimensional yang dipengaruhi oleh faktor

geografis, sosial-ekonomi, kelembagaan, dan budaya. Permasalahan ini menegaskan pentingnya strategi pembangunan pendidikan yang holistik, berbasis pemerataan akses, peningkatan kualitas guru, penguatan fasilitas, serta perlindungan anak dari risiko putus sekolah. Dengan demikian, arah kebijakan pembangunan daerah melalui RPJPD 2025–2045 harus disinergikan dengan RPJMN dan Asta Cita agar permasalahan pendidikan tidak hanya diatasi secara parsial, tetapi mampu mendorong transformasi pendidikan menuju SDM unggul, sehat, berdaya saing, dan adaptif terhadap perkembangan global.

c. Masih tingginya angka stunting dan keterbatasan akses layanan kesehatan bagi masyarakat

Kesehatan masyarakat merupakan indikator fundamental dalam pembangunan manusia dan kesejahteraan suatu daerah. Kabupaten Nias Selatan, sebagai daerah kepulauan dengan kondisi geografis yang menantang, masih menghadapi kesenjangan serius dalam sektor kesehatan. Permasalahan utama yang teridentifikasi adalah tingginya angka stunting serta keterbatasan akses layanan kesehatan. Kedua permasalahan ini bukan hanya menjadi isu krusial dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan, tetapi juga menjadi prioritas dalam RPJPD 2025–2045, karena berdampak langsung terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM) dan daya saing daerah. Pada tingkat nasional, masalah ini relevan dengan RPJMN 2025–2029 yang menekankan peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, serta dengan Asta Cita yang menegaskan pentingnya membangun manusia Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing.

Permasalahan pertama adalah tingginya angka stunting di Kabupaten Nias Selatan. Kondisi aktual menunjukkan bahwa prevalensi stunting masih berada di atas rata-rata nasional, jauh dari target ideal pemerintah untuk menurunkan angka stunting menjadi di bawah 14% pada tahun 2024 dan terus ditekan hingga mendekati nol pada tahun 2045. Kesenjangan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, banyak keluarga yang tidak mampu menyediakan asupan gizi seimbang karena keterbatasan ekonomi, sehingga anak-anak rentan mengalami kekurangan gizi kronis. Kedua, pengetahuan masyarakat, khususnya ibu hamil dan menyusui, mengenai pentingnya gizi masih rendah, menyebabkan pola makan tidak sesuai standar kesehatan. Ketiga, buruknya kondisi sanitasi dan keterbatasan air bersih memperparah risiko penyakit infeksi yang berkontribusi pada stunting. Keempat, layanan kesehatan ibu dan anak masih belum optimal akibat keterbatasan

fasilitas, jarak tempuh yang jauh, serta distribusi tenaga medis yang tidak merata. Faktor-faktor ini saling berkaitan dan memperlebar kesenjangan antara kondisi aktual dengan kondisi ideal. Dampak stunting tidak hanya pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga perkembangan kognitif, produktivitas, dan kualitas SDM di masa depan. Karena itu, penanggulangan stunting menjadi prioritas kebijakan dalam RPJPD Nias Selatan, sejalan dengan RPJMN yang menekankan intervensi spesifik dan sensitif untuk pencegahan stunting, serta Asta Cita yang menggariskan peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia sejak usia dini.

Permasalahan kedua adalah keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Kondisi aktual di Nias Selatan menunjukkan adanya kesenjangan besar dengan kondisi ideal berupa layanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Banyak desa dan wilayah terpencil yang memiliki jarak tempuh jauh ke puskesmas atau rumah sakit, ditambah kondisi jalan yang rusak dan transportasi terbatas, sehingga menghambat masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Distribusi tenaga kesehatan juga belum merata, dengan kekurangan dokter, bidan, dan perawat di daerah terpencil. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi ideal yang menghendaki ketersediaan tenaga medis profesional di setiap kecamatan dan desa. Selain itu, fasilitas kesehatan yang ada masih belum memadai. Banyak puskesmas kekurangan peralatan medis, ruang perawatan, serta pasokan obat-obatan, sehingga mutu layanan rendah. Biaya kesehatan juga menjadi kendala, sebab meskipun ada program JKN, masyarakat miskin masih terbebani biaya transportasi dan kebutuhan penunjang lainnya. Faktor pengaruh dari keterbatasan ini mencakup aspek geografis kepulauan, keterbatasan anggaran daerah, lemahnya kapasitas manajemen kesehatan, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi kesehatan digital.

Kesenjangan dalam akses kesehatan ini sudah diantisipasi dalam RPJPD Kabupaten Nias Selatan 2025–2045 yang memprioritaskan peningkatan kualitas layanan kesehatan melalui pemerataan fasilitas, tenaga medis, dan pemanfaatan teknologi digital untuk telemedicine. Hal ini sejalan dengan RPJMN 2025–2029 yang menekankan perluasan akses layanan kesehatan berkualitas serta penguatan sistem Jaminan Kesehatan Nasional agar lebih inklusif. Sementara itu, Asta Cita juga memberikan arah yang jelas melalui misinya meningkatkan kualitas

kesehatan masyarakat, menekan angka stunting, dan memperluas layanan kesehatan dasar bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

Secara keseluruhan, permasalahan kesehatan di Kabupaten Nias Selatan memperlihatkan adanya gap besar antara kondisi aktual dan kondisi ideal, yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, geografis, sosial, dan kelembagaan. Tingginya angka stunting dan keterbatasan layanan kesehatan bukan hanya permasalahan teknis, tetapi juga menyangkut aspek struktural pembangunan daerah. Oleh karena itu, kebijakan kesehatan di Nias Selatan harus diarahkan pada strategi terpadu, mencakup peningkatan gizi masyarakat, penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, pemerataan distribusi tenaga medis, perbaikan infrastruktur pendukung, serta penguatan program edukasi kesehatan. Dengan demikian, pembangunan sektor kesehatan dapat berjalan sinergis dengan visi RPJPD 2025–2045, RPJMN, dan Asta Cita, guna mewujudkan masyarakat Nias Selatan yang sehat, produktif, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

d. Ketergantungan Ekonomi pada Sektor Tertentu dan Rendahnya Pemanfaatan Potensi Daerah

Perekonomian Kabupaten Nias Selatan pada dasarnya memiliki potensi yang besar untuk berkembang, baik melalui sektor pertanian, pariwisata, perikanan, maupun industri kreatif. Namun, dalam realitasnya, terdapat kesenjangan (gap) yang cukup lebar antara potensi yang dimiliki dengan kondisi aktual di lapangan. Kesenjangan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural, kultural, maupun kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung optimalisasi pemanfaatan potensi daerah. Permasalahan ini tercermin dalam dokumen RPJMD dan perlu ditangani dalam kerangka pembangunan jangka panjang melalui RPJPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025–2045 agar selaras dengan arah kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJMN serta Asta Cita Presiden.

Salah satu gap yang paling menonjol adalah ketergantungan ekonomi pada sektor tertentu, khususnya pertanian tradisional. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Nias Selatan masih menggantungkan hidup pada sektor pertanian subsisten dengan produktivitas rendah. Kesenjangan terjadi karena secara potensial sektor pertanian dapat menjadi penggerak utama ekonomi, tetapi realisasi di lapangan masih terbatas akibat minimnya penerapan teknologi modern, tingginya ketergantungan pada kondisi cuaca yang semakin tidak menentu karena perubahan iklim, serta terbatasnya akses petani terhadap pasar

yang lebih luas. Faktor infrastruktur jalan yang buruk, lemahnya sistem distribusi, dan rendahnya kapasitas manajemen usaha tani semakin memperlebar gap tersebut. Kondisi ini menjadikan perekonomian daerah rapuh terhadap guncangan eksternal, seperti fluktuasi harga komoditas atau bencana alam. Dalam konteks kebijakan, permasalahan ini menuntut adanya transformasi ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD Kabupaten Nias Selatan 2025–2045 yang mengarah pada pertanian modern, sejalan dengan RPJMN yang menargetkan ketahanan pangan, serta Asta Cita yang menekankan pada pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Gap berikutnya terlihat dalam rendahnya pemanfaatan potensi daerah di luar sektor pertanian, khususnya pada sektor pariwisata, perikanan, dan industri kreatif. Dari sisi pariwisata, Kabupaten Nias Selatan memiliki daya tarik alam dan budaya yang unik, seperti tradisi lompat batu, pantai berkelas dunia, serta kekayaan seni dan budaya lokal. Namun, potensi tersebut belum berkembang maksimal akibat keterbatasan infrastruktur penunjang, minimnya promosi yang terarah dan berkelanjutan, serta rendahnya kualitas fasilitas akomodasi dan layanan wisata. Kesenjangan ini mencerminkan adanya potensi unggulan yang belum mampu diolah menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Faktor penyebabnya terletak pada lemahnya perencanaan strategis pariwisata daerah, keterbatasan investasi swasta, serta belum adanya integrasi antara promosi budaya dengan destinasi wisata unggulan.

Demikian pula dalam sektor perikanan, potensi laut yang besar belum mampu dimanfaatkan optimal karena teknologi penangkapan yang masih tradisional, keterbatasan fasilitas rantai dingin (cold storage), serta rendahnya akses pasar. Gap antara potensi produksi perikanan dengan realisasi hasil tangkapan dan nilai tambah ekonominya sangat jelas terlihat. Faktor yang mempengaruhi antara lain rendahnya intervensi teknologi, minimnya pelatihan dan pendampingan nelayan, serta belum adanya dukungan industri pengolahan ikan skala lokal. Padahal, jika digarap secara serius, sektor perikanan dapat menjadi basis ekonomi baru yang mendukung visi RPJPD 2025–2045 menuju pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal.

Selain itu, industri kreatif dan kerajinan lokal juga menghadapi gap signifikan. Kabupaten Nias Selatan memiliki produk budaya seperti tenun dan ukiran kayu yang berpotensi tinggi sebagai produk unggulan, namun realisasi

kontribusinya terhadap perekonomian masih rendah. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya akses pasar, kurangnya inovasi produk agar sesuai dengan tren global, serta keterbatasan modal dan dukungan kebijakan untuk pengrajin lokal. Gap ini menunjukkan adanya potensi ekonomi kreatif yang terabaikan akibat lemahnya ekosistem pendukung.

Secara keseluruhan, berbagai gap yang terjadi dalam perekonomian Kabupaten Nias Selatan menunjukkan adanya permasalahan mendasar berupa lemahnya diversifikasi ekonomi dan belum optimalnya pemanfaatan potensi daerah. Faktor penyebabnya tidak hanya terkait keterbatasan infrastruktur dan teknologi, tetapi juga menyangkut aspek kebijakan, kapasitas SDM, dan dukungan investasi. Oleh karena itu, selaras dengan RPJPD Kabupaten Nias Selatan 2025–2045, strategi pembangunan ekonomi harus difokuskan pada transformasi struktur ekonomi dari berbasis subsisten menuju ekonomi produktif, inovatif, dan berkelanjutan. Hal ini juga sejalan dengan arah RPJMN yang menekankan penguatan ekonomi daerah dan pengurangan kesenjangan wilayah, serta mendukung pencapaian Asta Cita, khususnya cita keempat dan kelima yang berfokus pada kemandirian ekonomi daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pengembangan potensi lokal yang berdaya saing.

e. Tata Kelola Pemerintahan Yang Masih Perlu Ditingkatkan Dalam Hal Transparansi, Akuntabilitas, Dan Layanan Publik.

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan salah satu fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang efektif, efisien, dan berkeadilan. Namun, di Kabupaten Nias Selatan masih terdapat kesenjangan (gap) yang cukup signifikan antara prinsip ideal *good governance* dengan realitas pelaksanaan di lapangan. Gap ini terlihat dalam tiga aspek utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan publik. Kesenjangan tersebut bukan hanya dipengaruhi oleh faktor internal seperti kapasitas aparatur dan sistem birokrasi, tetapi juga oleh faktor eksternal seperti budaya politik lokal, tingkat partisipasi masyarakat, serta keterbatasan infrastruktur dan teknologi. Kondisi ini menjadi tantangan penting yang harus dijawab dalam RPJPD Kabupaten Nias Selatan 2025–2045 agar sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam RPJMN dan Asta Cita yang menekankan penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas.

Pertama, terdapat gap dalam aspek transparansi pemerintahan. Secara normatif, prinsip keterbukaan informasi publik telah diamanatkan oleh undang-undang, namun implementasinya di Kabupaten Nias Selatan masih terbatas. Akses masyarakat terhadap dokumen penting seperti anggaran daerah, rencana pembangunan, dan laporan kinerja belum sepenuhnya terbuka. Gap ini semakin diperlebar oleh lemahnya mekanisme sosialisasi dan keterbatasan pemanfaatan media informasi digital, sehingga masyarakat kesulitan memperoleh informasi yang seharusnya bersifat publik. Selain itu, proses pengambilan keputusan di tingkat pemerintah daerah seringkali masih bersifat top-down dan kurang melibatkan partisipasi masyarakat. Faktor yang mempengaruhi kondisi ini adalah kultur birokrasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap prinsip keterbukaan, keterbatasan kapasitas institusi dalam mengelola sistem informasi publik, serta minimnya pengawasan masyarakat. Dalam konteks kebijakan, RPJPD 2025–2045 mendorong peningkatan transparansi melalui digitalisasi tata kelola pemerintahan, selaras dengan RPJMN yang menargetkan pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), serta Asta Cita yang menekankan transparansi sebagai prasyarat utama tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Kedua, terdapat gap dalam akuntabilitas pemerintahan. Idealnya, akuntabilitas diwujudkan melalui pelaporan kinerja yang terbuka, evaluasi program pembangunan yang komprehensif, serta mekanisme pengawasan yang kuat. Namun, realitas di Kabupaten Nias Selatan menunjukkan bahwa laporan kinerja seringkali tidak dipublikasikan secara rutin, sementara evaluasi program pembangunan masih bersifat parsial. Mekanisme pengawasan internal dan eksternal juga belum optimal, sehingga membuka peluang terjadinya inefisiensi dan penyimpangan dalam pengelolaan program dan anggaran. Lemahnya penegakan hukum terhadap aparatur yang melakukan pelanggaran semakin memperlebar gap antara standar ideal akuntabilitas dan kondisi aktual di lapangan. Faktor yang mempengaruhi adalah keterbatasan sistem pengendalian internal pemerintah daerah, rendahnya kapasitas lembaga pengawasan, serta budaya birokrasi yang belum sepenuhnya berbasis kinerja. Dalam kerangka kebijakan, RPJPD 2025–2045 menekankan pentingnya penguatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dan integritas aparatur. Hal ini juga selaras dengan RPJMN yang menekankan agenda reformasi birokrasi, serta

Asta Cita yang berkomitmen membangun pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

Ketiga, terdapat gap dalam kualitas layanan publik. Secara normatif, pemerintah daerah dituntut memberikan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, dan berkualitas. Namun, kenyataan di Kabupaten Nias Selatan menunjukkan bahwa layanan publik masih lambat, berbelit, dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh birokrasi yang panjang, keterbatasan kompetensi dan profesionalisme aparatur, serta minimnya fasilitas pelayanan terutama di daerah pedesaan. Gap semakin terlihat karena di satu sisi terdapat tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi digital, sementara di sisi lain kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan layanan berbasis teknologi informasi masih sangat terbatas. Rendahnya inovasi pelayanan publik menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi pemanfaatan teknologi digital dengan realitas implementasinya di lapangan. Faktor yang mempengaruhi adalah kualitas sumber daya manusia aparatur, minimnya anggaran untuk inovasi, serta lemahnya manajemen pelayanan publik yang terintegrasi. Kebijakan RPJPD 2025–2045 mengarahkan pada penguatan pelayanan publik berbasis digital yang inklusif, mendukung RPJMN yang mendorong reformasi pelayanan publik, dan sejalan dengan Asta Cita yang menekankan peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan birokrasi modern yang melayani.

Dengan demikian, permasalahan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Nias Selatan dapat dipahami sebagai kesenjangan antara prinsip ideal good governance dengan praktik di lapangan, yang dipengaruhi oleh keterbatasan sistem, sumber daya, serta budaya birokrasi. Upaya menutup gap ini harus dilakukan melalui strategi reformasi birokrasi yang komprehensif, peningkatan kapasitas aparatur, digitalisasi pemerintahan, serta penguatan partisipasi masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya relevan dalam konteks pembangunan jangka menengah melalui RPJMD, tetapi juga strategis untuk mewujudkan visi RPJPD Kabupaten Nias Selatan 2025–2045, selaras dengan agenda nasional dalam RPJMN dan Asta Cita.

f. Menurunnya Nilai-Nilai Budaya Dan Kurangnya Pelestarian Lingkungan.

Kabupaten Nias Selatan dengan kekayaan budaya dan alam yang melimpah seharusnya memiliki daya saing yang kuat dalam pembangunan daerah berbasis

kearifan lokal dan berkelanjutan. Namun, terdapat kesenjangan (gap) yang nyata antara potensi ideal tersebut dengan realitas yang ada di lapangan. Dua permasalahan utama yang saling berkaitan, yaitu menurunnya nilai-nilai budaya dan kurangnya pelestarian lingkungan, menjadi tantangan serius yang tidak hanya berdampak pada identitas masyarakat dan kesejahteraan sosial, tetapi juga mengancam keberlanjutan pembangunan. Gap ini dipengaruhi oleh faktor internal seperti lemahnya pewarisan budaya dan kesadaran masyarakat, serta faktor eksternal seperti pengaruh globalisasi, dinamika sosial-ekonomi, dan perubahan iklim global. Permasalahan ini telah diidentifikasi dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan, dan secara strategis juga menjadi bagian penting dari visi RPJPD 2025–2045 yang menekankan pembangunan manusia dan lingkungan yang berkelanjutan, sejalan dengan RPJMN dan Asta Cita yang mendorong pelestarian budaya serta ketahanan lingkungan hidup.

Pertama, terdapat gap dalam pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Secara ideal, budaya Nias Selatan yang kaya tradisi, adat istiadat, bahasa daerah, dan kesenian khas dapat menjadi identitas kolektif yang memperkuat jati diri masyarakat sekaligus sebagai modal sosial dan ekonomi melalui sektor pariwisata dan industri kreatif. Namun, realitas menunjukkan adanya penurunan signifikan dalam penghayatan dan praktik budaya lokal. Pengaruh globalisasi dan modernisasi telah membawa perubahan gaya hidup yang membuat generasi muda lebih tertarik pada budaya populer dari luar, sementara tradisi lokal mulai ditinggalkan. Gap ini semakin melebar karena proses pewarisan budaya dari generasi tua ke generasi muda semakin melemah, baik karena kurangnya minat maupun terbatasnya ruang pendidikan formal dan nonformal yang mengajarkan budaya lokal. Faktor lain yang turut memengaruhi adalah perubahan struktur sosial ekonomi, di mana banyak masyarakat meninggalkan desa dan adat istiadatnya untuk beradaptasi dengan pola hidup modern. Kondisi ini menimbulkan erosi identitas budaya dan berpotensi melemahkan kohesi sosial. Dalam konteks kebijakan, RPJPD Nias Selatan 2025–2045 menekankan penguatan budaya lokal sebagai identitas daerah, sejalan dengan arah RPJMN yang mendorong pembangunan kebudayaan, serta mendukung Asta Cita yang berfokus pada pelestarian budaya bangsa dan penguatan karakter nasional.

Kedua, terdapat gap dalam pelestarian lingkungan hidup. Idealnya, sebagai daerah kepulauan dengan ekosistem hutan, sungai, pesisir, dan laut, Nias Selatan

dapat mengembangkan pembangunan berbasis lingkungan yang menjaga keseimbangan ekologi sekaligus mendukung ekonomi masyarakat. Namun, realitas menunjukkan terjadinya degradasi lingkungan akibat penebangan liar, alih fungsi lahan, serta eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali. Gap semakin nyata dalam pengelolaan sampah, terutama di wilayah perkotaan dan pesisir, di mana fasilitas pengelolaan masih sangat terbatas dan kesadaran masyarakat rendah, sehingga terjadi pencemaran yang mengancam ekosistem laut, termasuk terumbu karang dan biota perikanan. Selain itu, dampak perubahan iklim global seperti kenaikan muka air laut, cuaca ekstrem, dan bencana alam semakin memperburuk kerentanan lingkungan. Faktor yang memengaruhi kondisi ini meliputi lemahnya regulasi dan penegakan hukum lingkungan, keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah, rendahnya edukasi masyarakat tentang lingkungan, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi ramah lingkungan. Kesenjangan antara ideal dan realitas ini berdampak langsung pada sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata yang sangat bergantung pada keberlanjutan ekosistem. RPJPD 2025–2045 menempatkan pelestarian lingkungan sebagai salah satu pilar pembangunan berkelanjutan, yang sejalan dengan prioritas RPJMN dalam mewujudkan ekonomi hijau dan rendah karbon, serta mendukung Asta Cita yang menekankan perlindungan lingkungan hidup dan ketahanan terhadap perubahan iklim.

Dengan demikian, permasalahan menurunnya nilai budaya dan pelestarian lingkungan di Kabupaten Nias Selatan dapat dipahami sebagai kesenjangan antara kondisi ideal (budaya dan lingkungan sebagai identitas dan modal pembangunan) dengan realitas yang menunjukkan degradasi nilai dan sumber daya. Gap ini diperkuat oleh faktor internal maupun eksternal, dan memiliki keterkaitan langsung dengan kualitas SDM, keberlanjutan ekonomi, serta daya saing daerah. Upaya menutup kesenjangan ini harus dilakukan melalui strategi terpadu, seperti revitalisasi budaya lokal melalui pendidikan dan pariwisata, penguatan regulasi dan kelembagaan lingkungan, peningkatan kesadaran masyarakat, serta pemanfaatan teknologi ramah lingkungan. Strategi tersebut sejalan dengan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Nias Selatan 2025–2045, mendukung target RPJMN, dan berkontribusi langsung pada pencapaian Asta Cita yang menekankan pembangunan manusia Indonesia berbudaya sekaligus berkelanjutan secara lingkungan.

g. Dominasi Kawasan Hutan Lindung Lindung Yang Membatasi Ruang Pembangunan dan Pemanfaatan Lahan Secara Berkelanjutan Di Nias Selatan

Permasalahan dominasi kawasan hutan lindung di Kabupaten Nias Selatan menunjukkan adanya kesenjangan (gap) antara kebutuhan pembangunan masyarakat dengan regulasi tata kelola kawasan hutan yang berlaku. Secara ideal, kawasan hutan lindung berfungsi menjaga kelestarian ekosistem, melindungi keanekaragaman hayati, serta mencegah bencana ekologis. Namun, dalam kenyataannya, sebagian besar lahan yang ditetapkan sebagai hutan lindung telah lama menjadi wilayah permukiman dan pertanian masyarakat jauh sebelum ditetapkan secara resmi. Gap ini memunculkan ketidakpastian hukum, keterbatasan lahan untuk pembangunan, serta konflik tata ruang yang menghambat realisasi program pembangunan daerah. Faktor-faktor yang memengaruhi kondisi ini antara lain kebijakan sentralistik dalam penetapan kawasan hutan tanpa mempertimbangkan sejarah pemanfaatan lahan masyarakat, keterlambatan harmonisasi RTRW dengan peta kawasan hutan nasional, serta lemahnya koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan lokal. Kondisi ini berdampak langsung pada keterbatasan ruang pertanian, perumahan, serta infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.

Dalam kerangka kebijakan, RPJPD Kabupaten Nias Selatan 2025–2045 menekankan pentingnya pembangunan wilayah berbasis keseimbangan antara kebutuhan sosial-ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Namun, dominasi kawasan hutan lindung yang tidak selaras dengan kondisi riil masyarakat memperlebar kesenjangan antara target pembangunan dengan kapasitas ruang yang tersedia. Hal ini berimplikasi pada lambannya akselerasi pembangunan daerah dan terbatasnya kontribusi sektor unggulan, seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan, terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada tingkat nasional, RPJMN menargetkan penguatan tata kelola kehutanan dan penyelesaian konflik agraria melalui reforma agraria, serta mendorong pembangunan rendah karbon. Sementara itu, Asta Cita menekankan perlunya keberpihakan pada masyarakat desa, pelestarian lingkungan, serta peningkatan infrastruktur untuk pemerataan pembangunan. Dengan demikian, penyelesaian persoalan kawasan hutan lindung di Nias Selatan bukan hanya persoalan lokal, tetapi juga bagian dari agenda

nasional untuk menciptakan keseimbangan antara pembangunan inklusif, kepastian hukum agraria, dan keberlanjutan ekologi.

Dominasi kawasan hutan lindung di Kabupaten Nias Selatan menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan jangka panjang. Kawasan ini mencakup hampir seluruh wilayah permukiman penduduk dan lahan pertanian masyarakat, meskipun banyak permukiman tersebut telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Beberapa wilayah seperti Ulunoyo, Boronadu, serta beberapa kecamatan lain di wilayah daratan saat ini dikategorikan sebagai kawasan hutan lindung. Padahal, secara historis, wilayah-wilayah tersebut bukan merupakan kawasan hutan lindung, melainkan telah lama menjadi area permukiman dan pertanian masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 6609/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara hingga tahun 2020, luas hutan lindung di Kabupaten Nias Selatan tercatat sebesar 72.716,57 hektare. Namun, keterbatasan ruang untuk permukiman, pertanian, serta pembangunan infrastruktur menjadi perhatian utama dalam perencanaan pembangunan daerah.

Menanggapi kondisi tersebut, pada tahun 2024, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia telah melakukan pelepasan sebagian kawasan hutan lindung melalui perubahan batas kawasan hutan untuk kepentingan masyarakat desa yang sebelumnya termasuk dalam kawasan hutan lindung. Pelepasan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri LHK Nomor 1502 Tahun 2024, dengan luas kawasan yang dilepas mencapai 2.175,87 hektare. Dengan adanya perubahan ini, luas hutan lindung di Kabupaten Nias Selatan berkurang menjadi 70.540,70 hektare.

Meskipun pelepasan ini merupakan langkah positif dalam menyediakan ruang bagi masyarakat, pengurangan luas kawasan lindung tersebut masih belum cukup signifikan dalam mengatasi permasalahan keterbatasan lahan bagi permukiman, pertanian, serta pembangunan infrastruktur di Kabupaten Nias Selatan.

Beberapa permasalahan utama yang muncul akibat dominasi kawasan hutan lindung di Kabupaten Nias Selatan antara lain:

1. Ketidakpastian Hukum atas Pemanfaatan Lahan

- Banyak masyarakat yang telah bermukim di dalam kawasan hutan lindung jauh sebelum Pemerintah Pusat menetapkan sebagai kawasan hutan lindung, tetapi tidak bisa memiliki hak kepemilikan tanah yang sah, sehingga mengalami keterbatasan dalam memperoleh layanan pembangunan dan akses pembiayaan.
- Ketiadaan legalitas lahan menghambat investasi dan pengembangan sektor ekonomi produktif, seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata.
- Kurangnya kejelasan status kepemilikan lahan berpotensi menimbulkan konflik agraria dan sosial antara masyarakat dengan pemerintah atau pemangku kepentingan lainnya.

2. Terbatasnya Ruang untuk Pengembangan Infrastruktur dan Pusat Kegiatan Ekonomi
   - Kesulitan dalam menyediakan lahan untuk pembangunan fasilitas publik seperti jalan, sekolah, rumah sakit, perkantoran, dan infrastruktur dasar lainnya.
   - Keterbatasan ruang untuk pengembangan kawasan industri, perdagangan, dan layanan ekonomi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi daerah.
   - Potensi sektor unggulan daerah, seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata, sulit dikembangkan secara maksimal karena keterbatasan ruang akibat status hutan lindung.
3. Konflik Tata Ruang dan Ketidaksesuaian dengan Rencana Pembangunan Daerah
   - Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nias Selatan mengalami ketidaksesuaian dengan kondisi faktual di lapangan, sehingga banyak kegiatan pembangunan yang terhambat oleh regulasi tata ruang.
   - Proses revisi dan penyesuaian RTRW harus dilakukan secara komprehensif agar mendukung kebutuhan pembangunan daerah tanpa mengabaikan aspek konservasi lingkungan.
   - Diperlukan sinergi dan koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam penyelesaian status kawasan.

- Ancaman terhadap Kelestarian Lingkungan dan Keberlanjutan Ekosistem
- Perubahan status hutan lindung tanpa perencanaan yang baik berpotensi menyebabkan degradasi lingkungan, seperti deforestasi, erosi, dan berkurangnya keanekaragaman hayati.
- Perlunya kebijakan pembangunan yang berbasis lingkungan, seperti perhutanan sosial, pengelolaan ekowisata, dan pola pemanfaatan lahan yang berkelanjutan.
- Meningkatnya tekanan terhadap sumber daya alam akibat aktivitas masyarakat yang bermukim dan berusaha di dalam kawasan hutan lindung.

4. Terbatasnya Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah
   - Status hutan lindung menghambat pembangunan jalan dan sarana transportasi yang menghubungkan antarwilayah dalam Kabupaten Nias Selatan, sehingga mempersulit mobilitas masyarakat dan distribusi barang.
   - Kesulitan dalam membangun jaringan listrik, telekomunikasi, serta infrastruktur dasar lainnya yang penting bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang lebih komprehensif guna menyeimbangkan kebutuhan pembangunan daerah dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dalam menjawab tantangan pembangunan jangka panjang dan menengah Kabupaten Nias Selatan.

Tabel 2.38
Pohon Masalah, Akar Masalah dan Permasalahan Pokok dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029

No	Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Keterbatasan infrastruktur dasar yang belum terpenuhi, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.	Rendahnya akses masyarakat terhadap jalan, air bersih, listrik, dan infrastruktur sosial dasar lainnya.	- Kapasitas fiskal daerah terbatas - Kondisi geografis yang menantang - Perencanaan belum berbasis data - Koordinasi lintas sektor belum optimal - Minimnya keterlibatan swasta
2	Akses pendidikan yang belum merata dan rendahnya angka partisipasi sekolah hingga jenjang yang lebih tinggi.	Ketimpangan akses pendidikan antar wilayah, minimnya sarana	- Keterbatasan fasilitas dan tenaga pendidik di daerah terpencil - Rendahnya kesadaran pentingnya pendidikan

No	Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
		pendidikan menengah dan kejuruan.	- Masih tingginya angka kemiskinan - Infrastruktur pendidikan belum memadai
3	Masih tingginya angka stunting dan keterbatasan akses layanan kesehatan bagi masyarakat.	Angka stunting yang tinggi dan fasilitas kesehatan yang belum merata.	- Kurangnya tenaga medis dan gizi - Akses layanan kesehatan dasar terbatas - Perilaku hidup bersih dan sehat belum optimal - Sanitasi dan air bersih belum terpenuhi
4	Ketergantungan ekonomi pada sektor tertentu dan rendahnya pemanfaatan potensi daerah.	Kurangnya diversifikasi ekonomi lokal dan tingginya angka pengangguran.	- Lemahnya inovasi dan teknologi tepat guna - Terbatasnya akses pembiayaan dan pasar - SDA belum dimanfaatkan secara optimal - Kurangnya pelatihan dan pendampingan usaha
5	Tata kelola pemerintahan yang masih perlu ditingkatkan dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan layanan publik.	Rendahnya kepercayaan publik dan belum optimalnya pelayanan publik.	- Sistem pengawasan internal belum efektif - SDM ASN belum merata kualitasnya - Belum optimalnya penerapan digitalisasi layanan - Lemahnya budaya birokrasi melayani
6	Menurunnya nilai-nilai budaya dan kurangnya pelestarian lingkungan.	Degradasi lingkungan dan hilangnya warisan budaya lokal.	- Kurangnya edukasi budaya dan lingkungan - Minimnya regulasi dan pengawasan - Praktik eksploitasi SDA tidak terkendali - Ketidaksadaran masyarakat akan pelestarian
7	Dominasi Kawasan Hutan Lindung Lindung Yang Membatasi Ruang Pembangunan dan Pemanfaatan Lahan Secara Berkelanjutan di Nias Selatan	Keterbatasan lahan untuk pemukiman, pertanian, dan pembangunan infrastruktur.	- Penetapan kawasan hutan tidak mempertimbangkan dinamika kebutuhan pembangunan - Proses tata ruang tidak sinergis - Belum optimalnya revisi RTRW sesuai kebutuhan lokal

2.6.2 Isu Strategis

2.6.2.1 Isu Global

a. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) tahun 2015-2030 merupakan komitmen agenda pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, pembangunan tata kelola yang inklusif, serta menjaga kualitas kehidupan ke generasi berikutnya. TPB/SDGs mencakup 17 tujuan yaitu: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4)

Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

b. Demografi Global dan Bonus Demografi

Demografi global sangat berpenaruh dalah perkembangan ekonomi dan sosial yang memberikan tantangan peningkatan kebutuhan hidup masyarakat tetapi ketersediaan sumber daya yang semakin terbatas. Pada tahun 2045, Indonesia akan mengalami bonus demografi dengan potensi angkatan kerja produktif yang tinggi. Tingginya jumlah penduduk usia muda memberikan tantangan pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan (Bappenas, 2023). Menurut data *Word Population Prospects* (2024) Populasi dunia saat ini mencapai lebih dari 8,2 miliar jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 10,2 miliar jiwa pada tahun 2080. Hal ini menjadi tantangan terkait penyesuaian tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan. Sementara itu, kebutuhan terhadap pangan, energi, dan air akan semakin meningkat seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Dampak dari hal tersebut adalah diperlukan penyesuaian sektor produksi untuk mendorong rentang kehidupan yang semakin Panjang.

Meskipun jumlah penduduk terus bertambah, namun laju pertumbuhannya terus melambat. Proyeksi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan bahwa penduduk global pada tahun 2045 tumbuh menjadi 9,5 miliar penduduk. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya Angka Harapan Hidup saat lahir. di sisi lain terjadi penurunan angka kelahiran yang signifikan di beberapa negara, terutama negara maju. Selain itu bertambahnya penduduk lanjut usia dan tingginya jumlah penduduk usia muda akan memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu,

diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM, jaminan sosial (kesehatan dan pendidikan), peluang lapangan kerja bagi generasi muda.

Mobilitas penduduk dan pergeseran ideologi berisiko memunculkan struktur dan bentuk keluarga yang berbeda. Semakin maraknya fenomena tidak memiliki anak (*childfree*), menunda pernikahan dan perilaku kehidupan sesama jenis telah menyebabkan turunnya angka kelahiran, sementara itu perkawinan di bawah umur masih banyak terjadi di negara berkembang. Akses terhadap media digital yang tidak terkendali berisiko meningkatkan kekerasan, perdagangan manusia, adiksi terhadap pornografi, perilaku menyimpang, dan perilaku beresiko anggota keluarga menjadi tantangan bagi keluarga dalam menjalankan fungsinya.

c. Perkembangan Teknologi

Disrupsi teknologi merupakan fenomena perkembangan teknologi yang berpenaruh pada perilaku masyarakat, pasar, industri, dan lain sebaginya. Disrupsi teknologi ditandai dengan inovasi-inovasi yang mendorong produktivitas, efektivitas, dan efisiensi sumber daya dan operasional. Perkembangan teknologi memerlukan kesiapan adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi secara optimal dan meminimalkan risiko disrupsi teknologi. Perkembangan teknologi seperti *Internet of Things* (IOT), Kecerdasan Buatan (AI), rekayasa genetik, nanotechnology, dan lain sebagainya akan mempengaruhi sektor manufaktur, perkembangan pendidikan-kesehatan, dan berbagai sektor lainnya. Selain itu, teknologi membuka peluang baru pembangunan ekonomi, mendorong inovasi, dan transformasi tata kelola kinerja pelayanan publik (Bappenas, 2023).

d. Krisis Iklim dan Pembangunan Rendah Karbon

Kelangkaan dan persaingan dalam mengakses sumber daya alam (utamanya energi, air, dan pangan) menjadi tantangan dalam memenuhi kebutuhan manusia di masa depan. Kelangkaan ini juga dipengaruhi oleh tiga krisis global (*The Triple Planetary Crisis*) yaitu perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan kehilangan keanekaragaman hayati. Krisis global tersebut menjadi urgensi untuk mengarahkan praktik pembangunan yang berkelanjutan dan sirkular seperti ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon. Pada Paris Agreement tahun 2015, Indonesia menyampaikan komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29% dengan kemampuan sendiri dan sebesar 41% dengan dukungan internasional pada 2030.

Kajian Bappenas (2019) 3 menunjukkan capaian penurunan emisi GRK Indonesia dapat mencapai 43% di tahun 2030. Capaian baik tersebut perlu konsisten dipertahankan bahkan ditingkatkan dengan langkah-langkah strategis, yaitu: (1) mendorong transisi ke sumber energi terbarukan dan mengurangi penggunaan batu bara; (2) peningkatan efisiensi energi; (3) penegakan penuh morotarium hutan, kelapa sawit, pertambangan, dan lahan gambut; (4) mematuhi komitmen konservasi sumber daya air, perikanan, dan keanekaragaman hayati; serta (5) peningkatan produktivitas lahan. Maka dari itu, ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon menjadi landasan penting arahan perencanaan pembangunan daerah.

2.6.2.2 Isu Strategis Nasional

Isu strategis nasional mencerminkan tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing. Salah satu isu yang krusial adalah transformasi ekonomi di tengah perubahan global yang cepat, termasuk digitalisasi, industri hijau, dan ketahanan pangan serta energi. Selain itu, ketimpangan sosial dan ekonomi masih menjadi tantangan, terutama dalam hal akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di daerah tertinggal. Isu lingkungan juga semakin mendesak, dengan ancaman perubahan iklim, degradasi sumber daya alam, dan bencana alam yang memerlukan mitigasi serta adaptasi yang lebih baik. Stabilitas politik dan keamanan menjadi faktor kunci dalam menjaga kelangsungan pembangunan, terutama dalam menghadapi dinamika geopolitik serta tuntutan reformasi birokrasi dan penegakan hukum. Oleh karena itu, strategi pembangunan nasional harus dirancang secara komprehensif, adaptif, dan inovatif agar mampu menjawab berbagai tantangan ini serta mewujudkan visi Indonesia sebagai negara maju, inklusif, dan berkelanjutan.

Isu strategis nasional yang berkembang dalam penyusunan RPJMN 2025-2029 mencerminkan berbagai tantangan yang harus dihadapi pemerintah dalam lima tahun ke depan. Salah satu isu utama adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, mengingat target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% membutuhkan peningkatan investasi, inovasi, serta penguatan industri berbasis sumber daya alam dan ekonomi digital. Selain itu, ketimpangan sosial dan kemiskinan masih menjadi permasalahan yang harus diatasi, dengan target penurunan tingkat kemiskinan di bawah 5% yang memerlukan strategi efektif

dalam distribusi kesejahteraan dan peningkatan akses terhadap layanan dasar. Isu ketahanan pangan, energi, dan air juga menjadi perhatian, terutama dalam menghadapi dampak perubahan iklim serta peningkatan kebutuhan akibat pertumbuhan populasi dan urbanisasi. Sementara itu, pembangunan infrastruktur dan konektivitas nasional harus ditingkatkan untuk mendukung daya saing industri serta pemerataan pembangunan antarwilayah, termasuk percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai pusat ekonomi baru. Stabilitas politik, reformasi birokrasi, serta supremasi hukum juga menjadi faktor kunci dalam mendukung efektivitas pemerintahan dan tata kelola pembangunan.

Di tengah pesatnya digitalisasi, pemerintah juga perlu mengantisipasi tantangan dalam penguatan ekonomi digital, keamanan siber, serta peningkatan daya saing tenaga kerja Indonesia di era industri 4.0. Dengan berbagai isu strategis ini, RPJMN 2025-2029 harus mampu menghadirkan kebijakan yang adaptif, inovatif, dan berbasis pada keberlanjutan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat serta ketahanan nasional di masa mendatang.

Isu Strategis Nasional yang dapat dikembangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut :

a. Bonus Demografi

Indonesia telah mengalami bonus demografi sejak tahun 2015 dengan periode puncaknya diperkirakan terjadi pada periode 2020- 2035, dimana tingkat kelahiran mengalami penurunan sehingga mengakibatkan persentase penduduk usia 0-14 tahun dan rasio ketergantungan menurun. Hal ini dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan bonus demografi untuk meningkatkan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan. Jumlah penduduk usia produktif yang besar dan berkualitas dapat berperan sebagai sumber tenaga kerja dan pelaku ekonomi yang dapat mempercepat pencapaian tujuan-tujuan pembangunan. Di sisi lain penduduk usia produktif yang dominan dapat menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk yang memiliki daya beli cukup tinggi dan dapat membeli produk-produk berkualitas (*consuming class*). Masyarakat ini perlu diimbangi dengan pemenuhan sisi produksi dan investasi di dalam negeri agar pasar domestik tetap dapat terkuasai. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan Isu strategis dari Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan adalah Indonesia

menjadi negara maju dan salah satu ekonomi terbesar di dunia dengan di gerakkan oleh investasi dan perdagangan, industri, pariwisata, maritim, dan jasa, serta didukung oleh infrastruktur yang andal dan ketahanan pangan, energi, dan air yang kuat. Komitmen terhadap Lingkungan hidup terus dijaga bagi keberlanjutan pembangunan.

b. Daya Dukung Sumber Daya Alam dan Daya Tampung

Daya dukung sumber daya alam di Indonesia diperkirakan akan mengalami penurunan. Daya dukung lahan hutan diperkirakan akan menurun seiring dengan proyeksi hilangnya luas hutan sebesar 10 juta hektar dari tahun 2025 hingga 2026. Daya dukung ketersediaan air juga diperkirakan mengalami tren menuju kelangkaan di sejumlah wilayah di Indonesia dan di tahun 2029 di sebagian wilayah Sumatera diperkirakan berada pada tingkat langka atau kritis. Daya dukung lahan dan air dalam menopang ketahanan pangan diperkirakan juga akan semakin menurun dengan meningkatnya alih fungsi lahan dan penurunan kualitas lahan dan air.

Daya dukung keanekaragaman hayati diproyeksikan akan menurun seiring dengan hilangnya habitat, peningkatan pencemaran perubahan iklim, dan persebaran jenis asing invasif (JAI). Daya dukung ekosistem laut mengalami kerentanan seiring dengan meningkatnya aktivitas manusia dan perubahan iklim. Di sisi lain daya dukung dari ketersediaan energi dan sumber daya mineral di Indonesia cukup besar namun belum sepenuhnya teroptimalkan.

Daya tampung kualitas air diperkirakan akan terus menurun dan mengakibatkan krisis air bersih dengan setidaknya 82% dari 550 sungai di Indonesia berstatus tercemar. Daya tampung kualitas udara juga telah melampaui standar mutu dengan peningkatan konsentrasi polutan setiap tahunnya. Daya tampung lingkungan laut juga mengalami penurunan karena aktivitas yang tidak berkelanjutan dan peningkatan persaingan akan ruang laut. Daya tampung lahan juga mengalami penurunan secara kapasitas dan kualitas.

c. Pembangunan IKN

Isu Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dilakukan untuk mengurangi ketimpangan antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia. Dengan ditetapkannya Undang-Undang IKN Nomor 3 Tahun 2022 pembangunan fisik Ibu Kota Nusantara telah dimulai. Pemindahan ibu kota negara ini tidak hanya memindahkan aktivitas pemerintahan, tetapi juga membangun pusat

pertumbuhan ekonomi (superhub) ekonomi. Pembangunan IKN diharapkan menjadi sumber pertumbuhan yang berkelanjutan dan menciptakan kehidupan yang layak dan modern. Pembangunan IKN sebagai superhub ekonomi melalui pengembangan klaster ekonomi yang berdaya saing dan inovatif perlu menjadi pertimbangan ke depan terutama juga untuk menciptakan konektivitas logistik dan rantai pasok ekonomi secara nasional. IKN yang direncanakan akan menjadi superhub dengan klaster ekonomi baru akan mempengaruhi pengembangan ekonomi di Sumatera Utara karena perubahan konektivitas logistik dan rantai pasok yang saat ini terjadi antara Sumatera dan Jawa.

d. Kapasitas Ilmu Pengetahuan, teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)

Peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi secara nasional masih dihadapkan pada lemahnya komitmen pemerintah, terutama dari segi anggaran yang hanya mencapai 0,28 % dari PDB. Padahal ke depannya kapasitas IPTEKIN menjadi sangat penting untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui peningkatan efisiensi dan penciptaan produk-produk berkualitas dan berteknologi tinggi.

Penguatan fondasi infrastruktur dasar riset dan inovasi masih menghadapi tantangan pada pemerataan distribusi kuantitas dan kualitas peneliti/periset, serta masih belum optimalnya kuantitas dan kualitas inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah, terutama inovasi berbasis sains dan teknologi yang bersifat *applied* dan *evidence based*.

Perluasan kemitraan ekosistem riset dan inovasi juga masih belum optimal, terutama pada kolaborasi stakeholders dalam meningkatkan difusi dan inkubasi teknologi inovasi yang dapat direplikasi dan berkelanjutan, khususnya dalam pengembangan klaster dan teknologi inovasi berbasis produk unggulan daerah.

e. Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah

Kontribusi industri pengolahan terhadap PDB semakin menurun akibat terjadinya pelemahan sektor manufaktur, rendahnya produktivitas faktor-faktor produksi, terbatasnya kemampuan adopsi teknologi serta pemanfaatan hasil industri di luar Jawa, dan terjadinya ekonomi biaya tinggi akibat biaya logistik dan suku bunga. Produktivitas sektor pertanian juga terus melambat dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 yang disebabkan banyak faktor, misalnya regenerasi petani dan nelayan, kurangnya keterampilan, terbatasnya adopsi

teknologi dan akses keuangan, kelembagaan ekonomi petani dan nelayan, serta berkurangnya daya dukung lahan pertanian.

f. Pemanfaatan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pemanfaatan potensi pariwisata sebagai destinasi unggulan dunia yang berkelanjutan terus mengukuhkan ekonomi kreatif sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi baru, menjadikannya barometer terdepan dalam arena ekonomi kreatif global. Dengan mengangkat kekayaan budaya, seni, dan kearifan lokal, serta mendorong kreativitas talenta Kabupaten Nias Selatan, kita membuka peluang untuk memberikan nilai tambah yang tinggi secara global.

g. Optimalisasi pemanfaatan potensi ekonomi laut

Indonesia memiliki potensi ekonomi laut yang tinggi, namun belum dimanfaatkan secara optimal untuk penciptaan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan. Rendahnya pemanfaatan sumber daya laut serta belum berkembangnya pemanfaatan *Sea Lines of Communication* (*SloC*) dan ALKI menyebabkan kontribusi PDB kemaritiman masih berada di kisaran 7,60%. Selain itu, masih juga terdapat tantangan degradasi lingkungan laut, tingginya kegiatna *illegal, unreported, and unregulated fishing (IUUF)*, dan belum optimalnya tata kelola dan regulasi pemanfaatan ruang laut.

h. Produktivitas Tenaga Kerja

Produktivitas tenaga kerja Indonesia dalam kurun waktu tahun 2010-2022 masih relatif tertinggal, dengan nilai US$7.274,9 per pekerja dan berada di bawah rata-rata pekerja di kawasan ASEAN. Peningkatan produktivitas tenaga kerja juga dihadapkan dengan rendahnya kualitas SDM, yang masih didominasi oleh tingkat pendidikan SMP ke bawah. Tantangan lainnya ialah ketidaksesuaian keahlian *(mismatch)* antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, informasi pasar tenaga kerja yang belum baik, dan pasar kerja Indonesia yang belum mampu merespons perubahan cepat jenis lapangan kerja, kebutuhan keahlian, struktur penduduk, serta pola budaya kerja.

2.6.2.3 Isu Strategis Sumatera Utara

Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara diidentifikasi dan dirumuskan berdasarkan Isu Global, Isu Nasional, Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan dalam KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan permasalahan yang dihadapi Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2024 serta tantangan yang mungkin dihadapi 5 (lima) tahun yang akan datang, Isu-isu strategis Sumatera

Utara yang diharapkan dapat teratasi dalam pembangunan jangka panjang (2025–2029) diuraikan sebagai berikut:

a. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia dihadapkan pada pembangunan dan Pembentukan modal manusia. Modal manusia tersebut dapat terwujud apabila setiap individu sehat, terdidik, dan terlindungi dari berbagai risiko siklus hidup. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan Transformasi Sosial yang menitikberatkan pada penuntasan pemenuhan layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Transformasi Sosial diperlukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus hidup sehingga mampu melahirkan manusia sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing. Pembangunan kesehatan dihadapkan pada peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, pengendalian penyakit, penguatan dan pemerataan kapasitas ketahanan kesehatan, serta responsiveness/ ketanggapan sistem kesehatan di seluruh wilayah.

Pembangunan pendidikan dihadapkan pada tantangan untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan di berbagai bidang sedangkan Perlindungan sosial yang adaptif ditujukan untuk percepatan penuntasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif.

Selanjutnya sistem demokrasi masih prosedural ditandai dengan kapasitas dan kemandirian masyarakat sipil belum kuat; belum terjaminnya kebebasan dan kesetaraan sosial, ekonomi, dan politik; informasi dan komunikasi publik belum merata; permasalahan politik elektoral seperti politik uang, politisasi isu SARA; nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi yang belum terinternalisasi serta sistem kaderisasi partai politik belum maksimal. Selain hal di atas nilai-nilai agama, kearifan lokal, dan konservasi lingkungan menjadi dimensi dasar dalam proses pembangunan kualitas sumber daya manusia. Agama dan kebudayaan harus menjadi landasan spiritual, etika, dan moral dalam penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi. Dalam hal ini, sumber daya manusia berperan sebagai katalisator transformasi pembangunan dengan dukungan keluarga sebagai

institusi internalisasi nilai positif dan pembangunan integritas karakter individu. Selain itu, perlu dipastikan terselenggaranya kebijakan pemerintah yang ramah gender serta inklusif bagi kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas dan lanjut usia, untuk pemerataan pembangunan dan layanan dasar yang optimal.

b. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas ke destinasi wisata unggulan seperti Danau Toba, Nias, dan Bukit Lawang. Untuk meningkatkan daya tarik wisata, diperlukan pembangunan dan perbaikan jalan, bandara, serta transportasi publik yang lebih terintegrasi. Selain itu, penyediaan fasilitas pendukung seperti hotel, restoran, dan pusat informasi wisata yang berkualitas juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kenyamanan wisatawan dan memperpanjang durasi kunjungan mereka.

Selain infrastruktur, penguatan ekonomi kreatif juga menjadi kunci dalam mendukung sektor pariwisata. Pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang bergerak di bidang kerajinan tangan, kuliner khas, serta seni pertunjukan perlu mendapatkan pembinaan dan akses permodalan yang lebih baik. Digitalisasi usaha ekonomi kreatif, seperti pemasaran berbasis e-commerce dan promosi melalui platform media sosial, juga harus diperkuat agar produk-produk lokal dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Dengan demikian, ekonomi kreatif tidak hanya mendukung industri pariwisata tetapi juga memberikan peluang kerja yang lebih besar bagi masyarakat lokal.

Keberlanjutan lingkungan dan pelestarian budaya harus menjadi fokus dalam pengembangan sektor ini. Pariwisata berbasis alam dan budaya perlu dikembangkan dengan tetap menjaga ekosistem dan kearifan lokal agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Edukasi kepada masyarakat dan pelaku wisata mengenai pentingnya ekowisata serta pengelolaan sampah di kawasan wisata harus ditingkatkan.

c. Pembangunan sarana dan prasarana yang merata dan berkeadilan

Pembangunan sarana dan prasarana yang belum memadai masih menjadi persoalan pembangunan yang perlu direspons ke depan. Luasan permukiman kumuh, rumah tangga dengan akses air minum layak, rumah tangga dengan akses sanitasi layak infrastruktur SDA dalam kondisi baik, penanganan banjir merupakan isu-isu penyediaan infrastruktur yang perlu direspons dalam jangka panjang ke depan. Cakupan rumah tangga yang menempati hunian layak yang

terpadu dengan akses air minum, sanitasi dan penanganan persampahan juga masih cukup rendah. Selain itu, kondisi kawasan perkotaan di Provinsi Sumatera Utara menghadapi perkotaan arah perkembangan yang tidak terstruktur (*urban sprawl*). Kelayakan dan keandalan perumahan yang dibangun secara swadaya juga perlu menjadi perhatian mengingat tingginya risiko bencana di Provinsi Sumatera Utara.

Layanan ketenagalistrikan Provinsi Sumatera Utara masih kekurangan pasokan daya atau beberapa sistem, atau cadangan di pembangkit eksisting yang tidak efisien serta kekurangan pasokan daya untuk daerah perbatasan serta pulau terluar. Penyediaan tenaga listrik di Wilayah Sumatra masih belum menjangkau seluruh penduduk secara berkualitas. Fleksibilitas operasi masih belum optimum terutama saat kondisi di luar waktu beban puncak sebagai akibat dari minimum operasi PLTG. Infrastruktur ketenagalistrikan terdiri dari Sistem Interkoneksi Sumatra dan sistem-sistem yang terisolasi. Sistem transmisi ekstra tinggi belum tersambung untuk mengevakuasi daya energi yang tersebar di seluruh wilayah. Konsumen tenaga listrik masih didominasi oleh rumah tangga.

Jangkauan jaringan seluler di Provinsi Sumatera Utara belum diimbangi dengan pemanfaatannya untuk mendukung kegiatan produktif (masih terbatas untuk penggunaan telekomunikasi). Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan komunikasi di Provinsi Sumatera Utara sudah cukup merata dan hampir menjangkau seluruh area wilayah pemukiman dan pusat-pusat pertumbuhan.

Provinsi Sumatera Utara juga memiliki tantangan dalam penyediaan pelayanan dasar, yaitu belum terpenuhi dan meratanya penyediaan sarana dan prasarana dasar di seluruh daerah, khususnya di daerah afirmasi 3T. Permasalahan yang dihadapi di antaranya penyediaan air bersih, irigasi, banjir, dan abrasi. Jumlah kejadian bencana banjir masih tinggi terutama di Metropolitan Medan, pulau-pulau kecil di Provinsi Sumatera Utara juga terdampak risiko abrasi akibat perubahan iklim tersebut. Permasalahan dari pelayanan dasar mencakup tiga aspek, yakni aspek perumahan dan permukiman, aspek kesehatan dan aspek ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Aspek perumahan dan permukiman mencakup akses terhadap layanan sumber air minum, sanitasi dan pengolahan air limbah dan lumpur tinja. Aspek kesehatan mencakup Jaminan Kesehatan Sosial, ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas

dan distribusi tenaga kesehatan. Sedangkan aspek kasus kejahatan, rasa aman dan penyalahgunaan narkoba.

Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri belum memenuhi target, hal ini mempengaruhi akses terhadap layanan air minum dan sanitasi. Pada sisi lain ketersediaan air di Provinsi Sumatera Utara secara total masih surplus, termasuk pada daerah kabupaten/kota. Namun pada lokasi-lokasi tertentu terjadi defisit air seperti pada sebagian wilayah Kota Tanjungbalai, Kota Medan, Tebing Tinggi, Pematangsiantar, Kabupaten Asahan, Batubara, Serdang Bedagai, dst. Kondisi defisit dipengaruhi oleh ketersediaan dan tingkat konsumsi. Ketersediaan air cenderung menurun dari waktu ke waktu, selain karena dampak perubahan iklim juga karena makin terdegradasinya daerah hulu baik karena deforestasi, maupun karena alih fungsi hutan dan lahan. Luasan hutan pada wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) dimana kota-kota utama di Sumatera Utara berada, pada umumnya sudah berada di bawah 30%. Hal ini akan menambah ancaman keberlanjutan ketersediaan air pada masa yang akan datang. Kekurangtersediaan air akan menyebabkan ketidaktercapaian target sanitasi dan akan mempengaruhi kesehatan masyarakat.

Peningkatan kualitas lingkungan, pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dipengaruhi oleh sampah yang belum tertangani, juga disebabkan oleh sanitasi, air peningkatan kualitas lingkungan juga belum memadai, yang tercermin dari belum tercapainya jumlah perusahaan yang menerapkan manajemen lingkungan yang baik (sertifikasi SNI ISO 14001) serta masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai. Penurunan kualitas air permukaan cenderung meningkat seiring waktu, mengingat pertambahan jumlah penduduk yang terus meningkat. Timbulan sampah akan meningkat, juga limbah cair dan lumpur tinja serta limbah B3. Peningkatan beban lingkungan ini harus dibarengi dengan peningkatan pengelolaan untuk meningkatkan kualitas lingkungan.

d. Pembangunan antar daerah serta desa-kota

Keterkaitan antar daerah serta desa-kota di Provinsi Sumatera Utara belum mencerminkan keterkaitan tidak bisa mengabaikan rantai pasok, sehingga wilayah kota dan kawasan-kawasan perlu memiliki rantai nilai dengan wilayah-wilayah lain untuk mendorong perekonomian yang merata. Pembangunan wilayah Mebidangro (Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten

Karo) masih menghadapi permukiman kumuh seperti air bersih dan sanitasi, penurunan kualitas lingkungan hidup, dan infrastruktur transportasi massal yang belum mendukung mobilitas penduduk. Permasalahan ini muncul sebagai akibat dari urbanisasi yang tidak terkendali dan pertumbuhan ekonomi yang berpusat di inti bisnis dan perdagangan. wilayah pertumbuhan ekonomi yang pesat menjadi *pull factor* manusia bermigrasi ke wilayah dengan ekonomi yang relatif baik.

e. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Berkelanjutan

Dalam upaya pengelolaan SDA berkelanjutan menjadi perhatian terhadap pengelolaan investasi berbasis lahan yang belum seluruhnya mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik terutama kelestarian lingkungan dan menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat dalam jangka panjang. Pengoptimalan pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup berkelanjutan juga berkaitan dengan adaptasi perubahan iklim; pengawasan terhadap deforestasi dan kebakaran hutan dan lahan dan harmonisasi antara manusia dengan satwa liar; akses dan partisipasi masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok marginal; dukungan dalam mewujudkan kelestarian dan kesejahteraan yang rendah; belum maksimalnya akses seluruh masyarakat terhadap energi, dan peningkatan pemanfaatan sumber energi terbarukan. Pengentasan kemiskinan dan penguatan ketahanan pangan yang berkaitan erat dengan keberadaan pangan. Defisit air pada beberapa wilayah dapat menyebabkan gangguan terhadap ketahanan pangan. Secara umum ketersediaan air di Sumatera Utara melebihi kebutuhan (surplus) namun ketersebarannya tidak selalu bersesuaian dengan ketersebaran kebutuhan, hal inilah yang menyebabkan defisit air pada beberapa wilayah, dan status defisit ini akan mempengaruhi ketahanan pangan.

Dari aspek ketersediaan pangan, Sumatera Utara juga masih surplus, hal ini turut ditopang oleh keanekaragaman hayati yang tinggi di Sumatera Utara. Kondisi kekurangan pangan di beberapa wilayah di Sumatera Utara dapat dipengaruhi oleh jasa lingkungan penyediaan pangan yang memiliki kategori rendah dan sangat rendah yang terdapat pada wilayah barat Sumatera Utara. Kerentanan wilayah yang tinggi terhadap dampak perubahan iklim juga dapat mempengaruhi Perubahan iklim dan pencegahan serta penanggulangan bencana juga merupakan permasalahan di Provinsi Sumatera Utara. Aspek perubahan

iklim menyangkut jumlah emisi gas rumah kaca yang masih tinggi, intensitas energi primer yang masih tinggi serta upaya penyerapan emisi gas rumah kaca terutama pada wilayah perkotaan yang masih minim yang terlihat dari belum terpenuhinya penerapan *green waste* dan ruang terbuka hijau.

Perubahan iklim ini akan menimbulkan dampak yang semakin parah mengingat 73% wilayah Sumatera Utara cukup rentan terhadap perubahan iklim terlebih pada 2% wilayah yang sangat rentan perubahan iklim. Pada sisi lain jasa lingkungan pengatur iklim juga dominan bernilai rendah hingga sangat rendah pada wilayah Pesisir Timur Sumatera.

Aspek pencegahan serta penanggulangan bencana mencakup jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana, jumlah kerugian ekonomi langsung karena bencana, jumlah daerah bencana alam yang diperlengkapi secara khusus, dan penurunan indeks risiko bencana yang belum mencapai target. Aspek-aspek ini belum mencapai target juga dipengaruhi oleh wilayah Sumatera Utara yang memiliki potensi bencana tinggi pada beberapa wilayah seperti potensi banjir tinggi pada pantai utara Kabupaten Langkat hingga Kabupaten Labuhanbatu Selatan, potensi kekeringan kelas tinggi pada beberapa kabupaten. Keberadaan potensi bencana yang tinggi ini belum dibarengi dengan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi bencana. Pada sisi lain jasa lingkungan pencegahan dan perlindungan dari bencana alam juga sangat rendah terutama pada sisi timur Sumatera Utara dan kepulauan Nias. Mengingat dominan bencana alam di Sumatera Utara adalah bencana hidrometeorologi, bencana yang disebabkan oleh dampak perubahan iklim serta ketidakmampuan alam menampung dampak perubahan iklim, maka upaya penurunan faktor penyebab perubahan iklim mutlak dilakukan disertai dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan bencana alam.

f. Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Infrastruktur

Infrastruktur yang berkaitan dengan konektivitas dan sistem logistik berpotensi menekan aktivitas ekonomi berupa mahalnya biaya logistik dari wilayah penghasil komoditas menuju lokasi pengolahan dan pemasaran. Hal tersebut perlu diupayakan dengan upaya meningkatkan kelancaran arus barang, jasa, dan informasi, menurunkan biaya logistik, mengurangi ekonomi biaya tinggi, mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah, dan mewujudkan sinergi

antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Aksesibilitas daerah juga dapat ditinjau dari ketersediaan fasilitas perhubungan yang meliputi darat, laut dan udara. Perhubungan darat di dibagi atas beberapa bagian jaringan transportasi seperti jaringan angkutan jalan raya, jaringan jalur kereta api, jaringan angkutan sungai dan danau, dan jaringan angkutan penyeberangan.

g. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, Akuntabel, Transparan dan Kolaboratif

Provinsi Sumatera Utara masih menghadapi dua persoalan utama yaitu memperbaiki tata kelola pemerintahan yang fokus pada kapabilitas dan integritas dan memperbaiki kualitas pelayanan publik yang belum optimal kepada masyarakat. Kapabilitas tata pemerintahan berfokus pada penguatan transisi reformasi birokrasi menuju reformasi Birokrasi tematik, memperbaiki proses bisnis adaptif dengan dukungan teknologi informasi, meningkatkan profesionalisme ASN melalui meritokrasi dan penguatan *core value*.

Isu-isu berkaitan dengan tata kelola pemerintahan lainnya ialah pemanfaatan kehadiran teknologi informasi dalam area deregulasi kebijakan, penataan kelembagaan, penguatan profesionalisme ASN, penguatan kualitas pengawasan, penguatan akuntabilitas dan pelayanan publik. Ketersediaan dan keterjangkauan teknologi pada masyarakat sipil diharapkan mampu mentransformasi posisi masyarakat dari objek menjadi subjek pembangunan.

2.6.2.4 Isu Strategis Nias Selatan

Berdasarkan permasalahan pembangunan yang telah diuraikan sebelumnya dan isu strategis global, nasional dan regional serta mengacu pada RPJMN 2025–2029 sebagai arah kebijakan pembangunan nasional, laporan resmi dari lembaga pemerintah maupun lembaga luar negeri yang memberikan gambaran mengenai dinamika pembangunan global dan nasional, Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Nias Selatan 2025–2029 yang menekankan aspek keberlanjutan lingkungan, serta hasil penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai bagian dari proses perencanaan partisipatif, maka isu strategis daerah Kabupaten Nias Selatan pada RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Infrastruktur Dasar Daerah untuk Mendukung Mobilitas dan Pembangunan Wilayah.

Isu strategis pembangunan infrastruktur dasar di Kabupaten Nias Selatan berangkat dari adanya kesenjangan nyata antara kondisi eksisting dengan kebutuhan masyarakat. Pertama, dalam aspek jalan dan jembatan, masih terdapat gap yang cukup besar di mana sebagian wilayah, khususnya daerah pedesaan dan pulau-pulau kecil, belum memiliki akses transportasi memadai. Kondisi jalan yang rusak, sempit, atau belum beraspal menghambat mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta akses layanan dasar. Faktor pengaruhnya terletak pada kondisi geografis yang sulit, keterbatasan kapasitas fiskal daerah, dan belum optimalnya sinergi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini berkaitan erat dengan arah RPJPD Kabupaten Nias Selatan 2025–2045 yang menekankan konektivitas antarwilayah, sejalan dengan RPJMN yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal dan kepulauan, serta mendukung Asta Cita dalam memperkuat pelayanan dasar dan pemerataan pembangunan.

Kedua, dalam aspek akses air bersih dan sanitasi, terdapat gap yang signifikan antara kebutuhan masyarakat terhadap layanan air bersih yang aman dan sistem sanitasi yang layak dengan realisasi penyediaannya. Banyak desa masih mengandalkan sumber air tradisional yang tidak selalu memenuhi standar kesehatan, sementara fasilitas sanitasi belum merata. Faktor pengaruh utama mencakup keterbatasan investasi pemerintah, minimnya teknologi pengolahan air, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih. Dalam konteks kebijakan, hal ini menjadi perhatian RPJPD Nias Selatan 2025–2045 yang menargetkan peningkatan kualitas hidup masyarakat, sejalan dengan agenda RPJMN mengenai penguatan layanan dasar, serta mendukung Asta Cita yang menekankan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat secara adil dan merata.

Ketiga, pada aspek penyediaan listrik dan telekomunikasi, gap yang muncul adalah masih banyaknya wilayah terpencil yang belum teraliri listrik secara memadai dan lemahnya jaringan telekomunikasi, sehingga membatasi akses masyarakat terhadap informasi, layanan publik, dan peluang ekonomi digital. Faktor yang memengaruhi kondisi ini adalah keterbatasan infrastruktur jaringan di daerah kepulauan, tingginya biaya investasi, serta rendahnya minat sektor swasta karena dianggap tidak ekonomis. Isu ini menjadi sangat relevan dengan RPJPD 2025–2045 yang menempatkan digitalisasi dan energi berkelanjutan sebagai motor pertumbuhan ekonomi, sekaligus selaras dengan RPJMN yang

mendorong transformasi digital nasional, serta Asta Cita yang menekankan pemerataan akses energi dan teknologi bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keempat, terkait penguatan kebijakan dan pendanaan, gap terjadi pada ketidakseimbangan antara kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar yang sangat besar dengan kapasitas fiskal daerah yang terbatas. Ketergantungan pada transfer pusat masih tinggi, sementara alternatif pendanaan seperti skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) belum optimal dimanfaatkan. Faktor pengaruhnya meliputi lemahnya inovasi pembiayaan, rendahnya kualitas perencanaan berbasis data, serta keterbatasan kapasitas kelembagaan daerah. Dalam kerangka kebijakan, RPJPD Nias Selatan 2025–2045 menegaskan pentingnya diversifikasi sumber pendanaan pembangunan, yang selaras dengan RPJMN dalam mengedepankan pembiayaan kreatif dan kolaborasi multipihak, serta mendukung Asta Cita yang berkomitmen memperkuat tata kelola pembangunan secara transparan, efisien, dan berkeadilan.

Dengan demikian, isu strategis peningkatan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar di Kabupaten Nias Selatan mencerminkan adanya gap multidimensi yang dipengaruhi oleh faktor geografis, fiskal, kelembagaan, dan teknologi. Penyelesaian isu ini membutuhkan kebijakan terintegrasi yang tidak hanya mengandalkan pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat tata kelola, pendanaan inovatif, serta pemanfaatan teknologi digital.

b. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Untuk Menciptakan SDM Unggul dan Siap Kerja.

Isu strategis peningkatan akses dan kualitas pendidikan di Kabupaten Nias Selatan muncul dari adanya kesenjangan yang cukup lebar antara kondisi ideal pendidikan yang diharapkan dengan kondisi faktual yang masih dihadapi masyarakat. Pertama, pada aspek sarana dan prasarana pendidikan, terdapat gap besar di mana banyak sekolah masih kekurangan ruang kelas layak, laboratorium, perpustakaan, serta fasilitas berbasis teknologi. Kondisi ini semakin parah di daerah pedesaan dan terpencil, di mana akses transportasi sulit sehingga distribusi sarana dan pembangunan infrastruktur pendidikan menjadi terhambat. Faktor pengaruh utamanya mencakup keterbatasan anggaran daerah, kondisi geografis yang menantang, serta kurangnya investasi pendidikan dari pihak swasta. Isu ini terkait erat dengan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Nias Selatan 2025–2045 yang menekankan pemerataan akses layanan dasar, sejalan dengan

RPJMN yang memprioritaskan peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan, serta mendukung Asta Cita dalam misi meningkatkan SDM unggul, produktif, dan berdaya saing.

Kedua, dari sisi tenaga pendidik, gap yang muncul adalah masih kurangnya jumlah guru, terutama di wilayah terpencil, serta rendahnya kompetensi sebagian guru dalam menguasai kurikulum baru dan teknologi pendidikan. Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas pembelajaran dan keterbatasan dalam memberikan pengalaman belajar yang relevan bagi siswa. Faktor pengaruhnya adalah distribusi guru yang tidak merata, keterbatasan kesempatan pelatihan, serta masih lemahnya sistem insentif bagi guru yang bertugas di daerah terpencil. RPJPD Kabupaten Nias Selatan 2025–2045 menempatkan penguatan kapasitas pendidik sebagai pilar utama pembangunan SDM, sejalan dengan RPJMN yang mendorong peningkatan kompetensi guru, serta mendukung Asta Cita yang menekankan transformasi pendidikan berbasis kualitas dan pemerataan.

Ketiga, dalam hal partisipasi pendidikan, terdapat gap signifikan antara target universal access pendidikan dasar-menengah dengan realitas banyaknya anak putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan. Faktor penyebab utamanya adalah kondisi ekonomi keluarga yang lemah, hambatan budaya, serta keterbatasan akses transportasi di wilayah terpencil. Gap ini semakin memperlebar kesenjangan pendidikan antara perkotaan dan pedesaan. Arah kebijakan RPJPD Kabupaten Nias Selatan 2025–2045 yang menargetkan peningkatan angka partisipasi sekolah sangat relevan, sejalan dengan RPJMN yang menekankan pentingnya pengurangan angka putus sekolah, serta mendukung Asta Cita yang menegaskan komitmen negara dalam menjamin pendidikan untuk semua.

Keempat, terkait keterkaitan pendidikan dengan dunia kerja, gap terlihat pada rendahnya relevansi antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Banyak lulusan sekolah menengah maupun perguruan tinggi di Nias Selatan yang masih belum memiliki keterampilan teknis maupun soft skills sesuai kebutuhan industri. Faktor pengaruh utamanya adalah minimnya pengembangan pendidikan vokasi, lemahnya kerja sama sekolah dengan industri, serta keterbatasan implementasi program link and match. Dalam kerangka kebijakan, RPJPD Kabupaten Nias Selatan 2025–2045 menekankan pentingnya pendidikan vokasi dan peningkatan daya saing tenaga kerja, sejalan dengan RPJMN yang

mendorong penguatan vokasi dan digitalisasi pembelajaran, serta mendukung Asta Cita dalam agenda penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Dengan demikian, isu strategis pendidikan di Kabupaten Nias Selatan tidak hanya menyangkut persoalan fisik berupa keterbatasan sarana-prasarana, tetapi juga menyentuh aspek kualitas guru, partisipasi masyarakat, serta keterhubungan pendidikan dengan dunia kerja. Penyelesaian gap ini membutuhkan pendekatan komprehensif melalui peningkatan infrastruktur, kompetensi guru, bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu, penguatan pendidikan vokasi, serta digitalisasi pembelajaran. Langkah-langkah ini akan memperkuat arah kebijakan RPJPD 2025–2045 dalam membangun SDM unggul, mendukung target RPJMN dalam mencetak generasi emas 2045, serta sejalan dengan Asta Cita yang menekankan pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan berkelanjutan.

c. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat Melalui Perbaikan Gizi, Layanan Kesehatan, dan Jaminan Kesehatan Universal.

Isu strategis peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Nias Selatan ditandai oleh adanya gap yang cukup lebar antara kondisi kesehatan ideal yang diharapkan dengan realitas di lapangan. Pertama, pada aspek status gizi masyarakat, terdapat kesenjangan signifikan di mana angka stunting dan gizi buruk masih relatif tinggi akibat keterbatasan akses terhadap makanan bergizi dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat. Kondisi ideal yang ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Nias Selatan 2025–2045 adalah menurunnya prevalensi stunting hingga mendekati target nasional, sejalan dengan arah RPJMN yang menjadikan penurunan stunting sebagai prioritas nasional, serta mendukung Asta Cita yang menekankan pembangunan manusia sehat, cerdas, dan produktif. Faktor pengaruh yang memperbesar gap ini mencakup kemiskinan rumah tangga, keterbatasan program edukasi gizi, serta rendahnya efektivitas intervensi kesehatan ibu dan anak.

Kedua, dalam hal akses dan kualitas layanan kesehatan, gap terjadi karena fasilitas kesehatan di sejumlah wilayah, terutama daerah terpencil, belum memadai. Kondisi eksisting menunjukkan masih banyak desa yang sulit mengakses puskesmas atau rumah sakit akibat keterbatasan infrastruktur transportasi, kurangnya tenaga medis, serta peralatan kesehatan yang belum

modern. Padahal, kondisi ideal yang diharapkan adalah tersedianya layanan kesehatan yang merata, modern, dan responsif di seluruh wilayah. Faktor pengaruhnya adalah distribusi tenaga kesehatan yang tidak seimbang, keterbatasan anggaran daerah untuk pembangunan fasilitas kesehatan, serta kondisi geografis Nias Selatan yang menyulitkan akses. Dalam kerangka kebijakan, RPJPD 2025–2045 menekankan pemerataan layanan dasar kesehatan, RPJMN mendorong transformasi layanan primer dan digitalisasi kesehatan, sementara Asta Cita menegaskan pentingnya sistem kesehatan nasional yang kuat dan inklusif.

Ketiga, pada aspek jaminan kesehatan universal, gap terlihat pada masih adanya masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan, yang belum sepenuhnya mendapatkan akses layanan kesehatan melalui skema jaminan seperti BPJS Kesehatan. Kondisi ideal yang ingin dicapai adalah jaminan kesehatan semesta, di mana seluruh penduduk terlindungi tanpa terkendala biaya. Faktor pengaruh utama dari gap ini adalah keterbatasan cakupan kepesertaan BPJS, kendala administrasi dalam pendaftaran, serta masih adanya hambatan kultural terkait pemanfaatan layanan kesehatan. Kebijakan RPJPD Kabupaten Nias Selatan 2025–2045 mengarahkan agar cakupan jaminan kesehatan diperluas, selaras dengan RPJMN yang menargetkan *Universal Health Coverage* (UHC), serta mendukung Asta Cita yang berfokus pada pemerataan akses layanan kesehatan berkualitas bagi seluruh masyarakat.

Keempat, pada dimensi perilaku hidup sehat, gap terlihat dari rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat, termasuk dalam aspek sanitasi, kebiasaan konsumsi makanan bergizi, serta pencegahan penyakit. Kondisi ideal adalah masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi dalam menjaga kesehatan diri dan lingkungan, sehingga angka penyakit menular dan tidak menular dapat ditekan. Faktor pengaruhnya adalah rendahnya edukasi kesehatan berbasis komunitas, terbatasnya program promosi kesehatan yang berkesinambungan, serta kurangnya integrasi antara sektor kesehatan dengan sektor lain seperti pendidikan, sosial, dan lingkungan hidup. Hal ini sesuai dengan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Nias Selatan 2025–2045 yang menekankan pembangunan manusia sehat sejak dini, sejalan dengan RPJMN yang mengedepankan paradigma preventif dan promotif dalam layanan kesehatan, serta

mendukung Asta Cita yang menegaskan kesehatan sebagai fondasi utama peningkatan produktivitas bangsa.

Dengan demikian, isu strategis kesehatan di Kabupaten Nias Selatan mencerminkan kesenjangan multidimensional: mulai dari status gizi, akses layanan, jaminan kesehatan, hingga perilaku masyarakat. Untuk menutup gap ini, diperlukan strategi komprehensif berupa peningkatan edukasi gizi, penguatan program kesehatan ibu dan anak, pemberian bantuan makanan bergizi, pembangunan fasilitas kesehatan yang merata, penambahan tenaga medis, modernisasi alat kesehatan, perluasan cakupan jaminan kesehatan, serta promosi pola hidup sehat secara massif. Seluruh langkah tersebut akan memperkuat arah RPJPD 2025–2045 dalam membangun masyarakat sehat dan sejahtera, mendukung target RPJMN menuju Indonesia Emas 2045, serta selaras dengan Asta Cita yang menjadikan kesehatan rakyat sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional.

d. Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal yang Inklusif, Inovatif, dan Berkelanjutan.

Isu strategis pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal di Kabupaten Nias Selatan merefleksikan adanya kesenjangan yang cukup nyata antara kondisi aktual dengan kondisi ideal yang diharapkan. Kabupaten Nias Selatan memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri kreatif, namun potensi tersebut belum sepenuhnya memberikan nilai tambah yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Gap utama terlihat pada rendahnya produktivitas dan daya saing produk lokal, yang disebabkan oleh keterbatasan teknologi, minimnya akses permodalan bagi pelaku usaha kecil, serta belum optimalnya infrastruktur pendukung seperti jalan, listrik, dan jaringan komunikasi. Kondisi ideal yang diinginkan melalui RPJPD 2025–2045 adalah terwujudnya ekonomi daerah yang tangguh, inovatif, dan inklusif, sejalan dengan arah RPJMN yang menekankan transformasi ekonomi berbasis hilirisasi dan digitalisasi, serta mendukung Asta Cita yang menempatkan peningkatan produktivitas dan daya saing sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Faktor pengaruh dominan dalam gap ini meliputi lemahnya kapasitas teknologi lokal, terbatasnya sistem pembiayaan inklusif, serta lambatnya pembangunan infrastruktur strategis.

Aspek lain yang menimbulkan kesenjangan adalah keterbatasan inovasi dan kewirausahaan di tingkat lokal. Banyak sektor produktif, khususnya UMKM, belum mampu beradaptasi dengan tuntutan pasar global karena kurangnya keterampilan kewirausahaan, minimnya pemanfaatan teknologi digital, serta rendahnya penetrasi pemasaran online. Kondisi ideal adalah terbentuknya ekosistem kewirausahaan inovatif yang didukung oleh akses teknologi, pelatihan, dan kolaborasi dengan sektor swasta maupun akademisi. Dalam konteks kebijakan, RPJPD Kabupaten Nias Selatan 2025–2045 menekankan penguatan kapasitas SDM dan ekosistem inovasi, RPJMN menekankan ekonomi digital sebagai akselerator pertumbuhan, sementara Asta Cita menekankan transformasi sektor produktif agar lebih bernilai tambah dan berbasis inovasi. Faktor pengaruh dalam kesenjangan ini adalah lemahnya budaya inovasi, keterbatasan SDM dengan keterampilan digital, serta rendahnya dukungan ekosistem riset dan pengembangan.

Selanjutnya, isu strategis terkait inklusivitas ekonomi juga memperlihatkan adanya gap, di mana partisipasi masyarakat, khususnya kelompok rentan, perempuan, dan pemuda, masih rendah dalam kegiatan ekonomi produktif. Kondisi aktual menunjukkan bahwa manfaat pembangunan ekonomi belum dirasakan secara merata, sementara kondisi ideal adalah ekonomi yang partisipatif di mana seluruh lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap peluang usaha, permodalan, dan pasar. Kebijakan RPJPD 2025–2045 menggariskan inklusivitas ekonomi sebagai basis pembangunan daerah, RPJMN mendorong pemerataan pembangunan untuk menekan kesenjangan wilayah, sementara Asta Cita menegaskan pentingnya keberpihakan pada UMKM dan kelompok rentan dalam pembangunan ekonomi. Faktor pengaruh yang memperlebar gap ini adalah keterbatasan kebijakan afirmatif, lemahnya akses permodalan inklusif, serta dominasi sektor ekonomi informal yang tidak terintegrasi dengan sistem ekonomi modern.

Di sisi lain, prinsip keberlanjutan ekonomi juga menghadapi gap signifikan. Eksploitasi sumber daya alam, khususnya di sektor pertanian dan perikanan, belum sepenuhnya dikelola dengan memperhatikan daya dukung lingkungan. Kondisi aktual menunjukkan adanya risiko degradasi ekosistem akibat praktik yang tidak ramah lingkungan, sementara kondisi ideal adalah sistem produksi yang berkelanjutan, ramah lingkungan, serta memperhatikan keseimbangan

antara kebutuhan ekonomi dan kelestarian ekosistem. Hal ini sesuai dengan arah RPJPD Kabupaten Nias Selatan 2025–2045 yang menekankan pembangunan berwawasan lingkungan, RPJMN yang mengedepankan ekonomi hijau, serta Asta Cita yang menekankan transisi menuju pembangunan berkelanjutan. Faktor pengaruh yang memperlebar gap adalah lemahnya regulasi pengelolaan sumber daya, minimnya kesadaran masyarakat terhadap keberlanjutan, serta keterbatasan teknologi ramah lingkungan yang dapat diakses oleh pelaku usaha.

Dengan demikian, isu strategis pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal di Kabupaten Nias Selatan mencakup beberapa gap utama: rendahnya nilai tambah produk lokal, keterbatasan inovasi dan kewirausahaan, belum inklusifnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi, serta kurangnya prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya. Untuk menutup kesenjangan ini, diperlukan strategi terpadu berupa diversifikasi ekonomi berbasis potensi unggulan, penguatan kapasitas pelaku usaha melalui pelatihan dan pendampingan, perluasan akses pasar dengan memanfaatkan teknologi digital, pembangunan infrastruktur konektivitas, serta penerapan prinsip ekonomi hijau yang berkelanjutan. Langkah-langkah ini akan mendukung arah kebijakan RPJPD Kabupaten Nias Selatan 2025–2045, memperkuat implementasi RPJMN, serta mewujudkan visi Asta Cita dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, inovatif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

e. Reformasi Birokrasi dan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, serta Berbasis Digital.

Isu strategis reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Nias Selatan menunjukkan adanya kesenjangan (gap) yang cukup nyata antara kondisi aktual birokrasi dengan kondisi ideal yang diharapkan. Kondisi aktual masih ditandai dengan birokrasi yang kurang efisien, proses pelayanan publik yang lamban, serta rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas. Hal ini berbeda jauh dengan kondisi ideal yang ditetapkan dalam RPJPD 2025–2045, yakni terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, dan akuntabel. RPJMN juga menekankan pentingnya birokrasi yang lincah dan efektif untuk mendukung transformasi pembangunan, sementara Asta Cita menempatkan reformasi birokrasi bersih dan digital sebagai salah satu agenda utama menuju Indonesia Emas 2045. Faktor pengaruh yang memperlebar

gap ini antara lain keterbatasan kapasitas ASN, budaya birokrasi yang masih konvensional, serta lemahnya sistem pengawasan dan penegakan akuntabilitas.

Kesenjangan lain terlihat pada pemanfaatan digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan. Saat ini, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik masih terbatas, baik karena infrastruktur teknologi yang belum merata, literasi digital ASN yang rendah, maupun resistensi terhadap perubahan menuju sistem digital. Kondisi ideal yang diharapkan adalah terbangunnya sistem pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*) yang mampu menghadirkan layanan publik cepat, efisien, transparan, dan terintegrasi. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Nias Selatan 2025–2045 yang menekankan pembangunan tata kelola berbasis teknologi, serta RPJMN yang menargetkan digital government sebagai pilar reformasi birokrasi nasional. Sementara itu, Asta Cita menegaskan pentingnya penguatan infrastruktur digital dan literasi teknologi untuk memastikan transformasi digital berjalan inklusif. Faktor pengaruh yang memperlebar kesenjangan ini mencakup keterbatasan sarana prasarana teknologi, kurangnya investasi dalam infrastruktur digital, serta budaya kerja ASN yang belum sepenuhnya adaptif terhadap inovasi.

Selain itu, terdapat gap pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Saat ini, praktik birokrasi di Kabupaten Nias Selatan masih menghadapi persoalan rendahnya keterbukaan informasi, potensi penyalahgunaan wewenang, serta lemahnya mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik. Kondisi ideal yang diharapkan adalah terwujudnya birokrasi bersih yang menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan meritokrasi dalam manajemen ASN, serta adanya partisipasi publik yang aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan. Hal ini selaras dengan arah RPJPD Kabupaten Nias Selatan 2025–2045 yang menekankan tata kelola pemerintahan yang bersih dan demokratis, RPJMN yang mendorong penguatan good governance, serta Asta Cita yang menekankan penguatan supremasi hukum dan pemberantasan korupsi. Faktor pengaruh utama dalam kesenjangan ini adalah lemahnya sistem kontrol internal, kurangnya penerapan prinsip meritokrasi dalam manajemen ASN, serta belum optimalnya keterbukaan informasi publik.

Dengan demikian, isu strategis reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Nias Selatan dapat dipetakan ke dalam

beberapa kesenjangan utama: pertama, kesenjangan antara birokrasi yang lamban dengan kebutuhan birokrasi yang efektif dan adaptif; kedua, keterbatasan digitalisasi dengan kebutuhan tata kelola berbasis teknologi modern; dan ketiga, lemahnya transparansi dan akuntabilitas dengan idealisme pemerintahan yang bersih dan partisipatif. Untuk menutup kesenjangan ini, strategi yang diperlukan mencakup peningkatan kapasitas dan profesionalisme ASN, percepatan transformasi digital melalui penguatan infrastruktur dan literasi teknologi, penerapan prinsip meritokrasi dalam birokrasi, serta penguatan mekanisme transparansi dan partisipasi publik. Langkah-langkah ini tidak hanya akan mendukung pencapaian RPJPD Kabupaten Nias Selatan 2025–2045, tetapi juga memperkuat implementasi RPJMN dan mewujudkan visi Asta Cita dalam membangun birokrasi yang bersih, digital, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas.

f. Penguatan Ketahanan Sosial Budaya dan Perlindungan Lingkungan Hidup untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Isu strategis penguatan ketahanan sosial budaya dan perlindungan lingkungan hidup di Kabupaten Nias Selatan memperlihatkan adanya kesenjangan (gap) antara kondisi aktual dengan kondisi ideal yang diharapkan. Dari sisi sosial budaya, kondisi aktual menunjukkan adanya penurunan pemahaman dan keterlibatan generasi muda terhadap tradisi dan adat istiadat lokal. Modernisasi dan arus globalisasi mempercepat pergeseran nilai budaya, sehingga identitas masyarakat perlahan terkikis. Kondisi ini sangat berbeda dengan kondisi ideal yang diamanatkan dalam RPJPD Kabupaten Nias Selatan 2025–2045, yakni terjaganya identitas budaya daerah sebagai fondasi pembangunan yang berkarakter. Dalam RPJMN, aspek pembangunan manusia yang berakar pada nilai budaya bangsa juga menjadi prioritas, sementara Asta Cita menekankan penguatan budaya nasional yang berdaya saing di tengah dinamika global. Faktor-faktor yang memengaruhi kesenjangan ini mencakup lemahnya proses pewarisan budaya, rendahnya integrasi pendidikan berbasis kearifan lokal, serta minimnya ruang ekspresi budaya di tengah derasnya budaya populer global.

Kesenjangan juga terlihat dalam aspek ketahanan sosial. Saat ini, masih terdapat masalah kemiskinan, pengangguran, serta kesenjangan sosial yang melemahkan daya tahan masyarakat. Kondisi aktual ini tidak sejalan dengan

kondisi ideal dalam RPJPD, yaitu terciptanya masyarakat yang sejahtera, inklusif, dan memiliki kohesi sosial yang kuat. Dalam RPJMN, penguatan ketahanan sosial menjadi bagian penting dalam strategi penanggulangan kemiskinan dan pembangunan inklusif, sedangkan Asta Cita menekankan pentingnya kesejahteraan sosial yang merata tanpa diskriminasi. Faktor pengaruh yang memperlebar gap ini meliputi keterbatasan kesempatan kerja yang layak, rendahnya pemberdayaan kelompok rentan, serta belum optimalnya sinergi antarprogram pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.

Di sisi lain, perlindungan lingkungan hidup menghadapi kesenjangan yang tidak kalah serius. Kondisi aktual ditandai dengan tingginya degradasi hutan, pencemaran lingkungan, eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali, serta meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan iklim. Kondisi ini jauh dari kondisi ideal yang diamanatkan dalam RPJPD 2025–2045, yaitu terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian ekosistem. Hal ini juga sejalan dengan arah kebijakan RPJMN yang menempatkan penguatan lingkungan hidup dan ketahanan iklim sebagai prioritas nasional, serta Asta Cita yang menekankan pentingnya pembangunan berwawasan lingkungan dan transisi menuju ekonomi hijau. Faktor pengaruh dalam kesenjangan ini antara lain lemahnya pengawasan terhadap aktivitas eksploitasi, kurangnya kesadaran ekologis masyarakat, serta keterbatasan infrastruktur pendukung pengelolaan lingkungan.

Dengan demikian, isu strategis ini dapat dipetakan dalam tiga gap utama: pertama, gap antara kondisi aktual penurunan nilai budaya dengan kondisi ideal pelestarian budaya sebagai jati diri daerah; kedua, gap antara kondisi sosial yang masih diliputi kemiskinan dan kesenjangan dengan kondisi ideal masyarakat yang inklusif dan sejahtera; serta ketiga, gap antara degradasi lingkungan dengan kondisi ideal pembangunan berkelanjutan. Untuk menutup kesenjangan tersebut, diperlukan strategi komprehensif, seperti memperkuat edukasi berbasis kearifan lokal di dunia pendidikan, memperluas program pemberdayaan sosial-ekonomi bagi masyarakat rentan, memperketat regulasi dan pengawasan aktivitas yang merusak lingkungan, serta mengembangkan ekonomi hijau yang mengintegrasikan potensi lokal dengan prinsip keberlanjutan. Dengan langkah-langkah tersebut, Kabupaten Nias Selatan tidak hanya akan menjaga ketahanan sosial budaya dan kelestarian lingkungan hidup, tetapi juga berkontribusi pada

pencapaian target pembangunan nasional yang tercermin dalam RPJMN dan visi besar Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.

g. Optimalisasi Sumber Daya Lokal untuk Mewujudkan Kemandirian Pangan.

Kabupaten Nias Selatan memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, khususnya di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Namun, kondisi aktual menunjukkan masih tingginya ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah, yang mengindikasikan adanya kesenjangan (gap) antara potensi yang tersedia dengan kondisi ideal kemandirian pangan yang ingin diwujudkan. Dalam perspektif RPJPD Kabupaten Nias Selatan 2025–2045, kemandirian pangan menjadi bagian penting dari pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal, sejalan dengan RPJMN yang menekankan penguatan ketahanan pangan nasional, serta Asta Cita yang mengarahkan pada terwujudnya kedaulatan pangan dan gizi masyarakat.

Gap pertama terlihat pada aspek produksi pangan. Kondisi aktual menunjukkan produksi pangan lokal belum optimal karena keterbatasan infrastruktur pertanian, minimnya inovasi teknologi, dan rendahnya kapasitas petani dalam mengelola lahan secara produktif. Hal ini berbeda dengan kondisi ideal yang menargetkan Kabupaten Nias Selatan mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan pangan dari hasil produksi lokal. Faktor-faktor yang memengaruhi kesenjangan ini mencakup lemahnya dukungan riset dan teknologi pertanian, terbatasnya akses terhadap sarana produksi seperti pupuk dan benih unggul, serta rendahnya keterhubungan rantai pasok (supply chain) antara produsen lokal dan pasar.

Gap kedua terletak pada aspek akses dan distribusi pangan. Saat ini, masih terdapat ketimpangan dalam distribusi dan akses pangan bergizi, terutama di wilayah pedesaan dan kepulauan terpencil. Hal ini berdampak pada tingginya kerentanan pangan masyarakat serta masih adanya masalah gizi buruk, termasuk stunting. Kondisi ini jauh dari kondisi ideal yang menekankan pemerataan akses pangan berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam RPJMN, penguatan akses pangan sehat dan bergizi menjadi strategi nasional untuk menekan prevalensi stunting, sementara dalam Asta Cita, hal ini berkaitan dengan misi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif. Faktor penyebab kesenjangan ini antara lain keterbatasan

jaringan infrastruktur transportasi dan logistik, kurangnya fasilitas penyimpanan hasil pangan, serta lemahnya integrasi program intervensi gizi di tingkat lokal.

Gap ketiga berada pada aspek kualitas konsumsi pangan masyarakat. Berdasarkan indikator seperti Skor Pola Pangan Harapan (PPH), konsumsi kalori, dan konsumsi protein per kapita sehari, masih terdapat ketidakseimbangan dalam pola konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Nias Selatan. Ketergantungan pada sumber pangan tertentu menyebabkan rendahnya keberagaman dan kualitas gizi, sehingga memengaruhi kesehatan dan produktivitas masyarakat. Kondisi ini bertolak belakang dengan kondisi ideal di mana masyarakat memiliki pola konsumsi yang beragam, bergizi seimbang, aman, dan sesuai standar kesehatan. Faktor-faktor yang memperburuk kesenjangan ini meliputi rendahnya literasi gizi, budaya konsumsi yang belum sejalan dengan prinsip pangan sehat, serta keterbatasan intervensi edukasi yang berkelanjutan di masyarakat.

Dengan demikian, isu strategis optimalisasi sumber daya lokal untuk mewujudkan kemandirian pangan di Kabupaten Nias Selatan dapat dipetakan dalam tiga gap utama: (1) gap produksi pangan lokal yang belum optimal; (2) gap akses dan distribusi pangan yang masih timpang; serta (3) gap kualitas konsumsi pangan yang belum seimbang. Untuk menutup kesenjangan ini, diperlukan langkah-langkah strategis, antara lain peningkatan produktivitas pangan berbasis riset dan teknologi, pembangunan infrastruktur distribusi dan logistik yang merata, pemberdayaan petani dan nelayan lokal melalui akses permodalan dan pasar, serta edukasi gizi masyarakat untuk mendorong pola konsumsi sehat. Strategi ini sejalan dengan RPJPD Kabupaten Nias Selatan 2025–2045 yang menekankan kemandirian ekonomi berbasis potensi daerah, mendukung RPJMN dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, serta konsisten dengan arah kebijakan Asta Cita yang mengusung kedaulatan pangan sebagai salah satu pilar pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

h. Pembebasan Kawasan yang Termasuk dalam Hutan Lindung untuk Mendukung Pembangunan Kabupaten Nias Selatan

Salah satu isu strategis utama dalam pembangunan Kabupaten Nias Selatan adalah dominasi kawasan hutan lindung yang mencakup sebagian besar wilayah daratan dan kepulauan. Kondisi ini menimbulkan gap struktural antara kebutuhan pembangunan daerah dengan keterbatasan ruang akibat status kawasan hutan yang ditetapkan secara nasional. Di satu sisi, masyarakat telah

lama mendiami dan memanfaatkan lahan tersebut jauh sebelum Indonesia merdeka, namun di sisi lain status kawasan hutan lindung membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam merancang tata ruang, memperluas permukiman, serta mengembangkan sektor pertanian, perkebunan, maupun infrastruktur. Hal ini berimplikasi pada tertahannya investasi, terhambatnya akses masyarakat terhadap legalitas kepemilikan tanah, serta melambatnya pengembangan ekonomi lokal yang bergantung pada pemanfaatan lahan produktif.

Gap pertama terletak pada aspek legalitas dan tata ruang wilayah. Kondisi aktual menunjukkan bahwa sejumlah besar permukiman masyarakat dan lahan pertanian berada dalam kawasan hutan lindung yang tidak dapat dilepaskan secara hukum, sehingga masyarakat kesulitan memperoleh sertifikat tanah. Padahal, kondisi ideal yang diharapkan adalah adanya kejelasan status lahan, revisi tata ruang yang adaptif, serta kepastian hukum yang memungkinkan pemanfaatan lahan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Faktor pengaruh utama dalam gap ini adalah regulasi nasional mengenai kehutanan, minimnya koordinasi lintas lembaga, serta keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan perubahan status kawasan hutan.

Gap kedua berada pada aspek pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Saat ini, keterbatasan lahan non-hutan menghambat pengembangan pertanian, perkebunan, dan pembangunan infrastruktur strategis yang sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini jauh dari kondisi ideal di mana lahan produktif dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, dan menarik investasi. Faktor-faktor yang memengaruhi kesenjangan ini mencakup tingginya ketergantungan masyarakat pada sektor berbasis lahan, keterbatasan investasi akibat kepastian hukum lahan yang lemah, serta resistensi dalam proses pengajuan perubahan status kawasan kepada pemerintah pusat.

Gap ketiga terlihat pada aspek keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang tinggal dan bertani di kawasan hutan lindung menghadapi kerentanan sosial-ekonomi akibat status lahan yang tidak jelas, sehingga mereka tidak dapat memanfaatkan aset tanah sebagai jaminan permodalan atau investasi. Kondisi aktual ini berbanding terbalik dengan kondisi ideal di mana masyarakat memiliki hak kepemilikan dan akses legal terhadap lahan, yang dapat digunakan sebagai modal sosial-ekonomi untuk meningkatkan

kesejahteraan. Faktor pengaruh di balik gap ini mencakup rendahnya akses masyarakat terhadap kebijakan redistribusi lahan, lemahnya pemberdayaan kelompok tani, serta kurangnya skema afirmatif dalam mendukung masyarakat yang terdampak kebijakan kawasan hutan lindung.

Untuk menutup berbagai kesenjangan tersebut, strategi yang dapat ditempuh antara lain adalah mempercepat revisi tata ruang daerah yang selaras dengan kepentingan masyarakat, mengajukan perubahan status kawasan hutan kepada pemerintah pusat, serta memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar kebijakan lebih berpihak kepada kebutuhan pembangunan daerah. Di sisi lain, upaya ini juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dengan memastikan bahwa pembebasan kawasan hutan lindung dilakukan secara selektif dan proporsional, sehingga keseimbangan ekosistem tetap terjaga.

Secara kebijakan, isu strategis ini memiliki keterkaitan erat dengan RPJPD Kabupaten Nias Selatan 2025–2045 yang menekankan penguatan tata ruang dan pemanfaatan potensi sumber daya daerah untuk mempercepat pembangunan. Pada level nasional, hal ini sejalan dengan RPJMN yang mengarahkan penyelesaian permasalahan tata ruang dan penguatan hak masyarakat atas tanah guna mendorong investasi serta pembangunan wilayah berbasis potensi lokal. Sementara dalam konteks Asta Cita, isu ini berkaitan dengan agenda mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan, sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat di wilayah tertinggal dan perbatasan. Dengan pembebasan sebagian kawasan hutan lindung yang membelenggu ruang pembangunan, Kabupaten Nias Selatan diharapkan dapat mengembangkan wilayahnya secara lebih leluasa, meningkatkan daya tarik investasi, memperkuat basis ekonomi rakyat, serta mendorong pertumbuhan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

RPJMD

KABUPATEN NIAS SELATAN
TAHUN 2025–2029

BAB III
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB III
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

3.1.1. Visi dan Misi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjabarkan visi, misi, serta program kerja Kepala Daerah, yaitu Bupati Nias Selatan, Sokhiatulo Laia, dan Wakil Bupati Nias Selatan, Ir. Yusuf Nache, ST., MM. Keduanya telah dilantik oleh Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn.) H. Prabowo Subianto, pada tanggal 20 Februari 2025, berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Serentak yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3–1719 Tahun 2025.

RPJMD ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta selaras dengan tujuan pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah menempatkan manusia sebagai pusat perhatian, baik sebagai objek maupun subjek pembangunan. Prinsip hak asasi manusia menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan yang berkeadilan, di mana pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dalam memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari pembangunan serta turut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaannya.

RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029 merupakan tahap pertama dari pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045, yang mengusung tema "Penguatan Fondasi Transformasi", sebagai langkah awal menuju pencapaian visi jangka panjang, yaitu "Nias Selatan Sejahtera, Berbudaya, Maju, dan Berkelanjutan". Visi RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang menjadi landasan dalam penyusunan prioritas pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.

3.1.1.1. Visi

Visi pembangunan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029 adalah:

"Mewujudkan Masyarakat Adil Makmur, Berdaya Saing, Inovatif, Berkelanjutan dan Lestari Berkeadaban"

Visi ini mencerminkan tekad pembangunan Kabupaten Nias Selatan dalam lima tahun ke depan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur dengan kesejahteraan merata, memperkuat daya saing daerah melalui penguatan sumber daya manusia dan sektor unggulan, serta mendorong pembangunan inovatif agar lebih maju dan adaptif. Selain itu, pembangunan yang berkelanjutan dan lestari menjadi landasan dalam menjaga keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Seluruh upaya ini dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai keadaban yang mencerminkan moralitas dan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap kata dalam visi ini memiliki makna yang mendalam, yaitu:

- **Adil**

  Menggambarkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Nias Selatan, tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, maupun geografis. Prinsip keadilan ini juga mencakup pelayanan publik yang inklusif dan berpihak pada kelompok rentan, sehingga setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.

- **Makmur**

  Merupakan harapan agar masyarakat Kabupaten Nias Selatan dapat mencapai kesejahteraan yang lebih baik, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun kualitas hidup. Kemakmuran ini dicapai melalui pengelolaan sumber daya alam yang optimal, peningkatan pendapatan masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

- **Berdaya saing**

  Menunjukkan upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, produktivitas ekonomi, dan infrastruktur guna mendorong Kabupaten Nias Selatan menjadi daerah yang kompetitif. Hal ini mencakup peningkatan kualitas tenaga kerja, pengembangan sektor unggulan, serta pemanfaatan teknologi dan digitalisasi dalam berbagai aspek pembangunan.

- **Inovatif**

  Menekankan pentingnya kreativitas dan inovasi dalam merancang kebijakan dan strategi pembangunan daerah. Kabupaten Nias Selatan harus mendorong ekosistem inovasi di berbagai sektor, termasuk ekonomi, tata kelola pemerintahan, pendidikan, dan pelayanan publik, sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.

- **Berkelanjutan**

  Mengandung makna bahwa pembangunan di Kabupaten Nias Selatan dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta kelestarian lingkungan hidup.

- **Lestari berkeadaban**

  Mengandung arti bahwa pembangunan Kabupaten Nias Selatan harus tetap menjaga identitas budaya dan kearifan lokal yang menjadi kekuatan utama masyarakat. Nilai-nilai adat, tradisi, dan norma sosial yang baik harus terus dipertahankan dalam setiap aspek pembangunan, sehingga kemajuan daerah tetap berpijak pada akar budaya dan moralitas yang luhur.

3.1.1.1.1. Keterkaitan Visi dan Misi dengan Nasional/Provinsi

Untuk memastikan arah pembangunan daerah sejalan dengan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan provinsi, visi dan misi RPJPD serta RPJMD Kabupaten Nias Selatan disusun secara sinkron dengan RPJPN dan RPJMN, serta dengan RPJPD dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara. Sinkronisasi ini dimaksudkan agar pembangunan di Kabupaten Nias Selatan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang, menengah, maupun tahunan secara terpadu dan berkesinambungan. Tabel berikut menyajikan keterkaitan visi RPJPD dan RPJMD Kabupaten Nias Selatan dengan visi pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 3.1
Keterkaitan visi RPJPD dan RPJMD Kabupaten Nias Selatan dengan Visi Pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Utara

VISI NASIONAL	VISI PROVINSI SUMATERA UTARA	VISI KABUPATEN NIAS SELATAN
(1)	(2)	(3)
RPJPN 2025–2045 Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan	**RPJPD 2025–2045** Sumatera Utara Unggul, Maju, Berkelanjutan	**RPJPD 2025–2045** Nias Selatan Sejahtera, Berbudaya, Maju dan Berkelanjutan
RPJMN 2025–2029 Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045	**RPJMD 2025–2029** Kolaborasi Sumut Berkah Menuju Sumatera Utara yang Unggul, Maju, dan Berkelanjutan	**RPJMD 2025–2029** Mewujudkan Masyarakat Adil Makmur, Berdaya Saing, Inovatif, Berkelanjutan dan Lestari Berkeadaban

3.1.1.2. Misi

Visi Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029 akan ditempuh melalui 6 (enam) Misi Pembangunan Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan infrastruktur daerah yang terpadu dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat;
2. Membangun manusia yang berkualitas dan berkepribadian unggul melalui pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia siap kerja dan siap merintis usaha sendiri;
3. Memastikan kemudahan akses kesehatan untuk rakyat guna menciptakan manusia yang sehat jasmani dan rohani;
4. Membangun ekonomi daerah yang berkeadilan, inklusif, inovatif, kreatif, dan mandiri berbasis potensi sumber daya lokal;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan bebas dari korupsi dengan menjunjung tinggi penegakan hukum dan menjamin hak-hak masyarakat;
6. Mewujudkan ketahanan sosial budaya yang berkeadaban dan pelestarian lingkungan hidup.

3.1.2. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan "Mewujudkan Masyarakat Adil Makmur, Berdaya Saing, Inovatif, Berkelanjutan, dan Lestari Berkeadaban" melalui pelaksanaan enam misi pembangunan, perlu ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan yang jelas untuk setiap misi. Penetapan tujuan dan sasaran ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, guna memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan selaras dengan misi yang diemban. Keberhasilan dari setiap misi diukur melalui indikator kinerja sasaran dengan target yang terukur, sehingga pencapaian pembangunan dapat dievaluasi secara objektif dan akuntabel. Berikut adalah tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Nias Selatan dalam periode 2025-2029.

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029
Visi : "Mewujudkan Masyarakat Adil Makmur, Berdaya Saing, Inovatif, Berkelanjutan dan Lestari Berkeadaban"

Misi		Tujuan/ Sasaran		Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2024)	Target Tahun					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
M1	Membangun dan mengembangkan infrastruktur daerah yang terpadu dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat	1	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik	Indeks Infrastruktur Daerah (IID)	Skor	30,68	33,15	37,41	41,47	46,81	50,50	54,61
		1.1	Meningkatkan konektivitas wilayah melalui peningkatan aksesibilitas infrastruktur jalan, jembatan, dan moda transportasi untuk mendukung mobilitas penduduk, distribusi barang dan jasa, serta pelayanan dasar	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Skor	0,00	0,00	40	45	50	55	60
				Rasio konektivitas	Indeks	54,70	58,75	63,10	67,78	72,80	78,19	83,99
		1.2	Terwujudnya hunian yang layak dan lingkungan permukiman yang tertata, serta tersedianya gedung pemerintahan yang representatif untuk mendukung kehidupan masyarakat yang lebih bermartabat dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Rumah Tangga dengan akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persen	0,00	12,50	12,91	13,32	13,73	14,14	14,55
				Persentase Ketersediaan Gedung Pemerintahan	Persen	47,57	47,57	57,28	66,02	78,64	85,44	93,20
M2	Membangun manusia yang berkualitas dan berkepribadian unggul melalui pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia siap kerja dan siap merintis usaha sendiri	2	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi seluruh masyarakat	Indeks Pendidikan	Poin	57,62	57,75	57,88	58,01	58,14	58,27	58,40
		2.1	Meningkatkan angka partisipasi sekolah hingga 13 tahun	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,92	12,93	12,95	12,96	12,98	12,99	13,00
				Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,52	6,55	6,58	6,60	6,63	6,66	6,69

Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2024)	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk : Literasi Membaca								
		- SD	Persen	0,00	38,35	40,22	42,09	43,95	45,82	47,69
		- SMP	Persen	0,00	28,05	30,41	32,77	35,13	37,50	39,86
		Numerasi								
		- SD	Persen	0,00	39,20	40,65	42,11	43,56	45,01	46,46
		- SMP	Persen	0,00	31,14	32,98	34,81	36,65	38,48	40,32
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	1,52	1,52	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00
	2.2 Meningkatkan kualitas tenaga pendidik	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	Persen	0,00	31,99	36,99	44,49	51,99	59,49	66,99
	2.3 Meningkatkan jumlah lulusan SMA sederajat yang melanjutkan ke pendidikan tinggi	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persen	11,97	12,07	12,17	12,27	12,36	12,46	12,56
	2.4 Meningkatkan kompetensi pencari kerja	Rasio Kewirausahaan	Persen	0,00	0,18	0,40	0,63	0,85	1,08	1,30
		Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	Rp (Juta) /Orang	22,23	22,98	23,73	24,48	25,23	25,98	26,73
M3 Memastikan Kemudahan Akses Kesehatan Untuk Rakyat Guna Menciptakan Manusia Yang Sehat Jasmani dan Rohani	3 Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat untuk mewujudkan warga Nias Selatan yang sehat jasmani dan rohani	Indeks Kesehatan	Poin	77,95	77,98	78,41	78,83	79,25	79,67	80,10
	3.1 Menurunkan prevalensi stunting pada balita sebagai upaya peningkatan gizi dan kesehatan anak secara berkelanjutan	Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Persen	-	34,77	31,94	29,11	26,28	23,45	20,62

Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2024)	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	3.2 Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat secara merata dan berkeadilan	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional	Persen	-	85,00	87,60	90,20	92,80	95,40	98,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan	Nilai	n/a	82,00	85,00	89,00	90,00	92,00	95,00
		Umur Harapan Hidup	Tahun	71,77	71,79	72,04	72,30	72,55	72,80	73,06
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Skor	0,00	0,82	0,87	0,90	0,93	0,97	1,00
	3.3 Meningkatkan kualitas hidup keluarga dalam tatanan masyarakat yang harmonis, berkeadilan gender, ramah anak, serta ditopang oleh sistem kesejahteraan sosial yang inklusif dan berkelanjutan	Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA)	Indeks	48,64	49,60	50,50	51,40	52,30	53,10	54,00
		Indeks Pembangunan Gender	Persen	90,47	91,27	92,06	92,85	93,65	94,44	95,23
		Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0,55	0,54	0,53	0,52	0,51	0,50	0,49
		Indeks Perlindungan Anak	Poin	42,57	43,07	43,57	44,07	44,57	45,07	45,57
		Indeks Kesejahteraan Sosial	Nilai	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
M4 Membangun ekonomi daerah yang berkeadilan, inklusif, inovatif, kreatif, dan mandiri berbasis potensi sumber daya lokal	4 Peningkatan pendapatan perkapita masyarakat melalui penguatan ekonomi berbasis potensi lokal secara berkelanjutan	PDRB Perkapita ADHK	Juta Rupiah	12.325,28	12.326,42	12.327,56	12.328,70	12.329,84	12.330,98	12.332,12
	4.1 Meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan secara berkelanjutan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Indeks	0,00	90,00	92,00	94,00	96,00	98,00	100,00
		Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	Indeks	0,00	88,00	90,00	92,00	94,00	96,00	98,00
		Nilai Tukar Petani (NTP)	Indeks	0	60	70	80	90	100	110
		Indeks Ketahanan Pangan	Skor	66,29	66,90	67,52	68,13	68,75	69,36	69,98

Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2024)	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	4.2 Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang inklusif, berkeadilan, dan mandiri berbasis sumber daya lokal	Kontribuasi Sektor Industri terhadap PDRB	Persen	0,17	0,19	0,20	0,22	0,23	0,25	0,26
		Kontribuasi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	9,19	9,20	9,22	9,23	9,24	9,25	9,27
		Kontribusi UMKM Terhadap PDRB	Persen	20	25	25	25	30	30	35
		Persentase Peningkatan Investasi	Persen	80,00	40,00	45,00	45,00	50,00	50,00	60,00
		Indeks Akses Keuangan Daerah	Skor	2,05	2,20	2,27	2,34	2,42	2,49	2,53
	4.3 Mengoptimalkan pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan berbasis potensi lokal	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (ADHB)	Persen	2,27	2,28	2,29	2,30	2,30	2,31	2,32
M5 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan bebas dari korupsi dengan menjunjung tinggi penegakan hukum dan menjamin hak-hak masyarakat	5 Mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel dalam rangka percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	60,00	62/B	64/B	66/B	68/B	70/BB	72/BB
	5.1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, berintegritas, berbasis digital, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	2,90	2,95	3,01	3,12	3,22	3,33	3,44
		Indeks Pelayanan Publik	Skor	91,23	92,22	93,22	94,22	95,22	96,22	97,22
		Nilai Indeks Transformasi Digital	Poin	30,79	37,90	38,20	38,37	38,44	38,55	39,00
		Pilar Pemerintah								
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
		Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Opini	0,00	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai SAKIP	Poin	54,15	60/B	62/B	64/B	66/B	68/B	70/BB

Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2024)	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Skor	0,00	83,00	83,60	84,20	84,80	85,40	86,00
		Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	80	80	81	82	83	84	85
		Indeks Profesionalitas ASN (PNS)	Skor	0,00	49,41	57,41	63,41	68,41	74,41	74,41
		Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	II	III	III	III	III	III	III
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Skor	0,00	76,50	78,50	81,00	83,50	86,00	88,50
		Indeks Desa Membangun (IDM)	Skor	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,51	0,51
		Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	Skor	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
		Indeks Reformasi Hukum	Nilai	0,00	53,00	53,40	53,80	54,20	54,60	55,00
M6 Mewujudkan ketahanan sosial budaya yang berkeadaban dan pelestarian lingkungan hidup	6 Peningkatan ketahanan sosial budaya dan pelestarian lingkungan hidup	Indeks Pemajuan Kebudayaan	Nilai	47,56	47,62	47,69	47,75	47,82	47,88	47,95
	6.1 Meningkatnya pelestarian budaya daerah yang berkelanjutan melalui penguatan identitas lokal dan pemajuan kebudayaan daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Poin	0,00	55,00	56,13	57,25	58,38	59,50	60,63

Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2024)	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	6.2 Meningkatnya kualitas dan daya dukung lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	53,56	53,56	53,56	53,57	53,57	53,57	53,57
	6.3 Meningkatnya kerukunan umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat yang berpijak pada Pancasila, demokrasi, dan HAM	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Skor	-	90,00	90,40	90,80	91,20	91,60	92,00
		Indeks Demokrasi Indonesia	Kategori	0,00	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
		Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Skor	58,62	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00

3.1.2.1. Penyelarasan Sasaran Pembangunan RPJMD Kabupaten Nias Selatan Dengan Sasaran Pembangunan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara

Penyusunan sasaran pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025–2029 dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan dan konsistensi terhadap sasaran pembangunan nasional maupun provinsi. Hal ini dimaksudkan agar arah pembangunan daerah dapat mendukung pencapaian target pembangunan yang lebih luas, baik di tingkat provinsi Sumatera Utara maupun nasional. Oleh karena itu, sasaran pembangunan daerah diselaraskan dengan indikator, baseline, dan target yang tercantum dalam RPJMN 2025–2029 serta RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025–2029. Tabel berikut menyajikan penyelarasan sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Nias Selatan dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 3.3
Penyelarasan Sasaran Pembangunan RPJMD Kabupaten Nias Selatan Dengan Sasaran Pembangunan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara

No	RPJMN 2025–2029(Sasaran per Provinsi)			RPJMD Provinsi 2025–2029			RPJMD Kab/Kota 2025–2029		
	Indikator	Baseline 2025	Target 2029	Indikator	Baseline 2025	Target 2029	Indikator	Baseline 2025	Target 2029
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,3	7,6	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,3	7,6	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	2,97-4,15	5,33
2	PDRB Per Kapita (Rp Juta)	78,4	115,3	PDRB Per Kapita (Rp Juta)	78,4	115,3	PDRB Per Kapita (Rp Juta)	24,03	59,82
3	Kontribusi PDRB Provinsi/Kab/Kota (%)	5,2	5,3	Kontribusi PDRB Provinsi/ Kab/ Kota (%)	5,2	5,3	Kontribusi PDRB Kabupaten/ Kota (%)	0,8	0,79
4	Tingkat Kemiskinan (%)	6,96–7,46	2,823,82	Tingkat Kemiskinan (%)	6,96–7,46	2,82–3,82	Tingkat Kemiskinan (%)	15,90-15,50	11,90-11,50
5	Rasio Gini	0,303–0,305	0,287–0,291	Rasio Gini	0,303–0,305	0,287–0,291	Rasio Gini	0,260-0,240	0,206
6	Indeks Modal Manusia	0,54	0,57	Indeks Modal Manusia	0,54	0,57	Indeks Pembangunan Manusia	67,39	75,01
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK (TonCO_2eq)	1	16,88	Penurunan Intensitas Emisi GRK (TonCO_2eq)	1	16,88	Penurunan Emisi GRK (TonCo2eq)	169.980,00	332.099,00
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,2	77,87	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,2	77,87	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	53,56	53,57
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,27–5,56	4,74–5,20	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,27–5,56	4,74–5,20	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,00-2,80	1,70-1,50

3.1.2.2. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran RPJMD dengan Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan RPJPD

RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025–2029 disusun dengan berpedoman pada RPJPD Tahun 2025–2045 agar arah pembangunan lima tahunan tetap sejalan dengan rencana jangka panjang daerah.

Visi RPJMD "Mewujudkan Masyarakat Adil Makmur, Berdaya Saing, Inovatif, Berkelanjutan dan Lestari Berkeadaban" merupakan turunan dari Visi RPJPD "Nias Selatan Sejahtera, Berbudaya, Maju dan Berkelanjutan."

Visi tersebut dijabarkan ke dalam misi, tujuan, dan sasaran yang diselaraskan dengan sasaran pokok dan arah pembangunan RPJPD. Dengan demikian, RPJMD menjadi bagian penting untuk mewujudkan pembangunan jangka panjang secara bertahap, terarah, dan berkesinambungan.

Tabel 3.4
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran RPJMD dengan Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan RPJPD

RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029 Visi : Mewujudkan Masyarakat Adil Makmur, Berdaya Saing, Inovatif, Berkelanjutan dan Lestari Berkeadaban			**RPJPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029 Visi : Nias Selatan Sejahtera, Berbudaya, Maju dan Berkelanjutan**	
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**	**Sasaran Pokok**	**Arah Pembangunan**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Membangun dan mengembangkan infrastruktur daerah yang terpadu dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik	Meningkatkan konektivitas wilayah melalui peningkatan aksesibilitas infrastruktur jalan, jembatan, dan moda transportasi untuk mendukung mobilitas penduduk, distribusi barang dan jasa, serta pelayanan dasar	Pemenuhan infrastruktur sesuai karakteristik daerah secara adil dan merata untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah	
			Pembangunan infrastuktur berkualitas dan ramah lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat	
		Terwujudnya hunian yang layak dan lingkungan permukiman yang tertata, serta tersedianya gedung pemerintahan yang representatif untuk mendukung kehidupan masyarakat yang lebih bermartabat dan pelayanan publik yang berkualitas	Terwujudnya perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi (IE8)
Membangun manusia yang berkualitas dan berkepribadian unggul melalui pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia siap kerja dan siap merintis usaha sendiri	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi seluruh masyarakat	Meningkatkan angka partisipasi sekolah hingga 13 tahun	Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata	Pendidikan berkualitas yang merata (IE2)
		Meningkatkan kualitas tenaga pendidik		
		Meningkatkan jumlah lulusan SMA sederajat yang melanjutkan ke pendidikan tinggi		
		Meningkatkan kompetensi pencari kerja	Meningkatnya iptek, inovasi, dan produktifitas ekonomi	Iptek, inovasi, dan produktifitas ekonomi (IE4)

RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029 Visi : Mewujudkan Masyarakat Adil Makmur, Berdaya Saing, Inovatif, Berkelanjutan dan Lestari Berkeadaban			RPJPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029 Visi : Nias Selatan Sejahtera, Berbudaya, Maju dan Berkelanjutan	
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**	**Sasaran Pokok**	**Arah Pembangunan**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Memastikan Kemudahan Akses Kesehatan Untuk Rakyat Guna Menciptakan Manusia Yang Sehat Jasmani dan Rohani	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat untuk mewujudkan warga Nias Selatan yang sehat jasmani dan rohani	Menurunkan prevalensi stunting pada balita sebagai upaya peningkatan gizi dan kesehatan anak secara berkelanjutan	Terwujudnya kesehatan untuk semua	Kesehatan untuk semua (IE)
		Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat secara merata dan berkeadilan	terwujudnya perlindungan sosial yang adaptif	Perlindungan sosial yang adaptif (IE3)
		Meningkatkan kualitas hidup keluarga dalam tatanan masyarakat yang harmonis, berkeadilan gender, ramah anak, serta ditopang oleh sistem kesejahteraan sosial yang inklusif dan berkelanjutan	Terwujudnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif	Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif (IE14)
Membangun ekonomi daerah yang berkeadilan, inklusif, inovatif, kreatif, dan mandiri berbasis potensi sumber daya lokal	Peningkatan pendapatan perkapita masyarakat melalui penguatan ekonomi berbasis potensi lokal secara berkelanjutan	Meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan secara berkelanjutan	Meningkatnya iptek, inovasi, dan produktifitas ekonomi	Iptek, inovasi, dan produktifitas ekonomi (IE4)
			Meningkatnya penerapan ekonomi berkelanjutan	Penerapan ekonomi hijau (IE5)
			Terwujudnya berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan	Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan (IE16)
		Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang inklusif, berkeadilan, dan mandiri berbasis sumber daya lokal	Terwujudnya stabilitas ekonomi makro	Stabilitas ekonomi makro (IE11)
		Mengoptimalkan pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan berbasis potensi lokal	Meningkatnya iptek, inovasi, dan produktifitas ekonomi	Iptek, inovasi, dan produktifitas ekonomi (IE4)
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan bebas dari korupsi dengan menjunjung tinggi penegakan hukum dan menjamin hak-hak masyarakat	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel dalam rangka percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, berintegritas, berbasis digital, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.	Terwujudnya transformasi digital	Transformasi digital (IE6)
			Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif	Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif (IE9)

RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029 Visi : Mewujudkan Masyarakat Adil Makmur, Berdaya Saing, Inovatif, Berkelanjutan dan Lestari Berkeadaban			RPJPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029 Visi : Nias Selatan Sejahtera, Berbudaya, Maju dan Berkelanjutan	
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**	**Sasaran Pokok**	**Arah Pembangunan**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang terintegrasi, Sinkron, bersinergi dan inovatif.	
Mewujudkan ketahanan sosial budaya yang berkeadaban dan pelestarian lingkungan hidup	Peningkatan ketahanan sosial budaya dan pelestarian lingkungan hidup	Meningkatnya pelestarian budaya daerah yang berkelanjutan melalui penguatan identitas lokal dan pemajuan kebudayaan daerah	Terwujudnya beragama maslahat dan berkebudayaan maju	Beragama maslahat dan berkebudayaan maju (IE13)
		Meningkatnya kualitas dan daya dukung lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Terwujudnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim (IE17)
			Terwujudnya lingkungan hidup berkualitas	Lingkungan hidup berkualitas (IE15)
		Meningkatnya kerukunan umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat yang berpijak pada Pancasila, demokrasi, dan HAM	Terwujudnya beragama maslahat dan berkebudayaan maju	Beragama maslahat dan berkebudayaan maju (IE13)
			Terwujudnya keamanan lingkungan yang tangguh, dan demokrasi substansial	Hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh, dan demokrasi substansial (IE10)

3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

3.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan secara efektif dan efisien. Strategi pembangunan mencakup langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan, sedangkan arah kebijakan memastikan pelaksanaan strategi sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Penyusunan strategi pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029 didasarkan pada analisis kondisi ekonomi, sosial, infrastruktur, serta potensi daerah. Sebagai wilayah kepulauan, Kabupaten Nias Selatan menghadapi tantangan dalam konektivitas, akses layanan dasar, serta pemanfaatan potensi unggulan seperti perikanan, pariwisata, dan pertanian. Namun, peluang untuk meningkatkan daya saing daerah tetap terbuka melalui

penguatan ekonomi lokal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, strategi pembangunan diarahkan pada peningkatan daya saing ekonomi, penguatan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, tata kelola pemerintahan yang baik, serta pelestarian lingkungan. Setiap strategi dan kebijakan ini akan dilengkapi dengan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilannya. Dengan pendekatan ini, diharapkan pembangunan Kabupaten Nias Selatan dapat berjalan lebih terarah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

1. Untuk mencapai **Misi 1,** yaitu *Membangun dan mengembangkan infrastruktur daerah yang terpadu dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat,* Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menetapkan tujuan utama yaitu meningkatkan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik. Tujuan ini dijabarkan ke dalam dua sasaran pembangunan, yaitu pertama, meningkatkan konektivitas wilayah melalui peningkatan aksesibilitas infrastruktur jalan, jembatan, dan moda transportasi guna mendukung mobilitas penduduk, distribusi barang dan jasa, serta pelayanan dasar; dan kedua, mewujudkan hunian yang layak dan lingkungan permukiman yang tertata, serta tersedianya gedung pemerintahan yang representatif guna mendukung kehidupan masyarakat yang lebih bermartabat dan pelayanan publik yang berkualitas.

   Pembangunan infrastruktur dasar diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh wilayah, baik daratan maupun kepulauan, memiliki akses jalan yang memadai, moda transportasi yang tersedia, serta lingkungan permukiman yang layak dan tertata. Akses infrastruktur yang baik menjadi kunci bagi terwujudnya pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta efisiensi pelayanan publik. Infrastruktur jalan dan jembatan yang tersambung secara fungsional akan mempercepat konektivitas antarwilayah, sedangkan transportasi darat, laut, dan udara yang memadai akan meningkatkan integrasi antarwilayah dan memperlancar distribusi barang dan jasa. Di sisi lain, hunian yang layak dan lingkungan yang sehat akan berkontribusi besar terhadap kualitas hidup masyarakat dan peningkatan derajat kesehatan.

Strategi pembangunan infrastruktur dalam periode RPJMD ini difokuskan pada tiga aspek utama, yakni pembangunan dan preservasi jalan serta jembatan berdasarkan skala prioritas; penyediaan infrastruktur transportasi darat, laut, dan udara; serta penyediaan hunian layak dan gedung pemerintahan yang representatif. Dalam hal pembangunan jalan dan jembatan, kebijakan diarahkan pada penyusunan rencana induk dan peta kondisi terkini, peningkatan konektivitas antar pusat kecamatan dan desa dengan berbagai jenis permukaan jalan yang sesuai, serta memastikan seluruh akses menuju fasilitas publik seperti sekolah, puskesmas, pasar, kantor pemerintahan, dan objek wisata dapat dilalui oleh kendaraan roda dua dan empat. Pemerintah daerah juga akan mengintensifkan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah desa untuk memaksimalkan dukungan pendanaan.

Pada aspek transportasi, pembangunan terminal di Teluk Dalam, pengoperasian Bandara Silambo, pembangunan pelabuhan pengumpan lokal di wilayah Kepulauan Batu, serta penyediaan transportasi laut antar kecamatan dengan pusat distribusi di Pulau Tello merupakan prioritas utama. Hal ini untuk memastikan bahwa masyarakat di wilayah kepulauan tidak terisolasi dan dapat menikmati pelayanan dasar serta kesempatan ekonomi yang setara dengan wilayah daratan.

Sementara itu, untuk aspek permukiman dan gedung pemerintahan, kebijakan diarahkan pada pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni, penyediaan prasarana dan sarana permukiman seperti air bersih, sanitasi, listrik, serta penataan kawasan permukiman agar menjadi lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman. Di samping itu, pembangunan dan revitalisasi gedung pemerintahan yang representatif menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan efektivitas birokrasi.

2. Untuk mencapai **Misi 2**, yaitu *membangun manusia yang berkualitas dan berkepribadian unggul melalui pendidikan guna menciptakan sumber daya manusia yang siap kerja dan siap merintis usaha sendiri*, ditetapkan tujuan utama berupa peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi seluruh masyarakat. Tujuan ini dijabarkan dalam empat sasaran pembangunan, yakni: (a) meningkatkan angka partisipasi sekolah hingga 13 tahun; (b)

meningkatkan kualitas tenaga pendidik; (c) meningkatkan jumlah lulusan SMA/sederajat yang melanjutkan ke pendidikan tinggi; dan (d) meningkatkan kompetensi pencari kerja.

Peningkatan akses dan kualitas pendidikan di Kabupaten Nias Selatan merupakan bentuk komitmen untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat, tanpa terkecuali, memperoleh pendidikan yang merata dan berkualitas. Hal ini penting guna menciptakan generasi yang cerdas, kompeten, serta siap menghadapi tantangan pembangunan dan persaingan di era global.

Strategi pembangunan pendidikan difokuskan pada empat pilar utama, yaitu penguatan pendidikan wajib belajar 13 tahun, peningkatan kualitas tenaga pendidik, dorongan kepada masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, serta peningkatan kompetensi pencari kerja melalui program pelatihan dan balai latihan kerja.

Dalam pelaksanaan pendidikan wajib belajar 13 tahun, pemerintah akan mengembangkan teknik perencanaan kebutuhan tenaga pengajar, meningkatkan status sekolah menjadi ramah anak, memenuhi kebutuhan guru bimbingan konseling di setiap sekolah, serta meningkatkan sinergitas antara sekolah dan keluarga. Selain itu, peningkatan akses dan kualitas layanan perpustakaan juga menjadi bagian integral dari strategi ini.

Untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik, langkah-langkah yang akan ditempuh meliputi pengembangan teknik perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana sekolah, penerapan metode pengajaran terkini, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru sebagai bentuk apresiasi terhadap peran strategis mereka dalam proses pendidikan.

Upaya mendorong lulusan SMA/sederajat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi akan dilakukan melalui pemberian beasiswa kepada lulusan berprestasi. Beasiswa ini diberikan sebagai bentuk dukungan kepada generasi muda untuk melanjutkan studi pada perguruan tinggi yang memiliki akreditasi minimal “B”.

Sementara itu, peningkatan kompetensi pencari kerja akan diwujudkan melalui pembangunan balai latihan kerja, penyediaan kursus keterampilan dan keahlian yang sesuai kebutuhan pasar, serta pelaksanaan Program

"Three in One" yang mencakup pelatihan, perkuliahan, dan penempatan kerja dalam satu paket terpadu.

3. Dalam mencapai **Misi 3**, yaitu *memastikan kemudahan akses kesehatan untuk rakyat guna menciptakan manusia yang sehat jasmani dan rohani*, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menetapkan tujuan berupa *Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat*. Tujuan ini dijabarkan ke dalam tiga sasaran utama pembangunan**,** yaitu: (a) Menurunkan prevalensi stunting pada balita sebagai upaya peningkatan gizi dan kesehatan anak secara berkelanjutan; (b) Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat secara merata dan berkeadilan; dan (c) Meningkatkan kualitas hidup keluarga dalam tatanan masyarakat yang harmonis, berkeadilan gender, ramah anak, serta didukung sistem kesejahteraan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

   Upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Nias Selatan diarahkan untuk menjamin bahwa seluruh warga, termasuk mereka yang tinggal di wilayah kepulauan dan terpencil, memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan. Hal ini merupakan bagian integral dari strategi pembangunan manusia seutuhnya, baik secara jasmani maupun rohani, guna meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat.

   Strategi pembangunan di sektor kesehatan difokuskan pada empat pilar utama, yakni:

   1. Percepatan penuntasan dan pencegahan stunting,
   2. Peningkatan akses layanan kesehatan universal,
   3. Penguatan infrastruktur kesehatan masyarakat, dan
   4. Peningkatan kualitas hidup keluarga.

   Dalam rangka menurunkan prevalensi stunting, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menetapkan kebijakan percepatan pencegahan stunting melalui berbagai langkah konkret. Ini mencakup pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil dan balita, penyediaan data kesehatan yang aktual, serta pembangunan infrastruktur sanitasi dan air bersih di lokasi-lokasi khusus yang menjadi fokus penanganan stunting. Di samping itu, keterlibatan aktif masyarakat akan ditingkatkan dalam upaya pencegahan dan penuntasan stunting secara berkelanjutan.

Untuk meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, perluasan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi prioritas, khususnya untuk menjangkau kelompok rentan dan masyarakat miskin. Pemerintah juga mendorong peningkatan kesadaran akan pentingnya keikutsertaan dalam sistem jaminan kesehatan agar pelayanan dapat diakses secara adil dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pada aspek penguatan infrastruktur kesehatan, peningkatan kualitas layanan Public Service Care (PSC) seperti ambulans 24 jam akan diperluas guna memberikan respons cepat terhadap kondisi darurat. Rumah sakit daerah akan ditingkatkan kapasitas dan kualitasnya agar mampu menjadi rumah sakit rujukan yang layak, dengan kelengkapan fasilitas dan kualitas pelayanan yang lebih baik. Pemenuhan tenaga medis, termasuk penambahan dokter spesialis, menjadi prioritas untuk memastikan pelayanan kesehatan berjalan optimal.

Sebagai bentuk kolaborasi dengan sektor swasta, Pemerintah juga mendorong optimalisasi dana pendidikan bidang kesehatan bagi masyarakat di wilayah Kepulauan Batu melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah tenaga kesehatan lokal serta memperkuat layanan fasilitas kesehatan di wilayah-wilayah yang membutuhkan.

Di sisi lain, peningkatan kualitas hidup keluarga menjadi bagian penting dari pembangunan kesehatan masyarakat. Pemerintah berkomitmen untuk menekan angka kekerasan dalam rumah tangga, mencegah pernikahan di bawah umur, serta memperluas layanan kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan, termasuk lansia, penyandang disabilitas, anak-anak, dan masyarakat miskin. Selain itu, edukasi tentang pola hidup sehat dan penguatan peran keluarga akan terus ditingkatkan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, inklusif, dan berdaya saing.

4. Dalam rangka mencapai **Misi 4**, yaitu membangun ekonomi daerah yang berkeadilan, inklusif, inovatif, kreatif, dan mandiri berbasis potensi sumber daya lokal, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menetapkan tujuan utama berupa peningkatan pendapatan perkapita masyarakat melalui penguatan ekonomi berbasis potensi lokal secara berkelanjutan. Tujuan ini dijabarkan ke dalam tiga sasaran pembangunan, yaitu: (a) meningkatkan produktivitas

sektor pertanian dan perikanan secara berkelanjutan; (b) mengembangkan ekonomi kerakyatan yang inklusif, berkeadilan, dan mandiri berbasis sumber daya lokal; serta (c) mengoptimalkan pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan berbasis potensi lokal.

Upaya peningkatan pendapatan per kapita dilakukan melalui penguatan ekonomi lokal yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan, dengan bertumpu pada pengembangan sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata. Strategi utama yang diterapkan mencakup peningkatan ketahanan pangan, penguatan ekonomi kerakyatan, serta optimalisasi sektor pariwisata sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Untuk mewujudkan ketahanan pangan, pemerintah fokus pada pengelolaan sektor pertanian dan perikanan yang berkelanjutan. Hal ini diwujudkan melalui peningkatan produktivitas pertanian sebagai sumber ketahanan pangan, peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya, menjaga stabilitas harga bahan pokok, serta membangun dan meningkatkan infrastruktur pendukung sektor pertanian dan perikanan.

Di sisi lain, pengembangan ekonomi kerakyatan diarahkan pada pemberdayaan UMKM dengan menciptakan ekosistem usaha yang kondusif. Langkah-langkahnya meliputi mendorong pertumbuhan dan penguatan UMKM, menyederhanakan proses perizinan dan memperbaiki regulasi usaha kecil, memperluas akses permodalan dan pemberian insentif, serta meningkatkan daya saing UMKM melalui inovasi, digitalisasi, dan inklusi keuangan. Pemerintah juga mendorong penguatan koperasi melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, akses pembiayaan, dan integrasi dalam rantai pasok berbasis potensi unggulan daerah.

Dalam pengembangan sektor pariwisata, pemerintah berkomitmen untuk menetapkan dan mengembangkan destinasi wisata unggulan yang berkelanjutan, meningkatkan aksesibilitas serta infrastruktur pendukung, mengembangkan promosi dan pemasaran wisata yang inovatif dan berbasis digital, serta mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif berbasis wisata. Selain itu, kebijakan diarahkan pula pada pengelolaan sampah dan energi ramah lingkungan di destinasi wisata guna mewujudkan wisata hijau yang berkelanjutan dan berdaya saing.

5. Dalam mencapai ***Misi 5***, yaitu *Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Bebas dari Korupsi dengan Menjunjung Tinggi Penegakan Hukum serta Menjamin Hak-hak Masyarakat*, ditetapkan tujuan utama *Mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel dalam rangka percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik*. Tujuan ini dijabarkan dalam satu sasaran pembangunan, yakni *Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, berintegritas, berbasis digital, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat*.

   Upaya untuk mewujudkan reformasi birokrasi merupakan langkah strategis guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang modern dan responsif. Pemerintahan diarahkan agar menjadi lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Untuk itu, strategi yang diterapkan meliputi *Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital, Berintegritas, dan Berorientasi Kinerja* serta *Peningkatan Sinergi dengan Aparat Penegak Hukum dalam Pencegahan dan Penegakan Hukum*, sebagai dasar dalam menjawab tuntutan masyarakat yang semakin kompleks.

   Sebagai bagian dari strategi tersebut, pemerintah akan melaksanakan *Transformasi Digital dan Penguatan Sistem Akuntabilitas* melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan dan pelayanan publik. Digitalisasi diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan responsivitas birokrasi terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, riset dan kajian ilmiah akan menjadi landasan dalam pengambilan keputusan, guna memastikan kebijakan yang diambil tepat sasaran dan berbasis data.

   Peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi fokus utama, dengan menerapkan prinsip *"Right Man, Right Place, Right Job"* dalam penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN), untuk mendorong profesionalisme dan optimalisasi kinerja organisasi pemerintah. Peran Inspektorat akan diperkuat sebagai pengawas internal yang bertugas melakukan audit, pembinaan, dan pengawasan terhadap kinerja perangkat daerah.

   Selanjutnya, sinergi dengan lembaga penegak hukum akan ditingkatkan guna memperkuat upaya pencegahan dan penegakan hukum secara efektif. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan dalam *Memperkuat Sinergi dengan Aparat Penegak Hukum*, serta *Penataan regulasi daerah agar lebih sederhana dan selaras dengan hukum nasional*. Selain itu, pemerintah daerah juga akan

mendorong *Penyusunan produk hukum yang transparan, partisipatif, dan berbasis data*, guna menciptakan sistem hukum yang adil dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

6. Dalam mencapai **Misi 6**, yaitu *Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya yang Berkeadaban dan Pelestarian Lingkungan Hidup*, ditetapkan tujuan utama berupa peningkatan ketahanan sosial budaya dan pelestarian lingkungan hidup. Tujuan ini dijabarkan ke dalam tiga sasaran pembangunan, yaitu: (1) meningkatnya pelestarian budaya daerah yang berkelanjutan melalui penguatan identitas lokal dan pemajuan kebudayaan daerah; (2) meningkatnya kualitas dan daya dukung lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; serta (3) meningkatnya kerukunan umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat yang berpijak pada Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia.

   Peningkatan ketahanan sosial budaya dan pelestarian lingkungan hidup ini bertujuan untuk memperkuat harmoni sosial, menjaga dan mengembangkan identitas budaya lokal, serta memastikan keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi mendatang. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan berkomitmen untuk memperkokoh nilai-nilai kearifan lokal melalui pelestarian budaya daerah, memperkuat kerukunan antarumat beragama, serta meningkatkan solidaritas sosial di tengah masyarakat. Di sisi lain, pelestarian lingkungan hidup dilakukan melalui pengelolaan sampah yang lebih efektif, optimalisasi fungsi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) secara berkelanjutan, serta penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang ramah lingkungan. Kesiapsiagaan dan mitigasi bencana juga menjadi fokus, dengan peningkatan sistem peringatan dini, pembangunan infrastruktur yang tangguh terhadap bencana, serta pelibatan aktif masyarakat dalam penanggulangan bencana.

   Strategi yang ditempuh meliputi pelestarian budaya daerah sebagai identitas dan kearifan lokal, mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan, serta memperkokoh kerukunan umat beragama dalam bingkai *"Nias Selatan Rumah Kita"*. Dalam upaya pelestarian budaya, pemerintah akan mengoptimalkan inventarisasi budaya dan cagar budaya sebagai warisan daerah, serta melaksanakan revitalisasi budaya dan cagar budaya untuk pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya lokal.

Pada aspek lingkungan hidup, pemerintah fokus pada peningkatan kualitas dan jangkauan layanan pengelolaan persampahan di wilayah perkotaan dan destinasi wisata, serta melakukan revitalisasi dan optimalisasi fungsi TPA secara berkelanjutan. Upaya mitigasi bencana diperkuat melalui pengembangan sistem peringatan dini, pembangunan infrastruktur tangguh terhadap bencana, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Sementara itu, dalam menjaga kerukunan umat beragama, langkah-langkah yang akan dilakukan antara lain memperkuat pembinaan keagamaan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), meningkatkan fasilitasi forum keagamaan, serta mendorong penguatan kelembagaan dan regulasi untuk menciptakan tatanan sosial yang damai, harmonis, demokratis, serta menghormati hak asasi manusia. Dengan terwujudnya ketahanan sosial budaya yang berkeadaban dan lingkungan hidup yang lestari, diharapkan tercipta masyarakat Nias Selatan yang harmonis, berbudaya, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik.

Tabel 3.5
Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029

Tujuan/Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
(1)		(2)	(3)
1	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik		
	1.1 Meningkatkan konektivitas wilayah melalui peningkatan aksesibilitas infrastruktur jalan, jembatan, dan moda transportasi untuk mendukung mobilitas penduduk, distribusi barang dan jasa, serta pelayanan dasar	Meningkatkan pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan jalan dan jembatan secara terarah dan berkelanjutan, dengan memperkuat kerja sama antar pemerintah dan pemanfaatan data pendukung	Menyusun Rencana Induk dan Peta Jalan Infrastruktur mencakup kondisi eksisting dan kebutuhan pengembangan ke depan.
			Menghubungkan Jalan Dari Pusat Kecamatan Menuju Jalan Nasional/Provinsi dengan Permukaan Hotmix/ Coldmix
			Penguatan infrastruktur jalan dan jembatan penghubung antar-kecamatan
			Menghubungkan jalan dari pusat kecamatan ke desa dengan permukaan lapen/semenisasi
			Menjamin kelayakan akses jalan ke fasilitas strategis seperti pusat pemerintahan, sekolah, fasilitas kesehatan, pasar, dan objek wisata agar dapat dilalui kendaraan roda dua dan empat.
			Mendorong sinergi pendanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur melalui koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi, dan desa.

Tujuan/Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
(1)		(2)	(3)
			Meningkatkan peran serta masyarakat dan OPD teknis dalam perencanaan, pengawasan, dan pemeliharaan infrastruktur.
		Penyediaan dan pengembangan infrastruktur transportasi darat, laut, dan udara yang terintegrasi	Membangun Terminal Di Teluk Dalam
			Mendorong Pemanfaatan dan Pengoperasian Bandara Silambo, serta peningkatan kualitas layanan Bandara Lasondre
			Membangun Pelabuhan Pengumpan Lokal di Daerah Kepulauan Batu
			Memastikan tersedianya Transportasi Laut Antar Kecamatan di Kepulauan Batu dengan Pulau Tello Sebagai Sentral Distribusi Barang dan Jasa
			Memastikan tersedianya Transportasi Laut Antar Teluk Dalam dengan Pulau Tello
	1.2 Terwujudnya hunian yang layak dan lingkungan permukiman yang tertata, serta tersedianya gedung pemerintahan yang representatif untuk mendukung kehidupan masyarakat yang lebih bermartabat dan pelayanan publik yang berkualitas	Penyediaan hunian layak bagi masyarakat serta pembangunan gedung pemerintahan yang representatif	Peningkatan akses masyarakat terhadap hunian yang layak melalui pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni
			Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) permukiman secara merata dan berkelanjutan
			Penataan kawasan permukiman kumuh dan rawan bencana menuju lingkungan hunian yang sehat, aman, dan tertata
			Pembangunan gedung-gedung pemerintahan yang representatif dan ramah lingkungan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik Revitalisasi dan pemeliharaan gedung pemerintahan yang ada agar tetap fungsional dan layak digunakan Peningkatan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyediaan perumahan dan fasilitas permukiman
2	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi seluruh masyarakat		
	2.1 Meningkatkan angka partisipasi sekolah hingga 13 tahun	Penguatan Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun	Mengembangkan teknik perencanaan kebutuhan tenaga pengajar
			Meningkatkan sarana prasarana pendidikan
			Meningkatkan status sekolah menjadi ramah anak
			Memenuhi kebutuhan guru bimbingan konseling di setiap sekolah
			Meningkatkan sinergitas antara sekolah dan keluarga
			Peningkatan akses dan kualitas layanan perpustakaan

Tujuan/Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
(1)		(2)	(3)
	2.2 Meningkatkan kualitas tenaga pendidik	Peningkatan mutu guru melalui inovasi pembelajaran, dukungan sarana-prasarana, dan kesejahteraan tenaga pendidik	Menerapkan Metode Pengajaran Terkini/ Terbaru
			Meningkatkan Kualitas dan Kesejahteraan Guru
	2.3 Meningkatkan jumlah lulusan SMA sederajat yang melanjutkan ke pendidikan tinggi	Mendorong Masyarakat Melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi	Memberikan Beasiswa Kepada Lulusan SMA Sederajat Berprestasi Untuk Melanjutkan Pendidikan Kejenjang Perguruan Tinggi
	2.4 Meningkatkan kompetensi pencari kerja	Peningkatan Kompetensi Pencari Kerja Melalui Kursus dan Balai Latihan Kerja	Membangun Balai Latihan Kerja
			Memfasilitasi kursus berbasis keterampilan dan keahlian bagi pencari kerja
			Melaksanakan Program Three in One (Pelatihan, Perkuliahan dan Pekerjaan dalam satu paket)
3	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat untuk mewujudkan warga Nias Selatan yang sehat jasmani dan rohani		
	3.1 Menurunkan prevalensi stunting pada balita sebagai upaya peningkatan gizi dan kesehatan anak secara berkelanjutan	Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting	Memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil dan balita
			Menyediakan data kesehatan ibu hamil dan bayi yang aktual
			Memprioritaskan penyediaan infrastuktur sanitasi dan air bersih di lokasi khusus stunting
			Meningkatkan peran masyarakat dalam pencegahan dan penuntasan stunting
	3.2 Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat secara merata dan berkeadilan	Peningkatan Akses Layanan Kesehatan Universal	Meningkatkan Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan
		Penguatan Infrastruktur Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan kualitas Public Service Care (PSC): Ambulance 24 Jam
			Meningkatkan Kualitas Layanan Rumah Sakit layak rujukan di Kabupaten Nias Selatan
			Memenuhi kebutuhan Dokter Spesialis
			Memfasilitasi dana pendidikan kesehatan bagi masyarakat di wilayah Kepulauan Batu melalui CSR Perusahaan
			Meningkatkan kulitas layanan fasilitas kesehatan
	3.3 Meningkatkan kualitas hidup keluarga dalam tatanan masyarakat yang harmonis, berkeadilan gender, ramah anak, serta ditopang oleh sistem kesejahteraan sosial yang inklusif dan berkelanjutan	Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga	Mengurangi Angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga
			Mengurangi Jumlah Pernikahan di Bawah Umur
			Meningkatkan kualitas layanan kesejahteraan sosial yang menjangkau kelompok rentan, miskin, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan anak-anak.

Tujuan/Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
(1)		(2)	(3)
4	Peningkatan pendapatan perkapita masyarakat melalui penguatan ekonomi berbasis potensi lokal secara berkelanjutan		
	4.1 Meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan secara berkelanjutan	Mewujudkan Ketahanan Pangan melalui Pengelolaan Pertanian dan Perikanan yang Berkelanjutan	Meningkatkan Produktivitas Pertanian sebagai Sumber Ketahanan Pangan
			Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya
			Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pokok untuk Ketahanan Pangan Masyarakat
			Membangun dan Meningkatkan Infrastruktur Pertanian dan Perikanan
	4.2 Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang inklusif, berkeadilan, dan mandiri berbasis sumber daya lokal	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Sumber Daya Lokal dan Berdaya Saing	Mendorong Pertumbuhan dan Penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
			Meningkatkan Kemudahan Izin Berusaha dan Regulasi yang Mendukung Usaha Kecil
			Memperluas Akses Permodalan dan Insentif bagi UMKM
			Meningkatkan Daya Saing UMKM dalam Pasar melalui inovasi dan digitalisasi
			Memperluas inklusi keuangan dengan meningkatkan akses masyarakat ke lembaga keuangan formal dan alternatif.
			Mendorong penguatan koperasi melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, akses terhadap pembiayaan dan pasar, serta integrasi koperasi dalam rantai pasok berbasis potensi unggulan daerah guna memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.
	4.3 Mengoptimalkan pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan berbasis potensi lokal	Mengoptimalkan Potensi Wisata sebagai Sektor Unggulan Perekonomian Daerah	Menetapkan dan Mengembangkan Destinasi Wisata Unggulan
			Meningkatkan Aksesibilitas dan Infrastruktur Pendukung Pariwisata
			Mengembangkan Promosi dan Pemasaran Wisata yang Inovatif dan Berbasis Digital
			Mendorong Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Wisata
			Mendorong pengelolaan sampah dan energi ramah lingkungan di destinasi wisata untuk menciptakan wisata hijau dan berkelanjutan.
5	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel dalam rangka percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.		
	5.1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, berintegritas, berbasis digital, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital, Berintegritas, dan Berorientasi Kinerja untuk Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Transformasi Digital dan Penguatan Sistem Akuntabilitas
			Peningkatan Kapasitas ASN dan Pelayanan Berbasis Masyarakat

Tujuan/Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
(1)		(2)	(3)
		Meningkatkan sinergi dengan lembaga penegak hukum dalam pencegahan dan penegakan hukum, serta menata regulasi daerah yang adaptif, jelas, dan mendukung pelaksanaan pembangunan secara efektif	Memperkuat Sinergi dengan Aparat Penegak Hukum dalam Pencegahan dan Penegakan Hukum
			Penataan regulasi daerah agar lebih sederhana, selaras dengan hukum nasional, serta mendukung investasi dan pelayanan publik.
			Penyusunan produk hukum daerah yang transparan, partisipatif, dan berbasis data.
6	Peningkatan ketahanan sosial budaya dan pelestarian lingkungan hidup		
	6.1 Meningkatnya pelestarian budaya daerah yang berkelanjutan melalui penguatan identitas lokal dan pemajuan kebudayaan daerah	Melestarikan budaya daerah sebagai identitas dan kearifan lokal	Mengoptimalkan Inventarisasi Budaya dan Cagar Budaya sebagai Warisan Daerah
			Melaksanakan Revitalisasi Budaya dan Cagar Budaya untuk Pelestarian dan Pengembangan
	6.2 Meningkatnya kualitas dan daya dukung lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Layanan Pengelolaan Persampahan di Perkotaan dan Destinasi Wisata
			Revitalisasi dan Optimalisasi Fungsi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) secara Berkelanjutan
			Meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana melalui sistem peringatan dini, peran masyarakat, dan infrastruktur tangguh bencana
	6.3 Meningkatnya kerukunan umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat yang berpijak pada Pancasila, demokrasi, dan HAM	Memperkokoh kerukunan Umat Beragama dalam Bingkai “Nias Selatan Rumah Kita"	Meningkatkan Pembinaan Keagamaan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN)
			Memperkuat Kerukunan Umat Beragama melalui Fasilitasi Forum Keagamaan
			Penguatan kelembagaan dan regulasi untuk menciptakan tatanan sosial yang damai, harmonis, demokratis, dan menghormati hak asasi manusia

3.2.2. Penahapan Pembangunan RPJMD

Arah kebijakan tahunan merupakan penjabaran operasional dari strategi pembangunan daerah yang bertujuan memberikan fokus dalam pelaksanaan pembangunan selama periode RPJMD. Arah kebijakan ini dirumuskan untuk memastikan strategi pembangunan dapat dijalankan secara lebih terarah dan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan arah kebijakan tahunan didasarkan pada identifikasi permasalahan dan isu strategis daerah. Setiap arah kebijakan diarahkan untuk mendukung pencapaian target kinerja, khususnya pada tingkat outcome, melalui

intervensi yang tepat pada sektor dan jenjang yang relevan. Arah kebijakan tahunan Kabupaten Nias Selatan dari Tahun 2026 hingga Tahun 2030 dilaksanakan secara bertahap dan terintegrasi, sesuai dengan tahapan pembangunan lima tahunan dalam RPJMD. Setiap tahun

Tabel 3.6
Penahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2025-2029

Tahap 1 (Tahun 2026)	Tahap 2 (Tahun 2027)	Tahap 3 (Tahun 2028)	Tahap 4 (Tahun 2029)	Tahap 5 (Tahun 2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan	**Percepatan**	**Pemantapan**	**Integrasi dan Ekspansi**	**Perwujudan**
Konsolidasi kebijakan, penyempurnaan perencanaan, dan pembangunan fondasi infrastruktur dasar (jalan, jembatan, air bersih, listrik, telekomunikasi) secara merata di wilayah strategis	Percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar, penguatan konektivitas antar-kawasan, serta optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang telah dibangun	Pemantapan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi publik yang andal, aman, dan terjangkau untuk mendukung mobilitas masyarakat dan perekonomian daerah	Integrasi sistem transportasi antar-wilayah, perluasan jangkauan infrastruktur, dan penguatan keterhubungan wilayah guna mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan	Perwujudan Nias Selatan Masyarakat Adil Makmur, Berdaya Saing, Inovatif, Berkelanjutan dan Lestari Berkeadaban
Peningkatan produktivitas dan efisiensi sektor unggulan daerah (pertanian, perikanan, pariwisata) disertai pemetaan potensi unggulan desa dan sektor prioritas (pertanian, perikanan, UMKM, pariwisata)	Pembangunan dan optimalisasi fasilitas pendukung ekonomi rakyat, peningkatan akses pasar, serta penguatan rantai pasok sektor unggulan	Pemantapan dan peningkatan nilai tambah sektor unggulan melalui diversifikasi produk lokal bernilai tinggi, pengembangan sentra industri kecil, dan penguatan promosi produk unggulan	Penguatan regulasi untuk menjamin keberlanjutan pembangunan ekonomi, integrasi ekonomi digital, dan perluasan jaringan perdagangan antar-daerah hingga akses ke pasar ekspor	
Penyediaan akses pendidikan dan layanan kesehatan yang merata di seluruh wilayah, disertai pemetaan kebutuhan SDM di bidang pendidikan, kesehatan, dan keterampilan kerja sesuai potensi lokal	Peningkatan kapasitas melalui pelatihan, peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, serta penguatan fasilitas pendukung pendidikan dan kesehatan	Pemantapan kualitas tenaga kerja melalui sertifikasi kompetensi, peningkatan profesionalisme, dan pelaksanaan program kesehatan preventif yang berkelanjutan	Integrasi pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri lokal, pengembangan SDM unggul di sektor prioritas daerah, serta penguatan jejaring kerja sama antar-lembaga pendidikan dan industri	
Penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas layanan publik melalui pemetaan sistem tata kelola, kebutuhan digitalisasi, dan penguatan perencanaan pembangunan daerah	Pembangunan dan optimalisasi sistem e-government, peningkatan transparansi data publik, serta penguatan kapasitas dan profesionalisme aparatur	Optimalisasi pelayanan publik berbasis digital dan transparansi, serta pemantapan kinerja layanan publik dengan peningkatan akuntabilitas keuangan daerah	Integrasi data lintas sektor dan pengembangan pelayanan terpadu satu pintu yang melibatkan partisipasi masyarakat, untuk mewujudkan tata kelola yang efektif dan inklusif	

Penahapan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025–2029 dirancang untuk menjawab kebutuhan pembangunan secara sistematis, berjenjang, dan berkesinambungan. Setiap tahap memiliki fokus, prioritas, serta capaian yang akan menjadi dasar bagi tahap berikutnya. Dengan demikian, pembangunan daerah dapat berlangsung secara terarah dan konsisten dalam mewujudkan Visi Kabupaten Nias Selatan *"Masyarakat Adil Makmur, Berdaya Saing, Inovatif, Berkelanjutan, dan Lestari Berkeadaban."*

a. Tahap 1 – Penguatan (Tahun 2026)

Tahap pertama merupakan landasan awal pembangunan daerah. Fokus utama diarahkan pada konsolidasi kebijakan, harmonisasi perencanaan lintas sektor, dan pembangunan fondasi infrastruktur dasar di wilayah strategis.

Infrastruktur yang menjadi prioritas meliputi peningkatan kualitas jalan dan jembatan untuk membuka keterisolasian desa, penyediaan akses air bersih yang lebih merata, perluasan jaringan listrik ke wilayah terpencil, serta peningkatan akses telekomunikasi sebagai sarana konektivitas digital.

Pada sektor ekonomi, pembangunan dititikberatkan pada peningkatan produktivitas dan efisiensi sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, pariwisata, serta UMKM. Upaya ini dilakukan melalui pemetaan potensi unggulan desa, peningkatan kapasitas produksi, serta pemberdayaan pelaku usaha lokal.

Di bidang sosial, prioritas pembangunan adalah penyediaan akses dasar pendidikan dan kesehatan secara merata, terutama pada wilayah pedesaan dan pulau-pulau terluar. Pemetaan kebutuhan SDM pendidikan, kesehatan, dan keterampilan kerja juga dilakukan untuk menyiapkan dasar pengembangan SDM di tahap selanjutnya.

Dalam aspek pemerintahan, tahap ini diarahkan pada penguatan tata kelola dengan pemetaan sistem tata kelola daerah, kebutuhan digitalisasi, serta penyusunan rencana penguatan kapasitas aparatur. Tahap ini menjadi pondasi untuk pembangunan yang lebih cepat dan luas di tahap berikutnya.

b. Tahap 2 – Percepatan (Tahun 2027)

Tahap kedua merupakan fase percepatan pembangunan dengan menitikberatkan pada peningkatan kualitas dan perluasan jangkauan infrastruktur dasar. Pembangunan diarahkan pada peningkatan konektivitas antar-kawasan, baik di wilayah daratan maupun antar-pulau, sehingga mendukung integrasi ekonomi dan sosial.

Pada sektor ekonomi, fokus diarahkan pada pembangunan fasilitas pendukung ekonomi rakyat, seperti pasar, gudang penyimpanan hasil pertanian dan perikanan, serta sarana distribusi produk lokal. Penguatan rantai pasok sektor unggulan juga dilakukan untuk meningkatkan daya saing produk daerah dan memperluas akses pasar.

Di bidang SDM, tahap ini menekankan peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan tenaga kesehatan melalui pelatihan dan pengembangan profesionalisme. Penyediaan sarana pendukung pendidikan dan kesehatan terus ditingkatkan, sementara pelatihan keterampilan kerja diberikan kepada masyarakat untuk memperkuat daya saing tenaga kerja lokal.

Tata kelola pemerintahan diperkuat melalui pembangunan dan optimalisasi sistem e-government. Transparansi data publik diperluas, dan kapasitas aparatur ditingkatkan untuk mendukung pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

c. Tahap 3 – Pemantapan (Tahun 2028)

Tahap ketiga adalah fase pemantapan pembangunan. Pada tahap ini, infrastruktur transportasi publik mulai dioptimalkan agar dapat berfungsi secara andal, aman, dan terjangkau. Transportasi publik yang memadai menjadi sarana penting untuk mendukung mobilitas masyarakat, aktivitas perekonomian, serta akses layanan sosial.

Di sektor ekonomi, fokus diarahkan pada peningkatan nilai tambah melalui diversifikasi produk lokal bernilai tinggi, pengembangan sentra industri kecil, serta penguatan promosi produk unggulan daerah ke pasar yang lebih luas. Upaya ini bertujuan agar sektor unggulan tidak hanya produktif, tetapi juga kompetitif di tingkat regional maupun nasional.

Dalam pembangunan SDM, dilakukan pemantapan kualitas tenaga kerja melalui program sertifikasi kompetensi, peningkatan profesionalisme, serta pelaksanaan program kesehatan preventif secara berkelanjutan. Hal ini ditujukan agar masyarakat Nias Selatan memiliki daya saing kerja yang lebih tinggi.

Di bidang pemerintahan, pelayanan publik berbasis digital dioptimalkan agar lebih transparan, mudah diakses, dan mampu meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah. Pemantapan kinerja layanan publik dilakukan untuk menjawab tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat dan berkualitas.

d. Tahap 4 – Integrasi dan Ekspansi (Tahun 2029)

Tahap keempat merupakan fase integrasi dan ekspansi pembangunan. Infrastruktur transportasi antarwilayah diintegrasikan untuk memperkuat keterhubungan antar-kawasan. Perluasan jangkauan infrastruktur dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, khususnya dalam membuka akses kawasan potensial baru.

Dalam sektor ekonomi, regulasi diperkuat untuk menjamin keberlanjutan pembangunan. Integrasi ekonomi digital mulai diwujudkan untuk mempermudah transaksi, memperluas akses pasar, serta mendorong keterhubungan perdagangan antar-daerah hingga ke pasar ekspor.

Pada aspek SDM, integrasi pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri lokal menjadi prioritas, dengan tujuan menciptakan tenaga kerja unggul yang sesuai dengan permintaan pasar. Selain itu, jejaring kerja sama antar-lembaga pendidikan dan industri diperkuat untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal.

Di bidang pemerintahan, pembangunan diarahkan pada integrasi data lintas sektor dan pengembangan pelayanan terpadu satu pintu yang inklusif. Hal ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola yang lebih efektif, efisien, dan partisipatif dengan melibatkan peran masyarakat.

e. Tahap 5 – Perwujudan (Tahun 2030)

Tahap terakhir merupakan fase perwujudan hasil pembangunan daerah. Pada tahap ini, cita-cita pembangunan diwujudkan melalui penguatan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai pada tahap sebelumnya. Kabupaten Nias Selatan ditargetkan mampu mencapai kondisi masyarakat yang adil, makmur, berdaya saing, inovatif, berkelanjutan, dan lestari berkeadaban.

Fase ini bukan hanya menandai pencapaian indikator pembangunan, tetapi juga menjadi refleksi atas keberhasilan pembangunan daerah dalam menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Keberhasilan ini tercermin melalui meningkatnya kualitas hidup masyarakat, berkurangnya kesenjangan antarwilayah, terjaganya kelestarian lingkungan, serta terbangunnya tata kehidupan sosial yang berkeadaban.

3.2.3. Program-Program Prioritas Daerah

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menetapkan sasaran pembangunan yang dijabarkan ke dalam program-program prioritas Bupati dan Wakil Bupati tahun 2025–2030.

Program prioritas ini menjadi panduan bagi perangkat daerah dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan selama lima tahun ke depan. Pelaksanaan program tersebut diarahkan untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat, mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan layanan dasar, dan mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.

3.2.3.1. Misi 1 "Membangun dan mengembangkan infrastruktur daerah yang terpadu dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat".

Pembangunan infrastruktur menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempercepat pertumbuhan wilayah. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan fokus untuk membangun infrastruktur yang saling terhubung, efisien, dan merata antar wilayah.

Untuk menjawab misi tersebut, ditetapkan dua sasaran utama sebagai berikut:

1. Meningkatkan konektivitas wilayah melalui peningkatan aksesibilitas infrastruktur jalan, jembatan, dan moda transportasi untuk mendukung mobilitas penduduk, distribusi barang dan jasa, serta pelayanan dasar.

   Sasaran ini dilaksanakan melalui dua program prioritas:

   - Memastikan Kualitas Jalan dan Jembatan yang Layak dan Aman (1)
   - Mendorong Konektivitas atau Keterhubungan Antar Wilayah (2)

   Melalui program ini, Pemerintah Daerah membangun dan memperbaiki jalan serta jembatan yang tersebar di berbagai wilayah, baik di pusat kecamatan, kawasan produksi, maupun daerah terpencil. Peningkatan kualitas jalan bertujuan untuk memperlancar akses menuju pusat pemerintahan, sekolah, puskesmas, pelabuhan, dan pasar.

   Selain itu, pembangunan transportasi darat dan laut juga menjadi perhatian. Akses jalan darat yang memadai akan menghubungkan desa-desa dengan pusat aktivitas ekonomi, sementara transportasi laut yang lebih tertata, seperti pengembangan pelabuhan penumpang dan dermaga rakyat, akan memperkuat hubungan antar pulau dan mendukung distribusi barang kebutuhan pokok, terutama ke wilayah-wilayah yang hanya dapat dijangkau melalui laut.

2. Terwujudnya hunian yang layak dan lingkungan permukiman yang tertata, serta tersedianya gedung pemerintahan yang representatif untuk mendukung kehidupan masyarakat yang lebih bermartabat dan pelayanan publik yang berkualitas

   Sasaran ini dilaksanakan melalui program prioritas:

   - Penyediaan Hunian Layak (3)

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan tempat tinggal masyarakat, termasuk bantuan rumah layak huni, penataan kawasan permukiman, serta pembangunan gedung pemerintahan yang lebih baik dan fungsional. Dengan demikian, masyarakat dapat tinggal di lingkungan yang aman, sehat, dan nyaman, serta mendapat pelayanan publik yang optimal dari sarana pemerintahan yang memadai.

Tabel berikut memuat misi, sasaran, program prioritas, dan kegiatan strategis yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025–2029.

Tabel 3.7
Kegiatan Strategis Misi 1
"Membangun dan mengembangkan infrastruktur daerah yang terpadu dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat"

Sasaran RPJMD	Prioritas Daerah	Kegiatan Strategis	Lokasi	Target	Satuan	Perangkat Daerah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap infrastruktur jalan, jembatan, dan transportasi lainnya untuk mendukung mobilitas dan pembangunan daerah	Memastikan Kualitas Jalan/ Jembatan Yang Layak dan Aman (1)	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten	Jl. Siofabanua	11,8	Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
			Jl. Somambawa-Idanotae	9,9	Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
			Jl. Hilizamurugo	8,5	Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
			Jl. Sifalagosusua	5,1	Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
			Jl. Soi	15,4	Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
			Jl. Nitanokara	9,2	Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
			Jl. Tuindrao Godu	7,7	Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
			Jl. Mazino-Hilimondregeraya	14,1	Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
			Jl. Ex Propinsi	2,8	Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
			Jl. Siwalawa	4,3	Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
			Jl. Bawogosali	7,3	Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
			Jl. Mazo	10,4	Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
			Jl. Umbunasi	10,5	Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
			Jl. Boronadu	4,2	Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
			Jl. Bahombowo	6	Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
			Jl. Soliga-Balodano	8	Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
			Jl. Togizita Oladano	11,7	Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
			Jl. Sambulu	4,9	Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	

Sasaran RPJMD	Prioritas Daerah	Kegiatan Strategis	Lokasi	Target	Satuan	Perangkat Daerah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Jl. Lazafahowu-Hilifalago	6,1	Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
			Jl. Lolosoni	8	Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
			Jl. Gitemeso	2,6	Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
			Jl. Ringroad Tello	14,6	Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
			Jl. Eho-Tebolo	11,4	Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
			Jl. Uluidanotae-Ulunoyo	12,6	Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
			Jl. Susua-Aramo	19,9	Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
			Jl. Hilimegai-Ulunoyo	15,5	Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
			Jl. Lahusa Balaekha-Mazino	8,7	Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
			Jl. Fanayama-Hilimondregeraya	5	Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
			Jl. Mazo-Susua	4,7	Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
			Jl. Uluidanotae-Idanotae	6,6	Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
			Jl. Hiliuso	3,5	Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
			Jl. Lalimanawa	2,6	Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		Penyelenggaraan Jembatan Kabupaten	Pembangunan Jembatan Masio	90	Meter	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
			Pembangunan Jembatan Kecil dekat Ari Terjun Helaowo	8	Meter	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
			Pembangunan jembatan sungai Ri'i di Ruas Jalan Harenoro	15	Meter	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
			Pembangunan Jembatan Idano Mbolo (Lahusa)	17	Meter	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
			Pembangunan jembatan Gantung Sungai Lumbui Melayu Kecamatan Hibala	14	Meter	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	

Sasaran RPJMD	Prioritas Daerah	Kegiatan Strategis	Lokasi	Target	Satuan	Perangkat Daerah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Mendorong konektivitas/ keterhubungan antar wilayah (2)	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Teluk Dalam	1	Unit	Dinas Perhubungan, PUPR	
		Pembangunan Terminal tipe C di Kecamatan	Gomo, Lahusa, Lolowau	3	Unit	Dinas Perhubungan	
		Penyediaan Pelabuhan Pengumpan Lokal di Kecamatan Kepulauan	Labuhan Hiu, Bale, Bais, Eho, Pono, Simuk	6	Unit	Dinas Perhubungan	
		Penyediaan tempat parkir di Los Pekan Kecamatan	Nias Selatan	6	Unit	Dinas Perhubungan	
		Penyediaan tempat parkir di lokasi tujuan wisata	Nias Selatan	11	Unit	Dinas Perhubungan	
		Pengadaan dan Pemasangan Rambu - Rambu Lalu Lintas	Nias Selatan	50	Unit	Dinas Perhubungan	
		Memberikan Belanja Subsidi Kapal kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yang melayani penyeberangan dari Teluk Dalam ke Pulau - Pulau Batu dan antar Pulau -Pulau Batu ke Pulau sekitarnya.	Nias Selatan	1	Tahun	Dinas Perhubungan	
		Mendorong pembangunan Bandara Silambo	Luahagundre Maniamolo	1	Unit	Dinas Perhubungan	
		Koordinasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Bandara Lasondre	Pulua-Pulau Batu	1	Unit	Dinas Perhubungan	
Terwujudnya hunian yang layak dan lingkungan permukiman yang tertata, serta tersedianya gedung pemerintahan yang representatif untuk mendukung kehidupan masyarakat yang lebih bermartabat dan pelayanan publik yang berkualitas	Penyediaan Hunian Layak (3)	Pembangunan Baru Rumah Tidak Layak Huni	Nias Selatan	50	Unit	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	

Sasaran RPJMD	Prioritas Daerah	Kegiatan Strategis	Lokasi	Target	Satuan	Perangkat Daerah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Nias Selatan	60	Unit	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		Peningkatan jalan lingkungan	Teluk Dalam, Gomo, Amandraya	1.080	Meter	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		Pembangunan drainase lingkungan	Luahagundre Maniamolo	90	Meter	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		Penyediaan dan penataan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di setiap kecamatan	Nias Selatan	35	Kec.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		Pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor pemerintahan	Pembangunan Kantor Camat Pulau-Pulau Batu Utara	1	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
			Pembangunan Kantor Camat Pulau-Pulau Batu Timur	1	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
			Pembangunan Kantor Camat Hibala	1	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
			Pembangunan Kantor Camat Pulau-Pulau Batu Barat	1	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
			Pembangunan Kantor Camat Onohazumba	1	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
			Pembangunan Gedung Kantor Pemerintahan	1	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	

3.2.3.2. Misi 2 "Membangun manusia yang berkualitas dan berkepribadian unggul melalui pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia siap kerja dan siap merintis usaha sendiri".

Membangun manusia yang berkualitas dan berkepribadian unggul melalui pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia siap kerja dan siap merintis usaha sendiri." Untuk menjawab misi tersebut, ditetapkan empat sasaran utama sebagai berikut:

1. Meningkatkan angka partisipasi sekolah hingga 13 tahun
2. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik

   Kedua sasaran ini dilaksanakan melalui program prioritas:

   - Penguatan Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun (4)

     Program ini bertujuan untuk menjamin akses pendidikan dasar dan menengah bagi seluruh anak usia sekolah hingga 13 tahun, mulai dari jenjang PAUD hingga SMA/sederajat. Pemerintah Daerah akan mendorong peningkatan daya tampung dan kualitas sekolah, penyediaan sarana-prasarana pendidikan, serta pemerataan tenaga pendidik yang kompeten di seluruh wilayah. Program ini juga mencakup peningkatan kapasitas dan kesejahteraan guru sebagai kunci mutu pembelajaran.
3. Meningkatkan jumlah lulusan SMA sederajat yang melanjutkan ke pendidikan tinggi

   Sasaran ini dijalankan melalui program prioritas:

   - Pendidikan yang Berkualitas untuk Menghasilkan Satu Keluarga Satu Sarjana (5)

     Program ini ditujukan untuk membuka akses seluas-luasnya bagi lulusan SMA/sederajat dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Melalui dukungan beasiswa daerah, bimbingan akademik, serta kerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi dan dunia usaha, diharapkan akan tercapai satu sarjana dalam setiap keluarga sebagai motor penggerak perubahan sosial dan ekonomi.
4. Meningkatkan kompetensi pencari kerja

   Sasaran ini diwujudkan melalui program prioritas:

   - SDM Siap Kerja dan Siap Merintis Usaha Sendiri (6)

     Program ini fokus pada peningkatan keterampilan kerja, pelatihan vokasional, kewirausahaan, serta sertifikasi kompetensi bagi angkatan

kerja usia produktif. Pemerintah Daerah akan menggandeng Balai Latihan Kerja (BLK), sektor swasta, dan lembaga pelatihan untuk memperkuat kemampuan teknis dan kewirausahaan masyarakat. Dengan demikian, lulusan pendidikan dan pencari kerja memiliki alternatif pilihan untuk bekerja atau menciptakan lapangan kerja secara mandiri.

Tabel berikut memuat misi, sasaran, program prioritas, dan kegiatan strategis yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025–2029

Tabel 3.8
Kegiatan Strategis Misi 2
"Membangun manusia yang berkualitas dan berkepribadian unggul melalui pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia siap kerja dan siap merintis usaha sendiri"

Sasaran RPJMD	Prioritas Daerah	Kegiatan Strategis	Lokasi	Target	Satuan	Perangkat Daerah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatkan angka partisipasi sekolah hingga 13 tahun	Penguatan Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun (4)	Penguatan pendidikan inklusif dan ramah anak	Nias Selatan	500	Satuan pendidikan	Dinas Pendidikan	
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Nias Selatan	325	Ruang	Dinas Perpustakaan	
		Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Nias Selatan	500	Ruang	Dinas Pendidikan	
		Pembangunan Laboratorium	Nias Selatan	250	Ruang	Dinas Pendidikan	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan utilitas sekolah	Nias Selatan	250	Ruang	Dinas Pendidikan	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Nias Selatan	1.600	Ruang	Dinas Pendidikan	
		Pengembangan Bahan Pustaka	Nias Selatan	30.000	Eksemplar	Dinas Perpustakaan	
		Pengembangan Layanan Perpustakaan Elektronik	Nias Selatan	1	Paket	Dinas Perpustakaan	
		Layanan Mobil Perpustakaan Keliling	Nias Selatan	300	Sekolah/ Desa	Dinas Perpustakaan	
Meningkatkan kualitas tenaga pendidik	Penguatan Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun (4)	Pemetaan dan Pemerataan Guru	Nias Selatan	5	Kegiatan	Dinas Pendidikan	
		Fasilitasi Sertifikasi dan Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Nias Selatan	1.500	Orang	Dinas Pendidikan	
		Pelatihan koding dan artifisial	Nias Selatan	5.200	Orang	Dinas Pendidikan	
		Pelatihan pembelajaran mendalam	Nias Selatan	2.600	Orang	Dinas Pendidikan	
Meningkatkan jumlah lulusan SMA sederajat yang melanjutkan ke pendidikan tinggi	Pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan Satu Keluarga Satu Sarjana (5)	Memberikan Beasiswa Kepada Lulusan SMA Sederajat yang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi ber-Akreditasi minimal "B".	Nias Selatan	400	Orang	Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan	
Meningkatkan kompetensi pencari kerja	SDM Siap Kerja dan Siap Merintis Usaha Sendiri (6)	Melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah kejuruan untuk mempersiapkan pelajar menjadi pekerja atau pelaku usaha	Nias Selatan	49	Sekolah	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Pendidikan Provinsi	

Sasaran RPJMD	Prioritas Daerah	Kegiatan Strategis	Lokasi	Target	Satuan	Perangkat Daerah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Melakukan kerjasama dengan pengguna jasa tenaga kerja	Nias Selatan/ Luar Nias Selatan	50	Badan Usaha	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Kebudayaan Pariwisata Dan Kepemudaan Olahraga	
		Memfasilitasi pelatihan kepada pencari kerja	Nias Selatan/ Luar Nias Selatan	500	Orang	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	

3.2.3.3. Misi 3 "Memastikan Kemudahan Akses Kesehatan Untuk Rakyat Guna Menciptakan Manusia Yang Sehat Jasmani dan Rohani".

Dalam rangka mewujudkan misi tersebut, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menetapkan tiga sasaran utama pembangunan di bidang kesehatan yang diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar, meningkatkan kualitas gizi masyarakat, serta menciptakan lingkungan keluarga yang sehat dan sejahtera.

1. Menurunkan prevalensi stunting pada balita sebagai upaya peningkatan gizi dan kesehatan anak secara berkelanjutan.

   Sasaran ini dilaksanakan melalui program prioritas:

   - Menuju Zero Stunting (7)

     Program ini bertujuan untuk mencegah dan menurunkan angka stunting pada balita dengan pendekatan intervensi gizi spesifik dan sensitif, termasuk edukasi gizi, pemantauan tumbuh kembang anak, pemberian makanan tambahan, serta peningkatan kesadaran keluarga akan pentingnya pola asuh dan sanitasi lingkungan yang baik.
2. Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat secara merata dan berkeadilan

   Sasaran ini dijalankan melalui dua program prioritas:

   - Perlindungan Bagi Kelompok Rentan (8)

     Program ini difokuskan pada peningkatan pelayanan kesehatan bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, bayi, lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin melalui jaminan pelayanan dasar, posyandu aktif, dan dukungan fasilitas kesehatan.
   - Penguatan Infrastruktur Kesehatan Masyarakat (9)

     Melalui program ini, Pemerintah Daerah akan memperluas cakupan layanan dengan membangun atau merehabilitasi puskesmas, pustu, dan fasilitas kesehatan lainnya, melengkapi peralatan medis, serta meningkatkan kapasitas tenaga medis di daerah terpencil.
3. Meningkatkan kualitas hidup keluarga dalam tatanan masyarakat yang harmonis, berkeadilan gender, ramah anak, serta ditopang oleh sistem kesejahteraan sosial yang inklusif dan berkelanjutan

   Sasaran ini diwujudkan melalui program prioritas:

   - Keluarga Sehat dan Harmonis (10)

Program ini diarahkan untuk memperkuat ketahanan keluarga melalui layanan konseling, pendidikan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta penguatan peran institusi keluarga dalam menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan mendukung tumbuh kembang anak.

Tabel berikut memuat misi, sasaran, program prioritas, dan kegiatan strategis yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025–2029

Tabel 3.9
Kegiatan Strategis Misi 3
"Memastikan Kemudahan Akses Kesehatan Untuk Rakyat Guna Menciptakan Manusia Yang Sehat Jasmani dan Rohani"

Sasaran RPJMD	Prioritas Daerah	Kegiatan Strategis	Lokasi	Target	Satuan	Perangkat Daerah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Menurunkan prevalensi stunting pada balita sebagai upaya peningkatan gizi dan kesehatan anak secara berkelanjutan	Menuju zero stunting (7)	Pemberian makanan tambahan bagi Ibu hamil resiko KEK dan KEK, dan balita bermasalah gizi	Lokus stunting (sesuai Perbup)	45360	Orang	Dinas Kesehatan	
		Pelaksanaan Gerakan Cegah Stunting	Kab. Nias Selatan	175	Kecamatan	Dinas Kesehatan	
		Peningkatan sarana dan prasarana di posyandu	Kab. Nias Selatan	486	Unit	Dinas Kesehatan	
		Kalibrasi antropometri	Kab. Nias Selatan	180	Puskesmas	Dinas Kesehatan	
		Pengelolaan dan Pengembangan Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Lokus Stunting	1300	RT	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Lokus Stunting	1040	RT	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		Edukasi Gizi melalui DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting) DI Kampung KB	Kab. Nias Selatan	249	Desa/tahun	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
		Pemberian bantuan percepatan penurunan stunting	Desa dan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Nias Selatan	3140	Orang	Dinas Sosial	
Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat secara merata dan berkeadilan	Perlindungan Bagi Kelompok Rentan (8)	Penyediaan dana dan penambahan kepesertaan layanan jaminan kesehatan	Kab. Nias Selatan	25000	orang	Dinas Kesehatan	

Sasaran RPJMD	Prioritas Daerah	Kegiatan Strategis	Lokasi	Target	Satuan	Perangkat Daerah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Pemberian bantuan berupa pelatihan keterampilan kewirausahaan bagi penyandang disabilitas	Desa dan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Nias Selatan	175	Orang	Dinas Sosial	
		Pemberian bantuan permakanan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis	Desa dan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Nias Selatan	9283	Orang	Dinas Sosial	
		Pemberian bantuan alat bantu kemandirian dan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas	Desa dan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Nias Selatan	235	Orang	Dinas Sosial	
		Pemberian bantuan permakanan bagi korban bencana	Desa dan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Nias Selatan	100	Orang	Dinas Sosial	
		Pemberian pelatihan mitigasi bencana untuk mengurangi risiko dan dampak dari bencana	Desa dan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Nias Selatan	50	Kampung	Dinas Sosial	
	Penguatan Infrastruktur Kesehatan Masyarakat (9)	Perekrutan jenis dokter spesialis yang dibutuhkan di RSUD	RSUD Nias Selatan	8	Orang	Dinas Kesehatan	
		Perekrutan jenis dokter spesialis yang dibutuhkan di RSUD	RSUD Lukas Hilisimaetano	10	Orang	Dinas Kesehatan	

Sasaran RPJMD	Prioritas Daerah	Kegiatan Strategis	Lokasi	Target	Satuan	Perangkat Daerah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Advokasi kepada perusahaan untuk membuat MOU dalam rangka pemberian beasiswa pendidikan dokter kepada masyarakat di Kepulauan Batu	Masyarakat Kepulauan	10	Orang	Dinas Kesehatan	
		Pelayanan PSC 24 jam	Kab. Nias Selatan	10	Puskesmas	Dinas Kesehatan	
		Pengembangan Rumah Sakit Daerah dan Fasilitas pendukungnya	Kab. Nias Selatan	10	Rumah sakit	Dinas Kesehatan	
		Pengembangan Puskesmas dan Fasilitas pendukungnya	Kab. Nias Selatan	10	Puskesmas	Dinas Kesehatan	
Meningkatkan kualitas hidup keluarga dalam tatanan masyarakat yang harmonis, berkeadilan gender, ramah anak, serta ditopang oleh sistem kesejahteraan sosial yang inklusif dan berkelanjutan	Keluarga Sehat dan Harmonis (10)	Sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	Kab. Nias Selatan	1120	Orang	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
		Peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	Kab. Nias Selatan	1120	Orang	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
		Kegiatan Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Kab. Nias Selatan	1120	Orang	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
		KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak	Kab. Nias Selatan	1750	Orang	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
		Pelayanan KB MOW	Kab. Nias Selatan	200	Orang	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	

3.2.3.4. Misi 4 "Membangun ekonomi daerah yang berkeadilan, inklusif, inovatif, kreatif, dan mandiri berbasis potensi sumber daya lokal".

Untuk menjawab misi ini, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menetapkan tiga sasaran utama yang fokus pada peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah, penguatan ekonomi masyarakat berbasis lokal, serta pengembangan pariwisata berkelanjutan yang mampu menggerakkan ekonomi secara merata.

1. Meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan secara berkelanjutan
   Sasaran ini dilaksanakan melalui program prioritas:
   - Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Berkelanjutan (11)
     Program ini bertujuan untuk meningkatkan hasil produksi pertanian dan perikanan melalui penerapan teknologi tepat guna, pemberdayaan petani dan nelayan, penguatan kelembagaan ekonomi lokal, serta perbaikan infrastruktur pendukung seperti irigasi, jalan usaha tani, dan sarana perikanan. Selain itu, ketahanan pangan masyarakat juga ditingkatkan melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan diversifikasi produk pertanian lokal.
2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang inklusif, berkeadilan, dan mandiri berbasis sumber daya lokal
   Sasaran ini diwujudkan melalui program prioritas:
   - Penguatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Sumber Daya Lokal (12)
     Program ini mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, serta industri rumahan berbasis potensi lokal. Dukungan diberikan dalam bentuk pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, pembukaan pasar lokal dan digital, serta penguatan jejaring pelaku usaha. Pendekatan pemberdayaan masyarakat dilakukan agar ekonomi tumbuh dari bawah secara inklusif dan berkeadilan.
3. Mengoptimalkan pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan berbasis potensi lokal
   Sasaran ini dilaksanakan melalui program prioritas:
   - Optimalisasi Potensi Wisata (13)
     Program ini diarahkan untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi baru daerah. Pemerintah Daerah akan mengembangkan kawasan wisata unggulan, memperbaiki infrastruktur

dan aksesibilitas ke destinasi wisata, serta meningkatkan kapasitas pelaku pariwisata lokal. Pelestarian budaya dan lingkungan juga menjadi bagian integral dari pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Tabel berikut memuat misi, sasaran, program prioritas, dan kegiatan strategis yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025–2029

Tabel 3.10
Kegiatan Strategis Misi 4
"Membangun ekonomi daerah yang berkeadilan, inklusif, inovatif, kreatif, dan mandiri berbasis potensi sumber daya lokal"

Sasaran RPJMD	Prioritas Daerah	Kegiatan Strategis	Lokasi	Target	Satuan	Perangkat Daerah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan secara berkelanjutan	Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Berkelanjutan (11)	Membangun sentral perikanan	Kec. Teluk Dalam; Kec. Lahusa; Kec. Somambawa; Kec. P.P. Batu Timur; Kec. Tanah Masa; Kec. P.P. Batu Utara; Kec. P.P. Batu Barat, Kec. P.P. Batu; Kec. Hibala; Kec. Simuk; Kec. Luahagundre Maniamolo	5	Sentral	Dinas Perikanan, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	
		Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kec. P.P. Batu Timur; Kec. P.P. Batu; Kec. Teluk Dalam	3	Unit	Dinas Perikanan	
		Pengembangan perikanan budidaya laut	Kec. P.P. Batu; Kec. P.P. Batu Timur; Kec. Tanah Masa; Kec. P.P. Batu Utara; Kec. Hibala; Kec. Simuk; Kec. P.P. Barat	7	Kecamatan	Dinas Perikanan	
		Pengembangan perikanan budidaya air tawar	Kec. Lolomatua; Kec. Gomo Kec. Ulunoyo; Kec. Uluidanotae; Kec. Susua; Kec. Ulususua; Kec. Mazo; Kec. Siduaori; Kec. Huruma	9	Kecamatan	Dinas Perikanan	
		Pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Kec. Teluk Dalam; Kec. Lahusa; Kec. Somambawa; Kec. P.P. Batu Timur; Kec. Tanah Masa; Kec. P.P. Batu Utara; Kec. P.P. Batu Barat, Kec. P.P. Batu; Kec. Hibala; Kec. Simuk; Kec. Luahagundre Maniamolo	5	Sentral	Dinas Perikanan	
		Pembangunan Central Pangan/Terminal Agribisnis	Kecamatan Teluk Dalam, Kecamatan OOU, Kecamatan Siduaori, Kecamatan Pulau Pulau Batu, Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara	5	Unit	Dinas Pertanian, Dinas UMKM, Dinas Perindag	
		pemetaan kawasan/pengembangan kawasan, lahan pertanian dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan, kegiatan pemetaan evaluasi kesesuaian lahan	Nias Selatan	1	paket	Dinas Pertanian	

Sasaran RPJMD	Prioritas Daerah	Kegiatan Strategis	Lokasi	Target	Satuan	Perangkat Daerah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Kegiatan pembangunan jalan usaha tani	Nias Selatan	27	km	Dinas Pertanian	
		Pembangunan balai benih dan pupuk pada kawasan pertanian terpadu	Nias Selatan	1	unit	Dinas Pertanian	
		Pembangunan Brigade Alsintan pada Kawasan Pertanian Terpadu	Nias Selatan	1	unit	Dinas Pertanian	
		Pembangunan sarana pendukung (gudang alat dan gudang benih) pada kawasan pertanian terpadu	Nias Selatan	1	unit	Dinas Pertanian	
		Pembangunan pengolahan pupuk organik pada Kawasan pertanian terpadu	Nias Selatan	1	unit	Dinas Pertanian	
		Pembangunan sarana pendukung lainnya pada Kawasan pertanian terpadu	Nias Selatan	1	unit	Dinas Pertanian, Dinas PU	
		Pembangunan kandang sapi untuk produksi bibit ternak pada Kawasan Pertanian Terpadu	Nias Selatan	1	unit	Dinas Pertanian	
		Pembangunan kandang ayam sebagai produksi bibit ayam pada kawasan pertanian terpadu	Nias Selatan	1	unit	Dinas Pertanian	
		Pembangunan sarana dan prasarana Ekowisata/Agrowisata pada Kawasan Pertanian Terpadu	Nias Selatan	1	unit	Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata, Dinas PU	
		Pembangunan rumah potong hewan pada Kawasan Pertanian Terpadu	Nias Selatan	1	unit	Dinas Pertanian	

Sasaran RPJMD	Prioritas Daerah	Kegiatan Strategis	Lokasi	Target	Satuan	Perangkat Daerah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Pembangunan Balai Produksi Bibit Ternak dalam Kawasan Pertanian Terpadu	Nias Selatan	1	unit	Dinas Pertanian	
		Pembangunan balai pelatihan dan penyuluhan dalam kawasan pertanian terpadu	Nias Selatan	1	unit	Dinas Pertanian	
		Kegiatan reaksi cepat pengendalian hama dan penyakit tanamaan	Nias Selatan	1	paket	Dinas Pertanian	
		Pembangunan lumbung pangan masyarakat	Nias Selatan	1	Unit	Dinas Pangan	
		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Nias Selatan	500	Keluarga	Dinas Pangan	
		Pengadaan Cadangan Pangan	Nias Selatan	25.000	Ton	Dinas Pangan	
		Penyaluran Cadangan Pangan	Nias Selatan	50.000	Ton	Dinas Pangan	
		Gerakan pangan murah	Nias Selatan	50	Ton	Dinas Pangan	
		Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan (Penanganan Kerawanan Pangan)	Nias Selatan	15	Desa	Dinas Pangan	
		Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Nias Selatan	50	Kelompok	Dinas Pangan	
Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang inklusif, berkeadilan, dan mandiri berbasis sumber daya lokal	Penguatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Sumber Daya Lokal (12)	Pengawasan ketersediaan kebutuhan pokok di wilayah Kabupaten Nias Selatan	Kabupaten Nias Selatan	60	Kegiatan	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
		Pelaksanaan kegiatan Pasar Murah	Kabupaten Nias Selatan	10	Kegiatan	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
		Pemasaran komoditas unggulan daerah dan peningkatan pemanfaatan produk daerah	Kabupaten Nias Selatan	10	Kegiatan	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	

Sasaran RPJMD	Prioritas Daerah	Kegiatan Strategis	Lokasi	Target	Satuan	Perangkat Daerah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Pembangunan, Revitalisasi, dan Penyediaan Sarana Perdagangan Lainnya	Kabupaten Nias Selatan	15	Kegiatan	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
		Pelaksanaan kegiatan pelatihan dan fasilitasi kepada IKM	Kabupaten Nias Selatan	5	Kegiatan	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
		Pengumpulan data industri ke dalam SIINAS	Kabupaten Nias Selatan	30	Kegiatan	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
		Penyusunan Dokumen IPRO (Investment Project Ready to Offer) Kabupaten Nias Selatan	Kab. Nias Selatan	1	Dokumen	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP	
		Pembangunan Gedung Mall Pelayanan Publik (MPP) Di Kabupaten Nias Selatan	Kab. Nias Selatan	1	Unit	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP	
		Implementasi Inovasi Si Abang JADI (Jemput Antar Dokumen Izin)	Teluk Dalam, Fanayama, Toma, Onolalu dan Luahagundre Maniamolo	5	Lokasi	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP	
		Peningkatan Capaian PAD melalui Pengawasan kepada Para Pelaku Usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.	Kab. Nias Selatan	1	Kegiatan	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP	
		Memfasilitasi inkubasi UMKM kepada pelaku usaha Hilirisasi	Nias Selatan	100	Badan Usaha	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		Meningkatkan pengawasan dan penilaian terhadap praktek perkoperasian	Nias Selatan	488	Badan Usaha	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		Menyusun Road Map hilirisasi komoditas unggulan	Nias Selatan	1	Dokumen	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Bapperida, Dinas Perikanan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Kebudayaan Pariwisata Dan Kepemudaan Olahraga	

Sasaran RPJMD	Prioritas Daerah	Kegiatan Strategis	Lokasi	Target	Satuan	Perangkat Daerah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Mendirikan pusat logistik UMKM	Nias Selatan	1	Unit	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
Mengoptimalkan pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan berbasis potensi lokal	Optimalisasi Potensi Wisata (13)	Pembangunan dan Penataan Pantai Sorake	Luahagundre Maniamolo	1	Lokasi	Dinas Kebudayaan Pariwisata Dan Kepemudaan Olahraga	
		Pembangunan dan Penataan Desa Bawomataluo sebagai cagar budaya nasional, provinsi dan kabupaten	Fanayama	1	Lokasi	Dinas Kebudayaan Pariwisata Dan Kepemudaan Olahraga	
		Dukungan Kejuaraan Surfing Internasional Nias Pro	Luahagundre Maniamolo	5	Event	Dinas Kebudayaan Pariwisata Dan Kepemudaan Olahraga	
		Penataan objek wisata	Desa Wisata Hilisimaetano, Pantai Ladeha, Pantai Sibaranun, Pantai Naru'u, Pantai Bais, Teluk Dalam, dan Situs Megalit Tundrumbaho	7	Lokasi	Dinas Kebudayaan Pariwisata Dan Kepemudaan Olahraga	
		Keikutsertaan Pameran	-	2	Kegiatan	Dinas Kebudayaan Pariwisata Dan Kepemudaan Olahraga	

3.2.3.5. Misi 5 "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan bebas dari korupsi dengan menjunjung tinggi penegakan hukum dan menjamin hak-hak masyarakat".

Untuk mewujudkan misi ini, ditetapkan sasaran pembangun yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, berintegritas, berbasis digital, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sasaran ini diarahkan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur, serta pemanfaatan teknologi informasi yang mendukung pelayanan publik yang cepat, terbuka, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Adapun program prioritas yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah:

- Penguatan Reformasi Birokrasi (14)

  Program ini mencakup kegiatan peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, pembenahan tata kelola kelembagaan dan manajemen SDM aparatur, serta percepatan transformasi digital melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Tujuannya adalah menciptakan birokrasi yang profesional, adaptif, dan melayani.
- Mendukung Kepatuhan Hukum (15)

  Program ini bertujuan memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal, membangun budaya hukum di masyarakat dan lingkungan birokrasi, serta memastikan keterbukaan informasi dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Termasuk dalam program ini adalah peningkatan edukasi hukum, advokasi, serta penegakan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tabel berikut memuat misi, sasaran, program prioritas, dan kegiatan strategis yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025–2029

Tabel 3.11
Kegiatan Strategis Misi 5
"Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan bebas dari korupsi dengan menjunjung tinggi penegakan hukum dan menjamin hak-hak masyarakat"

Sasaran RPJMD	Prioritas Daerah	Kegiatan Strategis	Lokasi	Target	Satuan	Perangkat Daerah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, berintegritas, berbasis digital, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.	Penguatan Reformasi Birokrasi (14)	Menyusun road map reformasi birokrasi	Nias Selatan	1	Dokumen	Sekretariat Daerah	
		Melakukan fasilitasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nias Selatan	1	Laporan	Sekretariat Daerah	
		Survey terhadap kualitas pelayanan publik	Nias Selatan	1	Dok/Lap	Sekretariat Daerah	
		Melakukan Publikasi Kegiatan Pemerintah Daerah	Nias Selatan	5	Kegiatan	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Mengelola Satu Data Tingkat Kabupaten	Nias Selatan	5	Layanan	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Mengadakan Jaringan Internet pada OPD di Lingkup Kabupaten	Nias Selatan	29	Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Menyusun Regulasi Tata Kelola SPBE	Nias Selatan	1	Dokumen	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Melakukan Kerjasama dalam pengembangan Smartcity	Nias Selatan	1	Dokumen	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Penyusunan dokumen APBD/ P.APBD tepat waktu	Nias Selatan	10	Perda	Badan Pengelolaan Kuangan dan Pendapatan Daerah	
		Penyusunan laporan pelaksanaan APBD sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan anggaran.	Nias Selatan	5	Laporan	Badan Pengelolaan Kuangan dan Pendapatan Daerah	
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Nias Selatan	5	Laporan	Badan Pengelolaan Kuangan dan Pendapatan Daerah	
		Optimalisasi pendapatan asli daerah melalui validasi data objek dan subjek pajak serta penguatan sistem digitalisasi	Nias Selatan	1	Layanan	Badan Pengelolaan Kuangan dan Pendapatan Daerah	
		Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis data	Bapperida	11	Dokumen	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	

Sasaran RPJMD	Prioritas Daerah	Kegiatan Strategis	Lokasi	Target	Satuan	Perangkat Daerah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Penyusunan database peraturan daerah dan hasil evaluasi sebagai bahan monitoring regulasi berkelanjutan	Bapperida	5	Laporan	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	
		Penyusunan dokumen rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi daerah	Bapperida	1	Dokumen	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	
		Penguatan dukungan layanan administrasi, persidangan, dan fasilitasi DPRD secara profesional dan berbasis digital untuk meningkatkan kepuasan anggota DPRD	Nias Selatan	35	Anggota DPRD	Sekretariat DPRD	
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN dengan pemberian beasiswa di bidang strategis	PT Terkait	10	Orang	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	LPPD atau Puslatbang LAN regional	585	Orang	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Menyelenggarakan Pengawasan Internal untuk Pencegahan Korupsi	Nias Selatan	6	Laporan	Inspektorat	
		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Nias Selatan	5	Rekomendasi	Inspektorat	
		Digitalisasi dan Integrasi Layanan Dukcapil	Nias Selatan	461	Desa/ Kelurahan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
		Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat	Nias Selatan	25	Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan	
		Pembentukan BKAD (Badan Kerjasama antar Desa	Nias Selatan	10	BKAD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan	
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)	Nias Selatan	4590	Orang	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan	
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES)	Nias Selatan	2295	Orang	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan	
		Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI)	Nias Selatan	315	Orang	Dinas Perpustakaan	
	Mendukung Kepatuhan Hukum (15)	Melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah	Nias Selatan	5	Kegiatan	Sekretariat Daerah	

3.2.3.6. Misi 6 "Mewujudkan ketahanan sosial budaya yang berkeadaban dan pelestarian lingkungan hidup"

Misi ini bertujuan untuk membangun masyarakat yang tangguh secara sosial dan budaya, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagai bagian integral dari pembangunan berkelanjutan. Pendekatan pembangunan diarahkan pada penguatan identitas lokal, peningkatan harmoni sosial, serta pengelolaan sumber daya alam yang lestari dan berkeadilan.

Adapun sasaran dan program prioritas dari Misi 6 adalah sebagai berikut:

1. **Sasaran:**

   Meningkatnya pelestarian budaya daerah yang berkelanjutan melalui penguatan identitas lokal dan pemajuan kebudayaan daerah.

   Program Prioritas:

   Pelestarian Budaya Daerah (16)

   Program ini mencakup kegiatan seperti pendataan dan dokumentasi warisan budaya, revitalisasi situs budaya, perlindungan tradisi dan ekspresi budaya lokal, serta pembinaan komunitas seni dan budaya, termasuk pelibatan generasi muda. Tujuan utama dari program ini adalah memperkuat identitas daerah, meningkatkan kebanggaan masyarakat terhadap nilai-nilai budaya lokal, serta memperkuat ketahanan budaya dalam menghadapi perubahan zaman.

2. **Sasaran:**

   Meningkatnya kualitas dan daya dukung lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

   Program Prioritas:

   Lingkungan Hidup Berkualitas (17)

   Program ini berfokus pada pelaksanaan kegiatan pengelolaan limbah dan sampah secara terpadu, pelestarian ekosistem hutan dan pesisir, rehabilitasi lahan kritis, serta upaya penanggulangan pencemaran dan pengendalian kerusakan lingkungan. Selain itu, program ini juga mencakup peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan serta penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim.

3. **Sasaran:**

   Meningkatnya kerukunan umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat yang berpijak pada Pancasila, demokrasi, dan HAM.

   Program Prioritas:

   Kerukunan Umat Beragama (Nias Selatan Rumah Kita) (18)

   Program ini diarahkan untuk memperkuat keharmonisan kehidupan antarumat beragama melalui fasilitasi dialog lintas agama, penguatan kelembagaan forum kerukunan umat beragama, dan pendidikan nilai-nilai toleransi, demokrasi, serta hak asasi manusia. Kegiatan ini bertujuan membangun masyarakat yang inklusif, rukun, dan damai, sekaligus mencegah potensi konflik yang berbasis perbedaan agama atau keyakinan.

Tabel berikut memuat misi, sasaran, program prioritas, dan kegiatan strategis yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025–2029

Tabel 3.12
Kegiatan Strategis Misi 6
"Mewujudkan ketahanan sosial budaya yang berkeadaban dan pelestarian lingkungan hidup"

Sasaran RPJMD	Prioritas Daerah	Kegiatan Strategis	Lokasi	Target	Satuan	Perangkat Daerah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya pelestarian budaya daerah yang berkelanjutan melalui penguatan identitas lokal dan pemajuan kebudayaan daerah	Pelestarian Budaya Daerah (16)	Pengusulan OPK menjadi WBtB	Kabupaten Nias Selatan	11	Objek	Dinas Kebudayaan Pariwisata Dan Kepemudaan Olahraga	
		Festival Kebudayaan Daerah	Kabupaten Nias Selatan	5	Kegiatan	Dinas Kebudayaan Pariwisata Dan Kepemudaan Olahraga	
		Pelatihan/Workshop bagi pelaku seni dan budaya	Kabupaten Nias Selatan	80	Orang/Kegiatan	Dinas Kebudayaan Pariwisata Dan Kepemudaan Olahraga	
		Sosialisasi dan Verifikasi Pendaftaran Objek diduga Cagar Budaya	Orahili Fau, Lahusa Fau, Hilinawalo Mazino, Bawolowalani, Hiliamaigila,Hiliamaetaniha, Bawogosali, Lahusa Satua Idanotae, Rumah Sakit Lukas, Bintuang, Hayo,	50	Kegiatan	Dinas Kebudayaan Pariwisata Dan Kepemudaan Olahraga	
		Sidang Penetapan Cagar Budaya	Orahili Fau, Lahusa Fau, Hilinawalo Mazino, Bawolowalani, Hiliamaigila,Hiliamaetaniha, Bawogosali, Lahusa Satua Idanotae, Rumah Sakit Lukas, Bintuang, Hayo,	50	Kegiatan	Dinas Kebudayaan Pariwisata Dan Kepemudaan Olahraga	
		Penyusunan Kajian Konservasi	Desa Bawomataluo, Desa Hilinawalo Fau, Hilinawalo Mazino, Sifalago Gomo, Tundrumbaho, Bitaha dan Tetegewo	5	Kegiatan	Dinas Kebudayaan Pariwisata Dan Kepemudaan Olahraga	
		Konservasi Cagar Budaya	Desa Bawomataluo, Desa Hilinawalo Fau, Hilinawalo Mazino, Sifalago Gomo, Tundrumbaho, Bitaha dan Tetegewo	5	Kegiatan	Dinas Kebudayaan Pariwisata Dan Kepemudaan Olahraga	

Sasaran RPJMD	Prioritas Daerah	Kegiatan Strategis	Lokasi	Target	Satuan	Perangkat Daerah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Pembentukan kelompok sanggar budaya di satuan pendidikan dan pengadaan perlengkapan sanggar	Nias Selatan	5	Kegiatan	Dinas Pendidikan	
Meningkatnya kualitas dan daya dukung lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Lingkungan Hidup Berkualitas (17)	Pembangunan dan Pengadaan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu	Fanayama, Lahusa, Lolowau, Gomo, Amandraya dan Pulau-Pulau Batu	6	Unit	Dinas Lingkungan Hidup	
		Peningkatan Capaian Target PAD melalui Retribusi Sampah dan Pengelolahan sampah	Kabupaten Nias Selatan	3000	Rumah Tangga	Dinas Lingkungan Hidup	
		Penetapan dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	Kabupaten Nias Selatan	39	Ruang Terbuka Hijau	Dinas Lingkungan Hidup	
		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan TPST di Kecamatan Lahusa	1	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
			Pembangunan TPST di Kecamatan Gomo	1	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
			Pembangunan TPST di Kecamatan Amandraya	1	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
			Pembangunan TPST di Kecamatan Lolowau	1	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
Meningkatnya kerukunan umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat yang berpijak pada Pancasila, demokrasi, dan HAM	Kerukunan Umat Beragama (Nias Selatan Rumah Kita) (18)	Fasilitasi Pelaksanaan peringatan hari besar Nasional dan Daerah	Kab. Nias Selatan	15000	Orang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

Sasaran RPJMD	Prioritas Daerah	Kegiatan Strategis	Lokasi	Target	Satuan	Perangkat Daerah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Sosialisasi Pendidikan Politik bagi Masyarakat dan Pemilih Pemula	Kecamatan diwilayah Kab. Nias Selatan	3000	Orang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Fasilitasi pelaksanaan peringatan hari besar keagamaan	Kab. Nias Selatan	30	Kegiatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (RAN P4GN)	Kecamatan diwilayah Kabupaten Nias Selatan	2500	Orang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama	Kab. Nias Selatan	5	Tahun	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Pembinaan dan pengawasan aktivitas Organisasi Kemasyarakatan	Kecamatan diwilayah Kabupaten Nias Selatan	140	Orang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Fasilitasi kegiatan FORKOPIMDA Kab. Nias Selatan	Kab. Nias Selatan	35	Dokumen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Pelaksanaan Patroli Gangguan Trantibum, Pengamanan Kegiatan Keagamaan, Daerah dan Nasional serta Pengawalan Pejabat Daerah dan Tamu VIP/VVIP	Desa dan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Nias Selatan	450	Laporan	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Nias Selatan	
		Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa	Desa dan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Nias Selatan	175	Laporan	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Nias Selatan	
		Penanganan atas Pelanggaran Perda dan Perkada Kab. Nias Selatan	Desa dan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Nias Selatan	450	Laporan	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Nias Selatan	
		Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran	Kabupaten Nias Selatan	7	Unit	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Nias Selatan	
		Melatih kesiapsiagaan masyarakat, aparat pemerintah daerah, serta personnel stakeholder terkait dalam menghadapi bencana	Kabupaten Nias Selatan	1250	Orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

Sasaran RPJMD	Prioritas Daerah	Kegiatan Strategis	Lokasi	Target	Satuan	Perangkat Daerah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Melaksanakan operasi bersama Tim Gabungan (BPBD, Basarnas, TNI-AL, POLAIRUD, dan Masyarakat) dalam kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Kabupaten Nias Selatan	500	Orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

Delapan belas program prioritas merupakan fondasi utama sekaligus menjadi prioritas daerah dalam perencanaan pembangunan lima tahun ke depan. Program-program ini dirancang untuk memastikan tercapainya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan melalui pendekatan yang terarah, inklusif, dan berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat.

Dalam rangka menjawab setiap misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, Pemerintah Daerah merumuskan program-program prioritas yang terukur dan realistis. Program ini dilaksanakan secara terpadu oleh perangkat daerah sebagai bagian integral dari upaya mewujudkan pembangunan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil (outcome). Dengan demikian, setiap program prioritas tidak hanya menjadi instrumen pembangunan, tetapi juga cerminan komitmen kepala daerah dalam menghadirkan perubahan yang nyata dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Tabel 3.13
Program Prioritas RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029

Visi "Mewujudkan Masyarakat Adil Makmur, Berdaya Saing, Inovatif, Berkelanjutan dan Lestari Berkeadaban"

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Membangun dan mengembangkan infrastruktur daerah yang terpadu dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik			Indeks Infrastruktur Daerah (IID)(Skor)		
		Meningkatkan konektivitas wilayah melalui peningkatan aksesibilitas infrastruktur jalan, jembatan, dan moda transportasi untuk mendukung mobilitas penduduk, distribusi barang dan jasa, serta pelayanan dasar		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) (Indeks)		
				Rasio konektivitas kabupaten/kota (%)		
			Meningkatkan kualitas layanan transportasi darat	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota (Persentase)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				Rasio konektivitas perhubungan darat (%)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
			Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Rasio konektivitas perhubungan laut (%)	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pengadaan pelayanan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan LepasLandas Helikopter	Persentase Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (%)	2.15.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	
		Terwujudnya hunian yang layak dan lingkungan permukiman yang tertata, serta tersedianya gedung pemerintahan yang representatif untuk mendukung kehidupan masyarakat yang lebih bermartabat dan pelayanan publik yang berkualitas		Persentase Rumah Tangga dengan akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (Persentase)		
				Persentase Ketersediaan Gedung Pemerintahan (Persentase)		
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Jumlah bangunan gedung yang dibangun/ ditingkatkan/ direhabilitasi/ dilakukan pengawasan & penataan (Unit)	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
			Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Persentase kawasan Perumahan di kabupaten/kota ditangani (%)	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
			Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana dan terkena relokasi akibat program pemerintah	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota (%)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
				Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
Membangun manusia yang berkualitas dan berkepribadian unggul melalui pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia siap kerja dan siap merintis usaha sendiri	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi seluruh masyarakat			Indeks Pendidikan(Poin)		
		Meningkatkan angka partisipasi sekolah hingga 13 tahun		Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca SD (%)		
				Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca SMP (%)		
				Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi SD (%)		

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi SMP (%)		
				Harapan Lama Sekolah (Tahun)		
				Indeks pembangunan literasi masyarakat (Indeks)		
				Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		
			Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	
			Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
			Meningkatnya Partisipasi anak usia sekolah	Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS) (Persentase)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	
		Meningkatkan kualitas tenaga pendidik		Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)		
			Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidik	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya Partisipasi anak usia sekolah	Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS) (Persentase)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
		Meningkatkan jumlah lulusan SMA sederajat yang melanjutkan ke pendidikan tinggi		Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi ((%))		
			Meningkatnya kualitas kebijakan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		Meningkatkan kompetensi pencari kerja		Rasio Kewirausahaan Daerah (%)		
				Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja (Juta Rupiah/Tenaga Kerja)		
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
			Meningkatnya Pekerja Indonesia Yang Terlindungi	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ((%))	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
			Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
			Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Terkelolanya informasi tenaga kerja	Presentase pemenuhan kebutuhan perencanaan tenaga kerja makro, mikro di kabupaten nias selatan (%)	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	
Memastikan kemudahan akses kesehatan untuk rakyat guna menciptakan manusia yang sehat jasmani dan rohani	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat untuk mewujudkan warga Nias Selatan yang sehat jasmani dan rohani			Indeks Kesehatan(Poin)		
		Menurunkan prevalensi stunting pada balita sebagai upaya peningkatan gizi dan kesehatan anak secara berkelanjutan		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%)		
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (%)	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan dan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman (Persentase)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyaraka	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup) (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Meningkatnya Mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
			Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (Persentase)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
		Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat secara merata dan berkeadilan		Indeks Keluarga Sehat (Angka)		
				Indeks kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan (Nilai)		
				Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))		
				Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))		

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan dan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman (Persentase)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyaraka	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup) (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Meningkatnya Mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
			Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial (Persentase)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA (Persentase)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
			Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
			Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
		Meningkatkan kualitas hidup keluarga dalam tatanan masyarakat yang harmonis, berkeadilan gender, ramah anak, serta ditopang oleh sistem kesejahteraan sosial yang inklusif dan berkelanjutan		Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)		
				Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)		
				Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)		
				Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)		
				Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA) (Indeks)		
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam Pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
			Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial (Persentase)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
				Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA (Persentase)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
			Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (Persentase)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
			Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
			Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
			Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
			Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	TFR (Angka Kelahiran Total) (Jiwa)	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
Membangun ekonomi daerah yang berkeadilan, inklusif, inovatif, kreatif, dan mandiri berbasis potensi sumber daya lokal	Peningkatan pendapatan perkapita masyarakat melalui penguatan ekonomi berbasis potensi lokal secara berkelanjutan			PDRB Perkapita ADHK(Juta Rupiah)		
		Meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan secara berkelanjutan		Nilai Tukar Nelayan (NTN) (Indeks)		
				Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi) (Indeks)		
				Nilai Tukar Petani (NTP) (Indeks)		
				Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)		

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
			Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit ((%))	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan produksi tanaman hortikultura (Persentase)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Peningkatan produksi komoditas peternakan (Persentase)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Peningkatan Produksi tanaman pangan (Persentase)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor pola pangan harapan (Skor)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan (Persentase)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
				Persentase kelembagaan kelompok tani yang dibentuk dan beroperasi (Persentase)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
			Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase)	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
			Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase)	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	
			Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
			Meningkatnya Pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
				Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	
			Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
			Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri	persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator Pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RIPIP (%)	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
		Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang inklusif, berkeadilan, dan mandiri berbasis sumber daya lokal		Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (Persentase)		
				Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (Persentase)		
				Kontribusi UMKM terhadap PDRB (Persentase)		
				Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (%)		
				Indeks Akses Keuangan Daerah (Indeks)		

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit ((%))	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
			meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian (%)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
			Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
			Meningkatnya kualitas SDM Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
			Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang (Nilai)	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	
			Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase)	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	
			Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya Perizinan Berusaha Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri	persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator Pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RIPIP (%)	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
			Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
		Mengoptimalkan pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan berbasis potensi lokal		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)		
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
			meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan bebas dari korupsi dengan menjunjung tinggi penegakan hukum dan menjamin hak-hak masyarakat	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel dalam rangka percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.			Indeks Reformasi Birokrasi(Indeks)		
		Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, berintegritas, berbasis digital, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.		Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD (Indeks)		
				Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)		
				Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Indeks)		
				Nilai SAKIP (Nilai)		
				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)		
				Indeks Desa Membangun (IDM) (Indeks)		
				Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)		
				Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah (Poin)		
				Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)		
				Indeks Kepuasan Masyarakat (Predikat)		

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah (Nilai)		
				Indeks Reformasi Hukum (Indeks)		
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan (Skor)		
				Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)		
			Meningkatnya efektivitas kerjasama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase)	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	
			Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Persentase)	5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Indeks Diseminasi Informasi (%)	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
				Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
			Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
			Meningkatnya keselarasan RPJMD dengan RENSTRA PD	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan (Persentase)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Meningkatnya kualitas kebijakan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Meningkatnya Kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
				Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
				Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase)	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase)	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	
			Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemerintah Daerah (%)	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
			Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
			MENINGKATNYA KUALITAS PERSIDANGAN DAN KAJIAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN	Waktu penetapan perda APBD dan PAPBD (Tepat Waktu)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
			Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan bidang Administrasi Umum	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah (Persentase)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional (Persentase)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis (Persentase)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (Persentase)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Meningkatnya pemanfaatan riset kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Meningkatnya Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
			Meningkatnya Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Meningkatnya sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan dengan dokumen perencanaan lainnya	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan dokumen perencanaan lainnya	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA dengan dokumen perencanaan lainnya	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
			Meningkatnya Tata Kelola Pengembangan Karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
			Peningkatan Capaian Target Kinerja atas tugas pembinaan dan pengawasan pada setiap OPD	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
				Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
			Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
Mewujudkan ketahanan sosial budaya yang berkeadaban dan pelestarian lingkungan hidup	Peningkatan ketahanan sosial budaya dan pelestarian lingkungan hidup			Indeks Pemajuan Kebudayaan(Nilai)		

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Meningkatnya pelestarian budaya daerah yang berkelanjutan melalui penguatan identitas lokal dan pemajuan kebudayaan daerah		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) ((%))		
			meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Terlestarikannya cagar budaya (%)	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
			Terlestarikannya Bahasa dan Sastra Daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (Persentase)	1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	
		Meningkatnya kualitas dan daya dukung lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)		
			Meningkatnya Efektivitas kajian lingkungan hidup untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (Persentase)	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
			Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional (%)	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	
			meningkatnya tata kelola persampahan	Presentase pengurangan sampah kabupaten (%)	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Indeks Kualitas Udara (Indeks)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Indeks Kualitas Lahan (Indeks)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Meningkatnya kerukunan umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat yang berpijak pada Pancasila, demokrasi, dan HAM		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) ((%))		
				Indeks Demokrasi (*)		
				Indeks Harmoni Indonesia (Indeks)		
				Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum (Nilai)		
			Meningkatnya Etika dan Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik kepada masyarakat (Persentase)	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
			Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (Persentase)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
			Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) ((%))	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	
			Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
			Meningkatnya kualitas kebijakan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat, Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase penanganan tanggap bencana darurat (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
			Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
			Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
			Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masvarakat (Persentase)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

RPJMD

KABUPATEN NIAS SELATAN
TAHUN 2025–2029

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Program Perangkat Daerah

4.1.1. Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Dalam Mencapai Kinerja Pembangunan Daerah

Rencana program dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran strategis dari visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Bab III. Program-program ini disusun untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara terarah dan berkelanjutan, serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan urusan pemerintahan oleh perangkat daerah.

Sebagai bagian dari keseluruhan sistem perencanaan pembangunan daerah, Bab IV ini menjadi penghubung strategis antara perencanaan (Bab III) dan pengendalian serta evaluasi kinerja (Bab V). Program-program yang dirancang tidak hanya menjawab sasaran prioritas pembangunan daerah, tetapi juga akan dievaluasi kinerjanya secara berkala untuk menjamin efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaannya. Dengan demikian, Bab IV memiliki fungsi strategis dan operasional untuk memastikan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah yang berdampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Nias Selatan.

Program pembangunan daerah ini disusun secara sinkron dan selaras dengan program prioritas nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025–2029, serta RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029. Sinkronisasi ini dilakukan dengan tetap memperhatikan potensi, karakteristik wilayah, dan kebutuhan nyata masyarakat Kabupaten Nias Selatan, sehingga program yang dirancang benar-benar responsif, adaptif, dan berbasis bukti (evidence-based).

Selain itu, rencana program pada tahun 2030 juga diposisikan sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan pembangunan daerah. Program tahun 2030 menjadi pijakan awal dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2030 yang akan dilaksanakan pada awal periode kepemimpinan kepala daerah berikutnya (2030–2034). Dengan demikian, kesinambungan perencanaan pembangunan daerah dapat terjaga, sehingga

transisi kepemimpinan tidak mengurangi arah strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Nias Selatan.

Program-program tersebut akan dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yang menjadi pedoman operasional bagi setiap perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai urusan pemerintahan masing-masing.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan daerah, program perangkat daerah diklasifikasikan berdasarkan jenis urusan pemerintahan yang terdiri dari:

1. Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, mencakup 6 (enam) urusan utama yang menjadi prioritas dalam pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lainnya.
2. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, sebanyak 17 (tujuh belas) urusan, mencakup berbagai fungsi pendukung pemerintahan seperti perhubungan, koperasi, komunikasi, dan lainnya.
3. Urusan Pilihan, sebanyak 5 (lima) urusan yang disesuaikan dengan potensi unggulan lokal seperti pariwisata, kelautan dan perikanan, serta pertanian.
4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, terdiri dari 2 (dua) unsur seperti perencanaan dan keuangan daerah.
5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, meliputi 5 (lima) unsur seperti kepegawaian, pengadaan barang/jasa, arsip, statistik, dan persandian.
6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, terdiri dari 1 (satu) unsur, yaitu pengawasan internal.
7. Unsur Kewilayahan, 1 (satu) unsur yang berkaitan dengan tata ruang dan penataan wilayah.
8. Unsur Pemerintahan Umum, 1 (satu) unsur yang meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di daerah.
9. Non-Urusan, yaitu program-program yang tidak termasuk dalam urusan pemerintahan namun tetap memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah, seperti penanganan bencana dan pelayanan kebencanaan.

Rencana program ini disusun sebagai bagian dari mekanisme perencanaan pembangunan yang terintegrasi, terukur, dan berbasis hasil (result-

based), serta menjadi acuan penting dalam penyusunan dokumen anggaran dan pengendalian capaian pembangunan ke depan.

Program-program pembangunan yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025–2029 dipilih berdasarkan isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, serta kesesuaian dengan arah kebijakan nasional, provinsi, dan visi-misi Kepala Daerah. Pemilihan program dilakukan secara selektif dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Relevansi dengan kebutuhan masyarakat

   Program diprioritaskan untuk menjawab masalah yang paling mendesak, seperti rendahnya akses dan mutu pendidikan, tingginya angka stunting dan kematian ibu, keterbatasan infrastruktur dasar, serta kerentanan sosial masyarakat.
2. Dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan

   Setiap program diharapkan memberi manfaat nyata, misalnya peningkatan partisipasi sekolah, perbaikan gizi dan kesehatan masyarakat, kemantapan jalan, akses air bersih, penanganan kawasan kumuh, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
3. Penguatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola

   Sejumlah program diarahkan untuk memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan, penguatan kapasitas aparatur, serta penyediaan layanan publik yang akuntabel dan transparan.
4. Mendorong pemerataan dan keberlanjutan pembangunan

   Program dipilih agar dapat menjangkau seluruh wilayah, termasuk desa-desa terpencil, sekaligus memastikan keberlanjutan melalui pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan perlindungan lingkungan.
5. Kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah

   Seluruh program berkontribusi langsung pada sasaran yang telah dirumuskan dalam Bab III RPJMD, misalnya peningkatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, penguatan ketahanan pangan, serta pelestarian lingkungan hidup.

4.1.2. Indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tabel berikut menyajikan pagu indikatif dan program-program perangkat daerah untuk tahun 2025–2030. Informasi ini memberikan gambaran awal tentang rencana alokasi anggaran bagi setiap perangkat daerah guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025–2029.

Tabel 4.1
Pagu Indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2026-2030

Kode	Perangkat Daerah	Target Tahun					Total (5 Tahun)
		2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.01.0.00.0.00.01	Dinas Pendidikan	484.836.022.722,50	505.238.249.446,13	526.686.776.430,93	547.241.069.489,98	572.964.214.514,48	2.636.966.332.604,02
1.02.0.00.0.00.01	Dinas Kesehatan	129.456.504.025,00	131.628.532.050,00	134.482.594.850,00	135.199.939.500,00	140.068.987.820,00	670.836.558.245,00
1.03.0.00.0.00.01	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	145.597.466.841,08	138.869.194.173,97	199.581.892.816,51	165.782.446.411,33	276.116.574.352,35	925.947.574.595,24
1.04.0.00.0.00.01	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	4.400.000.000,00	4.400.000.000,00	4.400.000.000,00	3.400.000.000,00	4.400.000.000,00	21.000.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01	Satuan Polisi Pamong Praja	4.516.000.000,00	4.516.000.000,00	4.516.000.000,00	4.516.000.000,00	4.516.000.000,00	22.580.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	1.400.000.000,00	1.900.000.000,00	9.000.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01	Dinas Sosial	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.500.000.000,00	2.000.000.000,00	9.500.000.000,00
2.07.2.17.0.00.01	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7.400.000.000,00	7.400.000.000,00	7.400.000.000,00	7.400.000.000,00	7.400.000.000,00	37.000.000.000,00
2.08.2.14.0.00.02	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	14.500.000.000,00	15.000.000.000,00	74.500.000.000,00
2.09.3.27.0.00.01	Dinas Pangan	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.000.000.000,00	2.500.000.000,00	12.000.000.000,00
2.11.0.00.0.00.01	Dinas Lingkungan Hidup	6.403.000.000,00	6.403.000.000,00	6.403.000.000,00	6.403.000.000,00	6.403.000.000,00	32.015.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	15.000.000.000,00
2.13.0.00.0.00.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2.000.000.000,00	32.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	40.000.000.000,00
2.15.0.00.0.00.01	Dinas Perhubungan	6.500.000.000,00	6.750.000.000,00	7.000.000.000,00	6.750.000.000,00	7.500.000.000,00	34.500.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01	Dinas Komunikasi Dan Informatika	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	2.500.000.000,00	3.000.000.000,00	14.500.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00	7.000.000.000,00
2.22.2.19.3.26.02	Dinas Kebudayaan Pariwisata Dan Kepemudaan Olahraga	9.100.000.000,00	9.100.000.000,00	9.100.000.000,00	8.100.000.000,00	9.100.000.000,00	44.500.000.000,00
2.23.2.24.0.00.01	Dinas Perpustakaan dan Arsip	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00	7.000.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01	Dinas Perikanan	4.500.000.000,00	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	5.500.000.000,00	6.500.000.000,00	29.500.000.000,00
3.27.0.00.0.00.01	Dinas Pertanian	6.311.000.000,00	8.311.000.000,00	8.311.000.000,00	5.811.000.000,00	8.311.000.000,00	37.055.000.000,00

Kode	Perangkat Daerah	Target Tahun					Total (5 Tahun)
		2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.31.3.30.0.00.02	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00	7.000.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01	Sekretariat Daerah	35.258.270.318,00	37.258.270.318,00	39.258.270.318,00	41.258.270.318,00	41.258.270.318,00	194.291.351.590,00
4.02.0.00.0.00.01	Sekretariat DPRD	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	225.000.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	4.000.000.000,00	18.000.000.000,00
5.02.0.00.0.00.04	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	706.614.777.994,43	735.848.999.833,13	766.640.324.786,08	799.087.734.045,27	833.299.423.624,73	3.841.491.260.283,63
5.03.0.00.0.00.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	1.500.000.000,00	2.500.000.000,00	11.500.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01	Inspektorat	6.897.374.830,00	7.042.243.571,50	7.194.355.750,08	7.354.073.537,58	7.521.777.214,46	36.009.824.903,62
7.01.0.00.0.00.01	Kecamatan Lolomatua	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	1.500.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02	Kecamatan Gomo	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	1.500.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03	Kecamatan Lahusa	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	1.500.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04	Kecamatan Hibala	325.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00	1.625.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05	Kecamatan Pulau-Pulau Batu	1.155.000.000,00	1.155.000.000,00	1.155.000.000,00	1.155.000.000,00	1.155.000.000,00	5.775.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06	Kecamatan Teluk Dalam	1.155.000.000,00	1.155.000.000,00	1.155.000.000,00	1.155.000.000,00	1.155.000.000,00	5.775.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07	Kecamatan Amandraya	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	1.500.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08	Kecamatan Lolowau	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	1.500.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09	Kecamatan Susua	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	1.500.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10	Kecamatan Maniamolo	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	1.500.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11	Kecamatan Hilimegai	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	1.500.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12	Kecamatan Toma	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	1.500.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13	Kecamatan Mazino	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	1.500.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14	Kecamatan Umbunasi	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	1.500.000.000,00
7.01.0.00.0.00.15	Kecamatan Aramo	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	1.500.000.000,00

Kode	Perangkat Daerah	Target Tahun					Total (5 Tahun)
		2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7.01.0.00.0.00.16	Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur	325.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00	1.625.000.000,00
7.01.0.00.0.00.17	Kecamatan Mazo	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	1.500.000.000,00
7.01.0.00.0.00.18	Kecamatan Fanayama	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	1.500.000.000,00
7.01.0.00.0.00.19	Kecamatan Ulunoyo	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	1.500.000.000,00
7.01.0.00.0.00.20	Kecamatan Huruna	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	1.500.000.000,00
7.01.0.00.0.00.21	Kecamatan O'o'u	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	1.500.000.000,00
7.01.0.00.0.00.22	Kecamatan Onohazumba	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	1.500.000.000,00
7.01.0.00.0.00.23	Kecamatan Hilisalawa"Ahe	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	1.500.000.000,00
7.01.0.00.0.00.24	Kecamatan Ulususua	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	1.500.000.000,00
7.01.0.00.0.00.25	Kecamatan Sidua'ori	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	1.500.000.000,00
7.01.0.00.0.00.26	Kecamatan Somambawa	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	1.500.000.000,00
7.01.0.00.0.00.27	Kecamatan Boronadu	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	1.500.000.000,00
7.01.0.00.0.00.28	Kecamatan Simuk	325.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00	1.625.000.000,00
7.01.0.00.0.00.29	Kecamatan Pulau-Pulau Batu Barat	325.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00	1.625.000.000,00
7.01.0.00.0.00.30	Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara	325.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00	1.625.000.000,00
7.01.0.00.0.00.31	Kecamatan Tanah Masa	325.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00	1.625.000.000,00
7.01.0.00.0.00.32	Kecamatan Luahagundre Maniamolo	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	1.500.000.000,00
7.01.0.00.0.00.33	Kecamatan Onolalu	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	1.500.000.000,00
7.01.0.00.0.00.34	Kecamatan Uluidanotae	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	1.500.000.000,00
7.01.0.00.0.00.35	Kecamatan Idanotae	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	1.500.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	4.876.779.068,00	4.876.779.068,00	4.876.779.068,00	89.876.779.068,00	4.876.779.068,00	109.383.895.340,00
Total Belanja		**1.659.927.195.799,01**	**1.741.402.268.460,72**	**1.829.610.994.019,60**	**1.925.940.312.370,16**	**2.027.996.026.912,02**	**9.184.876.797.561,51**

Tabel 4.2
Program Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					485.036.022.723,000		505.438.249.446,000		526.886.776.431,000		547.441.069.490,000		573.164.214.515,000	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					255.521.022.723,000		260.521.022.723,000		265.521.022.723,000		265.521.022.723,000		265.521.022.723,000	
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan bidang Pendidikan	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah (Persentase)	78	82	86	255.521.022.723,000	90	260.521.022.723,000	94	265.521.022.723,000	96	265.521.022.723,000	100	265.521.022.723,000	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					228.415.000.000,000		243.817.226.723,000		259.565.753.708,000		279.870.046.767,000		305.343.191.792,000	
Meningkatnya Partisipasi anak usia sekolah	Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS) (Persentase)	54,10	56,40	58,70	228.415.000.000,000	61,00	243.817.226.723,000	63,30	259.565.753.708,000	65,60	279.870.046.767,000	68,00	305.343.191.792,000	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					500.000.000,000		500.000.000,000		1.100.000.000,000		1.350.000.000,000		1.500.000.000,000	
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	60	65	70	500.000.000,000	75	500.000.000,000	80	1.100.000.000,000	85	1.350.000.000,000	90	1.500.000.000,000	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					400.000.000,000		400.000.000,000		500.000.000,000		500.000.000,000		600.000.000,000	
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidik	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	30	33	38	400.000.000,000	42	400.000.000,000	46	500.000.000,000	50	500.000.000,000	55	600.000.000,000	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					200.000.000,000		200.000.000,000		200.000.000,000		200.000.000,000		200.000.000,000	
Terlestarikannya Bahasa dan Sastra Daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (Persentase)	10	20	30	200.000.000,000	40	200.000.000,000	50	200.000.000,000	60	200.000.000,000	70	200.000.000,000	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					129.456.504.025,000		131.628.532.050,000		134.482.594.850,000		135.199.939.500,000		140.068.987.820,000	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.096.504.025,000		9.068.532.050,000		8.296.594.850,000		9.139.939.500,000		9.208.987.820,000	
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan bidang kesehatan	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah (Persentase)	70	80	90	9.096.504.025,000	100	9.068.532.050,000	100	8.296.594.850,000	100	9.139.939.500,000	100	9.208.987.820,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					107.010.000.000,000		109.210.000.000,000		112.836.000.000,000		112.710.000.000,000		117.510.000.000,000	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyaraka	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup) (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	67	100	100	107.010.000.000,000	95	109.210.000.000,000	90	112.836.000.000,000	85	112.710.000.000,000	80	117.510.000.000,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	37,6	34,77	31,94		29,11		26,28		23,45		20,62		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					10.950.000.000,000		10.950.000.000,000		10.950.000.000,000		10.950.000.000,000		10.950.000.000,000	

SALINAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	40	50	60	10.950.000.000,000	70	10.950.000.000,000	80	10.950.000.000,000	90	10.950.000.000,000	100	10.950.000.000,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					400.000.000,000		400.000.000,000		400.000.000,000		400.000.000,000		400.000.000,000	
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan dan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman (Persentase)	50	55	60	400.000.000,000	65	400.000.000,000	70	400.000.000,000	75	400.000.000,000	80	400.000.000,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					2.000.000.000,000		2.000.000.000,000		2.000.000.000,000		2.000.000.000,000		2.000.000.000,000	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	-	50	55	2.000.000.000,000	60	2.000.000.000,000	65	2.000.000.000,000	70	2.000.000.000,000	75	2.000.000.000,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					145.597.466.841,340		138.869.194.173,960		199.581.892.816,520		165.782.446.411,330		276.116.574.352,350	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.350.120.000,000		4.115.120.000,000		8.295.120.000,000		4.045.120.000,000		12.610.120.000,000	
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan bidang Pekerjaan Umum	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah (Persentase)	70	80	80	4.350.120.000,000	90	4.115.120.000,000	90	8.295.120.000,000	90	4.045.120.000,000	100	12.610.120.000,000	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					11.000.000.000,000		16.300.000.000,000		21.600.000.000,000		16.900.000.000,000		24.100.000.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Persentase)	15	15	18	11.000.000.000,000	22	16.300.000.000,000	25	21.600.000.000,000	28	16.900.000.000,000	30	24.100.000.000,000	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob (Persentase)	25	25	30		35		40		45		50		1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Persentase)	77,50	77,50	82,50		87,50		92,50		97,50		100		1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					14.594.142.000,000		14.600.000.000,000		15.600.000.000,000		14.600.000.000,000		16.600.000.000,000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (%)	60,70	62	64	14.594.142.000,000	66	14.600.000.000,000	68	15.600.000.000,000	70	14.600.000.000,000	72	16.600.000.000,000	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					0,000		1.500.000.000,000		1.000.000.000,000		0,000		500.000.000,000	
Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional (%)	45,50	50,00	53,00	0,000	55,50	1.500.000.000,000	58,50	1.000.000.000,000	60,50	0,000	62,00	500.000.000,000	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					7.121.324.000,000		8.000.000.000,000		12.000.000.000,000		12.000.000.000,000		14.000.000.000,000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	11,74	13,50	15,50	7.121.324.000,000	17,50	8.000.000.000,000	19,50	12.000.000.000,000	21,50	12.000.000.000,000	23,00	14.000.000.000,000	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					3.159.586.560,000		3.500.000.000,000		6.072.237.490,770		5.415.765.279,330		9.068.858.816,660	
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Presentase drainase dalam kondisi baik (%)	55,80	65,50	70,00	3.159.586.560,000	75,00	3.500.000.000,000	80,00	6.072.237.490,770	85,00	5.415.765.279,330	90,00	9.068.858.816,660	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					10.876.222.000,000		5.100.000.000,000		15.100.000.000,000		10.100.000.000,000		20.100.000.000,000	
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Jumlah bangunan gedung yang dibangun/ ditingkatkan/ direhabilitasi/ dilakukan pengawasan & penataan (Unit)	5	5	5	10.876.222.000,000	5	5.100.000.000,000	5	15.100.000.000,000	5	10.100.000.000,000	5	20.100.000.000,000	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					93.696.072.281,340		84.849.826.900,210		119.264.535.325,750		102.521.561.132,000		178.487.595.535,690	
Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	30,93	30,93	33,93	93.696.072.281,340	36,93	84.849.826.900,210	39,93	119.264.535.325,750	42,93	102.521.561.132,000	45,93	178.487.595.535,690	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					100.000.000,000		100.000.000,000		450.000.000,000		100.000.000,000		450.000.000,000	
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	20	20	20	100.000.000,000	21	100.000.000,000	22	450.000.000,000	23	100.000.000,000	24	450.000.000,000	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(%)													
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					700.000.000,000		804.247.273,750		200.000.000,000		100.000.000,000		200.000.000,000	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota (%)	2,78	2,78	2,78	700.000.000,000	5,56	804.247.273,750	8,83	200.000.000,000	8,83	100.000.000,000	8,83	200.000.000,000	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					4.400.000.000,000		4.400.000.000,000		4.400.000.000,000		3.400.000.000,000		4.400.000.000,000	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					750.917.363,000		1.111.745.163,000		747.212.863,000		771.602.863,000		731.667.863,000	
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah (Persentase)	90	90	90	750.917.363,000	100	1.111.745.163,000	100	747.212.863,000	100	771.602.863,000	100	731.667.863,000	1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					1.000.000.000,000		788.254.700,000		1.000.000.000,000		600.000.000,000		1.000.000.000,000	
Terpenuhinya rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana dan terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100	100	100	1.000.000.000,000	100	788.254.700,000	100	1.000.000.000,000	100	600.000.000,000	100	1.000.000.000,000	1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program	0	0	100		100		100		100		100		1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	pemerintah kabupaten/kota (%)													
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					889.082.500,000		730.000.000,000		857.787.000,000		858.397.000,000		908.332.000,000	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	8	18	28	889.082.500,000	38	730.000.000,000	48	857.787.000,000	58	858.397.000,000	68	908.332.000,000	1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					760.000.000,000		770.000.000,000		795.000.000,000		170.000.000,000		760.000.000,000	
Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Persentase kawasan Perumahan di kabupaten/kota ditangani (%)	0	0,1	0,2	760.000.000,000	0,3	770.000.000,000	0,4	795.000.000,000	0,5	170.000.000,000	0,6	760.000.000,000	1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					980.000.137,000		980.000.137,000		980.000.137,000		980.000.137,000		980.000.137,000	
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	37,09	38	39	980.000.137,000	40	980.000.137,000	41	980.000.137,000	42	980.000.137,000	43	980.000.137,000	1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.06 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					20.000.000,000		20.000.000,000		20.000.000,000		20.000.000,000		20.000.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) tingkat kemampuan menengah	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU (Persentase)	0	0	100	20.000.000,000	100	20.000.000,000	100	20.000.000,000	100	20.000.000,000	100	20.000.000,000	1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					6.409.000.000,000		6.409.000.000,000		6.409.000.000,000		5.916.000.000,000		6.409.000.000,000	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.687.400.000,000		3.764.400.000,000		3.787.400.000,000		3.614.400.000,000		3.787.400.000,000	
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah (Persentase)	87,17	100	100	2.895.500.000,000	100	2.895.500.000,000	100	2.895.500.000,000	100	2.895.500.000,000	100	2.895.500.000,000	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan kebencanaan	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah (Persentase)	80	80	80	791.900.000,000	90	868.900.000,000	90	891.900.000,000	90	718.900.000,000	90	891.900.000,000	1.05.0.00.0.00.04.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					828.000.000,000		828.000.000,000		828.000.000,000		828.000.000,000		828.000.000,000	
Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	20	40	60	50.000.000,000	60	50.000.000,000	60	50.000.000,000	60	50.000.000,000	60	50.000.000,000	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (Persentase)	18,75	25	25	260.000.000,000	25	260.000.000,000	25	260.000.000,000	25	260.000.000,000	25	260.000.000,000	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja
Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	86,15	100	100	383.000.000,000	100	383.000.000,000	100	383.000.000,000	100	383.000.000,000	100	383.000.000,000	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja
Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masvarakat (Persentase)	52,60	60	60	135.000.000,000	60	135.000.000,000	60	135.000.000,000	60	135.000.000,000	60	135.000.000,000	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					1.101.100.000,000		1.024.100.000,000		1.001.100.000,000		681.100.000,000		1.001.100.000,000	
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat, Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	100	100	100	1.101.100.000,000	100	1.024.100.000,000	100	1.001.100.000,000	100	681.100.000,000	100	1.001.100.000,000	1.05.0.00.0.00.04.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase penanganan tanggap bencana darurat (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.05.0.00.0.00.04.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.05.0.00.0.00.04.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					792.500.000,000		792.500.000,000		792.500.000,000		792.500.000,000		792.500.000,000	
Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	85	100	100	175.000.000,000	100	175.000.000,000	100	175.000.000,000	100	175.000.000,000	100	175.000.000,000	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	72,22	80	80	617.500.000,000	80	617.500.000,000	80	617.500.000,000	80	617.500.000,000	80	617.500.000,000	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					2.000.000.000,000		2.000.000.000,000		2.000.000.000,000		1.500.000.000,000		2.000.000.000,000	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					676.000.000,000		676.000.000,000		676.000.000,000		611.000.000,000		676.000.000,000	
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan bidang sosial	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100	676.000.000,000	100	676.000.000,000	100	676.000.000,000	100	611.000.000,000	100	676.000.000,000	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					210.000.000,000		210.000.000,000		210.000.000,000		170.000.000,000		210.000.000,000	
Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial (Persentase)	0	100	100	210.000.000,000	100	210.000.000,000	100	210.000.000,000	100	170.000.000,000	100	210.000.000,000	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA (Persentase)	0	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					5.000.000,000		5.000.000,000		5.000.000,000		5.000.000,000		5.000.000,000	
Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (Persentase)	0	100	100	5.000.000,000	100	5.000.000,000	100	5.000.000,000	100	5.000.000,000	100	5.000.000,000	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					540.000.000,000		540.000.000,000		540.000.000,000		211.000.000,000		540.000.000,000	
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	0	100	100	540.000.000,000	100	540.000.000,000	100	540.000.000,000	100	211.000.000,000	100	540.000.000,000	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	0	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	0	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
	Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	0	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	0	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					295.000.000,000		295.000.000,000		295.000.000,000		229.000.000,000		295.000.000,000	
Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	0	100	100	295.000.000,000	100	295.000.000,000	100	295.000.000,000	100	229.000.000,000	100	295.000.000,000	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (Persentase)	0	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					254.000.000,000		254.000.000,000		254.000.000,000		254.000.000,000		254.000.000,000	
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	100	100	100	254.000.000,000	100	254.000.000,000	100	254.000.000,000	100	254.000.000,000	100	254.000.000,000	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					20.000.000,000		20.000.000,000		20.000.000,000		20.000.000,000		20.000.000,000	
Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan (Persentase)	0	100	100	20.000.000,000	100	20.000.000,000	100	20.000.000,000	100	20.000.000,000	100	20.000.000,000	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					6.709.940.000,000		6.684.940.000,000		6.664.940.000,000		6.664.940.000,000		6.664.940.000,000	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					529.940.000,000		549.940.000,000		529.940.000,000		529.940.000,000		529.940.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan bidang ketenagakerjaan, koperasi, UKM	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah (Persentase)	85	90	90	529.940.000,000	90	549.940.000,000	90	529.940.000,000	90	529.940.000,000	90	529.940.000,000	2.07.2.17.0.00.01.0 000 - Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					15.000.000,000		20.000.000,000		20.000.000,000		20.000.000,000		20.000.000,000	
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Presentase pemenuhan kebutuhan perencanaan tenaga kerja makro, mikro di kabupaten nias selatan (%)	0	100	100	15.000.000,000	100	20.000.000,000	100	20.000.000,000	100	20.000.000,000	100	20.000.000,000	2.07.2.17.0.00.01.0 000 - Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					6.100.000.000,000		6.050.000.000,000		6.050.000.000,000		6.050.000.000,000		6.050.000.000,000	
Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)	35	40	45	6.100.000.000,000	50	6.050.000.000,000	60	6.050.000.000,000	60	6.050.000.000,000	60	6.050.000.000,000	2.07.2.17.0.00.01.0 000 - Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					5.000.000,000		5.000.000,000		5.000.000,000		5.000.000,000		5.000.000,000	
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	50,35	50,35	52,86	5.000.000,000	55,51	5.000.000,000	58,28	5.000.000,000	61,20	5.000.000,000	61,20	5.000.000,000	2.07.2.17.0.00.01.0 000 - Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					60.000.000,000		60.000.000,000		60.000.000,000		60.000.000,000		60.000.000,000	
Meningkatnya Pekerja Indonesia Yang Terlindungi	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ((%))	50	50	55	60.000.000,000	60	60.000.000,000	60	60.000.000,000	60	60.000.000,000	65	60.000.000,000	2.07.2.17.0.00.01.0 000 - Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					829.550.000,000		829.550.000,000		829.550.000,000		610.000.000,000		829.550.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					247.000.000,000		247.000.000,000		247.000.000,000		180.000.000,000		247.000.000,000	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam Pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	25	35	45	247.000.000,000	55	247.000.000,000	65	247.000.000,000	75	180.000.000,000	85	247.000.000,000	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	73,44	73,62	73,8		73,98		74,16		74,34		74,52		2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					223.550.000,000		223.550.000,000		223.550.000,000		170.000.000,000		223.550.000,000	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	25	23	21	223.550.000,000	19	223.550.000,000	17	223.550.000,000	15	170.000.000,000	13	223.550.000,000	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					129.000.000,000		129.000.000,000		129.000.000,000		108.500.000,000		129.000.000,000	
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	25	30	35	129.000.000,000	40	129.000.000,000	45	129.000.000,000	50	108.500.000,000	55	129.000.000,000	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					40.500.000,000		40.500.000,000		40.500.000,000		15.000.000,000		40.500.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	25	30	35	40.500.000,000	40	40.500.000,000	45	40.500.000,000	50	15.000.000,000	55	40.500.000,000	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					58.000.000,000		58.000.000,000		58.000.000,000		31.500.000,000		58.000.000,000	
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	40	43	46	58.000.000,000	49	58.000.000,000	52	58.000.000,000	55	31.500.000,000	58	58.000.000,000	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					131.500.000,000		131.500.000,000		131.500.000,000		105.000.000,000		131.500.000,000	
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	100	100	100	131.500.000,000	100	131.500.000,000	100	131.500.000,000	100	105.000.000,000	100	131.500.000,000	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					2.500.000.000,000		2.500.000.000,000		2.500.000.000,000		2.000.000.000,000		2.500.000.000,000	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					900.000.000,000		900.000.000,000		900.000.000,000		800.000.000,000		900.000.000,000	
Meningkatnya Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah (Persentase)	80	60	70	900.000.000,000	80	900.000.000,000	85	900.000.000,000	90	800.000.000,000	100	900.000.000,000	2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					200.000.000,000		200.000.000,000		200.000.000,000		150.000.000,000		200.000.000,000	
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	75	75	80	200.000.000,000	85	200.000.000,000	90	200.000.000,000	95	150.000.000,000	100	200.000.000,000	2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pangan
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					900.000.000,000		900.000.000,000		900.000.000,000		800.000.000,000		900.000.000,000	
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor pola pangan harapan (Skor)	79,2	80	81	900.000.000,000	82	900.000.000,000	83	900.000.000,000	84	800.000.000,000	85	900.000.000,000	2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pangan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					300.000.000,000		300.000.000,000		300.000.000,000		125.000.000,000		300.000.000,000	
Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	31,88	30	29	300.000.000,000	27	300.000.000,000	25	300.000.000,000	23	125.000.000,000	20	300.000.000,000	2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pangan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					200.000.000,000		200.000.000,000		200.000.000,000		125.000.000,000		200.000.000,000	
Meningkatnya Pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	75	78	81	200.000.000,000	83	200.000.000,000	85	200.000.000,000	88	125.000.000,000	90	200.000.000,000	2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pangan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					6.403.000.000,000		6.403.000.000,000		6.403.000.000,000		6.403.000.000,000		6.403.000.000,000	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					2.753.000.000,000		2.753.000.000,000		2.753.000.000,000		2.753.000.000,000		2.753.000.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan bidang Lingkungan Hidup	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah (Persentase)	70	80	80	2.753.000.000,000	85	2.753.000.000,000	85	2.753.000.000,000	90	2.753.000.000,000	90	2.753.000.000,000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					200.000.000,000		200.000.000,000		200.000.000,000		200.000.000,000		200.000.000,000	
Meningkatnya Efektivitas kajian lingkungan hidup untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	80,00	82,50	82,80	200.000.000,000	83,00	200.000.000,000	83,20	200.000.000,000	83,40	200.000.000,000	83,50	200.000.000,000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					500.000.000,000		500.000.000,000		500.000.000,000		500.000.000,000		500.000.000,000	
menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	60,00	67,25	67,80	500.000.000,000	68,00	500.000.000,000	68,50	500.000.000,000	69,00	500.000.000,000	69,50	500.000.000,000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	94,86	95,00	95,50		96,00		96,50		97,00		98,00		2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Lahan (Indeks)	66,69	67,00	67,50		68,00		68,50		69,00		69,50		2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					200.000.000,000		200.000.000,000		200.000.000,000		200.000.000,000		200.000.000,000	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (Persentase)	50,00	55,00	56,00	200.000.000,000	57,00	200.000.000,000	58,00	200.000.000,000	59,00	200.000.000,000	60,00	200.000.000,000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN					50.000.000,000		50.000.000,000		50.000.000,000		50.000.000,000		50.000.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)														
meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	70,00	80,00	80,50	50.000.000,000	81,00	50.000.000,000	81,50	50.000.000,000	82,00	50.000.000,000	82,50	50.000.000,000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					50.000.000,000		50.000.000,000		50.000.000,000		50.000.000,000		50.000.000,000	
meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	0	20,00	21,00	50.000.000,000	22,00	50.000.000,000	23,00	50.000.000,000	24,00	50.000.000,000	25,00	50.000.000,000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					100.000.000,000		100.000.000,000		100.000.000,000		100.000.000,000		100.000.000,000	
meningkatnya penyelesaian sengketa / kasus tindak pidana Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	0	1,20	1,25	100.000.000,000	1,50	100.000.000,000	1,75	100.000.000,000	1,80	100.000.000,000	1,90	100.000.000,000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					2.550.000.000,000		2.550.000.000,000		2.550.000.000,000		2.550.000.000,000		2.550.000.000,000	
meningkatnya tata kelola persampahan	Presentase pengurangan sampah kabupaten	94,90	95,50	95,80	2.550.000.000,000	96,00	2.550.000.000,000	96,50	2.550.000.000,000	97,00	2.550.000.000,000	97,00	2.550.000.000,000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(%)													
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					3.000.000.000,000		3.000.000.000,000		3.000.000.000,000		3.000.000.000,000		3.000.000.000,000	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.000.000.000,000		1.000.000.000,000		1.000.000.000,000		1.000.000.000,000		1.000.000.000,000	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah (Persentase)	84	95	98	1.000.000.000,000	98	1.000.000.000,000	98	1.000.000.000,000	98	1.000.000.000,000	98	1.000.000.000,000	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					600.000.000,000		600.000.000,000		600.000.000,000		600.000.000,000		600.000.000,000	
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	1,63	2	5	600.000.000,000	7,5	600.000.000,000	10	600.000.000,000	12,5	600.000.000,000	15	600.000.000,000	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	35	45	55		65		75		80		90		2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					600.000.000,000		600.000.000,000		600.000.000,000		600.000.000,000		600.000.000,000	
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100	600.000.000,000	100	600.000.000,000	100	600.000.000,000	100	600.000.000,000	100	600.000.000,000	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(Persentase)													
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					600.000.000,000		600.000.000,000		600.000.000,000		600.000.000,000		600.000.000,000	
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan (Persentase)	100	100	100	600.000.000,000	100	600.000.000,000	100	600.000.000,000	100	600.000.000,000	100	600.000.000,000	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					200.000.000,000		200.000.000,000		200.000.000,000		200.000.000,000		200.000.000,000	
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	100	100	100	200.000.000,000	100	200.000.000,000	100	200.000.000,000	100	200.000.000,000	100	200.000.000,000	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					2.000.000.000,000		32.000.000.000,000		2.000.000.000,000		2.000.000.000,000		40.000.000.000,000	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.137.500.000,000		1.135.240.000,000		1.123.740.000,000		1.120.500.000,000		2.095.980.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah (Persentase)	50	60	60	1.137.500.000,000	70	1.135.240.000,000	70	1.123.740.000,000	80	1.120.500.000,000	80	2.095.980.000,000	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					11.500.000,000		34.500.000,000		34.500.000,000		34.500.000,000		34.500.000,000	
Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase)	80	85	95	11.500.000,000	96	34.500.000,000	97	34.500.000,000	98	34.500.000,000	98	34.500.000,000	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					12.000.000,000		12.000.000,000		12.000.000,000		12.000.000,000		12.000.000,000	
Meningkatnya efektivitas kerjasama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase)	60	65	68	12.000.000,000	70	12.000.000,000	72	12.000.000,000	75	12.000.000,000	75	12.000.000,000	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					519.000.000,000		30.539.000.000,000		529.000.000,000		509.000.000,000		31.393.520.000,000	
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase)	90	92	95	519.000.000,000	100	30.539.000.000,000	100	529.000.000,000	100	509.000.000,000	100	31.393.520.000,000	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					320.000.000,000		279.260.000,000		300.760.000,000		324.000.000,000		6.464.000.000,000	
Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga	100	100	100	320.000.000,000	100	279.260.000,000	100	300.760.000,000	100	324.000.000,000	100	6.464.000.000,000	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
pembangunan	Masyarakat Hukum Adat (Persentase)													
	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					14.170.450.000,000		14.170.450.000,000		14.170.450.000,000		13.890.000.000,000		14.170.450.000,000	
2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.414.000.000,000		1.414.000.000,000		1.414.000.000,000		1.420.000.000,000		1.414.000.000,000	
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempaun dan perlindungan anak	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100	1.414.000.000,000	100	1.414.000.000,000	100	1.414.000.000,000	100	1.420.000.000,000	100	1.414.000.000,000	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					1.905.200.000,000		1.905.200.000,000		1.905.200.000,000		1.815.000.000,000		1.905.200.000,000	
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	TFR (Angka Kelahiran Total) (Jiwa)	2,97	2,95	2,92	1.905.200.000,000	2,90	1.905.200.000,000	2,87	1.905.200.000,000	2,85	1.815.000.000,000	2,82	1.905.200.000,000	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					8.139.150.000,000		8.139.150.000,000		8.139.150.000,000		8.080.000.000,000		8.139.150.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	20	22	24	8.139.150.000,000	26	8.139.150.000,000	28	8.139.150.000,000	30	8.080.000.000,000	32	8.139.150.000,000	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	20,2	20,1	20		19,9		19,8		19,7		19,6		2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					2.712.100.000,000		2.712.100.000,000		2.712.100.000,000		2.575.000.000,000		2.712.100.000,000	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	60	65	70	2.712.100.000,000	75	2.712.100.000,000	80	2.712.100.000,000	85	2.575.000.000,000	90	2.712.100.000,000	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					6.500.000.000,000		6.750.000.000,000		7.000.000.000,000		6.750.000.000,000		7.500.000.000,000	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.171.600.000,000		2.171.600.000,000		2.171.600.000,000		2.171.600.000,000		2.171.600.000,000	
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan bidang Perhubungan	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah (Persentase)	0	100	100	2.171.600.000,000	100	2.171.600.000,000	100	2.171.600.000,000	100	2.171.600.000,000	100	2.171.600.000,000	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					2.192.400.000,000		2.302.400.000,000		2.302.400.000,000		2.102.400.000,000		2.407.400.000,000	
Meningkatkan kualitas layanan transportasi darat	Rasio konektivitas perhubungan	0	58,75	63,1	2.192.400.000,000	67,78	2.302.400.000,000	72,89	2.302.400.000,000	78,19	2.102.400.000,000	83,99	2.407.400.000,000	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	darat (%)													
	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota (Persentase)	80	80	80		80		90		90		100		2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					1.386.000.000,000		1.526.000.000,000		1.526.000.000,000		1.226.000.000,000		1.531.000.000,000	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Rasio konektivitas perhubungan laut (%)	0	100	100	1.386.000.000,000	100	1.526.000.000,000	100	1.526.000.000,000	100	1.226.000.000,000	100	1.531.000.000,000	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
2.15.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN					750.000.000,000		750.000.000,000		1.000.000.000,000		1.250.000.000,000		1.390.000.000,000	
Pengadaan pelayanan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan LepasLandas Helikopter	Persentase Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (%)	0	100	100	750.000.000,000	100	750.000.000,000	100	1.000.000.000,000	100	1.250.000.000,000	100	1.390.000.000,000	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					2.600.000.000,000		2.600.000.000,000		2.600.000.000,000		2.100.000.000,000		2.600.000.000,000	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					700.000.000,000		700.000.000,000		700.000.000,000		700.000.000,000		700.000.000,000	
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100	700.000.000,000	100	700.000.000,000	100	700.000.000,000	100	700.000.000,000	100	700.000.000,000	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					400.000.000,000		400.000.000,000		400.000.000,000		400.000.000,000		400.000.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	100	100	100	400.000.000,000	100	400.000.000,000	100	400.000.000,000	100	400.000.000,000	100	400.000.000,000	2.16.2.20.2.21.01.0 000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
	Indeks Diseminasi Informasi (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.16.2.20.2.21.01.0 000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					1.500.000.000,000		1.500.000.000,000		1.500.000.000,000		1.000.000.000,000		1.500.000.000,000	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemerintah Daerah (%)	100	100	100	1.500.000.000,000	100	1.500.000.000,000	100	1.500.000.000,000	100	1.000.000.000,000	100	1.500.000.000,000	2.16.2.20.2.21.01.0 000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					690.060.000,000		715.060.000,000		735.060.000,000		735.060.000,000		735.060.000,000	
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					5.060.000,000		5.060.000,000		5.060.000,000		5.060.000,000		5.060.000,000	
Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam (Persentase)	80	85	90	5.060.000,000	90	5.060.000,000	90	5.060.000,000	90	5.060.000,000	95	5.060.000,000	2.07.2.17.0.00.01.0 000 - Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					75.000.000,000		75.000.000,000		75.000.000,000		75.000.000,000		75.000.000,000	
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	40	50	55	75.000.000,000	60	75.000.000,000	70	75.000.000,000	80	75.000.000,000	90	75.000.000,000	2.07.2.17.0.00.01.0 000 - Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN					40.000.000,000		40.000.000,000		40.000.000,000		40.000.000,000		40.000.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KSP/USP KOPERASI														
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Presentase koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam dan KSPPS/ USPPS yang sehat dan cukup sehat (%)	50	60	60	40.000.000,000	70	40.000.000,000	70	40.000.000,000	80	40.000.000,000	90	40.000.000,000	2.07.2.17.0.00.01.0 000 - Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					250.000.000,000		210.000.000,000		210.000.000,000		210.000.000,000		210.000.000,000	
Meningkatnya kualitas SDM Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	50	50	60	250.000.000,000	70	210.000.000,000	70	210.000.000,000	80	210.000.000,000	90	210.000.000,000	2.07.2.17.0.00.01.0 000 - Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					20.000.000,000		20.000.000,000		20.000.000,000		20.000.000,000		20.000.000,000	
Meningkatnya produktivitas koperasi	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Berkoperasi (Persentase)	10	15	15	20.000.000,000	20	20.000.000,000	20	20.000.000,000	25	20.000.000,000	30	20.000.000,000	2.07.2.17.0.00.01.0 000 - Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					50.000.000,000		50.000.000,000		50.000.000,000		50.000.000,000		50.000.000,000	
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian (%)	25	25	30	50.000.000,000	30	50.000.000,000	40	50.000.000,000	40	50.000.000,000	50	50.000.000,000	2.07.2.17.0.00.01.0 000 - Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					250.000.000,000		315.000.000,000		335.000.000,000		335.000.000,000		335.000.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit ((%))	30	35	40	250.000.000,000	40	315.000.000,000	50	335.000.000,000	50	335.000.000,000	50	335.000.000,000	2.07.2.17.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					1.500.000.000,000		1.500.000.000,000		1.500.000.000,000		1.000.000.000,000		1.500.000.000,000	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					872.500.000,000		872.500.000,000		872.500.000,000		715.000.000,000		872.500.000,000	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Bidang Penanaman Modal	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah (Persentase)	0	80%	85%	872.500.000,000	85%	872.500.000,000	90%	872.500.000,000	95%	715.000.000,000	100%	872.500.000,000	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					220.000.000,000		220.000.000,000		220.000.000,000		100.000.000,000		220.000.000,000	
Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	40	40	45	220.000.000,000	45	220.000.000,000	50	220.000.000,000	50	100.000.000,000	60	220.000.000,000	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					65.000.000,000		65.000.000,000		65.000.000,000		35.000.000,000		65.000.000,000	
Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	0,25	10	15	65.000.000,000	15	65.000.000,000	20	65.000.000,000	20	35.000.000,000	25	65.000.000,000	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					120.000.000,000		120.000.000,000		120.000.000,000		50.000.000,000		120.000.000,000	
Meningkatnya Perizinan Berusaha Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	60	70	80	120.000.000,000	80	120.000.000,000	90	120.000.000,000	90	50.000.000,000	100	120.000.000,000	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					200.000.000,000		200.000.000,000		200.000.000,000		80.000.000,000		200.000.000,000	
Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	100%	100%	100%	200.000.000,000	100%	200.000.000,000	100%	200.000.000,000	100%	80.000.000,000	100%	200.000.000,000	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					22.500.000,000		22.500.000,000		22.500.000,000		20.000.000,000		22.500.000,000	
Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	100%	100%	100%	22.500.000,000	100%	22.500.000,000	100%	22.500.000,000	100%	20.000.000,000	100%	22.500.000,000	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					1.320.000.000,000		1.140.000.000,000		1.590.000.000,000		1.380.000.000,000		1.785.000.000,000	
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					330.000.000,000		150.000.000,000		555.000.000,000		330.000.000,000		635.000.000,000	
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	0,84	0,84	0,85	330.000.000,000	0,85	150.000.000,000	0,86	555.000.000,000	0,86	330.000.000,000	0,87	635.000.000,000	2.22.2.19.3.26.02.0000 - Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					920.000.000,000		920.000.000,000		960.000.000,000		975.000.000,000		1.075.000.000,000	
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase)	1	1	2	920.000.000,000	2	920.000.000,000	2	960.000.000,000	2	975.000.000,000	2	1.075.000.000,000	2.22.2.19.3.26.02.0000 - Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					70.000.000,000		70.000.000,000		75.000.000,000		75.000.000,000		75.000.000,000	
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Peningkatan kualitas organisasi kepramukaan (Kegiatan)	1	1	1	70.000.000,000	1	70.000.000,000	1	75.000.000,000	1	75.000.000,000	1	75.000.000,000	2.22.2.19.3.26.02.0000 - Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					200.000.000,000		200.000.000,000		200.000.000,000		200.000.000,000		200.000.000,000	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					200.000.000,000		200.000.000,000		200.000.000,000		200.000.000,000		200.000.000,000	
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	1,10	1,80	2,60	200.000.000,000	2,70	200.000.000,000	2,80	200.000.000,000	2,90	200.000.000,000	3,00	200.000.000,000	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					200.000.000,000		200.000.000,000		200.000.000,000		200.000.000,000		200.000.000,000	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					200.000.000,000		200.000.000,000		200.000.000,000		200.000.000,000		200.000.000,000	
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	504	515	535	200.000.000,000	560	200.000.000,000	600	200.000.000,000	650	200.000.000,000	700	200.000.000,000	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					2.680.000.000,000		2.410.000.000,000		3.210.000.000,000		2.770.000.000,000		3.515.000.000,000	
2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.190.000.000,000		985.000.000,000		1.485.000.000,000		995.000.000,000		1.615.000.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan bidang kebudayaan, bidang pariwisata dan pemuda olahraga	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah (Persentase)	70	70	80	1.190.000.000,000	80	985.000.000,000	80	1.485.000.000,000	90	995.000.000,000	90	1.615.000.000,000	2.22.2.19.3.26.02.0000 - Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					400.000.000,000		400.000.000,000		600.000.000,000		650.000.000,000		700.000.000,000	
meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	5	7	9	400.000.000,000	9	400.000.000,000	10	600.000.000,000	11	650.000.000,000	11	700.000.000,000	2.22.2.19.3.26.02.0000 - Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	0	15	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	25	50.000.000,00	2.22.2.19.3.26.02.0000 - Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					65.000.000,000		0,000		100.000.000,000		100.000.000,000		150.000.000,000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)	0	0,15	0,15	65.000.000,000	0,20	0,000	0,25	100.000.000,000	0,25	100.000.000,000	0,30	150.000.000,000	2.22.2.19.3.26.02.0000 - Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					1.025.000.000,000		1.025.000.000,000		1.025.000.000,000		1.025.000.000,000		1.050.000.000,000	
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Terlestarikannya cagar budaya (%)	10	10	15	1.025.000.000,000	15	1.025.000.000,000	17	1.025.000.000,000	19	1.025.000.000,000	20	1.050.000.000,000	2.22.2.19.3.26.02.0000 - Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					1.200.000.000,000		1.110.000.000,000		1.110.000.000,000		790.000.000,000		1.110.000.000,000	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					870.000.000,000		670.000.000,000		670.000.000,000		550.000.000,000		670.000.000,000	
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan bidang perpustakaan dan kearsipan	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah (Persentase)	80	80	90	870.000.000,000	90	670.000.000,000	100	670.000.000,000	100	550.000.000,000	100	670.000.000,000	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Arsip

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					290.000.000,000		400.000.000,000		400.000.000,000		200.000.000,000		400.000.000,000	
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	54	55	56	290.000.000,000	57	400.000.000,000	58	400.000.000,000	59	200.000.000,000	60	400.000.000,000	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Arsip
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					40.000.000,000		40.000.000,000		40.000.000,000		40.000.000,000		40.000.000,000	
Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	10	10	100	40.000.000,000	100	40.000.000,000	100	40.000.000,000	100	40.000.000,000	100	40.000.000,000	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Arsip
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					300.000.000,000		390.000.000,000		390.000.000,000		210.000.000,000		390.000.000,000	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					190.000.000,000		270.000.000,000		270.000.000,000		140.000.000,000		270.000.000,000	
Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	10	10	100	190.000.000,000	100	270.000.000,000	100	270.000.000,000	100	140.000.000,000	100	270.000.000,000	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Arsip
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					90.000.000,000		100.000.000,000		100.000.000,000		50.000.000,000		100.000.000,000	
Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	0	10	100	90.000.000,000	100	100.000.000,000	100	100.000.000,000	100	50.000.000,000	100	100.000.000,000	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Arsip
2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					20.000.000,000		20.000.000,000		20.000.000,000		20.000.000,000		20.000.000,000	
Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Penggunaan Arsip yang bersifat Tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Persentase)	0	0	100	20.000.000,000	100	20.000.000,000	100	20.000.000,000	100	20.000.000,000	100	20.000.000,000	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Arsip

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					4.499.000.000,000		6.500.000.000,000		6.500.000.000,000		5.500.000.000,000		6.500.000.000,000	
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					702.500.000,000		768.500.000,000		814.500.000,000		603.500.000,000		603.500.000,000	
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan bidang kelautan dan perikanan	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah (Persentase)	60	70	70	702.500.000,000	80	768.500.000,000	90	814.500.000,000	100	603.500.000,000	100	603.500.000,000	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					1.924.000.000,000		3.000.000.000,000		2.834.000.000,000		2.770.000.000,000		3.170.000.000,000	
Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	8.770	9.000	9.500	1.924.000.000,000	10.000	3.000.000.000,000	10.500	2.834.000.000,000	11.000	2.770.000.000,000	11.500	3.170.000.000,000	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					1.155.985.000,000		1.300.000.000,000		1.520.000.000,000		1.295.000.000,000		1.570.000.000,000	
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	38	39	40	1.155.985.000,000	42	1.300.000.000,000	45	1.520.000.000,000	48	1.295.000.000,000	50	1.570.000.000,000	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					716.515.000,000		1.431.500.000,000		1.331.500.000,000		831.500.000,000		1.156.500.000,000	
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	0	45	47	716.515.000,000	50	1.431.500.000,000	53	1.331.500.000,000	56	831.500.000,000	59	1.156.500.000,000	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					5.100.000.000,000		5.550.000.000,000		4.300.000.000,000		3.950.000.000,000		3.800.000.000,000	
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					2.750.000.000,000		3.000.000.000,000		1.650.000.000,000		1.950.000.000,000		1.100.000.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	21	22	24	2.750.000.000,000	24	3.000.000.000,000	24	1.650.000.000,000	26	1.950.000.000,000	26	1.100.000.000,000	2.22.2.19.3.26.02.0000 - Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					2.350.000.000,000		2.450.000.000,000		2.550.000.000,000		2.000.000.000,000		2.550.000.000,000	
meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	5	5	6	2.350.000.000,000	7	2.450.000.000,000	8	2.550.000.000,000	9	2.000.000.000,000	10	2.550.000.000,000	2.22.2.19.3.26.02.0000 - Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					0,000		100.000.000,000		100.000.000,000		0,000		150.000.000,000	
meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	3	3	5	0,000	5	100.000.000,000	6	100.000.000,000	7	0,000	8	150.000.000,000	2.22.2.19.3.26.02.0000 - Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					6.311.000.000,000		8.311.000.000,000		8.311.000.000,000		5.811.000.000,000		8.311.000.000,000	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					899.000.000,000		899.000.000,000		899.000.000,000		522.000.000,000		899.000.000,000	
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan bidang pertanian	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah (Persentase)	90	90	92,5	899.000.000,000	95	899.000.000,000	97,5	899.000.000,000	100	522.000.000,000	100	899.000.000,000	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					1.157.000.000,000		2.107.000.000,000		1.607.000.000,000		1.012.000.000,000		1.457.000.000,000	
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi tanaman pangan (Persentase)	0	2	4	1.157.000.000,000	6	2.107.000.000,000	8	1.607.000.000,000	10	1.012.000.000,000	12	1.457.000.000,000	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Peningkatan produksi tanaman hortikultura (Persentase)	0	2	4		6		8		10		12		3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian
	Peningkatan produksi komoditas peternakan (Persentase)	0,00	2	4		6		8		10		12		3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					3.355.000.000,000		4.405.000.000,000		4.905.000.000,000		3.736.500.000,000		4.855.000.000,000	
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	0	4.000	4.000	3.355.000.000,000	4.000	4.405.000.000,000	4.000	4.905.000.000,000	4.000	3.736.500.000,000	4.000	4.855.000.000,000	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					245.000.000,000		245.000.000,000		245.000.000,000		26.000.000,000		245.000.000,000	
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (HPMS) (Persentase)	100	100	100	245.000.000,000	100	245.000.000,000	100	245.000.000,000	100	26.000.000,000	100	245.000.000,000	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian
	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	0	100	100		100		100		100		100		3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					200.000.000,000		200.000.000,000		200.000.000,000		160.000.000,000		400.000.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	0	100	100	200.000.000,000	100	200.000.000,000	100	200.000.000,000	100	160.000.000,000	100	400.000.000,000	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	0	100	100		100		100		100		100		3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					55.000.000,000		55.000.000,000		55.000.000,000		3.500.000,000		55.000.000,000	
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase)	0	0	100	55.000.000,000	100	55.000.000,000	100	55.000.000,000	100	3.500.000,000	100	55.000.000,000	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					400.000.000,000		400.000.000,000		400.000.000,000		351.000.000,000		400.000.000,000	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan (Persentase)	0	100	100	400.000.000,000	100	400.000.000,000	100	400.000.000,000	100	351.000.000,000	100	400.000.000,000	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian
	Persentase kelembagaan kelompok tani yang dibentuk dan beroperasi (Persentase)	0	100	100		100		100		100		100		3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					1.236.000.000,000		1.236.000.000,000		1.236.000.000,000		960.000.000,000		1.236.000.000,000	
3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					391.000.000,000		391.000.000,000		391.000.000,000		285.000.000,000		391.000.000,000	
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan bidang perdagangan dan perindustrian	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah (Persentase)	-	80	80	391.000.000,000	85	391.000.000,000	85	391.000.000,000	90	285.000.000,000	90	391.000.000,000	3.31.3.30.0.00.02.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					340.000.000,000		340.000.000,000		340.000.000,000		310.000.000,000		340.000.000,000	
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	100	100	100	340.000.000,000	100	340.000.000,000	100	340.000.000,000	100	310.000.000,000	100	340.000.000,000	3.31.3.30.0.00.02.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					120.000.000,000		120.000.000,000		120.000.000,000		120.000.000,000		120.000.000,000	
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	-	20	30	120.000.000,000	40	120.000.000,000	50	120.000.000,000	60	120.000.000,000	70	120.000.000,000	3.31.3.30.0.00.02.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					185.000.000,000		185.000.000,000		185.000.000,000		185.000.000,000		185.000.000,000	
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	-	60	65	185.000.000,000	70	185.000.000,000	75	185.000.000,000	80	185.000.000,000	85	185.000.000,000	3.31.3.30.0.00.02.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					80.000.000,000		80.000.000,000		80.000.000,000		0,000		80.000.000,000	
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang (Nilai)	-	-	20.000.000	80.000.000,000	25.000.000	80.000.000,000	30.000.000	80.000.000,000	35.000.000	0,000	40.000.000	80.000.000,000	3.31.3.30.0.00.02.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					60.000.000,000		60.000.000,000		60.000.000,000		60.000.000,000		60.000.000,000	
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	-	80	80	60.000.000,000	85	60.000.000,000	90	60.000.000,000	95	60.000.000,000	100	60.000.000,000	3.31.3.30.0.00.02.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					60.000.000,000		60.000.000,000		60.000.000,000		0,000		60.000.000,000	
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	-	-	30	60.000.000,000	35	60.000.000,000	40	60.000.000,000	45	0,000	50	60.000.000,000	3.31.3.30.0.00.02.0 000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					264.000.000,000		264.000.000,000		264.000.000,000		40.000.000,000		264.000.000,000	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					184.000.000,000		184.000.000,000		184.000.000,000		40.000.000,000		184.000.000,000	
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator Pembangunan industri dalam RIPIN yang ditepatkan dalam RIPIP (%)	-	10	30	184.000.000,000	50	184.000.000,000	70	184.000.000,000	90	40.000.000,000	100	184.000.000,000	3.31.3.30.0.00.02.0 000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					40.000.000,000		40.000.000,000		40.000.000,000		0,000		40.000.000,000	
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Industri (IUI) kesil dan Idustri Menengah Yang dilakukan oleh Instansi terkait (%)	-	10	30	40.000.000,000	50	40.000.000,000	70	40.000.000,000	90	0,000	100	40.000.000,000	3.31.3.30.0.00.02.0 000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					40.000.000,000		40.000.000,000		40.000.000,000		0,000		40.000.000,000	
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase)	-	-	10	40.000.000,000	30	40.000.000,000	50	40.000.000,000	70	0,000	100	40.000.000,000	3.31.3.30.0.00.02.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					35.258.270.318,000		37.258.270.318,000		39.258.270.318,000		41.258.270.318,000		41.258.270.318,000	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					25.541.091.018,000		26.989.891.018,000		28.438.691.018,000		29.887.491.018,000		29.887.491.018,000	
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan bidang Administrasi Umum	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah (Persentase)	60	60	62	25.541.091.018,000	64	26.989.891.018,000	66	28.438.691.018,000	68	29.887.491.018,000	70	29.887.491.018,000	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					8.052.988.941,000		8.509.788.941,000		8.966.588.941,000		9.423.388.941,000		9.423.388.941,000	
Meningkatnya kualitas kebijakan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	100	100	100	8.052.988.941,000	100	8.509.788.941,000	100	8.966.588.941,000	100	9.423.388.941,000	100	9.423.388.941,000	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					1.664.190.359,000		1.758.590.359,000		1.852.990.359,000		1.947.390.359,000		1.947.390.359,000	
Meningkatnya Kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	100	100	100	1.664.190.359,000	100	1.758.590.359,000	100	1.852.990.359,000	100	1.947.390.359,000	100	1.947.390.359,000	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					45.000.000.000,000		45.000.000.000,000		45.000.000.000,000		45.000.000.000,000		45.000.000.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					26.471.854.375,000		23.677.954.875,000		24.308.338.875,000		25.200.662.875,000		25.002.826.875,000	
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PENYELENGGARAAN URUSAN BIDANG SEKRETARIAT DPRD	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah (Persentase)	90	60	60	26.471.854.375,000	70	23.677.954.875,000	70	24.308.338.875,000	80	25.200.662.875,000	80	25.002.826.875,000	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					18.528.145.625,000		21.322.045.125,000		20.691.661.125,000		19.799.337.125,000		19.997.173.125,000	
MENINGKATKAN KUALITAS PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	70	80	80	10.495.926.625,000	85	12.289.826.125,000	85	11.659.442.125,000	88	10.801.392.125,000	88	10.964.954.125,000	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD
MENINGKATNYA KUALITAS PERSIDANGAN DAN KAJIAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN	Waktu penetapan perda APBD dan PAPBD (Tepat Waktu)	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	8.032.219.000,000	tepat waktu	9.032.219.000,000	tepat waktu	9.032.219.000,000	tepat waktu	8.997.945.000,000	tepat waktu	9.032.219.000,000	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	16	12	12		14		14		12		10		4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN					2.830.000.000,000		2.830.000.000,000		2.830.000.000,000		2.830.000.000,000		3.290.000.000,000	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.220.560.000,000		1.229.010.000,000		1.220.960.000,000		1.222.000.000,000		1.228.040.000,000	
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah (Persentase)	0	94	95	1.220.560.000,000	96	1.229.010.000,000	97	1.220.960.000,000	98	1.222.000.000,000	99	1.228.040.000,000	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan inovasi Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					655.000.000,000		655.000.000,000		680.000.000,000		655.000.000,000		774.500.000,000	
Meningkatnya keselarasan RPJMD dengan RENSTRA PD	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	100	100	100	180.000.000,000	100	180.000.000,000	100	205.000.000,000	100	180.000.000,000	100	199.500.000,000	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan inovasi Daerah
Meningkatnya keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	93	94	95	475.000.000,000	96	475.000.000,000	97	475.000.000,000	98	475.000.000,000	99	575.000.000,000	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan inovasi Daerah
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					954.440.000,000		945.990.000,000		929.040.000,000		953.000.000,000		1.287.460.000,000	
Meningkatnya sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan dengan dokumen perencanaan lainnya	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	100	100	100	320.000.000,000	100	310.000.000,000	100	310.000.000,000	100	305.000.000,000	100	430.000.000,000	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan inovasi Daerah
Meningkatnya sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan dokumen perencanaan lainnya	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	100	100	100	305.000.000,000	100	325.990.000,000	100	315.000.000,000	100	348.000.000,000	100	437.460.000,000	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan inovasi Daerah
Meningkatnya sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA dengan dokumen perencanaan lainnya	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	100	100	100	329.440.000,000	100	310.000.000,000	100	304.040.000,000	100	300.000.000,000	100	420.000.000,000	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan inovasi Daerah
5.02 - KEUANGAN					706.589.204.744,420		735.823.426.583,120		766.614.751.536,080		799.062.160.795,270		833.273.850.374,720	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					215.798.491.091,560		220.781.291.249,110		226.013.231.414,540		231.506.768.588,240		237.274.982.620,620	
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan bidang Keuangan	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah (Persentase)	60	65	70	215.798.491.091,560	75	220.781.291.249,110	80	226.013.231.414,540	85	231.506.768.588,240	90	237.274.982.620,620	5.02.0.00.0.00.04.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					489.928.689.908,370		514.180.111.589,520		539.739.496.377,050		566.693.368.462,540		595.136.844.009,610	
Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	90	95	96	498.023.997,620	97	498.023.997,620	98	498.023.997,620	99	498.023.997,620	100	498.023.997,620	5.02.0.00.0.00.04.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	0	0	24,82	488.949.988.410,750	24,57	513.201.410.091,900	24,32	538.760.794.879,430	24,07	565.714.666.964,920	23,82	594.158.142.511,990	5.02.0.00.0.00.04.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	19	13	20		25		30		35		40		5.02.0.00.0.00.04.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	91,58	93	94	480.677.500,000	95	480.677.500,000	96	480.677.500,000	97	480.677.500,000	98	480.677.500,000	5.02.0.00.0.00.04.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	0	0	0		0		0		0		0		5.02.0.00.0.00.04.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					341.406.825,000		341.406.825,000		341.406.825,000		341.406.825,000		341.406.825,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	10	20	30	341.406.825,000	40	341.406.825,000	50	341.406.825,000	60	341.406.825,000	70	341.406.825,000	5.02.0.00.0.00.04.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					520.616.919,490		520.616.919,490		520.616.919,490		520.616.919,490		520.616.919,490	
Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)	0	65	70	80.352.934,830	75	80.352.934,830	80	80.352.934,830	85	80.352.934,830	90	80.352.934,830	5.02.0.00.0.00.04.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Meningkatnya Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)	0	70	75	37.000.220,000	80	37.000.220,000	85	37.000.220,000	90	37.000.220,000	95	37.000.220,000	5.02.0.00.0.00.04.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	2,85	3,47	3,48	403.263.764,660	3,49	403.263.764,660	3,50	403.263.764,660	3,51	403.263.764,660	3,52	403.263.764,660	5.02.0.00.0.00.04.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5.03 - KEPEGAWAIAN					1.950.000.000,000		1.950.000.000,000		1.950.000.000,000		1.115.000.000,000		1.950.000.000,000	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					856.500.000,000		856.500.000,000		856.500.000,000		376.500.000,000		856.500.000,000	
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan Bidang Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah (Persentase)	90	90	91	856.500.000,000	92	856.500.000,000	93	856.500.000,000	94	376.500.000,000	95	856.500.000,000	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					1.093.500.000,000		1.093.500.000,000		1.093.500.000,000		738.500.000,000		1.093.500.000,000	
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	100	100	100	210.000.000,000	100	210.000.000,000	100	210.000.000,000	100	110.000.000,000	100	210.000.000,000	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	82	98	98	195.000.000,000	98	195.000.000,000	98	195.000.000,000	98	100.000.000,000	98	195.000.000,000	5.03.5.04.0.00.01.0 000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensiny a (Persentase)	0,4	0,5	0,7	538.500.000,000	1,0	538.500.000,000	1,2	538.500.000,000	4,7	438.500.000,000	5,5	538.500.000,000	5.03.5.04.0.00.01.0 000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Meningkatnya Tata Kelola Pengembangan Karir ASN	Persentase Pengembang an Karir ASN sesuai dengan Kompetensiny a (Persentase)	9,0	25,6	12,8	150.000.000,000	15,8	150.000.000,000	14,4	150.000.000,000	17,4	90.000.000,000	12,8	150.000.000,000	5.03.5.04.0.00.01.0 000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					550.000.000,000		550.000.000,000		550.000.000,000		385.000.000,000		550.000.000,000	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA					550.000.000,000		550.000.000,000		550.000.000,000		385.000.000,000		550.000.000,000	
Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan (Persentase)	100	100	100	30.000.000,000	100	30.000.000,000	100	30.000.000,000	100	20.000.000,000	100	30.000.000,000	5.03.5.04.0.00.01.0 000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang mendapatkan pengembanga n kompetensi dasar, manajerial dan fungsional (Persentase)	0,5	2,1	3,8	210.000.000,000	4,0	210.000.000,000	4,2	210.000.000,000	4,4	205.000.000,000	4,6	210.000.000,000	5.03.5.04.0.00.01.0 000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang mendapatkan pengembanga n kompetensi teknis (Persentase)	0,0	0,5	0,9	200.000.000,000	1,3	200.000.000,000	1,4	200.000.000,000	1,6	50.000.000,000	1,7	200.000.000,000	5.03.5.04.0.00.01.0 000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (Persentase)	0,0	0,5	0,9	110.000.000,000	1,3	110.000.000,000	1,4	110.000.000,000	1,6	110.000.000,000	1,7	110.000.000,000	5.03.5.04.0.00.01.0 000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					670.000.000,000		670.000.000,000		670.000.000,000		670.000.000,000		710.000.000,000	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					430.000.000,000		400.000.000,000		430.000.000,000		400.000.000,000		310.000.000,000	
Meningkatnya pemanfaatan riset kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	100	100	100	430.000.000,000	100	400.000.000,000	100	430.000.000,000	100	400.000.000,000	100	310.000.000,000	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan inovasi Daerah
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					240.000.000,000		270.000.000,000		240.000.000,000		270.000.000,000		400.000.000,000	
Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Persentase)	0	0	100	240.000.000,000	100	270.000.000,000	100	240.000.000,000	100	270.000.000,000	100	400.000.000,000	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan inovasi Daerah
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					6.897.374.829,750		7.042.243.571,000		7.194.355.750,080		7.353.973.537,580		7.521.777.214,460	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.872.489.833,750		4.937.450.007,000		5.029.355.750,080		5.138.473.537,580		5.220.277.214,460	
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan bidang Pengawasan	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah (Persentase)	90	92	94	4.872.489.833,750	96	4.937.450.007,000	98	5.029.355.750,080	99	5.138.473.537,580	100	5.220.277.214,460	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					1.275.000.000,000		1.275.000.000,000		1.283.000.000,000		1.315.500.000,000		1.335.000.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	20	80	84	1.275.000.000,000	85	1.275.000.000,000	88	1.283.000.000,000	89	1.315.500.000,000	92	1.335.000.000,000	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					749.884.996,000		829.793.564,000		882.000.000,000		900.000.000,000		966.500.000,000	
Peningkatan Capaian Target Kinerja atas tugas pembinaan dan pengawasan pada setiap OPD	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	Berkembang	Berkembang	Berkembang	749.884.996,000	Berkembang	829.793.564,000	Terdefinisi	882.000.000,000	Terdefinisi	900.000.000,000	Terkelola dan Terukur	966.500.000,000	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat
	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)		Terintegrasi (Integrated)		Dikelola (Managed)		Dikelola (Managed)		Dikelola (Managed)		6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat
7.01 - KECAMATAN					12.362.000.000,000		12.362.000.000,000		12.362.000.000,000		12.362.000.000,000		12.362.000.000,000	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.192.788.533,000		8.172.959.133,000		8.180.598.533,000		8.232.801.833,000		8.240.266.333,000	
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan bidang kewilayahan	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah (Persentase)	15	15	15	224.000.000,000	15	224.000.000,000	20	224.000.000,000	20	224.000.000,000	20	224.000.000,000	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Lahusa
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan bidang kewilayahan	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah (Persentase)	70	70	80	224.000.000,000	80	224.000.000,000	90	224.000.000,000	90	224.000.000,000	100	224.000.000,000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Lolomatua
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan bidang kewilayahan	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah (Persentase)	0	75	80	224.000.000,000	80	224.000.000,000	85	224.000.000,000	85	224.000.000,000	90	224.000.000,000	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Gomo
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan bidang kewilayahan	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah (Persentase)	0	100	100	276.500.000,000	100	276.500.000,000	100	276.500.000,000	100	276.500.000,000	100	276.500.000,000	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Hibala
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan bidang kewilayahan	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah (Persentase)	0	75	75	248.173.700,000	80	248.173.700,000	85	248.173.700,000	90	248.173.700,000	95	248.173.700,000	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Pulau-Pulau Batu

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan bidang kewilayahan	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah (Persentase)	0	70	75	153.000.000,000	80	153.000.000,000	85	153.000.000,000	90	153.000.000,000	95	153.000.000,000	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Teluk Dalam
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan bidang kewilayahan	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah (Persentase)	80	82	84	265.500.000,000	86	265.500.000,000	88	265.500.000,000	90	265.500.000,000	92	265.500.000,000	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Lolowau
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan bidang kewilayahan	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah (Persentase)	72	74	76	242.000.000,000	76	242.000.000,000	78	242.000.000,000	78	242.000.000,000	80	242.000.000,000	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Susua
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan bidang kewilayahan	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah (Persentase)	75	80	83	229.000.000,000	85	232.000.000,000	87	214.000.000,000	90	235.000.000,000	92	237.000.000,000	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Maniamolo
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan bidang kewilayahan	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah (Persentase)	0	87	89	232.410.400,000	91	232.504.900,000	93	233.179.400,000	95	237.183.000,000	97	238.363.000,000	7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Hilimegai
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan bidang kewilayahan	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah (Persentase)	0	70	75	224.000.000,000	80	224.000.000,000	85	224.000.000,000	90	224.000.000,000	95	224.000.000,000	7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Toma
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan bidang kewilayahan	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah (Persentase)	-	80,00	80,50	215.200.000,000	82,00	215.200.000,000	84,00	215.200.000,000	88,00	215.200.000,000	90,00	215.200.000,000	7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kecamatan Mazino
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan bidang kewilayahan	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah (Persentase)	0	80	80	223.297.733,000	80	223.297.733,000	85	223.297.733,000	85	223.297.733,000	100	223.297.733,000	7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Umbunasi
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan bidang kewilayahan	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah (Persentase)	0	87	89	230.759.400,000	91	230.734.400,000	93	231.271.400,000	95	236.692.700,000	97	236.785.000,000	7.01.0.00.0.00.15.0000 - Kecamatan Aramo
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan bidang kewilayahan	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah (Persentase)	0	100	100	280.000.000,000	100	280.000.000,000	100	280.000.000,000	100	280.000.000,000	100	280.000.000,000	7.01.0.00.0.00.16.0000 - Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan bidang kewilayahan	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah (Persentase)	70	70	80	224.000.000,000	80	224.000.000,000	90	224.000.000,000	90	224.000.000,000	100	224.000.000,000	7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kecamatan Mazo
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan bidang kewilayahan	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah (Persentase)	72	72	76	242.000.000,000	78	242.000.000,000	78	242.000.000,000	79	242.000.000,000	79	242.000.000,000	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Fanayama

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan bidang kewilayahan	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah (Persentase)	70	70	80	224.000.000,000	80	224.000.000,000	90	224.000.000,000	90	224.000.000,000	100	224.000.000,000	7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Ulunoyo
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan bidang kewilayahan	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah (Persentase)	0	100	100	236.515.600,000	100	238.977.400,000	100	237.505.600,000	100	241.683.100,000	100	241.883.800,000	7.01.0.00.0.00.20.0000 - Kecamatan Huruna
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan bidang kewilayahan	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah (Persentase)	70	70	80	224.000.000,000	80	224.000.000,000	90	224.000.000,000	90	224.000.000,000	100	224.000.000,000	7.01.0.00.0.00.21.0000 - Kecamatan O O U
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan bidang kewilayahan	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah (Persentase)	0	87	89	232.410.400,000	91	232.424.900,000	93	233.179.400,000	95	237.183.000,000	97	238.363.000,000	7.01.0.00.0.00.22.0000 - Kecamatan Onohazumba
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan bidang kewilayahan	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah (Persentase)	0	87	89	232.436.400,000	91	232.411.400,000	93	232.948.400,000	95	237.961.750,000	97	238.462.000,000	7.01.0.00.0.00.23.0000 - Kecamatan Hilisalawa ahe
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan bidang kewilayahan	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah (Persentase)	70	70	80	224.000.000,000	80	224.000.000,000	90	224.000.000,000	90	224.000.000,000	100	224.000.000,000	7.01.0.00.0.00.24.0000 - Kecamatan Ulususua
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan bidang kewilayahan	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah (Persentase)	70	70	80	224.000.000,000	80	224.000.000,000	90	224.000.000,000	90	224.000.000,000	100	224.000.000,000	7.01.0.00.0.00.25.0000 - Kecamatan Sidua ori
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan bidang kewilayahan	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah (Persentase)	70	70	80	211.500.000,000	80	211.500.000,000	90	211.500.000,000	90	211.500.000,000	100	211.500.000,000	7.01.0.00.0.00.26.0000 - Kecamatan Somambawa
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan bidang kewilayahan	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah (Persentase)	0	100	100	232.410.400,000	100	232.424.900,000	100	233.179.400,000	100	237.183.000,000	100	238.363.000,000	7.01.0.00.0.00.27.0000 - Kecamatan Boronadu
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan bidang kewilayahan	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah (Persentase)	0	100	100	251.112.300,000	100	250.735.800,000	100	251.541.300,000	100	250.624.300,000	100	251.099.300,000	7.01.0.00.0.00.28.0000 - Kecamatan Simuk
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan bidang kewilayahan	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah (Persentase)	0	100	100	248.376.900,000	100	248.240.300,000	100	248.150.900,000	100	248.392.900,000	100	248.470.900,000	7.01.0.00.0.00.29.0000 - Kecamatan Pulau-Pulau Batu Barat
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan bidang kewilayahan	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah (Persentase)	0	80	85	248.376.900,000	90	248.240.300,000	95	248.150.900,000	100	248.392.900,000	100	248.470.900,000	7.01.0.00.0.00.30.0000 - Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan bidang kewilayahan	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah (Persentase)	0	100	100	248.029.000,000	100	248.029.000,000	100	248.029.000,000	100	248.029.000,000	100	248.029.000,000	7.01.0.00.0.00.31.0000 - Kecamatan Tanah Masa
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan bidang kewilayahan	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah (Persentase)	87,00	87,25	87,50	214.228.000,000	87,75	214.228.000,000	88,00	214.228.000,000	88,25	214.228.000,000	88,50	214.228.000,000	7.01.0.00.0.00.32.0000 - Kecamatan Luahagundre Maniamolo
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan bidang kewilayahan	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah (Persentase)	60	65	70	273.221.000,000	75	270.221.000,000	80	273.221.000,000	85	273.221.000,000	90	273.221.000,000	7.01.0.00.0.00.33.0000 - Kecamatan Onolalu
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan bidang kewilayahan	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah (Persentase)	0	87	89	232.436.400,000	91	232.411.400,000	93	232.948.400,000	95	237.961.750,000	97	238.462.000,000	7.01.0.00.0.00.34.0000 - Kecamatan Uluidanotae
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan bidang kewilayahan	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah (Persentase)	70	70	80	224.000.000,000	80	224.000.000,000	90	224.000.000,000	90	224.000.000,000	100	224.000.000,000	7.01.0.00.0.00.35.0000 - Kecamatan Idanotae
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Bidang Kewilayahan	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah (Persentase)	76,30	76,50	77,00	253.894.000,000	77,50	232.204.000,000	80,00	251.894.000,000	80,50	251.894.000,000	90,00	251.894.000,000	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Amandraya
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					574.922.100,000		578.619.800,000		585.815.100,000		545.368.200,000		540.131.100,000	
meningkatnya layanan administrasi publik	"Persentase layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang sesuai standar pelayanan (SOP) " (Persentase)	0	100	100	16.324.900,000	100	16.884.400,000	100	16.425.900,000	100	12.430.900,000	100	12.024.900,000	7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Hilimegai
Meningkatnya layanan administrasi publik	"Persentase layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang sesuai standar pelayanan (SOP) "	15	15	20	16.000.000,000	20	16.000.000,000	20	16.000.000,000	20	16.000.000,000	20	16.000.000,000	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Lahusa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(Persentase)													
Meningkatnya layanan administrasi publik	"Persentase layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang sesuai standar pelayanan (SOP) " (Persentase)	80	80	80	16.000.000,000	80	16.000.000,000	90	16.000.000,000	90	16.000.000,000	100	16.000.000,000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Lolomatua
Meningkatnya layanan administrasi publik	"Persentase layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang sesuai standar pelayanan (SOP) " (Persentase)	0	75	75	16.000.000,000	80	16.000.000,000	80	16.000.000,000	85	16.000.000,000	90	16.000.000,000	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Gomo
Meningkatnya layanan administrasi publik	"Persentase layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang sesuai standar pelayanan (SOP) " (Persentase)	0	100	100	10.000.000,000	100	10.000.000,000	100	10.000.000,000	100	10.000.000,000	100	10.000.000,000	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Hibala
Meningkatnya layanan administrasi publik	"Persentase layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang sesuai standar pelayanan (SOP) " (Persentase)	0	75	80	11.763.300,000	85	11.763.300,000	90	11.763.300,000	95	11.763.300,000	100	11.763.300,000	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Pulau-Pulau Batu
Meningkatnya layanan administrasi publik	"Persentase layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang	89	89	89	52.000.000,000	90	52.000.000,000	91	52.000.000,000	92	52.000.000,000	93	52.000.000,000	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Teluk Dalam

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	sesuai standar pelayanan (SOP) " (Persentase)													
Meningkatnya layanan administrasi publik	"Persentase layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang sesuai standar pelayanan (SOP) " (Persentase)	80	82	84	9.500.000,000	86	9.500.000,000	88	9.500.000,000	90	9.500.000,000	92	9.500.000,000	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Lolowau
Meningkatnya layanan administrasi publik	"Persentase layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang sesuai standar pelayanan (SOP) " (Persentase)	10	10	10	8.000.000,000	10	8.000.000,000	20	8.000.000,000	20	8.000.000,000	20	8.000.000,000	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Susua
Meningkatnya layanan administrasi publik	"Persentase layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang sesuai standar pelayanan (SOP) " (Persentase)	82	84	88	15.000.000,000	90	15.000.000,000	92	25.000.000,000	93	15.000.000,000	95	10.000.000,000	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Maniamolo
Meningkatnya layanan administrasi publik	"Persentase layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang sesuai standar pelayanan (SOP) " (Persentase)	0	70	75	16.000.000,000	80	16.000.000,000	85	16.000.000,000	90	16.000.000,000	95	16.000.000,000	7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Toma
Meningkatnya layanan administrasi publik	"Persentase layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang	0	83,00	85,00	37.800.000,000	86,50	37.800.000,000	87,00	37.800.000,000	88,50	37.800.000,000	90,00	37.800.000,000	7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kecamatan Mazino

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	sesuai standar pelayanan (SOP) " (Persentase)													
Meningkatnya layanan administrasi publik	"Persentase layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang sesuai standar pelayanan (SOP) " (Persentase)	0	90	90	26.000.000,000	95	26.000.000,000	100	26.000.000,000	100	26.000.000,000	100	26.000.000,000	7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Umbunasi
Meningkatnya layanan administrasi publik	"Persentase layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang sesuai standar pelayanan (SOP) " (Persentase)	0	100	100	16.276.900,000	100	17.034.900,000	100	16.377.900,000	100	12.382.900,000	100	11.968.900,000	7.01.0.00.0.00.15.0000 - Kecamatan Aramo
Meningkatnya layanan administrasi publik	"Persentase layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang sesuai standar pelayanan (SOP) " (Persentase)	80	80	80	16.000.000,000	80	16.000.000,000	90	16.000.000,000	90	16.000.000,000	100	16.000.000,000	7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kecamatan Mazo
Meningkatnya layanan administrasi publik	"Persentase layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang sesuai standar pelayanan (SOP) " (Persentase)	0	80	85	8.000.000,000	90	8.000.000,000	95	8.000.000,000	100	8.000.000,000	100	8.000.000,000	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Fanayama
Meningkatnya layanan administrasi publik	"Persentase layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang	80	80	80	16.000.000,000	80	16.000.000,000	90	16.000.000,000	90	16.000.000,000	100	16.000.000,000	7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Ulunoyo

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	sesuai standar pelayanan (SOP) " (Persentase)													
Meningkatnya layanan administrasi publik	"Persentase layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang sesuai standar pelayanan (SOP) " (Persentase)	0	100	100	15.124.900,000	100	13.672.400,000	100	14.733.900,000	100	10.456.600,000	100	11.157.900,000	7.01.0.00.0.00.20.0000 - Kecamatan Huruna
Meningkatnya layanan administrasi publik	"Persentase layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang sesuai standar pelayanan (SOP) " (Persentase)	80	80	80	16.000.000,000	80	16.000.000,000	90	16.000.000,000	90	16.000.000,000	100	16.000.000,000	7.01.0.00.0.00.21.0000 - Kecamatan O O U
Meningkatnya layanan administrasi publik	"Persentase layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang sesuai standar pelayanan (SOP) " (Persentase)	0	100	100	16.324.900,000	100	16.964.400,000	100	16.425.900,000	100	12.430.900,000	100	12.024.900,000	7.01.0.00.0.00.22.0000 - Kecamatan Onohazumba
Meningkatnya layanan administrasi publik	"Persentase layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang sesuai standar pelayanan (SOP) " (Persentase)	0	100	100	16.276.900,000	100	17.034.900,000	100	16.377.900,000	100	11.594.600,000	100	11.968.900,000	7.01.0.00.0.00.23.0000 - Kecamatan Hilisalawa ahe
Meningkatnya layanan administrasi publik	"Persentase layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang	80	80	80	16.000.000,000	80	16.000.000,000	90	16.000.000,000	90	16.000.000,000	100	16.000.000,000	7.01.0.00.0.00.24.0000 - Kecamatan Ulususua

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	sesuai standar pelayanan (SOP) " (Persentase)													
Meningkatnya layanan administrasi publik	"Persentase layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang sesuai standar pelayanan (SOP) " (Persentase)	80	80	80	16.000.000,000	80	16.000.000,000	90	16.000.000,000	90	16.000.000,000	100	16.000.000,000	7.01.0.00.0.00.25.0000 - Kecamatan Sidua ori
Meningkatnya layanan administrasi publik	"Persentase layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang sesuai standar pelayanan (SOP) " (Persentase)	80	80	80	16.000.000,000	80	16.000.000,000	90	16.000.000,000	90	16.000.000,000	100	16.000.000,000	7.01.0.00.0.00.26.0000 - Kecamatan Somambawa
Meningkatnya layanan administrasi publik	"Persentase layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang sesuai standar pelayanan (SOP) " (Persentase)	0	100	100	16.324.900,000	100	16.964.400,000	100	16.425.900,000	100	12.430.900,000	100	12.024.900,000	7.01.0.00.0.00.27.0000 - Kecamatan Boronadu
Meningkatnya layanan administrasi publik	"Persentase layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang sesuai standar pelayanan (SOP) " (Persentase)	0	100	100	11.899.900,000	100	12.664.400,000	100	12.125.900,000	100	11.954.900,000	100	11.899.900,000	7.01.0.00.0.00.28.0000 - Kecamatan Simuk
Meningkatnya layanan administrasi publik	"Persentase layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang	0	100	100	11.763.300,000	100	11.899.900,000	100	11.989.300,000	100	11.763.300,000	100	11.763.300,000	7.01.0.00.0.00.29.0000 - Kecamatan Pulau-Pulau Batu Barat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	sesuai standar pelayanan (SOP) " (Persentase)													
Meningkatnya layanan administrasi publik	"Persentase layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang sesuai standar pelayanan (SOP) " (Persentase)	0	80	90	11.763.300,000	100	11.899.900,000	100	11.989.300,000	100	11.763.300,000	100	11.763.300,000	7.01.0.00.0.00.30.0000 - Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara
Meningkatnya layanan administrasi publik	"Persentase layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang sesuai standar pelayanan (SOP) " (Persentase)	0	100	100	38.815.000,000	100	38.815.000,000	100	38.815.000,000	100	38.815.000,000	100	38.815.000,000	7.01.0.00.0.00.31.0000 - Kecamatan Tanah Masa
Meningkatnya layanan administrasi publik	"Persentase layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang sesuai standar pelayanan (SOP) " (Persentase)	87,00	87,25	87,50	4.485.000,000	87,75	4.485.000,000	88,00	4.485.000,000	88,25	4.485.000,000	88,50	4.485.000,000	7.01.0.00.0.00.32.0000 - Kecamatan Luahagundre Maniamolo
Meningkatnya layanan administrasi publik	"Persentase layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang sesuai standar pelayanan (SOP) " (Persentase)	70	75	80	8.095.000,000	85	8.095.000,000	90	8.095.000,000	95	8.095.000,000	100	8.095.000,000	7.01.0.00.0.00.33.0000 - Kecamatan Onolalu
Meningkatnya layanan administrasi publik	"Persentase layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang	0	100	100	16.276.900,000	100	17.034.900,000	100	16.377.900,000	100	11.594.600,000	100	11.968.900,000	7.01.0.00.0.00.34.0000 - Kecamatan Uluidanotae

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	sesuai standar pelayanan (SOP) " (Persentase)													
Meningkatnya layanan administrasi publik	"Persentase layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang sesuai standar pelayanan (SOP) " (Persentase)	80	80	80	16.000.000,000	80	16.000.000,000	90	16.000.000,000	90	16.000.000,000	100	16.000.000,000	7.01.0.00.0.00.35.0000 - Kecamatan Idanotae
Meningkatnya Layanan Administrasi Publik	"Persentase layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang sesuai standar pelayanan (SOP) " (Persentase)	76,30	76,50	77,00	11.107.000,000	77,50	11.107.000,000	80,00	11.107.000,000	80,50	11.107.000,000	90,00	11.107.000,000	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Amandraya
Meningkatnya Layanan Administrasi Publik	"Persentase layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang sesuai standar pelayanan (SOP) " (Persentase)	0	100	100	10.000.000,000	100	10.000.000,000	100	10.000.000,000	100	10.000.000,000	100	10.000.000,000	7.01.0.00.0.00.16.0000 - Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					2.415.859.000,000		2.413.198.000,000		2.412.524.000,000		2.409.620.600,000		2.406.066.200,000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	"Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes) "	10	10	15	20.000.000,000	15	20.000.000,000	15	20.000.000,000	20	20.000.000,000	20	20.000.000,000	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Lahusa

SALINAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(Persentase)													
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	"Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes) " (Persentase)	60	60	65	20.000.000,000	70	20.000.000,000	75	20.000.000,000	75	20.000.000,000	80	20.000.000,000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Lolomatua
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	"Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes) " (Persentase)	0	75	75	20.000.000,000	80	20.000.000,000	80	20.000.000,000	90	20.000.000,000	100	20.000.000,000	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Gomo
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	"Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes) " (Persentase)	0	100	100	6.000.000,000	100	6.000.000,000	100	6.000.000,000	100	6.000.000,000	100	6.000.000,000	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Hibala
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	"Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan	0	75	80	867.576.000,000	85	867.576.000,000	90	867.576.000,000	95	867.576.000,000	100	867.576.000,000	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Pulau-Pulau Batu

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(Musrenbangdes) " (Persentase)													
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	"Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes) " (Persentase)	80	82	84	4.000.000,000	86	4.000.000,000	88	4.000.000,000	90	4.000.000,000	92	4.000.000,000	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Lolowau
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	"Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes) " (Persentase)	98	100	100	11.000.000,000	100	11.000.000,000	100	11.000.000,000	100	11.000.000,000	100	11.000.000,000	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Susua
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	"Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes) " (Persentase)	85	90	90	10.000.000,000	95	10.000.000,000	95	10.000.000,000	95	9.000.000,000	99	10.000.000,000	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Maniamolo
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	"Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan	82	84	86	35.269.300,000	88	34.962.300,000	90	34.781.300,000	92	34.422.700,000	94	33.896.700,000	7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Hilimegai

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(Musrenbangdes) " (Persentase)													
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	"Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes) " (Persentase)	0	70	75	20.000.000,000	80	20.000.000,000	85	20.000.000,000	90	20.000.000,000	95	20.000.000,000	7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Toma
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	"Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes) " (Persentase)	0	80,00	84,00	5.000.000,000	85,00	5.000.000,000	85,50	5.000.000,000	86,50	5.000.000,000	90,00	5.000.000,000	7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kecamatan Mazino
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	"Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes) " (Persentase)	0	100	100	10.000.000,000	100	10.000.000,000	100	10.000.000,000	100	10.000.000,000	100	10.000.000,000	7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Umbunasi
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	"Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan	0	84	86	34.591.300,000	88	34.284.300,000	90	34.259.300,000	92	33.829.000,000	94	33.218.700,000	7.01.0.00.0.00.15.0000 - Kecamatan Aramo

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(Musrenbangdes) " (Persentase)													
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	"Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes) " (Persentase)	60	60	65	20.000.000,000	70	20.000.000,000	75	20.000.000,000	75	20.000.000,000	80	20.000.000,000	7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kecamatan Mazo
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	"Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes) " (Persentase)	98	98	100	11.000.000,000	100	11.000.000,000	100	11.000.000,000	100	11.000.000,000	100	11.000.000,000	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Fanayama
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	"Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes) " (Persentase)	60	60	65	20.000.000,000	70	20.000.000,000	75	20.000.000,000	75	20.000.000,000	80	20.000.000,000	7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Ulunoyo
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	"Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan	0	87	89	33.339.300,000	92	32.700.300,000	95	32.876.300,000	98	32.870.100,000	100	32.344.100,000	7.01.0.00.0.00.20.0000 - Kecamatan Huruna

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(Musrenbangdes) " (Persentase)													
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	"Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes) " (Persentase)	60	60	65	20.000.000,000	70	20.000.000,000	75	20.000.000,000	75	20.000.000,000	80	20.000.000,000	7.01.0.00.0.00.21.0000 - Kecamatan O O U
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	"Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes) " (Persentase)	75	78	86	35.269.300,000	88	34.962.300,000	90	34.781.300,000	92	34.422.700,000	94	33.896.700,000	7.01.0.00.0.00.22.0000 - Kecamatan Onohazumba
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	"Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes) " (Persentase)	0	65	86	34.591.300,000	88	34.284.300,000	90	34.259.300,000	92	33.865.750,000	94	33.195.700,000	7.01.0.00.0.00.23.0000 - Kecamatan Hilisalawa ahe
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	"Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan	60	60	65	20.000.000,000	70	20.000.000,000	75	20.000.000,000	75	20.000.000,000	80	20.000.000,000	7.01.0.00.0.00.24.0000 - Kecamatan Ulususua

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(Musrenbangdes) " (Persentase)													
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	"Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes) " (Persentase)	60	60	65	20.000.000,000	70	20.000.000,000	75	20.000.000,000	75	20.000.000,000	80	20.000.000,000	7.01.0.00.0.00.25.0000 - Kecamatan Sidua ori
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	"Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes) " (Persentase)	0	84	86	35.269.300,000	88	34.962.300,000	90	34.781.300,000	92	34.422.700,000	94	33.896.700,000	7.01.0.00.0.00.27.0000 - Kecamatan Boronadu
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	"Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes) " (Persentase)	0	98	98	38.979.300,000	98	38.799.300,000	100	38.567.300,000	100	38.995.300,000	100	38.651.300,000	7.01.0.00.0.00.28.0000 - Kecamatan Simuk
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	"Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan	0	98	98	38.573.300,000	98	38.573.300,000	100	38.573.300,000	100	38.557.300,000	100	38.479.300,000	7.01.0.00.0.00.29.0000 - Kecamatan Pulau-Pulau Batu Barat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(Musrenbangdes) " (Persentase)													
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	"Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes) " (Persentase)	0	80	100	38.573.300,000	100	38.573.300,000	100	38.573.300,000	100	38.557.300,000	100	38.479.300,000	7.01.0.00.0.00.30.0000 - Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	"Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes) " (Persentase)	0	100	100	6.450.000,000	100	6.450.000,000	100	6.450.000,000	100	6.450.000,000	100	6.450.000,000	7.01.0.00.0.00.31.0000 - Kecamatan Tanah Masa
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	"Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes) " (Persentase)	87,00	87,25	87,50	14.586.000,000	87,75	14.586.000,000	88,00	14.586.000,000	88,25	14.586.000,000	88,50	14.586.000,000	7.01.0.00.0.00.32.0000 - Kecamatan Luahagundre Maniamolo
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	"Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan	70	75	80	1.200.000,000	85	1.200.000,000	90	1.200.000,000	95	1.200.000,000	100	1.200.000,000	7.01.0.00.0.00.33.0000 - Kecamatan Onolalu

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(Musrenbangdes) " (Persentase)													
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	"Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes) " (Persentase)	60	60	65	20.000.000,000	70	20.000.000,000	75	20.000.000,000	75	20.000.000,000	80	20.000.000,000	7.01.0.00.0.00.35.0000 - Kecamatan Idanotae
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	"Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes) " (Persentase)	60	60	65	20.000.000,000	70	20.000.000,000	75	20.000.000,000	75	20.000.000,000	80	20.000.000,000	7.01.0.00.0.00.26.0000 - Kecamatan Somambawa
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	"Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes) " (Persentase)	0	100	100	10.000.000,000	100	10.000.000,000	100	10.000.000,000	100	10.000.000,000	100	10.000.000,000	7.01.0.00.0.00.16.0000 - Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	"Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan	100	100	100	880.000.000,000	100	880.000.000,000	100	880.000.000,000	100	880.000.000,000	100	880.000.000,000	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Teluk Dalam

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(Musrenbangdes) " (Persentase)													
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	"Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes) " (Persentase)	80	84	86	34.591.300,000	88	34.284.300,000	90	34.259.300,000	92	33.865.750,000	94	33.195.700,000	7.01.0.00.0.00.34.0000 - Kecamatan Uluidanotae
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					218.585.900,000		218.585.900,000		218.585.900,000		218.585.900,000		218.585.900,000	
Meningkatnya keamanan, ketertiban dan ketanggapan terhadap keadaan darurat	"Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan " (Poin)	10	10	15	10.000.000,000	15	10.000.000,000	15	10.000.000,000	20	10.000.000,000	20	10.000.000,000	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Lahusa
Meningkatnya keamanan, ketertiban dan ketanggapan terhadap keadaan darurat	"Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan " (Poin)	0	75	80	10.341.500,000	85	10.341.500,000	90	10.341.500,000	95	10.341.500,000	100	10.341.500,000	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Pulau-Pulau Batu
Meningkatnya keamanan, ketertiban dan ketanggapan terhadap keadaan darurat	"Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan " (Poin)	0	80	100	10.341.500,000	100	10.341.500,000	100	10.341.500,000	100	10.341.500,000	100	10.341.500,000	7.01.0.00.0.00.30.0000 - Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara
Meningkatnya keamanan, ketertiban dan ketanggapan terhadap keadaan darurat	"Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan " (Poin)	0	100	100	9.047.000,000	100	9.047.000,000	100	9.047.000,000	100	9.047.000,000	100	9.047.000,000	7.01.0.00.0.00.31.0000 - Kecamatan Tanah Masa
Meningkatnya keamanan, ketertiban dan ketanggapan terhadap keadaan darurat	"Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan " (Poin)	5	15	25	2.100.000,000	35	2.100.000,000	45	2.100.000,000	50	2.100.000,000	55	2.100.000,000	7.01.0.00.0.00.33.0000 - Kecamatan Onolalu

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya keamanan, ketertiban, dan ketanggapan terhadap keadaan darurat	"Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan " (Poin)	50	50	50	10.000.000,000	60	10.000.000,000	70	10.000.000,000	80	10.000.000,000	90	10.000.000,000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Lolomatua
Meningkatnya keamanan, ketertiban, dan ketanggapan terhadap keadaan darurat	"Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan " (Poin)	0	80	80	10.000.000,000	80	10.000.000,000	85	10.000.000,000	85	10.000.000,000	100	10.000.000,000	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Gomo
Meningkatnya keamanan, ketertiban, dan ketanggapan terhadap keadaan darurat	"Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan " (Poin)	100	100	100	10.000.000,000	100	10.000.000,000	100	10.000.000,000	100	10.000.000,000	100	10.000.000,000	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Teluk Dalam
Meningkatnya keamanan, ketertiban, dan ketanggapan terhadap keadaan darurat	"Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan " (Poin)	80	82	84	3.000.000,000	86	3.000.000,000	88	3.000.000,000	90	3.000.000,000	92	3.000.000,000	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Lolowau
Meningkatnya keamanan, ketertiban, dan ketanggapan terhadap keadaan darurat	"Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan " (Poin)	60	65	70	11.000.000,000	75	11.000.000,000	80	11.000.000,000	85	11.000.000,000	90	11.000.000,000	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Susua
Meningkatnya keamanan, ketertiban, dan ketanggapan terhadap keadaan darurat	"Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan " (Poin)	0	100	100	3.336.600,000	100	3.336.600,000	100	3.336.600,000	100	3.336.600,000	100	3.336.600,000	7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Hilimegai
Meningkatnya keamanan, ketertiban, dan ketanggapan terhadap keadaan darurat	"Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan " (Poin)	0	70	75	10.000.000,000	80	10.000.000,000	85	10.000.000,000	90	10.000.000,000	95	10.000.000,000	7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Toma
Meningkatnya keamanan, ketertiban, dan ketanggapan terhadap keadaan darurat	"Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan " (Poin)	0	85,00	85,00	4.000.000,000	85,50	4.000.000,000	86,00	4.000.000,000	87,50	4.000.000,000	90,00	4.000.000,000	7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kecamatan Mazino
Meningkatnya keamanan, ketertiban, dan ketanggapan terhadap keadaan darurat	"Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan " (Poin)	100	100	100	2.000.000,000	100	2.000.000,000	100	2.000.000,000	100	2.000.000,000	100	2.000.000,000	7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Umbunasi
Meningkatnya keamanan, ketertiban, dan ketanggapan terhadap keadaan darurat	"Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan " (Poin)	0	100	100	3.336.600,000	100	3.336.600,000	100	3.336.600,000	100	3.336.600,000	100	3.336.600,000	7.01.0.00.0.00.15.0000 - Kecamatan Aramo

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya keamanan, ketertiban, dan ketanggapan terhadap keadaan darurat	"Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan " (Poin)	50	50	50	10.000.000,000	60	10.000.000,000	70	10.000.000,000	80	10.000.000,000	90	10.000.000,000	7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kecamatan Mazo
Meningkatnya keamanan, ketertiban, dan ketanggapan terhadap keadaan darurat	"Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan " (Poin)	50	50	50	10.000.000,000	60	10.000.000,000	70	10.000.000,000	80	10.000.000,000	90	10.000.000,000	7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Ulunoyo
Meningkatnya keamanan, ketertiban, dan ketanggapan terhadap keadaan darurat	"Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan " (Poin)	0	87	89	1.568.300,000	92	1.568.300,000	95	1.568.300,000	98	1.568.300,000	100	1.568.300,000	7.01.0.00.0.00.20.0000 - Kecamatan Huruna
Meningkatnya keamanan, ketertiban, dan ketanggapan terhadap keadaan darurat	"Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan " (Poin)	50	50	50	10.000.000,000	60	10.000.000,000	70	10.000.000,000	80	10.000.000,000	90	10.000.000,000	7.01.0.00.0.00.21.0000 - Kecamatan O O U
Meningkatnya keamanan, ketertiban, dan ketanggapan terhadap keadaan darurat	"Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan " (Poin)	0	100	100	3.336.600,000	100	3.336.600,000	100	3.336.600,000	100	3.336.600,000	100	3.336.600,000	7.01.0.00.0.00.22.0000 - Kecamatan Onohazumba
Meningkatnya keamanan, ketertiban, dan ketanggapan terhadap keadaan darurat	"Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan " (Poin)	100	100	100	3.336.600,000	100	3.336.600,000	100	3.336.600,000	100	3.336.600,000	100	3.336.600,000	7.01.0.00.0.00.23.0000 - Kecamatan Hilisalawa ahe
Meningkatnya keamanan, ketertiban, dan ketanggapan terhadap keadaan darurat	"Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan " (Poin)	50	50	50	10.000.000,000	60	10.000.000,000	70	10.000.000,000	80	10.000.000,000	90	10.000.000,000	7.01.0.00.0.00.24.0000 - Kecamatan Ulususua
Meningkatnya keamanan, ketertiban, dan ketanggapan terhadap keadaan darurat	"Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan " (Poin)	50	50	50	10.000.000,000	60	10.000.000,000	70	10.000.000,000	80	10.000.000,000	90	10.000.000,000	7.01.0.00.0.00.25.0000 - Kecamatan Sidua ori
Meningkatnya keamanan, ketertiban, dan ketanggapan terhadap keadaan darurat	"Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan " (Poin)	50	50	50	10.000.000,000	60	10.000.000,000	70	10.000.000,000	80	10.000.000,000	90	10.000.000,000	7.01.0.00.0.00.26.0000 - Kecamatan Somambawa
Meningkatnya keamanan, ketertiban, dan ketanggapan terhadap keadaan darurat	"Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan " (Poin)	0	100	100	3.336.600,000	100	3.336.600,000	100	3.336.600,000	100	3.336.600,000	100	3.336.600,000	7.01.0.00.0.00.27.0000 - Kecamatan Boronadu

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya keamanan, ketertiban, dan ketanggapan terhadap keadaan darurat	"Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan " (Poin)	0	87	89	10.341.500,000	92	10.341.500,000	95	10.341.500,000	98	10.341.500,000	100	10.341.500,000	7.01.0.00.0.00.28.0000 - Kecamatan Simuk
Meningkatnya keamanan, ketertiban, dan ketanggapan terhadap keadaan darurat	"Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan " (Poin)	0	100	100	10.341.500,000	100	10.341.500,000	100	10.341.500,000	100	10.341.500,000	100	10.341.500,000	7.01.0.00.0.00.29.0000 - Kecamatan Pulau-Pulau Batu Barat
Meningkatnya keamanan, ketertiban, dan ketanggapan terhadap keadaan darurat	"Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan " (Poin)	87,00	87,25	87,50	4.485.000,000	87,75	4.485.000,000	88,00	4.485.000,000	88,25	4.485.000,000	88,50	4.485.000,000	7.01.0.00.0.00.32.0000 - Kecamatan Luahagundre Maniamolo
Meningkatnya keamanan, ketertiban, dan ketanggapan terhadap keadaan darurat	"Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan " (Poin)	0	100	100	3.336.600,000	100	3.336.600,000	100	3.336.600,000	100	3.336.600,000	100	3.336.600,000	7.01.0.00.0.00.34.0000 - Kecamatan Uluidanotae
Meningkatnya keamanan, ketertiban, dan ketanggapan terhadap keadaan darurat	"Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan " (Poin)	50	50	50	10.000.000,000	60	10.000.000,000	70	10.000.000,000	80	10.000.000,000	90	10.000.000,000	7.01.0.00.0.00.35.0000 - Kecamatan Idanotae
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					550.484.967,000		546.308.667,000		556.612.967,000		551.849.967,000		551.448.967,000	
Meningkatnya wawasan kebangsaan	"Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan " (Persentase)	100	100	100	18.000.000,000	100	18.000.000,000	100	18.000.000,000	100	18.000.000,000	100	18.000.000,000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Lolomatua
Meningkatnya wawasan kebangsaan	"Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan " (Persentase)	0	80	80	18.000.000,000	80	18.000.000,000	85	18.000.000,000	90	18.000.000,000	100	18.000.000,000	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Gomo
Meningkatnya wawasan kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	10	10	15	18.000.000,000	15	18.000.000,000	15	18.000.000,000	20	18.000.000,000	20	18.000.000,000	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Lahusa
Meningkatnya wawasan kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan	0	100	100	25.000.000,000	100	25.000.000,000	100	25.000.000,000	100	25.000.000,000	100	25.000.000,000	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Hibala

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Karakter Kebangsaan (Persentase)													
Meningkatnya wawasan kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	0	80	80	8.964.000,000	85	8.964.000,000	90	8.964.000,000	95	8.964.000,000	100	8.964.000,000	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Pulau-Pulau Batu
Meningkatnya wawasan kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	100	100	100	10.000.000,000	100	10.000.000,000	100	10.000.000,000	100	10.000.000,000	100	10.000.000,000	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Teluk Dalam
Meningkatnya wawasan kebangsaan	"Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan " (Persentase)	80	82	84	15.000.000,000	86	15.000.000,000	88	15.000.000,000	90	15.000.000,000	92	15.000.000,000	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Lolowau
Meningkatnya wawasan kebangsaan	"Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan " (Persentase)	65	70	75	11.000.000,000	80	11.000.000,000	85	11.000.000,000	90	11.000.000,000	95	11.000.000,000	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Susua
Meningkatnya wawasan kebangsaan	"Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan " (Persentase)	88	90	90	25.000.000,000	93	20.000.000,000	95	30.000.000,000	96	25.000.000,000	96	25.000.000,000	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Maniamolo
Meningkatnya wawasan kebangsaan	"Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan " (Persentase)	0	100	100	7.966.800,000	100	7.840.800,000	100	7.840.800,000	100	7.840.800,000	100	7.820.800,000	7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Hilimegai
Meningkatnya wawasan kebangsaan	"Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan " (Persentase)	0	70	75	18.000.000,000	80	18.000.000,000	85	18.000.000,000	90	18.000.000,000	100	18.000.000,000	7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Toma
Meningkatnya wawasan kebangsaan	"Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan " (Persentase)	0	85,00	85,50	35.000.000,000	86,00	35.000.000,000	86,00	35.000.000,000	87,00	35.000.000,000	90,00	35.000.000,000	7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kecamatan Mazino

SALINAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya wawasan kebangsaan	"Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan " (Persentase)	100	100	100	22.702.267,000	100	22.702.267,000	100	22.702.267,000	100	22.702.267,000	100	22.702.267,000	7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Umbunasi
Meningkatnya wawasan kebangsaan	"Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan " (Persentase)	0	100	100	8.006.800,000	100	7.840.800,000	100	7.880.800,000	100	7.860.800,000	100	7.820.800,000	7.01.0.00.0.00.15.0000 - Kecamatan Aramo
Meningkatnya wawasan kebangsaan	"Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan " (Persentase)	100	100	100	18.000.000,000	100	18.000.000,000	100	18.000.000,000	100	18.000.000,000	100	18.000.000,000	7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kecamatan Mazo
Meningkatnya wawasan kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	100	100	100	22.000.000,000	100	22.000.000,000	100	22.000.000,000	100	22.000.000,000	100	22.000.000,000	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Fanayama
Meningkatnya wawasan kebangsaan	"Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan " (Persentase)	100	100	100	18.000.000,000	100	18.000.000,000	100	18.000.000,000	100	18.000.000,000	100	18.000.000,000	7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Ulunoyo
Meningkatnya wawasan kebangsaan	"Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan " (Persentase)	0	100	100	7.761.900,000	100	7.567.600,000	100	7.751.900,000	100	7.635.900,000	100	7.615.900,000	7.01.0.00.0.00.20.0000 - Kecamatan Huruna
Meningkatnya wawasan kebangsaan	"Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan " (Persentase)	100	100	100	18.000.000,000	100	18.000.000,000	100	18.000.000,000	100	18.000.000,000	100	18.000.000,000	7.01.0.00.0.00.21.0000 - Kecamatan O O U
Meningkatnya wawasan kebangsaan	"Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan " (Persentase)	0	100	100	7.966.800,000	100	7.840.800,000	100	7.840.800,000	100	7.840.800,000	100	7.820.800,000	7.01.0.00.0.00.22.0000 - Kecamatan Onohazumba
Meningkatnya wawasan kebangsaan	"Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter	0	100	100	8.006.800,000	100	7.840.800,000	100	7.880.800,000	100	7.860.800,000	100	7.820.800,000	7.01.0.00.0.00.23.0000 - Kecamatan Hilisalawa ahe

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	kebangsaan " (Persentase)													
Meningkatnya wawasan kebangsaan	"Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan " (Persentase)	100	100	100	18.000.000,000	100	18.000.000,000	100	18.000.000,000	100	18.000.000,000	100	18.000.000,000	7.01.0.00.0.00.24.0000 - Kecamatan Ulususua
Meningkatnya wawasan kebangsaan	"Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan " (Persentase)	100	100	100	18.000.000,000	100	18.000.000,000	100	18.000.000,000	100	18.000.000,000	100	18.000.000,000	7.01.0.00.0.00.25.0000 - Kecamatan Sidua ori
Meningkatnya wawasan kebangsaan	"Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan " (Persentase)	0	100	100	7.966.800,000	100	7.840.800,000	100	7.840.800,000	100	7.840.800,000	100	7.820.800,000	7.01.0.00.0.00.27.0000 - Kecamatan Boronadu
Meningkatnya wawasan kebangsaan	"Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan " (Persentase)	0	100	100	9.070.000,000	100	8.964.000,000	100	8.964.000,000	100	9.377.000,000	100	9.176.000,000	7.01.0.00.0.00.28.0000 - Kecamatan Simuk
Meningkatnya wawasan kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	0	100	100	8.964.000,000	100	8.964.000,000	100	8.964.000,000	100	8.964.000,000	100	8.964.000,000	7.01.0.00.0.00.29.0000 - Kecamatan Pulau-Pulau Batu Barat
Meningkatnya wawasan kebangsaan	"Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan " (Persentase)	0	70	80	8.964.000,000	90	8.964.000,000	95	8.964.000,000	100	8.964.000,000	100	8.964.000,000	7.01.0.00.0.00.30.0000 - Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara
Meningkatnya wawasan kebangsaan	"Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan " (Persentase)	0	100	100	12.879.000,000	100	12.879.000,000	100	12.879.000,000	100	12.879.000,000	100	12.879.000,000	7.01.0.00.0.00.31.0000 - Kecamatan Tanah Masa
Meningkatnya wawasan kebangsaan	"Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan " (Persentase)	87,00	87,25	87,50	35.175.000,000	87,75	35.175.000,000	88,00	35.175.000,000	88,25	35.175.000,000	88,50	35.175.000,000	7.01.0.00.0.00.32.0000 - Kecamatan Luahagundre Maniamolo

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya wawasan kebangsaan	"Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan " (Persentase)	0	100	100	8.006.800,000	100	7.840.800,000	100	7.880.800,000	100	7.860.800,000	100	7.820.800,000	7.01.0.00.0.00.34.0000 - Kecamatan Uluidanotae
Meningkatnya wawasan kebangsaan	"Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan " (Persentase)	100	100	100	18.000.000,000	100	18.000.000,000	100	18.000.000,000	100	18.000.000,000	100	18.000.000,000	7.01.0.00.0.00.35.0000 - Kecamatan Idanotae
Meningkatnya wawasan Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	100	100	100	10.000.000,000	100	10.000.000,000	100	10.000.000,000	100	10.000.000,000	100	10.000.000,000	7.01.0.00.0.00.26.0000 - Kecamatan Somambawa
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan	"Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan " (Persentase)	0	100	100	15.000.000,000	100	15.000.000,000	100	15.000.000,000	100	15.000.000,000	100	15.000.000,000	7.01.0.00.0.00.16.0000 - Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan	"Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan " (Persentase)	75	80	85	13.584.000,000	90	13.584.000,000	95	13.584.000,000	100	13.584.000,000	100	13.584.000,000	7.01.0.00.0.00.33.0000 - Kecamatan Onolalu
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan	"Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan " (Persentase)	90	100	100	26.500.000,000	100	28.500.000,000	100	28.500.000,000	100	28.500.000,000	100	28.500.000,000	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Amandraya
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					409.359.500,000		432.328.500,000		407.863.500,000		403.773.500,000		405.501.500,000	
Meningkatnya kepatuhan desa/kelurahan terhadap regulasi	Indeks Kepatuhan Desa Terhadap Regulasi Pemerintahan Desa (Poin)	0	100	100	5.690.000,000	100	5.514.000,000	100	5.564.000,000	100	5.786.000,000	100	5.430.000,000	7.01.0.00.0.00.20.0000 - Kecamatan Huruna
Meningkatnya kepatuhan desa/kelurahan terhadap regulasi	Indeks Kepatuhan Desa Terhadap Regulasi Pemerintahan	0	100	100	4.692.000,000	100	4.471.000,000	100	4.436.000,000	100	4.786.000,000	100	4.558.000,000	7.01.0.00.0.00.22.0000 - Kecamatan Onohazumba

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Desa (Poin)													
Meningkatnya kepatuhan desa/kelurahan terhadap regulasi	Indeks Kepatuhan Desa Terhadap Regulasi Pemerintahan Desa (Poin)	0	100	100	5.352.000,000	100	5.092.000,000	100	5.197.000,000	100	5.380.500,000	100	5.216.000,000	7.01.0.00.0.00.23.0000 - Kecamatan Hilisalawa ahe
Meningkatnya kepatuhan desa/kelurahan terhadap regulasi	Indeks Kepatuhan Desa Terhadap Regulasi Pemerintahan Desa (Poin)	0	100	100	4.692.000,000	100	4.471.000,000	100	4.436.000,000	100	4.786.000,000	100	4.558.000,000	7.01.0.00.0.00.27.0000 - Kecamatan Boronadu
Meningkatnya kepatuhan desa/kelurahan terhadap regulasi	Indeks Kepatuhan Desa Terhadap Regulasi Pemerintahan Desa (Poin)	0	100	100	3.597.000,000	100	3.495.000,000	100	3.460.000,000	100	3.707.000,000	100	3.832.000,000	7.01.0.00.0.00.28.0000 - Kecamatan Simuk
Meningkatnya kepatuhan desa/kelurahan terhadap regulasi	Indeks Kepatuhan Desa Terhadap Regulasi Pemerintahan Desa (Poin)	0	100	100	6.981.000,000	100	6.981.000,000	100	6.981.000,000	100	6.981.000,000	100	6.981.000,000	7.01.0.00.0.00.29.0000 - Kecamatan Pulau-Pulau Batu Barat
Meningkatnya kepatuhan desa/kelurahan terhadap regulasi	Indeks Kepatuhan Desa Terhadap Regulasi Pemerintahan Desa (Poin)	0	100	100	5.352.000,000	100	5.092.000,000	100	5.197.000,000	100	5.380.500,000	100	5.216.000,000	7.01.0.00.0.00.34.0000 - Kecamatan Uluidanotae
Meningkatnya kepatuhan desa/kelurahan terhadap regulasi	Indeks Kepatuhan Desa Terhadap Regulasi Pemerintahan Desa (Poin)	85	85	85	12.000.000,000	85	12.000.000,000	90	12.000.000,000	90	12.000.000,000	100	12.000.000,000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Lolomatua
Meningkatnya kepatuhan desa/kelurahan terhadap regulasi	Indeks Kepatuhan Desa Terhadap Regulasi Pemerintahan Desa (Poin)	0	75	80	12.000.000,000	80	12.000.000,000	90	12.000.000,000	90	12.000.000,000	95	12.000.000,000	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Gomo
Meningkatnya kepatuhan desa/kelurahan terhadap regulasi	Indeks Kepatuhan Desa Terhadap Regulasi Pemerintahan Desa (Poin)	10	10	15	12.000.000,000	15	12.000.000,000	15	12.000.000,000	20	12.000.000,000	20	12.000.000,000	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Lahusa

SALINAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kepatuhan desa/kelurahan terhadap regulasi	Indeks Kepatuhan Desa Terhadap Regulasi Pemerintahan Desa (Poin)	0	100	100	7.500.000,000	100	7.500.000,000	100	7.500.000,000	100	7.500.000,000	100	7.500.000,000	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Hibala
Meningkatnya kepatuhan desa/kelurahan terhadap regulasi	Indeks Kepatuhan Desa Terhadap Regulasi Pemerintahan Desa (Poin)	0	75	80	8.181.500,000	85	8.181.500,000	90	8.181.500,000	95	8.181.500,000	100	8.181.500,000	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Pulau-Pulau Batu
Meningkatnya kepatuhan desa/kelurahan terhadap regulasi	Indeks Kepatuhan Desa Terhadap Regulasi Pemerintahan Desa (Poin)	80	82	84	3.000.000,000	86	3.000.000,000	88	3.000.000,000	90	3.000.000,000	92	3.000.000,000	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Lolowau
Meningkatnya kepatuhan desa/kelurahan terhadap regulasi	Indeks Kepatuhan Desa Terhadap Regulasi Pemerintahan Desa (Poin)	65	70	75	17.000.000,000	80	17.000.000,000	85	17.000.000,000	90	17.000.000,000	95	17.000.000,000	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Susua
Meningkatnya kepatuhan desa/kelurahan terhadap regulasi	Indeks Kepatuhan Desa Terhadap Regulasi Pemerintahan Desa (Poin)	80	82	83	21.000.000,000	85	23.000.000,000	85	21.000.000,000	86	16.000.000,000	90	18.000.000,000	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Maniamolo
Meningkatnya kepatuhan desa/kelurahan terhadap regulasi	Indeks Kepatuhan Desa Terhadap Regulasi Pemerintahan Desa (Poin)	0	80	80	12.000.000,000	80	12.000.000,000	85	12.000.000,000	100	12.000.000,000	2.030	12.000.000,000	7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Toma
Meningkatnya kepatuhan desa/kelurahan terhadap regulasi	Indeks Kepatuhan Desa Terhadap Regulasi Pemerintahan Desa (Poin)	0	80,00	80,50	3.000.000,000	83,50	3.000.000,000	85,00	3.000.000,000	87,00	3.000.000,000	90,00	3.000.000,000	7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kecamatan Mazino
Meningkatnya kepatuhan desa/kelurahan terhadap regulasi	Indeks Kepatuhan Desa Terhadap Regulasi Pemerintahan Desa (Poin)	0	100	100	7.029.000,000	100	6.769.000,000	100	6.874.000,000	100	5.898.000,000	100	6.870.000,000	7.01.0.00.0.00.15.0000 - Kecamatan Aramo
Meningkatnya kepatuhan desa/kelurahan terhadap regulasi	Indeks Kepatuhan Desa Terhadap Regulasi	85	85	85	12.000.000,000	85	12.000.000,000	90	12.000.000,000	90	12.000.000,000	100	12.000.000,000	7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kecamatan Mazo

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pemerintahan Desa (Poin)													
Meningkatnya kepatuhan desa/kelurahan terhadap regulasi	Indeks Kepatuhan Desa Terhadap Regulasi Pemerintahan Desa (Poin)	0	85	90	17.000.000,000	95	17.000.000,000	100	17.000.000,000	100	17.000.000,000	100	17.000.000,000	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Fanayama
Meningkatnya kepatuhan desa/kelurahan terhadap regulasi	Indeks Kepatuhan Desa Terhadap Regulasi Pemerintahan Desa (Poin)	85	85	85	12.000.000,000	85	12.000.000,000	90	12.000.000,000	90	12.000.000,000	100	12.000.000,000	7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Ulunoyo
Meningkatnya kepatuhan desa/kelurahan terhadap regulasi	Indeks Kepatuhan Desa Terhadap Regulasi Pemerintahan Desa (Poin)	85	85	85	12.000.000,000	85	12.000.000,000	90	12.000.000,000	90	12.000.000,000	100	12.000.000,000	7.01.0.00.0.00.21.0000 - Kecamatan O O U
Meningkatnya kepatuhan desa/kelurahan terhadap regulasi	Indeks Kepatuhan Desa Terhadap Regulasi Pemerintahan Desa (Poin)	85	85	85	12.000.000,000	85	12.000.000,000	90	12.000.000,000	90	12.000.000,000	100	12.000.000,000	7.01.0.00.0.00.24.0000 - Kecamatan Ulususua
Meningkatnya kepatuhan desa/kelurahan terhadap regulasi	Indeks Kepatuhan Desa Terhadap Regulasi Pemerintahan Desa (Poin)	85	85	85	12.000.000,000	85	12.000.000,000	90	12.000.000,000	90	12.000.000,000	100	12.000.000,000	7.01.0.00.0.00.25.0000 - Kecamatan Sidua ori
Meningkatnya kepatuhan desa/kelurahan terhadap regulasi	Indeks Kepatuhan Desa Terhadap Regulasi Pemerintahan Desa (Poin)	0	80	80	6.981.000,000	90	6.981.000,000	90	6.981.000,000	100	6.981.000,000	100	6.981.000,000	7.01.0.00.0.00.30.0000 - Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara
Meningkatnya kepatuhan desa/kelurahan terhadap regulasi	Indeks Kepatuhan Desa Terhadap Regulasi Pemerintahan Desa (Poin)	0	100	100	9.780.000,000	100	9.780.000,000	100	9.780.000,000	100	9.780.000,000	100	9.780.000,000	7.01.0.00.0.00.31.0000 - Kecamatan Tanah Masa
Meningkatnya kepatuhan desa/kelurahan terhadap regulasi	Indeks Kepatuhan Desa Terhadap Regulasi Pemerintahan Desa (Poin)	87,00	87,25	87,50	27.041.000,000	87,75	27.041.000,000	88,00	27.041.000,000	88,25	27.041.000,000	88,50	27.041.000,000	7.01.0.00.0.00.32.0000 - Kecamatan Luahagundre Maniamolo

SALINAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kepatuhan desa/kelurahan terhadap regulasi	Indeks Kepatuhan Desa Terhadap Regulasi Pemerintahan Desa (Poin)	15	15	20	1.800.000,000	20	4.800.000,000	20	1.800.000,000	25	1.800.000,000	25	1.800.000,000	7.01.0.00.0.00.33.0000 - Kecamatan Onolalu
Meningkatnya kepatuhan desa/kelurahan terhadap regulasi	Indeks Kepatuhan Desa Terhadap Regulasi Pemerintahan Desa (Poin)	85	85	85	12.000.000,000	85	12.000.000,000	90	12.000.000,000	90	12.000.000,000	100	12.000.000,000	7.01.0.00.0.00.35.0000 - Kecamatan Idanotae
Meningkatnya Kepatuhan Desa/Kelurahan terhadap Regulasi	Indeks Kepatuhan Desa Terhadap Regulasi Pemerintahan Desa (Poin)	60	60	63	32.500.000,000	67	32.500.000,000	70	32.500.000,000	73	32.500.000,000	75	32.500.000,000	7.01.0.00.0.00.26.0000 - Kecamatan Somambawa
Meningkatnya Kepatuhan Desa/Kelurahan Terhadap Regulasi	Indeks Kepatuhan Desa Terhadap Regulasi Pemerintahan Desa (Poin)	90	100	100	8.499.000,000	100	28.189.000,000	100	8.499.000,000	100	8.499.000,000	100	8.499.000,000	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Amandraya
Meningkatnya Kepatuhan Desa/Kelurahan Terhadap Regulasi	Indeks Kepatuhan Desa Terhadap Regulasi Pemerintahan Desa (Poin)	0	55	60	50.000.000,000	65	50.000.000,000	70	50.000.000,000	75	50.000.000,000	80	50.000.000,000	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Teluk Dalam
Meningkatnya Kepatuhan Desa/Kelurahan Terhadap Regulasi	Indeks Kepatuhan Desa Terhadap Regulasi Pemerintahan Desa (Poin)	0	100	100	4.692.000,000	100	4.471.000,000	100	4.436.000,000	100	4.786.000,000	100	4.558.000,000	7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Hilimegai
Meningkatnya Kepatuhan Desa/Kelurahan Terhadap Regulasi	Indeks Kepatuhan Desa Terhadap Regulasi Pemerintahan Desa (Poin)	90	90	90	18.000.000,000	95	18.000.000,000	95	18.000.000,000	95	18.000.000,000	95	18.000.000,000	7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Umbunasi
Meningkatnya Kepatuhan Desa/Kelurahan Terhadap Regulasi	Indeks Kepatuhan Desa Terhadap Regulasi Pemerintahan Desa (Poin)	0	100	100	10.000.000,000	100	10.000.000,000	100	10.000.000,000	100	10.000.000,000	100	10.000.000,000	7.01.0.00.0.00.16.0000 - Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					4.876.779.068,000		4.876.779.068,000		4.876.779.068,000		89.876.779.068,000		4.876.779.068,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					872.750.000,000		872.750.000,000		872.750.000,000		872.750.000,000		872.750.000,000	
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah (Persentase)	0	75	80	872.750.000,000	81	872.750.000,000	82	872.750.000,000	85	872.750.000,000	90	872.750.000,000	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					1.154.355.000,000		1.154.355.000,000		1.154.355.000,000		1.154.355.000,000		1.154.355.000,000	
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	100	100	100	1.154.355.000,000	100	1.154.355.000,000	100	1.154.355.000,000	100	1.154.355.000,000	100	1.154.355.000,000	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					1.585.999.068,000		1.585.999.068,000		1.585.999.068,000		86.585.999.068,000		1.585.999.068,000	
Meningkatnya Etika dan Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik kepada masyarakat (Persentase)	80	80	80	1.585.999.068,000	80	1.585.999.068,000	81	1.585.999.068,000	81,5	86.585.999.068,000	82	1.585.999.068,000	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					140.480.000,000		140.480.000,000		140.480.000,000		140.480.000,000		140.480.000,000	
Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	60	60	60	140.480.000,000	61	140.480.000,000	61,5	140.480.000,000	62	140.480.000,000	65	140.480.000,000	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					544.875.000,000		544.875.000,000		544.875.000,000		544.875.000,000		544.875.000,000	
Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) ((%))	-	90,00	90,40	544.875.000,000	90,80	544.875.000,000	91,20	544.875.000,000	91,60	544.875.000,000	92,00	544.875.000,000	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					578.320.000,000		578.320.000,000		578.320.000,000		578.320.000,000		578.320.000,000	
Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	80	80	80	578.320.000,000	80,5	578.320.000,000	81	578.320.000,000	81,5	578.320.000,000	82	578.320.000,000	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL KESELURUHAN					1.660.095.622.549,510		1.741.571.695.210,080		1.829.780.420.769,680		1.926.116.639.120,180		2.066.165.453.662,530	

4.1.3. Dukungan Program terhadap PHTC dan 17 Program Prioritas RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

Sebagai bagian dari upaya percepatan pembangunan daerah yang terarah, terpadu, dan selaras dengan kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Nias Selatan berkewajiban memberikan dukungan terhadap Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) serta 17 Program Prioritas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

PHTC merupakan sebuah pendekatan strategis yang menekankan pada pencapaian hasil pembangunan yang optimal dalam waktu yang relatif cepat, dengan mengutamakan pelaksanaan program-program prioritas yang memberikan manfaat nyata dan langsung dirasakan oleh masyarakat.

Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan telah merumuskan berbagai bentuk dukungan, baik melalui program, kegiatan, maupun kebijakan pembangunan yang diintegrasikan secara sistematis ke dalam dokumen perencanaan daerah, termasuk RPJMD 2025–2029. Dukungan ini mencerminkan komitmen nyata Pemerintah Kabupaten Nias Selatan untuk memperkuat sinergi pembangunan antar level pemerintahan, mempercepat pencapaian target-target pembangunan daerah, serta berkontribusi pada pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Utara.

Sebagai wujud konkret dari komitmen tersebut, berikut disajikan tabel dukungan Kabupaten Nias Selatan terhadap PHTC dan 17 Program Prioritas Provinsi Sumatera Utara, yang menjadi acuan dalam implementasi pembangunan daerah lima tahun mendatang.

Tabel 4.3
Dukungan Program Daerah terhadap Kegiatan Utama dalam RPJMN 2025 – 2029 dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2025-2029

No	RPJMN Tahun 2025-2029 Kegiatan Prioritas Utama (KPU) per Provinsi	RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 Program Daerah	RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029 Program Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	*Daftar KPU akan disampaikan lebih lanjut untuk masing-masing provinsi, dikarenakan terdapat perbedaan jumlah KPU pada masing-masing provinsi	17 Program Prioritas Sumatera Utara	18 Program Prioritas Daerah Kabupaten Nias Selatan

Tabel 4.4
Dukungan Program Daerah terhadap 6 (enam) PHTC RPJMD Provinsi Sumatera Utara Pelaksanaan Tahun 2025-2029

No	RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 PHTC	RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029 Program Daerah
(1)	(2)	(3)
1	Penyediaan SDM Unggul yang Siap Bekerja (Program Unggulan Bersekolah Gratis)	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pengembangan Kurikulum 3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 6. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)
2	Peningkatan Kualitas Layanan, Akses dan Jaminan Kesehatan Gratis Bagi Seluruh Penduduk Sumatera Utara dalam rangka Peningkatan Usia Harapan Hidup (Program Berobat Gratis (Probis) melalui Program Universal Health Coverage (UHC))	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 4. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 5. Program Penanganan Bencana 6. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
3	Peningkatan Produktivitas Pangan dan Kesejahteraan Petani (Program Jaminan Kestabilan Harga Komoditi Pangan)	1. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian 2. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian 3. Program penyuluhan pertanian 4. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 5. Program Penanganan Kerawanan Pangan 6. Program Pengawasan Keamanan Pangan 7. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
4	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan melalui Birokrasi yang Responsif, Lincah dan Memahami Kebutuhan (Digitalisasi Pelayanan Publik "Cepat, Responsif, Handal, dan Solutif")	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 5. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah 6. Program Riset Dan Inovasi Daerah 7. Program Kepegawaian Daerah 8. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 9. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 10. Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum
5	Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Merata, Terhubung dan Ramah Lingkungan (a. Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi, b. Penguatan Infrastruktur Irigasi dan Sumber Air Pertanian untuk Mendukung Swasembada Pangan	1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 2. Program Penyelenggaraan Jalan 3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 4. Program Kawasan Permukiman 5. Program Pengelolaan Persampahan 6. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) 7. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

No	RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 PHTC	RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029 Program Daerah
(1)	(2)	(3)
	Berkelanjutan, c. Peningkatan Kualitas Permukiman Layak, Terjangkau, dan Inklusif melalui Penyediaan Hunian Murah serta dukungan terhadap pelaksanaan program 3 juta rumah)	8. Program Pengelolaan Pelayaran 9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 10. Program Penataan Bangunan Gedung 11. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh 12. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) 13. Program Pengembangan Perumahan
6	Meningkatkan Peran Desa dan Keterlibatan Masyarakat untuk Menghasilkan Kemajuan Daerah (Bantuan Hukum dan perlindungan rakyat melalui Restorative Justice)	1. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 2. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya 6. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan 7. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

Tabel 4.5
Dukungan Program Daerah terhadap 17 (Tujuh belas) Program Prioritas RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

No	RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 Program Prioritas	RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029 Program Daerah
1	Pendidikan melalui program sekolah unggulan berbasis peningkatan skill yang berhubungan dengan kebutuhan industri dan potensi wilayah di tingkat lokal Bentuk Intervensi:Pembangunan dan Penyelenggaraan SMA/SMK Unggulan Penguatan Pendidikan Vokasi dan Pengembangan Kurikulum Bermuatan Lokal “MARSIPATURE HUTANABE” Pengembangan Minat Bakat Siswa melalui Event Lomba dan Pergelaran Seni, Budaya dan Olahraga Unggulan Daerah antar SMA/SMK dan MA Penguatan Pengembangan Pusat Pelatihan dan Keterampilan serta Kerjasama Rekrutmen Tenaga Kerja dengan Dunia Usaha - Dunia Industri	a. Program Pengelolaan Pendidikan b. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan c. Program Pengembangan Kurikulum d. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja e. Program pengembangan kesenian tradisional f. Program Pengembangan Kebudayaan g. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
2	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, Dan Penyandang Disabilitas Dalam Berkarya Dan Berprestasi Bentuk Intervensi: Inkubasi Usaha untuk Perempuan dan Pemuda Dukungan terhadap Pengembangan Prestasi Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas khususnya pada Bidang Seni, Budaya dan Olahraga Pengembangan	a. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja b. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) c. Program pengembangan kebudayaan d. Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan e. Program peningkatan kapasitas sumber

No	RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 Program Prioritas	RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029 Program Daerah
	Keterampilan dan Penempatan Kerja Inklusif	daya manusia
3	Kesehatan yang terintegrasi di beberapa titik kawasan yang menjadi sentra layanan kesehatan masyarakat terpadu Bentuk Intervensi: Sistem Informasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan, Ketersedian Dokter dan Layanan Pengaduan Kesehatan Dukungan Pemeriksaan Kesehatan Gratis Penuntasan Kasus TBC Dukungan Pembangunan dan Pengembangan Sentra Pelayanan Kesehatan dan RSUD Kab/Kota dengan Layanan Unggulan Kerjasama Penyediaan Dokter Spesialis dengan Perguruan Tinggi Bapak Asuh dalam penurunan Gizi Buruk dan Prevelensi Stunting Dapur Sehat Atasi Stunting (DAHSYAT)	a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat b. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat c. Program pengelolaan Aplikasi Informatika d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan f. Program Pembinaan Keluarga Berencana (K
4	Pemberantasan kemiskinan melalui perlindungan dan pemberdayaan masyarakat rentan secara menyeluruh dan tepat sasaran Bentuk Intervensi: MARIPRO (Masyarakat Rentan Produktif)	a. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja b. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) c. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
5	Penguatan stabilitas makro ekonomi dan kesinambungan fiskal daerah Bentuk Intervensi: INDHIRA (Industrialisasi dan Hilirisasi Sumatera Utara) SEMESTA (Sinergi Ekonomi dan Investasi Sumatera Utara) Reformasi, Efisiensi dan Penyesuaian Model Bisnis serta Tata Kelola BUMD Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang stabil	a. Program perencanaan dan pembangunan industri b. Program pengendalian izin usaha industri c. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian d. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian e. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) f. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan g. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja h. Program pemasaran pariwisata i. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia j. Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi k. Program pendidikan dan latihan perkoperasian l. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota m. Program pengelolaan aplikasi informatika n. Program pemerintah dan kesejahteraan rakyat o. Program kepegawaian daerah p. Program Pengelolaan Keuangan Daerah q. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
6	Pengembangan ekonomi Hijau dan Biru Bentuk Intervensi:	a. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian

No	RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 Program Prioritas	RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029 Program Daerah
	Pengembangan Ekonomi Hijau Pengembangan Ekonomi Biru	b. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian c. Program penyuluhan pertanian d. Program pengelolaan sumber daya air (SD
7	Ketahanan pangan melalui penguatan nilai budaya dan kearifan lokal agar diversifikasi hasil pertanian menjadi lebih produktif dan berdampak pada kesejahteraanmasyarakat lokal Bentuk Intervensi:Peningkatan Produktivitas Pangan Peningkatan Kesejahteraan Petani	e. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian f. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian g. Program penyuluhan pertanian h. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya i. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap j. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja k. Program pemberdayaan dan perlindungan koperasih) l. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) m. Program pendidikan dan latihan perkoperasian n. Program pengembangan kebudayaan) o. Program pengembangan kesenian tradisional p. Program pengelolaan sumber daya air (SDM) q. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budayan r. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia s. Program pemerintah dan kesejahteraan rakyat
8	Pariwisata yang menggerakkan potensi alam lokal di pedesaan dan perkotaan dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung (komunitas, pemerintah daerah/desa/kelurahan dan pengusaha lokal) Bentuk Intervensi: Pengembangan Ekosistem dan Destinasi Kepariwisataan Holistik - 6A (Attraction, Accesibilities, Amenities, Available Package, Activities, Ancillary Service) Pengembangan Desa Wisata berbasis Budaya, Kearifan Lokal dan Alam	a. Program pemasaran pariwisata b. Program pengembangan kebudayaan c. Program pengembangan kesenian tradisional d. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif e. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata f. Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya
9	Ekonomi kreatif dan industri berbasis teknologi Bentuk Intervensi: Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Industri berbasis digital	a. Program pengelolaan aplikasi informatika b. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif c. Program perencanaan dan pembangunan industri d. Program pemasaran pariwisata e. Program pengembangan kebudayaan f. Program pengembangan kesenian tradisional g. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)

No	RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 Program Prioritas	RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029 Program Daerah
		h. Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi i. Program pendidikan dan latihan perkoperasian j. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
10	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan Bentuk Intervensi: Inovasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	a. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota c. Program Kepegawaian Daerah d. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat e. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum f. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial g. Program Penanganan Bencana h. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia i. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang j. Program Pengelolaan Persampahan k. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja l. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian m. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya n. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
11	Transformasi digital dan inovasi teknologi pada pelayanan publik dan perekonomian masyarakat Bentuk Intervensi: Digitalisasi Layanan Publik	a. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika b. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
12	Infrastruktur Dengan Prioritas Jalan, Jembatan, Dan Irigasi Yang Langsung Berdampak Pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat LokalBentuk Intervensi:Program PIJAR (Peningkatan Infrastruktur Jalan JembAtan dan IRigasi)Pengembangan Kawasan Deli Sports City melalui Kerjasama Pembangunan Kawasan Ekonomi Produktif	a. Program Penyelenggaraan Jalan Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) b. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang c. Program Kawasan Permukiman d. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan e. Program perencanaan dan pembangunan industri f. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) g. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja h. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata i. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
13	Pengembangan Sistem Logistik Dan Transportasi Yang Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Daya Saing	a. Program Penyelenggaraan Jalan b. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

No	RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 Program Prioritas	RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029 Program Daerah
	Bentuk Intervensi: Peta Jalan Sentra Produksi Pertanian Sumatera Utara dalam rangka mendukung Sistem Logistik dan Transportasi untuk Memfasilitasi Perdagangan dan Memperluas Akses Pasar bagi Produsen Lokal, termasuk Petani dan Pengusaha kecil. Dukungan Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan melalui pembangunan BRT dan peningkatan Kereta Commuter Subsidi Transportasi untuk Pertanian Pakan dan Pangan Dukungan Pengembangan Sistem Transportasi Daerah	c. Program Kawasan Permukiman d. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SD e. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian f. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian g. Program Penyuluhan Pertanian h. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan i. Program Pengendalian Izin Usaha Industri j. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
14	Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berketahanan terhadap bencana Bentuk Intervensi: Konservasi Sumber Daya Alam Pengurangan Emisi Karbon	a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SD b. Program Pengelolaan Persampahan c. Program Penanganan Bencana d. Program Penataan Ruang e. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya f. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap g. Program Kawasan Permukiman
15	Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa Bentuk Intervensi: Program Membangun Desa Produktif Terpadu	a. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian b. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian c. Program penyuluhan pertanian d. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)
16	Meningkatkan ketahanan sosial dan budaya yang mendukung suasana yang harmonis, toleran dan rukun Bentuk Intervensi: Program BERHATI (Berbudaya, Rukun, Harmonis, Toleran dan Empati)	a. Program Pengembangan Kebudayaan b. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum c. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Sosial dan Budaya e. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
17	Terciptanya kehidupan yang lebih aman dan tertib Bentuk Intervensi: SUMUT BERSATU (Bersama, Aman, Tertib dan Unggul)	a. Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum b. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial c. Program penanganan bencana d. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia f. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat g. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 4.6
Dukungan terhadap 6 (enam) PHTC Provinsi Sumatera Utara pelaksanaan Tahun 2025-2030

DAFTAR PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2030					
PHTC	**TAHUN**	**RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN**	**DUKUNGAN OPD PROVSU**		**DUKUNGAN Kabupaten/Kota**
			UTAMA	**PENDUKUNG**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
1. Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) Kepulauan Nias (2026), Kepulauan Nias dan Pantai Barat (2027), Kepulauan Nias, Pantai Barat dan Dataran Tinggi (2028), Kepulauan Nias, Pantai Barat, Dataran Tinggi dan Pantai Timur (2029) **33 Kabupaten/Kota**	2025	Penyusunan kajian akademik tentang bersekolah gratis, Pembentukan Tim Pokja, Validasi data siswa SMA/SMK/SLB Negeri di zona kepulauan Nias, zona Pantai Barat, zona Dataran Tinggi, zona Pantai Timur • 33 Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan	Diskominfo (Publikasi Kegiatan)	- Menyediakan basis data siswa SMP/SLTP kelas IX yang akan melanjut SLTA - Melakukan edukasi kepada siswa SLTP agar seluruhnya melanjut kepada jenjang SLTA
	2026	Implementasi Program Bersekolah Gratis • Zona Kepulauan Nias			
	2027	Implementasi Program Bersekolah Gratis • Zona Kepulauan Nias dan Pantai Barat			
	2028	Implementasi Program Bersekolah Gratis • Kepulauan Nias, Pantai Barat, dan Dataran Tinggi			
	2029	Implementasi Program Bersekolah Gratis • Kepulauan Nias, Pantai Barat, Dataran tinggi, dan Pantai Timur			
	2030	Implementasi Program Bersekolah Gratis • Kepulauan Nias, Pantai Barat, Dataran tinggi, dan Pantai Timur			
2. Program Berobat Gratis (Probis) melalui Program Universal Health Coverage (UHC) (mulai Oktober tahun 2025, UHC+ tahun 2026 - 2030).	2025	Melakukan *Launching* UHC Penyusunan regulasi (Pergub/ SK Gub UHC) MoU 33 Kabupaten/ Kota Pemenuhan jaminan kesehatan melalui peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara Triwulan IV dimulai Oktober 2025 • 33 Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	1. Dinas Sosial (Pembinaan kepada Dinsos Kabupaten/Kota untuk melakukan penginputan, pemutakhiran dan verifikasi data DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) pada Pusdatin Kemensos setiap bulannya), 2. Dinas PMD Dukcapil (Penyediaan data kependudukan Provsu) 3. Diskominfo	- Dukungan penganggaran APBD Kabupaten/Kota untuk UHC/PBPU yaitu pada Tahun 2025 sebesar 80%, tahun 2026 sebesar 77,5%, tahun 2027 sebesar 75%, tahun 2028 sebesar 72,5%, tahun 2029 dan 2030 sebesar 70%. - Melakukan penginputan, pemutakhiran dan verifikasi data DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) pada Pusdatin Kemensos setiap bulannya - Dinas PMD Dukcapil (Penyediaan data kependudukan Kabupaten/Kota)
	2026	- Pemenuhan jaminan kesehatan melalui peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara • 33 Kabupaten/Kota			
	2027	- Pemenuhan jaminan kesehatan melalui peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara • 33 Kabupaten/Kota			
	2028	- Pemenuhan jaminan kesehatan melalui peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara • 33 Kabupaten/Kota			
	2029	- Pemenuhan jaminan kesehatan melalui			

DAFTAR PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2030					
PHTC	**TAHUN**	**RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN**	**DUKUNGAN OPD PROVSU**		**DUKUNGAN Kabupaten/Kota**
			UTAMA	**PENDUKUNG**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
		peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara - Peningkatan Pelayanan Kesehatan menjadi UHC Plus • 33 Kabupaten/Kota		(Publikasi Kegiatan),	
	2030	- Pemenuhan jaminan kesehatan melalui peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara - Peningkatan Pelayanan Kesehatan menjadi UHC Plus • 33 Kabupaten/Kota			
3. Program Jaminan Kestabilan Harga Komoditi Pangan (JASKOP)	2025	tidak ada	Dinas TPH	- Disperindag ESDM (Memfasilitasi kemitraan antara petani dan pelaku usaha) - Diskop UMKM (Mendorong koperasi tani dan mengkoordinasikan ke koperasi merah putih) - PUPR (Perbaikan akses jalan ke sentra produksi dan koordinasi dengan PUPR Kabupaten/Kota terkait akses jalan) - BUMD Dirga Surya (Skema pembelian hasil pertanian cabai merah ketika harga turun) - Biro Pemotda (fasilitasi kerja sama antar pemerintah daerah) - Diskominfo (Publikasi Kegiatan)	- Disperindag Kabupaten/Kota : Melakukan fasilitasi dan pameran produk cabai kering di tingkat lokal - Dinas Pertanian Kabupaten/Kota : Menyiapkan lahan dan kelompok tani (CPCL) serta pendampingan kelompok tani - Dinas Koperasi Kabupaten/Kota : Mendorong pembentukan koperasi atau kelompok usaha bersama yang mengelola SDD Total Solar *Dry Dome*: 70
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			
	2030	tidak ada			
4. Digitalisasi Pelayanan Publik "Cepat,	2025	Identifikasi dan pemetaan pelayanan publik yang akan di digitalisasi	Dinas Kominfo	DPMPTSP Dinas Pendidikan	1. Penyiapan kebijakan/ regulasi di tingkat Provinsi/ Pemda

DAFTAR PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2030					
PHTC	**TAHUN**	**RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN**	**DUKUNGAN OPD PROVSU**		**DUKUNGAN Kabupaten/Kota**
			UTAMA	**PENDUKUNG**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
Responsif, Handal, dan Solutif" (CERDAS)		1. Pemetaan layanan publik yang akan didigitalisasi, Audit kesiapan infrastruktur dan SDM dan kebijakan pendukung 2. Penyusunan *roadmap* dan desain awal sistem Layanan digital. Lokasi: • Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.		Dinas Kesehatan Bapenda Disperindag ESDM BPSDM Biro Adpem BUMD: PDAM, Bank Sumut	Kabupaten/ Kota. 2. Penyiapan Peningkatan kapasitas SDM di kabupaten/kota. 3. Penyiapan data-data aplikasi yang ada di pemerintahan Kabupaten/Kota. 4. Penentuan lokasi
		Identifikasi Penetapan Lokasi 1. Pelaksanaan Survei lapangan untuk identifikasi kebutuhan dan potensi gangguan jaringan. 2. Integrasi Sistem (Layanan). 3. Pemetaan Lokasi Strategis. 4. Koordinasi kepada *Stakeholder* dan Penyusunan dokumen perencanaan Teknis dan Administratif. Lokasi Kegiatan: • 33 kabupaten/kota			1. Kesiapan Infrastruktur Internet, dan Kesiapan SDM di Kabupaten/Kota. 2. Melakukan Pemeliharaan dan Pengawasan
	2026	Pembangunan integrasi portal aplikasi 1. Pengembangan dan Implementasi Aplikasi . 2. Integrasi Sistem (Layanan). 3. Pelatihan penggunaan Aplikasi. 4. Sosialisasi penggunaan aplikasi kepada masyarakat. Lokasi Kegiatan: • Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.			1. Penyiapan dan penguatan infastruktur digital. 2. Penyiapan Peningkatan kapasitas SDM di Kabupaten/Kota. 3. Penyiapan data-data aplikasi yang ada di pemerintahan Kabupaten/ Kota 4. Penentuan lokasi
		tidak ada			1. Kesiapan Infrastruktur Internet, dan Kesiapan SDM di Kabupaten/Kota. 2. Melakukan Pemeliharaan dan Pengawasan
	2027	Pengembangan dan penambahan 1. Pengembangan dan Implementasi Aplikasi. 2. Integrasi Sistem (Layanan). 3. Pelatihan penggunaan Aplikasi. 4. Sosialisasi peggunaan aplikasi kepada masyarakat. 5. Peningkatan kapasitas jaringan dan infrastruktur Lokasi: • Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.			1. Penyiapan dan penguatan infastruktur digital. 2. Penyiapan Peningkatan kapasitas SDM di Kabupaten/Kota. 3. Penyiapan data-data aplikasi yang ada di pemerintahan Kabupaten/Kota 4. Penentuan lokasi
		Pembangunan dan implementasi serta titik pemasangan jaringan internet			1. Kesiapan Infrastruktur Internet, dan Kesiapan SDM di

DAFTAR PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2030					
PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN Kabupaten/Kota
			UTAMA	PENDUKUNG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
		1. Pengadaan Perangkat Jaringan dan akses internet. 2. Pemasangan Titik akses Wifi. 3. Sosialisasi Penggunaan. 4. Evaluasi dan Pengembangan Sistem Mointoring. Lokasi Penggunaan: • 25 Kab			Kabupaten/Kota. 2. Melakukan Pemeliharaan dan Pengawasan
	2028	Perluasan area layanan dan akses jaringan internet 1. Pengembangan dan Implementasi Aplikasi. 2. Pelatihan penggunaan Aplikasi. 3. Sosialisasi penggunaan aplikasi kepada masyarakat. 4. Peningkatan kapasitas jaringan dan infrastruktur Lokasi Kegiatan: • Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.			1. Penyiapan dan penguatan infastruktur digital. 2. Penyiapan Peningkatan kapasitas SDM di Kabupaten/Kota. 3. Penyiapan data-data aplikasi yang ada di pemerintahan Kabupaten/ Kota 4. Penentuan lokasi
		tidak ada			1. Kesiapan Infrastruktur Internet, dan Kesiapan SDM di Kabupaten/Kota. 2. Melakukan Pemeliharaan dan Pengawasan
	2029	Perluasan area layanan dan akses jaringan internet 1. Pengembangan dan Implementasi Aplikasi. 2. Pelatihan penggunaan Aplikasi. 3. Sosialisasi penggunaan aplikasi kepada masyarakat. 4. Peningkatan kapasitas jaringan dan infrastruktur Lokasi Kegiatan: • Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.			1. Penyiapan dan penguatan infastruktur digital. 2. Penyiapan Peningkatan kapasitas SDM di Kabupaten/Kota. 3. Penyiapan data-data aplikasi yang ada di pemerintahan Kabupaten/ Kota 4. Penentuan lokasi
		1. Pengadaan Perangkat Jaringan dan akses internet. 2. Pemasangan Titik akses Wifi. 3. Sosialisasi Penggunaan. 4. Evaluasi dan Pengembangan Sistem Mointoring. Lokasi Perluasan Area Layanan: • 25 Kab			1. Kesiapan Infrastruktur Internet, dan Kesiapan SDM di Kabupaten/Kota. 2. Melakukan Pemeliharaan dan Pengawasan
	2030	Evaluasi dan *Monitoring*			1. Penyiapan dan penguatan

DAFTAR PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2030					
PHTC	**TAHUN**	**RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN**	**DUKUNGAN OPD PROVSU**		**DUKUNGAN Kabupaten/Kota**
			UTAMA	**PENDUKUNG**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
		1. Pengembangan dan Implementasi Aplikasi. 2. Pelatihan penggunaan Aplikasi. 3. Sosialisasi penggunaan aplikasi kepada masyarakat. 4. Peningkatan kapasitas jaringan dan infrastruktur Lokasi kegiatan: • 33 Kabupaten/Kota			infastruktur digital. 2. Penyiapan Peningkatan kapasitas SDM di kabupaten/kota. 3. Penyiapan data-data aplikasi yang ada di pemerintahan Kabupaten/Kota. 4. Penentuan lokasi
		1. Pengadaan Perangkat Jaringan dan akses internet. 2. Pemasangan Titik akses Wifi. 3. Sosialisasi Penggunaan. 4. Evaluasi dan Pengembangan Sistem *Monitoring*. Lokasi Perluasan Area Layanan: • 33 Kabupaten/Kota			1. Kesiapan Infrastruktur Internet, dan Kesiapan SDM di Kabupaten/Kota. 2. Melakukan Pemeliharaan dan Pengawasan.
5. **a. Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi (INSTANSI)**	2025	1. Penyediaan penyusunan desain Perencanaan (DED) 2. Penyusunan Leger jalan 3. Pelaksanaan penanganan Jalan Kawasan Pertumbuhan: Kabupaten Karo, Kabupaten Simalungun, Kota Gunungsitoli Kawasan Komoditas Unggulan: Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Padang Lawas Utara Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi : Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Dairi, Kabupaten Toba Kawasan Afirmasi: Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten **Nias Selatan** 4. Pelaksanaan penanganan Jembatan Kawasan Pertumbuhan: Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Toba, Kota Gunungsitoli Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi : Kabupaten Tapanuli Selatan Kawasan Afirmasi: Kabupaten Nias Barat, Kota Padangsidimpuan Target pembangunan tahun ini mencakup 49,92 km jalan dan 244,20 meter jembatan	Dinas PUPR	OPD Dinas LHK terkait penyiapan dokumen lingkungan/ AMDAL, Dinas Kominfo untuk publikasi Media, Dinas Perhubungan terkait Fasilitas Keselamatan Jalan, Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi	1. Dukungan penanganan akses jalan dalam koridor pembangunan jalan provinsi yang mendukung kawasan prioritas. 2. Dukungan penyediaan lahan pada rencana pelebaran yang tidak sesuai dengan Ruang Milik Jalan (RUMIJA).
	2026	1. Penyediaan penyusunan desain Perencanaan (DED) 2. Penyusunan Leger jalan 3. Pelaksanaan penanganan Jalan Kawasan Pertumbuhan: Kabupaten Karo, Kabupaten			

DAFTAR PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2030					
PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN Kabupaten/Kota
			UTAMA	PENDUKUNG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
		Simalungun, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kabupaten Pakpak Bharat, Kota Binjai, Kota Padangsidimpuan Kawasan Komoditas Unggulan: Kabupaten Karo, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Asahan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Tapanuli Selatan Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi : Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Toba, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan Kawasan Afirmasi: Kabupaten **Nias Selatan**, Kabupaten Nias Barat 4. Pelaksanaan penanganan Jembatan Kawasan Pertumbuhan: Kabupaten Simalungun, Kabupaten Samosir Kawasan Komoditas Unggulan: Kabupaten Asahan Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi : Kabupaten Mandailing Natal Kawasan Konservasi/ Rawan Bencana: Kabupaten Langkat target: jalan 202,84 km jembatan 202,90 m.			
	2027	1. Penyediaan penyusunan desain Perencanaan (DED) 2. Penyusunan Leger jalan 3. Pelaksanaan penanganan Jalan Kawasan Pertumbuhan: Kabupaten Karo, Kabupaten Simalungun, Kota Pematangsiantar, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Dairi, Kota Binjai, Kota Padangsidimpuan Kawasan Komoditas Unggulan: Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Asahan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Tapanuli Selatan Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi : Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Labuhanbatu,			

DAFTAR PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2030					
PHTC	**TAHUN**	**RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN**	**DUKUNGAN OPD PROVSU**		**DUKUNGAN Kabupaten/Kota**
			UTAMA	**PENDUKUNG**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
		Kabupaten Dairi, Kabupaten Toba, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan Kawasan Afirmasi: Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten **Nias Selatan** Kawasan Konservasi/ Rawan Bencana: Kabupaten Langkat 4. Pelaksanaan penanganan Jembatan Kawasan Pertumbuhan: Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Deli Serdang Kawasan Komoditas Unggulan: Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Asahan, Kota Tanjungbalai Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi : Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Pakpak Bharat serta target: jalan 130,99 km & jembatan 708,45 m			
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			
	2030	tidak ada			
b. Penguatan Infrastruktur Irigasi dan Sumber Air Pertanian untuk Mendukung Swasembada Pangan Berkelanjutan	2025	tidak ada	Dinas PUPR	OPD Dinas LHK terkait penyiapan dokumen lingkungan/AMDAL, Dinas TPH melakukan pemataan terhadap kawasan swasembada dan dukungan terhadap irigasi tersier dan kuarter, benih, pupuk, alsintan, penyuluh pertanian. Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi, Dinas Kominfo untuk publikasi Media	- Dukungan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan jaringan irigasi tersier - Sinergi antara pemerintah daerah, kelompok tani, dan BUMDes untuk pemeliharaan jaringan irigasi - Pembangunan embung, sumur bor, dan pompanisasi untuk sumber air cadangan. - Digitalisasi sistem irigasi (*smart irrigation*) berbasis sensor dan aplikasi. - Pemberdayaan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) untuk pengelolaan irigasi. - Integrasi dengan program ketahanan pangan daerah.
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			
	2030	tidak ada			
c. Peningkatan Kualitas Permukiman Layak, Terjangkau, dan	2025	tidak ada	Dinas PKP	Dinas PUPR terkait dukungan terkait Tata Ruang,Jalan, dan	Bupati/Wali Kota: 1. Pendataan dan Validasi Calon Penerima (BNBA = *by name by*
	2026	- Membentuk Tim Pelaksana, Anggaran Biaya - Survei Lokasi di setiap kabupaten/kota			

DAFTAR PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2030					
PHTC	**TAHUN**	**RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN**	**DUKUNGAN OPD PROVSU**		**DUKUNGAN Kabupaten/Kota**
			UTAMA	**PENDUKUNG**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
Inklusif melalui Penyediaan Hunian Murah serta dukungan terhadap pelaksanaan program 3 juta rumah		- Membuat Nota Kesepahaman/Nota kerja sama dengan mitra terkait (REI, Bank Sumut dan lain lain) - Penyediaan data dan/atau informasi statistika MBR dan ASN Pemerintah Daerah - Perluasan pemasaran dan kepemilikan rumah bagi MBR dan ASN - Pembangunan Fisik setiap Tahun - Mengevaluasi dampak program dan penataan lingkungan • Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Toba, Kabupaten Langkat, Kabupaten **Nias Selatan**, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara		Keciptakaryaan (sanitasi dan air minum), BPBD koordinasi terhadap Rehab rumah akibat bencana Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi Biro Pemotda (memfasilitasi kerja sama antar Pemerintah Daerah) Badan Kepegawaian dan BP Tapera untuk penyediaan data ASN yang belum memilik rumah Dinas Kominfo untuk publikasi Media	*address*) 2. SK Kumuh yang dikeluarkan Bupati atau Wali Kota terkait wewenang Provinsi untuk luasan 10 – 15 Ha 3. SK Pokja Penanganan Kawasan Kumuh pada kabupaten/Kota 4. Melakukan sosialisasi kepada MBR dan ASN Dinas yang Membidangi Perumahan Rakyat (di Kabupaten/Kota): Pelaksana teknis utama di lapangan. Bertanggung jawab atas pendataan, verifikasi, penyaluran bantuan, pendampingan, monitoring, dan pelaporan langsung dari lokasi perbaikan. Dinas PUPR Kabupaten/Kota: Memberikan bantuan teknis konstruksi, menyusun RAB, dan memberikan supervisi teknis kepada pelaksana di lapangan. Dinas Sosial Kabupaten/Kota: Membantu dalam pembaruan dan verifikasi data kemiskinan di tingkat lokal. Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan: Ujung tombak identifikasi awal calon penerima, sosialisasi langsung kepada masyarakat, memfasilitasi gotong royong, dan membantu monitoring di lapangan. Badan Kepegawaian dan BP Tapera: Penyediaan data ASN yang belum memilik rumah
	2027	- Membentuk Tim Pelaksana, Anggaran Biaya - Survei Lokasi di setiap kabupaten/kota - Membuat Nota Kesepahaman/Nota kerja sama dengan mitra terkait (REI, Bank Sumut dan lain lain) - Penyediaan data dan/atau informasi statistika MBR dan ASN Pemerintah Daerah - Pembangunan Fisik setiap Tahun - Perluasan pemasaran dan kepemilikan rumah bagi MBR dan ASN • Mengevaluasi dampak program dan penataan lingkungan Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi, Kabupaten Samosir, Kabupaten Nias dan Kabupaten **Nias Selatan**			
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			
	2030	- Membentuk Tim Pelaksana, Anggaran Biaya - Survei Lokasi di setiap kabupaten/kota - Membuat Nota Kesepahaman/Nota kerja sama dengan mitra terkait (REI, Bank Sumut dan lain lain)			

DAFTAR PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2030					
PHTC	**TAHUN**	**RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN**	**DUKUNGAN OPD PROVSU**		**DUKUNGAN Kabupaten/Kota**
			UTAMA	**PENDUKUNG**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
		- Penyediaan data dan/atau informasi statistika MBR dan ASN Pemerintah Daerah - Pembangunan Fisik setiap Tahun - Perluasan pemasaran dan kepemilikan rumah bagi MBR dan ASN • Mengevaluasi dampak program dan penataan lingkungan Kabupaten Asahan, Kota Tanjungbalai, Kabupaten **Nias Selatan**, Kabupaten Nias, Kota Gunungsitoli, Kabupaten Serdang Bedagai dan Kota Tebing Tinggi			
6. Bantuan Hukum dan perlindungan rakyat melalui Restorative Justice (PRESTICE).	2025	tidak ada	Biro Hukum	Dinas PMD Capil (memberikan data/pemetaan desa prioritas kegiatan PRESTICE yaitu desa dengan karakteristik konflik yang tinggi) Diskominfo (Publikasi),	1. Replikasi Kegiatan PRESTICE pada tingkat Kabupaten/Kota 2. Edukasi dan Sosialisasi PRESTICE di tingkat Kabupaten/Kota sampai dengan ke level Kecamatan dan Desa. 3. Pendampingan dari bagian hukum kabupaten/kota dari kasus tidak pidana ringan yang ditangani oleh PRESTICE
	2026	- Pembentukan kelembagaan Prestice, Bimbingan Teknis Paralegal Desa dan Edukasi dan Sosialisasi Prestice di 25 kabupaten (Asahan, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Langkat, Mandailing Natal, Nias, **Nias Selatan**, Nias Utara, Nias Barat, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba) - Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum selain kasus KDRT dan Narkoba - Pendampingan bagi masyarakat yang berhadapan dengan kasus tindak pidana ringan - Pelatihan mediator tingkat kabupaten/kota (2 orang per kabupaten/kota, dilaksanakan di Kota Medan)			
	2027	- Pendampingan bagi masyarakat yang berhadapan dengan kasus tindak pidana ringan - Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum selain kasus KDRT dan Narkoba - Pelatihan mediator tingkat kabupaten/kota (2 orang per kabupaten/kota, dilaksanakan di Kota Medan)			
	2028	- Pendampingan bagi masyarakat yang berhadapan dengan kasus tindak pidana ringan - Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat			

DAFTAR PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2030					
PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN Kabupaten/Kota
			UTAMA	PENDUKUNG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
		miskin yang berhadapan dengan hukum selain kasus KDRT dan Narkoba - Pelatihan mediator tingkat kabupaten/kota (2 orang per kabupaten/kota, dilaksanakan di Kota Medan)			
	2029	- Pendampingan bagi masyarakat yang berhadapan dengan kasus tindak pidana ringan - Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum selain kasus KDRT dan Narkoba - Pelatihan mediator tingkat kabupaten/kota (2 orang per kabupaten/kota, dilaksanakan di Kota Medan)			
	2030	- Pendampingan bagi masyarakat yang berhadapan dengan kasus tindak pidana ringan. - Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum selain kasus KDRT dan Narkoba - Pelatihan mediator tingkat kabupaten/kota (2 orang per kabupaten/kota, dilaksanakan di Kota Medan)			

Tabel 4.7
Dukungan Terhadap Program Prioritas/Proyeksi Strategis Daerah (PSD) RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2030

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2030					
PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PP1. PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM SEKOLAH UNGGULAN BERBASIS PENINGKATAN *SKILL* YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEBUTUHAN INDUSTRI DAN POTENSI WILAYAH DI TINGKAT LOKAL					
1. Pemenuhan 100% Fasilitasi Listrik dan Layanan Internet pada Seluruh SMA/SMK/SLB di	2025	Instalasi dan aktivasi pada titik lokasi bekerja sama dengan *provider* (Tahun 2025)	Dinas Pendidikan	Disperindag ESDM (pendampingan terhadap akses listrik), Dinas Kominfo	Pembangunan akses jalan yang baik ke sekolah yang akan dibangun akses listrik dan

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2030					
PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sumatera Utara		Listrik: 35 sekolah (8 SMA dan 27 SMK) a. Listrik Gratis 8 SMA: SMA Negeri 1 Pulau Simuk Kabupaten **Nias Selatan** (Plts), SMA Negeri 2 Alasa Kabupaten Nias Utara (Plts), SMA Negeri 2 Hilimigia Kabupaten **Nias Selatan** (Plts), SMA Negeri 2 Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal (Plts), SMA Negeri 1 Tanah Masa **Kabupaten Nias Selatan**, SMA Negeri 1 Hibala Kabupaten **Nias Selatan**, SMA Negeri 2 Hibala Kabupaten **Nias Selatan**, SMA Negeri 9 Kota Padangsidimpuan 27 SMK: SMK Negeri 1 Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan, SMK Negeri 2 Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, SMK Negeri 1 Bawolato Kabupaten Nias, SMK Negeri 1 Botomuzoi Kabupaten Nias, SMK Negeri 1 Gido Kabupaten Nias, SMK Negeri 1 Hiliduho Kabupaten Nias, SMK Negeri 1 Idanogawo Kabupaten Nias, SMK Negeri 1 Ulugawo Kabupaten Nias, SMK Negeri 2 Botomuzoi Kabupaten Nias, SMK Negeri 2 Idanogawo Kabupaten Nias, SMK Negeri 2 Somolomolo Kabupaten Nias, SMK Negeri 3 Hiliserangkai Kabupaten Nias, SMK Negeri 1 Alasa Kabupaten Nias Utara, SMK Negeri 1 Lahewa Kabupaten Nias Utara, SMK Negeri 1 Lotu Kabupaten Nias Utara, SMK Negeri 1 Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara, SMK Negeri 1 Sawo Kabupaten Nias		(pendampingan terhadap akses internet dan publikasi kegiatan).	layanan internet.

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2030					
PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Utara, SMK Negeri 1 Sitolu Ori Kabupaten Nias Utara, SMK Negeri 1 Tugala Oyo Kabupaten Nias Utara, SMK Negeri 2 Afulu Kabupaten Nias Utara, SMK Negeri 2 Lotu Kabupaten Nias Utara, SMK Negeri 2 Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara, SMK Negeri 2 Tugala Oyo Kabupaten Nias Utara, SMK Negeri 1 Susua Kabupaten **Nias Selatan**, SMK Negeri 1 Ulunoyo Kabupaten **Nias Selatan**, SMK Negeri 1 Umbunasi Kabupaten **Nias Selatan**, SMK Negeri 2 Susua Kabupaten **Nias Selatan**			
		Instalasi dan aktivasi pada titik lokasi bekerja sama dengan provider (Tahun 2025) Internet: 66 Sekolah (29 SMA, 34 SMK dan 3 SLB) b. Internet Gratis 29 SMA: SMA Negeri 1 Gunung Sitember Kabupaten Dairi, SMA Negeri 2 Besitang Kabupaten Langkat, SMA Negeri 1 Tanah Masa Kabupaten **Nias Selatan**, SMA Negeri 1 Hibala Kabupaten **Nias Selatan**, SMA Negeri 2 Hibala Kabupaten **Nias Selatan**, SMA Negeri 1 Pulau Simuk Kabupaten **Nias Selatan**, SMA Negeri 2 Hilimegai Kabupaten **Nias Selatan**, SMA Negeri 1 Susua Kabupaten **Nias Selatan**, SMA Negeri 2 Susua Kabupaten **Nias Selatan**, SMA Negeri 3 Susua Kabupaten **Nias Selatan**, SMA Negeri 4 Susua Kabupaten **Nias Selatan**, SMA Negeri 1 Ulu Susua Kabupaten **Nias Selatan**, SMA Negeri 1 Ulunoyo Kabupaten **Nias Selatan**, SMA Negeri 2 Ulunoyo Kabupaten **Nias Selatan**, SMA			

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2030					
PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Negeri 1 Umbunasi Kabupaten **Nias Selatan**, SMA Negeri 1 Idanotae Kabupaten **Nias Selatan**, SMA Negeri 1 Ulu Idanotae Kabupaten Nias Barat, SMA Negeri 1 Mazo Kabupaten **Nias Selatan**, SMA Negeri 2 Mazo Kabupaten **Nias Selatan**, SMA Negeri 2 Hilisalawae Kabupaten **Nias Selatan**, SMA Negeri 1 Boronadu Kabupaten **Nias Selatan**, SMA Negeri 1 Hilimegai Kabupaten **Nias Selatan**, SMA Negeri 1 Dolok Silau Kabupaten Simalungun, SMA Negeri 2 Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, SMA Negeri 1 Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, SMA Negeri 3 Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, SMA Negeri 1 Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu, SMA Negeri 2 Alasa Kabupaten Nias Utara, SMA Negeri 2 Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara			
		SMK: SMKN 1 BORONADU Kabupaten **Nias Selatan**, SMKN 1 SUSUA Kabupaten **Nias Selatan,** SMKN 2 SUSUA Kabupaten **Nias Selatan**, SMKN 1 UMBUNASI Kabupaten **Nias Selatan**, SMKN 2 ARAMO Kabupaten **Nias Selatan**, SMKN 1 IDANO TAE Kabupaten **Nias Selatan**, SMKN 1 AMANDARAYA Kabupaten **Nias Selatan**, SMKN 1 O'O'U Kabupaten **Nias Selatan**, SMKN 1 LOLOWAU Kabupaten **Nias Selatan**, SMKN 1 HILIMEGAI Kabupaten **Nias Selatan**, SMKN 1 LOLOMATUA Kabupaten **Nias Selatan**, SMKN 1 PULAU PULAU BATU **Kabupaten Nias Selatan**, SMKN 2 PULAU PULAU BATU Kabupaten **Nias Selatan**, SMKN 1 HURUNA Kabupaten **Nias Selatan**, SMKN 2 HURUNA			

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2030					
PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Kabupaten **Nias Selatan**, SMKN 1 GOMO Kabupaten **Nias Selatan**, SMKN 1 MAZO Kabupaten **Nias Selatan**, SMKN 1 HILISALAWAHE Kabupaten **Nias Selatan**, SMKN 1 MOROO Kabupaten NIAS BARAT, SMKN 1 ULU MOROO Kabupaten NIAS BARAT, SMKN 2 ULU MOROO Kabupaten NIAS BARAT, SMKN 1 MANDREHE Kabupaten NIAS BARAT, SMKN 2 MANDREHE Kabupaten NIAS BARAT, SMKN 2 MANDREHE UTARA Kabupaten NIAS BARAT, SMKN 1 MANDREHE BARAT Kabupaten NIAS BARAT, SMKN 1 LAHOMI Kabupaten NIAS BARAT, SMKN 1 SIROMBU Kabupaten NIAS BARAT, SMKN 2 TUGALA OYO Kabupaten NIAS UTARA, SMKN 2 SOMOLO-MOLO Kabupaten NIAS, SMKN 1 MA'U Kabupaten NIAS, SMKN 2 HILISERANGKAI Kabupaten NIAS, SMKN 1 HILIDUHO Kabupaten NIAS, SMKN 1 ULUGAWO Kabupaten NIAS, SMKN 1 SIPOHOLON Kabupaten TAPANULI UTARA SLB: SLB Negeri Gunungsitoli, SLB Negeri Nias Barat, SLB Negeri Salak Kabupaten Pakpak Bharat Pembiayaan tagihan listrik dan Perangkat Internet (Tahun 2025-2030)			
	2026	1. Pembiayaan tagihan listrik dan Perangkat Internet 2. Pemeliharaan & *Maintenance*			
	2027	1. Pembiayaan tagihan listrik dan Perangkat Internet 2. Pemeliharaan & Maintenance			
	2028	1. Pembiayaan tagihan listrik dan Perangkat Internet 2. Pemeliharaan & Maintenance			

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2030					
PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2029	1. Pembiayaan tagihan listrik dan Perangkat Internet 2. Pemeliharaan & Maintenance			
	2030	1. Pembiayaan tagihan listrik dan Perangkat Internet 2. Pemeliharaan & Maintenance			
2. Pembangunan 4 SMA/SMK/SLB Unggulan (Nias/SMA - 2026, Asahan/SMK - 2027, Samosir/SMK – 2028, Karo/SLB - 2029)	2025	tidak ada	Dinas Pendidikan	PUPR (Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi) Dinas Kominfo (Publikasi kegiatan)	- Penyediaan lahan/hibah lahan yang diperlukan - Pembangunan akses jalan yang baik dari dan ke sekolah - Menyediakan basis data siswa SMP/SLTP kelas IX yang berprestasi dan direkomendasikan masuk ke dalam sekolah unggulan
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			
	2030	tidak ada			
3. Rehabilitasi Ruang Kelas SMA/SMK/SLB sebanyak 490 Sekolah	2025	Pendataan valid rehabilitasi ruang kelas tahun 2026-2029 • Provinsi Sumatera Utara (Dokumen *Aprasial*)	Dinas Pendidikan	PUPR (*Appraisal*/Penilaian Kerusakan, Pendampingan, *Monitoring* dan Evaluasi) Dinas Kominfo (Publikasi kegiatan)	Pembangunan infrastruktur akses jalan yang baik dari dan menuju sekolah yang akan dilakukan kegiatan rehabilitasi ruangan kelas rusak
	2026	Pelaksanaan Fisik Tahap I – 150 Ruang Kelas (2026) di 21 Kabupaten/Kota • Medan, Binjai, Langkat, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Asahan, Tanjungbalai, Labuhanbatu, Pematangsiantar, Samosir, Toba, Sibolga, Padangsidimpuan, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padangsidimpuan, Padang Lawas Utara, Nias, **Nias Selatan**, Gunungsitoli, Nias Utara, Nias Barat			
	2027	Pelaksanaan Fisik Tahap II – 150 Ruang Kelas (2027) di 22 Kabupaten/Kota •Medan, Binjai, Langkat, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Asahan, Tanjungbalai, Labuhanbatu, Pematangsiantar, Samosir, Toba,			

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2030					
PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Sibolga, Padangsidimpuan, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padangsidimpuan, Padang Lawas Utara, Nias, **Nias Selatan**, Gunungsitoli, Nias Utara, Nias Barat			
	2028	tidak ada			
	2029	*Monitoring*, Evaluasi & Pemutakhiran Data (2029)			
	2030				
4. Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Unit Sekolah Baru	2025	Pendataan Kebutuhan Ruang Kelas Baru (mendesak), Pembangunan Ruang Kelas Baru Tahap I sebanyak 57 RKB di 15 Kabupaten/Kota • Deli Serdang, Langkat, Dairi, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Mandailing Natal, Simalungun, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Nias, **Nias Selatan**, Nias Barat, Asahan	Dinas Pendidikan	PUPR (Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi) Dinas Kominfo (Publikasi kegiatan)	Penyediaan atau hibah Lahan dari kabupaten/kota untuk lokasi Pembangunan Ruang Kelas Baru sesuai kebutuhan. Pembangunan infrastruktur dasar air bersih dan akses jalan yang baik dari dan menuju sekolah.
	2026	Pembangunan Ruang Kelas Baru (mendesak) Tahap II (2026) sebanyak 80 Ruang Kelas Baru di 19 Kabupaten/Kota • Langkat, Binjai, Medan, Dairi, Serdang Bedagai, Batu Bara, Asahan, Simalungun, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Padangsidimpuan, Nias, **Nias Selatan**, Nias Barat, Nias Utara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 4 Unit Sekolah Baru			
	2027	Pembangunan Ruang Kelas Baru sebanyak 30 Ruang Kelas Baru di 14 Kabupaten/Kota • Medan, Langkat, Deli Serdang, Simalungun, Asahan, Tapanuli			

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2030					
PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Utara, Padangsidimpuan, Tapanuli Tengah, Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Nias, **Nias Selatan**, Gunungsitoli			
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			
5. Optimalisasi Sarana dan Prasarana BLK Provsu menuju BLK Tematik Bioindustri dan Pariwisata	2025	tidak ada	DISNAKER	Dinas Perindustrian Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral: Disperindag ESDM bersifat mendukung dan lintas sektor, bukan pelaksana utama pelatihan. Maka Disperindag ESDM mendukung proyek strategis BLK, sebagai berikut: • Menjadi penghubung antara pelaku industri/perusahaan dengan Disnaker dan BLK. • Memfasilitasi program magang industri dan penempatan lulus BKL ke industri lokal. • Disperindag ESDM dapat menjadi mitra dalam pengembangan program pelatihan vokasi di BLK melalui fasilitasi pelatihan berbasis proyek industri, penyediaan instruktur ahli dari sektor industri dan akses terhadap bantuan alat pelatihan. Dinas Pendidikan: Dinas Pendidikan memiliki peran dalam proyek strategis ini dalam hal pelatihan kerja, sebagai berikut: • Mendorong sinkronisasi kurikulum SMK/vokasi dengan skema pelatihan BLK agar lulusan SMK	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Ketenagakerjaan, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan: 1. Dukungan sarana dan prasaran pendukung sesuai kewenangan kabupaten 2. Memfasilitasi kerja sama antara BLK dan perusahaan lokal untuk program magang, pelatihan kerja, atau penyerapan tenaga kerja berbasis potensi daerah
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029-2030	tidak ada			

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2030					
PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				lebih siap kerja. • Memastikan kompetensi lulusan SMK sejalan dengan kebutuhan industri dan program pelatihan BLK. • Mengintegrasikan *teaching factory* di SMK dengan fasilitas pelatihan BLK untuk menciptakan ekosistem pelatihan *dual system.* • Mendorong peserta didik SMK mengikuti sertifikasi kompetensi melalui LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) yang terhubung dengan BLK. • Bersama Disnaker, mendata dan menyiapkan guru produktif/tenaga pelatih yang memenuhi standar pelatihan. Dinas Koperasi dan UMKM: • Mengintegrasikan hasil pelatihan BLK dengan program inkubasi usaha UMKM • Membina lulusan BLK agar mampu mengembangkan usaha mandiri berbasis keahlian yang telah diperoleh • Menyediakan pendampingan usaha lanjutan bagi peserta pelatihan BLK yang ingin berwirausaha • Menyediakan ruang inkubasi bisnis di sentra-sentra UMKM daerah yang terhubung dengan BLK	

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2030					
PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				• Membantu lulusan BLK yang berwirausaha dalam promosi dan digitalisasi produk melalui *E-commerce* dan platform digital UMKM. Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: • Menyediakan ruang promosi bagi hasil karya lulusan BLK di sektor kriya, kuliner, dan fashion etnik melalui festival budaya, event pariwisata, serta platform pemasaran digital. • Menjalin kolaborasi dengan Disnaker untuk mendukung pengembangan ekosistem pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat dan budaya lokal melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan. • Memberikan dukungan fasilitasi uji kompetensi dan sertifikasi bagi peserta pelatihan BLK untuk meningkatkan daya saing dan kesiapan kerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. • Bekerja sama dengan Disnaker dalam menyusun kurikulum pelatihan di BLK yang relevan dengan kebutuhan industri pariwisata dan subsektor ekonomi kreatif.	

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2030					
PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Dinas Sosial: • Menjangkau dan Memberdayakan Kelompok Rentan Sosial. • Integrasi Program Rehabilitasi Sosial dan Pelatihan Kerja. • Bersinergi dengan Disnaker dalam memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memastikan program pelatihan BLK tepat sasaran, terutama bagi warga miskin dan rentan sosial. • Melalui tenaga pekerja sosial, Dinas Sosial dapat melakukan pendampingan bagi peserta pelatihan selama dan setelah masa pelatihan, untuk memastikan mereka mampu menerapkan keterampilan yang diperoleh, baik untuk bekerja maupun memulai usaha secara mandiri. Badan Kepegawaiaan Daerah: • BKD berperan dalam mendukung ketersediaan ASN dengan kompetensi teknis dan manajerial yang relevan, untuk memperkuat kapasitas kelembagaan BLK, baik sebagai instruktur, tenaga administrasi, maupun pengelola program pelatihan. • Melakukan pemetaan dan	

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2030					
PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				perencanaan kebutuhan SDM aparatur di bidang pelatihan vokasional agar sejalan dengan arah pengembangan BLK, termasuk dalam pengadaan, rotasi, dan pengembangan karier ASN yang ditempatkan di unit-unit pelatihan. • BKD dapat mengintegrasikan program pelatihan teknis fungsional dan manajerial bagi ASN yang bertugas di lingkungan BLK ke dalam rencana pengembangan kompetensi tahunan, guna meningkatkan efektivitas dan kualitas layanan pelatihan. • Berperan dalam membangun sistem penilaian kinerja yang berbasis output dan dampak, termasuk mengawasi efektivitas kinerja ASN di BLK dalam menyelenggarakan pelatihan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja. Kominfo: Dukungan Publikasi Kegiatan	
PP2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMUDA, DAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM BERKARYA DAN BERPRESTASI					
6. Liga Olahraga Pelajar Sumut Piala Gubernur Sumatera Utara Cabang Olahraga Sepak Bola	2025	1. Inisiasi dan konsolidasi melalui rapat rapat koordinasi tahun 2025 2. Pelaksanaan Liga Olahraga Pelajar	Dispora	Dinas Pendidikan/Cabang Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan (pembinaan,	- Melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan liga

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2030					
PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
dan Voli tahun 2026 - 2030		2025 • Provinsi Sumatera Utara		edukasi dan sosialisasi kepada pelajar untuk dapat menjadi atlet pelajar) Dinas Kominfo (Publikasi kegiatan)	olahraga pelajar sumut untuk cabang olahraga sepak bola dan voli - Melaksanakan *side event* pada saat pelaksanaan liga olahraga (pameran UMKM) dan sejenisnya
	2026	1. Pelaksanaan Liga Olahraga Pelajar 2026 2. Penguatan Pembinaan & Kemitraan Tahun 2026 • Provinsi Sumatera Utara			
	2027	1. Pelaksanaan Liga Olahraga Pelajar 2027 2. Penguatan Pembinaan & Kemitraan Tahun 2027 • Provinsi Sumatera Utara			
	2028	1. Pelaksanaan Liga Olahraga Pelajar 2028 2. Penguatan Pembinaan & Kemitraan Tahun 2028 • Provinsi Sumatera Utara			
	2029	1. Pelaksanaan Liga Olahraga Pelajar 2029 2. Penguatan Pembinaan & Kemitraan Tahun 2029 • Provinsi Sumatera Utara			
	2030	1. Pelaksanaan Liga Olahraga Pelajar 2030 2. Penguatan Pembinaan & Kemitraan Tahun 2030 3. Penguatan Legacy & Keberlanjutan Tahun 2030 • Provinsi Sumatera Utara			
7. Pekan Olahraga Paralimpik Pelajar Sumatera Utara pada Cabang Olahraga Atletik Tahun 2026 - 2030	2025	Inisiasi konsolidasi melalui pertemuan koordinasi Tahun 2025 • Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang	Dispora	Dinas pendidikan / Cabang Dinas Pendidikan (Edukasi dan Sosialisasi bagi Pelajar Difabel untuk dapat mendata dan membina atlet sesuai potensi dan minat siswa) Dinas Kominfo (Publikasi kegiatan)	NPC Kabupaten/Kota dan Dispora Kabupaten/Kota memperkuat perekrutan dan pembinaan para atlet disabilitas pelajar di Kabupaten/Kota
	2026	1. Pelaksanaan Pekan paralimpik pelajar daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Cabang Olahraga para atletik tahun 2026 2. Perluasan Partisipasi & Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2026-2027			

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2030					
PROYEK STRATEGIS	**TAHUN**	**RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN**	**PERANGKAT DAERAH**		**DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA**
			UTAMA	**PENDUKUNG**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		• Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang			
	2027	1. Pelaksanaan Pekan paralimpik pelajar daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Cabang Olahraga para atletik tahun 2027 2. Perluasan Partisipasi & Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2027-2028 • Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang			
	2028	1. Pelaksanaan Pekan paralimpik pelajar daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Cabang Olahraga para atletik tahun 2028 2. Perluasan Partisipasi & Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2028-2029 • Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang			
	2029	1. Pelaksanaan Pekan paralimpik pelajar daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Cabang Olahraga para atletik tahun 2029 2. Perluasan Partisipasi & Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2029-2030 • Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang			
	2030	1. Pelaksanaan Pekan paralimpik pelajar daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Cabang Olahraga para atletik tahun 2030 2. Perluasan Partisipasi & Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2030 • Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang			
PP 3 KESEHATAN YANG TERINTEGRASI DI BEBERAPA TITIK KAWASAN YANG MENJADI SENTRA LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT TERPADU					
8. Digitalisasi sistem kesehatan terintegrasi *(Sumut e-Health Integration system)*	2025	Penyusunan Kajian dan Bisnis Proses *Platform e-Health Integration System* Tahun 2025	Dinas Kesehatan	Dinas Kominfo (Penyediaan Web,Server dan Publikasi Kegiatan)	- Penyediaan data kepesertaan JKN Kabupaten/Kota - Sosialisasi dan edukasi

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2030					
PROYEK STRATEGIS	**TAHUN**	**RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN**	**PERANGKAT DAERAH**		**DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA**
			UTAMA	**PENDUKUNG**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pembangunan Aplikasi Tahun 2025 *Launching* Aplikasi *Sumut e-Health Integration System* Tahun 2025 • 33 Kabupaten/Kota			*platform* kepada faskes tingkat Kabupaten/Kota
	2026	Edukasi penggunaan Aplikasi ke Masyarakat Tahun 2026 Pengembangan Aplikasi *Sumut e-Health Integration System* Tahun 2026-2029 • 33 Kabupaten/Kota			
	2027	Edukasi penggunaan Aplikasi ke Masyarakat Tahun 2027 Pengembangan Aplikasi *Sumut e-Health Integration System* Tahun 2026-2029 • 33 Kabupaten/Kota			
	2028	Edukasi penggunaan Aplikasi ke Masyarakat Tahun 2028 Pengembangan Aplikasi *Sumut e-Health Integration System* Tahun 2026-2029 • 33 Kabupaten/Kota			
	2029	Edukasi penggunaan Aplikasi ke Masyarakat Tahun 2029 Pengembangan Aplikasi *Sumut e-Health Integration System* Tahun 2026-2029 • 33 Kabupaten/Kota			
	2030	tidak ada			
9. Beasiswa Ikatan Dinas bagi Dokter Spesialis dan dokter spesialis residen di Wilayah Kurang Terlayani (2025 – 2030)	2025	- Pemenuhan Dokter Spesialis melalui pemberian beasiswa bekerja sama dengan Perguruan Tinggi yakni USU dan UGM - Distribusi Dokter Spesialis sebagai upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Primer dan Rujukan melalui dokter residen (Layanan Medis Merata) Tahun 2025-2030 • DTPK di Kepulauan Nias (6 RSUD di 3 Kabupaten) RSUD **Nias Selatan** (3 Orang), RSUD Tafaeri Nias Utara (6 Orang), RSUD	Dinas Kesehatan	Badan Kepegawaian (Pelaksanaan assesmen kompetensi dokter spesialis sesuai kebutuhan, Pembinaan Monitoring kepada Badan Kepegawaian Kabupaten/Kota agar Dokter Spesialis yang sudah dididik tidak berpindah tempat kerja) Biro Pemotda (Fasilitasi Penyusunan Dokumen kerja sama dengan USU dan UGM) Dinas Kominfo (Publikasi	- Menyediakan data dokter umum yang memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh beasiswa dokter spesialis dan Mengidentifikasi jenis dan jumlah spesialis yang dibutuhkan di RSUD atau faskes daerah - Menyiapkan surat komitmen bersama dengan para Bupati/Wali Kota yang menyatakan bahwa peserta

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2030					
PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pratama Kabupaten Nias Barat (5 Orang), RSUD Pratama Lologolu Soguna Bazato Kabupaten Nias Barat (4 Orang). RSUD KJSU Unggulan RSUD Drs. Hadrianus Sinaga Samosir Kabupaten Samosir, RSUD Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, RSUD Lausimomo Kabupaten Karo UPT Dinkes		Kegiatan)	dokter spesialis akan kembali ke daerah asal dan RSUD setempat - Menentukan jenis spesialis yang paling dibutuhkan - Kesiapan Sarana dan Prasarana RSUD - Surat Penugasan & Dukungan Legal Formal - penyediaan Akomodasi dokter residen
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	- Pemenuhan dokter spesialis melalui pemberian beasiswa bekerja sama dengan Perguruan Tinggi yakni USU dan UGM - Distribusi dokter spesialis sebagai upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Primer dan Rujukan melalui dokter residen (Layanan Medis Merata) Tahun 2025-2030 • RSU Pirngadi Kota Medan, RSUD dr. Hadrianus Sinaga Kabupaten Samosir, RSUD Drs. H. Amri Tambunan Kabupaten Deli Serdang, RSUD Perdagangan Kabupaten Simalungun, RSUD Penyabungan Kabupaten Mandailing Natal, RSUD Porsea Kabupaten Toba, RSUD Pintupadang Kabupaten Tapanuli Selatan, RSUD dr. Husni Thamrin Kabupaten Mandailing Natal, RSUD Tafaeri Kabupaten Nias Utara, RSUD Pratama Lologulu Soguna Bazato Kabupaten Nias Barat, RSUD **Nias Selatan**, RSUD Kabupaten Nias Barat			
	2030	- Pemenuhan dokter spesialis melalui pemberian beasiswa bekerja sama dengan Perguruan Tinggi yakni USU			

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2030					
PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		dan UGM - Distribusi dokter spesialis sebagai upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Primer dan Rujukan melalui dokter residen (Layanan Medis Merata) Tahun 2025-2030 • Kabupaten/Kota yang terintervensi pada tahun 2026, 2027, 2028 dan 2029			
10. Dukungan Pengembangan Rumah Sakit Unggulan (Pengembangan Rumah Sakit Unggulan dan Pemenuhan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan)	2025	tidak ada	Dinas Kesehatan	PUPR (Manajamen Konstruksi, Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi) Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	- Penyediaan Lahan dan Dokumen Legalitas - Menyediakan tenaga non-medis, mendukung rekrutmen tenaga kesehatan, dan pemeliharaan fasilitas - Koordinasi Lintas Pemerintahan
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			
	2030				
PP4 PEMBERANTASAN KEMISKINAN MELALUI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RENTAN SECARA MENYELURUH DAN TEPAT SASARAN					
11. Bantuan Sosial Produktif melalui Program Masyarakat Produktif (MAPRO).	2025	tidak ada	Dinas Sosial	Disperindag dan Dinas Koperasi UMKM (Dukungan Pelatihan dan Pendampingan bagi sasaran kegiatan Mapro yaitu KUBe dan UEP, fasilitasi keikutsertaan Kelompok Usaha Bersama/Usaha Ekonomi Produktif Mapro dalam pameran/expo yang dilaksanakan oleh Dinas) Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	Dukungan penjajakan calon penerima bantuan agar tepat sasaran. Dukungan koordinasi penyiapan kegiatan pelatihan bagi calon penerima bantuan di Kabupaten/Kota. Replikasi kegiatan serupa di Kabupaten/Kota masing-masing.
	2026	- Pendataan dan penetapan penerima manfaat (KK/KUBE) - Pembuatan Bank Data penyasarannya masyarakat miskin sebanyak 200 KK (40 KUBE) di 4 Kabupaten/Kota: Mandailing Natal, Humbang Hasundutan, Toba, Padang Lawas Utara, Dairi serta 200 KK (UEP) di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten **Nias Selatan**, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Nias			
	2027	tidak ada			

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2030					
PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			
	2030	tidak ada			
12. Pelaksanaan Program Pasar Murah Bergerak (PMB)	2025	Identifikasi kebutuhan dan lokasi sasaran (IHK, P3KE, desa rentan pangan, dan wilayah 3T); Penentuan komoditas & harga jual; Penyusunan Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) Pasar Murah Bergerak (PMB); Koordinasi dan Kemitraan dengan TPID, BULOG, CSR, Distributor, Pengusaha daerah/ koperasi/ BUMEDes, Pemerintah Kabupaten/ Kota;Penentuan jadwal & titik lokasi; Pelaksanaan Pasar Murah Bergerak (PMB)	DISPERINDAG ESDM	• Dinas TPH: Data pangan strategis dan penyediaan stok • Dinas Perhubungan: Transportasi logistik • Dinas Sosial: Data P3KE *by name by address* (untuk menentukan titik titik PMB dilakukan) • Dinas Koperasi & UMKM: Pelibatan UMKM dan Koperasi dalam penyediaan stok • Biro Perekonomian: pelibatan TPID untuk menghitung dampak terhadap pengendalian inflasi • Dinas Kominfo: Publikasi Pelaksanaan • Bappelitbang: Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan • Inspektorat: Pengawasan Pelaksanaan	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan (Tahun 2025-2030): 1. Pendataan kecamatan dan jumlah penduduk miskin dan rawan miskin; 2. Pendataan jumlah KUMKM penyedia Bahan Kebutuhan Pokok; 3. Pengawasan distribusi dan harga bahan kebutuhan pokok; 4. kerja sama antar kabupaten dalam penyediaan Bahan Kebutuhan Pokok 5. Penyediaan lokasi untuk pelaksanaan; 6. Monitoring dan evaluasi
		tidak ada			
	2026	Konsolidasi kelembagaan, integrasi sistem informasi daerah; Pelaksanaan Pasar Murah Bergerak (PMB)			
		Lokasi: Mandailing Natal (kemiskinan struktural), Tapanuli Utara (akses terbatas), Nias Barat (isolasi logistik), Humbang Hasundutan (wilayah dataran tinggi), Pakpak Bharat (akses sangat terbatas), Dairi (wilayah perbatasan), Kabupaten Batu Bara (wilayah pesisir), Toba (hinterland), Samosir (wilayah tertutup), Labuhanbatu Selatan (kemiskinan tinggi), **Nias Selatan** (akses sulit), Padang Lawas (rawan logistik), Padang Lawas Utara (wilayah sulit distribusi), Tapanuli Tengah (akses dan harga tinggi), Langkat (distribusi padat dan IHK)			
	2027	Pelaksanaan Pasar Murah Bergerak (PMB) • 15 Kabupaten/Kota			
		Lokasi; Karo (rawan inflasi sayur), Deli Serdang (kontributor IHK), Mandailing			

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2030					
PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Natal (kemiskinan ekstrem), Humbang Hasundutan (akses distribusi sulit), Tapanuli Tengah (harga fluktuatif), Toba (wilayah pegunungan), Nias Barat (daerah pulau terluar), Padang Lawas (akses distribusi), Nias Utara (rawan kemiskinan), **Nias Selatan** (akses logistik laut), Langkat (wilayah Pantai Timur), Samosir (pulau tengah danau), Serdang Bedagai (penyangga distribusi), Tapanuli Selatan (akses transportasi terbatas), Simalungun (wilayah padat penduduk)			
	2028	Pelaksanaan Pasar Murah Bergerak (PMB) • 15 Kabupaten/Kota			
		Medan (kota IHK utama), Pematangsiantar (wilayah urban), Padangsidimpuan (wilayah tertutup distribusi), Deli Serdang (wilayah distribusi padat), Toba (akses perbatasan dan pariwisata), Humbang Hasundutan (wilayah pertanian dan pengunungan), **Nias Selatan** (terpencil), Karo (akses dan cuaca ekstrem), Langkat (wilayah perbatasan), Simalungun (pusat distribusi regional), Tapanuli Selatan (wilayah pegunungan), Mandailing Natal (akses rendah), Dairi (hinterland), Nias Barat (wilayah terpencil), Tapanuli Tengah (rawan distribusi)			
	2029	Pelaksanaan Pasar Murah Bergerak (PMB) • 15 Kabupaten/Kota			
		Tebing Tinggi (kota IHK baru), Binjai (urban miskin), Toba (wilayah distribusi luas), Langkat (wilayah perbatasan), Samosir (akses logistik air), Pakpak Bharat (akses sangat terbatas), Humbang Hasundutan			

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2030					
PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(wilayah dataran tinggi), Tapanuli Tengah (harga fluktuatif), Mandailing Natal (kemiskinan struktural), Padang Lawas (akses distribusi sulit), Deli Serdang (wilayah IHK), Karo (rawan inflasi hortikultura), **Nias Selatan** (logistik laut), Simalungun (distribusi lintas kabupaten), Asahan (wilayah urban pertanian)			
	2030	Pelaksanaan Pasar Murah Bergerak (PMB) • 15 Kabupaten/Kota			
		tidak ada			
13. Perlindungan Sosial bagi Tenaga Kerja Rentan (Subsidi BPJS Ketenagakerjaan)	2025	1. Pendataan dan verifikasi 2. Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan (Pekerja rentan yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja dibawah standar) sebanyak 21.000 (APBD dan DBH Sawit) 3. Penguatan peran dan komitmen kabupaten/kota dalam pembiayaan dan regulasi (MoU Pemprovsu dengan Kabupaten dan Kota) • 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara informal prioritas Masyarakat miskin ekstrem di Desil 1 dan 2)	DISNAKER	Dinas Sosial • Dinas Sosial berperan dalam memberikan data dukung DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) untuk memastikan penerima termasuk dalam kategori penerima bantuan. • Pendataan dan Validasi Calon Penerima, Mengelola dan memutakhirkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai dasar penetapan penerima bantuan iuran BPJS. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil • Penyediaan dan Verifikasi Data Identitas • Menyediakan data kependudukan yang valid (NIK, KK, KTP) sebagai prasyarat utama pendaftaran peserta BPJS Ketenagakerjaan.	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Ketenagakerjaan, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan: 1. Mendukung pelaksanaan agar bisa mencapai target *Universal Coverage Jamsostek* (UCJ) sebesar 60% sesuai RPJMD 2025-2029 2. Memberikan sosialisasi untuk masyarakat, khususnya untuk tenaga kerja rentan dan masyarakat yang berada di garis kemiskinan 3. Pengalokasian DBH sawit dan APBD dengan persentase pembagian 80 persen Kabupaten/Kota dan 20 persen provinsi utk perlindungan pekerja rentan miskin ekstrem desil 1 dan 2
	2026	Perluasan kepesertaan pekerja rentan di sektor informal sebanyak 44.645 dengan skema penganggaran 20% Provinsi dan 80% Kabupaten/Kota • 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara informal prioritas Masyarakat miskin ekstrem di Desil 1 dan 2			
	2027	Pembayaran kepesertaan pekerja rentan di sektor informal sebanyak 44.646 dengan skema penganggaran 20% Provinsi dan 80% Kabupaten/Kota			

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2030					
PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		• 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara informal prioritas Masyarakat miskin ekstrem di Desil 1 dan 2		• Melakukan verifikasi dan sinkronisasi data dengan sistem BPJS, DTKS (Dinas Sosial), dan lembaga lain untuk memastikan data pekerja rentan terverifikasi secara administratif. • Dukungan Pemutakhiran Data DTKS, Bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk memastikan kesesuaian dan kelengkapan data identitas dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), yang digunakan untuk menetapkan penerima bantuan iuran BPJS. • Membantu mempercepat proses registrasi atau koreksi data calon penerima manfaat yang belum memiliki dokumen kependudukan lengkap. BPJS Ketenagakerjaan • BPJS Ketenagakerjaan berperan menyelenggarakan perlindungan sosial bagi pekerja melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK): Perlindungan atas risiko kecelakaan selama bekerja. • Jaminan Kematian (JKm): Santunan kepada ahli waris pekerja yang meninggal. • Jaminan Hari Tua (JHT): Tabungan jangka panjang bagi pekerja saat pensiun.	
	2028	Pembayaran kepesertaan pekerja rentan di sektor informal sebanyak 44.647 dengan skema penganggaran 20% Provinsi dan 80% Kabupaten/Kota • 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara informal prioritas Masyarakat miskin ekstrem di Desil 1 dan 2			
	2029	Pembayaran kepesertaan pekerja rentan di sektor informal sebanyak 44.648 dengan skema penganggaran 20% Provinsi dan 80% Kabupaten/Kota • Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara informal prioritas Masyarakat miskin ekstrem di Desil 1 dan 2			
	2030	1. Pembayaran kepesertaan pekerja rentan di sektor informal sebanyak 44.648 dengan skema penganggaran 20% Provinsi dan 80% Kabupaten/Kota 2. Evaluasi menyeluruh dan pencapaian target cakupan 60% UCJ • 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara			

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2030					
PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				• Jaminan Pensiun (JP): Penghasilan berkala untuk pekerja setelah pensiun. • Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP): Bantuan uang tunai, akses informasi kerja, dan pelatihan bagi pekerja yang terkena PHK. • Kominfo: Publikasi Kegiatan	
14. Revitalisasi, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Panti Sosial Provinsi	2025	Bimbingan keterampilan dasar bagi PPKS/penghuni panti Pemberian bantuan sosial bagi PPKS/penghuni panti sosial yang akan memasuki masa terminasi		PUPR (Dokumen *appraisal*, pendampingan, *monitoring* dan evaluasi untuk revitalisasi panti sosial) Disperindag, Dinas Koperasi UMKM, Disnaker (Dukungan Pelatihan dan Keterampilan Kerja bagi sasaran Penghuni Panti) Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	- Kabupaten/Kota mendukung pelaksanaan pelatihan bimbingan mental, dan pendidikan paket A/B/C bagi penerima manfaat yang dirujuk dari panti sosial provinsi khususnya panti anak dan remaja - Kabupaten/Kota bersama Provinsi melakukan pemantauan, evaluasi atas keberlanjutan penerima manfaat.
	2026	Penyusunan dokumen *appraisal*/penilaian kerusakan bekerja sama dengan Dinas PUPR Penyusunan dokumen perencanaan (jasa konsultan perencanaan) untuk 13 panti sosial Bimbingan keterampilan dasar bagi PPKS/penghuni panti Pemberian bantuan sosial bagi PPKS/penghuni panti sosial yang akan memasuki masa terminasi			
	2027	Revitalisasi fisik gedung Panti Sosial (4 unit) 1.PSAR Anak Tanjung Morawa (Kabupaten Deli Serdang) 2.PS Lansia Kisaran (Kabupaten Asahan) 3.PS Gepeng Binjai (Kota Binjai) 4.PS Lansia TRW Pematangsiantar (Kota Pematangsiantar) Bimbingan keterampilan dasar bagi PPKS/penghuni panti Pemberian bantuan sosial bagi PPKS/penghuni panti sosial yang akan memasuki masa terminasi			

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2030					
PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2028	Revitalisasi fisik gedung Panti Sosial (4 unit) 1. PS Tuna Susila & Tuna Laras Berastagi (Kabupaten Karo) 2. PS Padangsidimpuan (Kota Padangsidimpuan) 3. PS Siborong-borong (Kabupaten Tapanuli Utara) 4. PS Tebing Tinggi (Kota Tebing Tinggi) Bimbingan keterampilan dasar bagi PPKS/penghuni panti Pemberian bantuan sosial bagi PPKS/penghuni panti sosial yang akan memasuki masa terminasi			
	2029	Revitalisasi fisik gedung Panti Sosial (5 unit) 1. PS Anak Sidikalang-Kabanjahe (Kabupaten Dairi & Kabupaten Karo) 2. PS Lausimomo-Hutasalem (Kab.Karo & Kabupaten Toba) 3. PS Anak Gunungsitoli (Kota Gunungsitoli) 4. PS Eks Kusta Belidahan-Sicanang (Kota Medan) 5. PS Pinangsori (Kabupaten Tapanuli Tengah) Bimbingan keterampilan dasar bagi PPKS/penghuni panti Pemberian bantuan sosial bagi PPKS/penghuni panti sosial yang akan memasuki masa terminasi			
	2030	Bimbingan keterampilan dasar bagi PPKS/penghuni panti Pemberian bantuan sosial bagi PPKS/penghuni panti sosial yang akan memasuki masa terminasi			
PP 5 PENGUATAN STABILITAS MAKRO EKONOMI DAN KESINAMBUNGAN FISKAL DAERAH					
15. Pembentukan Kawasan	2025	tidak ada	DISBUDPAREKRAF	• Bappelitbang:	2025:

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2030					
PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ekonomi Khusus Pertanian dan pariwisata		tidak ada	DAN DINAS KETAPANG TPH	Menyelaraskan rencana pengajuan KEK Pariwisata dan Pertanian dengan RPJMD, RTRW, RPJPD, dan RIPPARNAS/ RIPPARDA , Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan • Dinas Lingkungan Hidup: Kajian AMDAL dan pengelolaan lingkungan • Dinas Ketenagakerjaan: Peningkatan Capacity Building Pariwisata dan Pertanian • Dinas Pendidikan: Penguatan Vokasi SMK Pariwisata dan Pertanian • Dinas PUPR: Percepatan Perda RTRW Perubahan, sinkronisasi lokasi KEK pada RTRW • Dinas Kominfo: Dukungan Publikasi Kegiatan • Biro Hukum: Penetapan Regulasi Perda/Pergub • DPMPTSP: Fasilitasi perizinan	• Dukungan Kabupaten/Kota untuk Pengembangan KEK Pariwisata • Koordinasi terkait rencana pengajuan DPSP Danau Toba menjadi KEK 2026: • Persetujuan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kawasan Danau Toba dan Penetapan Lokasi • Penertapan Pebup RTRW; Kesesuaian Dokumen RTRW dan RDTR 2027: • Penyediaan Lahan (Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang KEK dalam hal terdapat lahan yang belum dibebaskan) • Peningkatan infrastruktur kewenangan kabupaten (jalan, air, sarana persampahan, sanitasi) • Kemudahan Perizinan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 2028: • Peningkatan SDM Pariwisata dan Pertanian '• Penyediaan Lahan • Peningkatan Infrastruktur kewenangan Kabupaten/ Kota • Kemudahan Perizinan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 2029: • Peningkatan SDM Pariwisata • Penyediaan Lahan • Peningkatan Infrastruktur
	2026	tidak ada			
		tidak ada			
	2027	tidak ada			
		tidak ada			
	2028	tidak ada			
		tidak ada			
	2029	tidak ada			
		tidak ada			
	2030	tidak ada			

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2030					
PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					kewenangan Kabupaten/ Kota • Kemudahan Perizinan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota • Promosi Investasi 2030: • Peningkatan SDM Pariwisata dan Pertanian • Penyediaan Lahan • Peningkatan Infrastruktur kewenangan Kabupaten/ Kota • Kemudahan Perizinan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota • Promosi Investasi
		tidak ada			
16. Penguatan Hilirisasi Komoditas Unggulan di Kawasan Industri Sumatera Utara	2025	Penguatan Hilirisasi Produk Unggulan Sumatera Utara Identifikasi rantai pasok dan IKM Komoditas Unggulan Lokasi • Kelapa: Kabupaten Nias Barat, **Nias Selatan**, Nias Utara, Asahan, Batu Bara, dan Labuhanbatu Utara • Kopi: Kabupaten Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, dan Simalungun • Aren: Kabupaten Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal • Cabai: Kabupaten Karo, Batu Bara, Serdang Bedagai, Deli Serdang • Kelapa Sawit:	DISPERINDAG ESDM	• Dinas TPH: Peningkatan Produksi Cabe melalui Sarprodi; Pemberian Bibit Cabai varietas tahan hama & cocok untuk pengeringan, *capacity building* bagi petani • Dinas Perkebunan dan Peternakan: Peningkatan Produksi Kelapa, Aren dan Kopi melalui Sarprodi; Pemberian Bibit Kelapa genjah, Kopi Unggu, Aren, *capacity building* bagi petani • Dinas PUPR: Penguatan Inftratruktur Jalan dan Jembatan • Dinas Kominfo: Dukungan Publikasi Kegiatan	Dukungan Kabupaten/Kota: • Menyediakan Data IKM sektor Kopi, Kelapa, Aren, Cabe (jenis produk, data produksi, nilai omset produksi)
	2026	1. Hilirisasi komoditas Unggulan Sumatera Utara Peningkatan Kapasitas Produksi IKM dengan Produk Hilirisasi, Riset inovasi produk dan teknologi tepat guna • Kelapa: VCO, Santan Kemasan, Minyak kelapa kopra (*cooking oil*); Gula Kelapa/gula semut,			Peningkatan *capacity building* pada IKM (kelapa, cabe, kopi, aren); menyusun regulasi pengembangan hilirisasi,

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2030					
PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Kelapa kering, arang aktif dari batok kelapa, Produk berbasis serat sabut (keset, geotekstil, jok mobil) • Cabe: Cabe Kering, Cabe Bubuk, Saos (cabe bawang tomat), saos pasta; Produk Turunan untuk Industri Non-Pangan (Ekstrak capsaicin → bahan baku industri farmasi, kosmetik (krim pereda nyeri, pelangsing), pestisida organik; Oleoresin cabai → pewarna dan pemberi rasa pedas alami untuk industri makanan & minuman; *Spray* pengusir hama berbahan *capsaicin* • Kopi : Minuman kopi kemasan siap minum (*RTD Coffee*) — botol/*sachet/cup*; Kopi instan (*pure instant coffee, 3-in-1, cappuccino sachet); Drip bag coffee* — kopi bubuk dalam kantong celup; *Cold brew* • Aren: Gula Aren, Sirup Aren, Tuak, manisan kolang kaling, Sapu ijuk, sikat, keset, anyaman kerajinan dari lidi atau serat kayu/daun aren			
		• Kelapa: Kabupaten Nias Barat, **Nias Selatan**, Nias Utara dan Asahan • Kopi: Kabupaten Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, dan Simalungun • Aren: Kabupaten Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal • Cabe: Kabupaten Karo dan Kabupaten Batu Bara			
	2027	1. Hilirisasi Produk Unggulan Sumatera Utara Peningkatan Kapasitas Produksi			Penguatan kemitraan hilirisasi antar Kabupaten/Kota. Pemasaran, dukungan promosi,

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2030					
PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Hilir dan peningkatan kemitraan IKM dengan industri hilir; Diversifikasi Produk & Inovasi • Kelapa: Kabupaten Nias Barat, **Nias Selatan**, Nias Utara, Asahan, Batu Bara, dan Labuhanbatu Utara • Kopi: Kabupaten Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, dan Simalungun • Aren: Kabupaten Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal • Cabe: Kabupaten Karo, Kabupaten Batu Bara, Serdang Bedagai, Deli Serdang			*capacity buliding* difersifikasi produk hilirisasi , Penyediaan Rumah kemasan oleh Kabupaten/Kota
	2028	1. Hilirisasi Produk Unggulan Sumatera Utara Peningkatan SDM, Peningkatan Kapasitas Produksi dan peningkatan kemitraan IKM dengan industri hilir; Penguatan Pasar & *Branding* ; MoU dengan Industri Besar untuk menampung produk hilirisasi dari IKM Binaan • Kelapa: Kabupaten Nias Barat**,** **Nias Selatan**, Nias Utara, Asahan,Batu Bara, dan Labuhanbatu Utara • Kopi: Kabupaten Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara dan Simalungun • Aren: Kabupaten Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal • Cabe: Kabupaten Karo, Batu Bara, Serdang Bedagai dan Deli Serdang			Menentukan IKM yang akan dilakukan *capacity building*, menyusun regulasi pengembangan hilirisasi, penguatan kemitraan hilirisasi antar Kabupaten/ Kota, peningkatan akses pembiayaan melalui KUR atau Koperasi, fasilitasi *capacity building* standarisasi eksport bagi pelaku IKM.
	2029	1. Hilirisasi Produk Unggulan Sumatera Utara Integrasi Ekosistem Industri / (dari hulu ke hilir mulai dari bahan baku, sampai ke pasok industri besar) dan Bisnis **Matching** dengan			Dukungan pembiayaan KUR , identifikasi IKM berpotensi untuk dilakukan *business matching.*

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2030					
PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Industri Besar dalam dan luar negeri • Kelapa: Kabupaten Nias Barat, **Nias Selatan**, Nias Utara, Asahan, Batu Bara, dan Labuhanbatu Utara • Kopi: Kabupaten Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, dan Simalungun • Aren: Kabupaten Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal • Cabe: Kabupaten Karo, Batu Bara, Serdang Bedagai dan Deli Serdang			
	2030	1. Hilirisasi Produk Unggulan Sumatera Utara Evaluasi, Ekspansi dan Keberlanjutan Produk Hilirisasi Industri di pasar global • Kelapa: Kabupaten Nias Barat, **Nias Selatan**, Nias Utara, Asahan, Batu Bara, dan Labuhanbatu Utara • Kopi: Kabupaten Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, dan Simalungun • Aren: Kabupaten Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal • Cabe: Kabupaten Karo, Batu Bara, Serdang Bedagai dan Deli Serdang			*Branding* Ekspor
17. BUMD Reform Program (Penguatan Peran BUMD sebagai Motor Ekonomi)	2025	tidak ada	-	Bappelitbang: Penyusunan konsep dan perencanaan kesehatan BUMD, GCG Biro Hukum: Percepatan fasilitasi regulasi Biro PemOtda: Fasilitasi Kerja sama Diskominfo: Publikasi Kegiatan Inspektorat: Audit BUMD	-
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			
	2030	tidak ada			
18. Pemanfaatan Aset barang milik daerah melalui kerja sama ekonomi	2025	• Inventarisasi Barang Milik Daerah yang belum optimal, serta potensi pemanfaatan	BKAD	Bapenda Provsu: Dukungan dalam proses bisnis pendapatan melalui	Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota pada pelaksanaan pengamanan BMD

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2030					
PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		• Penyusunan skema/proses bisnis pemanfaatan aset BMD • Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil investarisasi • Proses digitalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah		pemafaatan aset BMD dengan kerja sama ekonomi Bappelitbang Provsu: Dukungan dalam penyusunan konsep dan perencanaan Diskominfo: Dukungan dalam penyediaan web aplikasi dan promosi OPD Pengguna BMD: Dukungan dalam inventarisir dan pengamanan aset serta pemeliharaan BMD	dalam penerbitan SKT lahan (Surat Keterangan Kepemilikan Lahan) dari Pemerintah Setempat (Kelurahan atau Kepala Desa)
	2026	• Pemanfaatan aset Barang Milik Daerah yang berdasarkan hasil inventarisasi (target 2 Barang Milik Daerah yang termanfaatkan) • Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil investarisasi • Penyusunan Regulasi penggunaan web aplikasi pemanfaatan Barang Milik Daerah • Peningkatan kapasitas dan kuantitas SDM penilai barang			
	2027	• Pemanfaatan aset Barang Milik Daerah yang berdasarkan hasil inventarisasi (target 2 Barang Milik Daerah yang termanfaatkan) • Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil investarisasi • Pengembangan skema pemanfaatan Barang Milik Daerah • Pengembangan sistem informasi atau promosi			
	2028	• Pemanfaatan aset Barang Milik Daerah yang berdasarkan hasil inventarisasi (target 2 Barang Milik Daerah yang termanfaatkan) • Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil investarisasi • Penguatan kemitraan dalam perluasan pemanfaatan Barang Milik Daerah termasuk kerja sama dengan platform lain			
	2029	• Pemanfaatan aset Barang Milik Daerah yang berdasarkan hasil inventarisasi (target 2 Barang Milik Daerah yang termanfaatkan) • Pengamanan Barang Milik Daerah			

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2030					
PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		berdasarkan hasil investarisasi • Penguatan kemitraan dalam perluasan pemanfaatan Barang Milik Daerah termasuk kerja sama dengan platform lain (kerja sama dengan 1 Platform) • Evaluasi dan Monitoring secara berkala terhadap Pemanfaatan Barang Milik Daerah produktif berkelanjutan			
	2030	• Pemanfaatan aset Barang Milik Daerah yang berdasarkan hasil inventarisasi (target 2 Barang Milik Daerah yang termanfaatkan) • Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil investarisasi • Evaluasi dan Monitoring secara berkala terhadap Pemanfaatan Barang Milik Daerah melalui kerja sama ekonomi berkelanjutan			
PP.6 PENGEMBANGAN EKONOMI HIJAU DAN BIRU					
19. Pengembangan Kawasan Perkebunan (Kelapa, Kopi, Aren)	2025	Penyusunan regulasi teknis, Tim Pelaksana, Kajian awal pada semester II	DISBUNAK	1. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Provinsi Sumatera Utara: Memberikan pelatihan pengemasan izin edar hasil produk, pelatihan pengemasan produk dan sertifikasi halal serta pemberian alat untuk mengolah hasil produksi dalam rangka hilirisasi hasil Perkebunan kelapa seperti alat untuk menjadikan air kelapa menjadi minyak kelapa/VCO, dan *coconut milk*, kemudian biji kopi menjadi kopi bubuk dan kopi ekstrak, kemudian aren menjadi gula aren	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan: 1. Dukungan data CPCL di lokasi intervensi 2. Melakukan Pembinaan dan pelatihan peningkatan produksi atau peningkatan pasca produksi di lokasi intervensi pengembangan kawasan perkebunan
	2026	tidak ada			
	2027	- verifikasi CPCL dan sosialisasi awal kepada kelompok pekebun di lokasi intervensi pengembangan kawasan yang dilaksanakan mulai bulan Maret - Pembinaan dan pengawasan dilakukan pada bulan Juli-Agustus untuk melihat perkembangan kawasan perkebunan dan pelatihan pengolahan hasil produksi di lokasi intervensi yang telah dilaksanakan pada tahun 2026 - pemberian benih pada komoditas kelapa sebanyak 50.000 batang benih, 100 ton pupuk organik dan 10 paket alat pasca panen pembuatan kopra dan VCO kepada 10 kelompok			

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2030					
PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		pekebun di Kabupaten **Nias Selatan**, Pemberian benih pada komoditas kopi sebanyak 200.000 batang benih, 400 ton pupuk organik dan 40 kotak pestisida nabati dan 2 paket mesin pasca panen pembuatan bubuk kopi kepada 10 kelompok pekebun di Kabupaten Karo dilaksanakan pada bulan Oktober		dan bioetanol 2. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara: Pembentukan dan pelatihan UMKM bagi kelompok pekebun dan alat pengolah hasil produksi kelapa, kopi dan aren; 3. Dinas PMD Dukcapil: Untuk pembentukan dan pemberdayaan BUMDes di lokasi intervensi pengembangan kawasan perkebunan 4. Diskominfo: Untuk publikasi media	
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			
	2030	tidak ada			
20. Pengembangan Kawasan Unggulan Perikanan Tangkap dan Budidaya	2025	tidak ada	DISKANLA	• Dinas Perindustrian dan Perdagangan – Pengolahan, pemasaran, dan ekspor produk perikanan. • Dinas Koperasi dan UKM – Penguatan kelembagaan usaha nelayan/pembudidaya. • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang – Pembangunan infrastruktur pendukung (jalan dan pelabuhan). • Dinas Kominfo: Publikasi, sosialisasi, dan edukasi masyarakat	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan: - Pendataan kelompok nelayan dan pembudidaya Kabupaten/Kota - Klasterisasi - Sosialisasi dan Edukasi - Replikasi di daerah yang sama
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			
	2030	tidak ada			
21. Pengawasan Konservasi Laut SEMESTA (Pemberdayaan Nelayan Sebagai Pasukan Penjaga Laut)	2025	tidak ada	DISKANLA	• BAPPELITBANG: Integrasi program SEMESTA dalam perencanaan daerah. • Dinas Lingkungan Hidup Provsu: Kebijakan dan pemantauan kualitas lingkungan laut. • Dinas Perhubungan	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan: - Pendataan Nelayan
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			
	2030	tidak ada			

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2030					
PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Provsu: Dukungan transportasi laut dan keselamatan pelayaran patroli. • Satpol PP Provsu: Penegakan perda terkait konservasi laut. • Dinas Pariwisata Provsu: Sinergi dengan wisata bahari berkelanjutan. • Dinas Kominfo Provsu: Publikasi, sosialisasi, dan edukasi masyarakat. • Dinas Koperasi & UKM Provsu: Penguatan kelembagaan nelayan pengawas. • Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provsu: Kesiapsiagaan dan tanggap darurat di laut. • Inspektorat: Pengawasan dan pendampingan jalannya program	Kabupaten/Kota - Klasterisasi - Sosialisasi dan Edukasi
22. Rehabilitasi Mangrove dan Pesisir berbasis Masyarakat	2025	tidak ada	DLHK	1. Dinas Kominfo - Media massa - Publikasi kegiatan 2. Kementerian Kehutanan - Penyediaan Regulasi - Koordinasi program-program	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui DLHK dengan dukungan *Stakeholder* terkait diantaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kementerian Kehutanan, Kelompok Masyarakat Pesisir dan LSM/NGO/pemerhati Lingkungan. adapun dukungan kabupaten/kota pada kegiatan ini diantaranya: 1. Kolaborasi *Multistakeholder* dalam kegiatan 2. Pemberdayaan
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			
	2030	tidak ada			

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2030					
PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Masyarakat: Program rehabilitasi yang sukses tidak hanya tentang menanam pohon, tapi juga tentang memberdayakan masyarakat. 3. Membantu dalam proses pengadaan lahan dan memastikan status hukum lahan tersebut jelas 4. Pemerintah kabupaten melakukan pemantauan dan pemeliharaan secara berkala untuk memastikan pertumbuhan mangrove berjalan baik dan program mencapai tujuannya.
23. Pengembangan Energi Baru Terbarukan (PLTS Pompa Air Untuk Irigasi Pertanian/PLTA Mikrohidro dan lainnya)	2025	tidak ada	DISPERINDAG ESDM	• TPH : Pembinaan Kelompok Petani dalam penggunaan PLTS • Bappelitbang: *Monitoring*, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan • Inspektorat: Pengawasan Pelaksanaan • Dinas Kominfo: Dukungan Publikasi Kegiatan	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan untuk Tahun 2025-2030: 1. Data Kelompok Tani (CPCL) 2. Data penentual lokasi 3. Pengadaan lahan 4. Data produksi pertanian; kondisi air 5. Data *readiness criteria*
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			
	2030	tidak ada			
PP 7 KETAHANAN PANGAN MELALUI PENGUATAN NILAI BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL AGAR DIVERSIFIKASI HASIL PERTANIAN MENJADI LEBIH PRODUKTIF DAN BERDAMPAK PADA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LOKAL					
24. Pembentukan dan	2025	tidak ada	Pelaksanaan	1. Dinas Pekerjaan Umum	• Memfasilitasi penyediaan

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2030					
PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengembangan Kawasan Unggulan Padi, Jagung, Cabai Merah, dan bawang merah	2026	tidak ada	program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Ketahanan Pangan dan TPH	dan Penataan Ruang (PUPR) memiliki peran krusial dalam pembangunan infrastruktur dasar pendukung pertanian. Ini mencakup pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, jalan usaha tani, serta infrastruktur penunjang lainnya yang memperlancar distribusi hasil panen dan aksesibilitas kawasan pertanian. Penataan ruang juga menjadi fokus penting untuk memastikan kawasan pertanian unggulan tidak terganggu oleh alih fungsi lahan. 2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) turut berperan dalam mendorong hilirisasi produk pertanian melalui pengembangan industri pengolahan hasil tani, seperti pengeringan, pengemasan, dan pengolahan lanjutan produk padi, jagung, cabai, dan bawang merah. Di sisi perdagangan, dinas ini memastikan akses pasar yang lebih luas dan stabil melalui promosi, fasilitasi perdagangan, dan penguatan sistem rantai pasok. Adanya kegiatan Gerakan pangan	benih unggul, pupuk, dan alat pertanian dasar. • Mendorong sinergi antar pemangku kepentingan lokal (petani, penyuluh, BUMDes). • Memfasilitasi pembangunan/peningkatan akses jalan produksi di kawasan unggulan. • Mendukung pembangunan fasilitas pascapanen: gudang, alat pengering, rumah sortasi. • Mengkoordinasikan petani/UMKM untuk mengikuti pelatihan sertifikasi ekspor dan standar internasional. • Memberikan laporan lengkap atas capaian program, kendala, dan peluang lanjutan. Replikasi di daerah yang sama
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2030					
PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Murah membuat Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dapat berkolaborasi dengan Dinas ketahanan Pangan dan TPH dalam menjalankan kegiatan ini 3. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) memegang peranan sebagai koordinator perencanaan strategis lintas sektor. Bappelitbang merumuskan arah kebijakan, menyusun rencana aksi, serta memastikan sinergi antar-dinas dalam pengembangan kawasan unggulan. 4. Diskominfo (Publikasi)	
	2030	tidak ada			
25. Pembentukan dan Pengembangan Kawasan Peternakan unggulan	2025	Penyusunan regulasi teknis, Tim Pelaksana, Kajian awal pada semester II	DISBUNAK	1. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Provinsi Sumatera Utara: Memberikan pelatihan pengemasan izin edar hasil produk, pelatihan pengemasan produk dan sertifikasi halal serta pemberian alat untuk mengolah hasil produksi 2. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara: Koordinasi pembentukan dan pelatihan UMKM bagi kelompok peternak	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan: 1. Dukungan data CPCL di lokasi intervensi 2. Melakukan Pembinaan dan pelatihan peningkatan produksi atau peningkatan pasca produksi di lokasi intervensi pengembangan kawasan peternakan 3. Pemberian izin usaha untuk
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	- Verifikasi CPCL dan sosialisasi awal kepada kelompok peternak di lokasi intervensi pengembangan kawasan yang dilaksanakan mulai bulan April - Pembinaan dan pengawasan serta penguatan kelembagaan peternak yang dilakukan mulai bulan Juli untuk melihat perkembangan kawasan perkebunan yang telah dilaksanakan pada tahun 2027 - Pemberian bibit 30 ekor sapi perah			

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2030					
PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		beserta pembangunan kandang dan alat pengolah susu kepada 3 kelompok tani/ peternak di Kabupaten Deli Serdang, 200 ekor kambing kepada 10 kelompok tani/ peternak di Kabupaten Serdang Bedagai, 200 ekor babi kepada 10 kelompok tani/ peternak di Kabupaten **Nias Selatan,** dan 4000 ekor ayam kepada 4 kelompok tani/ peternak di Kabupaten Langkat dilaksanakan pada bulan September		3. Dinas PMD Dukcapil: Untuk pembentukan dan pemberdayaan BUMDes di lokasi intervensi pengembangan kawasan peternakan 4. Diskominfo: Untuk publikasi media	koperasi, UMKM, BUMDes yang mengolah hasil produksi berada di kawasan peternakan 4. Replikasi di daerah yang sama
	2029	tidak ada			
	2030	tidak ada			
26. Program Pengembangan Bibit Unggul Pertanian	2025	tidak ada	Dinas Ketahanan Pangan dan TPH Provinsi berperan sebagai inisiator utama program. Mereka bertanggung jawab atas perumusan kebijakan, penyediaan alokasi anggaran, serta koordinasi lintas sektor di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dalam implementasinya, mereka juga menetapkan lokasi uji multilokasi dan mendukung pelepasan varietas secara resmi	PT. Dirga Surya: memasarkan produksi bibit unggul padi	Dinas Pertanian Kabupaten mempromosikan dan menggunakan bibit unggul padi varietas baru.
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			
	2030	Pengembangan produksi benih unggul dan pemasaran di Kabupaten/Kota sentra provinsi Sumatera Utara dan di kepulauan Sumatera			
27. Fasilitasi Akses Permodalan Terhadap Kelompok Tani	2025	Fokus pada persiapan program, pembentukan Tim Pokja FPPS di provinsi dan kabupaten/kota, rekrutmen dan pelatihan Fasilitator Pembiayaan Petani Swadaya (FPPS),	Dinas Ketahanan Pangan dan TPH bertindak sebagai penghubung antara kelompok tani	a. Dinas Koperasi dan UKM memiliki peran sentral dalam penguatan kelembagaan kelompok tani melalui pembinaan	Memetakan kelompok tani yang layak dan potensial untuk memperoleh akses permodalan, berdasarkan data luas lahan, komoditas yang diusahakan,

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2030					
PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		pemutakhiran data kelompok tani, koordinasi dengan lembaga keuangan, dan sosialisasi program. • 33 Kabupaten/Kota	dengan lembaga keuangan formal seperti bank, koperasi, serta lembaga penjaminan kredit. Melalui penyediaan data kelompok tani, pelatihan manajemen usaha tani, serta pembentukan kelembagaan petani yang kuat, dinas membantu petani memenuhi persyaratan administratif dan teknis agar layak mengakses program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan skema pembiayaan pertanian lainnya.	koperasi tani dan UMKM berbasis pertanian. Dinas ini dapat memfasilitasi akses permodalan bagi kelompok tani melalui penguatan koperasi simpan pinjam, pelatihan manajemen usaha tani, hingga menjembatani kerja sama antara koperasi dan lembaga keuangan. b. Disperindag ESDM berkontribusi dalam mendorong hilirisasi produk pertanian dan menjaga stabilitas harga hasil tani. Melalui penguatan rantai nilai dan pasar hasil tani, dinas ini dapat membuka peluang tambahan pendapatan bagi petani yang dapat digunakan sebagai modal atau premi asuransi. c. Dinas Kominfo memainkan peran dalam penyebarluasan informasi terkait program bantuan iuran premi asuransi dan akses permodalan. Melalui berbagai saluran komunikasi digital dan non-digital, Kominfo dapat menjamin transparansi program, meningkatkan literasi digital kelompok tani, dan mendorong penggunaan teknologi informasi dalam pengajuan permodalan dan asuransi pertanian.	serta rekam jejak kelembagaan kelompok
	2026	Mulai pelaksanaan Temu Pembiayaan tahap I dan II, pendampingan realisasi kredit, pelatihan manajemen keuangan bagi kelompok tani penerima pembiayaan, serta monitoring awal terhadap usaha penerima kredit. • 33 Kabupaten/Kota			
	2027	Memperluas cakupan penerima pembiayaan, memperkuat kemitraan dengan BUMN, BUMD, dan swasta, serta memberikan pelatihan lanjutan kepada FPPS terkait negosiasi bisnis dan pemasaran. • 33 Kabupaten/Kota			
	2028	Mengintegrasikan pemasaran digital dan *e-commerce*, mengembangkan sistem informasi pembiayaan pertanian berbasis aplikasi, serta melatih FPPS dan kelompok tani dalam penggunaannya • 33 Kabupaten/Kota			
	2029	Melakukan diversifikasi sumber pembiayaan melalui koperasi, CSR, dan investor. Mengembangkan usaha hilir di bidang pascapanen dan olahan, memberikan pelatihan manajemen usaha hilir, serta mendorong pemasaran produk hilir. • 33 Kabupaten/Kota			
	2030	Melaksanakan kajian dampak ekonomi program, menyusun model pendampingan berkelanjutan, dan melatih FPPS menjadi konsultan atau koperasi tani. • 33 Kabupaten/Kota			

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2030					
PROYEK STRATEGIS	**TAHUN**	**RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN**	**PERANGKAT DAERAH**		**DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA**
			UTAMA	**PENDUKUNG**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				d. Dinas Pemdesdukcapil memiliki peran strategis dalam verifikasi dan validasi data kependudukan serta kelembagaan desa sebagai basis penyaluran bantuan. Melalui data kependudukan dan basis kelompok tani di desa, Pemdesdukcapil memastikan agar bantuan permodalan maupun iuran premi asuransi diberikan secara tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan riil kelompok tani. e. Diskominfo (Publikasi)	
PP 8 PARIWISATA YANG MENGGERAKKAN POTENSI ALAM LOKAL DI PEDESAAN DAN PERKOTAAN DENGAN MELIBATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT SECARA LANGSUNG (KOMUNITAS, PEMERINTAH DAERAH/DESA/KELURAHAN DAN PENGUSAHA LOKAL)					
28. Dukungan terhadap Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba	2025	tidak ada	DISBUDPAREKRAF	DISKOMINFO: Publikasi Media DISBUDPAREKRAF: Penguatan Atraksi Budaya dan Pariwisata; Pengembangan SDM dan Ekonomi Kreatif; Promosi dan Pemasaran Destinasi; Pengembangan Infrastruktur dan Amenitas Pariwisata; Kolaborasi dan Sinkronisasi Program; Penguatan Tata Kelola Destinasi;	1. Memastikan keselarasan Program/Kegiatan dalam Rencana Aksi Tahap II telah sesuai dengan Dokumen Perencanaan di darah (RPJMD Kabupaten & RKPD Kabupaten) dan Integrasi RIPDN kedalam renja OPD 2. Menyusun rencana aksi tahunan 3. Memastikan ketersediaan anggaran dalam mendukung Pengembangan DPSP Danau Toba 4. Penyediaan Lahan yang
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			
	2030	tidak ada			

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2030					
PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				BPODT (Badan Pelaksana Otorita Danau Toba): Koordinasi Pengelolaan Kawasan Pariwisata Strategis; Pengembangan infrastruktur dan Investasi; Promosi dan Branding Kawasan; Pengembangan SDM dan Ekosistem Wisata BAPPELITBANG (Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah): Integrasi Perencanaan Pengembangan DPP Danau Toba; Sinkronisasi Program Daerah dengan Nasional; Litbang & Evaluasi Program Pengembangan Pariwisata; Dukungan Kebijakan Inovatif & Kolaboratif Sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumut Nomor 188.44/159/KTPS/2019 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja P3TB Provinsi Sumatera Utara, seluruh Opd Pemprovsu yg termasuk dalam SK Gubsu tersebut berperan dalam mendukung Pengembangan DPSP Danau Toba sesuai dengan Rencan Aksi yang disusun	Clean & Clear (jika terdapat pembangunan fisik) 5. Pembentukan Desa Wisata sesuai dengan potensi; 6. Pembentukan Tata Kelola / Kelembagaan untuk Desa Wisata; 7. Pendampingan Desa Wisata; 8. Pendataan Potensi Unggulan Daerah di bidang Kebudayaan, Pariwisata & Ekonomi Kreatif; 9. Pendataan jumlah Pelaku Usaha Industri Pariwisata (Usaha Penyediaan Makan-Minum, Penyediaan Akomodasi (*Homestay*/Hotel), Penyedia Jasa Transportasi, Penyeda Jasa *Travel Agent*); 10. Pendampingan Pelaku Usaha Pariwisata 11. Pelaksaan *Event* Budaya, Pariwisata dan Ekonomi Keratif berskala Nasional
29. Pengelolaan dan Penataan Kawasan Toba Caldera UGGp dan Kawasan Geopark lainnya	2025	tidak ada	DISBUDPAREKRAF	1. DISBUDPAREKRAF: Penyaluran Belanja Operasional BP TCUGGp; Pembangunan *Visibilities di* Geosite; Pelatihan dan Pembinaan Pelaku Pariwisata dan Pengelola Desa Wisata; Identifikasi	1. Memastikan ketersediaan dukungan anggaran dalam pengelolaan *Geosite* di masing-masing Kabupaten; 2. Penyusunan muatan Lokal; 3. Bekerja sama dengan BP
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			
	2030	tidak ada			

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2030					
PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				dan Penetapan Cultural Heritage di Kawasan Geopark; Melaksanakan *Event Geofest*. 2. DINAS Koperasi &UMK: Melakukan Pelatihan & Pembinaan UMKM terutama di Kawasan *Geosite*; 3. Dinas Pendidikan: Melaksanaan kegiatan *Geopark to School* dan edukasi terkait Geopark kepada pelajar; 4. Dinas PUPR: Peningkatan kualitas jalan/jembatan di ruas jalan Provinsi yang menghubungkan antar geosite; 5. Bappeltbang: Melaksanakan penelitian terkait *Geological Heritage/Natural/Biological Heritage/Cultural Heritage* di Kawasan Toba Caldera UGGp maupun di Kawasan Geopark yang baru; 6. BPBD: Mitigasi Bencana & Sosialisasi; 7. Dinas LHK: Pelestarian Hutan dan ekosisten di Kawasan Danau Toba 8. Dinas Kominfo: Publikasi kegiatan;	dalam melaksanakan sosialisasi & edukasi kepada Masyarakat, Pelaku Wisata, Pelajar dan ASN tentang *Geopark*; 4. Melaksanakan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM terutama dalam pengembangan Geoproduk; 5. Mengidentifikasi dan menginventarisasi serta melakukan penelitian terkait potensi *Geological Heritage, Biological/ Natural Heritage* dan *Cultural Heritage;* 6. Rutin melaksanaan *Event GeoFest*; 7. Menyusun kajian awal terkait Kawasan Geopark baru; 8. Pembentukan Desa Wisata sesuai dengan potensi; 9. Pembentukan Tata Kelola / Kelembagaan untuk Desa Wisata; 10. Pendampingan Desa Wisata; 11. Pendataan jumlah Pelaku Usaha Industri Pariwisata (Usaha Penyediaan Makan-Minum, SPenyediaan Akomodasi (*Homestay*/ Hotel), Penyedia Jasa Transportasi, Penyedia Jasa *Travel Agent*); 12. Pendampingan Pelaku Usaha Pariwisata
9. Pembentukan & Pengembangan Kawasan Strategis Budaya, Parawisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi yang	2025	Inventarisasi & Identifikasi SDM Kawasan (BUMDES/ Pokdarwis/ Pengelola Desa Wisata/UMKM); Penyusunan Regulasi Penetapan	DISBUDPAREKRAF	1. Dinas Koperasi & UMKM: Pelatihan dan Pembinaan kepada UMKM di Kawasan.	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2030					
PROYEK STRATEGIS	**TAHUN**	**RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN**	**PERANGKAT DAERAH**		**DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA**
			UTAMA	**PENDUKUNG**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Terintegrasi (TATABUSE, SIBANDAN, SIPUAN, KARDAPAK dan BAHLIKE)		Kawasan Strategis; Penyusunan *Masterplan* • Sibolga-Pandan, Sipirok-Padangsidimpuan, Bawomatoluo-Hilisimaetano-Sorake, Tanjung Pura-Tangkahan-Bukit Lawang-Sei Bingai, Karo-Dairi-Pakpak		2. Dinas PUPR: Pembangunan Kawasan (jika ada pembangunan fisik); Peningkatan Akses Ruas Jalan Provinsi menuju Kawasan. 3. Dinas PMD : Pelatihan dan Pembinaan pengelola BUMDES Wisata 4. Dinas Kominfo : Penyediaan Failitas Digital di Kawasan; Publikasi Kegiatan	Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, sementara kabupaten/kota berperan dalam: 1. Memastikan ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan Proyek Strategis; 2. Penyediaan Lahan yang *Clean & Clear* (jika terdapat pembangunan fisik); 3. Pembentukan Desa Wisata sesuai dengan potensi; 4. Pembentukan Tata Kelola / Kelembagaan untuk Desa Wisata; 5. Pendampingan Desa Wisata; 6. Pendataan Potensi Unggulan Daerah di bidang Kebudayaan, Pariwisata & Ekonomi Kreatif; 7. Pendataan jumlah Pelaku Usaha Industri Pariwisata (Usaha Penyediaan Makan-Minum, Penyediaan Akomodasi (*Homestay*/Hotel), Penyedia Jasa Transportasi, Penyeda Jasa *Travel Agent*); 8. Pendampingan Pelaku Usaha Pariwisata; 9. Pendataan dan inventarisasi pelaku UMKM; 10. Pendampingan kepada pelaku UMKM; 11. Pelaksaan *Event* Budaya, Pariwisata dan Ekonomi Keratif berskala Nasional
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	Penataan Kawasan, Pembinaan, Pelatihan & Pendampingan bagi BUMDes/Pokdarwis/Pengelola Desa Wisata/UMKM dan Peningkatan Aksesibiltas • Kawasan Strategis BAHLIKE			
	2029	tidak ada			
	2030	tidak ada			

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2030					
PROYEK STRATEGIS	**TAHUN**	**RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN**	**PERANGKAT DAERAH**		**DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA**
			UTAMA	**PENDUKUNG**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10. Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Situs Cagar Budaya Sumatera Utara	2025	Pemetaan dan verifikasi kondisi situs cagar budaya (fisik & nonfisik) • **Nias Selatan**, Kawasan Danau Toba, Tapanuli Tengah, Langkat & Padang Lawas Utara	DISBUDPAREKRAF	1. Dinas Koperasi & UMKM: Pelatihan dan Pembinaan kepada UMKM di Kawasan. 2. Dinas PUPR: Peningkatan Akses Ruas Jalan Provinsi menuju Kawasan. 3. Dinas PMD: Pelatihan dan Pembinaan pengelola BUMDes Wisata 4. Dinas Kominfo: Penyediaan Failitas Digital di Kawasan; Publikasi Kegiatan 5. Dinas Pendidikan: Edukasi kepada pelajar tentang Situs Cagar Budaya	1. Memastikan ketersediaan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Provinsi; 2. Penyediaan Lahan yang *Clean & Clear* (jika terdapat pembangunan fisik); 3. Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Tingkat Kabupaten/Kota; 4. Pembentukan Pengelola Kawasan Situs Cagar Budaya; 5. Melaksanakan Program edukasi kepada masyarakat dan pelajar tentang Kawasan Situs Cagar Budaya; 6. Pendataan, Inventarisasi, Pendaftaran dan Penetapan Cagar Budaya di Kabupaten/Kota 7. Pembentukan Desa Wisata sesuai dengan potensi; 8. Pembentukan Tata Kelola / Kelembagaan untuk Desa Wisata; 9. Pendampingan Desa Wisata; 10. Pendataan jumlah Pelaku Usaha Industri Pariwisata (Usaha Penyediaan Makan-Minum, Penyediaan Akomodasi (*Homestay*/Hotel), Penyedia Jasa Transportasi, Penyeda Jasa *Travel Agent*); 11. Pendampingan Pelaku Usaha Pariwisata; 12. Pendataan dan Pendampingan UMKM;
	2026	Penyusunan dokumen perencanaan pelestarian (*masterplan*, DED, *roadmap*); Pelaksanaan konservasi/pemugaran bangunan bersejarah; Pelatihan konservasi dasar & manajemen situs budaya; Pelaksanaan Program Edukasi di Sekolah & Masyarakat • **Nias Selatan**, Kawasan Danau Toba, Tapanuli Tengah, Langkat & Padang Lawas Utara			
	2027	tidak ada			
	2028	Pelaksanaan konservasi/pemugaran bangunan bersejarah; Pelatihan konservasi dasar & manajemen situs budaya; Pelaksanaan Program Edukasi di Sekolah & Masyarakat; Promosi melalui pelaksanaan event budaya maupun media digital • di Kabupaten **Nias Selatan**, 1 Cagar budaya UNESCO			
	2029	tidak ada			
	2030	tidak ada			

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2030					
PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					13. Pelaksaan *Event* Budaya, Pariwisata dan Ekonomi Keratif berskala Nasional
11. Pelaksanaan Event Internasional, pengembangan paket wisata dan digitalisasi promosi pariwisata global	2025	tidak ada	DISBUDPAREKRAF	1. Dinas Perhubungan: Memastikan ketersediaan transportasi dan lalu lintas saat *event* internasional dilaksanakan 2. Dinas Kesehatan: Dukungan Tenaga Kesehatan dan Ambulans 3. Dinas Koperasi &UMKM: Pelatihan dan pendampingan UMKM untuk mendukung pelaksaan event internasional 4. Dinas Kominfo: Memastikan ketersediaan jaringan digital saat pra *event-event*-pasca *event* internasional; publikasi kegiatan 5. Satpol PP: Keamanan Pelaksanaan *Event* dan ketertiban penyelenggaraan acara 6. Dinas Pemuda dan Olahraga; Pembinaan Pemuda untuk partisipasi dalam penyelenggaraan event (sport, *e-sport*, dsb)	1. Pelaksanaan *Side Event* saat pelaksanaan *Event* Internasional; 2. Pelaksanaan Promosi melalui media digital dan cetak; 3. Sosialisasi & Edukasi kepada Pelaku Usaha Pariwisata (Penyedia Jasa Akomodasi (Hotel & *Homestay*),Penyedia Jasa makan-minum, Penyedia Jasa Transportasi, dan *Travel Agent*); 4. Pendataan & pendampingan terhadap UMKM; 5. Memastikan kelancaran aksesibiltas terutama saat pelaksanaan *Event* internasional (Pengaturan lalu lintas; Peningkatan kualitas jalan)
	2026	Uji coba & promosi paket wisata, Pengembangan *website* & media sosial destinasi, dan Kampanye digital internasional (video, *influencer*, konten kreatif); Penyusunan *Calender of Event* dan Penyelenggaraan *Event* Internasional • Kawasan Pariwisata Provinsi Sibolga-Pandan, Sipirok-Padangsidimpuan, Bawomatoluo-Hilisimaetano-Sorake, Tanjung Pura-Tangkahan-Bukit Lawang-Sei Bingai, Karo-Dairi-Pakpak (Event Internasional), Luar Negeri (Digitalisasi Promosi)			
	2027	Penyelenggaraan *event* tematik baru (kuliner, minat khusus, budaya), dan Diversifikasi wisata minat khusus (*geo tourism, wellness, heritage, agro*, religi); Penyusunan *Calender of Event* dan Penyelenggaraan *Event* Internasional • Kawasan Pariwisata Provinsi Sibolga-Pandan, Sipirok-Padangsidimpuan, Bawomatoluo-Hilisimaetano-Sorake, Tanjung Pura-Tangkahan-Bukit Lawang-Sei Bingai, Karo-Dairi-Pakpak (Event Internasional), Luar Negeri (Digitalisasi Promosi)			
	2028	Penyusunan *Calender of Event* dan Penyelenggaraan *Event* Internasional. Melaksanakan kerja sama Sponshorship dalam mendukung pelaksaan event; Pendataan, Inventarsasi dan penyusunan kajian awal terkait *event* tematik; Bersama dengan ASITA menyusun Paket-paket wisata; Melaksanakan kerja sama			

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2030					
PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		dengan influencer untuk mempromosikan pariwisata SUMUT; Melaksanakan kerja sama dengan *platform* pariwisata (traveloka, booking.com, tiket.com,dll). • Kawasan Pariwisata Provinsi Sibolga-Pandan, Sipirok-Padangsidimpuan, Bawomatoluo-Hilisimaetano-Sorake, Tanjung Pura-Tangkahan-Bukit Lawang-Sei Bingai, Karo-Dairi-Pakpak (*Event* Internasional), Luar Negeri (Digitalisasi Promosi)			
	2029	Penyusunan *Calender of Event* dan Penyelenggaraan *Event* Internasional; Kemitraan dengan diaspora & pelaku pariwisata global, Integrasi penuh dengan *platform* pariwisata nasional dan global • Kawasan Pariwisata Provinsi Sibolga-Pandan, Sipirok-Padangsidimpuan, Bawomatoluo-Hilisimaetano-Sorake, Tanjung Pura-Tangkahan-Bukit Lawang-Sei Bingai, Karo-Dairi-Pakpak (*Event* Internasional), Luar Negeri (Digitalisasi Promosi)			
	2030	Penyusunan *Calender of Event* dan Penyelenggaraan *Event* Internasional; Kemitraan dengan diaspora & pelaku pariwisata global, Integrasi penuh dengan *platform* pariwisata nasional dan global • Kawasan Pariwisata Provinsi Sibolga-Pandan, Sipirok-Padangsidimpuan, Bawomatoluo-Hilisimaetano-Sorake, Tanjung Pura-Tangkahan-Bukit Lawang-Sei Bingai, Karo-Dairi-Pakpak (*Event* Internasional), Luar Negeri (Digitalisasi Promosi)			
PP 9 EKONOMI KREATIF DAN					

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2030					
PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI					
12. Sentra industri kreatif di Kawasan Sport Center Sumatera Utara	2025	tidak ada	DISBUDPAREKRAF	1. Dinas PUPR: Pembangunan Sentra Industri Kreatif 2. Biro Perekonomian : Menyusun Kajian pembentukan BLUD; Pembentukan BLUD pengelola Sentra Industri Kreatif. 3. Dinas PerindagESDM: Pendataan, Pelatihan & Pembinaan IKM Kreatif. 4. Dinas Koperasi UMK: Pendataan, Pelatihan & Pembinaan UMKM 5. Dinas Kominfo: Penyediaan Fasilitas Digital (Internet, dll) di Kawasan Sentra Industri Kreatif; Publikasi Kegiatan	1. Pendataan Pelaku Industri Kreatif & Data UMKM Potensial; 2. Kurasi Pelaku Ekonomi Kreatif; 3. Fasiitasi HAKI bagi Pelaku Ekonomi Kreatif; 4. Pelaksanaan *Event* Ekonomi Kreatif secara rutin di Sentra Industri Kreatif; 5. Promosi terkait Sentra Industri Kreatif melalui media digital dan cetak;
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			
	2030	tidak ada			
13. Sumut digital market dan galeri virtual produk UMKM kreatif	2025	Evaluasi *Platform e-commerce* yang sudah ada (SIMITRA)	DISKOP UMKM	KOMINFO: Publikasi Media DISKOP UKM: Pendataan dan Kurasi Produk UMKM; Pelatihan dan Literasi Digital UMKM; Pembangunan dan Pengelolaan Platform; Promosi dan Akses Pasar; Pendampingan dan Skema Dukungan Lanjutan DISKOP UKM: Pendataan dan Kurasi Produk UMKM; Pelatihan dan Literasi Digital UMKM; Pembangunan dan Pengelolaan Platform; Promosi dan Akses Pasar; Pendampingan dan Skema Dukungan Lanjutan	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Koperasi dan UKM, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan: Pendataan UMKM binaan Kabupaten/Kota: - Kurasi Produk UMKM - Klasterisasi UMKM yang dapat dimasukkan ke dalam Galeri - *Capacity Building*
	2026	Desain dan pengembangan platform e-commerce; Kurasi awal 100 produk UMKM; Kemitraan dengan *platform* logistik & *payment gateway*. Manajemen Operasional *platform e-commerce*; Promosi dan sosialisasi *platform e-commerce*; • PLUT			
	2027	*Onboarding* UMKM; Pelatihan dan fasilitasi branding, dan manajemen toko online. Manajemen Operasional *platform e-commerce*; Promosi dan sosialisasi *platform e-commerce*; • PLUT			
	2028	Pengembangan *E-commerce* menjadi Market Place; Integrasi dengan katalog elektronik, Manajemen Operasional *platform e-commerce*; Promosi dan sosialisasi *platform e-commerce*;			

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2030					
PROYEK STRATEGIS	**TAHUN**	**RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN**	**PERANGKAT DAERAH**		**DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA**
			UTAMA	**PENDUKUNG**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		• PLUT			
	2029	Galeri Virtual 3D; Kampanye digital nasional & regional, Manajemen Operasional *platform e-commerce*; Promosi dan sosialisasi *platform e-commerce;* • PLUT			
	2030	Kurasi produk ekspor; Promosi virtual di *event* internasional (*virtual expo, marketplace ASEAN*), Manajemen Operasional *platform e-commerce* dan Promosi dan sosialisasi *platform e-commerce* ; • PLUT			
PP 10 REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN					
14. Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	2025	1. Penyusunan SK Tim Forum Pemangku Kepentingan SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2030 2. Sosialisasi SK Tim forum dan *milestone* TPB SDGs 2025-2030 3. Updating target capaian SDGs tahun 2025 disesuaikan dengan dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 4. Penyusunan skema *Declaration and Registration System* 5. Pembangunan fitur aplikasi pendaftaran BRS SDGs 6. Replikasi, instalasi dan *Capacity Building* Aplikasi E-Monev SDGs (Inovasi) 7. Menyusun Draf Rancangan Awal RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2030 8. *Launching* dan Pelaksanaan BRS *pilot project* sekaligus penyerahan sertifikat kepada 15 UMKM 9. *Workshop* Penyusunan *Voluntary Local Review* (VLR) Kabupaten/Kota	Bappelitbang	Seluruh Perangkat Daerah	1. Penyusunan dokumen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs Kabupaten/Kota se-Sumut tahun 2025-2030 2. Dukungan pelaksanaan skema BRS Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs : identifikasi UMKM/IMK serta pelaku usaha 3. Dukungan pelaksanaan North Sumatera SDGs Action Awards 4. Dukungan proses penginputan E- Monev Kabupaten/Kota 5. Peningkatan Kapasitas untuk implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2030					
PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		10. Modifikasi Aplikasi E-Monev SDGs 11. *Workshop E-Monev* dengan Bappeda/Bapperida/Bappelitbang Kabupaten/Kota 12. Menyusun *draf Monev* capaian SDGs tahun 2025			
	2026	1. Inovasi *Business Registration System Policy TPB/SDGs* 2. Diseminasi Skema BRS TPB/SDGs (Kolaborasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM pada acara FYP, BRS SDGs dijadikan kurikulum) 3. Menyusun Laporan Monev TPB/SGDs Tahun 2025 4. Finalisasi Draf RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026-2030 melalui desk per pilas TPB/SDGs 5. *Launching* Aplikasi e-Monev 6. Pelaksanaan skema *Declaration and Registration System BRS TPB/SDGs* 7. Diseminasi RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026-2030 8. Penyusunan Rancang Bangun aplikasi e-Monev SDGs (INOVASI) 9. *Workshop* Penyusunan *Voluntary Local Review (VLR)* Kabupaten/Kota 10. Menyusun draf Monev capaian SDGs tahun 2026 11. Sosialisasi *North Sumatra SDGs Action Award 2027* (Indikator RAD TPB/SDGs, VLR dan Laporan Monev)			
	2027	1. Pembangunan aplikasi e-Monev SDGs (INOVASI) 2. Menyusun Laporan Monev TPB/SGDs Tahun 202 3. Forum *Business Registration System* (BRS) 4. *North Sumatra SDGs Action Award 2027* (Indikator RAD TPB/SDGs, VLR dan Laporan Monev)			

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2030					
PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		5. *Desk* capaian pelaksanaan program unggulan tematik berbasis lokus prioritas SDGs Tahun 2026 6. *Workshop* Penyusunan *Voluntary Local Review* (VLR) Kabupaten/Kota 7. Menyusun draf Monev capaian SDGs tahun 2027 8. Sosialisasi penyusunan rancang bangun Integrasi Satu Data SDGs Provinsi Sumatera Utara (INOVASI)			
	2028	1. Menyusun Laporan Monev TPB/SGDs Tahun 2027 2. Finalisasi aplikasi e-Monev SDGs 3. Penyusunan rancang bangun Integrasi Satu Data SDGs Provinsi Sumatera Utara (INOVASI) 4. *North Sumatra SDGs Action Award 2028* 5. *Launching* aplikasi e-Monev SDGs 6. Diseminasi pemanfaatan aplikasi e-Monev SDGs 7. *Desk* capaian pelaksanaan program unggulan tematik berbasis lokus prioritas SDGs Tahun 2027 8. *Workshop* Penyusunan *Voluntary Local Review (VLR)* Kabupaten/Kota 9. Menyusun draf Monev capaian SDGs tahun 2028			
	2029	1. Menyusun Laporan Monev TPB/SGDs Tahun 2028 2. Pelaksanaan Skema BRS 3. Finalisasi integrasi Satu Data SDGs pada aplikasi SADAINA 4. *Launching* integrasi Satu Data SDGs pada aplikasi SADAINA 5. Diseminasi pemanfaatan aplikasi e-Monev SDGs 6. *Desk* capaian pelaksanaan program unggulan tematik berbasis lokus prioritas SDGs Tahun 2028 7. Penyusunan rancang bangun Integrasi Satu Data SDGs Provinsi			

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2030					
PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Sumatera Utara (INOVASI) 8. *North Sumatra SDGs Action Award 2029* 9. Pelaksanaan Skema *Business Registration System (BRS)* 10. Menyusun draf Monev capaian SDGs tahun 2029			
	2030	1. Menyusun Laporan Monev TPB/SGDs Tahun 2029 2. Desk capaian pelaksanaan program unggulan tematik berbasis lokus prioritas SDGs tahun 2029 3. *North Sumatra SDGs Action Award 2030* 4. Menyusun Draf Laporan Monev RAD TPB/SGDs Tahun 2026-2030 5. *Workshop* Penyusunan *Voluntary Local Review* (VLR) Kabupaten/Kota 6. Menyusun laporan akhir kegiatan SDGs			
15. kerja sama APIP dan APH dalam Pendampingan Proyek Strategis dan Kegiatan Unggulan Daerah melalui pendampingan sejak tahapan perencanaan, pelaksanaan dan serah terima kegiatan proyek strategis	2025	- Penyusunan MoU antara APIP dengan APH (Kejaksaan Tinggi, Kepolisian) - Pendampingan Penyusunan Perencanaan dan Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah	Inspektorat	Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan) Perangkat Daerah yang memiliki Proyek Strategis	Inspektorat Kabupaten/Kota : Koordinasi Pengawasan dengan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara terkait pelaksanaan Proyek Strategis yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota
	2026	- Reviu Perencanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara - Pendampingan Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara - Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara			
	2027	- Reviu Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara - Pelaksanaan Kolaborasi Pendampingan Proyek Strategis Daerah - Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan Proyek Strategis Daerah			
	2028	- Reviu Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara			

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2030					
PROYEK STRATEGIS	**TAHUN**	**RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN**	**PERANGKAT DAERAH**		**DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA**
			UTAMA	**PENDUKUNG**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		- Pelaksanaan Kolaborasi Pendampingan Proyek Strategis Daerah - Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan Proyek Strategis Daerah			
	2029	- Reviu Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara - Pelaksanaan Kolaborasi Pendampingan Proyek Strategis Daerah - Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan Proyek Strategis Daerah			
	2030	Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan Proyek Strategis Daerah			
PP 11. TRANSFORMASI DIGITAL DAN INOVASI TEKNOLOGI PADA PELAYANAN PUBLIK DAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT					
16. Pemanfaatan Satu Data SUMUT pusat data dan informasi pembangunan	2025	- Tindak lanjut MoU terkait kerja sama teknis dengan BPS dan Diskominfo dalam pembangunan aplikasi Satu Data (*SADAINA Reborn*) - Proses input dan sinkronisasi data statistik sektoral OPD - *Launching SADAINA Reborn* di Konreg PDRB ISEI (BPS dan Diskominfo) - *Updating* SK Tim Pelaksana *SADAINA Reborn* - Diseminasi aplikasi dan tupoksi tim SADAINA	Dinas Kominfo	Seluruh OPD menginput data statistik sektoral	Replikasi aplikasi, menyediakan SDM, menyiapkan regulasi terkait
	2026	- Pemanfaatan *SADAINA Reborn* - Proses input dan sinkronisasi data statistik sektoral OPD - Forum Satu Data tingkat Daerah - Proses integrasi Satu Data dengan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Provsu - Penyusunan Proses Bisnis integrasi SADAINA dan Data Geospasial - Penyusunan Proses Bisnis integrasi			

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2030					
PROYEK STRATEGIS	**TAHUN**	**RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN**	**PERANGKAT DAERAH**		**DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA**
			UTAMA	**PENDUKUNG**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		SADAINA dan Data SDGs			
	2027	- Pemanfaatan SADAINA Reborn - Proses input dan sinkronisasi data statistik sektoral OPD - Forum Satu Data tingkat Daerah - Pemanfaatan SADAINA dan Data Geospasial - Pemanfaatan SMART SADAINA SDGs - Proses bisnis integrasi SADAINA Reborn dengan Kabupaten/Kota			
	2028	- Pemanfaatan *SADAINA Reborn* - Proses input dan sinkronisasi data statistik sektoral OPD - Forum Satu data tingkat Daerah - Pengembangan fitur SADAINA (API) - Peningkatan kapasitas user *SADAINA Reborn* - Pemanfaatan dan replikasi *SADAINA Reborn*			
	2029	- Pemanfaatan *SADAINA Reborn* - Proses input dan sinkronisasi data statistik sektoral OPD - Forum Satu data tingkat Daerah - Menyediakan API (*Application Programming Interface*) - Peningkatan kapasitas user *SADAINA Reborn* - Pemanfaatan dan replikasi *SADAINA Reborn*			
	2030	- Menyediakan API (*Application Programming Interface*) - Pemanfaatan *SADANA Reborn* - Proses input dan sinkronisasi data statistik sektoral OPD - Forum Satu data tingkat Daerah - Monitoring dan Evaluasi			
PP 12. INFRASTRUKTUR DENGAN PRIORITAS JALAN, JEMBATAN, DAN IRIGASI YANG LANGSUNG BERDAMPAK PADA PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT LOKAL					

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2030					
PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17. Pembangunan Ruas Jalan Baru Penghubung Wilayah Terisolir atau Strategis yang Merupakan kewenangan Provinsi	2025	tidak ada	Dinas PUPR	Dinas Kominfo, untuk publikasi kegiatan, Dinas LHK mendukung proses penyusunan dokumen lingkungan, AMDAL dan izin pinjam pakai Hutan, Dinas Perhubungan untuk penyediaan Fasilitas Keselamatan Jalan, Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi, Inspektorat melaksanakan pengawasan	1. Memberikan dukungan administratif atas pembangunan jalan yang berada di wilayah kewenangannya, mendukung penyediaan lahan pada trase jalan serta perizinan 2. Menyelaraskan program jalan dengan perencanaan pembangunan daerah dan usulan prioritas lokal. 3. Melaksanakan koordinasi teknis lapangan dan penyedia data kondisi eksisting jalan serta kebutuhan daerah.
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			
	2030	tidak ada			
18. Pemerataan Infrastruktur Layanan Dasar bagi Kawasan Afirmasi, Terluar, dan Terpencil untuk Mewujudkan Keadilan Pembangunan	2025	Pemetaan kebutuhan infrastruktur layanan dasar Air Minum dan Sanitasi Koordinasi terkait penetapan lokasi layanan pada Kawasan Afirmasi, Terluar, dan Terpencil	Dinas PUPR	Dinas LHK untuk penyediaan dokumen lingkungan, AMDAL, Dinas Kominfo untuk publikasi kegiatan, Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi, Inspektorat melaksanakan pengawasan	1. Pemerintah Kabupaten/ Kota: Menyediakan lahan, mengarahkan program RTLH (Air Minum dan Sanitasi), menetapkan penerima bantuan, dan mengalokasikan anggaran daerah. 2. Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten/Kota: Pelaksana utama di lapangan yang mengurus pendataan, verifikasi, penyaluran bantuan, pendampingan, monitoring, dan pelaporan. 3. Dinas PUPR Kabupaten/ Kota: Memberikan dukungan teknis konstruksi, membuat RAB, dan mengawasi pelaksanaan di lapangan. 4. Dinas Sosial Kabupaten/Kota: Membantu memperbarui dan memverifikasi data kemiskinan lokal. 5. Pemerintah Kecamatan dan
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	Pembuatan sumur bor di Teluk Dalam, **Nias Selatan** dan penambahan pipa jaringan distribusi			
	2030	tidak ada			

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2030					
PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Desa/Kelurahan pada Kabupaten/Kota: Melakukan identifikasi penerima bantuan, sosialisasi, memfasilitasi gotong royong, serta membantu pemantauan di lapangan.
PP13. PENGEMBANGAN SISTEM LOGISTIK DAN TRANSPORTASI YANG MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN DAYA SAING					
19. Dukungan Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Melalui Pembangunan BRT dan Peningkatan Kereta *Commuter*	2025	tidak ada	Dinas Perhubungan	Dinas Kominfo untuk publikasi Media, Dinas PUPR terkait penyelenggaraan Jalan Provinsi (jika trayek melalui jalan provinsi) Dinas LHK untuk penyediaan dokumen lingkungan dan AMDAL, Biro Organisasi membentuk kelembagaan (BLUD) BRT Mebidang, Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi, Inspektorat melaksanakan pengawasan	Dinas Perhubungan Kabupaten/ Kota Pelaksana operasional harian, koordinator lapangan. Kota Binjai: Dukungan penetapan lokasi lahan depo BRT Kabupaten Deli Serdang: Dukungan penetapan lokasi lahan depo BRT
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			
	2030	tidak ada			
20. Subsidi Transportasi Bus Perintis untuk Daerah-Daerah Terpencil	2025	tidak ada	Dinas Perhubungan	Dinas Kominfo untuk publikasi Media, Dinas PUPR terkait penyelenggaraan Jalan Provinsi (jika trayek melalui jalan provinsi) Dinas LHK untuk penyediaan dokumen lingkungan dan AMDAL, Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi, Inspektorat melaksanakan pengawasan	1. Koordinasi dan Penyediaan Data: Pemerintah kabupaten/kota berperan menyediakan data dan kebutuhan daerah terkait angkutan perintis serta berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi agar subsidi dapat tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi wilayah terpencil yang membutuhkan akses transportasi. 2. Fasilitasi Pelaksanaan Program: Kabupaten/kota
	2026	Pengadaan di 2 Kabupaten/Kota, sosialisasi : Dokumen teknis rute, 8 unit beroperasi di Kabupaten Pakpak Bharat (4 bus) dan Kabupaten **Nias Selatan** (4 bus) Biaya Operasional 28 unit bus perintis di Kabupaten Deli Serdang (4 bus), Kabupaten Mandailing Natal (4 bus), Kabupaten Nias Barat (20 bus).			
	2027	Pengadaaan, Pembangunan halte dan fasilitasi dasar, sosialisasi, pengadaan di 2 kab : Halte. 8 unit beroperasi di Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Padang Lawas			

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2030					
PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Biaya Operasional 28 unit bus perintis di Kabupaten Deli Serdang (4 bus), Kabupaten Mandailing Natal (4 bus), Kabupaten Nias Barat (20 bus). Biaya Operasional 4 unit bus perintis di Kabupaten Pakpak Bharat (4 bus) dan Kabupaten **Nias Selatan (**4 bus)			membantu pelaksanaan program subsidi dengan memastikan armada bus perintis dapat beroperasi di wilayahnya, menyediakan dukungan administratif, dan memantau pelaksanaan layanan agar berjalan lancar dan memenuhi kebutuhan masyarakat yaitu penyediaan fasilitas pendukung untuk kelancaran operasional, berupa lahan untuk titik keberangkatan. 3. Penentuan Rute dan Kebijakan Lokal: Pemerintah daerah menetapkan rute bus perintis yang strategis sesuai kebutuhan wilayah dan sinkron dengan program nasional, serta mengeluarkan kebijakan pendukung agar subsidi bisa dimanfaatkan optimal untuk membuka keterisolasian daerah, yaitu pengusulan dan penetapan trayek dan sosialisasi program kepada masyarakat serta kesiapan infrastruktur jalan di kabupaten dalam kondisi layak dan aman, yang akan dilalui oleh trayek 4. Pengawasan dan *Monitoring*: Kabupaten/kota melakukan pemantauan operasional bus perintis di lapangan untuk memastikan layanan tetap berjalan dengan baik, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat di daerah terpencil.
	2028	Pengadaan armada di 2 Kabupaten, sosialisasi kepada masyarakat (pelajar, petani, pedagang, dll): 8 unit beroperasi di Kabupaten Toba dan Kabupaten Nias Utara Biaya Operasional 28 unit bus perintis di Kabupaten Deli Serdang (4 bus), Kabupaten Mandailing Natal (4 bus), Kabupaten Nias Barat (20 bus). Biaya Operasional 8 unit bus perintis di Kabupaten Pakpak Bharat (4 bus) dan Kabupaten **Nias Selatan** (4 bus) Biaya Operasional 8 unit bus perintis di Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Padang Lawas			
	2029	Pengadaan 8 unit bus perintis di Kabupaten Padang Lawas Utara (4) bus dan Kabupaten Tapanuli Selatan (4 bus) Biaya Operasional 28 unit bus perintis di Kabupaten Deli Serdang (4 bus), Kabupaten Mandailing Natal (4 bus), Kabupaten Nias Barat (20 bus). Biaya Operasional 8 unit bus perintis di Kabupaten Pakpak Bharat (4 bus) dan Kabupaten **Nias Selatan** (4 bus) Biaya Operasional 8 unit bus perintis di Kabupaten Serdang Bedagai (4 bus) dan Kabupaten Padang Lawas (4 bus) Biaya Operasional 8 unit bus perintis di di Kabupaten Toba dan Kabupaten Nias Utara			
	2030	Monitoring dan evaluasi (bulanan, triwulan, tahunan); Laporan monitoring			

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2030					
PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Biaya Operasional 28 unit bus perintis di Kabupaten Deli Serdang (4 bus), Kabupaten Mandailing Natal (4 bus), Kabupaten Nias Barat (20 bus) Biaya Operasional 8 unit bus perintis di Kabupaten Pakpak Bharat (4 bus) dan Kabupaten **Nias Selatan** (4 bus) Biaya Operasional 8 unit bus perintis di Kabupaten Serdang Bedagai (4 bus) dan Kabupaten Padang Lawas (4 bus) Biaya Operasional 8 unit bus perintis di di Kabupaten Toba dan Kabupaten Nias Utara Biaya Operasional 8 unit bus perintis di di Kabupaten Padang Lawas Utara (4 bus) dan Kabupaten Tapanuli Selatan (4 bus)			
PP 14. PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN DAN BERKETAHANAN TERHADAP BENCANA					
21. Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir	2025	tidak ada	Dinas PUPR	Dinas LHK untuk dokumen lingkungan dan AMDAL, BPBD menyusun kajian resiko bencana, rencana mitigasi, dan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat pada wilayah bencana, Diskominfo untuk publikasi kegiatan	1. Penyediaan Data dan Koordinasi: Kabupaten/kota berperan menyediakan data wilayah yang terdampak banjir serta kebutuhan teknis di lapangan dan melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi agar pembangunan bisa tepat sasaran dan efektif (BPBD) 2. Fasilitasi Pelaksanaan dan Administrasi: Kabupaten/kota membantu kelancaran pelaksanaan pembangunan dengan menyediakan dukungan administratif, perizinan, penyediaan lahan, dan tenaga lokal di wilayahnya (PUPR)
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			
	2030	tidak ada			

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2030					
PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					3. Pemeliharaan dan Pengawasan: Setelah pembangunan infrastruktur pengendali banjir dilakukan, pemerintah kabupaten/kota turut bertanggung jawab melakukan pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian agar fasilitas yang dibangun tetap berfungsi sesuai perencanaan dan umur yang diharapkan (PUPR) 4. Pemberdayaan Masyarakat dan Kolaborasi: Pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dan bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk pemerintah provinsi dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan pengendalian banjir melalui manajemen drainase, normalisasi sungai, dan pengelolaan ruang terbuka hijau (LHK, Dinas PKP Kabupaten/Kota) 5. Penyesuaian Kebijakan Lokal: Kabupaten/kota juga menetapkan kebijakan lokal yang mendukung implementasi program pengendalian banjir provinsi, termasuk pengelolaan tata ruang dan penggunaan teknologi mitigasi banjir (LHK, Dinas PKP Kabupaten/Kota, BPBD)
22. Pembangunan TPST Regional	2025	tidak ada	Dinas PUPR : pelaksana	• PUPR: - Penyiapan dokumen Lingkungan, Dalam pembuatan FS dan	1. Penyusunan peraturan atau SK terkait pengelolaan sampah terpilah 2. Penyediaan dan penentuan
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2030					
PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2029	tidak ada		DED, dan pembangunan infrastruktur serta pendukungnya, • Dinas LHK : - Dukungan dalam proses penyusunan dokumen lingkungan hidup - Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi • Dinas Kominfo untuk publikasi media	lokasi 3. Dukungan pengumpulan sampah terpilah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 4. Dukungan pengangkutan sampah terpilah ke tempat pengolahan 5. Dukungan pemilahan sampah terpilah dan pra pengolahan 6. Dukungan SDM
	2030	tidak ada			
23. Pembangunan PLTSa	2025	tidak ada	DISPERINDAG ESDM	• PUPR : Pembangunan TPST • LHK: Pengelolaan Sampah • Dinas Kominfo : Dukungan Publikasi Kegiatan	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, sementara kabupaten/ kota berperan dalam menyiapkan: Lahan dan wilayah untuk pembangunan PLTSa, Penerapan Sistem Persampahan Terpilah Perizinan 1. Penyusunan peraturan atau SK terkait pengelolaan sampah terpilah 2. Penyediaan dan penentuan lokasi 3. Dukungan pengumpulan sampah terpilah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 4. Dukungan pengangkutan sampah terpilah ke tempat pengolahan 5. Dukungan pemilahan sampah terpilah dan pra
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			
	2030	tidak ada			

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2030					
PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					pengolahan 6. Dukungan SDM
24. Pengembangan SPAL Regional	2025	tidak ada	Dinas PUPR	Dinas LHK untuk penyediaan dokumen lingkungan dan AMDAL, PDAM dalam peningkatan layanan, Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi, Dinas kominfo untuk publikasi media	1. Perencanaan tata ruang (PKP Tata Ruang) 2. Membuat regulasi dan menerbitkan perizinan (LHK, DPMPTSP) 3. Sosialisasi kepada masyarakat (Dinas Kesehatan) 4. Dukungan penyediaan lahan (PKP Tata Ruang) 5. Menyediakan alokasi anggaran (BKAD) 6. Pembentukan kelembagaan untuk mengelola operasional IPLT (Biro Organisasi)
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			
	2030	tidak ada			
25. Pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati	2025	Rapat koordinasi, pembentukan tim *appraisal* dan pembentukan pokja rencana Pembangunan Taman Kehati	DLHK	1. Biro Pem Otda - SK Penlok 2. BPN - Sertifikat Lahan 3. Diskominf - Publikasi Media	1. Dukungan terhadap pengadaan lahan 2. Penetapan Taman Kehati pada RTRW Kabupaten/ Kota
	2026	Penyusunan dokumen DPPT dan pembebasan lahan			
	2027	Penyusunan dokumen FS, DED, dan dokumen administrasi lainnya			
	2028	Pekerjaan fisik di lapangan sesuai dengan Perdirjen KSDAE Nomor P.5 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan *Design* Dasar (*Design* Vegetasi dan *Design* Infrastruktur Taman Kehati)			
	2029	Tahap lanjutan kegiatan penanaman dan pemeliharaan vegetasi serta Membuat Rencana Kesepakatan Bersama/ kerja sama Pembangunan Taman Kehati sebagai dukungan Pengembangan Kawasan Konservasi Taman Kehati			
	2030	1. Pembukaan dan peresmian Taman Kehati serta tahap lanjutan kegiatan penanaman 2. Pemeliharaan vegetasi serta kegiatan pengembangan			

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2030					
PROYEK STRATEGIS	**TAHUN**	**RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN**	**PERANGKAT DAERAH**		**DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA**
			UTAMA	**PENDUKUNG**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		3. Pembentukan UPT Taman Keanekaragaman Hayati			
PP 15. MELANJUTKAN PEMBANGUNAN BERBASIS DESA					
26. Penguatan Ekonomi Desa untuk Mengurangi Ketergantungan pada Pusat Kota dengan Penguatan Ekonomi Lokal melalui Pembuatan *Master Plan* Desa Produktif dan Mandiri.	2025	Pendataan lokus desa, penyusunan *master plan* desa produktif dan mandiri		Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan) Dinas Perkebunan (Pemberian bantuan/pelatihan pengembangan komoditas gula aren, kopi, dan kelapa kepada kelompok yang terdapat pada desa yang menjadi sasaran intervensi kegiatan ini)	- Menyediakan data potensi desa yang akurat termasuk peta sebaran komoditi unggulan. - Memperbaiki jalan produksi, pasar desa, gudang, sentra dan pengolahan - Memfasilitasi kerja sama antar desa atau antar BUMDes untuk memperkuat rantai pasok. - Memfasilitasi sertifikasi produk (halal, organik, SNI) untuk meningkatkan daya saing. - Pembinaan Penggunaan dana desa untuk ekonomi desa pada Lokus yang di intervensi
	2026	- Penyusunan SK Gubernur terkait Hibah Desa dan Naskah Perjanjian Hibah Desa (NPHD) - Pelaksanaan Bantuan Pengembangan Produk Unggulan Desa (kepada BUMDes/BUMDesma) - Pendampingan bagi desa yang mendapatkan Hibah Desa - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 3 kawasan pedesaan (Kabupaten Tapanuli Selatan: Gula Aren, Kabupaten Mandailing Natal: Kopi dan Kepulauan Nias : Kelapa)			
	2027	- Penyusunan SK Gubernur terkait Hibah Desa dan Naskah Perjanjian Hibah Desa (NPHD) - Pelaksanaan Bantuan Pengembangan Produk Unggulan Desa (kepada BUMDes/BUMDesma) - Pendampingan bagi desa yang mendapatkan Hibah Desa - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 3 kawasan pedesaan (Kabupaten Tapanuli Selatan : Gula Aren, Kabupaten Mandailing Natal: Kopi dan Kepulauan Nias : Kelapa)			
	2028	- Penyusunan SK Gubernur terkait Hibah Desa dan Naskah Perjanjian Hibah Desa (NPHD)			

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2030					
PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		- Pelaksanaan Bantuan Pengembangan Produk Unggulan Desa - Pendampingan bagi desa yang mendapatkan Hibah Desa - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan - Penguatan Legacy & Keberlanjutan Tahun 2030 3 kawasan pedesaan (Kabupaten Tapanuli Selatan : Gula Aren, Kabupaten Mandailing Natal: Kopi dan Kepulauan Nias : Kelapa)			
	2029	- Penyusunan SK Gubernur terkait Hibah Desa dan Naskah Perjanjian Hibah Desa (NPHD) - Pelaksanaan Bantuan Pengembangan Produk Unggulan Desa - Pendampingan bagi desa yang mendapatkan Hibah Desa - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 3 kawasan pedesaan (Kabupaten Tapanuli Selatan : Gula Aren, Kabupaten Mandailing Natal: Kopi dan Kepulauan Nias : Kelapa)			
	2030	Tidak ada			
27. Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan bagi Pengelola BUMDES	2025	Pendataan BUMDES/BUMDeSMA yang akan menerima pemanfaatan kegiatan • 27 Kabupaten/Kota yang memiliki desa		Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan) Disperindag, Dinas Koperasi UMKM, (Dukungan Pelatihan dan Keterampilan bagi pengelola BUMDES/Masyarakat Desa).	- Menugaskan tenaga pendamping desa atau penyuluh ekonomi untuk mendampingi operasional BUMDES. - Memfasilitasi akses internet dan teknologi informasi untuk mendukung pemasaran digital. - Memfasilitasi sertifikasi kompetensi pengelola BUMDES melalui lembaga pelatihan resmi.
	2026	- Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dan pendampingan bagi pengelola BUMDES/BUMDesma - Monitoring dan Evaluasi kegiatan • Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Nias, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Dairi, Kabupaten Mandailing Natal,			

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2030					
PROYEK STRATEGIS	**TAHUN**	**RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN**	**PERANGKAT DAERAH**		**DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA**
			UTAMA	**PENDUKUNG**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kota Gunungsitoli, Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Karo, Kabupaten Toba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Labuhanbatu (20 Kabupaten/Kota)			
	2027	- Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dan pendampingan bagi pengelola BUMDes/BUMDesma - Monitoring dan Evaluasi kegiatan • *27 Kabupaten/kota yang memiliki desa			
	2028	- Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dan pendampingan bagi pengelola BUMDES/BUMDesma - Monitoring dan Evaluasi kegiatan • *27 Kabupaten/kota yang memiliki desa			
	2029	- Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dan pendampingan bagi pengelola BUMDES/BUMDesma - Monitoring dan Evaluasi kegiatan • *27 Kabupaten/kota yang memiliki desa			
	2030	Tidak ada			
PP 16. MENINGKATKAN KETAHANAN SOSIAL DAN BUDAYA YANG MENDUKUNG SUASANA YANG HARMONIS, TOLERAN DAN RUKUN					
28. Bantuan Hibah Rumah Ibadah di 33 Kabupaten/Kota	2025	- Penyusunan perubahan Pergub Hibah Rumah Ibadah dengan mekanisme penyaluran hibah yang	Biro KESRA	Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan) Inspektorat (pendampingan	-

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2030					
PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		memuat alokasi terhadap biaya operasional pengelola dan sarpras rumah ibadah Tahun 2025 - Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 - *Monitoring* dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara		menyeluruh dan tinjauan terhadap tata kelola pemberian bantuan hibah rumah ibadah)	
	2026	- Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 - *Monitoring* dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara			
	2027	- Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 - *Monitoring* dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara			
	2028	- Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 - *Monitoring* dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-203 33 Kabupaten/Kota Provinsi			

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2030					
PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Sumatera Utara			
	2029	- Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 - *Monitoring* dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara			
	2030	- Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 - *Monitoring* dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara			
29. Festival Seni dan Budaya Daerah	2025	Festival Bunga dan Buah, Pemetaan *Event* Budaya Potensial yang sudah dilaksanakan 3 tahun untuk ditingkatkan menjadi kalender *event* nasional (KEMENPAR) dan kalender *event* budaya (KEMENDIKBUD). Penyusunan *Calender of Event* 2026 • Kawasan Pariwisata Provinsi Sibolga - Pandan, Sipirok - Padangsidimpuan, Bawomatoluo - Hilisimaetano - Sorake, Tanjung Pura-Tangkahan-Bukit Lawang-Sei Bingai, Karo-Dairi-Pakpak	DISBUDPAREKRAF	1. Dinas Perhubungan : Memastikan ketersediaan transportasi dan lalu lintas saat *event* internasional dilaksanakan 2. Dinas Kesehatan : Dukungan Tenaga Kesehatan dan Ambulans 3. Dinas Koperasi &UMKM : Pelatihan dan pendampingan UMKM untuk mendukung pelaksaan *event* internasional 4. Dinas Kominfo : Memastikan ketersediaan jaringan digital saat pra *event-event*-pasca *event* internasional; publikasi kegiatan	1. Memastikan ketersediaan anggaran dalam mendukung Proyek Strategis Provinsi; 2. Pelatihan dan pembinaan Sanggar Kesenian Daerah; 3. Pendataan/Inventarisasi potensi Festival Seni Budaya di masing-masing daerah; 4. Memastikan kontinyuitas pelaksaan Festival Seni Budaya di masing-masing daerah 5. Promosi pelaksaan Festival Seni-Budaya; 6. Penyusunan Kalender Budaya
	2026	Tidak ada			
	2027	Penyusunan CoE, Sinkronisasi *travel pattern* dan *travel package* dengan CoE Sumatera Utara, Koordinasi dengan Ashita, Travel, penguatan sektor promosi , medsos, *online*, influencer, Penyelenggaraan *Event*; Melibatkan MURI (misal *Event* Loncat batu dengan			

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2030					
PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		peserta terbanyak). waktu pelaksanaan pada libur sekolah, musim panas, dan musim dingin. rekomendasi tema "*Cultural Coast Fest*" → paduan seni pantai dan adat daratan, karnaval budaya atau "Pesona Warisan Dunia" → promosi Bawömataluo, Bawomatoluo - Hilisimaetano - Sorake sebagai destinasi budaya kelas dunia. • Kawasan Pariwisata Provinsi Bawomatoluo - Hilisimaetano - Sorake		5. Satpol PP : Keamanan Pelaksanaan *Event* dan ketertiban penyelenggaraan acara	
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			
	2030	tidak ada			
30. Edukasi dan Pembekalan Solidaritas, Ketahanan Sosial Dan Wawasan Kebangsaan bagi Organisasi Masyarakat Dan Kelompok Masyarakat	2025	tidak ada		Dinas Pendidikan (Koordinasi rekomendasi satuan pendidikan yang membutuhkan pembekalan terhadap edukasi wawasan kebangsaan) Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	Replikasi pelaksanaan kegiatan Edukasi dan Pembekalan Solidaritas, Ketahanan Sosial Dan Wawasan Kebangsaan bagi Organisasi Masyarakat Dan Kelompok Masyarakat di Kabupaten/kota
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	- Pendataan Sasaran Ormas dan Kelompok masyarakat pada daerah rawan konfilk di Sumatera Utara di Tahun 2029 - Pelaksanaan Kegiatan edukasi wawasan kebangsaan dan Solidaritas bagi Ormas Tahun 2029 - Monitoring dan Evaluasi Tahun 2029 • Kabupaten Langkat, **Kabupaten Nias Selatan**, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias,Kota Medan, Kabupaten Simalungun, Kota Pematangsiantar, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Tanjungbalai, Kabupaten Karo			
	2030	tidak ada			
PP 17. TERCIPTANYA KEHIDUPAN YANG LEBIH AMAN DAN TERTIB					
31. Patroli Gabungan untuk Narkoba di Pintu Masuk Narkoba dan Kawasan-Kawasan	2025	tidak ada	Satpol PP	Kesbangpol (Penyediaan data dan peta daerah rawan narkoba)	Melakukan koordinasi dengan Satpol PP Kabupaten/Kota terkait dukungan personel
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2030					
PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kenakalan Remaja (Genk Motor).	2028	tidak ada		Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	dalam pelaksanaan kegiatan. Kesbangpol (Penyediaan data dan peta daerah rawan narkoba di Kabupaten/Kota)
	2029	tidak ada			
	2030	tidak ada			
32. Pemberantasan Pengguna dan Bandar Narkoba melalui Pemindahan Gembong Narkoba dari Lapas ke Nusakambangan	2025	tidak ada		Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan) Dinas Perhubungan (pengaturan lalu lintas untuk pemindahan gembong narkoba) Satpol PP (pendampingan saat pemindahan gerbong narkoba)	Penguatan pencegahan narkoba di pemerintahan daerah
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			
	2030	tidak ada			

4.1.4. Sandingan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Astacita, 17 Program Prioritas Nasional

Astacita merupakan delapan cita pembangunan nasional yang menjadi penjabaran visi dan misi Presiden sebagai arah kebijakan pembangunan Indonesia lima tahun ke depan. Dalam konteks penyusunan RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025–2029, Astacita menjadi acuan penting agar visi, misi, tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan daerah dapat selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Melalui penyandingan ini, setiap agenda pembangunan daerah tidak hanya diarahkan untuk menjawab kebutuhan lokal, tetapi juga diorientasikan untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Astacita. Dengan demikian, pembangunan Kabupaten Nias Selatan diharapkan mampu berkontribusi terhadap terwujudnya kemajuan dan kesejahteraan yang merata, sejalan dengan komitmen pemerintah pusat dalam mewujudkan pembangunan Indonesia yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Tabel 4.8
Sandingan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Astacita, 17 Program Prioritas Nasional

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
20252029 - Mewujudkan Masyarakat Adil Makmur, Berdaya Saing, Inovatif, Berkelanjutan dan Lestari Berkeadaban								
Membangun dan mengembangkan infrastruktur daerah yang terpadu dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat								
	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik	Meningkatkan konektivitas wilayah melalui peningkatan aksesibilitas infrastruktur jalan, jembatan, dan moda transportasi untuk mendukung mobilitas penduduk, distribusi barang dan jasa, serta pelayanan dasar						
			2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
			2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
			2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	2.15.02.2.03.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
			2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	2.15.02.2.03.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.2.13 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	2.15.03.2.13.0003 - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
			2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.2.13 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	2.15.03.2.13.0003 - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
			2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.2.13 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	2.15.03.2.13.0011 - Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
			2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.2.13 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	2.15.03.2.13.0011 - Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik	Terwujudnya hunian yang layak dan lingkungan permukiman yang tertata, serta tersedianya gedung pemerintahan yang representatif untuk mendukung kehidupan masyarakat yang lebih bermartabat dan pelayanan publik yang berkualitas						
			1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.04.04.2.01.0004 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
			1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.04.05.2.01.0011 - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
			1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.04.05.2.01.0012 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
Membangun manusia yang berkualitas dan berkepribadian unggul melalui pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia siap kerja dan siap merintis usaha sendiri								
	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi seluruh masyarakat	Meningkatkan angka partisipasi sekolah hingga 13 tahun						
			1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0039 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0060 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0040 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0010 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.23.02.2.01.0013 - Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Arsip	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.23.02.2.01.0013 - Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Arsip	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
			2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.23.02.2.01.0014 - Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Arsip	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.23.02.2.01.0014 - Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Arsip	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
			2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.2.01 - Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	2.23.03.2.01.0003 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Arsip	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.2.01 - Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	2.23.03.2.01.0003 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Arsip	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.2.01 - Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	2.23.03.2.01.0004 - Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Arsip	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.2.01 - Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	2.23.03.2.01.0004 - Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Arsip	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi seluruh masyarakat	Meningkatkan kualitas tenaga pendidik						
			1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0039 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0060 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0040 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0010 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi seluruh masyarakat	Meningkatkan kompetensi pencari kerja						

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.07.03.2.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	2.07.2.17.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
			2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.07.03.2.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	2.07.2.17.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.07.05.2.01.0001 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	2.07.2.17.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
			2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.07.05.2.01.0001 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	2.07.2.17.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.05.2.02.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	2.07.2.17.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
			2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.05.2.02.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	2.07.2.17.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	2.19.02.2.01.0011 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	2.22.2.19.3.26.02.0000 - Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.02 - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.19.02.2.02.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	2.22.2.19.3.26.02.0000 - Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
Memastikan kemudahan akses kesehatan untuk rakyat guna menciptakan manusia yang sehat jasmani dan rohani								
	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat untuk mewujudkan warga Nias Selatan yang sehat jasmani dan rohani	Menurunkan prevalensi stunting pada balita sebagai upaya peningkatan gizi dan kesehatan anak secara berkelanjutan						
			1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.0022 - Pengembangan Rumah Sakit	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.02.03.2.02.0002 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.0028 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
			1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.0028 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.0004 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
			1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.0004 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.0006 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.0006 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat untuk mewujudkan warga Nias Selatan yang sehat jasmani dan rohani	Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat secara merata dan berkeadilan						
			1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.0022 - Pengembangan Rumah Sakit	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.02.03.2.02.0002 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
			1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.0014 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
			1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.0014 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat untuk mewujudkan warga Nias Selatan yang sehat jasmani dan rohani	Meningkatkan kualitas hidup keluarga dalam tatanan masyarakat yang harmonis, berkeadilan gender, ramah anak, serta ditopang oleh sistem kesejahteraan sosial yang inklusif dan berkelanjutan						
			1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
			1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.0014 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
			1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.0014 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.0004 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
			1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.0004 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.0006 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
			1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.0006 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.01.0011 - Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.02.0009 - Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.2.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.0013 - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.14.03.2.03.0008 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2.14.03.2.04.0005 - Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.01.0016 - Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.01.0028 - Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
Membangun ekonomi daerah yang berkeadilan, inklusif, inovatif, kreatif, dan mandiri berbasis potensi sumber daya lokal								
	Peningkatan pendapatan perkapita masyarakat melalui penguatan ekonomi berbasis potensi lokal secara berkelanjutan	Meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan secara berkelanjutan						
			2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.2.01.0007 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pangan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.2.01.0008 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pangan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.09.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pangan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.09.04.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pangan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.25.03.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.25.03.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.25.03.2.02.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.27.02.2.01.0003 - Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.01.0005 - Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.31.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.31.3.30.0.00.02.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
			3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3.31.3.30.0.00.02.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
	Peningkatan pendapatan perkapita masyarakat melalui penguatan ekonomi berbasis potensi lokal secara berkelanjutan	Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang inklusif, berkeadilan, dan mandiri berbasis sumber daya lokal						
			2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	2.07.2.17.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
			2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.2.01.0015 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	2.07.2.17.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
			2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
			3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.30.05.2.01.0002 - Pameran Dagang Nasional	3.31.3.30.0.00.02.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
			3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.30.05.2.01.0004 - Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	3.31.3.30.0.00.02.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
			3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.31.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.31.3.30.0.00.02.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
			3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3.31.3.30.0.00.02.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
	Peningkatan pendapatan perkapita masyarakat melalui penguatan ekonomi berbasis potensi lokal secara berkelanjutan	Mengoptimalkan pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan berbasis potensi lokal						

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.01.0006 - Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	2.22.2.19.3.26.02.0000 - Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
			3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.01.0009 - Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	2.22.2.19.3.26.02.0000 - Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan bebas dari korupsi dengan menjunjung tinggi penegakan hukum dan menjamin hak-hak masyarakat								
	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel dalam rangka percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, berintegritas, berbasis digital, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.						
			2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.03.0001 - Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.03.0003 - Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.02.0006 - Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Desa	2.13.02.2.01.0006 - Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
			2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Desa	2.13.02.2.01.0006 - Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
			2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01.0008 - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
			2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01.0008 - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.0016 - Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.0016 - Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.02.0025 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.02.0025 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.02.0034 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.02.0034 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
			2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.21.02.2.01.0007 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.21.02.2.01.0007 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
			2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.21.02.2.01.0008 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.21.02.2.01.0008 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
			2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.2.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	2.24.02.2.01.0003 - Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Arsip	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
Mewujudkan ketahanan sosial budaya yang berkeadaban dan pelestarian lingkungan hidup								

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Peningkatan ketahanan sosial budaya dan pelestarian lingkungan hidup	Meningkatnya pelestarian budaya daerah yang berkelanjutan melalui penguatan identitas lokal dan pemajuan kebudayaan daerah						
			2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.22.02.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	2.22.2.19.3.26.02.0000 - Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
			2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.22.02.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	2.22.2.19.3.26.02.0000 - Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
			2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.22.02.2.01.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	2.22.2.19.3.26.02.0000 - Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
			2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.22.02.2.01.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	2.22.2.19.3.26.02.0000 - Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
			2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.2.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	2.22.05.2.01.0002 - Penetapan Cagar Budaya	2.22.2.19.3.26.02.0000 - Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
			2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.2.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	2.22.05.2.01.0002 - Penetapan Cagar Budaya	2.22.2.19.3.26.02.0000 - Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
	Peningkatan ketahanan sosial budaya dan pelestarian lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas dan daya dukung lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan						
			2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.01.0007 - Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.01.0007 - Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
			2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.0012 - Penanganan sampah melalui pengangkutan	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.0012 - Penanganan sampah melalui pengangkutan	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
			2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.0016 - Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.0016 - Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
			2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
	Peningkatan ketahanan sosial budaya dan pelestarian lingkungan hidup	Meningkatnya kerukunan umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat yang berpijak pada pancasila, demokrasi, dan HAM						
			1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.05.02.2.01.0015 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
			1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.05.02.2.01.0015 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
			1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.05.02.2.02.0011 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.05.02.2.02.0011 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
			1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.0027 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	1.05.0.00.0.00.04.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
			1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.0027 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	1.05.0.00.0.00.04.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
			8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
			8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
			8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.01.04.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
			8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.01.04.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.01.04.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai ukuran keberhasilan dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah diukur melalui tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029. Pengukuran ini dilakukan secara sistematis melalui dua indikator utama, yaitu:

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

   digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD. IKU mencerminkan capaian yang bersifat strategis, berdampak luas bagi masyarakat, serta berkontribusi langsung terhadap pembangunan daerah secara menyeluruh.

2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD)

   digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah selama periode 2025-2029. IKD berfungsi sebagai alat evaluasi guna memastikan bahwa tata kelola pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip good governance, transparan, akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat.

4.2.1. Indikator Kinerja Utama Kabupaten Nias Selatan

Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan sebagai pijakan dan ukuran yang terukur dalam menilai keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dari aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pencapaian IKU yang telah ditetapkan mencerminkan keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana direncanakan dalam RPJMD.

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan, yang selanjutnya disebut IKU Pemerintah Daerah, memuat indikator kinerja tujuan dan sasaran RPJMD sebagai tolok ukur dalam menilai kinerja Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan pada periode 2025-2029. Pencapaian IKU Pemerintah Daerah didukung oleh IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung.

IKU perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa perangkat daerah tersebut memiliki tugas dan fungsi yang lebih dominan dalam mewujudkan indikator kinerja

sasaran dari setiap misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Nias Selatan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya. Dengan demikian, sinergi antara Pemerintah Daerah dan perangkat daerah menjadi kunci utama dalam memastikan tercapainya sasaran pembangunan secara efektif dan berkelanjutan.

Tabel 4.9
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Nias Selatan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					KETERANGAN
			2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	PDRB Perkapita ADHK	Juta Rupiah	12,327.56	12,328.70	12,329.84	12,330.98	12,332.12	
2	Indeks Pendidikan	Poin	57,88	58,01	58,14	58,27	58,40	
3	Indeks Infrastruktur Daerah (IID)	Skor	37,41	41,47	46,81	50,50	54,61	
4	Indeks Pemajuan Kebudayaan	Nilai	47,69	47,75	47,82	47,88	47,95	
5	Indeks Kesehatan	Poin	78,41	78,83	79,25	79,67	80,10	
6	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	Persentase	36,99	44,49	51,99	59,49	66,99	
7	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,95	12,96	12,98	12,99	13,00	
8	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	(%)	87,60	90,20	92,80	95,40	98,00	
9	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	0,40	0,63	0,85	1,08	1,30	
10	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	2,29	2,30	2,30	2,31	2,32	
11	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	(%)	12,17	12,27	12,36	12,46	12,56	
12	Persentase Rumah Tangga dengan akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persentase	12,91	13,32	13,73	14,14	14,55	
13	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	40	45	50	55	60	
14	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	%	31,94	29,11	26,28	23,45	20,62	
15	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3,01	3,12	3,22	3,33	3,44	
16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	53,56	53,57	53,57	53,57	53,57	
17	Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA)	Indeks	50,50	51,40	52,30	53,10	40,00	
18	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	(%)	90,40	90,80	91,20	91,60	92,00	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					KETERANGAN
			2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
19	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Persentase	0,20	0,22	0,23	0,25	0,26	
20	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Indeks	92,00	94,00	96,00	98,00	100,00	
21	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	(%)	56,13	57,25	58,38	59,50	60,63	
22	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah/Tenaga Kerja	23,73	24,48	25,23	25,98	26,73	
23	Indeks Demokrasi	*	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	
24	Persentase Ketersediaan Gedung Pemerintahan	Persentase	57,28	66,02	78,64	85,44	93,20	
25	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,58	6,60	6,63	6,66	6,69	
26	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,53	0,52	0,51	0,50	0,49	
27	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase	9,22	9,23	9,24	9,25	9,27	
28	Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)	Indeks	90,00	92,00	94,00	96,00	98,00	
29	Rasio konektivitas kabupaten/kota	%	63,10	67,78	72,80	78,19	83,99	
30	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	Poin	38,20	38,37	38,44	38,55	39,00	
31	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92,06	92,85	93,65	94,44	95,23	
32	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca SD	%	40,22	42,09	43,95	45,82	47,69	
33	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	72,04	72,30	72,55	72,80	73,06	
34	Nilai Tukar Petani (NTP)	Indeks	70	80	90	100	110	
35	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	43,57	44,07	44,57	45,07	45,57	
36	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	93,22	94,22	95,22	96,22	97,22	
37	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	9	9	9	9	9	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					KETERANGAN
			2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	Persentase	25	25	30	30	35	
39	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	
40	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	Nilai	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	
41	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	45,00	45,00	50,00	50,00	60,00	
42	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	67,52	68,13	68,75	69,36	69,98	
43	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca SMP	%	30,41	32,77	35,13	37,50	39,86	
44	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,87	0,90	0,93	0,97	1,00	
45	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	2,27	2,34	2,42	2,49	2,53	
46	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi SD	%	40,65	42,11	43,56	45,01	46,46	
47	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	
48	Nilai SAKIP	Nilai	B	B	B	B	BB	
49	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi SMP	%	32,98	34,81	36,65	38,48	40,32	
50	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	20	25	30	35	40	
51	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	83,60	84,20	84,40	85,40	86,00	
52	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	81	82	83	84	85	
53	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	57,41	63,41	68,41	74,41	74,41	
54	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	
55	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Skor	78,50	81,00	83,50	86,00	88,50	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					KETERANGAN
			2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
56	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	
57	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	53,40	53,80	54,20	54,60	55,00	

4.2.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) adalah ukuran utama untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. IKD digunakan untuk mengevaluasi capaian target pembangunan dalam RPJMD 2025-2029 serta sebagai dasar dalam perumusan kebijakan daerah. IKD dalam RPJMD ini disusun berdasarkan peraturan yang berlaku, termasuk pedoman dari Kementerian DalamNegeri. Indikator ini mencerminkan keberhasilan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan pencapaian pembangunan daerah.

Tabel 4.10
Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Nias Selatan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**									
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	53,56	53,56	53,56	53,57	53,57	53,57	53,57	
2	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	66,29	66,90	67,52	68,13	68,75	69,36	69,98	
3	Penurunan Emisi GRK (tonCO2eq)	TON CO2 EQ	-	169.979,91	214.932,41	259.884,91	304.837,41	349.789,91	394.742,41	
4	Konsumsi Listrik per Kapita	kWh	-	150,00	155,04	160,08	165,13	170,17	175,21	
5	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	2,05	1,86	1,79	1,72	1,64	1,56	1,48	
6	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (prevalnce of dernourishment) (%)	%	13,08	12,70	12,33	11,96	11,59	11,22	10,85	
7	Rasio Penduduk	%	101,31	101,48	101,63	101,77	101,89	102,00	102,09	
8	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	-	41	44	47	50	53	56	
9	Indeks Risiko Bencana	poin	-	190,47	188,97	187,48	185,99	184,49	183,00	
10	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	-	2,23	2,90	3,58	4,25	4,93	5,60	
11	Kepadatan Penduduk	Orang/km2	156,74	159,65	162,51	165,30	168,02	170,64	173,16	
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**									
1	PDRB Perkapita ADHK	Juta Rupiah	12,325.28	12,326.42	12,327.56	12,328.70	12,329.84	12,330.98	12,332.12	
2	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	(%)	-	90,00	90,40	90,80	91,20	91,60	92,00	
3	Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA)	Indeks	48,64	49,60	50,50	51,40	52,30	53,10	40,00	
4	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,92	12,93	12,95	12,96	12,98	12,99	13,00	
5	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	(%)	0,00	55,00	56,13	57,25	58,38	59,50	60,63	
6	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	%	37,60	34,77	31,94	29,11	26,28	23,45	20,62	
7	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,52	6,55	6,58	6,60	6,63	6,66	6,69	
8	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	(%) Indeks	0,55	0,54	0,53	0,52	0,51	0,50	0,49	
9	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	42,57	43,07	43,57	44,07	44,57	45,07	45,57	
10	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	71,77	71,79	72,04	72,30	72,55	72,80	73,06	
11	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk	%	0,00	38,35	40,22	42,09	43,95	45,82	47,69	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Literasi Membaca SD									
12	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca SMP	%	0,00	28,05	30,41	32,77	35,13	37,50	39,86	
13	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,00	0,82	0,87	0,90	0,93	0,97	1,00	
14	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi SD	%	0,00	39,20	40,65	42,11	43,56	45,01	46,46	
15	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi SMP	%	0,00	31,14	32,98	34,81	36,65	38,48	40,32	
16	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	1,52	1,52	20	25	30	35	40	
17	Rasio Gini	Indeks	0,247	0,240	0,233	0,226	0,219	0,213	0,206	
18	Presentase konsistensi program perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	%	65,87	66,67	67,47	68,29	69,11	69,95	70,79	
19	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	-	14,00	14,80	15,60	16,40	17,20	18,00	
20	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	2.97-4.15	2.97-4.15	2.97-4.15	5,33	5,33	5,33	5,33	
21	Tingkat Kemiskinan (%)	%	16,32	15,80	15,44	15,09	14,73	14,38	14,02	
22	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,03	3,00	2,98	2,96	2,94	2,92	2,90	
23	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	%	28,13	90	90	90	90	90	90	
24	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	%	96	90	90	91	91	92	92	
25	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian	%	25	30	30	40	40	50	50	
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**									
1	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	0,00	0,18	0,40	0,63	0,85	1,08	1,30	
2	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	2,27	2,28	2,29	2,30	2,30	2,31	2,32	
3	Kontribusi Sektor Industri		0,17	0,19	0,20	0,22	0,23	0,25	0,26	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	terhadap PDRB									
4	Tingkat Inflasi	%	3	3	3	3	3	3	3	
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	78,83	79,37	79,91	80,46	81,01	81,57	82,13	
6	Angka Ketergantungan	%	46,45	46,96	47,70	48,64	49,76	51,01	52,32	
7	Indeks Inovasi Daerah	poin	35,01	45,00	46,40	47,80	49,20	50,60	52,00	
8	Porsi EBT dalam Bauran energi primer (%)	%	-	20	23	25	28	30	33	
9	Persentase Desa Mandiri	%	-	1,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	
10	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,64	0,51	0,66	0,68	0,69	0,71	0,72	
11	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	%	-68,59	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	
12	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	-	55,83	57,13	58,42	59,72	61,01	62,31	
13	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	49,49	51,76	54,02	56,28	58,54	60,80	63,06	
14	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak		-	65,03	66,02	67,02	68,01	69,01	70,00	
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**									
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	2,90	2,95	3,01	3,12	3,22	3,33	3,44	
2	Indeks Demokrasi	*	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	
3	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	91,23	92,22	93,22	94,22	95,22	96,22	97,22	
4	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	0,00	53,00	53,40	53,80	54,20	54,60	55,00	
5	Indeks Integritas Nasional	poin	-	67	67	68	69	70	70	
6	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	%	10.000	22.000	34.000	46.000	58.000	70.000	74.500	
7	Persentase Capaian Aksi HAM	%	77,20	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00	
8	Indeks daya saing daerah	Indeks	3,01	3,14	3,27	3,40	3,54	3,67	3,80	
9	Persentase Penegakan Perda	%	-	70	72	73	75	76	78	
V	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**									
1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan										
A	**1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**									
1	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persentase	10	20	30	40	50	60	70	
2	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Persentase	60	65	70	75	80	85	90	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	Persentase	54,10	56,40	58,70	61,00	63,30	65,60	68,00	
4	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	Persentase	30	33	38	42	46	50	55	
1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan										
B	**1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**									
1	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Persentase	-	50	55	60	65	70	75	
2	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Persentase	40	50	60	70	80	90	100	
3	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	67	100	100	95	90	85	80	
4	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman	Persentase	50	55	60	65	70	75	80	
5	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	37,6	34,77	31,94	29,11	26,28	23,45	20,62	
1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang										
C	**1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**									
1	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	11,74	13,50	15,50	17,50	19,50	21,50	23,00	
2	Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional	%	45,50	50,00	53,00	55,50	58,50	60,50	62,00	
3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	60,70	62	64	66	68	70	72	
4	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	%	2,78	2,78	2,78	5,56	8,83	8,83	8,83	
5	Jumlah bangunan gedung yang dibangun/ ditingkatkan/ direhabilitasi/ dilakukan pengawasan & penataan	Unit	5	5	5	5	5	5	5	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	20	20	20	21	22	23	24	
7	Presentase drainase dalam kondisi baik	%	55,80	65,50	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	
8	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	30,93	30,93	33,93	36,93	39,93	42,93	45,93	
1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman										
D	**1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**									
1	Rasio Rumah Layak Huni	Rasio	0,11	0,11	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15	
2	Rasio Permukiman Layak Huni	Rasio	0,14	0,14	0,14	0,26	0,38	0,50	0,62	
3	Persentasi Permukiman yang Tertata	%	37,09	37,09	37,09	40	45	50	55	
4	Persentase Rumah Tangga dengan akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persentase	0	12,50	12,91	13,32	13,73	14,14	14,55	
5	Persentase rumah tangga (RT) yang memiliki akses terhadap Sumber air minum layak	%	69,38	69,38	70	72	74	76	78	
6	Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	10,56	10,56	11	15	20	25	30	
7	Persentase Jaringan Jalan Lingkungan Dalam Kondisi Baik	%	0	0	100	100	100	100	100	
8	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung PSU	%	0	0	40	45	50	55	60	
9	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	3,45	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	%	8	18	28	38	48	58	68	
11	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	37,09	38	39	40	41	42	43	
12	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100	100	100	100	
13	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan	Persentase	0	0	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU									
14	Persentase kawasan Perumahan di kabupaten/kota ditangani	%	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	
15	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	0	0	100	100	100	100	100	
1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja										
E	**1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**									
1	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase	72,22	80	80	80	80	80	80	
2	Persentase Cakupan Perlindungan Masvarakat	Persentase	52,60	60	60	60	60	60	60	
3	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persentase	18,75	25	25	25	25	25	25	
4	Persentase PPNS yang ditingkatkan Kompetensinya	Persentase	20	40	60	60	60	60	60	
5	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	Persentase	85	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	Persentase	86,15	100	100	100	100	100	100	
1.05.0.00.0.00.04.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah										
F	**1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**									
1	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
2	Presentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Presentase layanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Penanganan Pasca Bencana	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial										
G	**1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**									
1	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan	Persentase	0	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	0	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	Persentase	0	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Persentase	0	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial	Persentase	0	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	Persentase	0	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	0	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	Persentase	0	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	0	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	0	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	0	100	100	100	100	100	100	
2.07.2.17.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah										
H	**2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**									
1	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	(%)	50	50	55	60	60	60	65	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	%	35	40	45	50	60	60	60	
3	Presentase pemenuhan kebutuhan perencanaan tenaga kerja makro, mikro di kabupaten nias selatan	%	0	100	100	100	100	100	100	
I	**2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**									
1	Presentase koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam dan KSPPS/ USPPS yang sehat dan cukup sehat	%	50	60	60	70	70	80	90	
2	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	Persentase	50	50	60	70	70	80	90	
3	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase	40	50	55	60	70	80	90	
4	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Berkoperasi	Persentase	10	15	15	20	20	25	30	
5	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase	80	85	90	90	90	90	95	
2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
J	**2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**									
1	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persentase	25	35	45	55	65	75	85	
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	73,44	73,62	73,8	73,98	74,16	74,34	74,52	
3	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkatpusat dan (b) pemerintah daerah.	%	30	30	30	30	30	30	30	
4	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	25	23	21	19	17	15	13	
5	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan	Persentase	25	30	35	40	45	50	55	
6	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai	Indeks	25	30	35	40	45	50	55	
7	Indeks Pemenuhan Hak Anak	Indeks	40	43	46	49	52	55	58	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	(IPHA)									
8	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
9	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	71,21	71,39	71,57	71,75	71,93	72,11	72,29	
K	**2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**									
1	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	Persentase	11,6	9	7,3	6,2	5,5	5	4,7	
2	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	%	60,5	62,8	64,9	66,7	68,3	69,7	69,9	
3	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	44,4	50,8	54,6	56,8	58,1	58,9	61,75	
4	TFR (Angka Kelahiran Total)	Jiwa	2,97	2,95	2,92	2,9	2,87	2,85	2,82	
5	Angka kelahiran remaja (umur 10-14 umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama.	Orang	23,8	22,3	21,1	20,0	19,2	18,5	18,1	
6	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	Persentase	20	22	24	26	28	30	32	
7	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	20,2	20,1	20	19,9	19,8	19,7	19,6	
8	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Persentase	60	65	70	75	80	85	90	
2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pangan										
L	**2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**									
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Persentase	75	75	80	85	90	95	100	
2	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Persentase	75	78	81	83	85	88	90	
3	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	31,88	30	29	27	25	23	20	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4	Skor pola pangan harapan	Skor	79,2	80	81	82	83	84	85	
2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup										
M	**2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**									
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	53,56	53,56	53,56	53,57	53,57	53,57	53,57	
2	Indeks Kualitas Air	Indeks	60,00	66,00	66,50	70,00	76,80	77,00	77,50	
3	Terlaksananya Pengelolahan Sampah di wilayah Kab/Kota	%	94,90	95,50	95,80	96,00	96,50	97,00	98,00	
4	Indeks Kualitas Udara	Indeks	94,86	95,50	96,50	97,50	98,50	99,50	99,50	
5	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	66,69	67,25	67,50	67,55	67,60	67,60	69,22	
6	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Persentase	80,00	82,50	82,80	83,00	83,20	83,40	83,50	
7	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	%	70,00	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00	82,50	
8	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persentase	0	20,00	21,00	22,00	23,00	24,00	25,00	
9	Persentase RTH	Persentase	50,00	55,00	56,00	57,00	58,00	59,00	60,00	
10	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Persentase	0	1,20	1,25	1,50	1,75	1,80	1,90	
11	Presentase pengurangan sampah kabupaten	%	94,90	95,50	95,80	96,00	96,50	97,00	97,00	
12	Indeks Kualitas Udara	Indeks	94,86	95,00	95,50	96,00	96,50	97,00	98,00	
2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
N	**2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**									
1	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	1,63	2	5	7,5	10	12,5	15	
2	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persentase	35	45	55	65	75	80	90	
3	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Informasi	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Kependudukan yang DImanfaatkan									
6	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
O	**2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**									
1	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	Persentase	90	92	95	100	100	100	100	
2	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	Persentase	60	65	68	70	72	75	75	
3	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Persentase	80	85	95	96	97	98	98	
4	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Persentase	50	60	65	75	80	85	90	
5	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	Persentase	10	20	25	30	34	40	50	
6	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase	30	40	45	50	55	60	70	
2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan										
P	**2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**									
1	Persentase Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan	%	0	100	100	100	100	100	100	
2	Rasio konektivitas perhubungan darat	%	0	58,75	63,1	67,78	72,89	78,19	83,99	
3	Rasio konektivitas perhubungan laut	%	0	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota	Persentase	80	80	80	80	90	90	100	
2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika										

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Q	**2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**									
1	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Indeks Diseminasi Informasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
R	**2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**									
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	1,10	1,80	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	
S	**2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**									
1	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Angka	504	515	535	560	600	650	700	
2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu										
T	**2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**									
1	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Persentase	60	70	80	80	90	90	100	
2	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Persentase	40	40	45	45	50	50	60	
4	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Persentase	0,25	10	15	15	20	20	25	
2.22.2.19.3.26.02.0000 - Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga										
U	**2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**									
1	Peningkatan kualitas organisasi kepramukaan	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	
2	Rasio Wirausaha Pemuda	Persentase	0,84	0,84	0,85	0,85	0,86	0,86	0,87	
3	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	Persentase	1	1	2	2	2	2	2	
V	**2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**									
1	Terlestarikannya cagar budaya	%	10	10	15	15	17	19	20	
2	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	Persentase	0	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,30	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Persentase	5	7	9	9	10	11	11	
W	**3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**									
1	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Persentase	3	3	5	5	6	7	8	
2	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Persentase	5	5	6	7	8	9	10	
3	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persentase	21	22	24	24	24	26	26	
2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Arsip										
X	**2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**									
1	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	Persentase	10	10	100	100	100	100	100	
2	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	54	55	56	57	58	59	60	
Y	**2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**									
1	Tingkat Ketersediaan Arsip	Persentase	10	10	100	100	100	100	100	
2	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Persentase	0	0	100	100	100	100	100	
3	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase	0	10	100	100	100	100	100	
3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan										
Z	**3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**									
1	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	8.770	9.000	9.500	10.000	10.500	11.000	11.500	
2	Angka Konsumsi Ikan	Kg/KAP/TH	0	45	47	50	53	56	59	
3	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	38	39	40	42	45	48	50	
3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian										
AA	**3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**									
1	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Ha	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
2	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	Persentase	0	0	100	100	100	100	100	
3	Peningkatan Produksi tanaman pangan	Persentase	0	2	4	6	8	10	12	
4	Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan	Persentase	0	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Penanganan Bencana	Persentase	0	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Pertanian									
6	Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (HPMS)	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase kelembagaan kelompok tani yang dibentuk dan beroperasi	Persentase	0	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	Persentase	0	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	Persentase	0	100	100	100	100	100	100	
10	Peningkatan produksi tanaman hortikultura	Persentase	0	2	4	6	8	10	12	
11	Peningkatan produksi komoditas peternakan	Persentase	0,00	2	4	6	8	10	12	
3.31.3.30.0.00.02.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan										
AB	**3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**									
1	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	-	80	80	85	90	95	100	
2	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase	-	60	65	70	75	80	85	
3	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Persentase	-	20	30	40	50	60	70	
4	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	Persentase	-	-	30	35	40	45	50	
5	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
6	Nilai Ekspor Barang	Nilai	-	-	20.000.000	25.000.000	30.000.000	35.000.000	40.000.000	
AC	**3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**									
1	persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator Pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RIPIP	%	-	10	30	50	70	90	100	
2	Persentase Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Industri (IUI) kesil dan Idustri Menengah Yang dilakukan oleh Instansi terkait	%	-	10	30	50	70	90	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	Persentase	-	-	10	30	50	70	100	
4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah										
AD	**4.01 - SEKRETARIAT DAERAH**									
1	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
2	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD										
AE	**4.02 - SEKRETARIAT DPRD**									
1	Waktu penetapan perda APBD dan PAPBD	Tepat Waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	
2	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase	70	80	80	85	85	88	88	
3	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Persentase	16	12	12	14	14	12	10	
5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan inovasi Daerah										
AF	**5.01 - PERENCANAAN**									
1	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persentase	93	94	95	96	97	98	99	
2	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
AG	**5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**									
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi	Persentase	0	0	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	terkait Riset dan Inovasi di Daerah									
5.02.0.00.0.00.04.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah										
AH	**5.02 - KEUANGAN**									
1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Opini	3	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
2	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	Persentase	0	0	24,82	24,57	24,32	24,07	23,82	
3	Persentase laporan keuangan tepat waktu	Persentase	90	95	96	97	98	99	100	
4	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	Persentase	0	65	70	75	80	85	90	
5	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Persentase	0	70	75	80	85	90	95	
6	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Persentase	91,58	93	94	95	96	97	98	
7	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persentase	10	20	30	40	50	60	70	
8	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase	2,85	3,47	3,48	3,49	3,50	3,51	3,52	
9	Persentase Penurunan SILPA	Persentase	0	0	0	0	0	0	0	
10	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Persentase	19	13	20	25	30	35	40	
5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia										
AI	**5.03 - KEPEGAWAIAN**									
1	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	Persentase	82	98	98	98	98	98	98	
3	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	Persentase	9,0	25,6	12,8	15,8	14,4	17,4	12,8	
4	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persentase	0,4	0,5	0,7	1,0	1,2	4,7	5,5	
AJ	**5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**									
1	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	Persentase	0,0	0,5	0,9	1,3	1,4	1,6	1,7	
3	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	Persentase	0,0	0,5	0,9	1,3	1,4	1,6	1,7	
4	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional	Persentase	0,5	2,1	3,8	4,0	4,2	4,4	4,6	
6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat										
AK	**6.01 - INSPEKTORAT DAERAH**									
1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Terdefinisi	Terdefinisi	Terkelola dan Terukur	
2	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Persentase	20	80	84	85	88	89	92	
3	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Dikelola (Managed)	Dikelola (Managed)	Dikelola (Managed)	
AL	**7.01 - KECAMATAN**									
7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Lolomatua										
1	"Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan "	Poin	50	50	50	60	70	80	90	
2	"Persentase layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang sesuai standar pelayanan (SOP) "	Persentase	80	80	80	80	90	90	100	
3	"Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan "	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
4	Indeks Kepatuhan Desa Terhadap Regulasi Pemerintahan Desa	Poin	85	85	85	85	90	90	100	
5	"Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes) "	Persentase	60	60	65	70	75	75	80	
7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Gomo										
1	"Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan "	Persentase	0	80	80	80	85	90	100	
2	Indeks Kepatuhan Desa Terhadap Regulasi Pemerintahan	Poin	0	75	80	80	90	90	95	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Desa									
3	"Persentase layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang sesuai standar pelayanan (SOP) "	Persentase	0	75	75	80	80	85	90	
4	"Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan "	Poin	0	80	80	80	85	85	100	
5	"Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes) "	Persentase	0	75	75	80	80	90	100	
7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Lahusa										
1	"Persentase layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang sesuai standar pelayanan (SOP) "	Persentase	15	15	20	20	20	20	20	
2	"Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan "	Poin	10	10	15	15	15	20	20	
3	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase	10	10	15	15	15	20	20	
4	Indeks Kepatuhan Desa Terhadap Regulasi Pemerintahan Desa	Poin	10	10	15	15	15	20	20	
5	"Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes) "	Persentase	10	10	15	15	15	20	20	
7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Hibala										
1	Indeks Kepatuhan Desa Terhadap Regulasi Pemerintahan Desa	Poin	0	100	100	100	100	100	100	
2	"Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes) "	Persentase	0	100	100	100	100	100	100	
3	"Persentase layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang sesuai standar pelayanan (SOP) "	Persentase	0	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase	0	100	100	100	100	100	100	
7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Pulau-Pulau Batu										
1	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase	0	80	80	85	90	95	100	
2	Indeks Kepatuhan Desa Terhadap Regulasi Pemerintahan Desa	Poin	0	75	80	85	90	95	100	
3	"Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan "	Poin	0	75	80	85	90	95	100	
4	"Persentase layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang sesuai standar pelayanan (SOP) "	Persentase	0	75	80	85	90	95	100	
5	"Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes) "	Persentase	0	75	80	85	90	95	100	
7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Teluk Dalam										
1	Indeks Kepatuhan Desa Terhadap Regulasi Pemerintahan Desa	Poin	0	55	60	65	70	75	80	
2	"Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes) "	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
3	"Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan "	Poin	100	100	100	100	100	100	100	
4	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
5	"Persentase layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang sesuai standar pelayanan (SOP) "	Persentase	89	89	89	90	91	92	93	
7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Amandraya										
1	"Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan "	Persentase	90	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	Indeks Kepatuhan Desa Terhadap Regulasi Pemerintahan Desa	Poin	90	100	100	100	100	100	100	
3	"Persentase layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang sesuai standar pelayanan (SOP) "	Persentase	76,30	76,50	77,00	77,50	80,00	80,50	90,00	
7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Lolowau										
1	"Persentase layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang sesuai standar pelayanan (SOP) "	Persentase	80	82	84	86	88	90	92	
2	"Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan "	Persentase	80	82	84	86	88	90	92	
3	Indeks Kepatuhan Desa Terhadap Regulasi Pemerintahan Desa	Poin	80	82	84	86	88	90	92	
4	"Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan "	Poin	80	82	84	86	88	90	92	
5	"Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes) "	Persentase	80	82	84	86	88	90	92	
7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Susua										
1	"Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan "	Persentase	65	70	75	80	85	90	95	
2	"Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan "	Poin	60	65	70	75	80	85	90	
3	"Persentase layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang sesuai standar pelayanan (SOP) "	Persentase	10	10	10	10	20	20	20	
4	"Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes) "	Persentase	98	100	100	100	100	100	100	
5	Indeks Kepatuhan Desa Terhadap Regulasi Pemerintahan Desa	Poin	65	70	75	80	85	90	95	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Maniamolo										
1	"Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan "	Persentase	75	80	83	85	87	90	92	
2	"Persentase layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang sesuai standar pelayanan (SOP) "	Persentase	82	84	88	90	92	93	95	
3	"Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes) "	Persentase	85	90	90	95	95	95	95	
4	Indeks Kepatuhan Desa Terhadap Regulasi Pemerintahan Desa	Poin	88	90	90	93	95	96	96	
7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Hilimegai										
1	"Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes) "	Persentase	82	84	86	88	90	92	94	
2	"Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan "	Poin	0	100	100	100	100	100	100	
3	"Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan "	Persentase	0	100	100	100	100	100	100	
4	Indeks Kepatuhan Desa Terhadap Regulasi Pemerintahan Desa	Poin	0	100	100	100	100	100	100	
5	"Persentase layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang sesuai standar pelayanan (SOP) "	Persentase	0	100	100	100	100	100	100	
7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Toma										
1	"Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan "	Persentase	0	70	75	80	85	90	100	
2	"Persentase layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang sesuai standar pelayanan (SOP) "	Persentase	0	70	75	80	85	90	95	
3	"Indeks Ketenteraman dan	Poin	0	70	75	80	85	90	95	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Ketertiban Kecamatan "									
4	"Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes) "	Persentase	0	70	75	80	85	90	95	
5	Indeks Kepatuhan Desa Terhadap Regulasi Pemerintahan Desa	Poin	0	80	80	80	85	100	2.030	
7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kecamatan Mazino										
1	"Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan "	Poin	0	85,00	85,00	85,50	86,00	87,50	90,00	
2	"Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes) "	Persentase	0	80,00	84,00	85,00	85,50	86,50	90,00	
3	"Persentase layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang sesuai standar pelayanan (SOP) "	Persentase	0	83,00	85,00	86,50	87,00	88,50	90,00	
4	Indeks Kepatuhan Desa Terhadap Regulasi Pemerintahan Desa	Poin	0	80,00	80,50	83,50	85,00	87,00	90,00	
5	"Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan "	Persentase	0	85,00	85,50	86,00	86,00	87,00	90,00	
7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Umbunasi										
1	"Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan "	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
2	"Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan "	Poin	100	100	100	100	100	100	100	
3	"Persentase layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang sesuai standar pelayanan (SOP) "	Persentase	0	90	90	95	100	100	100	
4	Indeks Kepatuhan Desa Terhadap Regulasi Pemerintahan Desa	Poin	90	90	90	95	95	95	95	
5	"Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan	Persentase	0	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes) "									
7.01.0.00.0.00.15.0000 - Kecamatan Aramo										
1	Indeks Kepatuhan Desa Terhadap Regulasi Pemerintahan Desa	Poin	0	100	100	100	100	100	100	
2	"Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan "	Poin	0	100	100	100	100	100	100	
3	"Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes) "	Persentase	0	84	86	88	90	92	94	
4	"Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan "	Persentase	0	100	100	100	100	100	100	
5	"Persentase layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang sesuai standar pelayanan (SOP) "	Persentase	0	100	100	100	100	100	100	
7.01.0.00.0.00.16.0000 - Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur										
1	"Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes) "	Persentase	0	100	100	100	100	100	100	
2	"Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan "	Persentase	0	100	100	100	100	100	100	
3	"Persentase layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang sesuai standar pelayanan (SOP) "	Persentase	0	100	100	100	100	100	100	
4	Indeks Kepatuhan Desa Terhadap Regulasi Pemerintahan Desa	Poin	0	100	100	100	100	100	100	
7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kecamatan Mazo										
1	"Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan "	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
2	Indeks Kepatuhan Desa Terhadap Regulasi Pemerintahan Desa	Poin	85	85	85	85	90	90	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	"Persentase layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang sesuai standar pelayanan (SOP) "	Persentase	80	80	80	80	90	90	100	
4	"Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes) "	Persentase	60	60	65	70	75	75	80	
5	"Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan "	Poin	50	50	50	60	70	80	90	
7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Fanayama										
1	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
2	Indeks Kepatuhan Desa Terhadap Regulasi Pemerintahan Desa	Poin	0	85	90	95	100	100	100	
3	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah	Persentase	72	72	76	78	78	79	79	
4	"Persentase layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang sesuai standar pelayanan (SOP) "	Persentase	0	80	85	90	95	100	100	
5	"Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes) "	Persentase	98	98	100	100	100	100	100	
7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Ulunoyo										
1	"Persentase layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang sesuai standar pelayanan (SOP) "	Persentase	80	80	80	80	90	90	100	
2	"Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes) "	Persentase	60	60	65	70	75	75	80	
3	"Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan "	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
4	"Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan "	Poin	50	50	50	60	70	80	90	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5	Indeks Kepatuhan Desa Terhadap Regulasi Pemerintahan Desa	Poin	85	85	85	85	90	90	100	
7.01.0.00.0.00.20.0000 - Kecamatan Huruna										
1	"Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan "	Poin	0	87	89	92	95	98	100	
2	Indeks Kepatuhan Desa Terhadap Regulasi Pemerintahan Desa	Poin	0	100	100	100	100	100	100	
3	"Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes) "	Persentase	0	87	89	92	95	98	100	
4	"Persentase layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang sesuai standar pelayanan (SOP) "	Persentase	0	100	100	100	100	100	100	
5	"Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan "	Persentase	0	100	100	100	100	100	100	
7.01.0.00.0.00.21.0000 - Kecamatan O O U										
1	"Persentase layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang sesuai standar pelayanan (SOP) "	Persentase	80	80	80	80	90	90	100	
2	"Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan "	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
3	"Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes) "	Persentase	60	60	65	70	75	75	80	
4	Indeks Kepatuhan Desa Terhadap Regulasi Pemerintahan Desa	Poin	85	85	85	85	90	90	100	
5	"Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan "	Poin	50	50	50	60	70	80	90	
7.01.0.00.0.00.22.0000 - Kecamatan Onohazumba										
1	"Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan "	Persentase	0	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	"Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes) "	Persentase	75	78	86	88	90	92	94	
3	Indeks Kepatuhan Desa Terhadap Regulasi Pemerintahan Desa	Poin	0	100	100	100	100	100	100	
4	"Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan "	Poin	0	100	100	100	100	100	100	
5	"Persentase layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang sesuai standar pelayanan (SOP) "	Persentase	0	100	100	100	100	100	100	
7.01.0.00.0.00.23.0000 - Kecamatan Hilisalawa ahe										
1	"Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes) "	Persentase	0	65	86	88	90	92	94	
2	"Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan "	Poin	100	100	100	100	100	100	100	
3	Indeks Kepatuhan Desa Terhadap Regulasi Pemerintahan Desa	Poin	0	100	100	100	100	100	100	
4	"Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan "	Persentase	0	100	100	100	100	100	100	
5	"Persentase layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang sesuai standar pelayanan (SOP) "	Persentase	0	100	100	100	100	100	100	
7.01.0.00.0.00.24.0000 - Kecamatan Ulususua										
1	"Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan "	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
2	"Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes) "	Persentase	60	60	65	70	75	75	80	
3	"Persentase layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang sesuai standar	Persentase	80	80	80	80	90	90	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	pelayanan (SOP) "									
4	"Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan "	Poin	50	50	50	60	70	80	90	
5	Indeks Kepatuhan Desa Terhadap Regulasi Pemerintahan Desa	Poin	85	85	85	85	90	90	100	
7.01.0.00.0.00.25.0000 - Kecamatan Sidua ori										
1	"Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan "	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
2	"Persentase layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang sesuai standar pelayanan (SOP) "	Persentase	80	80	80	80	90	90	100	
3	"Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes) "	Persentase	60	60	65	70	75	75	80	
4	Indeks Kepatuhan Desa Terhadap Regulasi Pemerintahan Desa	Poin	85	85	85	85	90	90	100	
5	"Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan "	Poin	50	50	50	60	70	80	90	
7.01.0.00.0.00.26.0000 - Kecamatan Somambawa										
1	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
2	"Persentase layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang sesuai standar pelayanan (SOP) "	Persentase	80	80	80	80	90	90	100	
3	Indeks Kepatuhan Desa Terhadap Regulasi Pemerintahan Desa	Poin	60	60	63	67	70	73	75	
4	"Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan "	Poin	50	50	50	60	70	80	90	
5	"Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes) "	Persentase	60	60	65	70	75	75	80	
7.01.0.00.0.00.27.0000 - Kecamatan Boronadu										

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	"Persentase layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang sesuai standar pelayanan (SOP) "	Persentase	0	100	100	100	100	100	100	
2	"Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan "	Persentase	0	100	100	100	100	100	100	
3	Indeks Kepatuhan Desa Terhadap Regulasi Pemerintahan Desa	Poin	0	100	100	100	100	100	100	
4	"Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes) "	Persentase	0	84	86	88	90	92	94	
5	"Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan "	Poin	0	100	100	100	100	100	100	
7.01.0.00.0.00.28.0000 - Kecamatan Simuk										
1	"Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan "	Poin	0	87	89	92	95	98	100	
2	"Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes) "	Persentase	0	98	98	98	100	100	100	
3	"Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan "	Persentase	0	100	100	100	100	100	100	
4	Indeks Kepatuhan Desa Terhadap Regulasi Pemerintahan Desa	Poin	0	100	100	100	100	100	100	
7.01.0.00.0.00.29.0000 - Kecamatan Pulau-Pulau Batu Barat										
1	"Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan "	Poin	0	100	100	100	100	100	100	
2	"Persentase layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang sesuai standar pelayanan (SOP) "	Persentase	0	100	100	100	100	100	100	
3	"Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes) "	Persentase	0	98	98	98	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4	Indeks Kepatuhan Desa Terhadap Regulasi Pemerintahan Desa	Poin	0	100	100	100	100	100	100	
5	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase	0	100	100	100	100	100	100	
7.01.0.00.0.00.30.0000 - Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara										
1	"Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan "	Persentase	0	70	80	90	95	100	100	
2	"Persentase layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang sesuai standar pelayanan (SOP) "	Persentase	0	80	90	100	100	100	100	
3	"Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan "	Poin	0	80	100	100	100	100	100	
4	Indeks Kepatuhan Desa Terhadap Regulasi Pemerintahan Desa	Poin	0	80	80	90	90	100	100	
5	"Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes) "	Persentase	0	80	100	100	100	100	100	
7.01.0.00.0.00.31.0000 - Kecamatan Tanah Masa										
1	"Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan "	Persentase	0	100	100	100	100	100	100	
2	"Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes) "	Persentase	0	100	100	100	100	100	100	
3	"Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan "	Poin	0	100	100	100	100	100	100	
4	"Persentase layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang sesuai standar pelayanan (SOP) "	Persentase	0	100	100	100	100	100	100	
5	Indeks Kepatuhan Desa Terhadap Regulasi Pemerintahan Desa	Poin	0	100	100	100	100	100	100	
7.01.0.00.0.00.32.0000 - Kecamatan Luahagundre Maniamolo										

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	"Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes) "	Persentase	87,00	87,25	87,50	87,75	88,00	88,25	88,50	
2	"Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan "	Persentase	87,00	87,25	87,50	87,75	88,00	88,25	88,50	
3	"Persentase layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang sesuai standar pelayanan (SOP) "	Persentase	87,00	87,25	87,50	87,75	88,00	88,25	88,50	
4	"Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan "	Poin	87,00	87,25	87,50	87,75	88,00	88,25	88,50	
5	Indeks Kepatuhan Desa Terhadap Regulasi Pemerintahan Desa	Poin	87,00	87,25	87,50	87,75	88,00	88,25	88,50	
7.01.0.00.0.00.33.0000 - Kecamatan Onolalu										
1	"Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan "	Persentase	75	80	85	90	95	100	100	
2	"Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan "	Poin	5	15	25	35	45	50	55	
3	Indeks Kepatuhan Desa Terhadap Regulasi Pemerintahan Desa	Poin	15	15	20	20	20	25	25	
4	"Persentase layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang sesuai standar pelayanan (SOP) "	Persentase	70	75	80	85	90	95	100	
7.01.0.00.0.00.34.0000 - Kecamatan Uluidanotae										
1	"Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan "	Persentase	0	100	100	100	100	100	100	
2	"Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes) "	Persentase	80	84	86	88	90	92	94	
3	"Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan "	Poin	0	100	100	100	100	100	100	
4	Indeks Kepatuhan Desa Terhadap Regulasi Pemerintahan	Poin	0	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Desa									
5	"Persentase layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang sesuai standar pelayanan (SOP) "	Persentase	0	100	100	100	100	100	100	
7.01.0.00.0.00.35.0000 - Kecamatan Idanotae										
1	"Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan "	Poin	50	50	50	60	70	80	90	
2	"Persentase layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang sesuai standar pelayanan (SOP) "	Persentase	80	80	80	80	90	90	100	
3	"Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes) "	Persentase	60	60	65	70	75	75	80	
4	Indeks Kepatuhan Desa Terhadap Regulasi Pemerintahan Desa	Poin	85	85	85	85	90	90	100	
5	"Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan "	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik										
AM	**8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**									
1	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persentase	60	60	60	61	61,5	62	65	
2	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
3	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	(%)	-	90,00	90,40	90,80	91,20	91,60	92,00	
4	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase	80	80	80	80,5	81	81,5	82	
5	Persentase Pendidikan Politik kepada masyarakat	Persentase	80	80	80	80	81	81,5	82	

4.2.3. Penyelarasan Indikator Kinerja Utama Pembangunan RPJMD Kabupaten Nias Selatan dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026

Penyelarasan indikator kinerja utama pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, merata, dan terintegrasi. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan secara konsisten menyesuaikan arah kebijakan dan target pembangunan daerah dengan sasaran strategis nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, serta dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029.

Indikator makro pembangunan, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan pertumbuhan ekonomi, menjadi tolok ukur utama yang diselaraskan dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan. Pada tingkat nasional, kebijakan pembangunan menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan penanggulangan kemiskinan, serta penguatan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Sasaran tersebut kemudian diturunkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam RPJMD dengan menetapkan target IPM yang progresif, penurunan tingkat kemiskinan, serta pencapaian pertumbuhan ekonomi yang stabil dan kompetitif di atas rata-rata nasional.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pembangunan daerah dalam RPJMD Tahun 2025–2029 yang telah diselaraskan dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara. Penyelarasan ini dimaksudkan agar capaian pembangunan Kabupaten Nias Selatan tetap sejalan dengan prioritas pembangunan provinsi maupun nasional, serta mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan secara lebih luas. Keselarasan indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.11
Penyelarasan Indikator Kinerja Utama Pembangunan RPJMD Kabupaten Nias Selatan dengan Sasaran Pembangunan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara

No	RPJMN Tahun 2025-2029 (Sasaran per Provinsi)			RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029			RPJMD Kabupaten Selatan Tahun 2025-2029		
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,73	74,54	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,73	74,54	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	71,79	72,80
2	Kesehatan Ibu dan Anak: a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) b) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	 146 16,4	 94 12,3	Kesehatan Ibu dan Anak: a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) b) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	 146 16,4	 94 12,3	Kesehatan Ibu dan Anak: a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) c) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	 100 12,70	 80 23,45
3	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) a) Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%) b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkolusis (treatment success rate) (%)	 90 90	 90 90	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) a) Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%) b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkolusis (treatment success rate) (%)	 90 90	 90 90	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) a) Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%) b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkolusis (treatment success rate) (%)	 90 90	 90 92
4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,6	99	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,6	99	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	85,00	95,40
5	Hasil Pembelajaran: a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: - Literasi membaca - Numerasi b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: - Literasi membaca - Numerasi c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) d) Harapan Lama Sekolah	 6,06-12,12 00,00-3,03 35,99–38,49 33,70–36,20 10.3-10.33 13.61-13.63	 27.27-30.30 6.06 - 9.09 41.53-44.03 37.70-40.20 10.83-10.84 13.86 -13.87	Hasil Pembelajaran: a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: - Literasi membaca - Numerasi b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: - Literasi membaca - Numerasi c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) d) Harapan Lama Sekolah	 6,06-12,12 6,06-12,12 35,99–38,49 33,70–36,20 10.3-10.33 13.61 -13.63	 27.27-30.30 6.06-9.09 41.53-44.03 37.70-40.20 10.83-10.84 13.86 -13.87	Hasil Pembelajaran: a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: - Literasi membaca SD - Numerasi SD b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: - Literasi membaca SMP - Numerasi SMP c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) d) Harapan Lama Sekolah	 38,35 39,20 28,05 31,14 6,55 12,93	 45,82 45,01 37,50 38,48 6,66S 12,99

No	RPJMN Tahun 2025-2029 (Sasaran per Provinsi)			RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029			RPJMD Kabupaten Selatan Tahun 2025-2029		
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	11,12	11,12-11,40	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	11,12	11,12-11,40	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	11,17	12,46
7	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	71,1	76,59	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	71,1	76,59	Persentase Pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)		
8	Tingkat Kemiskinan (%)	6,96-7,46	2,82-3,82	Tingkat Kemiskinan (%)	6,96-7,46	2,82-3,82	Tingkat Kemiskinan (%)	15,80	14,38
9	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	29,27	40,61	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	29,27	40,61	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	14,00	17,20
10	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)			Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)			Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)		
11	a) Rasio PDB Industri Pengolahan (%) b) Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	19-19,5 5,2	15,4,-15,1 7,8	a) Rasio PDB Industri Pengolahan (%) b) Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	19-19,5 5,2	15,4,-15,1 7,8	a) Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB b) Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,19	0,25
12	Pengembangan Pariwisata a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	2,42 300,00-350,00	2,73 421,14	Pengembangan Pariwisata a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	2,42 300,00-350,00	2,73 421,14	Pengembangan Pariwisata a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	2,28	2,31
13	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)*	5,45	5,43	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)*	5,45	5,43	Proporsi PDRB Ekonomi kreatif (%)		
14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN a) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) b) Rasio kewirausahaan daerah (%) c) Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%) d) Return on Asset (ROA) BUMD (%)	3,20% 3,63% 0,79% 1,24	3,51% 4,06% 0,81% 1,97	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN a) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) b) Rasio kewirausahaan daerah (%) c) Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%) d) Return on Asset (ROA) BUMD (%)	3,20% 3,63% 0,79% 1,24	3,51% 4,06% 0,81% 1,97	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN a) Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian (%) b) Rasio kewirausahaan daerah (%) c) Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%) d) Return on Asset (ROA) BUMD (%)	25 0,18	40 1,08
15	Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik a) Tingkat Pengangguran Terbuka (%) b) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	5,27-5,56 43	4,74-5,20 50,4	Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik a) Tingkat Pengangguran Terbuka (%) b) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	5,27 - 5,56 43	4,74 - 5,20 50,4	Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik a) Tingkat Pengangguran Terbuka (%) b) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	3,00	2,92
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	59,29-61,67	59,48-63,87	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	59,29-61,67	59,48-63,87	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	73,62	74,34
17	Tingkat Penguasaan IPTEK Disesuaikan dengan karakteristik daerah			Tingkat Penguasaan IPTEK Disesuaikan dengan karakteristik daerah			Tingkat Penguasaan IPTEK		

No	RPJMN Tahun 2025-2029 (Sasaran per Provinsi)			RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029			RPJMD Kabupaten Selatan Tahun 2025-2029		
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	 51,12 18,42	 51,18 21,49	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	 51,12 18,42	 51,18 21,49	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	 20	 30
19	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6	6,9	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6	6,9	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	55,83	61,01
20	Koefisien Variasi Harga Antar wilayah tingkat Provinsi	10,1	9,5	Koefisien Variasi Harga Antar wilayah tingkat Provinsi	10,1	9,5	Koefisien Variasi Harga Antar wilayah tingkat Kabupaten/Kota		
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	29,7	29,76-30,04	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	29,7	29,76-30,04	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	51,76	60,80
22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	16,45-16,54	17,13-17,41	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	16,45-16,54	17,13-17,41	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	1,00	1,8
23	Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan a) Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%) b) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%) c) Persentase Desa Mandiri (%)	 2,26% 74,36 8,44%	 2,33% 81,01 8,93%	Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan a) Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%) b) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%) c) Persentase Desa Mandiri (%)	 2,26% 74,36 8,44%	 2,33% 81,01 8,93%	Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan a) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%) b) Persentase Desa Mandiri (%)	 65,03 1,00	 69,01 4,00
24	Indeks Materi Hukum Proksi di Daerah: Indeks Reformasi Hukum (IRH)	70	71,5	Indeks Materi Hukum Proksi di Daerah: Indeks Reformasi Hukum (IRH)	70	71,5	Indeks Materi Hukum Proksi di Daerah: Indeks Reformasi Hukum (IRH)	53,00	54,60
25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,45	3,71	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,45	3,71	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,95	3,33
26	Indeks Pelayanan Publik	3,57	3,69	Indeks Pelayanan Publik	3,57	3,69	Indeks Pelayanan Publik	92,22	96,22
27	Indeks Integritas Nasional	66,78	69,51	Indeks Integritas Nasional	66,78	69,51	Indeks Integritas Nasional	67,00	70,00
28	Disesuaikan dengan karakteristik daerah Usulan Proksi: a) Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah b) Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	 70 60	 75,7 70	Disesuaikan dengan karakteristik daerah Usulan Proksi: a) Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah b) Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	 70 60	 75,7 70	Disesuaikan dengan karakteristik daerah Usulan Proksi: a) Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (Persentase) b) Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	 25 70,00	 25 74,00
29	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	58,5	62	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	58,5	62	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	22.000	74.500
30	Indeks Demokrasi Indonesia	82.58-85.83	86.83-90.08	Indeks Demokrasi Indonesia	82.58-85.83	86.83-90.08	Indeks Demokrasi Indonesia	sedang	sedang
31	Rasio Pajak terhadap PDB (%)			Rasio Pajak terhadap PDB (%)			Rasio Pajak terhadap PDRB (%)	0,51	0,71
32	Tingkat Inflasi (%)	1,8-3,8	1,4-3,7	Tingkat Inflasi (%)	1,8-3,8	1,4-3,7	Tingkat Inflasi (%)	3,00	3,00

No	RPJMN Tahun 2025-2029 (Sasaran per Provinsi)			RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029			RPJMD Kabupaten Selatan Tahun 2025-2029		
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) b) Aset Dana Pensiun/PDRB (%) c) Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Rupiah) d) Total Kredit/PDRB (%)	 28,77 0,13 8.103.064,03 25,7	 33,92 0,14 10.402.072, 3 9 31,49	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) b) Aset Dana Pensiun/PDRB (%) c) Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Rupiah) d) Total Kredit/PDRB (%)	 28,77 0,13 8.103.064,03 25,7	 33,92 0,14 10.402.072, 39 31,49	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) b) Total Kredit/PDRB (%)		
34	Inklusi Keuangan (%)	97,52	97,88	Inklusi Keuangan (%)	97,52	97,88	Indeks Akses Keuangan Daerah (%)	2,20	2,49
35	Disesuaikan dengan karakteristik daerah Usulan Proksi: Jumlah Kerja Sama Provinsi/ Kabupaten/ Kota Kembar/ Bersaudara (Sister Province/Sister City)			Disesuaikan dengan karakteristik daerah Usulan Proksi: Jumlah Kerja Sama Provinsi/ Kabupaten/ Kota Kembar/ Bersaudara (Sister Province/Sister City)			Disesuaikan dengan karakteristik daerah Usulan Proksi: Jumlah Kerja Sama Provinsi/ Kabupaten/ Kota Kembar/ Bersaudara (Sister Province/ Sister City)		
36	Disesuaikan dengan karakteristik daerah (Asia Power Indeks – Military Capability)			Disesuaikan dengan karakteristik daerah (Asia Power Indeks – Military Capability)			Indeks Daya Saing Daerah	3,14	3,67
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55,44-55,48	57,56-57,67	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55,44-55,48	57,56-57,67	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55,00	59,50
38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	81,17-81,2	82,62-82,79	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	81,17 - 81,2	82,62-82,79	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	90,00	91,60
39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	71,04	73,67	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	71,04	73,67	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	49,60	53,10
40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,407	0,37	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,407	0,37	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,54	0,50
41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,562	0,581	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,562	0,581			
42	Kualitas Lingkungan Hidup a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah b) Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%) c) Pengelolaan Sampah - Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) - Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	 77,2 10,00 16,00% 62	 77,87 15 28% 100	Kualitas Lingkungan Hidup a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah b) Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%) c) Pengelolaan Sampah - Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) - Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	 77,2 10,00 16,00% 62	 77,87 15 28% 100	Kualitas Lingkungan Hidup a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah b) Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%) c) Pengelolaan Sampah - Timbulan Sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%) - Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	 53,56 2,23	 53,57 4,93
43	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan			Ketahanan Energi, Air, dan Pangan			Ketahanan Energi, Air, dan Pangan		

No	RPJMN Tahun 2025-2029 (Sasaran per Provinsi)			RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029			RPJMD Kabupaten Selatan Tahun 2025-2029		
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	a) Ketahanan Energi - Konsumsi listrik per kapita (kWh) - Intensitas energi primer (SBM/ Rp milyar) b) Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%) c) Ketahanan Air - Kapasitas Tampungan Air (m3/kapita) - Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	850 170,57 7,35 40,95	1282 141,175 4,48 53	a) Ketahanan Energi - Konsumsi listrik per kapita (kWh) - Intensitas energi primer (SBM/ Rp milyar) b) Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%) c) Ketahanan Air - Kapasitas Tampungan Air (m3/kapita) - Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	850 170,57 7,35 40,95	1282 141,175 4,48 53	a) Ketahanan Energi - Konsumsi listrik per kapita (kWh) - Intensitas energi primer (SBM/ Rp milyar) b) Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishme nt) (%) c) Ketahanan Air - Kapasitas Air Baku□(m3/detik) - Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum (%)	150,00 12,70 41,00	170,17 11,22 53,00
44	Indeks Risiko Bencana (IRB) (untuk level provinsi)	157,53	152,55-147,69	Indeks Risiko Bencana (IRB) (untuk level provinsi)	157,53	152,55-147,69	Indeks Risiko Bencana (IRB)	190,47	184,49
45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%) a. Kumulatif b. Tahunan	10,06% 19,04%	12,92% 25,38%	Persentase Penurunan Emisi GRK (%) a. Kumulatif b. Tahunan	10,06% 19,04%	12,92% 25,38%	Penurunan Emisi GRK (TonCo2eq	169.980,00	332.099,00

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

RPJMD

KABUPATEN NIAS SELATAN
TAHUN 2025–2029

BAB V
PENUTUP

BAB V
PENUTUP

5.1. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan ini merupakan bagian penting dari sistem pengelolaan pembangunan berbasis kinerja. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Nias Selatan dalam lima tahun ke depan. Dokumen ini juga menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Nias Selatan, baik dari unsur pemerintah daerah, legislatif, swasta, masyarakat sipil, maupun dunia usaha, dalam berkontribusi aktif terhadap pembangunan daerah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.

RPJMD merupakan dokumen operasional pembangunan daerah untuk periode lima tahun yang memuat penjabaran visi dan misi Kepala Daerah ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program pembangunan yang terukur. Penyusunan RPJMD dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta melalui mekanisme perencanaan dari atas ke bawah (top-down) dan dari bawah ke atas (bottom-up), sehingga menjamin transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025–2029 menjadi penjabaran dari tahap pertama RPJPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025–2045. Penyusunan dokumen ini dilaksanakan dengan tetap memperhatikan keselarasan terhadap arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Nias Selatan, RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029, serta RPJMN Tahun 2025–2029, dan kebijakan strategis lainnya yang relevan termasuk Asta Cita Presiden.

RPJMD ini disusun dengan harapan mampu menjawab berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan daerah, serta isu-isu strategis yang dihadapi Kabupaten Nias Selatan selama lima tahun ke depan.

Kaidah pelaksanaan dalam dokumen ini mencakup prinsip konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, kerangka pengendalian, sistem insentif, serta mekanisme perubahan perencanaan. Cakupan ini berfungsi sebagai

instrumen pengaman (safeguarding) untuk memastikan tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat Kabupaten Nias Selatan.

5.1.1. Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan

Konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan serta sinkronisasinya dengan kebijakan pendanaan sangat penting untuk memastikan perencanaan yang berkualitas. Hal ini mencakup kesesuaian antara pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta optimalisasi ketersediaan dan pemanfaatan pendanaan. Perencanaan yang berkualitas menjadi kunci utama yang mampu menyesuaikan perubahan dinamika global dan nasional dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan serta memberikan arahan yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan, baik di tingkat pemerintah daerah, pelaku nonpemerintah, maupun dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah. Untuk menjamin konsistensi perencanaan dan pendanaan, diperlukan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas. Mekanisme ini berperan dalam menentukan prioritas pembangunan daerah hingga level proyek atau keluaran serta memastikan pelaksanaannya berjalan efektif. Penguatan proses pengambilan keputusan dilakukan dengan menekankan kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan. Dengan demikian, setiap kebijakan dan program pembangunan dapat dirumuskan secara lebih inklusif, terarah, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

5.1.1.1. Keterkaitan RPJMD dengan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Pusat

RPJMD memiliki posisi tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah dan menjadi pedoman bagi dokumen perencanaan turunannya. Dokumen perencanaan pembangunan daerah mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen-dokumen ini harus menjadi acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). RPJMD menekankan substansi berupa visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan pembangunan, serta indikator capaian tujuan pembangunan daerah. RKPD kemudian menjabarkan RPJMD ke dalam tujuan,

sasaran, serta program pembangunan tahunan. Seluruh dokumen perencanaan daerah harus selaras dengan perencanaan pembangunan nasional. RPJPD mengacu pada RPJPN, RPJMD berpedoman pada RPJMN, dan RKPD mengikuti arah RKP. Selain itu, rencana sektoral di tingkat daerah harus sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan pendek/tahunan. Keterkaitan antara dokumen-dokumen ini dapat diperlihatkan dalam gambar berikut.

Gambar 5.1
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

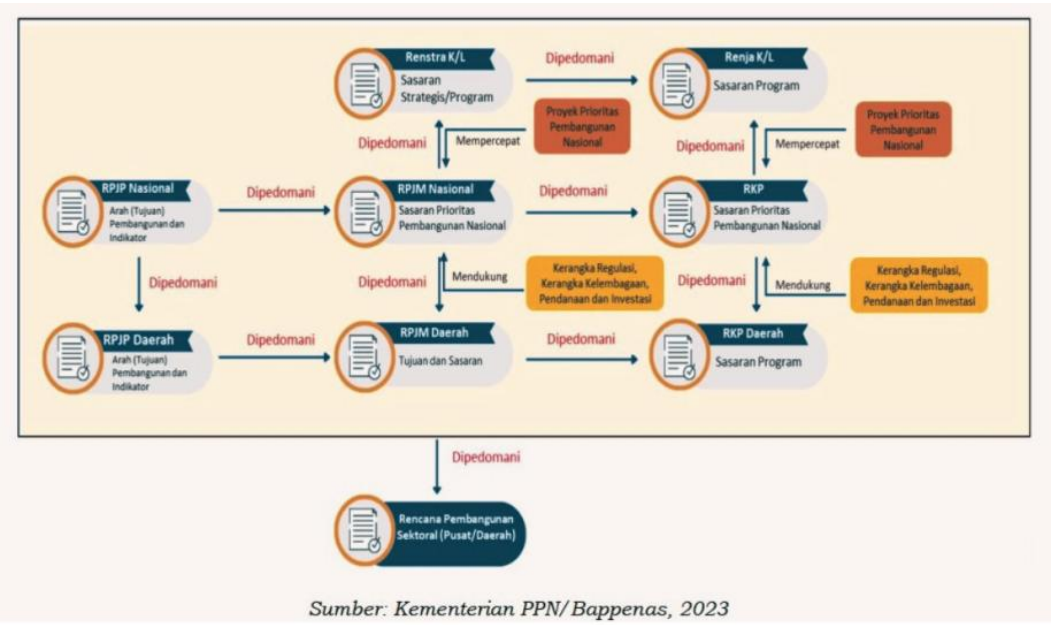

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Dalam rangka menyelaraskan RPJMD Kabupaten dengan dokumen perencanaan di tingkat pusat dan provinsi, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. RPJMD Kabupaten bersifat jangka menengah, sehingga memberikan arah pembangunan jangka menengah dan secara khusus memuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta arah kebijakan yang mendukung visi misi RPJMD Provinsi dan RPJMN serta sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045. RPJMD Kabupaten berfungsi sebagai rencana strategis lima tahunan di tingkat daerah.
2. Penyusunan RPJMD Kabupaten, termasuk penentuan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan indikator pembangunan, harus mengacu pada arah (tujuan) pembangunan dan indikator yang tercantum dalam RPJMD Provinsi dan RPJMN.

3. RPJMD Kabupaten harus berpedoman pada RPJMD Provinsi, khususnya dalam menetapkan sasaran dan indikator prioritas pembangunan daerah. Selain itu, RPJMD Kabupaten menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten serta sasaran dan indikator strategis/program dalam Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat kabupaten.
4. Sasaran dan indikator strategis/program dalam Renstra OPD Kabupaten menjadi pedoman dalam penyusunan sasaran dan indikator program pada Rencana Kerja (Renja) OPD Kabupaten. Sementara itu, tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menetapkan sasaran program dalam RKPD Kabupaten.
5. Sasaran program dalam RKPD Kabupaten harus berpedoman pada RPJMD Kabupaten serta selaras dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN. Selain itu, RKPD Kabupaten menjadi acuan dalam penyusunan sasaran dan indikator program dalam Renja OPD Kabupaten. Indikator prioritas pembangunan daerah diimplementasikan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD Kabupaten, yang selanjutnya digunakan dalam penilaian akuntabilitas kinerja OPD.

Pencapaian sasaran pembangunan daerah harus didukung dengan kebijakan kelembagaan, regulasi, serta pendanaan dan investasi yang efektif. Untuk mempercepat pencapaian sasaran tersebut, perlu ditetapkan sasaran program dalam RPJMD Kabupaten dan RKPD Kabupaten. Sasaran program daerah ini harus dilengkapi dengan ukuran keberhasilan guna memastikan tercapainya tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi Kabupaten.

5.1.1.2. Skema Pendanaan dan Penganggaran

Pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD harus didukung oleh sinkronisasi perencanaan dan pendanaan pembangunan yang optimal. Untuk menjamin keberhasilan sasaran pembangunan daerah, diperlukan strategi optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun nonpemerintah, secara inovatif, integratif, dan tepat sasaran. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan

pembangunan, pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas belanja serta memastikan pembiayaan prioritas pembangunan sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan. Selain melakukan efisiensi dan peningkatan efektivitas dalam pengelolaan belanja daerah, pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan berbagai sumber pendanaan pembangunan, termasuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), Belanja Kementerian/Lembaga (K/L), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pembiayaan Utang Daerah, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta sumber pendanaan di luar APBN/APBD. Pemanfaatan berbagai sumber pendanaan ini harus diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah secara berkelanjutan.

5.1.2. Kerangka Pengendalian

Dalam rangka menjamin pencapaian target pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025–2029, diperlukan kerangka pengendalian yang menyeluruh, terstruktur, dan berbasis sistem. Kerangka ini meliputi kegiatan pemantauan, evaluasi, serta pengelolaan risiko secara sistematis sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan.

Pengendalian ini dilaksanakan melalui serangkaian aktivitas pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko yang berkelanjutan dan partisipatif. Proses ini didukung oleh pemanfaatan sistem elektronik yang terintegrasi serta tata kelola data pembangunan yang efektif. Sistem elektronik ini memungkinkan seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah berjalan secara lebih transparan dan akuntabel, serta mendorong penerapan kebijakan berbasis bukti (evidence-based planning).

Dalam aspek manajemen risiko, pendekatan yang digunakan mengacu pada Kerangka Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023. MRPN merupakan kegiatan terkoordinasi yang bertujuan untuk mengarahkan, mengendalikan, dan mengelola risiko dalam pelaksanaan program, kegiatan, proyek prioritas pembangunan, serta risiko lintas sektor. Pendekatan ini mengintegrasikan Manajemen Risiko Organisasi (MRO) yang diterapkan di berbagai instansi pemerintah ke dalam suatu pengendalian risiko lintas sektor yang lebih komprehensif.

Penerapan MRPN bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah, serta memitigasi risiko yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan. Koordinasi yang kuat antar pemangku kepentingan, efisiensi pengelolaan risiko, dan sistem pelaporan yang terukur menjadi bagian penting dari pendekatan ini.

Gambar 5.2
Kerangka Kerja MRPN

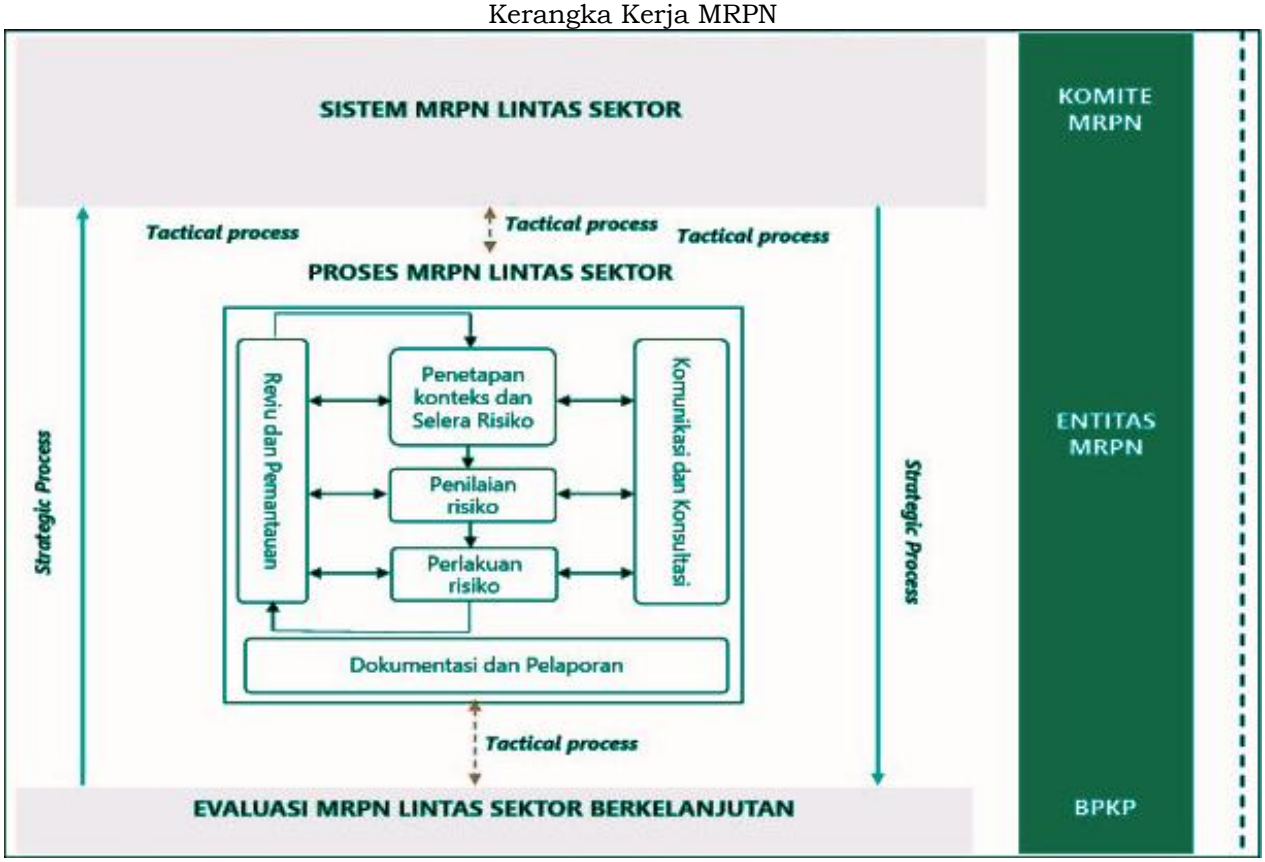

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas dan BPKP, 2024

RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025–2029 disusun secara berkesinambungan dengan perencanaan pembangunan jangka panjang dan menjaga sinkronisasi periodisasi maupun substansi dengan RPJPD Kabupaten Nias Selatan dan RPJMN. Konsistensi ini penting untuk memastikan pembangunan daerah sejalan dengan arah kebijakan nasional serta mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.

Dalam rangka mempercepat pembangunan di berbagai sektor, diperlukan integrasi manajemen risiko secara menyeluruh. Kerangka regulasi yang kuat menjadi landasan bagi penerapan manajemen risiko di seluruh tahapan RPJMD secara terukur dan akuntabel. Tahapan manajemen risiko tersebut diperlihatkan dalam ilustrasi berikut:

Gambar 5.3
Tahapan Manajemen Risiko untuk Mencapai Target RPJMD

Untuk memastikan keberhasilan implementasi RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029, diperlukan penerapan manajemen risiko yang sistematis dan berkelanjutan. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam manajemen risiko yang diterapkan dalam perencanaan pembangunan daerah:

1. Penentuan RPJMD 2025-2029 dan *Gap Analysis*

   Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, serta prioritas pembangunan jangka menengah yang akan dicapai pada tahun 2029 dilakukan melalui gap analysis terhadap target yang telah ditetapkan dalam RPJMD sebelumnya. *Gap analysis* bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara pencapaian yang diharapkan dengan realisasi kinerja pembangunan daerah, sehingga dapat ditentukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan efektivitas dan kualitas perencanaan pembangunan Kabupaten Nias Selatan.

2. *Risk Profile Analysis*

   Tahap ini melibatkan identifikasi dan analisis risiko yang dapat menghambat pencapaian target pembangunan daerah. Risiko yang diidentifikasi mencakup faktor internal maupun eksternal yang berpotensi menghambat implementasi RPJMD. Setelah risiko teridentifikasi, dilakukan assessment risiko, yang mencakup penilaian terhadap kemungkinan terjadinya risiko (*likelihood)* dan dampak yang ditimbulkan (*severity*). Hasil analisis ini menjadi dasar dalam menentukan tingkat urgensi risiko serta langkah-langkah mitigasi yang harus dilakukan.

3. Penyusunan Rencana Mitigasi (*Mitigation Plan Formulation*)

Berdasarkan hasil Risk Profile Analysis, disusun rencana mitigasi untuk mengatasi risiko yang telah teridentifikasi. Penyusunan rencana mitigasi ini dilakukan melalui koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemangku kepentingan terkait, baik di tingkat provinsi maupun nasional. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa strategi mitigasi yang disusun efektif, tepat sasaran, serta memiliki jadwal implementasi yang jelas guna mendukung keberhasilan RPJMD Kabupaten Nias Selatan.

4. Monitoring dan Pelaporan (*Monitoring & Reporting*)

   Untuk menjamin efektivitas implementasi RPJMD, dilakukan pemantauan dan pelaporan secara berkala terhadap pencapaian target pembangunan. Monitoring dilakukan dengan pendekatan internal dan eksternal, melibatkan perangkat daerah, lembaga pengawas, organisasi masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya. Tujuan dari monitoring dan pelaporan ini adalah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan RPJMD, serta memperoleh masukan guna penyempurnaan kebijakan pembangunan di Kabupaten Nias Selatan.

Identifikasi Risiko terhadap Misi, Tujuan, Sasaran, dan Prioritas Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Misi 1: Membangun dan mengembangkan infrastruktur daerah yang terpadu dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat

   Pembangunan infrastruktur yang terpadu menjadi salah satu prioritas utama dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat. Namun, terdapat beberapa risiko yang dapat menghambat pencapaian misi ini, seperti keterbatasan anggaran dan investasi, keterlambatan penyelesaian proyek akibat kendala administrasi dan teknis, serta potensi kerusakan infrastruktur akibat bencana alam atau kurangnya pemeliharaan. Selain itu, ketidaksesuaian antara perencanaan dengan kebutuhan masyarakat juga menjadi tantangan yang perlu diantisipasi.

2. Misi 2: Membangun manusia yang berkualitas dan berkepribadian unggul melalui pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia siap kerja dan siap merintis usaha sendiri

   Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan merupakan langkah strategis dalam menciptakan tenaga kerja yang kompetitif dan

mandiri. Namun, masih terdapat berbagai risiko yang dapat menghambat pencapaian misi ini, seperti akses pendidikan yang terbatas di daerah terpencil, kualitas tenaga pendidik yang belum merata, serta kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai. Rendahnya minat dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan juga menjadi faktor yang perlu mendapatkan perhatian khusus.

3. Misi 3: Memastikan kemudahan akses kesehatan untuk rakyat guna menciptakan manusia yang sehat jasmani dan rohani

   Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas sangat penting untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Beberapa risiko yang dapat menghambat misi ini meliputi fasilitas layanan kesehatan yang belum merata, kekurangan tenaga medis di daerah terpencil, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat. Selain itu, keterbatasan anggaran dalam penyediaan sarana dan prasarana kesehatan juga menjadi tantangan yang harus diatasi.

4. Misi 4: Membangun ekonomi daerah yang berkeadilan, inklusif, inovatif, kreatif, dan mandiri berbasis potensi sumber daya lokal

   Perekonomian daerah yang berkeadilan dan berbasis potensi lokal menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, terdapat berbagai risiko yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, seperti ketergantungan pada sektor tertentu yang rentan terhadap fluktuasi pasar, kurangnya akses permodalan bagi pelaku usaha kecil dan menengah, serta rendahnya daya saing produk lokal. Selain itu, perubahan kebijakan yang tidak mendukung dapat menjadi hambatan bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi.

5. Misi 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan bebas dari korupsi dengan menjunjung tinggi penegakan hukum dan menjamin hak-hak masyarakat

   Tata kelola pemerintahan yang transparan dan berintegritas menjadi kunci utama dalam menciptakan pemerintahan yang baik. Namun, potensi penyalahgunaan kewenangan dan praktik korupsi masih menjadi ancaman yang perlu diwaspadai. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan, kurangnya transparansi dalam pengelolaan

anggaran daerah, serta keterbatasan kapasitas aparatur dalam menjalankan tata kelola yang baik juga menjadi tantangan yang harus diatasi.

6. Misi 6: Mewujudkan ketahanan sosial budaya yang berkeadaban dan pelestarian lingkungan hidup

   Ketahanan sosial budaya dan pelestarian lingkungan hidup merupakan aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan. Namun, globalisasi dan modernisasi dapat menyebabkan berkurangnya kearifan lokal serta kurangnya perhatian terhadap pelestarian budaya dan lingkungan. Selain itu, peningkatan konflik sosial akibat kesenjangan ekonomi dan sosial serta degradasi lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali menjadi risiko yang harus ditangani dengan serius.

Untuk menjamin konsistensi dan keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025–2029, telah disusun mekanisme pengendalian yang sistematis dan berkelanjutan. Pengendalian ini dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/Bapperida sebagai institusi utama dalam mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Mekanisme pengendalian pelaksanaan RPJMD dilaksanakan secara sistematis untuk memastikan konsistensi antara perencanaan dan implementasi. Tujuan pengendalian adalah memantau pelaksanaan program, mengevaluasi capaian indikator kinerja, serta melakukan koreksi dan perbaikan secara berkala. Dalam hal ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berperan sebagai koordinator pengendalian, dengan dukungan perangkat daerah terkait. Instrumen pengendalian yang digunakan meliputi: (1) penyusunan Rencana Aksi Tahunan (RAT) sebagai penjabaran operasional dari program dan kegiatan pembangunan setiap tahun; (2) pelaksanaan rapat pengendalian pembangunan secara berkala dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan sinergi dan keselarasan antar sektor; (3) pemanfaatan sistem informasi kinerja pembangunan berbasis elektronik, seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang mendukung pemantauan dan pelaporan secara real-time dan transparan; serta (4) pelaporan kinerja pembangunan secara rutin untuk mendokumentasikan capaian,

mengidentifikasi kendala, dan merumuskan langkah perbaikan secara komprehensif.

Selain mekanisme pengendalian, sistem evaluasi juga menjadi bagian integral dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan RPJMD. Mekanisme evaluasi dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu evaluasi tahunan, evaluasi tengah periode, dan evaluasi akhir periode. Evaluasi tahunan dilakukan setiap tahun dengan metode pengukuran kinerja program dan kegiatan serta penilaian capaian indikator pembangunan. Hasil evaluasi tahunan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun berikutnya. Evaluasi tengah periode dilaksanakan pada tahun ketiga masa perencanaan untuk mengidentifikasi kebutuhan penyesuaian strategis terhadap arah kebijakan dan program prioritas; hasilnya dapat menjadi dasar revisi RPJMD apabila diperlukan. Evaluasi akhir periode bertujuan untuk mengukur secara komprehensif pencapaian target RPJMD dengan metode evaluasi kinerja menyeluruh, serta menghasilkan laporan akhir masa jabatan kepala daerah yang sekaligus menjadi input awal dalam penyusunan RPJMD periode berikutnya.

Dengan penerapan kerangka pengendalian dan evaluasi yang adaptif, terstruktur, dan partisipatif, RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025–2029 diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif, akuntabel, serta mampu menghasilkan dampak pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

5.1.3. Sistem Insentif

Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan daerah sangat bergantung pada partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan, baik dari unsur pemerintah maupun nonpemerintah. Pelaku pembangunan terdiri atas pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga penelitian, akademisi, serta kelompok masyarakat lainnya yang berkontribusi dalam mendukung pembangunan daerah secara kolaboratif dan berkelanjutan. Untuk meningkatkan keterlibatan semua unsur, diperlukan sistem insentif yang efektif guna mendorong partisipasi secara luas dan aktif, sehingga dapat mempercepat pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah melalui penguatan tata kelola pemerintahan serta fasilitasi bagi sektor nonpemerintah.

Bagi pelaku pembangunan dari unsur pemerintah, insentif diberikan dengan mengintegrasikannya dalam sistem manajemen kinerja dan manajemen anggaran daerah. Evaluasi kinerja Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi dasar pemberian insentif, dengan indikator mencakup konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, keselarasan perencanaan dengan pendanaan, pencapaian indikator kerangka ekonomi makro pusat dan daerah, serta realisasi program prioritas yang sesuai dengan visi pembangunan Kabupaten Nias Selatan. Insentif bagi OPD dapat berupa penghargaan kinerja, tambahan anggaran untuk program yang berhasil, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan.

Sementara itu, bagi pelaku pembangunan dari unsur nonpemerintah, insentif diberikan dalam bentuk dukungan regulasi dan fasilitas kemudahan untuk meningkatkan peran serta mereka dalam pembangunan daerah. Insentif ini mencakup kebijakan yang mendukung investasi dan dunia usaha, seperti penyederhanaan perizinan, insentif pajak daerah, serta kemudahan akses permodalan bagi UMKM dan koperasi. Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong sektor penelitian dan inovasi melalui kemitraan dengan lembaga penelitian, akademisi, serta komunitas inovasi lokal guna mempercepat pembangunan berbasis riset dan teknologi. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan dilakukan dengan membuka ruang konsultasi publik, forum diskusi, serta penguatan peran organisasi masyarakat sipil dalam mengawal kebijakan pembangunan daerah. Dengan sistem insentif yang tepat, keterlibatan semua pihak dalam pembangunan Kabupaten Nias Selatan dapat lebih optimal, sehingga mendorong pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

5.1.4. Mekanisme Perubahan

Dokumen perencanaan harus fleksibel agar dapat menyesuaikan dengan faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan. Dalam kondisi keadaan kahar (force majeure), seperti perubahan geopolitik, geoekonomi, bencana alam, atau penyimpangan signifikan dalam pencapaian sasaran pembangunan, maka RPJMD dapat dimutakhirkan melalui RKPD. Pemutakhiran ini didasarkan pada evaluasi rencana pembangunan untuk menyesuaikan kebijakan dan strategi

pembangunan daerah. Untuk mendukung perencanaan yang lebih adaptif, transformasi digital diterapkan melalui sistem elektronik terpadu yang mengintegrasikan data dan informasi pembangunan pada seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Hal ini meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pembangunan, memungkinkan pemerintah daerah merespons perubahan dengan lebih cepat dan tepat. Selain itu, penerapan tata kelola data yang baik memastikan kebijakan yang diambil berbasis data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Dengan demikian, kebijakan pembangunan daerah dapat lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan, sesuai dengan visi pembangunan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029.

5.1.5. Komunikasi Publik

Komunikasi publik di Kabupaten Nias Selatan berperan penting dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, responsif, dan partisipatif. Melalui komunikasi yang efektif, kebijakan dan program pemerintah daerah dapat lebih mudah dipahami serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Prinsip utama komunikasi publik mencakup tata kelola yang objektif dan akuntabel, penyediaan informasi yang transparan dan mudah diakses, serta keterlibatan seluruh elemen masyarakat dengan metode komunikasi yang sesuai dengan kondisi lokal. Dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029, komunikasi publik berlandaskan prinsip “tidak ada yang tertinggal” (*no one left behind*) dan “partisipasi yang bermakna” (*meaningful participation*). Komunikasi ini melibatkan Pemerintah Kabupaten, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan masyarakat. Komunikasi dengan OPD dilakukan melalui Forum OPD, sebagai wadah koordinasi dan masukan terhadap prioritas pembangunan daerah. Sementara itu, komunikasi dengan masyarakat dilaksanakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di tingkat kecamatan dan kabupaten, guna memastikan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan. Komunikasi publik di Kabupaten Nias Selatan dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, aksesibilitas, dan kejelasan informasi. Dengan pendekatan ini, komunikasi publik diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah,

sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kabupaten Nias Selatan.

5.2. Pembiayaan Pembangunan

Upaya untuk mewujudkan visi Kabupaten Nias Selatan *"Mewujudkan Masyarakat Adil Makmur, Berdaya Saing, Inovatif, Berkelanjutan, dan Lestari Berkeadaban"* memerlukan kapasitas pembiayaan yang memadai. Peningkatan kapasitas pembiayaan dilakukan melalui pengembangan inovasi pembiayaan, baik dengan memperluas sumber pendanaan, menerapkan skema atau mekanisme pelaksanaan yang baru, maupun mengoptimalkan peran sektor keuangan.

Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dilakukan melalui perluasan sumber dan pengembangan inovasi skema pembiayaan yang mencakup: (i) penguatan perencanaan pembiayaan, termasuk penataan regulasi daerah, pembentukan kelembagaan daerah yang adaptif, pembentukan kelompok kerja (Pokja) kelembagaan daerah, pemanfaatan teknologi digital dalam proses bisnis, penguatan branding melalui pemasaran digital untuk mempromosikan pariwisata, serta pengembangan mekanisme pelaksanaan (*delivery mechanism*) guna memperoleh skema pembiayaan yang berdampak (*impact investment*); (ii) perluasan kerja sama bilateral, multilateral, dan kerja sama keuangan lainnya untuk mengembangkan sumber pembiayaan, terutama pembiayaan inovatif dengan syarat dan ketentuan yang paling menguntungkan, investasi infrastruktur pariwisata, serta kerja sama ekonomi lainnya; (iii) penguatan dan perluasan berbagai instrumen dalam kerangka kerja sama pemerintah dan badan usaha, khususnya pada aspek regulasi, tata kelola, dan kelembagaan menuju model *private financial initiative* yang mencakup sektor infrastruktur publik, utilitas, dan infrastruktur sosial; (iv) penerapan skema-skema pembiayaan yang mendukung pemberdayaan industri daerah, termasuk peningkatan peran UMKM lokal dalam ekonomi kreatif serta mendorong alih teknologi; dan (v) optimalisasi pemanfaatan aset melalui daur ulang aset (*asset recycling*), tukar guling aset (*asset offset*), hingga pemanfaatan peningkatan nilai aset yang dihasilkan dari investasi, aktivitas, dan kebijakan di suatu kawasan (*asset value capture*).

Sementara itu, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor nonpemerintah dilakukan melalui: (i) pemanfaatan instrumen pendanaan jangka menengah, seperti dana pensiun, asuransi, instrumen di pasar modal, dan dana abadi daerah; (ii) inovasi produk pembiayaan syariah berdasarkan prinsip sewa-menyewa, jual beli, dan bagi hasil; (iii) inovasi pembiayaan untuk merespons perubahan iklim, mencakup berbagai jenis pembiayaan hijau, biru, dan sirkular; (iv) produk pembiayaan berbasis transaksi, seperti bursa karbon, bursa plastik, atau bursa tematik lainnya; serta (v) penguatan bauran pendanaan (*blended financing*) dengan memanfaatkan dana katalitik seperti dana filantropi, dana sosial korporasi, serta dana keagamaan, termasuk jaminan, yang bertujuan mengurangi risiko finansial bagi partisipasi sektor nonpemerintah dalam pembangunan daerah.

Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dan nonpemerintah perlu diikuti dengan manajemen investasi yang berkualitas agar kapasitas pembiayaan yang tersedia dapat digunakan secara optimal. Beberapa langkah penguatan manajemen investasi publik mencakup: (i) penajaman identifikasi investasi publik dalam setiap periode jangka menengah; (ii) penyempurnaan proses penyiapan dan penilaian proyek investasi publik; (iii) penyelarasan prioritas investasi publik skala daerah; (iv) modernisasi pemantauan dan pengendalian pelaksanaan investasi publik; (v) pelibatan sektor swasta dan masyarakat dalam siklus investasi publik; (vi) penyempurnaan kerangka regulasi, tata kelembagaan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam manajemen investasi publik; dan (vii) penguatan transparansi dan akuntabilitas atas seluruh aspek investasi publik.

5.3. Kesimpulan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan strategis lima tahunan yang menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, indikator kinerja, program prioritas, serta kerangka pendanaan pembangunan guna menjawab berbagai tantangan, permasalahan, dan isu-isu strategis yang dihadapi Kabupaten Nias Selatan.

RPJMD ini menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang bersifat tahunan. RKPD selanjutnya menjadi rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun.

RPJMD ini menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang bersifat tahunan. RKPD selanjutnya menjadi rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun. Integrasi RPJMD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut, termasuk Renstra Perangkat Daerah, RKPD, KUA-PPAS, hingga mekanisme penilaian kinerja oleh Pemerintah Pusat, menegaskan kedudukan RPJMD sebagai dokumen induk perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan secara terarah, konsisten, dan akuntabel.

Lebih dari itu, RPJMD ini juga menjadi instrumen penting dalam penilaian kinerja Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat, melalui mekanisme seperti Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan penetapan Dana Insentif Daerah (DID). Oleh karena itu, RPJMD disusun dengan menjunjung prinsip akuntabilitas, transparansi, dan berbasis data yang terukur, agar mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat serta tuntutan pembangunan secara berkelanjutan.

RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025–2029 memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi pembangunan daerah, yaitu: “Mewujudkan Masyarakat Adil Makmur, Berdaya Saing, Inovatif, Berkelanjutan, dan Lestari Berkeadaban.” Keberhasilan pencapaian visi dan misi tersebut memerlukan dukungan dari berbagai faktor penting, antara lain:

1. Komitmen kepemimpinan daerah yang kuat, demokratis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat;

2. Konsistensi kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan sesuai dengan arah visi dan misi;
3. Keberpihakan pembangunan terhadap peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat;
4. Peran aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan organisasi sosial;
5. Upaya menjaga keseimbangan pembangunan dan kesinambungan perencanaan yang selaras dan berkelanjutan.

Dukungan, tanggung jawab bersama, semangat gotong royong, serta partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat sangat diharapkan dalam mewujudkan Kabupaten Nias Selatan yang lebih adil, makmur, berdaya saing, dan berkelanjutan. Keberhasilan pembangunan ini juga diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung pencapaian visi pembangunan nasional, yaitu: “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045.”

Bupati Nias Selatan,

ttd

SOKHIATULO LAIA